

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950

www.kemnaker.go.id

persuratan@kemnaker.go.id

☎ 1500630

Nomor : B-1/477/KU.08.03/V/2026

8 Mei 2026

Sifat : Segera

Lampiran : Satu buku

Hal : Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan
Tahun 2025 *Audited*

Yth.

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
u.p. Auditor Keuangan Negara III
- di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 *Audited*.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Inspektur Jenderal.

LAPORAN KEUANGAN

Kementerian Ketenagakerjaan

Tahun Anggaran

2025

AUDITED

Jl. Gatot Subroto Kav. 51,
Jakarta Selatan



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan khususnya dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Ketenagakerjaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	xii
Pernyataan Telah Direviu	1
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Laporan Realisasi Anggaran	4
Neraca	5
Laporan Operasional	6
Laporan Perubahan Ekuitas	7
Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	122
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	255
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	271
F. Pengungkapan Penting Lainnya	281

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	2
Tabel 3	Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	2
Tabel 4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	3
Tabel 5	Program Kementerian Ketenagakerjaan	13
Tabel 6	Jumlah Satuan Kerja berdasarkan Jenis Kewenangan	16
Tabel 7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	24
Tabel 8	Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 9	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	27
Tabel 10	Perubahan Anggaran Menurut Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja	29
Tabel 11	Perubahan Anggaran Menurut Program	30
Tabel 12	Perubahan Anggaran Menurut Unit Eselon I	30
Tabel 13	Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Menurut Eselon I per 31 Desember 2025	31
Tabel 14	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Menurut Akun per 31 Desember 2025	31
Tabel 15	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	31
Tabel 16	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32
Tabel 17	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Satker Sekretariat Jenderal,	32
Tabel 18	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pada Satker Ditjen Binapenta & PKK	33
Tabel 19	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pada Satker Balai K3 Medan	33
Tabel 20	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pada Satker BBPVP Serang	34
Tabel 21	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pada Satker BBPVP Bandung	34
Tabel 22	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	35
Tabel 23	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan	35
Tabel 24	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pada Satker Balai K3 Samarinda	36
Tabel 25	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pada Satker Ditjen Binwasnaker & K3	36
Tabel 26	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pada Satker BPVP Belitung	36
Tabel 27	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pada Satker BBPVP Serang	37
Tabel 28	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	37
Tabel 29	Pendapatan Sewa Aula gedung PPSDM Pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan	38
Tabel 30	Pendapatan Sewa Rumah Dinas Pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan	38
Tabel 31	Pendapatan Pemanfaatan Gedung Auditorium pada Satker BPVP Sidoarjo	38
Tabel 32	Pendapatan Sewa Gedung Serbaguna, Sewa Asrama dan Sewa Ruang Kelas pada Satker BPVP Banyuwangi	39
Tabel 33	Pendapatan Sewa Gedung untuk Kantin, Sewa Asrama dan Aula pada Satker BBPVP Serang	39
Tabel 34	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	40

Tabel 35	Pendapatan Perpanjangan sewa ruangan/bangunan untuk Kantor Kas Bank BRI pada Satker Sekretariat BNSP	40
Tabel 36	Pendapatan Sewa Kantin pada Satker BBPVP Bandung	40
Tabel 37	Pendapatan Sewa Ruangan atau Aula pada Satker BPVP Sorong	41
Tabel 38	Pendapatan Sewa Studio Catwalk pada Satker BBPVP Semarang	41
Tabel 39	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin pada Satker BPVP Sorong	42
Tabel 40	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	43
Tabel 41	Pendapatan Sewa Kamar pada Wisma Ciloto pada Satker Sekretariat Jenderal	43
Tabel 42	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker Sekretariat Jenderal	43
Tabel 43	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan	44
Tabel 44	Pendapatan Sewa Ruang Rapat dan Ruang Kelas pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan	44
Tabel 45	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPKK Bandung Barat	45
Tabel 46	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPKK Bekasi	45
Tabel 47	Pendapatan Sewa Ruang Kelas pada Satker Balai K3 Jakarta	45
Tabel 48	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi pada Satker BPVP Surakarta	46
Tabel 49	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Sidoarjo	46
Tabel 50	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Banda Aceh	46
Tabel 51	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Padang	47
Tabel 52	Pendapatan Sewa Asrama, Workshop, Aula dan Ruang Kelas pada Satker BPVP Padang	47
Tabel 53	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Kendari	47
Tabel 54	Pendapatan Sewa Asrama dan Ruang Kelas pada Satker BPVP Kendari	48
Tabel 55	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Ambon	48
Tabel 56	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BPVP Ambon	48
Tabel 57	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BBPVP Serang	49
Tabel 58	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker Ditjen Binalavotas	49
Tabel 59	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPVP Medan	49
Tabel 60	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BBPVP Medan	50
Tabel 61	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Samarinda	50
Tabel 62	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPVP Bandung	51
Tabel 63	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BBPVP Bandung	51
Tabel 64	Pendapatan Sewa Auditorium, Ruang Kelas dan Sewa Asrama pada Satker BBPVP Bekasi	52
Tabel 65	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Sorong	52
Tabel 66	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Ternate	53
Tabel 67	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Semarang	53
Tabel 68	Pendapatan Sewa Rumah Kelas dan Asrama pada Satker BPVP Semarang	53
Tabel 69	Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPVP Makassar	54
Tabel 70	Pendapatan Sewa Asrama, Workshop dan Aula pada Satker BPVP Makassar	54
Tabel 71	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	54
Tabel 72	Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	55

Tabel 73	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	56
Tabel 74	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada Satker Balai K3 Makassar	57
Tabel 75	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada Satker Balai K3 Jakarta	57
Tabel 76	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BPVP Bandung Barat	57
Tabel 77	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BPVP Surakarta	58
Tabel 78	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada Satker BPVP Banda Aceh	58
Tabel 79	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BPVP Padang	59
Tabel 80	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BPVP Samarinda	59
Tabel 81	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BBPVP Bandung	59
Tabel 82	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BBPVP Bekasi	60
Tabel 83	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BPVP Sorong	60
Tabel 84	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BPVP Ternate	60
Tabel 85	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pada Satker BBPVP Makassar	61
Tabel 86	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	61
Tabel 87	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	61
Tabel 88	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Satker Balai K3 Bandung	62
Tabel 89	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Satker Ditjen Binalavotas	62
Tabel 90	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62
Tabel 91	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	64
Tabel 92	Pendapatan Lain-Lain	68
Tabel 93	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	69
Tabel 94	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	70
Tabel 95	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	71
Tabel 96	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	71
Tabel 97	Pendapatan setoran dari PT Taspen pada Satker Ditjen Binapenta dan PKK	72

Tabel 98	Pendapatan setoran dari PT Taspen pada Satker BBPVP Bandung	72
Tabel 99	Pendapatan Anggaran Lain- Lain	72
Tabel 100	Perbandingan Realisasi Pendapatan (Netto) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	73
Tabel 101	Perbandingan Realisasi Pendapatan per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	74
Tabel 102	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025	74
Tabel 103	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	74
Tabel 104	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana per 31 Desember 2025	75
Tabel 105	Perbandingan Realisasi Belanja Netto Menurut Sumber Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	75
Tabel 106	Ikhtisar Laporan Keuangan PHLN	76
Tabel 107	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja per 31 Desember 2025	77
Tabel 108	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	77
Tabel 109	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	77
Tabel 110	Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	78
Tabel 111	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	78
Tabel 112	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025	79
Tabel 113	Rincian Realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	79
Tabel 114	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	81
Tabel 115	Program Bantuan untuk Masyarakat pada Ditjen Binapenta dan PKK	81
Tabel 116	Program Bantuan untuk Masyarakat pada Satker PHI & JSK	85
Tabel 117	Penyaluran Program BSU Tahun 2025	87
Tabel 118	Pengembalian ke negara atas gagal salur BSU 2025	87
Tabel 119	Akun 117124 (Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat)	90
Tabel 120	Sisa Nilai RPATA pada Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	90
Tabel 121	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025	92
Tabel 122	Rincian Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	92
Tabel 123	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	92
Tabel 124	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025	93

Tabel 125	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	93
Tabel 126	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	93
Tabel 127	Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	94
Tabel 128	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	94
Tabel 129	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	95
Tabel 130	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	95
Tabel 131	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	95
Tabel 132	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	96
Tabel 133	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	96
Tabel 134	Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025	97
Tabel 135	Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya per Unit Eselon I per 31 Desember 2025	97
Tabel 136	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	97
Tabel 137	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	98
Tabel 138	Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	98
Tabel 139	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	99
Tabel 140	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	99
Tabel 141	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Pada Ditjen Binalavotas	100
Tabel 142	Setoran atas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada BPVP Bandung Barat 31 Desember 2024	102
Tabel 143	Setoran atas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada BPVP Ternate 31 Desember 2024	103
Tabel 144	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	103
Tabel 145	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) Menurut Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	103
Tabel 146	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pada Sekretariat Jenderal	104
Tabel 147	Rincian Piutang Lainnya Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	105

Tabel 148	Mutasi Piutang Lainnya Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025	105
Tabel 149	Setoran atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Bulan Desember TA 2024	106
Tabel 150	Setoran atas Kelebihan Pembayaran Daftar Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas TAYL pada Sekretariat Jenderal	106
Tabel 151	Setoran atas Hasil Audit Kepatuhan Program Dkungan Manajemen Biro Umum TA 2024	107
Tabel 152	Setoran atas Pengembalian Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PPNPN pada Biro Kerja Sama	107
Tabel 153	Setoran Pengembalian atas Temuan Inspektorat Jenderal Pada PPSDM Ketenagakerjaan TA 2025	107
Tabel 154	Setoran Atas Piutang Lainnya Pada PPSDM Ketenagakerjaan Per 31 Desember 2024	108
Tabel 155	Mutasi Piutang Lainnya Ditjen Binapenta & PKK	108
Tabel 156	Piutang Lainnya Pada BBPKK Bandung Barat	109
Tabel 157	Setoran Ke Kas Negara Piutang Lainnya BPKK Bandung Barat Tahun 2024	109
Tabel 158	Mutasi Piutang Lainnya Direktorat Bina PKK 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	110
Tabel 159	Setoran atas Piutang Lainnya Akibat Kelebihan Pembayaran atas 6 (enam) pekerjaan pemeliharaan bangunan Tahun 2025 pada BPKK Kendari	116
Tabel 160	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada BPKK Kendari	117
Tabel 161	Mutasi Piutang Lainnya Ditjen PHI dan Jamsos	117
Tabel 162	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 pada Ditjen PHI dan Jamsos	118
Tabel 163	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Honorarium pada Diten PHI dan JSK Tahun 2025	118
Tabel 164	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	119
Tabel 165	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	119
Tabel 166	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	120

Tabel 167	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Bahan Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	120
Tabel 168	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Bahan dan Honor Output Kegiatan Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	121
Tabel 169	Setoran Piutang Lainnya atas Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	121
Tabel 170	Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos	122
Tabel 171	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Ditjen PHI dan Jamsos Tahun 2020	125
Tabel 172	Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Bulan Desember 2025 Pada Ditjen Blnwasnaker dan K3	125
Tabel 173	Mutasi Piutang Lainnya Barenbang	125
Tabel 174	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas atas Daftar Pengeluaran Riil Barenbang Ketenagakerjaan Berdasarkan Hasil Verifikasi Itjen Itjen R-6/04/PW.06/IX/2024	126
Tabel 175	Pengembalian Belanja Paket Pelatihan atas Hasil Verifikasi Itjen Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 8 Pada Barenbang	126
Tabel 176	Pengembalian Belanja Konsumsi Rapat Barenbang Ketenagakerjaan atas Hasil Verifikasi Itjen R-6/75/PW.10.00/XII/2025	127
Tabel 177	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Barenbang Ketenagakerjaan atas Hasil Verifikasi Itjen No:6/75/PW.10.00/XII/2025	127
Tabel 178	Pengembalian TLHA Itjen atas Kelebihan Pembayaran TUKIN 2024 di Barenbang	128
Tabel 179	Pengembalian Hasil Verifikasi ITJEN atas Tindak lanjut BPK Yang di Setor Ke Kas Negara di Barenbang	128
Tabel 180	Pengembalian TLHA Itjen Pada Setbarenbang Yang di Setor Ke Kas Negara di Barenbang	129
Tabel 181	Pengembaliasn atas TLJP BPK Tahun 2021 Yang di Setor Ke Kas Negara di Barenbang	129
Tabel 182	Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Binalavotas	130
Tabel 183	Pengembalian Hasil Kelebihan Bayar Belanja Pelatihan Pada BPVP Sidoarjo	130
Tabel 184	Penyetoran ke Kas Negara Bantuan Program LHP BPK RI 2023	131
Tabel 185	Penyetoran ke Kas Negara Pada BPVP Banda Aceh	131

Tabel 186	Mutasi Piutang Lainnya pada BPVP Padang	132
Tabel 187	Penyetoran ke Kas Negara Pada BPVP Bantaeng	132
Tabel 188	Penyetoran ke Kas Negara Pada BPVP Kendari	133
Tabel 189	Mutasi Piutang Lainnya (Pengembalian Kegiatan Pelatihan) Pada Satker BPVP Serang	133
Tabel 190	Mutasi Piutang Lainnya (Pengembalian Belanja Modal Renovasi dan Belanja Pemeliharaan) Pada Satker BPVP Serang	134
Tabel 191	Mutasi Piutang Lainnya (Pengembalian Belanja Pegawai) Pada Satker BPVP Serang	134
Tabel 192	Mutasi Kurang Piutang Lainnya (Temuan Audit Kinerja) Pada Satker BPVP Samarinda	135
Tabel 193	Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Bina Lemlatvok	136
Tabel 194	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	138
Tabel 195	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	139
Tabel 196	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Pada Ditjen Binalavotas	139
Tabel 197	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	140
Tabel 198	Rincian Persediaan Menurut Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	140
Tabel 199	Rincian Persediaan Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	140
Tabel 200	Barang Konsumsi Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	141
Tabel 201	Barang Konsumsi pada Sekretariat Jenderal	141
Tabel 202	Barang Konsumsi pada Ditjen Binapenta dan PKK	141
Tabel 203	Barang Konsumsi pada Ditjen Binwasnaker dan K3	142
Tabel 204	Barang Konsumsi pada Ditjen Binalavotas	143
Tabel 205	Bahan Untuk Pemeliharaan Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	144

Tabel 206	Barang Untuk Pemeliharaan Pada Ditjen Binalavotas	144
Tabel 207	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	145
Tabel 208	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	145
Tabel 209	Bahan Baku Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	146
Tabel 210	Bahan Baku Pada Ditjen Binalavotas	146
Tabel 211	Persediaan Lainnya Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	147
Tabel 212	Persediaan Lainnya Pada Ditjen Binalavotas	147
Tabel 213	Aset Tetap Menurut Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	148
Tabel 214	Rincian Tanah Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	148
Tabel 215	Mutasi Aset Tetap - Tanah	149
Tabel 216	Mutasi Tambah (Koreksi Saldo Awal) pada Mutasi Aset Tetap-Tanah	149
Tabel 217	Mutasi Aset Tetap - Tanah pada Reklasifikasi Masuk	149
Tabel 218	Mutasi Aset Tetap - Tanah pada Reklasifikasi Masuk	151
Tabel 219	Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	152
Tabel 220	Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	152
Tabel 221	Mutasi Tambah (Koreksi Saldo Awal) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	153
Tabel 222	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin Ditjen Binwasnaker dan K3	154
Tabel 223	Mutasi Tambah (Pembelian) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	154
Tabel 224	Pembelian Peralatan dan Mesin Pada Ditjen Binapenta dan PKK	155
Tabel 225	Pembelian Peralatan dan Mesin pada Satker Ditjen Binwasanker dan K3	157
Tabel 226	Pembelian Peralatan dan Mesin Pada Barenbang Ketenagakerjaan	157
Tabel 227	Transfer Masuk Peralatan dan Mesin	158

Tabel 228	Mutasi Tambah (Transfer masuk) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Satker Ditjen Binapenta dan PKK	159
Tabel 229	Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin	165
Tabel 230	Reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin pada Balai K3 Bandung	167
Tabel 231	Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin	169
Tabel 232	Mutasi Tambah (Reklasifikasi masuk Dari Persediaan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	173
Tabel 233	pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	177
Tabel 234	Mutasi Tambah (Koreksi Susulan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	178
Tabel 235	Mutasi Tambah (Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	179
Tabel 236	Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan Nilai Kurang) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	180
Tabel 237	Mutasi Kurang (Transfer Keluar) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	182
Tabel 238	Mutasi Kurang (Hibah Keluar pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	184
Tabel 239	Mutasi Kurang (Reklasifikasi Keluar) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	186
Tabel 240	Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	188
Tabel 241	Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Ditjen Binalavotas	196
Tabel 242	Mutasi Kurang (Reklasifikasi Keluar) ke Persediaan pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	197
Tabel 243	Mutasi Kurang (Penghentian Aset Dari Penggunaan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	198
Tabel 244	Mutasi Kurang (Penghentian Aset Dari Penggunaan) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	199
Tabel 245	Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin BBPKK Bandung	201
Tabel 246	Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Bandung	202
Tabel 247	Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Bandung	202

Tabel 248	Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Makassar	203
Tabel 249	Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai k3 Makassar	203
Tabel 250	Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Makassar	204
Tabel 251	Rincian Gedung dan Bangunan Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	206
Tabel 252	Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	207
Tabel 253	Koreksi Saldo Awal - Gedung dan Bangunan	207
Tabel 254	Pembelian - Gedung dan Bangunan	208
Tabel 255	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Gedung dan Bangunan	209
Tabel 256	Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan	210
Tabel 257	Reklasifikasi Masuk Gedung Bangunan Pada Politeknik Ketenagakerjaan	210
Tabel 258	Reklasifikasi Masuk Gedung Bangunan Pada BBPKK Bandung	211
Tabel 259	Perolehan lainnya Gedung dan Bangunan	215
Tabel 260	Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan	216
Tabel 261	Pengembangan Melalui KDP Gedung dan Bangunan	220
Tabel 262	Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan	221
Tabel 263	Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan Pada Politeknik Ketenagakerjaan	222
Tabel 264	Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan Pada Ditjen Binapenta dan PKK	222
Tabel 265	Penggunaan Kembali BMN Yang sudah Dihentikan Penggunaan Aktif Gedung dan Bangunan	223
Tabel 266	Koreksi Pencatatan Nilai berkurang Gedung dan Bangunan	224
Tabel 267	Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan	227
Tabel 268	Koreksi Keluar Gedung Bangunan Pada Politeknik Ketenagakerjaan	227
Tabel 269	Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan	235

Tabel 270	Koreksi Pencatatan Gedung Bangunan Pada Politeknik Ketenagakerjaan	236
Tabel 271	Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan pada BBPKK Bandung Barat	236
Tabel 272	Penghentian Aset Dari Penggunaan Gedung dan Bangunan	238
Tabel 273	Jalan Irigasi Jaringan Menurut Akun Per 31 Desember 2025	239
Tabel 274	Jalan Irigasi Jaringan Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	240
Tabel 275	Mutasi Jalan Irigasi dan jaringan	240
Tabel 276	Reklasifikasi Masuk Jalan Irigasi dan jaringan	241
Tabel 277	Perolehan Lainnya Jalan Irigasi dan jaringan	242
Tabel 278	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Irigasi dan jaringan	243
Tabel 279	Reklasifikasi Keluar Jalan Irigasi dan jaringan	244
Tabel 280	Koreksi Pencatatan Jalan Irigasi dan jaringan	246
Tabel 281	Penghentian Aset dari Penggunaan Jalan Irigasi dan jaringan	246
Tabel 282	Rincian Aset Tetap Lainnya Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	247
Tabel 283	Mutasi Aset Tetap Lainnya	247
Tabel 284	Pembelian Aset Tetap lainnya	248
Tabel 285	Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Tetap lainnya	249
Tabel 286	Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	251
Tabel 287	Mutasi KDP	251
Tabel 288	Koreksi Saldo Awal KDP	251
Tabel 289	Koreksi Saldo Awal KDP Pada Politeknik Ketenagakerjaan	251
Tabel 290	Perolehan/Penambahan KDP	252
Tabel 291	Pengembangan KDP	253

Tabel 292	Pengembangan KDP pada Balai K3 Bandung	253
Tabel 293	Pengembangan KDP pada BPVP Ambon	254
Tabel 294	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	254
Tabel 295	Pengembangan Melalui KDP	256
Tabel 296	Penghentian Sementara KDP	257
Tabel 297	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	258
Tabel 298	Rincian Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	258
Tabel 299	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	259
Tabel 300	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Pada Ditjen Binapenta dan PKK	259
Tabel 301	Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi a.n. Thamrin	261
Tabel 302	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR	262
Tabel 303	Pembayaran PT Multidata Rancana Prima Piutang jangka Panjang Lainnya (Tindak Lanjut Pada Tahun 2023)	265
Tabel 304	Pembayaran PT Multidata Rancana Prima Piutang jangka Panjang Lainnya (Tindak Lanjut Pada Tahun 2024)	266
Tabel 305	Pembayaran PT Multidata Rancana Prima Pada Piutang jangka Panjang Lainnya (Tindak Lanjut Pada Tahun 2025)	266
Tabel 306	Pembayaran PT Multidata Rancana Prima Pada Piutang jangka Panjang Lainnya (Per 31 Desember 2025)	266
Tabel 307	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	267
Tabel 308	Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	267
Tabel 309	Aset Tak Berwujud Menurut Akun	268
Tabel 310	Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	268
Tabel 311	Mutasi Aset Tak Berwujud	268
Tabel 312	Pembelian Aset Tak Berwujud	269

Tabel 313	Pengembangan Melalui KDP pada Barenbang Ketenagakerjaan	269
Tabel 314	Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud	270
Tabel 315	Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud Pada Barenbang	270
Tabel 316	Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Aset Tak Berwujud	271
Tabel 317	Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Pada Barenbang Ketenagakerjaan	271
Tabel 318	Perolehan Lainnya Pada Aset Tak Berwujud	272
Tabel 319	Reklasifikasi Keluar Aset Tak Berwujud Pada Barenbang	272
Tabel 320	Penghentian Aset Dari Penggunaan Aset Tak Berwujud	273
Tabel 321	Mutasi Tambah (Penghentian Aset Dari Penggunaan) Pada Barenbang	274
Tabel 322	Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Tahun 2024 yang Diselesaikan Tahun 2025	276
Tabel 323	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025	278
Tabel 324	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Pada Politeknik Ketenagakerjaan	278
Tabel 325	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025 Pada Sekretariat Jenderal	279
Tabel 326	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025 Pada Pusat Pasar Kerja	280
Tabel 327	Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Pada Inspektorat Jenderal	280
Tabel 328	Pembayaran kepada Pihak Ketiga Pada Inspektorat Jenderal	280
Tabel 329	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Pada BBPKK Bandung Barat	281
Tabel 330	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025 Pada Barenbang Ketenagakerjaan	283
Tabel 331	Rincian Aset Lain-lain Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	288
Tabel 332	Mutasi Aset Lain-Lain	288
Tabel 333	Transfer Masuk (Henti Guna) Aset Lain-Lain	289
Tabel 334	Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Lain-Lain	290

Tabel 335	Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Balai K3 Bandung	292
Tabel 336	Penghentian Aset dari Penggunaan Berdasarkan Suket Nomor 5/1/UM.03.00/III/2025 tanggal 26 Maret Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3	294
Tabel 337	Penghentian Aset dari Penggunaan Berdasarkan Suket Nomor 5/82/KU.07.04/IX/2025 tanggal 24 September 2025 Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3	294
Tabel 338	Penghentian Aset dari Penggunaan Berdasarkan Suket Nomor 5/88/KU.07.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3	294
Tabel 339	Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Balai Besar K3 Jakarta	296
Tabel 340	Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Barenbang Ketenagakerjaan	297
Tabel 341	Mutasi Tambah (Pencatatan Pembatalan) Barang Yang Mau dihapuskan Pada Mutasi Aset Lain-Lain	300
Tabel 342	Mutasi Kurang (Penghapusan Pada Mutasi Aset Lain-Lain	301
Tabel 343	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) Aset Lain-Lain	302
Tabel 344	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) Aset Lain-Lain	303
Tabel 345	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/406/UM.03.03/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 Pada Ditjen Binwasnaker dan K3	305
Tabel 346	Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif Aset Lain-Lain	306
Tabel 347	Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif pada Ditjen Binapenta dan PKK	306
Tabel 348	Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan Aset Lain-Lain	309
Tabel 349	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	314
Tabel 350	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	314
Tabel 351	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga menurut masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	315
Tabel 352	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Menurut Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	315

Tabel 353	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Menurut Eselon I	316
Tabel 354	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Sekretariat Jenderal	316
Tabel 355	Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Ditjen Binapenta dan PKK	317
Tabel 356	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Ditjen Binwasnaker dan K3	319
Tabel 357	Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Ditjen Binalavotas	322
Tabel 358	Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Menurut Eselon I	323
Tabel 359	Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Pada Sekretariat Jenderal	323
Tabel 360	Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Pada Ditjen Binwasnaker	324
Tabel 361	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet Pada Ditjen Binalavotas	325
Tabel 362	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Kekurangan Uang Saku Peserta Pemagangan Pada Ditjen Binalavogon	325
Tabel 363	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Menurut Eselon I	325
Tabel 364	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Pada Satker Sekretariat Jenderal	326
Tabel 365	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Pada Satker Pusat Pasar Kerja	327
Tabel 366	Utang Kepada Pihak Ketiga Pada Inspektorat Jenderal	327
Tabel 367	Utang Kepada Pihak Ketiga Pada Dit. Bna PKK	328
Tabel 368	Utang Kepada Pihak Ketiga Pada BBPKK Bandung Barat	328
Tabel 369	Tagihan BPJS Ketenagakerjaan atas iuran peserta JKP pada 2023	329
Tabel 370	Hasil Reviu BPKP atas Tagihan BPJS Ketenagakerjaan atas iuran peserta JKP pada Desember 2022 dan 2023	329
Tabel 371	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Pada Ditjen Binalavotas	332
Tabel 372	Pendapatan Diterima Dimuka Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	335
Tabel 373	Rincian Uang Muka KPPN per Eselon I 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024	338

Tabel 374	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	338
Tabel 375	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	338
Tabel 376	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	340
Tabel 377	Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024	340
Tabel 378	Rincian Pendapatan Kegiatan Operasional per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	341
Tabel 379	Rincian Pendapatan PNBPN Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	341
Tabel 380	Rincian Pendapatan PNBPN Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	342
Tabel 381	Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2025 Menurut LO dan LRA	342
Tabel 382	Rincian Beban Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	344
Tabel 383	Rincian Beban Operasional per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	345
Tabel 384	Rincian Beban Pegawai Menurut Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	345
Tabel 385	Rincian Beban Pegawai Menurut Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	346
Tabel 386	Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2025 Menurut LO dan LRA	346
Tabel 387	Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	355
Tabel 388	Rincian Beban Persediaan Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	355
Tabel 389	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	356
Tabel 390	Rincian Beban Barang dan Jasa Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	357
Tabel 391	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	364
Tabel 392	Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	365

Tabel 393	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	368
Tabel 394	Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	368
Tabel 395	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	370
Tabel 396	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	371
Tabel 397	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	373
Tabel 398	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	373
Tabel 399	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	374
Tabel 400	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Menurut Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	374
Tabel 401	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	375
Tabel 402	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	375
Tabel 403	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	376
Tabel 404	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	376
Tabel 405	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	376
Tabel 406	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	377
Tabel 407	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	377
Tabel 408	Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	378
Tabel 409	Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	378
Tabel 410	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	379

Tabel 411	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	379
Tabel 412	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	380
Tabel 413	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	380
Tabel 414	Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	381
Tabel 415	Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	381
Tabel 416	Rincian Ekuitas Awal per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	382
Tabel 417	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	382
Tabel 418	Rincian koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	383
Tabel 419	Koreksi Nilai Persediaan Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	383
Tabel 420	Koreksi atas Reklasifikasi Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	384
Tabel 421	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	389
Tabel 422	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	389
Tabel 423	Koreksi Lain-Lain Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	394
Tabel 424	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	402
Tabel 425	Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	402
Tabel 426	Diterima dari Entitas Lain Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	403
Tabel 427	Ditagihkan ke Entitas Lain Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	403
Tabel 428	Transfer Keluar dan Transfer Masuk Menurut Unit Eselon I	403
Tabel 429	Transfer Keluar dan Transfer Masuk Menurut Satker	404

Tabel 430	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL Menurut Unit Eselon I	405
Tabel 431	Rincian Nilai Ekuitas per Eselon I 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	406
Tabel 432	Aset Tanah dan Gedung Bangunan yang digunakan sementara oleh BP2MI	422
Tabel 433	Rincian saldo BMN KIB per 31 Desember 2025	444
Tabel 434	Rincian BMN KIB berdasarkan kuantitas - Unit Eselon I per 31 Desember 2025	444
Tabel 435	Rincian BMN KIB berdasarkan Nilai Perolehan - Unit Eselon I per 31 Desember 2025	444
Tabel 436	Rekap Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) KIB Kementerian Ketenagakerjaan	445
Tabel 437	Sandingan Data Kondisi Aset Sebelum dan Sesudah Inventarisasi	445
Tabel 438	Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan	446
Tabel 439	Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Berlebih	446
Tabel 440	Daftar Barang Hasil Inventarisasi Salah Kodefikasi	446
Tabel 441	BMN Sengketa KL	447
Tabel 442	Penggunaan Sementara dan Penggunaan Bersama BMN untuk Sekolah Rakyat	456
Tabel 443	Pembebanan Biaya Pemeliharaan Penggunaan Sementara dan Penggunaan Bersama BMN Sekolah Rakyat	456
Tabel 444	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	457
Tabel 445	Perbandingan Saldo Belanja Dibayar DiMuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	457
Tabel 446	Pengembalian Uji Petik Kegiatan TKML Tahun 2022	459
Tabel 447	Hasil Verifikasi Itjen atas Nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka	460
Tabel 448	Hasil Verifikasi Itjen atas Nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka Pada Direktorat Binapenta dan PKK	464
Tabel 449	Pengembalian Bantuan TKM Pemula Tahun 2024	464
Tabel 450	Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2022 (Uji Petik BPK)	465

Tabel 451	Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2022 (Itjen)	466
Tabel 452	Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2023 (Itjen)	467
Tabel 453	Bantuan TKM Pemula Tahun 2023	467
Tabel 454	Bantuan Pemerintah TKM Pemula Tahun 2024	470
Tabel 455	Setoran Pengembalian Yayasan Miftahul Hasanah Al Musri	472
Tabel 456	Mutasi Progress Bantuan pembangunan BLKK Ditjen Binalavotas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	472



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026



Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan *Audited* Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Ketenagakerjaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 7 Mei 2026
Inspektur Jenderal



Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.236.628.989.173 atau 144,80% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.544.668.202.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.606.912.684.453 atau 82,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.262.609.941.000. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp666.681.923.410 atau 98,43% dari anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp11.892.493.211.117 atau 82,23% dari anggaran, realisasi belanja modal sebesar Rp47.737.549.926 atau 38,69% dari anggaran.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,544,668,202,000	2,236,628,989,173	144.80	1,411,469,409,000	2,257,426,143,716	159.93
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	1,544,668,202,000	2,236,628,989,173	144.80	1,411,469,409,000	2,257,426,143,716	159.93
Belanja Negara						
Belanja Pegawai	677,285,322,000.	666,681,923,410	98.43	521,260,641,000.	502,488,108,498	96.40
Belanja Barang	14,461,955,372,000.	11,892,493,211,117	82.23	5,020,565,197,000.	4,435,162,046,158	88.34
Belanja Modal	123,369,247,000.	47,737,549,926	38.69	602,520,399,000.	562,786,810,387	93.41
Jumlah Belanja Negara	15,262,609,941,000	12,606,912,684,453	82.60	6,144,346,237,000	5,500,436,965,043	89.52

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.743.882.609.269 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp670.741.692.731; Aset Tetap (netto) sebesar Rp11.810.263.086.567; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp680.646.667; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp262.197.183.304.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.333.024.695.565 dan Rp11.410.857.913.704.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	670.741.692.731	829.956.654.974	(159.214.962.243)	(19,18)
Aset Tetap	11.810.263.086.567	12.219.100.490.118	(408.837.403.551)	(3,35)
Piutang Jangka Panjang	680.646.667	739.166.667	(58.520.000)	(7,92)
Aset Lainnya	262.197.183.304	1.199.507.493.414	(937.310.310.110)	(78,14)
Jumlah Aset	12.743.882.609.269	14.249.303.805.173	(1.505.421.195.904)	(10,56)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.333.024.695.556	2.074.259.186.302	(741.234.490.746)	(35,73)
Jumlah Kewajiban	1.333.024.695.556	2.074.259.186.302	(741.234.490.746)	(35,73)
Ekuitas				
Ekuitas	11.410.857.913.713	12.175.044.618.871	(764.186.705.158)	(6,28)
Jumlah Ekuitas	11.410.857.913.713	12.175.044.618.871	(764.186.705.158)	(6,28)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.743.882.609.269	14.249.303.805.173	(1.505.421.195.904)	(10,56)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.220.904.684.019 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.201.595.025.205 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.980.690.341.186). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.806.361.500 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp10.974.883.979.686).

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal - LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	2.220.904.684.019	2.231.019.645.725	(10.114.961.706)	(0,45)
Beban Operasional	13.201.595.025.205	5.225.583.490.642	7.976.011.534.563	152,63
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan	(10.980.690.341.186)	(2.994.563.844.917)	(7.986.126.496.269)	266,69
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(51.083.798.901)	(401.506.850)	(50.682.292.051)	12.623,02
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56.890.160.401	19.541.542.127	37.348.618.274	191,12
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.806.361.500	19.140.035.277	(13.333.673.777)	(69,66)
POS LUAR BIASA				
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-	-	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)	(7.999.460.170.046)	268,85

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp12.175.044.618.871, ditambah Defisit-LO sebesar (Rp10.974.883.979.686) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar (Rp163.440.011.149) dan transaksi antar entitas sebesar Rp10.374.137.285.677 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp11.410.857.913.713.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan / Penurunan	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Ekuitas Awal	12.175.044.618.871	13.144.914.312.894	(969.869.694.023)	(7,38)
Surplus/Defisit - LO	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)	(7.999.460.170.046)	268,85
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	(163.440.011.149)	(1.250.964.807.628)	1.087.524.796.479	(86,93)
Koreksi Nilai Persediaan	(90.030)	100.000	(190.030)	(190,03)
Koreksi atas Reklasifikasi	658.557.883	1.140.776.870	(482.218.987)	(42,27)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(28.339.185.510)	(3.881.982.139)	(24.457.203.371)	630,02
Koreksi Lain-lain	(135.759.293.492)	(1.248.223.702.359)	1.112.464.408.867	(89,12)
Transaksi antar entitas	10.374.137.285.677	3.256.518.923.245	7.117.618.362.432	218,57
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(764.186.705.158)	(969.869.694.023)	205.682.988.865	(21,21)
Ekuitas Akhir	11.410.857.913.713	12.175.044.618.871	(764.186.705.158)	(6,28)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2025 (Rp)				DESEMBER 2024 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.544.668.202.000	2.236.628.989.173	691.960.787.173	144,80	2.257.426.143.716
JUM LAH PENDAPATAN		1.544.668.202.000	2.236.628.989.173	691.960.787.173	144,80	2.257.426.143.716
BELANJA	B.2.					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.2.3.1	677.285.322.000	666.681.923.410	(10.603.398.590)	98,43	502.488.108.498
Belanja Barang	B.2.3.2	14.461.955.372.000	11.892.493.211.117	(2.569.462.160.883)	82,23	4.435.162.046.158
Belanja Modal	B.2.3.3	123.369.247.000	47.737.549.926	(75.631.697.074)	38,69	562.786.810.387
JUM LAH BELANJA		15.262.609.941.000	12.606.912.684.453	(2.655.697.256.547)	82,60	5.500.436.965.043

Jakarta, 8 Mei 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024(Rp)
ASET	C		
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	263.374.984
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	41.168.638	22.988.940
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.3	-	107.461.663.718
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.4	23.134.170	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	623.783.157.587	627.740.714.006
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(3.118.899.144)	(3.138.878.710)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		<i>620.664.258.443</i>	<i>624.601.835.296</i>
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.7	-	62.642.021
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.1.8	-	(313.210)
<i>Bagian Lancar TP/TGR (Netto)</i>		<i>-</i>	<i>62.328.811</i>
Persediaan	C.1.9	50.013.131.480	97.544.463.225
Jumlah Aset Lancar		670.741.692.731	829.956.654.974
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	7.696.554.936.101	7.734.394.714.054
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.632.250.069.370	3.523.536.676.853
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.785.415.290.937	3.762.417.550.990
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	126.640.647.532	118.234.756.188
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	17.035.446.536	17.700.658.119
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	271.054.960.523	498.536.196.333
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(3.718.688.264.432)	(3.435.720.062.419)
JUMLAH ASET TETAP		11.810.263.086.567	12.219.100.490.118
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	1.471.897.354	1.467.897.354
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	(1.467.917.354)	(1.467.897.354)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)		3.980.000	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	1.353.333.334	1.478.333.334
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.4	(676.666.667)	(739.166.667)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (netto)	C.3.5	676.666.667	739.166.667
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		680.646.667	739.166.667
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	187.464.587.434	142.924.822.176
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	-	133.766.100
Dana yang dibatasi Penggunaannya	C.4.3	55.225.820.682	263.785.149.569
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	C.4.4	-	747.738.900.000
Aset Lain-Lain	C.4.5	557.304.096.246	573.767.425.299
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.6	(537.797.321.058)	(528.842.569.730)
JUMLAH ASET LAINNYA		262.197.183.304	1.199.507.493.414
JUMLAH ASET		12.743.882.609.269	14.249.303.805.173
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	1.330.279.151.979	2.072.858.512.346
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.2	2.734.659.421	1.125.326.400
Utang Muka dari KPPN	C.5.3	-	263.374.984
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	10.884.156	11.972.572
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.333.024.695.556	2.074.259.186.302
JUMLAH KEWAJIBAN		1.333.024.695.556	2.074.259.186.302
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6	11.410.857.913.713	12.175.044.618.871
JUMLAH EKUITAS		11.410.857.913.713	12.175.044.618.871
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.743.882.609.269	14.249.303.805.173

Jakarta, 8 Mei 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNPB Lainnya	D.1.1	2.220.904.684.019	2.231.019.645.725
JUMLAH PENDAPATAN		2.220.904.684.019	2.231.019.645.725
BEBAN			
Beban Pegawai	D.1.2.1	669.155.319.775	502.631.108.631
Beban Persediaan	D.1.2.2	20.451.724.896	30.513.751.717
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	666.351.563.054	1.200.815.833.268
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	94.527.621.631	153.282.248.756
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	253.429.615.110	1.066.681.444.727
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.1.2.6	11.107.338.789.065	1.865.039.362.424
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	390.398.497.588	406.765.986.904
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8	(58.105.914)	(146.245.785)
JUMLAH BEBAN		13.201.595.025.205	5.225.583.490.642
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.980.690.341.186)	(2.994.563.844.917)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	D.2.1	(51.083.798.901)	(401.506.850)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	2.413.291.622	4.374.848.973
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	53.497.090.523	4.776.355.823
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	56.890.160.401	19.541.542.127
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	57.090.484.655	19.909.428.930
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	200.324.254	367.886.803
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.806.361.500	19.140.035.277
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.3	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)

Jakarta, 8 Mei 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	E.1	12.175.044.618.871	13.144.914.312.894
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(163.440.011.149)	(1.250.964.807.628)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	(90.030)	100.000
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	658.557.883	1.140.776.870
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3	(28.339.185.510)	(3.881.982.139)
LAIN-LAIN	E.3.4	(135.759.293.492)	(1.248.223.702.359)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.374.137.285.677	3.256.518.923.245
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(764.186.705.158)	(969.869.694.023)
EKUITAS AKHIR	E.5	11.410.857.913.713	12.175.044.618.871

Jakarta, 8 Mei 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



[Handwritten signature in blue ink]

Prof. Yassierli, Ph.D.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. FUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
5. Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6.2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN);
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Ketenagakerjaan

Profil dan Kebijakan Teknis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kemnaker berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor Pusat Kemnaker berdomisili di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta.

Kemnaker menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di atas, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker terdiri dari 7 (tujuh) Unit Eselon I dan 4 (empat) Staf Ahli, sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK);
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan JSK);
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3);
6. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan);
7. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas);

8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan;
9. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
11. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik.

Visi Kemnaker

Visi Kementerian Ketenagakerjaan adalah “Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia emas 2045”.

Misi Kemnaker

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, yang terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 tercermin dari Visi Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini dan mendatang;
2. Mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang andal secara kolaboratif untuk perluasan dan pemerataan kesempatan kerja;

3. Meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, hubungan industrial yang harmonis dan penegakan norma ketenagakerjaan & K3 yang berkeadilan;
4. Memperkuat tata kelola birokrasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme; dan
5. Membangun ekosistem pengembangan diri pegawai yang inklusif dan kondusif.

Sasaran Strategis Kemnaker

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama (IKSS/IKU) ini didukung oleh sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:
 - a. laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja;
 - b. persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan;
 - d. jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial;
 - e. persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan;
 - f. peningkatan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3;
 - h. tingkat kepuasan stakeholder terhadap rencana tenaga kerja;
 - i. persentase lulusan politeknik ketenagakerjaan yang bekerja dan/atau magang; dan
 - j. jumlah penerima manfaat sistem informasi pasar kerja yang bekerja.
2. Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. IKSS/IKU ini didukung oleh sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:
 - a. indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital;
 - b. persentase kualitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal
 - c. persentase temuan hasil pemeriksaan menurun Kementerian Ketenagakerjaan;
 - d. tingkat tata kelola manajemen internal Inspektorat Jenderal;
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) general dan tematik;
 - f. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - g. tindak lanjut temuan BPK;

- h. Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
- i. nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- j. nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hasil Penjaminan Kualitas (PK); dan
- k. tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas, telah ditetapkan 3 (Tiga) program di lingkungan Kemnaker, yaitu sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Program Kementerian Ketenagakerjaan

NO.	PROGRAM
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
3.	Program Dukungan Manajemen

Sasaran dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Standar Kompetensi Dan Program Pelatihan Vokasi;
 - b. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas;
 - c. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan;
 - d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan;
 - f. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi;
2. Sasaran Program Pembinaan Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberdayaan tenaga kerja. Sasaran tersebut diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Tenaga Kerja Asing;
 - 4) Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja;
 - 5) Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Khusus;
 - 6) Pelayanan Pasar Kerja;
 - b. Meningkatnya pemenuhan hak pekerja/Buruh yang diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial;

- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 3) Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan;
 - 4) Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial;
 - c. Meningkatnya Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Pekerja yang diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ;
 - d. Meningkatnya Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Pekerja yang diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
 - 2) Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 3) Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4) Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan;
 - 5) Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 6) Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3
 - e. Meningkatnya Kualitas Data, Kebijakan, Rencana Tenaga Kerja, dan Penguatan Teknologi Informasi yang diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja;
 - 2) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan;
 - 3) Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan.
3. Sasaran Program Dukungan Manajemen terdiri dari:
- a. Meningkatnya pengawasan intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kementerian Ketenagakerjaan yang diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Inspektorat I;
 - 2) Pengawasan Inspektorat I;
 - 3) Pengawasan Inspektorat II;
 - 4) Pengawasan Inspektorat III;
 - 5) Pengawasan Inspektorat IV.
 - b. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Inspektorat Jenderal yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Terwujudnya penatakelolaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang baik, berintegritas, bersih dan bebas KKN yang diharapkan tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - 2) Pembentukan, Pembaruan, dan Penyelesaian Masalah Hukum;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - 4) Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
 - 5) Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan;
 - 6) Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum;
 - 7) Peningkatan Pengelolaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri;
 - 8) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan.
- d. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- e. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- f. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- g. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- h. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kemnaker. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan disusun berdasarkan data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) dan Aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI) untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) terdiri dari 9 (sembilan) modul, mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dihasilkan melalui Modul Pelaporan terdiri dari Modul *General Ledger* dan Pelaporan, Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Modul *General Ledger* dan Pelaporan menghasilkan komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap menghasilkan informasi persediaan, aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemnaker meliputi Unit Eselon I dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja (satker) aktif di lingkungan Kemnaker pada tahun 2025 adalah sebanyak 82 satker. Satker aktif meliputi seluruh satuan kerja yang terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi (DK), termasuk satker dekonsentrasi yang tidak memperoleh alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan pada tahun 2025.

Rincian jumlah satuan kerja pada masing-masing Unit Eselon I berdasarkan jenis kewenangan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah Satuan Kerja berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Kode Es1	Nama Eselon I	Jenis Kewenangan				Jumlah
			KP	KD	DK	TP	
1	02601	Sekretariat Jenderal	4	-	38	-	42
2	02602	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
3	02604	Ditjen Binapenta & PKK	2	3	-	-	5
4	02605	Ditjen PHI & JSK	1	-	-	-	1
5	02608	Ditjen Binwasnaker & K3	1	6	-	-	7
6	02611	Barenbang	1	-	-	-	1
7	02613	Ditjen Binalavotas	4	21	-	-	25
TOTAL			14	30	38	-	82

KP = Kantor Pusat; KD = Kantor Daerah; DK = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kemnaker menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemnaker. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemnaker adalah sebagai berikut:

A.5.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada Kementerian Ketenagakerjaan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA);
 - b. Jasa Pelatihan;
 - c. Jasa Penerbitan Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tugas dan Fungsi;
 - e. Denda Administratif.
5. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari jasa penerbitan surat keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp0 (nol rupiah).
 6. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke kas negara.
 7. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kemnaker adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa gedung dan bangunan diakui setelah manfaat sewa telah berjalan dan terjadi;
 - b. Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan diakui setelah laporan akhir dan surat tagihan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diterbitkan kepada rekanan/pelaksana pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja/perikatan;
 - c. Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) diakui pada saat realisasi kas masuk pada rekening bendahara penerimaan dan/atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) penyetoran ke Kas Negara;
 - d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa kompensasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing diakui pada saat Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) disetor ke Kas Negara;
 - e. Pendapatan PNBP berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana diakui pada saat jasa pengujian, jasa pemeriksaan, jasa pelatihan, atau jasa penggunaan sarana prasarana telah diberikan dan telah diverifikasi dalam suatu dokumen/kwitansi penagihan;
 - f. Pendapatan PNBP berupa Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan

Prasarana diakui pada saat jasa pendidikan dan pelatihan telah selesai diberikan.

3. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3. Belanja

Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
5. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. Beban

Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya beban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. Aset

Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
2. Aset disajikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.5.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar

1. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Kas terdiri atas:
 - a. Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
 - b. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.
4. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga satuan kerja.
5. Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - a. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara.
6. Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:
 - a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah

dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran dapat juga berupa bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

- b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan baik yang telah menjadi hak pemerintah maupun tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga.

Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga) diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dapat juga berupa utang pajak yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

- c. Kas Lainnya dari Hibah, dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat diakui sebagai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan atau Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. Nilai kas lainnya dari Hibah yang disajikan diperoleh dari saldo rekening penampungan hibah termasuk saldo yang terdapat pada rekening penyaluran hibah.
- d. Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Kementerian teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya.

7. Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

8. Kas disajikan di neraca menggunakan nilai nominal. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian.

9. Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
10. Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/ dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.
11. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
12. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
13. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
14. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
15. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.5.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap

1. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
5. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
6. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
7. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
8. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

9. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan cara mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
10. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6.2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat Aset Tetap dapat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.5.5.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

1. Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

6. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang setelah dikurangi nilai agunan atau nilai aset sita diatur sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8 Penggolongan Kualitas Piutang

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50 %
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	100 %

A.5.5.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.
2. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
3. Sesuatu diakui sebagai ATB diakui jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. ATB disajikan sebesar nilai neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.
5. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, amortisasi dilakukan terhadap ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:

- a. Perangkat lunak (*software*) komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*franchise*);
 - d. Hak Cipta (*copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
7. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
- a. ATB yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. ATB dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
8. Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.
9. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
10. Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.
11. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
12. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
13. Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
14. Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat ATB disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
08	01	01	01	001	Software Komputer	04
08	01	01	01	002	Lisensi	10
08	01	01	01	003	Franchise	05
08	01	01	01	004	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70
08	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
08	01	01	01	008	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II	50
08	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
08	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
08	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fenogram	50
08	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
08	01	01	01	013	Paten Biasa	20
08	01	01	01	014	Merek	10
08	01	01	01	015	Desain Industri	10
08	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
08	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
08	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
08	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

15. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
16. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

A.5.6. Kewajiban

Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasi ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

A.6. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Terealisasi pada Akhir Tahun Anggaran

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengisian RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP-Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan.

2. Pembayaran Kepada Penyedia

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan SPP/SPM-Pembayaran.

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

- a. Pekerjaan terselesaikan 100%;
- b. Masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir;
- c. Masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 (satu) kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember tahun berjalan namun dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. 31 Desember tahun berjalan belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.

3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terelesaikan

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.

4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 (dua) kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kemnaker telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Perubahan Anggaran Menurut Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja

URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	2.272.200.000	2.272.200.000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.537.706.324.000	1.537.706.324.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.689.678.000	4.689.678.000
JUMLAH PENDAPATAN	1.544.668.202.000	1.544.668.202.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	616.819.684.000	677.285.322.000
Belanja Barang	4.015.907.097.000	14.461.955.372.000
Belanja Modal	177.108.271.000	123.369.247.000
JUMLAH BELANJA	4.809.835.052.000	15.262.609.941.000

Perubahan Anggaran Menurut Program disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Perubahan Anggaran Menurut Program

URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	1.019.523.027.000	1.028.403.279.000
Program Pembinaan Ketenagakerjaan (DN)	2.267.156.411.000	12.643.852.242.000
Program Dukungan Manajemen (WA)	1.523.155.614.000	1.590.354.420.000
JUMLAH	4.809.835.052.000	15.262.609.941.000

Perubahan Anggaran Menurut Unit Eselon I disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Perubahan Anggaran Menurut Unit Eselon I

URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Sekretariat Jenderal	539.219.919.000	526.108.317.000
Inspektorat Jenderal	55.000.000.000	58.082.500.000
Ditjen Binapenta & PKK	800.906.424.000	804.120.474.000
Ditjen PHI & JSK	1.460.152.176.000	11.780.486.176.000
Ditjen Binwasnaker & K3	283.217.411.000	290.568.161.000
Barembang Ketenagakerjaan	146.717.344.000	218.824.166.000
Ditjen Binalavotas	1.524.621.778.000	1.584.420.147.000
JUMLAH	4.809.835.052.000	15.262.609.941.000

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kemnaker melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.386.952.330.000 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sehingga pagu efektif menjadi sebesar Rp2.422.882.722.000.

Kemudian terdapat perubahan Anggaran Kemnaker Tahun 2025 diantaranya disebabkan:

1. Penambahan Anggaran (*Top Up*) *Project Labor Market Information and Skill System Transformation for Labor Market Flexibility* (LISTRAF) sebesar Rp135.037.681.000 sesuai Surat Menaker Nomor B-M/76/KU.01/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.
2. Adanya penambahan anggaran terkait kegiatan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp10.318.646.425.000 sesuai Surat Menaker Nomor B-M/78/KU.01/V/2025 tanggal 2 Juni 2025.

Selanjutnya sebagai bagian dari pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.03/2025 tanggal 1 Oktober 2025 terdapat persetujuan buka blokir sebesar Rp202.707.332.000.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

B.1.1 PENDAPATAN PNBP LAINNYA

PNBP Lainnya sebesar
Rp2.236.628.989.173

Realisasi Pendapatan Kemnaker untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.236.628.989.173 atau 144,80% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.544.668.202.000.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Menurut Eselon I per 31 Desember 2025

Kode Es1	Nama Unit Eselon I	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
02601	Sekretariat Jenderal	2.731.146.000	6.266.888.470	229,46
02602	Inspektorat Jenderal	-	1.868.133	-
02604	Ditjen Binapenta & PKK	1.521.067.500.000	2.117.472.390.444	139,21
02605	Ditjen PHI & JSK	-	850.491.164	-
02608	Ditjen Binwasnaker & K3	18.055.252.000	98.734.647.679	546,85
02611	Barenbang Ketenagakerjaan	-	800.128.992	-
02613	Ditjen Binalavotas	2.814.304.000	12.502.574.291	444,25
	JUMLAH	1.544.668.202.000	2.236.628.989.173	144,80

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 Menurut Akun disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Menurut Akun per 31 Desember 2025

Kode Akun	Akun	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Dan Iuran Badan Usaha	2.272.200.000	9.034.617.992	397,62
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.537.706.324.000	2.211.270.603.800	143,80
4254	Pendapatan Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi	4.689.678.000	1.450.064.500	30,92
4257	Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Dan Pengelolaan Keuangan	-	310.943.847	-
4258	Pendapatan Denda	-	2.953.969.988	-
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	11.608.789.046	-
	JUMLAH	1.544.668.202.000	2.236.628.989.173	144,80

Realisasi Pendapatan Kemnaker berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp9.034.617.992 terdiri dari:

Tabel 15 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.860.000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.809.251.051
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	602.180.571
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.270.928.220
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	98.315.000
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.252.083.150
	Jumlah	9.034.617.992

a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan

Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.860.000 terdapat pada BBPVP Semarang sesuai HBL RL-648/09.01/2025-01 tanggal 04 November 2025 dengan NTPN 3BC7461QVDQC3BD6 tanggal 11 November 2025.

b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.809.251.051 terdapat pada:

Tabel 16 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Realisasi (Rp)
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	490.496.000
Jumlah Sekretariat Jenderal			490.496.000
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	136.489.851
02604	690633	BPKK Kendari	37.833.800
02604	690634	BPKK Bekasi	57.217.000
Jumlah Ditjen Binapenta & PKK			231.540.651
02608	350081	Balai K3 Medan	138.248.000
02608	350082	Balai K3 Makassar	6.650.000
Jumlah Ditjen Binwasnaker & K3			144.898.000
02613	50302	BPVP Sidoarjo	680.000.000
02613	219228	BPVP Ambon	6.412.800
02613	230302	BPVP Lombok Timur	27.545.500
02613	426531	BBPVP Serang	29.225.500
02613	452542	BBPVP Bandung	199.132.600
Jumlah Ditjen Binalavotas			942.316.400
Total			1.809.251.051

1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp490.496.000

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada satker Sekretariat Jenderal sebesar sebesar Rp490.496.000 merupakan pendapatan dari hasil penjualan/lelang peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 17 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Satker Sekretariat Jenderal

NO	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	20/01/2025	598EF7QLV21K6HB9	4.000.000	No. Risalah Lelang: 17/07.03/2025-01 tgl 17-01-2025 an Muhammad Rosy, Aset berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda NF 125 SD, No BAST:B-1/222/UM.03.03/1/2025 tgl 20 Januari 2025
2	30/04/2025	72BBE1JNG8A53OT7	5.815.000	No. Risalah Lelang: 251/08.03/2025-01 tgl 28-04-2025, Aset berupa 1 paket bagian-bagian barang inventarisasi berbagai merk/ jenis dengan kondisi rusak berat apa adanya, No. BAST: 1/1508/UM.03.03/V/2025 tgl 8 Mei 2025
3	21/08/2025	E04D20NA0E3DCPPP	19.359.200	No. Risalah Lelang: 251/07.03/2025-91 tgl 13-08-2025, Aset berupa 1 paket penjualan lelang scrap BMN berupa 4 unit kendaraan roda 4 dan 23 unit kendaraan roda 2, No. BAST: 1/2942/UM.03.03/V/2025 tgl 25 Agustus 2025
4	28/08/2025	8011F3CIFTQPCNSK	57.299.000	No. Risalah Lelang: 262/07.03/2025-01 tgl 20-08-2025, Aset berupa 17 unit kendaraan roda 2, No. BAST: 1/2942/UM.03.03/V/2025 tgl 25 Agustus 2025
5	24/11/2025	AB38655DFJ8CQCET	141.060.000	No. Risalah Lelang: 385/07.03/2025-01 tgl 24-11-2025, Aset berupa sedan, kendaraan bermotor penumpang lainnya dan sepeda motor
6	24/11/2025	516CD48VVOM0FTAC	257.327.000	No. Risalah Lelang: 384/07.03/2025-01 tgl 17-11-2025, Aset berupa sedan, kendaraan bermotor penumpang lainnya dan sepeda motor, No. BAST: 1/4144/UM.03.03/XI/2025 tgl 18-11-2025
7	25/11/2025	CA7926U8F8D1FVFR	5.635.800	No. Risalah Lelang: 383/07.03/2025-01 tgl 17-11-2025, Aset berupa 1 paket penjualan lelang scrap BMN (1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2), No. BAST: 1/4143/UM.03.03/XI/2025 tgl 18-11-2025
JUMLAH			490.496.000	

2) Ditjen Binapenta & PKK sebesar Rp231.540.651 terdapat pada:

- a) Satker Ditjen Binapenta & PKK sebesar Rp136.489.851 yang berasal dari lelang peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 18 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Pada Satker Ditjen Binapenta & PKK

NO	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	02/05/2025	08F5E7QLV2D0RVOF	1.410.657	satu paket barang inventaris kantor sesuai risalah lelang nomor 113/07.03/2025-01 tanggal 29 April 2025
2	20/06/2025	BA86C1JNG8FPBN0B	8.830.000	1 Paket BMN Sejumlah 40 Unit sesuai risalah lelang nomor 168/07.03/2025-01 tanggal 17 Juni 2025.
3	17/07/2025	8C5FA1JNG8KN1ES	50.185.000	1 unit Jeep New Fortuner 2.5 G A/T Diesel
4	15/08/2025	B02C40NA0E37S3RN	11.500.000	Lelang unit Vario
5	15/08/2025	5C8ED7QLV2MB445M	6.000.000	Lelang unit Karisma
6	27/10/2025	225BE61QVDNOJ7MK	1.598.299	Lelang Barang Inventaris Kantor
7	18/11/2025	BA5AB0NA0EC7A4OS	39.686.738	Lelang 163 Unit PM
8	19/11/2025	645540NA0EC7A6U8	7.335.194	Lelang 129 unit PM
9	25/11/2025	1E21D1JNG8URCM0F	6.750.000	Lelang 8 unit server
11	19/12/2025	BCC9F8N3ETKNOL2H	3.193.963	Lelang 15 unit Peralatan dan Mesin berdasarkan risalah Lelang nomor 464/07.03/2025-01 tanggal 18 Desember 2025.
JUMLAH			136.489.851	

- b) BPKK Kendari sebesar Rp37.833.800 berupa satu paket barang inventaris kantor sebanyak 243 unit kondisi rusak berat pada Balai Perluasan Kesempatan Kerjasesuai Risalah Lelang RL-217/15.05/2025-01 tanggal 03 Desember 2025 dengan NTPN 15757QLV324INGQ tanggal 11 Desember 2025.
- c) BPKK Bekasi sebesar Rp57.217.000 berupa satu unit mobil dan satu unit sepeda motor sesuai RL- 015/08.02/2024-01 tanggal 15 Januari 2025 dengan NTPN F17307QLV21K5IS2 tanggal 20 Januari 2025.

3) Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp144.898.000 terdapat pada:

- a) Balai K3 Medan sebesar Rp138.248.000 terdiri dari:

Tabel 19 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Pada Satker Balai K3 Medan

NO	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	13/02/2025	633D00NA0DH9SPKI	133.700.000	Mobil Toyota Nomor Polisi BK.1347K; Motor Yamaha 125cc Nomor Polisi BK2063L; dan Motor Honda 125cc Nomor Polisi BK6007K berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL.61/02.01/2025-01 tanggal 12 Februari 2025
2	19/09/2025	49E9855DFJ297VLV	4.548.000	Lelang 33 Peralatan dan Mesin kecuali kendaraan bermotor berdasarkan Risalah Lelang Nomor K.554/KNL.0201/2025
JUMLAH			138.248.000	

- b) Balai K3 Makassar sebesar Rp6.650.000 atas 1 (satu) paket Hasil Bongkaran Renovasi Atap Kantor sesuai Risalah Lelang Nomor RL-291/15.02/2025-01 tanggal 1 Juli 2025 dengan NTPN 8DA3A6U8F80JQ9D5 tanggal 3 Juli 2025.

- 4) Ditjen Binalavotas sebesar Rp942.316.400 terdapat pada:
- BPVP Sidoarjo sebesar Rp680.000.000 atas lelang peralatan dan mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL 383/10.02/2025-01 tanggal 3 September 2025 dengan NTPN 344D748VVOFINVRF tanggal 9 September 2025.
 - BPVP Ambon sebesar Rp6.412.800 atas lelang peralatan dan mesin sesuai Risalah Lelang Nomor 89/17.01/2025 - 1 tanggal 5 Agustus 2025 dengan NTPN 649100NA0E2VVFHV tanggal 7 Agustus 2025.
 - BPVP Lombok Timur sebesar Rp27.545.500 atas lelang peralatan dan mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-140/2025 dengan NTPN C1E8D0NA0E5Q4TMQ tanggal 1 September 2025.
 - BBPVP Serang sebesar Rp29.225.500 terdiri dari:

Tabel 20 Pendaparan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Pada Satker BBPVP Serang

NO	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	30/01/2025	AB22761QVCT55ERQ	15.725.500	Hasil Bersih Lelang atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang RL30/06.01/2025-01 Tgl. 24 Januari 2025 PL. April Mopsan Hutabarat, S.E.
2	31/01/2025	D26D23CIFT60VH32	13.500.000	Hasil Bersih Lelang atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang RL29/06.01/2025-01 Tgl. 24 Januari 2025 PL. April Mopsan Hutabarat, S.E.
JUMLAH			29.225.500	

- e) BBPVP Bandung sebesar Rp199.132.600

Tabel 21 Pendaparan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Pada Satker BBPVP Bandung

NO	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	24/07/2025	A2D9B55DFISEKEED	42.932.600	Hasil Lelang Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas RL 403/08.01/2025-01 tanggal 23 Juli 2025
2	17/09/2025	4A54048VVOFQHUE0	156.200.000	Penyetoran Lelang Mesin BBPVP Bandung tanggal 10 September 2025
JUMLAH			199.132.600	

- c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp602.180.571 terdapat pada:

Tabel 22 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	450938	Satker Sekretariat Jenderal Kemnaker	37.832.000
02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	184.061.000
Sekretariat Jenderal			221.893.000
02608	350079	Balai K3 Bandung	21.180.400
02608	350083	Balai K3 Samarinda	3.496.000
02608	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	99.525.926
Ditjen Binwasnaker & K3			124.202.326
02611	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	163.322.745
Barenbang Ketenagakerjaan			163.322.745
02613	352631	BPVP Belitung	800.000
02613	426531	BBPVP Serang	33.932.500
02613	451108	BPVP Samarinda	5.100.000
02613	452533	Sekretariat BNSP	52.930.000
Ditjen Binalavotas			92.762.500
Total			602.180.571

- 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp37.832.000
- a) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp37.832.000 merupakan pendapatan dari hasil penjualan/lelang 1 (satu) Paket Penjualan Lelang puing bongkaran dari berbagai jenis terdiri dari puing tembok, pintu, kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) kubik sesuai risalah lelang ROF9YL Bea Lelang 34/07.03/2025-01 tanggal 11 Februari 2025 dengan NTPN BF1372G502M73DUV tanggal 18 Februari 2025.
- b) PPSPDM Ketenagakerjaan sebesar Rp184.061.000 terdiri dari:

Tabel 23 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pada Satker PPSPDM Ketenagakerjaan

NO	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	08/10/2025	CFB8E55DFJ4SMRFL	3.400.000	Mohammad Munir
2	19/11/2025	0C4D055DFJ87G0FP	39.761.000	Dede Karlina
3	19/11/2025	23DD761QVDQJSVOC	64.569.000	Yanuar Panji
4	19/11/2025	0CA421JNG8ULRUBH	76.331.000	Abdul Khohar
JUMLAH			184.061.000	

- 2) Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp124.202.326 terdapat pada:
- a) Balai K3 Bandung sebesar Rp21.180.400 merupakan hasil lelang bongkaran Gedung dan Bangunan Balai K3 Bandung sesuai riisalah Lelang Nomor.252/08.01/2025-01 tanggal 13 Juni 2025 dengan NTPN 7BCE96U8F7TQNGA2 tanggal 10 Juni 2025.

- b) Balai K3 Samarinda sebesar Rp3.496.000 berupa lelang peralatan inventaris kantor terdiri dari:

Tabel 24 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pada Satker Balai K3 Samarinda

No.	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	22/05/2025	653DC55DFIMEKEJ1	1.443.000	Satu Paket Peralatan Inventaris Kantor sesuai Risalah Lelang Nomor:73/13.02/2025-01 tanggal 22 Mei 2025
2	14/08/2025	9633161QVDHH3GCH	2.053.000	Satu Paket Barang Inventaris berupa Stress Cracking Tester dan Alat Laboratorium Lainnya sesuai Risalah Lelang Nomor:126/13.02/2025-01 tanggal 13 Agustus 2025
Total			3.496.000	

- c) Satker Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp99.525.926 sesuai dokumen:

Tabel 25 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pada Satker Ditjen Binwasnaker & K3

No.	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	15/05/2025	7BA163CIFTHF21I7	57.254.176	Risalah Lelang Nomor 135/08.02/2025-01 tanggal 15 Mei 2025 berupa 1 (satu) paket inventaris kantor dengan kondisi rusak berat
2	17/06/2025	5C39A61QVDBL4P12	42.271.750	ii.Salinan Risalah Lelang Nomor 194/04.01/2025-01 tanggal 12 Juni 2025 berupa 1 (satu) paket barang inventaris kantor alat pengujian Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dengan kondisi rusak berat
Total			99.525.926	

- 3) Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp163.322.745 atas 1 (satu) paket bagian-bagian barang inventaris kantor berbagai merk/jenis sejumlah 1.892 unit sesuai Risalah Lelang Nomor HBL_01/07.03/2025-01 tanggal 2 Januari 2025 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 75BE955DFI9UNQ3A tanggal 30 Januari 2025.

- 4) Ditjen Binalavotas sebesar Rp92.762.500 terdapat pada:

- a) BPVP Belitung sebesar Rp800.000 terdiri dari:

Tabel 26 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pada Satker BPVP Belitung

No.	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	19/02/2025	AEA4655DFIDGIEQ	400.000	HBL RL 13/04.04/2025-01 tanggal 19 Februari 2025 Kode Lot 3LZY7P an Candra
2	19/05/2025	305CD6U8F7R3UQ78	400.000	HBL a RL 84/04.04/2025-01 tanggal 16 Mei 2025 Kode Lot XVUPT6 an SUKAISIH
Total			800.000	

- b) BBPVP Serang sebesar Rp33.932.500 terdiri dari:

Tabel 27 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pada Satker BBPVP Serang

No.	TANGGAL	NTPN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	30/01/2025	BF21C48VVNOCB8U	9.300.000	RL31/06.01/2025-01 Tgl. 24 Januari 2025 PL. April Mopsan Hutabarat, S.E.
2	19/05/2025	227A96U8F7R3TOB0	23.586.500	Penjualan Sisa Hasil Pasca Pelatihan Kejuruan Las
3	04/11/2025	E95727QLV2UUACV6	1.046.000	RL283/06.01/2025-01 Tgl. 31 Oktober 2025 PL. Aris Kurniawan, S.E., M.M.
Total			33.932.500	

- c) BPVP Samarinda sebesar Rp5.100.000 dengan NTPN DD92B61QVD5UHS4H tanggal 25 April 2025.
- d) Sekretariat BNSP sebesar Rp52.930.000 merupakan hasil bersih lelang atas lelang non eksekusi wajib BMN sesuai Risalah Lelang Nomor 33/07.03/2025-01 tanggal 11 Februari 2025 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 3410A1JNG83NBI7B tanggal 14 Februari 2025.
- d. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.270.928.220 terdapat pada:

Tabel 28 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	4.210.682.326
02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	60.757.972
Sekretariat Jenderal			4.271.440.298
02613	050302	BPVP Sidoarjo	37.110.000
02613	051102	BPVP Banyuwangi	39.819.000
02613	230302	BPVP Lombok Timur	436.572.340
02613	426531	BBPVP Serang	52.605.000
02613	451026	Satker Ditjen Binalavotas	157.761.382
02613	452533	Sekretariat BNSP	191.047.200
02613	452542	BBPVP Bandung	9.073.000
02613	452589	BPVP Sorong	30.750.000
02613	452609	BBPVP Semarang	44.750.000
Ditjen Binalavotas			999.487.922
Total			5.270.928.220

- 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.271.440.298 terdapat pada:
- a) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.210.682.326 berupa sewa Wisma Karya Jasa Ciloto, pendapatan sewa lahan parkir, sewa gedung serbaguna, sewa kios kantin, dan sewa ruang untuk kantor dengan daftar terlampir pada Lampiran *Audited* Simponi.
- b) Satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) sebesar Rp60.757.972 merupakan pendapatan sewa aula Gedung PPSDM dengan rincian setoran berikut:

- (1) pendapatan sewa aula Gedung PPSDM sebesar Rp56.048.800 dengan rincian setoran berikut:

Tabel 29 Pendapatan Sewa Aula gedung PPSDM
Pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	10/02/2025	A175355DFID4GB95	12.012.000
425131	11/03/2025	61CC82G502OVN7UV	8.000.800
425131	10/07/2025	8114E61QVDEE7796	12.012.000
425131	04/09/2025	842086U8F86JH84V	4.004.000
425131	04/09/2025	114C10NA0E3L7NII	4.004.000
425131	16/09/2025	A1DEC1JNG8ODHHAL	4.004.000
425131	03/11/2025	A36BE48VVOLBITLM	8.008.000
425131	14/11/2025	837AF48VVOLMKF89	4.004.000
Total			56.048.800

- (2) Sewa rumah dinas sebesar Rp4.709.172 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian:

Tabel 30 Pendapatan Sewa Rumah Dinas
Pada Satker PPSDM Ketenagakerjaan

Akun	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Nilai (Rp)
425131	01/01/2025	251821503000020	724.488
425131	01/01/2025	251821503000020	362.244
425131	01/02/2025	251821503000130	724.488
425131	01/02/2025	251821503000140	362.244
425131	01/03/2025	251821503000210	724.488
425131	01/03/2025	251821503000210	362.244
425131	01/04/2025	251821503000650	724.488
425131	01/04/2025	251821503000650	362.244
425131	01/05/2025	251821503000920	362.244
Total			4.709.172

- 2) Ditjen Binalavotas sebesar Rp999.487.922 terdapat pada:
- a) BPVP Sidoarjo sebesar Rp37.110.000 merupakan pemanfaatan Gedung Auditorium dan aula dengan rincian:

Tabel 31 Pendapatan Pemanfaatan Gedung Auditorium
pada Satker BPVP Sidoarjo

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	27/03/2025	75E500NA0DKMGVVF	4.940.000
425131	11/04/2025	9F9776U8F7NSGG8D	2.470.000
425131	02/05/2025	0D5451JNG8A2O84S	2.470.000
425131	02/05/2025	F5CC061QVD60PCNP	2.470.000
425131	02/05/2025	552030NA0DNMBH8D	2.470.000
425131	22/05/2025	95C6E6U8F7R68U80	2.470.000
425131	11/06/2025	A741448VVO6H7A2U	2.470.000
425131	17/06/2025	D066955DFIP8OM4J	2.470.000
425131	27/06/2025	218767QLV2GJEHC1	2.470.000
425131	25/07/2025	3FA9E7QLV2JJKDIJ	2.470.000
425131	26/08/2025	0C13061QVDHS5TD4	2.470.000
425131	04/10/2025	ACC1E7QLV2RVK8V0	2.470.000
425131	01/12/2025	C59921JNG8UVRJ3F	5.000.000
Total			37.110.000

- b) BPVP Banyuwangi sebesar Rp39.819.000 merupakan Sewa Gedung Serbaguna (Gedung K.H.R. As'ad Syamsul Arifin), sewa asrama dan sewa ruang kelas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Pendapatan Sewa Gedung Serbaguna, Sewa Asrama dan Sewa Ruang Kelas pada Satker BPVP Banyuwangi

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	23/01/2025	61E1761QVCSTP118	4.048.000
425131	25/03/2025	658E63CIFTBL2IIO	4.048.000
425131	26/03/2025	376901JNG871Q3EC	4.048.000
425131	26/03/2025	DE30E55DFIGJE2P5	4.048.000
425131	22/05/2025	2B2581JNG8CST512	4.048.000
425131	02/07/2025	0D04F3CIFTN139Q3	4.000.000
425131	02/07/2025	0D04F3CIFTN139Q3	2.235.000
425131	12/09/2025	D07D06U8F86Q48QU	4.048.000
425131	30/10/2025	9E5B93CIFU0Q3RU4	8.096.000
425131	07/11/2025	BC09E1JNG8UARRK7	1.200.000
Total			39.819.000

- c) BPVP Lombok Timur sebesar Rp436.572.340 terdiri dari sewa asrama, ruang kelas, workshop dan villa dengan rincian terlampir pada Lampiran *Audited* Simponi.
- d) BBPVP Serang sebesar Rp52.605.000 merupakan sewa gedung untuk kantin, sewa asrama dan aula dengan bukti setor berikut:

Tabel 33 Pendapatan Sewa Gedung untuk Kantin, Sewa Asrama dan Aula pada Satker BBPVP Serang

Akun	Tanggal	Nomor NTPN	Nilai (Rp)
425131	12/02/2025	A8D6A55DFID6P82V	2.600.000
425131	07/03/2025	B895D48VVNTL6RBI	2.600.000
425131	17/03/2025	EBF302G502P5AKC7	3.255.000
425131	23/04/2025	5B85E55DFIJEP9AV	6.510.000
425131	19/05/2025	A256D0NA0DQD2NKK	800.000
425131	20/05/2025	692A51JNG8CPHJD0	23.290.000
425131	20/06/2025	C191F55DFIPC2DAM	800.000
425131	15/07/2025	F06606U8F80V6123	800.000
425131	26/07/2025	4C6201JNG8IU67JL	7.950.000
425131	19/08/2025	3C23948VVOCSPE27	800.000
425131	18/09/2025	EDC0B61QVDKKF8V9	800.000
425131	17/10/2025	292B455DFJ56KQUB	800.000
425131	20/11/2025	0B6627QLV2VDT9G6	800.000
425131	29/12/2025	107707QLV32FQJUO	800.000
Total			52.605.000

- e) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp157.761.382 terdiri dari:

Tabel 34 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425131	16/07/2025	C851D7QLV2JAFBB1	53.161.000	Sewa Gedung Kantin Gedung Vokasi Kemnaker Gatsu 44
425131	14/08/2025	E921155DFIUTUGPA	78.891.252	Biaya sewa untuk penempatan 1 (satu) unit Mesin ATM PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di Gedung Vokasi Kemnaker selama 3 tahun.
425131	11/11/2025	221697QLV2V0G6PC	25.709.130	Sewa Penempatan Minimarket Koperasi Gedung Vokasi Kemnaker Gatsu 44
Total			157.761.382	

- f) Sekretariat BNSP sebesar Rp191.047.200 merupakan perpanjangan sewa sebagian ruangan/bangunan di Gedung Sekretariat BNSP untuk Kantor Kas Bank BRI, periode 1 Maret 2025 s.d 28 Februari 2027 dengan bukti setor berikut:

Tabel 35 Pendapatan Perpanjangan sewa ruangan/bangunan untuk Kantor Kas Bank BRI pada Satker Sekretariat BNSP

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	27/03/2025	B853E7QLV27N5RG	95.523.600
425131	27/03/2025	D835E2G502PD46U7	95.523.600
Total			191.047.200

- g) BBPVP Bandung sebesar Rp9.073.000 atas sewa kantin yang terdiri dari:

Tabel 36 Pendapatan Sewa Kantin pada Satker BBPVP Bandung

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	23/05/2025	D0C5848VVO4385QP	1.810.000
425131	24/12/2025	7524E0NA0EFDLPSQ	2.421.000
425131	24/12/2025	9E1931JNG91Q2P6B	2.421.000
425131	29/12/2025	7BD058N3ETKTAOCV	2.421.000
Total			9.073.000

- h) BPVP Sorong sebesar Rp30.750.000 atas sewa ruangan atau aula dengan bukti setor berikut:

Tabel 37 Pendapatan Sewa Ruang atau Aula pada Satker BPVP
Sorong

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	31/01/2025	F53AD48VVNO76LFL	1.000.000
425131	27/02/2025	A101D55DFIDEJ1AB	12.500.000
425131	13/03/2025	2580A3CIFTB8PLOA	3.250.000
425131	20/06/2025	F5DC561QVDBOEK48	500.000
425131	31/07/2025	054606U8F7R3SMHG	1.500.000
425131	04/09/2025	01ED855DFJ1QMFBQ	1.000.000
425131	14/11/2025	CDC617QLV2V6319C	4.000.000
425131	19/11/2025	9530D7QLV2VBKVK4	2.000.000
425131	27/11/2025	5D6040NA0ECH7B6U	1.000.000
425131	27/11/2025	406406U8F8D710OT	2.000.000
425131	09/12/2025	57B0861QVDT9GPI8	1.000.000
425131	22/12/2025	17D8C48VVOOT2NVK	1.000.000
Total			30.750.000

- i) BBPVP Semarang sebesar Rp44.750.000 atas sewa studio catwalk dan auditorium dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Pendapatan Sewa Studio Catwalk pada Satker BBPVP
Semarang

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425131	03/01/2025	EE6740NA0DE0L6UA	3.750.000
425131	06/01/2025	4F5D66U8F7ENG6B3	3.750.000
425131	17/04/2025	A3D816U8F7O245GQ	5.000.000
425131	07/05/2025	247DD55DFIM04TUD	2.450.000
425131	15/05/2025	661B555DFIM7QBR2	5.000.000
425131	28/05/2025	6231848VVO46NU26	5.000.000
425131	28/05/2025	E7D356U8F7RBS1TH	2.500.000
425131	09/07/2025	5F36A55DFIRR3GQ9	4.900.000
425131	29/07/2025	10A601JNG8J2CR2J	4.900.000
425131	22/08/2025	BBEC855DFIV96KUB	5.000.000
425131	05/12/2025	1BE3B61QVDT2U6CL	2.500.000
Total			44.750.000

- e. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.315.000 terdapat pada BPVP Sorong atas penggunaan peralatan dan mesin program pelatihan dengan rincian:

Tabel 39 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin pada Satker BPVP Sorong

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425131	19/05/2025	B7FE27QLV2DG9J2H	4.000.000	BKP SDM Kab Sorong
425131	19/05/2025	00CB47QLV2DG9NP2	3.100.000	Kementerian Perindustrian
425131	19/08/2025	672C63CIFTQD2UPT	3.915.000	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jayapura
425131	01/09/2025	78D5948VVOFBP6GT	2.100.000	PT GAG NIKEL
425131	01/09/2025	7E3053CIFTSVBQVV	400.000	PT. Eduvokasi Solusi Negeri
425131	01/10/2025	DD4BA0NA0E6L75LQ	8.000.000	Dinas Tenaga Kerja kab. Mamberamo Raya
425131	01/10/2025	50B4E3CIFTTQDJHS	22.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kab. Puncak Jaya
425131	15/10/2025	2F18A6U8F89S6NDG	4.000.000	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Raja Ampat
425131	17/10/2025	C89C355DFJ54FC3V	11.000.000	Dinas Tenaga kerja kab Yahukimo
425131	20/10/2025	25E572G503E09SBQ	600.000	PT Danica Kreatif Berkarya
425131	23/10/2025	44D2E3CIFU08AFG	12.500.000	Disnaker kab. Mamberamo Tengah
425131	24/10/2025	3BAFE0NA0E98L96G	1.600.000	Dinas Tenaga Kerja Papua Pegunungan
425131	06/11/2025	EDF357QLV2UUA610	1.500.000	Dinas Tenaga Kerja Papua Pegunungan
425131	19/11/2025	CB4CC61QVDQFGIC4	12.500.000	Disnaker kab. Deiyai
425131	01/12/2025	7E2B93CIFU5TDVNV	2.400.000	Afalandra Scuola
425131	03/12/2025	9C8050NA0EEOCM1U	300.000	LSK ESDM GATRIK PAPUA BARAT DAYA
425131	04/12/2025	E07F80NA0EEO9VHH	1.200.000	DISPORAPAREKRAF PROV. PAPUA BARAT DAYA
425131	10/12/2025	123E22G503JP114C	2.500.000	Disnaker ESDM Prov. Papua Pegunungan
425131	11/12/2025	5DF3A55DFJAT618J	3.000.000	DINTARNSNAKER
425131	22/12/2025	A55ED3CIFU6EEI0J	600.000	DISPERINDAG KAB. RAJA AMPAT
425131	24/12/2025	342DF48VVOOOIP9	600.000	Disnakertrans ESDM
		Total	98.315.000	-

- f. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi sebesar Rp1.252.083.150 terdapat pada:

Tabel 40 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	2.752.496
02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	40.331.612
Sekretariat Jenderal			43.084.108
02604	259322	BBPKK Bandung Barat	14.500.332
02604	690634	BPKK Bekasi	102.564
Ditjen Binapenta dan PKK			14.602.896
02608	350084	Balai K3 Jakarta	24.800.000
Ditjen Binwasnaker & K3			24.800.000
02613	035636	BPVP Surakarta	17.600.000
02613	050302	BPVP Sidoarjo	31.872
02613	065106	BPVP Banda Aceh	1.076.674
02613	089378	BPVP Padang	8.245.444
02613	209255	BPVP Kendari	14.920.500
02613	219228	BPVP Ambon	19.415.495
02613	426531	BBPVP Serang	9.160.539
02613	451026	Satker Ditjen Binalavotas	6.700
02613	451094	BBPVP Medan	88.956.700
02613	451108	BPVP Samarinda	145.294.402
02613	452542	BBPVP Bandung	51.327.376
02613	452558	BBPVP Bekasi	112.200.000
02613	452589	BPVP Sorong	550.379.377
02613	452595	BPVP Ternate	626.892
02613	452609	BBPVP Semarang	29.759.298
02613	452652	BBPVP Makassar	120.594.877
Ditjen Binalavotas			1.169.596.146
Total			1.252.083.150

- 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp43.084.108
- a) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.752.496 terdiri dari:
- (1) Sewa kamar pada Wisma Ciloto sebesar Rp1.000.000 dengan bukti setor berikut:

Tabel 41 Pendapatan Sewa Kamar pada Wisma Ciloto pada Satker Sekretariat Jenderal

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425151	15/03/2025	8A61B6U8F7L19RV3	200.000
425151	15/03/2025	AB4DB0NA0DKAERRI	200.000
425151	04/04/2025	82B376U8F7NM6D9E	600.000
Total			1.000.000

- (2) Sewa rumah dinas sebesar Rp1.752.496 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker Sekretariat Jenderal

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/05/2025	251821503000910	219.062
425151	01/06/2025	251821503001070	219.062
425151	01/07/2025	251821503001350	219.062
425151	01/08/2025	259991531004370	219.062
425151	01/09/2025	259991531007690	219.062
425151	01/10/2025	259991531013400	219.062
425151	01/11/2025	259991531015090	219.062
425151	01/12/2025	259991531020060	219.062
Total			1.752.496

b) PPSPDM Ketenagakerjaan sebesar Rp39.244.880

- (1) Sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM/SP2D sebesar Rp7.244.880 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker PPSPDM Ketenagakerjaan

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/05/2025	251821503000920	724.488
425151	01/06/2025	251821503001060	362.244
425151	01/06/2025	251821503001050	724.488
425151	01/07/2025	251821503001390	724.488
425151	01/07/2025	251821503001380	362.244
425151	01/08/2025	259991531004360	724.488
425151	01/08/2025	259991531004360	362.244
425151	01/09/2025	259991531007680	362.244
425151	01/09/2025	259991531007680	724.488
425151	01/10/2025	259991531013400	362.244
425151	01/10/2025	259991531013390	724.488
425151	01/11/2025	259991531015110	362.244
425151	01/11/2025	259991531015100	724.488
Total			7.244.880

- (2) Sewa ruang rapat dan ruang kelas sebesar Rp32.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Pendapatan Sewa Ruang Rapat dan Ruang Kelas pada Satker PPSPDM Ketenagakerjaan

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	25/08/2025	B31AA55DFMCH93B	1.200.000	Sewa oleh BNN
425151	25/08/2025	A591F61QVDHOUAVH	200.000	LSP HIP
425151	25/08/2025	A591F61QVDHOUAVH	400.000	LSP HIP
425151	25/08/2025	053B81JNG8LU2PFG	1.200.000	Sewa Penggunaan Kelas Meidi
425151	29/08/2025	BC1670NA0E3L7PIO	200.000	Sewa ruang kelas Meidi
425151	03/09/2025	A98753CIFTSVCEQN	1.600.000	Sewa Ruang Wangsa
425151	04/09/2025	D209E2G503ALG9U7	1.200.000	Sewa ruang kelas Meidi
425151	10/09/2025	3AC5A6U8F86NVGQ4	200.000	Sewa Ruang Rama Shinta
425151	01/10/2025	C0EED2G503B8EVRJ	200.000	Sewa Ruangan BIMA 2
425151	01/10/2025	2389161QVDN3GJA0	200.000	Sewa Bima
425151	01/10/2025	B35626U8F876G0SI	1.600.000	Sewa Ruangan Rama Shinta
425151	01/10/2025	EFCFA2G503B8FBPD	400.000	Sewa Ruangan Rama Shinta
425151	28/10/2025	3000948VVOJ36CE8	1.600.000	sewa ruang akarya
425151	28/10/2025	4F64055DFJ5FI37Q	14.400.000	Sewa kamar 18 kamar
425151	28/10/2025	4F64055DFJ5FI37Q	200.000	tambahan 1 kamar
425151	28/10/2025	5C6EF61QVDNRUU3S	1.600.000	Sewa Ruang Akarya
425151	30/10/2025	3E8822G503EACA80	200.000	Sewa ruangan Wangsa
425151	31/10/2025	CF1F90NA0E9JMAE2	400.000	Sewa Ruang Akarya
425151	03/11/2025	971272G503GIU3M	200.000	Sewa Ruangan BIMA
425151	11/11/2025	86FA848VVOLJ5GS8	1.200.000	Sewa Ruangan Akarya
425151	11/11/2025	86FA848VVOLJ5GS8	400.000	Sewa Ruangan Akarya
425151	01/12/2025	134E52G503HA1QKM	1.200.000	Sewa Ruangan Akarya
425151	18/12/2025	088C961QVDTHE2TA	400.000	Sewa Ruang Bima
425151	18/12/2025	088C961QVDTHE2TA	400.000	Sewa Ruang Bima
425151	24/12/2025	AF8342G503K6F6QK	800.000	Sewa Ruang Wangsa
425151	24/12/2025	D865655DFJBBM7B7	400.000	sewa ruang akarya
Total			32.000.000	

2) Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp14.602.896

- a) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp14.500.332 merupakan sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPKK Bandung Barat

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	14/05/2025	250221503000130	1.376.991
425151	14/05/2025	250221503000010	1.376.991
425151	14/05/2025	2502215030000270	1.172.556
425151	14/05/2025	2502215030000330	1.121.274
425151	14/05/2025	250221503000040	1.376.991
425151	01/06/2025	2502215030000370	1.121.274
425151	01/07/2025	2502215030000470	1.121.274
425151	01/08/2025	259991531004520	1.121.274
425151	01/09/2025	259991531007620	1.121.274
425151	01/10/2025	259991531011790	1.077.615
425151	01/11/2025	259991531016110	1.282.050
425151	01/12/2025	259991531020800	1.230.768
Total			14.500.332

- b) BPKK Bekasi sebesar Rp102.564 merupakan sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPKK Bekasi

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	16/04/2025	251711503000020	51.282
425151	16/04/2025	251711503000010	51.282
Total			102.564

- 3) Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp24.800.000 pada Balai K3 Jakarta atas sewa ruang kelas yang terdiri dari:

Tabel 47 Pendapatan Sewa Ruang Kelas pada Satker Balai K3 Jakarta

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	20/05/2025	603E46U8F7R50LN7	200.000	PT. Global Safety
425151	21/05/2025	890C93CIFTHI937Q	1.400.000	Phitagoras Training and Consulting
425151	17/06/2025	AD7DE3CIFTKFR6QB	200.000	PT. Global Safety
425151	28/07/2025	7DCFB3CIFTNMS363	200.000	STIKES Cirebon
425151	11/08/2025	2D5F855DFIUV6EIL	4.000.000	PT. Safety First Indonesia
425151	26/08/2025	74AF648VVOUUP5I	200.000	Phitagoras Training and Consulting
425151	08/09/2025	BAB136U8F86NLQ8J	4.000.000	PT. Safety First Indonesia
425151	25/09/2025	5C4510NA0E6GOJNQ	2.000.000	PT. Mulia Astara Nusantara
425151	01/10/2025	A073F55DFJ2J5OVV	200.000	PT. IndikaPratama Jaya
425151	06/10/2025	A0E597QLV2S0MEUS	400.000	PT. Maxima Aksara Jaya Utama
425151	08/10/2025	43A931JNG8R5G00J	3.000.000	IHC Rumah Sakit Pertamina Jaya
425151	08/10/2025	8903E6U8F89MJ6N1	200.000	PT. Maxima Aksara Jaya Utama
425151	10/10/2025	C4BA261QVDN7SRAE	4.000.000	PT. Safety First Indonesia
425151	15/10/2025	FA7FA48VVOIMUG2G	200.000	Phitagoras Training and Consulting
425151	19/11/2025	8809161QVDQLI1M	200.000	Phitagoras Training and Consulting
425151	22/12/2025	9F4AB6U8F8FUTA5B	4.400.000	PT. Safety First Indonesia
Total			24.800.000	

4) Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.169.596.146

a) BPVP Surakarta sebesar Rp17.600.000 terdiri dari:

Tabel 48 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi pada Satker BPVP Surakarta

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	23/05/2025	943DB7QLV2DKUQ70	1.000.000	sewa Auditorium workshop pariwisata
425151	28/05/2025	BCE8D3CIFTHQ70PK	15.600.000	sewa asrama dari LSP Pekerja Domestik Nasional
425151	28/05/2025	2021F7QLV2DO7V9T	1.000.000	Sewa ruang kelas dari LSP Pekerja Domestik Nasional
Total			17.600.000	

b) BPVP Sidoarjo sebesar Rp31.872 merupakan sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Sidoarjo

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/10/2025	259991330254104	10.624
425151	01/11/2025	259991530095924	10.624
425151	01/12/2025	259991531020810	10.624
Total			31.872

c) BPVP Banda Aceh sebesar Rp1.076.674 merupakan sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Banda Aceh

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/06/2025	250011506003350	3.350
425151	01/06/2025	250011506003350	85.089
425151	01/07/2025	250011506004090	3.350
425151	01/07/2025	250011506004080	81.739
425151	01/08/2025	259991525008380	3.350
425151	01/08/2025	259991525008380	81.739
425151	01/09/2025	259991525015960	85.089
425151	01/09/2025	259991525015960	3.350
425151	01/10/2025	259991525024300	3.350
425151	01/10/2025	259991525024300	91.789
425151	01/11/2025	259991525033040	3.350
425151	01/11/2025	259991525033050	88.439
425151	01/12/2025	250011506002420	85.089
425151	01/12/2025	250011506002170	3.350
425151	01/12/2025	250011506002420	3.350
425151	01/12/2025	259991525040420	97.145
425151	01/12/2025	259991525040420	3.350
425151	15/12/2025	250011506000160	3.350
425151	15/12/2025	250011506000190	85.089
425151	15/12/2025	250011506000940	85.089
425151	15/12/2025	250011506000320	3.350
425151	15/12/2025	250011506002160	85.089
425151	15/12/2025	250011506000940	3.350
425151	15/12/2025	250011506000320	85.089
Total			1.076.674

d) BPVP Padang sebesar Rp8.245.444 terdiri dari:

- (1) sewa rumah dinas sebesar Rp3.895.444 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D sebagai berikut:

Tabel 51 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Padang

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/06/2025	250101503000350	326.391
425151	01/07/2025	250101503000460	326.391
425151	01/08/2025	259991531003480	326.391
425151	01/09/2025	259991531008720	326.391
425151	01/10/2025	259991531011470	315.767
425151	01/11/2025	259991531017420	315.767
425151	01/12/2025	259991531018780	326.391
425151	31/12/2025	250101503000310	326.391
425151	31/12/2025	250101503000000	326.391
425151	31/12/2025	250101503000220	326.391
425151	31/12/2025	250101503000040	326.391
425151	31/12/2025	250101503000070	326.391
Total			3.895.444

- (2) Pemakaian asrama, workshop, aula dan ruang kelas sebesar Rp4.350.000 dengan rincian:

Tabel 52 Pendapatan Sewa Asrama, Workshop, Aula dan Ruang Kelas pada Satker BPVP Padang

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	19/10/2025	7FEE57QLV2SDVBCQ	400.000	pemakaian workshop tata boga selama 1 hari
425151	19/10/2025	7FEE57QLV2SDVBCQ	1.400.000	Pemakaian Asrama sebanyak 7 kamar selama 1 malam
425151	21/10/2025	2BA696U8F89VGC3P	750.000	Peminjaman Aula sebanyak 1 aula selama 1 hari
425151	21/10/2025	2BA696U8F89VGC3P	1.800.000	Peminjaman Ruang Kelas sebanyak 3 kelas selama 3 hari
Total			4.350.000	

e) BPVP Kendari sebesar Rp14.920.500 terdiri dari:

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp520.200 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Kendari

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	21/03/2025	250601503000000	43.375
425151	21/03/2025	250601503000080	43.375
425151	21/03/2025	250601503000060	43.375
425151	01/06/2025	250601503000340	43.375
425151	01/07/2025	250601503000460	43.375
425151	01/08/2025	259991531005590	43.375
425151	01/09/2025	259991531008500	43.375
425151	01/10/2025	259991531013330	43.375
425151	01/11/2025	259991531015670	43.375
425151	01/12/2025	259991531020160	43.375
425151	12/12/2025	250601503000280	43.375
425151	12/12/2025	250601503000230	43.375
Total			520.500

- (2) Sewa Asrama dan ruang kelas sebesar Rp14.400.000 dengan rincian:

Tabel 54 Pendapatan Sewa Asrama dan Ruang Kelas pada Satker BPVP Kendari

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	09/05/2025	FF71955DFILRMAEG	14.000.000	Sewa Asrama BPVP Kendari Sebanyak 5 Kamar x 14 Hari kegiatan Inkubasi WASTRA
425151	15/08/2025	08F443CIFTQ9DE4I	400.000	Pembayaran Sewa Ruang Kelas Kejuruan Listrik Pada Tanggal 9-10 Agustus 2025 oleh PT Lisna Abdi Prima
Total			14.400.000	

- f) BPVP Ambon sebesar Rp19.415.495 terdiri dari:

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp1.815.492 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Ambon

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/05/2025	250611502000340	151.291
425151	01/06/2025	250611502000390	151.291
425151	01/07/2025	250611502000500	151.291
425151	24/07/2025	250611502000030	151.291
425151	01/08/2025	259991529007240	151.291
425151	01/08/2025	250611502000120	151.291
425151	01/08/2025	250611502000060	151.291
425151	01/08/2025	250611502000250	151.291
425151	01/09/2025	259991529013520	151.291
425151	01/10/2025	259991529020380	151.291
425151	01/11/2025	259991529026520	151.291
425151	01/12/2025	259991529031270	151.291
Total			1.815.492

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp17.600.003 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BPVP Ambon

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	29/05/2025	D49B41JNG8CU3PIQ	3	ruang kelas
425151	05/06/2025	4373F3CIFTK1DGOK	600.000	ruang kelas
425151	11/06/2025	504273CIFTK4T609	15.000.000	Aula Nusantara
425151	11/06/2025	504273CIFTK4T609	2.000.000	Ruang Kelas
Total			17.600.003	

- g) BBPVP Serang sebesar Rp9.160.539

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp10.539 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D Nomor 259991320205030 tanggal 6 Agustus 2025.

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp9.150.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BBPVP Serang

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	17/03/2025	EBF302G502P5AKC7	750.000	sewa ruang kelas, kerjasama antara BBPVP Serang dengan Yayasan AL-Alif Indramayu
425151	23/04/2025	5B85E55DFJEP9AV	3.000.000	sewa ruang kelas, kerjasama antara BBPVP Serang dengan PT. Cakra Batara Sekurity
425151	20/05/2025	692A51JNG8CPHJD0	3.000.000	Sewa Ruang kelas kerjasama Antara PT. Cakra Batara Security Dengan BBPVP Serang (Dikdas Satpam Kualifikasi Gada Pratama BUJP)
425151	23/05/2025	D81892G502VAH5HP	1.600.000	Pembayaran kerjasama antara BBPVP Serang dengan Universitas Falatehan tentang Pendayagunaan Fasilitas Peralatan Kerja (Praktikum Mhs progStdElektro)
425151	23/05/2025	D81892G502VAH5HP	800.000	Pembayaran kerjasama antara BBPVP Serang dengan Universitas Falatehan tentang Pendayagunaan Fasilitas Peralatan Kerja (Praktikum Mhs progStdElektro)
Total			9.150.000	

- h) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp6.700 yang berasal dari sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM/SP2D sebagai berikut:

Tabel 58 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker Ditjen Binalavotas

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	10/11/2025	259991330365210	3.350
425151	01/12/2025	259991531020060	3.350
Total			6.700

- i) BBPVP Medan sebesar Rp88.956.700 terdiri dari:

- (1) sewa rumah dinas sebesar Rp6.700 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D sebagai berikut:

Tabel 59 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPVP Medan

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/07/2025	251231506000892	3.350
425151	01/08/2025	259991525008501	3.350
Total			6.700

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp88.950.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BBPVP Medan

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	27/03/2025	1B29A0NA0DKMGNH9	900.000	Penyewaan Workshop oleh PT. Almira Ekutama Solusi;
425151	22/04/2025	868230NA0DNCH3U9	54.400.000	Perlengkapan Asrama Jasa Pelatihan Teknisi AC Residential dan Pemasangan Instalasi Penerangan Bangunan Sederhana 260 JP CV Dunia Outbound Kita
425151	02/07/2025	D4CEA55DFIRPVL9I	20.000.000	Penggunaan Asrama Kerjasama Pelatihan Teknisi Perawatan AC Residential dengan CV Dunia Outbond Kita
425151	17/07/2025	941280NA0E0741E7	400.000	Penyewaan Workshop oleh BAZNAS Prov. Riau.
425151	12/08/2025	23D0E0NA0E3012AC	1.400.000	Penyewaan Workshop oleh PT H-Tech.
425151	14/08/2025	37A2B6U8F83MS06M	8.000.000	Penyewaan Workshop oleh PT Ecogreen Oleochemicals.
425151	27/08/2025	5DACE6U8F848J01I	400.000	Penyewaan Workshop oleh PT Kabil Citranusa.
425151	27/08/2025	5DACE6U8F848J01I	400.000	Penyewaan Workshop oleh PT Kabil Citranusa.
425151	27/08/2025	5DACE6U8F848J01I	100.000	Penyewaan Workshop oleh PT Kabil Citranusa.
425151	27/08/2025	5DACE6U8F848J01I	100.000	Penyewaan Workshop oleh PT Kabil Citranusa.
425151	30/09/2025	1DDD91JNG8P0GHA5	750.000	Penyewaan Workshop oleh PT Kabil Citranusa.
425151	05/11/2025	507502G503GIO87M	750.000	Penyewaan Workshop oleh PT. Kabil Citranusa.
425151	17/11/2025	3D8887QLV2V775G4	400.000	Penyewaan Workshop oleh Perwakilan BKKBN Prop. Riau
425151	17/11/2025	3D8887QLV2V775G4	200.000	Penyewaan Workshop oleh Perwakilan BKKBN Prop. Riau.
425151	27/11/2025	48D4461QVDQPF7I8	750.000	Penyewaan Workshop oleh PT. Kabil Indonusa Estate.
Total			88.950.000	

- j) BPVP Samarinda sebesar Rp145.294.402 terdiri dari:

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp3.894.402 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Samarinda

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/04/2025	250461501001100	339.646
425151	01/05/2025	250461501001430	329.107
425151	01/06/2025	250461501001640	329.107
425151	01/07/2025	259991530010000	329.107
425151	01/08/2025	259991530030790	318.568
425151	31/07/2025	250461501000520	339.646
425151	31/07/2025	250461501000080	322.304
425151	31/07/2025	250461501000270	339.646
425151	01/09/2025	259991530044570	318.568
425151	01/10/2025	259991530065880	318.568
425151	01/11/2025	259991530081450	318.568
425151	01/12/2025	259991530107970	291.567
Total			3.894.402

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp141.400.000 atas jasa penggunaan peralatan pelatihan, ruang kelas, auditorium, dan asrama dengan rincian terlampir.

k) BBPVP Bandung sebesar Rp51.327.376

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp127.376 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D sebagai berikut:

Tabel 62 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPVP Bandung

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	12/08/2025	250221502000012	63.688
425151	12/08/2025	250221502000045	63.688
Total			127.376

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp51.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Satker BBPVP Bandung

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425151	24/01/2025	4D85D61QVCSTSQSO	3.000.000	Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia
425151	28/01/2025	3D7CD0NA0DEOJ6QO	600.000	LPK Eikou Kakehashi Indonesia
425151	14/02/2025	A2BBC2G502M2NEA7	800.000	LPK PT. UPTY Global Network
425151	10/03/2025	55C221JNG86I5D12	4.000.000	DPD APJI Jabar
425151	10/03/2025	3A0EF2G502OUID8M	1.200.000	DPD APJI Jabar
425151	28/04/2025	9CFF855DFUJBMR1	2.400.000	LPK PT. UPTY Global Network
425151	28/04/2025	38A347QLV2APIMDO	800.000	LPK PT. UPTY Global Network
425151	28/04/2025	315956U8F7OD5NFD	600.000	LSP Elektroteknika
425151	14/05/2025	1EDFE6U8F7QQ3T3L	1.200.000	DPD APJI Jabar Tahap 2
425151	14/05/2025	85E481JNG8CFLSPS	7.200.000	DPD APJI Jabar Tahap 2
425151	26/05/2025	6C5BE7QLV2DKSQIA	3.000.000	PT Desain dan Teknik Indonesia
425151	05/06/2025	60F026U8F7TLCNAI	400.000	LSP Elektroteknika Tahap 2
425151	26/06/2025	3F18E6U8F7U9A1VQ	1.200.000	DPD APJI Jabar Tahap 3
425151	26/06/2025	0780E55DFIPGG01S	5.000.000	DPD APJI Jabar Tahap 3
425151	21/07/2025	0C7067QLV2JH46HS	800.000	LPK PT. UPTY Global Network
425151	05/08/2025	69B4748VVOCG6E3G	800.000	LPK PT. UPTY Global Network
425151	03/09/2025	E2D246U8F86IE9UP	800.000	PT. UPTY Global Network
425151	18/10/2025	F8A601JNG8RM4MQ3	5.200.000	Indonesian Chef Association
425151	18/10/2025	88D6D48VVOIRBMO0	1.600.000	Indonesian Chef Association
425151	05/11/2025	067B40NA0EBS4IOQ	10.400.000	Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan R.I
425151	14/11/2025	0F09A48VVOLLJSV6	200.000	Koperasi Aksi Sejahtera Mandiri (ASMI)
Total			51.200.000	

- l) BBPVP Bekasi sebesar Rp112.200.000 berasal dari sewa auditorium, ruang kelas dan sewa asrama:

Tabel 64 Pendapatan Sewa Auditorium, Ruang Kelas dan Sewa Asrama pada Satker BBPVP Bekasi

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Keterangan
425151	15/01/2025	E8E317QLV21DJSRG	2.000.000	Sewa auditorium
425151	15/01/2025	E8E317QLV21DJSRG	9.000.000	Sewa ruang kelas
425151	24/04/2025	805D30NA0DNGQVQ9	1.200.000	Sewa ruang kelas
425151	24/04/2025	805D30NA0DNGQVQ9	9.800.000	Sewa kamar asrama
425151	22/07/2025	6FD5D61QVDEPFLHV	400.000	Sewa ruang kelas
425151	26/09/2025	D677255DFJ2FR5R8	5.600.000	Sewa kamar asrama
425151	02/10/2025	60AB648VVOIBQ0DP	2.000.000	Sewa auditorium
425151	07/10/2025	20FCB6U8F89FUEUJ	27.200.000	Sewa kamar asrama
425151	21/10/2025	54F846U8F8A1NA8V	600.000	Sewa ruang kelas
425151	21/10/2025	54F846U8F8A1NA8V	2.000.000	Sewa auditorium
425151	03/11/2025	45DC01JNG8U6CPFJ	400.000	Sewa ruang kelas
425151	05/11/2025	9EE310NA0EBS49B8	3.000.000	Sewa aula nusantara
425151	06/11/2025	6DE396U8F8CK4BF9	12.000.000	Sewa asrama
425151	18/11/2025	F58271JNG8UGCCJS	3.000.000	Sewa Aula
425151	05/12/2025	CCE0861QVDT2U0Q2	2.000.000	Sewa auditorium
425151	05/12/2025	CCE0861QVDT2U0Q2	32.000.000	Sewa asrama
Total			112.200.000	

- m) BPVP Sorong sebesar Rp550.379.377 dengan rincian:

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp4.579.377 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Sorong

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/06/2025	250661506000230	74.745
425151	01/06/2025	250661501000700	308.946
425151	01/07/2025	259991530006500	308.946
425151	01/07/2025	259991525003110	74.745
425151	01/08/2025	259991530031970	308.946
425151	01/08/2025	259991525009060	74.745
425151	01/09/2025	259991525019430	74.745
425151	01/09/2025	259991530049500	308.946
425151	01/10/2025	259991530067570	308.946
425151	01/10/2025	259991525027720	74.745
425151	01/11/2025	259991525036960	74.745
425151	01/11/2025	259991530093280	308.946
425151	01/12/2025	259991530107610	249.150
425151	01/12/2025	259991525042390	74.745
425151	10/12/2025	259991311366400	34.881
425151	23/12/2025	250661501000660	308.946
425151	23/12/2025	250661501000050	274.065
425151	23/12/2025	250661501000080	274.065
425151	23/12/2025	250661506000020	74.745
425151	23/12/2025	250661506000200	74.745
425151	23/12/2025	250661506000090	74.745
425151	23/12/2025	250661301001140	69.762
425151	23/12/2025	250661301001220	34.881
425151	23/12/2025	250661506000150	74.745
425151	23/12/2025	250661506000050	74.745
425151	23/12/2025	250661501000480	308.946
425151	23/12/2025	250661501000170	274.065
Total			4.579.377

- (2) Penggunaan asrama, workshop, dan aula sebesar Rp545.800.000 dengan rincian terlampir.

- n) BPVP Ternate sebesar Rp626.892 berasal dari sewa rumah dinas yang telah dilakukan pemotongan melalui SPM/SP2D dengan rincian:

Tabel 66 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Ternate

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/05/2025	250621502000380	40.426
425151	01/06/2025	250621502000480	40.426
425151	01/07/2025	259991529003050	40.426
425151	01/08/2025	259991529007270	40.426
425151	01/09/2025	259991529012030	40.426
425151	01/10/2025	259991529018810	79.381
425151	01/11/2025	259991529026260	79.381
425151	02/12/2025	259991320718450	79.381
425151	03/12/2025	259991311251840	24.915
425151	12/12/2025	250621502000310	40.426
425151	12/12/2025	250621502000090	40.426
425151	12/12/2025	250621502000120	40.426
425151	12/12/2025	250621502000010	40.426
Total			626.892

- o) BBPVP Semarang sebesar Rp29.759.298 dengan rincian:

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp10.371.086 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian:

Tabel 67 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BPVP Semarang

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/06/2025	250261501001270	867.386
425151	01/07/2025	250261501001600	843.622
425151	01/08/2025	259991530021630	843.622
425151	01/09/2025	259991530041640	843.622
425151	25/09/2025	250261501000810	867.386
425151	25/09/2025	250261501000130	925.846
425151	25/09/2025	250261501001040	867.386
425151	25/09/2025	250261501000390	867.386
425151	25/09/2025	250261501000250	867.386
425151	01/10/2025	259991530061420	843.622
425151	01/11/2025	259991530085570	819.858
425151	01/12/2025	259991530109710	913.964
Total			10.371.086

- (2) Pembayaran kekurangan Rumah Dinas Kepala Bulan Oktober dan November 2025 sebesar Rp188.212 dengan NTPN 6C0C455DFJBH2OCL tanggal 31 Desember 2025.
- (3) Penggunaan ruang kelas dan asrama sebesar Rp19.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Pendapatan Sewa Rumah Kelas dan Asrama pada Satker BPVP Semarang

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425151	26/02/2025	96B581JNG83SS36E	1.000.000
425151	02/06/2025	04F3155DFIOQ72L4	15.000.000
425151	11/06/2025	A08F32G5031TP2IL	600.000
425151	16/06/2025	DB5713CIFTKEN4GG	800.000
425151	10/07/2025	187EC3CIFTN6QQ0G	1.000.000
425151	22/09/2025	9A8E255DFJ280JTB	800.000
Total			19.200.000

p) BBPVP Makassar sebesar Rp120.594.877 dengan rincian:

- (1) Sewa rumah dinas sebesar Rp5.445.652 yang telah dipotong melalui SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Satker BBPVP Makassar

Akun	Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
425151	01/06/2025	250541503000610	455.973
425151	02/05/2025	250541303001570	455.973
425151	01/07/2025	250541503000810	455.973
425151	01/08/2025	259991531005090	455.973
425151	01/09/2025	259991531008320	443.603
425151	01/10/2025	259991531012860	431.233
425151	01/11/2025	259991531015350	486.211
425151	01/12/2025	259991531020840	498.581
425151	31-DEC-25	250541503000420	455.973
425151	31-DEC-25	250541503000210	455.973
425151	31-DEC-25	250541503000060	425.048
425151	31-DEC-25	250541503000140	425.048
Total			5.445.562

- (2) Penggunaan asrama, workshop, dan aula sebesar Rp115.149.315 dengan rincian:

Tabel 70 Pendapatan Sewa Asrama, Workshop dan Aula pada Satker BPVP Makassar

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425151	21/01/2025	BABBE2G502J9R1LI	9.600.000	Sewa asrama
425151	11/02/2025	9B29D3CIFT8CSMMI	3.000.000	Sewa aula
425151	17/03/2025	77CDF0NA0DKCFFA4	3.000.000	Sewa aula
425151	14/04/2025	6F5E63CIFTEE7FBR	3.000.000	Sewa aula
425151	17/04/2025	E46526U8F7O24B72	3.000.000	Sewa aula
425151	23/04/2025	8ABD81JNG89S39PI	3.000.000	Sewa aula
425151	29/04/2025	2F0E73CIFTEOAOKG	197.920	Sewa asrama
425151	29/04/2025	2F0E73CIFTEOAOKG	284.510	Sewa asrama
425151	29/04/2025	2F0E73CIFTEOAOKG	463.875	Sewa asrama
425151	29/04/2025	2F0E73CIFTEOAOKG	432.950	Sewa asrama
425151	29/04/2025	2F0E73CIFTEOAOKG	395.840	Sewa asrama
425151	16/06/2025	8578F48VVO6R41ON	6.000.000	Sewa aula
425151	24/06/2025	E4FDB3CIFTKMHOG4	3.000.000	Sewa aula
425151	07/07/2025	440C57QLV2J3LQ23	3.000.000	Sewa aula
425151	22/07/2025	FB5CA3CIFTNK8UC0	3.000.000	Sewa aula
425151	21/08/2025	488752G503854D79	37.110	sewa rumah dinas
425151	21/08/2025	76A811JNG8LON9RM	37.110	sewa rumah dinas
425151	12/09/2025	38F8361QVDKQ1BH	41.600.000	Sewa asrama
425151	29/09/2025	57BF38N3ETC3L5LD	3.000.000	Sewa aula
425151	13/10/2025	EF2B12G503DT0DJA	3.000.000	Sewa aula
425151	27/10/2025	0BF2161QVDNSQV5S	3.000.000	Sewa aula
425151	27/10/2025	C8E4E2G503EA8LG2	3.000.000	Sewa aula
425151	03/11/2025	BE3362G503GJL69O	3.200.000	Sewa asrama
425151	12/11/2025	3EA702G503GPDV2	1.500.000	Sewa aula
425151	24/11/2025	1607A48VVOLTBTKC	6.000.000	Sewa asrama
425151	15/12/2025	493B07QLV322BK9K	6.400.000	Sewa asrama
425151	23/12/2025	BD1DF48VVOU4GLG	3.000.000	Sewa aula
Total			115.149.315	

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp2.211.270.603.800 terdiri dari:

Tabel 71 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	2.115.170.217.600
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	96.100.386.200
Jumlah		2.211.270.603.800

- a. Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp2.115.170.217.600 terdapat pada Ditjen Binapenta & PKK yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA kepada negara dengan menyetorkan pada rekening kas negara melalui SIMPONI.

Pengelolaan atas DKPTKA terdapat pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dit. PPTKA) yang diperoleh s.d. Desember 2025, atas pengajuan izin perpanjangan dan pengajuan izin baru penggunaan TKA. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, DKPTKA ditetapkan sebesar US\$100 per bulan untuk setiap TKA yang dipekerjakan.

- b. Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp96.100.386.200 terdapat pada:

Tabel 72 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02608	350079	Balai K3 Bandung	994.850.000
02608	350080	Balai Hiperkes dan KK Di Surabaya	1.000.200.000
02608	350081	Balai K3 Medan	1.618.532.000
02608	350082	Balai K3 Makassar	745.350.000
02608	350083	Balai K3 Samarinda	461.390.000
02608	350084	Balai Besar K3 Jakarta	529.895.000
02608	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	90.679.682.200
Ditjen Binwasnaker & K3			96.029.899.200
02613	451108	BPVP Samarinda	36.870.000
02613	452558	BBPVP Bekasi	31.395.000
02613	452652	BBPVP Makassar	2.222.000
Ditjen Binalavotas			70.487.000
		Total	96.100.386.200

- 1) Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp96.029.899.200 berasal dari
- Penerimaan jasa penerbitan surat keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di satuan kerja Ditjen Binwasnaker dan K3..
 - Pendapatan dari pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan pemeriksaan K3 lingkungan kerja di perusahaan seperti Promotif dan Preventif Kecelakaan Kerja dan/atau penyakit akibat kerja, kajian kondisi/perilaku di sektor UMKM, pelayanan laboratorium berupa pemeriksaan, pengujian dan analisi faktor fisika dan kimia di satuan Kerja Balai Besar K3 Jakarta, Balai K3 Samarinda, Balai K3 Bandung, Balai K3 Medan, Balai K3 Surabaya, dan Balai K3 Makassar.

Daftar Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya pada Ditjen Binwasnaker dan K3 terlampir.

- 2) Ditjen Binalavotas sebesar Rp70.487.000 terdapat pada:
- BPVP Samarinda sebesar Rp36.870.000 berasal dari setoran jasa BLK Paser atas sertifikasi skema Instalasi listrik bangunan sederhana sebesar Rp22.800.000 dan skema service sepeda motor injeksi sebesar Rp14.070.000 sesuai PKS No. 2.11/091/LP.05.01/IX/2025 Tgl. 10-09-2025 dengan NTPN 00A851JNG8RPIA2G tanggal 24 Oktober 2025.
 - BPVP Bekasi sebesar Rp31.395.000 berasal dari Kerjasama penyelenggaraan uji kompetensi program pengoperasian *industrial manufacturing system* dengan Yayasan Matsushita Gobel berdasarkan kontrak Nomor 025/MGF-MGI/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 dengan NTPN E66F455DFID4GH73 tanggal 10 Februari 2025.
 - BBPVP Makassar sebesar Rp2.222.000 berasal dari sertifikasi kompetensi jurusan las industri UNHAS dengan NTPN 1CA223CIFU30A579 tanggal 5 November 2025.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp1.450.064.500 merupakan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang terdapat pada:

Tabel 73 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02608	350082	Balai K3 Makassar	173.234.000
02608	350084	Balai Besar K3 Jakarta	203.280.000
Ditjen Binwasnaker & K3			376.514.000
02613	021212	BPVP Bandung Barat	61.813.500
02613	035636	BPVP Surakarta	40.222.000
02613	050302	BPVP Sidoarjo	14.720.000
02613	065106	BPVP Banda Aceh	72.640.000
02613	089378	BPVP Padang	37.030.000
02613	219228	BPVP Ambon	14.720.000
02613	451108	BPVP Samarinda	354.106.000
02613	452542	BBPVP Bandung	34.400.000
02613	452558	BBPVP Bekasi	111.309.000
02613	452589	BPVP Sorong	76.000.000
02613	452595	BPVP Ternate	31.420.000
02613	452609	BBPVP Semarang	91.250.000
02613	452652	BBPVP Makassar	133.920.000
Ditjen Binalavotas			1.073.550.500
		Total	1.450.064.500

a. Ditjen Binwasnaker sebesar Rp376.514.000

1) Balai K3 Makassar sebesar Rp173.234.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
pada Satker Balai K3 Makassar

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	02/07/2025	F4AEF48VVO9CDPTP	22.500.000	Pelatihan Basic Safety (K3 Dasar)
425421	11/09/2025	83CC67QLV2P6H7ON	630.000	PT. Wargi Santosa (Rafli Arisandy)
425421	11/09/2025	5AA751JNG8OFM67L	7.560.000	PT. Arlintang Dua Putri (Pelatihan Basic Safety)
425421	11/09/2025	748C155DFJ21A86V	5.040.000	PT. Almira Lintang Pratama (Pelatihan Basic Safety)
425421	15/09/2025	072FD7QLV2P7MKSF	1.260.000	PT. Almira Lintang Pratama (Pelatihan Basic Safety)
425421	24/09/2025	6590D8N3ETBU30EL	1.344.000	Pelatihan Paramedis (a.n. Chaeriah)
425421	25/09/2025	4544C61QVDKR7694	14.300.000	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis Perusahaan
425421	24/11/2025	9F85F48VVOLS9MUE	2.500.000	PT. Biota Laut Ganggang (Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
425421	27/11/2025	844B63CIFU3GVK91	12.500.000	PT. Celebes Railway Indonesia (Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
425421	04/12/2025	7CDD055DFJANM4R7	17.600.000	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis Perusahaan
425421	16/12/2025	2732148VVOONGO7S	88.000.000	Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina (Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
Total			173.234.000	

2) Balai K3 Jakarta sebesar Rp203.280.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
pada Satker Balai K3 Jakarta

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	02/07/2025	F4AEF48VVO9CDPTP	68.880.000	Pelatihan Hiperkes Dokter Universitas Trisakti
425421	11/09/2025	83CC67QLV2P6H7ON	67.200.000	Pelatihan Hiperkes Keselamatan dan Kesehatan Kerja FK USAKTI
425421	11/09/2025	5AA751JNG8OFM67L	67.200.000	FK USAKTI Pembayaran Pelatihan Hiperkes Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Total			203.280.000	

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.073.550.500 terdiri dari:

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp61.813.500

Tabel 76 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BPVP Bandung Barat

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	05/08/2025	E7D306U8F83LDS3H	2.576.000	Biaya Pelatihan
425421	26/08/2025	9FCD70NA0E3C862K	21.000.000	Biaya Pelatihan
425421	10/09/2025	C79FD2G503ALHKTF	9.920.000	Biaya Pelatihan
425421	02/10/2025	586293CIFTVUBABS	27.425.000	Biaya Pelatihan
425421	09/12/2025	D37E23CIFU64AM9C	892.500	Biaya Pelatihan
Total			61.813.500	

2) BPVP Surakarta sebesar Rp40.222.000

Tabel 77 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BPVP Surakarta

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	15/08/2025	9172B1JNG8LK7VCK	7.920.000	Pelatihan kejuruan pemeliharaan dan perbaikan AC Rumah Tangga
425421	01/09/2025	99E3E6U8F84C4IG1	5.713.000	Penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi bidang manufaktur
425421	16/09/2025	3F1733CIFTTCV11L	2.880.000	Pelatihan Ska kejuruan Plate Walder FCAW 3G-UP/PF
425421	24/09/2025	852931JNG8OQRHJP	7.800.000	Biaya pelatihan Kejuruan AC Residensial
425421	29/09/2025	3142161QVDKSAMLQ	3.680.000	Biaya pelatihan kejuruan menjahit pakaian wanita
425421	06/10/2025	DB8373CIFU02LTF2	920.000	Pelatihan kejuruan menjahit membuat pola atasan pria
425421	18/10/2025	0376D61QVDNJ49BO	7.000.000	pelatihan kejuruan administrasi perkantoran dan teknik sepeda motor
425421	03/11/2025	2CB6A6U8F8CGPBFJ	2.516.000	Pelatihan kejuruan service sepeda motor
425421	07/11/2025	52C4E7QLV2V0FJ1H	1.793.000	Pelatihan Ska kejuruan instalasi listrik bangunan sederhana
Total			40.222.000	

3) BPVP Sidoarjo sebesar Rp14.720.000 atas Jasa Pelatihan Kerja Pelatihan Refrigerasi & AC - Refrigerasi Domestik berdasarkan MOU No. 2.21/323/KS.06/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 dengan NTPN AE3DF2G50384Q7SU tanggal 20 Agustus 2025.

4) BPVP Banda Aceh sebesar Rp72.640.000

Tabel 78 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
pada Satker BPVP Banda Aceh

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	22/09/2025	3894D3CIFTTFAI17	36.800.000	Kerjasama antara BPVP Banda Aceh dengan Sentra Darussa'adah Kementerian Sosial dengan program "Carong Meusapat Disabilitas" untuk pelatihan Menjahit Pakaian dengan Mesin dgn jumlah 160JP untuk 10 org
425421	22/09/2025	3894D3CIFTTFAI17	35.840.000	Kerjasama antara BPVP Banda Aceh dengan Sentra Darussa'adah Kementerian Sosial dengan program "Carong Meusapat Disabilitas" untuk pelatihan Barista dgn jumlah 160JP untuk 8 org
Total			72.640.000	

5) BPVP Padang sebesar Rp37.030.000

Tabel 79 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BPVP Padang

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	04/09/2025	B68F92G503AKEFR8	4.991.000	Pelatihan Kerjasama Kejuruan Pariwisata Program Pembuatan Roti dan Kue Nagari Ujung Gading
425421	04/09/2025	4B1202G503AKEGU0	69.000	
425421	04/09/2025	8C5B96U8F86IFGLQ	31.970.000	
Total			37.030.000	

6) BPVP Ambon sebesar Rp14.720.000 atas Kerjasama Pelatihan AC Residential dengan NTPN BABCD0NA0EC2R3G2 tanggal 13 November 2025.

7) BPVP Samarinda sebesar Rp354.106.000

Tabel 80 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BPVP Samarinda

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	29/08/2025	5C38B3CIFTQN5519	125.440.000	Pelatihan pelatihan operator excavator 280JP Disnakertrans Kab. Donggala
425421	12/09/2025	7AD651JNG8OGP6RP	129.920.000	Pelatihan Mekanik servis alat berat 290JP
425421	26/11/2025	0CA4161QVDQJCGE	10.650.000	Uji kompetensi program pelatihan barista LPK Edukasi Multi Anugrah
425421	11/12/2025	CA25A48WOOIUL6R	20.208.000	Uji kompetensi skema plate welder SMAW 3G UP/PF Disnakertrans Prov. Kalimantan Utara
425421	22/12/2025	6CC2F6U8F8FSK2DU	16.288.000	Sertifikasi pelatihan menjahit pakaian Wanita dewasa B UPTD BLKIM Kutai Timur
425421	22/12/2025	499E661QVDTG7265	12.512.000	Sertifikasi pelatihan desain grafis muda UPTD BLKIM Kutai Timur
425421	22/12/2025	9D1063CIFU6B02FK	16.288.000	Sertifikasi pelatihan menjahit pakaian Wanita dewasa A UPTD BLKIM Kutai Timur
425421	22/12/2025	B2FDC7QLV32911H2	22.800.000	Sertifikasi pelatihan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana UPTD BLKIM Kutai Timur
Total			354.106.000	

8) BBPVP Bandung sebesar Rp34.400.000

Tabel 81 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BBPVP Bandung

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	28/01/2025	750E73CIFT5TQ6OU	21.600.000	Biaya Jasa Pelatihan PFLK Kej. Otomotif Tahun 2025 Kerjasama dengan LPK Eikou Kakehashi Indonesia
425421	14/02/2025	2FC962G502M2NDOC	12.800.000	Biaya Jasa Pelatihan PFLK Tahun 2025 Kej. Otomotif Pemeliharaan Kendaraan Ringan Klaster Chasis Kerjasama dengan PT. UPTY Global Network
Total			34.400.000	

9) BBPVP Bekasi sebesar Rp111.309.000

Tabel 82 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BBPVP Bekasi

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	26/09/2025	3E8D67QLV2PL282R	35.410.000	Kerja sama pelatihan bidang refrigerasi dengan PT Adika Jaya Engineering sesuai perjanjian kerja sama No : 008/PT.AJE-09/25 Tanggal 18 September 2025
425421	07/10/2025	4564361QVDN3HDA0	75.899.000	Kerja sama pelatihan bidang Elektronika dengan Disnaker Kabupaten Malinau sesuai perjanjian kerja sama No : 143/21/PKS/Tapem Tanggal 18 September 2025
Total			111.309.000	

10) BPVP Sorong sebesar Rp76.000.000

Tabel 83 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BPVP Sorong

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	15/10/2025	BCA248N3ETEJT4A5	20.800.000	Pembayaran Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) Kejuruan Otomotif (Sepeda motor) dari Dinas Tenaga Kerja Papua Pengunungan
425421	15/10/2025	3150861QVDNEM35G	55.200.000	Pembayaran Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) Kejuruan Menjahit dari Dinas Tenaga Kerja Papua Pengunungan
Total			76.000.000	

11) BPVP Ternate sebesar Rp31.420.000

Tabel 84 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BPVP Ternate

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	23/01/2025	417D72G502JC638S	14.700.000	Pembayaran Biaya Kerjasama Pelatihan dengan Unkhair Ternate Kej. Bisnis Manajemen Sub Kej. Digital Marketing
425421	24/09/2025	1D5908N3ETBV781R	16.720.000	Pembayaran Biaya Kerja Sama Pelatihan SMK Informatika Muhammadiyah Bacan Program Pelatihan TIK
Total			31.420.000	

12) BBPVP Semarang sebesar Rp91.250.000 terdiri dari:

- a) Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan untuk uji kompetensi Kejuruan Teknis Elektronika, Pariwisata, Otomotif dan TIK dengan NTPN 49FF455DFJ7VG8HR tanggal 14 November 2025 sebesar Rp73.050.000.
- b) Biaya pelatihan sebesar Rp18.200.000 dengan nomor NTPN EF4270JUTPI5E6UI tanggal 31 Desember 2025.

13) BBPVP Makassar sebesar Rp133.920.000

Tabel 85 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pada Satker BBPVP Makassar

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425421	12/09/2025	50D407QLV2P6JRR5	124.000.000	Pelatihan Jurusan Las Industri 25 Org x 160 Jp x 31.000
425421	24/10/2025	8FB622G503E3MVT6	7.440.000	Biaya Pelatihan PT. Bumi Jasa Utama (Kalla Transport & Logistik, Jur : Las Industri Keahlian Pengelasan SMAW 4 G Sebanyak 3 Org X 31.000 X 80 JP
425421	05/11/2025	032F58N3ETHBONGT	2.480.000	Biaya pelatihan (unhas) Jur. Las Industri 2 org x 31.000 x 40 JP
Total			133.920.000	

4. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp310.943.847 terdiri dari:

Tabel 86 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	97.406.796
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	73.537.051
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	140.000.000
Jumlah		310.943.847

a. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp97.406.796 terdapat pada:

Tabel 87 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02605	451270	Satker Ditjen PHI & JSK	96.313.271
Ditjen PHI & JSK			96.313.271
02608	350079	Balai K3 Bandung	26.463
Ditjen Binwasnaker & K3			26.463
02613	626132	Direktorat Bina Latvogan	1.067.062
Ditjen Binalavotas			1.067.062
Total			97.406.796

1) Satker Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp96.313.271

- a) Pendapatan jasa lembaga keuangan dari RPL Pengembalian BSU 2022 Bank BSI nomor 7218898739 yang disetor pada tahun 2025 dengan NTPN nomor 710E56U8F7L6ODSV pada tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp6.383.
- b) Jasa giro pada Bank BTN RPL 182 DB PHIJSTK UTK BSU BTN 25 nomor rekening 00000603-01-30-000566-7 yang telah disetor dengan Nomor NTPN 37046397D6DQ4CP1 pada tanggal 30 September 2025 sebesar Rp5.834.589.
- c) Jasa giro pada Bank Mandiri RPL 182 DB PHIJSTK UTK BSU MDRI 25 070-00-1254107-9 yang telah disetor dengan Nomor NTPN DA3375UFSM4VBCQ2 pada tanggal 25 September 2025 sebesar Rp90.472.295.
- d) Jasa lembaga keuangan dari RPL Pengembalian BSU 2022 Bank BSI nomor 7218898739 yang disetor pada tahun 2025 dengan NTPN nomor 49ED26U8F89K94ME pada tanggal 9 Oktober 2025 sebesar Rp4.

2) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp26.463 pada Balai K3 Bandung

Tabel 88 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Satker Balai K3 Bandung

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425764	28/07/2025	DFC081JNG8J18GNH	19.330	RPL 022 PS BALAI K3 BDG UTK PENGUJIAN
425764	21/08/2025	739622G50386880P	7.133	RPL 022 PS BALAI K3 BDG UTK PENGUJIAN
Total			26.463	

3) Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.067.062 terdapat pada Direktorat Bina Latvogan atas pengembalian bunga rekening:

Tabel 89 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Satker Ditjen Binalavotas

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Ket.
425764	15/12/2025	389DB48VVOON8GE0	1.007.099	RPL 182 DB BINALAVOTAS UTK MG MDRI
425764	16/12/2025	0E3C661QVDTG4C7G	59.963	RPL 182 DB BINALAVOTAS UTK MG BTN
Total			1.067.062	

b. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp73.537.051 terdapat pada:

Tabel 90 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	16.000.000
Ditjen Binapenta dan PKK			16.000.000
02613	050302	BPVP Sidoarjo	2.295.030
02613	352631	BPVP Belitung	55.242.021
Ditjen Binalavotas			57.537.051
Total			73.537.051

- 1) Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp16.000.000 berasal dari pengembalian kerugian negara berdasarkan laporan hasil ADTT Itjen No R.6/51/PW.10.00/VIII/2025 tgl 22 Agustus 2025 atas kehilangan kendaraan dinas roda 2 Honda Vario (B 3468 SQC) a.n R. dengan rincian:

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425791	30/09/2025	1E6126U8F87C125V	1.000.000
425791	13/10/2025	81A9861QVDNEJA8G	1.000.000
425791	20/10/2025	0CD6161QVDNLB1DE	1.000.000
425791	03/11/2025	D1C537QLV2UT7H2E	11.000.000
425791	03/11/2025	5E9AA1JNG8U6CF67	1.000.000
425791	04/12/2025	CB6DC0NA0EEQLS88	1.000.000
Total			16.000.000

- 2) Ditjen Binalavotas sebesar Rp57.537.051 terdapat pada:

- a) BPVP Sidoarjo sebesar Rp2.295.030 terdiri dari:

- (1) Pengembalian tunjangan kinerja berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal sebesar Rp66.380 dengan NTPN 299AB1JNG80HGNIV Tanggal 08 Januari 2025.
- (2) Pengembalian lembur pegawai berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal sebesar Rp120.650 dengan NTPN 6934548VVNNMNO3L Tanggal 08 Januari 2025.
- (3) Pengembalian Penerimaan PNBPN berdasarkan audit kepatuhan Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.108.000 dengan NTPN BBB2048VVNR23D69 Tanggal 20 Februari 2025

- b) BPVP Belitung sebesar Rp55.242.021 berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan alat selam pada tahun 2021 sesuai LHP BPK RI Nomor 67B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang disetor ke Kas Negara sebagai berikut:

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425764	03/02/2025	C84570NA0DERQFTL	50.000.000
425764	22/07/2025	7345F55DFISD3VMV	5.242.021
Total			55.242.021

- c. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar Rp140.000.000

- 1) Satker Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp125.000.000 adalah angsuran dari PT. Multidata Rencana Prima pada LHP BPK No.47/HP/XVI/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 atas pekerjaan Pengadaan Sistem Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan pd Ditjen Binwasnaker & K3 dengan bukti setor berikut:

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425793	06/02/2025	9969F1JNG83FKO69	25.000.000
425793	14/04/2025	375CE55DFJ74OCI	25.000.000
425793	16/05/2025	08E5148VVO3SHUOP	25.000.000
425793	28/05/2025	ADED861QVD90LNJ9	25.000.000
425793	25/08/2025	967827QLV2MGLTQL	25.000.000
Total			125.000.000

- 2) BPVP Sidoarjo sebesar Rp15.000.000 berupa Pengembalian Banprog Termin II TA 2024 BLKK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang dengan NTPN 026A90NA0DE5UR17 tanggal 08 Januari 2025.
5. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp2.953.969.988

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.489.969.988
425839	Pendapatan Denda Lainnya	1.464.000.000
	Jumlah	2.953.969.988

- a. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.489.969.988

Tabel 91 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	201.000.000
02601	626011	Pusat Pasar Kerja	153.637.046
		Sekretariat Jenderal	354.637.046
02604	259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	1.946.564
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	30.402.096
		Ditjen Binapenta & K3	32.348.660
02608	350079	Balai K3 Bandung	22.459.500
02608	350083	Balai K3 Samarinda	51.793.470
02608	350084	Balai Besar K3 Jakarta	31.081.890
		Ditjen Binwasnaker & K3	105.334.860
02611	452677	Barembang Ketenagakerjaan	14.453.048
		Barembang Ketenagakerjaan	14.453.048
02613	051102	BPVP Banyuwangi	66.614
02613	065106	BPVP Banda Aceh	181.490.666
02613	089378	BPVP Padang	117.376.315
02613	219228	BPVP Ambon	3.497.730
02613	352631	BPVP Belitung	927.760
02613	451026	Satker Ditjen Binalavotas	20.042.033
02613	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	659.795.256
		Ditjen Binalavotas	983.196.374
			1.489.969.988

- 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp354.637.046
- a) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp201.000.000 berdasarkan Lap. Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Internal Biro Umum No.179/PW.10.00/I/10/2023, menarik denda keterlambatan Pek. Renov. Gd. Vokasi PT. Indo Dea Internusa Tahap XII dengan NTPN F752A2G502ITLKF6 tanggal 7 Januari 2025.
- b) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp153.637.046 terdiri dari:
- (1) Denda atas Paket Pekerjaan Job Information Centre Pusat Pasar Kerja Tahun 2024 yang disetor melalui potongan SP2D Nomor 259991303001530 Tanggal 09 Januari 2025 sebesar Rp146.137.046.
- (2) Denda atas ketidaksesuaian kontrak sebesar Rp7.500.000 dengan NTPN F40E67QLV31RPDPQ tanggal 3 Desember 2025.

- 2) Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp32.348.660 terdapat pada:
- a) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp1.946.564 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Denda keterlambatan atas Perlengkapan Peserta dan Pengajar Kegiatan Pembekalan TKM Lanjutan 2025 sesuai dengan BAST Nomor 05/SJ/CV.DM/X/2025 tgl 11-10-2025 BAP No 3.1/3504/UM.02.01/BAP-PPK/X/2025 tgl 13-10 -2025 yang disetor ke Kas Negara melalui potongan SPM/SP2D Nomor 259991330297640 tanggal 16 Oktober 2025 sebesar Rp1.551.086.
 - (2) Denda keterlambatan atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kelas Ciburial sesuai BAST No 3.1/4435/UM.02.01/BAST-PPK/XII/2025 Tgl 17-12-2025 BAP No 3.1/4436/UM.02.01/BAP-PPK/XII/2025 Tgl 17-12-2025 yang disetor ke Kas Negara melalui potongan SPM/SP2D Nomor 259991330297640 tanggal 16 Oktober 2025 sebesar Rp395.478.
 - b) Satker Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebesar Rp30.402.096 terdiri dari:
 - (1) potongan denda atas renovasi ruang kerja Ditjen Binapenta dan PKK sesuai BAST Nomor: 1-2/458/UM.02.00/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024 dan Jaminan Pemeliharaan No:43.93.01.2775998.12.24 Tanggal 23 Desember 2024 dan disetor melalui SP2D Nomor 259991301000100 Tanggal 02 Januari 2025 sebesar Rp28.042.236.
 - (2) Pendapatan atas Denda Penyelesaian Pekerjaan Meubeler Ruang Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Tahun Anggaran 2024 PT Kharis Cita Prasada no SPK: SP 1-2/40/KU.02/XII/2024 dengan NTPN 2F08C3CIFT8MT0SH tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp2.359.800.
- 3) Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp105.334.860 terdapat pada:
- a) Balai K3 Bandung sebesar Rp22.459.500 atas denda pembayaran paket pengadaan jasa Konstruksi pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan yang disetor melalui potongan SP2D Nomor 259991302006380 Tanggal 06 Februari 2025.
 - b) Balai K3 Samarinda sebesar Rp51.793.470 atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan melewati batas waktu tanggal 30 Desember 2024 yang disetor melalui potongan SP2D Nomor 259991302006520 Tanggal 25 Februari 2025.
 - c) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp31.081.890 atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembayaran Rehabilitasi Gedung TUK Tahap II Balai Besar K3 Jakarta (Pekerjaan Pelapisan Dinding Facade) sesuai BAST Nomor 5.5/011/KU.02.01/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 yang disetor melalui SP2D Nomor 259991303002890 tanggal 14 November 2025.

- 4) Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp14.453.048 terdiri dari:
- Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembayaran belanja modal berupa Penambahan Fitur Aplikasi Internal - WLKP sebesar Rp967.000 yang disetor ke Kas Negara melalui potongan SP2D Nomor 259991320704530 tanggal 2 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembelian belanja modal berupa Penambahan Fitur Aplikasi Internal - Penyesuaian Fitur JKP sebesar Rp1.375.290 yang disetor ke Kas Negara melalui potongan SP2D Nomor 259991320734210 tanggal 5 Desember 2025
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial SDMA sebesar Rp164.414 yang disetor ke Kas Negara melalui potongan SP2D Nomor 259991330488730 tanggal 5 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Fullboard Meeting Penguatan Infrastruktur Jaringan dan Keamanan Data untuk Mendukung Program Magang sebesar Rp478.800 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN D25232G503JH9UV6 tanggal 3 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Adobe Cloud Pro for Teams sebesar Rp435.600 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 888AE55DFJAMH1DD tanggal 3 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan License Privilege Access Management sebesar Rp5.270.944 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN B7EA37QLV32A6JC4 tanggal 17 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Licence Platform Keamanan Observabilitas Terpadu sebesar Rp2.462.000 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN CF1BF1JNG91JF2HK tanggal 18 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Licence Service Ionic Enterprise sebesar Rp1.050.000 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 5ED0F3CIFU6C91U9 tanggal 17 Desember 2025.
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Perpanjangan Licence Perangkat Multi Hybrid sebesar Rp2.249.000 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN BA59548VVOOOM2LD tanggal 18 Desember 2025.
- 5) Ditjen Binalavotas sebesar Rp983.196.364 terdapat pada:
- BPVP Banyuwangi sebesar Rp66.614 dengan bukti setor sebagai berikut:

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425811	04/11/2025	FC3406U8F8CHRMUU	32.501
425811	05/11/2025	E5D236U8F8CJ06J3	23.975
425811	03/12/2025	8BBA48N3ETK99LLN	10.138
Total			66.614

- b) BPVP Banda Aceh sebesar Rp181.490.666 atas potongan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 259991301003730 tanggal 19 Februari 2025.
- c) BPVP Padang sebesar Rp117.376.315 atas potongan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D sesuai sesuai potongan SP2D Nomor 259991302006530 tanggal 24 Februari 2025.
- d) BPVP Ambon sebesar Rp3.497.730 atas denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pembangunan pekerjaan gedung *Talent Corner* berdasarkan BAST/BAPP Nomor 2.15/06/UM.02/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 dan 2.15/1867/UM.02/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sudah dibayarkan dengan SP2D 259991303003009 tanggal 20 Februari 2025.
- e) BPVP Belitung sebesar Rp927.760 dengan bukti setor sebagai berikut:

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425811	20/08/2025	259991310469540	69.015
425811	10/09/2025	259991340047230	22.360
425811	23/09/2025	259991340055170	152.165
425811	23/09/2025	259991340055170	154.620
425811	30/09/2025	259991310727460	92.160
425811	27/10/2025	259991320519260	437.440
Total			927.760

- f) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp20.042.033 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp270.000 pada PT Dwida Jaya Tama dengan kontrak senilai Rp.113.178.000 TA 2024 dengan NTPN 7122248VVNO51SQ8 tanggal 30 Januari 2025.
- (2) Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yang disetor melalui potongan SPD sebesar Rp19.772.033 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Tanggal	No. SP2D	Nilai (Rp)	Keterangan
425811	21/01/2025	259991303002870	2.010.467	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh PT Sinar Utama Nusantara
425811	23/01/2025	259991301003580	1.797.760	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh PT Dwida Jaya Tama
425811	03/02/2025	259991302006310	15.583.306	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh CV Gudang Solusi
425811	24/12/2025	259991340127680	380.500	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh PT Dwida Jaya Tama
Total			19.772.033	-

- g) Direktorat Bina Lemlatvok sebesar Rp659.795.256 dengan rincian terlampir.

b. Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp1.464.000.000

Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp1.464.000.000 merupakan pengenaan sanksi kepada Perusahaan yang telah melakukan pelanggaran norma penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) karena tidak memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan rincian setoran berikut ini:

Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)	Nama Perusahaan	Dasar Penetapan (Kep Dirjen)
25/06/2025	CCF731JNG8FMSMF0	18.000.000	PT. Mitsuboshi Belting Sales Indonesia	5/101/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 20 Juni 2025
30/06/2025	805482G5032GJB33	36.000.000	PT. Jomoo Technology Indonesia	5/102/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 20 Juni 2025
03/07/2025	82ADF2G5032FMMQ9	36.000.000	PT. Huaneng Metal Industry	5/101/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 20 Juni 2025
08/07/2025	E3C1F55DFIRQ06U8	36.000.000	PT. CPM Assets Indonesia Management	5/115/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025
06/07/2025	A3A3C1JNG8IKKF5T	18.000.000	PT. Santomo Green Power	5/103/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 20 Juni 2025
15/07/2025	ED79D48VVO9LG2I3	36.000.000	PT. Buluh Cawang Plantations	5/158/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 10 Juli 2025
15/08/2025	375C21JNG8LGL9HB	36.000.000	PT. Dover Chemicall	5/135/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 28 Juli 2025
25/08/2025	DF9200NA0E3B377O	36.000.000	PT. Hana Fashion Indonesia	5/148/AS.00.01/VI/2025 Tanggal 14 Agustus 2025
07/10/2025	611C21JNG8R7LVLI	36.000.000	PT. Azelis Indonesia Distribusi	5/17/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 03 Oktober 2025
31/10/2025	3CB917QLV2SO2TEC	36.000.000	PT. GEMC Machine Indonesia	5/18/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 04 Oktober 2025
07/11/2025	352D255DFJ7P24MV	12.000.000	PT. Sinar Mulia Logistic	5/29/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 03 November 2025
13/11/2025	F3CBE3CIFU396TOO	588.000.000	PT. Youpeng Informasi Teknologi	5/33/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 06 November 2025
18/11/2025	287AD1JNG8UF6B7F	144.000.000	PT. Wilmar Nabati Indonesia	5/38/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 12 November 2025
18/11/2025	59C0548VVKDAOI	144.000.000	PT. Wilmar Benih Indonesia	5/39/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 12 November 2025
18/11/2025	7B6202G503GRJC0Q	180.000.000	PT. Sentana Adidaya Pratama	5/40/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 12 November 2025
20/11/2025	EECCC1JNG8UKIU31	72.000.000	PT. Volac Wilmar Feed Ingredients Indonesia	5/41/AS.00.01/XI/2025 Tanggal 15 November 2025
Total		1.464.000.000		

c. Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp11.608.789.046 terdiri dari:

Tabel 92 Pendapatan Lain-Lain

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	326.597.305
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	9.274.474.381
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.905.172.605
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.541.702
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	96.003.053
Jumlah		11.608.789.046

Rp326.597.305 terdapat pada:

Tabel 93 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	448.628
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	33.540.948
02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	9.424.000
02601	626011	Pusat Pasar Kerja	3.841.272
Sekretariat Jenderal			47.254.848
02602	259031	Inspektorat Jenderal	668.133
Inspektorat Jenderal			668.133
02604	259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	70.300
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	45.138.717
02604	690633	BPKK Kendari	426
Ditjen Binapenta & K3			45.209.443
02605	451270	Satker Ditjen PHI & JSK	50
Ditjen PHI & JSK			50
02608	350081	Balai K3 Medan	1.092
02608	350082	Balai K3 Makassar	11.000.000
02608	350083	Balai K3 Samarinda	218.720
02608	350084	Balai Besar K3 Jakarta	55.535
02608	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	32.628.728
Ditjen Binwasnaker & K3			43.904.075
02611	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	36.943.306
Barenbang Ketenagakerjaan			36.943.306
02613	021212	BPVP Bandung Barat	1.073.000
02613	035636	BPVP Surakarta	2.273.789
02613	050302	BPVP Sidoarjo	10.372.282
02613	065106	BPVP Banda Aceh	3.402.313
02613	089378	BPVP Padang	2.421.668
02613	191206	BPVP Bantaeng	2.071.800
02613	209255	BPVP Kendari	4.915.080
02613	219228	BPVP Ambon	9.800.901
02613	230302	BPVP Lombok Timur	29
02613	352630	BPVP Pangkep	439.939
02613	352631	BPVP Belitung	914.431
02613	426531	BBPVP Serang	26.277.852
02613	451026	Satker Ditjen Binalavotas	52.141.762
02613	451094	BBPVP Medan	141
02613	452558	BBPVP Bekasi	23.260.246
02613	452595	BPVP Ternate	6.236.277
02613	452609	BBPVP Semarang	5.255.000
02613	452652	BBPVP Makassar	1.760.940
Ditjen Binalavotas			152.617.450
			326.597.305

Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai, kelebihan pembayaran tunjangan fungsional, kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, dan kelebihan gaji THR dengan bukti setor terlampir pada Lampiran *Audited* Simponi.

- b) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp9.274.474.381 terdapat pada:

Tabel 94 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	16.497.842
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	131.856.396
02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	115.456.775
02601	626011	Pusat Pasar Kerja	198.308.316
Sekretariat Jenderal			462.119.329
02602	259031	Inspektorat Jenderal	1.200.000
Inspektorat Jenderal			1.200.000
02604	259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	70.708.392
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	757.790.545
02604	626041	Direktorat Bina PKK	424.877.760
02604	690633	BPKK Kendari	3.850.000
02604	690634	BPKK Bekasi	598.890.795
Ditjen Binapenta & K3			1.856.117.492
02605	289006	Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara	1.410.000
02605	451270	Satker Ditjen PHI & JSK	749.862.441
Ditjen PHI & JSK			751.272.441
02608	350079	Balai K3 Bandung	10.184.000
02608	350081	Balai K3 Medan	34.981.900
02608	350083	Balai K3 Samarinda	1.194.582
02608	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	226.254.520
Ditjen Binwasnaker & K3			272.615.002
02611	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	240.865.893
Barenbang Ketenagakerjaan			240.865.893
02613	021212	BPVP Bandung Barat	4.965.920
02613	035636	BPVP Surakarta	5.869.838
02613	050302	BPVP Sidoarjo	15.266.500
02613	051102	BPVP Banyuwangi	731.792
02613	065106	BPVP Banda Aceh	13.705.000
02613	089378	BPVP Padang	5.346.301
02613	191206	BPVP Bantaeng	8.600.000
02613	209255	BPVP Kendari	680.000
02613	230302	BPVP Lombok Timur	2.500.000
02613	299022	Dinas Nakertrans Provinsi Banten	7.179.928
02613	352630	BPVP Pangkep	5.760.500
02613	352631	BPVP Belitung	417.171.026
02613	426531	BBPVP Serang	111.610.064
02613	451026	Satker Ditjen Binalavotas	864.636.266
02613	451094	BBPVP Medan	1.031.633.146
02613	451108	BPVP Samarinda	1.055.199.335
02613	452533	Sekretariat BNSP	206.592.429
02613	452542	BBPVP Bandung	113.002.949
02613	452558	BBPVP Bekasi	312.705.922
02613	452589	BPVP Sorong	1.600.000
02613	452595	BPVP Ternate	136.710.000
02613	452609	BBPVP Semarang	103.258.674
02613	452652	BBPVP Makassar	278.551.442
02613	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	968.323.601
02613	626132	Direktorat Bina Latvogan	18.683.591
Ditjen Binalavotas			5.690.284.224
			9.274.474.381

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian ke kas negara atas temuan BPK dan temuan Itjen pada belanja barang, pengembalian kelebihan pembayaran honorarium, pengembalian Bantuan Pembangunan BLKK, kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain dengan bukti setor terlampir pada Lampiran *Audited* Simponi.

- c) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.905.172.605 terdapat pada:

Tabel 95 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02601	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	48.506.965
02601	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	317.343.876
02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	10.113.000
Sekretariat Jenderal			375.963.841
02604	259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	450.000
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	97.685.000
02604	690633	BPKK Kendari	2.477.000
Ditjen Binapenta & K3			100.612.000
02608	350082	Balai K3 Makassar	19.405.990
Ditjen Binwasnaker & K3			19.405.990
02611	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	344.544.000
Barenbang Ketenagakerjaan			344.544.000
02613	050302	BPVP Sidoarjo	100.000.000
02613	051102	BPVP Banyuwangi	5.000.000
02613	089378	BPVP Padang	149.450.000
02613	219228	BPVP Ambon	73.447.232
02613	230302	BPVP Lombok Timur	3.861.000
02613	352630	BPVP Pangkep	96.496.010
02613	352631	BPVP Belitung	75.290.190
02613	426531	BBPVP Serang	67.195.013
02613	451026	Satker Ditjen Binalavotas	26.967.620
02613	451094	BBPVP Medan	2.719.260
02613	451108	BPVP Samarinda	3.438.750
02613	452542	BBPVP Bandung	2.322.362
02613	452609	BBPVP Semarang	17.772.726
02613	452652	BBPVP Makassar	55.853.500
02613	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	384.833.111
Ditjen Binalavotas			1.064.646.774
Total			1.905.172.605

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian ke kas negara atas temuan BPK dan temuan Itjen pada belanja modal, dan pengembalian kelebihan pembayaran dengan bukti setor terlampir pada Lampiran *Audited* Simponi.

- d) Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.541.702 terdapat pada:

Tabel 96 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02604	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	5.741.702
Ditjen Binapenta & K3			5.741.702
02613	452542	BBPVP Bandung	800.000
Ditjen Binalavotas			800.000
Total			6.541.702

- 1) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp5.741.702 terdapat setoran dari PT TASPEN karena kesalahan kode satker atas Pendapatan Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS, dan telah diajukan permohonan ralat setoran kepada PT TASPEN melalui Surat Nomor B.3/4192/KU.06/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

Tabel 97 Pendapatan setoran dari PT Taspen pada Satker Ditjen Binapenta dan PKK

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425931	10/01/2025	CA39355DFIA46A54	650.000
425931	10/02/2025	9A4600NA0DH4CDSA	650.000
425931	10/03/2025	8A7440NA0DK2IUGB	650.000
425931	10/04/2025	16E0355DFU2LPFH	650.000
425931	09/05/2025	B9CCA3CIFTH8F9K6	650.000
425931	10/06/2025	1ED402G5031NAK0T	650.000
425931	10/07/2025	1EF5848VVO9J7TR3	641.702
425931	08/08/2025	FA9670NA0E2US5P8	400.000
425931	10/09/2025	95A6261QVDKADGBU	400.000
425931	10/10/2025	6CE646U8F89MKMM1	400.000
Total			5.741.702

- 2) BBPVP Bandung sebesar Rp800.000 atas setoran dari PT TASPEN sebagai berikut:

Tabel 98 Pendapatan setoran dari PT Taspen pada Satker BBPVP Bandung

Akun	Tanggal	NTPN	Nilai (Rp)
425931	10/11/2025	F98F67QLV2V1MGV6	400.000
425931	10/12/2025	3EB841JNG91BBHH9	400.000
Total			800.000

- e) Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp96.003.053

Tabel 99 Pendapatan Anggaran Lain- Lain

Kode Es1	Kode Satker	Satker	Jumlah (Rp)
02605	451270	Satker Ditjen PHI & JSK	2.905.402
Ditjen PHI & JSK			2.905.402
02608	350079	Balai K3 Bandung	420.763
02608	350082	Balai K3 Makassar	1.161.000
02608	350083	Balai K3 Samarinda	2.466.000
Ditjen Binwasnaker			4.047.763
02613	230302	BPVP Lombok Timur	25.000
02613	426531	BBPVP Serang	89.024.888
Ditjen Binalavotas			89.049.888
Total			96.003.053

- 1) Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp2.905.402
- a) Saldo kas pada RKK DITJEN PHIJSTK KEMNAKER OPS Bank BRI nomor 2233-01-000088-30-6 per 31 Desember 2024. Saldo ini muncul karena kelebihan transaksi desimal, yang kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan setor sebesar Rp10.000 sehingga masih terdapat saldo Rp9.999 yang selanjutnya disetor menjadi pendapatan anggaran lain-lain, dibayarkan dengan NTPN 78E227QLV2AMB89J tanggal 30 April 2025.

- b) Transaksi transfer masuk pada RPL BSU 2025 Bank BNI RPL 182 DB PHIJSTK UTK BSU BNI 25 1939957841 (setoran masuk dari masyarakat) dan sudah dilakukan setor ke kas negara dengan Nomor NTPN F99847NASB9O5CO8 pada tanggal 29 September 2025 sebesar Rp2.895.403.
- 2) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp4.047.763
- a) Balai K3 Bandung sebesar Rp420.763 atas kelebihan bayar biaya akomodasi dan transportasi pengujian K3 dari perusahaan yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 930DB3CIFU6PACHQ tanggal 31 Desember 2025.
- b) Balai K3 Makassar sebesar Rp1.161.000 atas sisa saldo RPL PNBPN 2025 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN C8C3D1JNG920GTOB tanggal 31 Desember 2025.
- c) Balai K3 Samarinda sebesar Rp2.466.000 atas sisa biaya operasional pengujian K3 dari perusahaan yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 6E9AA55DFJBI4OD7 tanggal 31 Desember 2025.
- 3) Ditjen Binalavotas sebesar Rp89.049.888
- a) BPVP Lombok Timur sebesar Rp25.000 yang disetor ke Kas Negara dengan NTPN 28036522CUED11RB tanggal 31 Desember 2025.
- b) BBPVP Serang sebesar Rp89.024.888 merupakan pengembalian sisa dana kerjasama dengan UPT PPM Politeknik Caltex Riau Tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan dengan NTPN C830F3CIFTBB1S8O Tanggal 12 Maret 2025.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 100.

Tabel 100 Perbandingan Realisasi Pendapatan (Netto)
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	9.034.617.992	8.788.746.299	245.871.693	2,80
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	2.211.270.603.800	2.217.224.493.264	(5.953.889.464)	(0,27)
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	1.450.064.500	4.684.045.750	(3.233.981.250)	(69,04)
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	310.943.847	488.860.894	(177.917.047)	(36,39)
Pendapatan Denda	2.953.969.988	4.398.027.484	(1.444.057.496)	(32,83)
Pendapatan Lain-Lain	11.608.789.046	21.841.970.025	(10.233.180.979)	(46,85)
JUMLAH	2.236.628.989.173	2.257.426.143.716	(20.797.154.543)	(0,92)

Realisasi Pendapatan Netto per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.797.154.543 atau 0,92% dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember

2024. Penurunan terjadi pada seluruh akun pendapatan kecuali akun pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN yang mengalami peningkatan sebesar 2,80%.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 101.

Tabel 101 Perbandingan Realisasi Pendapatan per Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	6.266.888.470	7.543.624.820	(1.276.736.350)	(16,92)
Inspektorat Jenderal	1.868.133	150.953.085	(149.084.952)	(98,76)
Ditjen Binapenta & PKK	2.117.472.390.444	2.116.360.431.757	1.111.958.687	0,05
Ditjen PHI & JSK	850.491.164	1.075.092.027	(224.600.863)	(20,89)
Ditjen Binwasnaker & K3	98.734.647.679	110.582.611.799	(11.847.964.120)	(10,71)
Barenbang	800.128.992	1.810.774.214	(1.010.645.222)	(55,81)
Ditjen Binalavotas	12.502.574.291	19.902.656.014	(7.400.081.723)	(37,18)
JUMLAH	2.236.628.989.173	2.257.426.143.716	(20.797.154.543)	(0,92)

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Rp12.606.912.684.453

Realisasi Belanja netto Kemnaker per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.606.912.684.453 atau 82,60% dari pagu belanja sebesar Rp15.262.609.941.000.

B.2.1. Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I

Realisasi Belanja Menurut
Eselon I

Realisasi Belanja Kemnaker per 31 Desember 2025 dapat dirinci menurut Unit Eselon I sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 102.

Tabel 102 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	526.108.317.000	304.114.781.057	677.796.070	303.436.984.987	57,68
Inspektorat Jenderal	58.082.500.000	40.680.408.487	28.545.594	40.651.862.893	69,99
Ditjen Binapenta & PKK	804.120.474.000	207.879.577.723	2.329.797.728	205.549.779.995	25,56
Ditjen PHI & JSK	11.780.486.176.000	11.031.744.889.550	475.938.869.160	10.555.806.020.390	89,60
Ditjen Binwasnaker & K3	290.568.161.000	180.433.800.674	52.501.596	180.381.299.078	62,08
Barenbang Ketenagakerjaan	218.824.166.000	129.487.984.727	63.384.744	129.424.599.983	59,15
Ditjen Binalavotas	1.584.420.147.000	1.218.418.881.792	26.756.744.665	1.191.662.137.127	75,21
JUMLAH	15.262.609.941.000	13.112.760.324.010	505.847.639.557	12.606.912.684.453	82,60

Sedangkan perbandingan realisasi belanja menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 103.

Tabel 103 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	303.436.984.987	430.003.573.345	(126.566.588.358)	(29,43)
Inspektorat Jenderal	40.651.862.893	60.101.736.416	(19.449.873.523)	(32,36)
Ditjen Binapenta & PKK	205.549.779.995	775.635.579.915	(570.085.799.920)	(73,50)
Ditjen PHI & JSK	10.555.806.020.390	1.381.057.251.534	9.174.748.768.856	664,33
Ditjen Binwasnaker & K3	180.381.299.078	329.903.484.953	(149.522.185.875)	(45,32)
Barenbang	129.424.599.983	197.085.986.479	(67.661.386.496)	(34,33)
Ditjen Binalavotas	1.191.662.137.127	2.326.649.352.401	(1.134.987.215.274)	(48,78)
JUMLAH	12.606.912.684.453	5.500.436.965.043	7.106.475.719.410	129,20

Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 naik 129,20% dibandingkan 31 Desember 2024. Kenaikan signifikan terdapat pada Ditjen PHI dan JSK karena pada tahun 2025 terdapat program Bantuan Subsidi Upah.

B.2.2. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Pada Tahun 2025, Kemnaker mendapatkan alokasi belanja yang sumber dananya diperoleh dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana disajikan pada Tabel 104.

Tabel 104 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana per 31 Desember 2025

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Rupiah Murni (RM)	14.322.476.971.000	12.788.776.675.733	505.796.176.771	12.282.980.498.962	85,76
Pinjaman LN (PLN)	141.799.844.000	51.604.612.038	11.443.036	51.593.169.002	36,38
PNBP	798.333.126.000	272.379.036.239	40.019.750	272.339.016.489	34,11
JUMLAH	15.262.609.941.000	13.112.760.324.010	505.847.639.557	12.606.912.684.453	82,60

Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Netto per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 105.

Tabel 105 Perbandingan Realisasi Belanja Netto Menurut Sumber Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Sumber Dana	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Rupiah Murni (RM)	12.282.980.498.962	3.979.234.133.681	8.303.746.365.281	208,68
Pinjaman LN (PLN)	51.593.169.002	65.613.519.043	(14.020.350.041)	(21,37)
PNBP	272.339.016.489	643.495.700.483	(371.156.683.994)	(57,68)
JUMLAH	12.606.912.684.453	4.688.343.353.207	7.918.569.331.246	168,90

Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri diperoleh dari:

1. *Unicredit Bank Austria* untuk Pengembangan BPVP Maritim (*Development Maritime Vocational Training Center*) digunakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL) pada BPVP Banyuwangi Ditjen Binalavotas untuk kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Pinjaman tersebut terdaftar dengan Loan ID 239-450 dan Nomor Register 16ZSYNHA serta *Closing Date* pada 31 Desember 2026. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan Gedung Pariwisata/*Tourism* seluas 1.304 m2 dan Gedung Pengelasan/*Welding* seluas 459 m2 dan pengadaan peralatan, pekerjaan konstruksi, jasa pelatihan dan pendampingan teknis pembangunan BLK Maritim.

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi belanja sebesar Rp24.279.331.193 atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp24.406.084.000.

2. Program *Labour Market Information and Skill System Transformasion* (LISTRAF) dari *World Bank* berdasarkan *Loan Agreement* sebesar EUR132,200,000 yang dialokasikan untuk kategori 1 (*Goods, works, non-consulting services, consulting services, Incremental Operating Costs and Training for the Project*) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen. Proyek akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun mulai dari 2 Febuari 2024 sampai 31 Desember 2027.

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi belanja sebagai berikut:

Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal Kemnaker	20.059.628.000	3.311.328.798	11.443.036	3.299.885.762	16,45
Pusat Pasar Kerja	6.679.150.000	531.206.740	-	531.206.740	7,95
Sekretariat Jenderal	26.738.778.000	3.842.535.538	11.443.036	3.831.092.502	14,33
Barengbang Ketenagakerjaan	69.011.822.000	22.376.716.374	-	22.376.716.374	32,42
Barengbang Ketenagakerjaan	69.011.822.000	22.376.716.374	-	22.376.716.374	8,35
Satker Ditjen Binalavotas	6.399.782.000	418.270.000	-	418.270.000	6,54
Sekretariat BNSP	1.675.067.000	-	-	-	-
Direktorat Bina Lemlatvok	8.535.681.000	687.758.933	-	687.758.933	8,06
Direktorat Bina Latvogan	5.032.630.000	-	-	-	-
Ditjen Binalavotas	21.643.160.000	1.106.028.933	-	1.106.028.933	8,35
JUMLAH	117.393.760.000	27.325.280.845	11.443.036	27.313.837.809	23,27

Tabel 106 Ikhtisar Laporan Keuangan PHLN

		LK PLN 1	LK PLN 2
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	<i>Development Maritime Vocational Training Center</i>	<i>Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility Project</i>
2	Pemberi Pinjaman	<i>Unicredit Bank Austria AG</i>	<i>World Bank</i>
3	Nama Proyek	<i>Pengembangan Peralatan, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Pelatihan & Pendampingan Teknis BPVP Banyuwangi</i>	<i>Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility Project</i>
4	Loan ID	239-450	IBRD 9636-ID
5	No. Register	16ZSYNHA	1LYKVGAA
6	Date Sign	04 April 2023	02 Februari 2024
7	Date Effective	30-06-2023	27 Maret 2024
8	Closing Date	30-06-2026	31 Desember 2027
9	Loan Amount	€ 10.800.000,00	£132.200.000
10	Disbursement s.d 2025	€ 4.325.400,00	Rp291.752.470.000
11	Disbursement pada tahun 2025	Rp 5.424.351.000	Rp79.129.340.426
12	Disbursement pada tahun 2026	Rp 23.068.272.000	Rp1.315.878.201.000
	Disbursement pada tahun 2027		Rp1.160.662.614.562
12	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)		
	a. Belanja Pegawai	Rp -	Rp -
	b. Belanja Barang	Rp -	Rp 1.106.028.933
	c. Belanja Modal	Rp 24.279.331.193	Rp -
	d. Belanja Bansos	Rp -	Rp -
13	Neraca (Rupiah)		
	a. Aset Lancar	Rp -	Rp -
	b. Aset Tetap	Rp161.197.728.188	Rp -
	c. Aset Lainnya	Rp -	Rp -
	d. Kewajiban	Rp -	Rp -
14	Executing Agency	BPVP Banyuwangi	Sekretariat Jenderal

B.2.3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Kemnaker menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 107.

Tabel 107 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Pegawai	677.285.322.000	667.000.123.114	318.199.704	666.681.923.410	98,43
Belanja Barang	14.461.955.372.000	12.398.015.629.473	505.522.418.356	11.892.493.211.117	82,23
Belanja Modal	123.369.247.000	47.744.571.423	7.021.497	47.737.549.926	38,69
JUMLAH	15.262.609.941.000	13.112.760.324.010	505.847.639.557	12.606.912.684.453	82,60

Perbandingan Realisasi Belanja Netto Menurut Jenis Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 108 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	666.681.923.410	502.488.108.498	164.193.814.912	32,68
Belanja Barang	11.892.493.211.117	4.435.162.046.158	7.457.331.164.959	168,14
Belanja Modal	47.737.549.926	562.786.810.387	(515.049.260.461)	(91,52)
JUMLAH	12.606.912.684.453	5.500.436.965.043	7.106.475.719.410	129,20

B.2.3.1. Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Rp666.681.923.410

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp666.681.923.410 dan Rp502.488.108.498.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp666.681.923.410 atau 98,43% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp677.285.322.000.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 109 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	273.756.745.000	270.223.976.934	147.552.068	270.076.424.866	98,66
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	161.936.000	145.785.744	-	145.785.744	90,03
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	654.523.000	632.647.000	-	632.647.000	96,66
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	47.134.396.000	46.052.828.252	71.577.908	45.981.250.344	97,55
Belanja Honorarium	2.822.154.000	2.821.977.250	-	2.821.977.250	99,99
Belanja Lembur	6.246.679.000	4.986.138.000	1.051.000	4.985.087.000	79,80
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	346.508.889.000	342.136.769.934	98.018.728	342.038.751.206	98,71
JUMLAH	677.285.322.000	667.000.123.114	318.199.704	666.681.923.410	98,43

Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 110 Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	95.178.930.000	93.038.738.199	27.770.218	93.010.967.981	97,72
Inspektorat Jenderal	24.802.040.000	24.177.294.450	12.512.794	24.164.781.656	97,43
Ditjen Binapenta & PKK	67.379.606.000	65.946.774.994	39.639.442	65.907.135.552	97,81
Ditjen PHI & JSK	40.237.912.000	39.644.479.811	8.610.656	39.635.869.155	98,50
Ditjen Binwasnaker & K3	92.854.800.000	91.707.518.147	25.727.342	91.681.790.805	98,74
Barembang Ketenagakerjaan	26.877.940.000	26.115.884.696	8.407.283	26.107.477.413	97,13
Ditjen Binalavotas	329.954.094.000	326.369.432.817	195.531.969	326.173.900.848	98,85
JUMLAH	677.285.322.000	667.000.123.114	318.199.704	666.681.923.410	98,43

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 111 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	270.076.424.866	238.195.150.191	31.881.274.675	13,38
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	145.785.744	772.357.940	(626.572.196)	(81,12)
Belanja Gaji dan Tunj. Non PNS	632.647.000	284.375.000	348.272.000	122,47
Belanja Gaji dan Tunj. PPPK	45.981.250.344	23.838.962.313	22.142.288.031	92,88
Belanja Honorarium	2.821.977.250	2.779.638.900	42.338.350	1,52
Belanja Lembur	4.985.087.000	5.223.178.400	(238.091.400)	(4,56)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	342.038.751.206	231.394.445.754	110.644.305.452	47,82
JUMLAH	666.681.923.410	502.488.108.498	164.193.814.912	32,68

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 naik sebesar 32,68% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 yang karena kebijakan kenaikan gaji pegawai, tunjangan kinerja, lembur dan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil.

B.2.3.2. Realisasi Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp11.892.493.211.117

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.892.493.211.117 dan Rp4.435.162.046.158.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.892.493.211.117 atau 82,23% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp14.461.955.372.000.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 112 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	156.921.197.000	117.132.474.015	58.726.991	117.073.747.024	74,61
Belanja Barang Non Operasional	842.521.447.000	216.291.883.549	421.054.283	215.870.829.266	25,62
Belanja Barang Persediaan	26.957.684.000	21.259.848.077	2.245.000	21.257.603.077	78,86
Belanja Jasa	489.210.858.000	312.246.738.338	314.462.541	311.932.275.797	63,76
Belanja Pemeliharaan	152.238.326.000	94.431.830.499	251.886.760	94.179.943.739	61,86
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	673.264.074.000	244.086.909.350	3.383.918.045	240.702.991.305	35,75
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	27.060.483.000	13.203.766.663	123.419.362	13.080.347.301	48,34
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	161.431.503.000	109.290.792.173	700.000.000	108.590.792.173	67,27
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	11.932.349.800.000	11.270.071.386.809	500.266.705.374	10.769.804.681.435	90,26
JUMLAH	14.461.955.372.000	12.398.015.629.473	505.522.418.356	11.892.493.211.117	82,23

Sedangkan Rincian Realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 113 Rincian Realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	417.460.147.000	198.227.539.197	650.025.852	197.577.513.345	47,33
Inspektorat Jenderal	33.080.460.000	16.307.021.437	16.032.800	16.290.988.637	49,25
Ditjen Binapenta & PKK	735.740.868.000	140.933.190.618	2.286.569.311	138.646.621.307	18,84
Ditjen PHI & JSK	11.733.035.764.000	10.992.093.410.739	475.930.258.504	10.516.163.152.235	89,63
Ditjen Binwasnaker & K3	190.257.708.000	86.145.764.600	23.341.732	86.122.422.868	45,27
Bareng Ketenagakerjaan	158.246.226.000	101.513.122.993	54.977.461	101.458.145.532	64,11
Ditjen Binalavotas	1.194.134.199.000	862.795.579.889	26.561.212.696	836.234.367.193	70,03
JUMLAH	14.461.955.372.000	12.398.015.629.473	505.522.418.356	11.892.493.211.117	82,23

Realisasi belanja barang Tahun 2025, antara lain digunakan untuk:

1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
2. Pemeliharaan Mesin;
3. Operasional Petugas Keamanan (*Outsourcing*);
4. Asuransi Gedung dan Bangunan dan Alat Angkutan Bermotor;
5. Penyelenggaraan Rapat;
6. Perjalanan Dinas;

7. Pelatihan dan Sertifikasi Uji Kompetensi;
8. Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas;
9. Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Evaluasi Pengujian K3 Bidang Higiene Perusahaan dan Bahan Berbahaya.
11. FGD dan Webinar Kepatuhan Perusahaan Dalam Penerapan Norma 100 (*Self Assement*) Secara *Hybrid*.
12. Diklat PPNS Ketenagakerjaan;
13. Forum Dialog Komunitas Pemerhati Ketenagakerjaan/Kompetensi Profesionalisme JF (Komisi IX). Uji Kompetensi JF Wasnaker Dan Penguji K3.
14. Uji Kompetensi JF Wasnaker Dan Penguji K3;
15. Sosialisasi Ketenagakerjaan;
16. Adanya Langganan Bandwidth Jaringan Komunikasi Data ISP 1, Langganan Bandwidth Jaringan Komunikasi Data ISP 2, Langganan Bandwidth Jaringan Komunikasi Data ISP 3;
17. Langganan *Bandwidth* Jaringan Komunikasi Data Kantor LAVOTAS, dan Langganan *Bandwidth* Jaringan Komunikasi Data Kantor PASKER;
18. Adanya Sewa Layanan Metro P2P pada lokasi *Data Center* (DC) Kemnaker;
19. Pengadaan Solusi Otomatisasi Respon dan Orkestrasi Sistem TI Keamanan;
20. Perpanjangan *Licence Firewall Server*;
21. Program Lembaga Pelatihan Swasta.
22. Biaya Langganan Listrik, Telpon dan Air;
23. Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan;
24. Program Bantuan Padat Karya;
25. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU);
26. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
27. Program Pemagangan Nasional.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Netto per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 114 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	117.073.747.024	162.426.056.747	(45.352.309.723)	(27,92)
Belanja Barang Non Operasional	215.870.829.266	579.074.675.161	(363.203.845.895)	(62,72)
Belanja Barang Persediaan	21.257.603.077	31.166.562.834	(9.908.959.757)	(31,79)
Belanja Jasa	311.932.275.797	459.231.373.468	(147.299.097.671)	(32,08)
Belanja Pemeliharaan	94.179.943.739	153.147.257.432	(58.967.313.693)	(38,50)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.702.991.305	1.000.136.755.453	(759.433.764.148)	(75,93)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	13.080.347.301	66.680.569.996	(53.600.222.695)	(80,38)
Belanja Barang BLU	-	15.262.500	(15.262.500)	(100,00)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	108.590.792.173	325.287.442.855	(216.696.650.682)	(66,62)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	10.769.804.681.435	1.657.999.502.012	9.111.805.179.423	549,57
JUMLAH	11.892.493.211.117	4.435.165.458.458	7.457.327.752.659	168,14

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 kenaikan sebesar 168,14% dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 diantaranya disebabkan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Bantuan Subsidi Upah 2025.

Program Bantuan yang Menggunakan Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rincian Program Bantuan yang Menggunakan Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ditjen Binapenta dan PKK

Ditjen Binapenta dan PKK memiliki 3 (tiga) program bantuan untuk masyarakat sebagai berikut:

Tabel 115 Program Bantuan untuk Masyarakat pada Ditjen Binapenta dan PKK

No	Satker	Program Bantuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Direktorat Bina PKK	Bantuan TKM Pemula 2025	45.875.000.000	45.040.000.000	98,18%
2	Direktorat Bina PKK	Bantuan Padat Karya 2025	18.500.000.000	18.400.000.000	99,46%
3	BBPKK Bandung Barat	Bantuan TKM Lanjutan 2025	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00%
		JUMLAH	79.375.000.000	63.440.000.000	79,92%

a. Direktorat Bina PKK

1) Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKM Pemula) 2025

Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2025 merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang bertujuan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha pemula, membantu pencari kerja menjadi wirausaha, serta menumbuhkan usaha baru menuju skala UMKM.

Penerima bantuan adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai TKM Pemula, termasuk kelompok prioritas seperti penyandang disabilitas dan alumni pelatihan vokasi. Persyaratan utama antara lain berusia 18–64 tahun, memiliki KTP, tidak sedang bekerja atau menjadi ASN/TNI/Polri, Pensiunan dari ASN, tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA/SMK, serta belum pernah menerima bantuan serupa dalam dua tahun terakhir. Dalam satu Kartu Keluarga hanya diperbolehkan satu penerima bantuan, serta wajib memiliki akun SiapKerja dan Bizhub untuk proses pendaftaran.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp5.000.000 per orang yang digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan/atau bahan baku sesuai rencana usaha yang diajukan. Jenis usaha yang didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, jasa boga, usaha kreatif, perdagangan barang dan jasa, serta jasa perorangan seperti bengkel, pangkas rambut, dan layanan kesehatan. Besaran bantuan dan ketentuan penggunaan dana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PPK Bantuan dan penerima.

Realisasi Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula tahun 2025 sebesar Rp45.040.000.000 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp45.875.000.000. Capaian output sebanyak 8.934 orang atau 89,34% dari target 10.000 orang.

Dari total target 10.000 pendaftar Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Bizhub, sebanyak 9.175 orang dinyatakan lolos verifikasi dan memenuhi syarat. Penetapan ini terbagi dalam dua kategori melalui SK PPK Direktorat Bina PKK:

- a) TKM Pemula Reguler sebanyak 5.675 orang (SK No. 3/363/PK.03.03/X/2025).
- b) TKM Pemula Tematik Kemiskinan Ekstrem sebanyak 3.500 orang (SK No. 3/364/PK.03.03/X/2025).

Status Penyaluran dan Pencairan Dana sebagai berikut:

- Tersalurkan ke Bank sebanyak 9.008 orang.
- Berhasil Dicairkan sebanyak 8.934 orang.

- Tidak Dicairkan sebanyak 74 orang (Dana telah dikembalikan ke Kas Negara).

Selisih antara target awal dengan realisasi penerima disebabkan oleh banyaknya pendaftar yang tidak memenuhi kriteria persyaratan. Saat ini, proses memasuki tahap pemantauan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Masih terdapat sejumlah penerima yang belum mengunggah LPJ melalui Bizhub meski telah melewati batas waktu yang ditentukan.

2) Bantuan Padat Karya Tahun 2025

Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahun 2025 merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor 3/101/PK.03.00/VI/2025. Program ini bertujuan memberikan pekerjaan sementara dan tambahan penghasilan bagi masyarakat penganggur atau setengah penganggur sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan melalui kegiatan pembangunan berbasis padat karya.

Penerima bantuan dapat berupa Kelompok Masyarakat (Pokmas), Yayasan, Organisasi Masyarakat (Ormas), Pemerintah Desa/Kelurahan, atau Dinas Tenaga Kerja dengan persyaratan administratif tertentu, termasuk dokumen legalitas lembaga dan penanggung jawab yang sah. Lokasi kegiatan harus berada pada lahan milik pemerintah/fasilitas umum atau lahan masyarakat yang disetujui, tidak dalam sengketa, serta melibatkan minimal 30 pekerja lokal yang memenuhi kriteria usia 18–65 tahun, bukan ASN/TNI/Polri, dan berdomisili di wilayah pelaksanaan. Pekerja merupakan masyarakat penganggur atau setengah penganggur yang tidak sedang menerima bantuan perluasan kesempatan kerja lainnya pada tahun berjalan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000 per kegiatan yang digunakan untuk pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan rabat beton, paving blok, tanggul penahan tanah, saluran air atau irigasi, serta fasilitas pengelolaan sampah. Komposisi anggaran meliputi belanja bahan material, uang perangsang kerja (UPK), honor output kegiatan, perjalanan dalam kota, dan belanja barang non operasional lainnya. Beberapa komponen anggaran bersifat tetap sesuai petunjuk teknis dan tidak dapat diubah, serta sisa dana wajib disetor kembali ke kas negara.

Realisasi Program Bantuan Padat Karya tahun 2025 sebesar Rp18.400.000.000 atau 99,46% dari anggaran sebesar Rp18.500.000.000. Capaian output sebanyak 5.520 orang atau 92,00% dari target 6.000 orang.

Total pendaftar melalui sistem Bizhub tercatat sebanyak 8.589 lembaga/kelompok. Setelah dilakukan verifikasi online, hasil penetapan penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- Target Awal sebanyak 6.000 orang (200 lembaga).
- Hasil Verifikasi (Lolos Syarat) sebanyak 5.550 orang (185 lembaga).

Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui dua SK PPK Direktorat Bina PKK:

- Padat Karya Reguler sebanyak 165 Lembaga (SK No. 3/366/PK.03.00/X/2025).
- Padat Karya Tematik Kemiskinan Ekstrem sebanyak 20 Lembaga (SK No. 3.367/PK.03.00/2025).

Dari total lembaga yang ditetapkan, realisasi akhir berjumlah 5.520 orang (184 lembaga) karena 1 (satu) lembaga yang mengundurkan diri akibat adanya perbedaan pandangan internal kelompok, sehingga dikhawatirkan kegiatan tidak dapat berjalan maksimal.

b. BBPKK Bandung Barat

Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan Tahun 2025 merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang bertujuan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha pemula, membantu pencari kerja menjadi wirausaha, serta menumbuhkan usaha baru menuju skala UMKM.

Bantuan masyarakat dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada peserta TKM Lanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan dan pengembangan usaha para penerima bantuan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja. Untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan kegiatan tenaga kerja yang mendapat bantuan untuk menjadi TKM Lanjutan yang dilaksanakan melalui tahapan Rekrutmen, Seleksi, Pembekalan dan Pencairan. Penerima dana bantuan TKM Lanjutan Tahun 2025 ditetapkan oleh PPK Balai Besar melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat Nomor 3.1/2606/PK.03.03/IX/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan Tahun Anggaran 2025 tanggal 17 September 2025.

Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang, yang digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan/atau bahan baku sesuai rencana usaha yang diajukan. Jenis usaha yang didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, jasa boga, usaha kreatif, perdagangan barang dan jasa, serta jasa perorangan seperti bengkel, pangkas rambut, dan layanan kesehatan. Besaran bantuan dan ketentuan penggunaan dana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PPK Bantuan dan penerima. Dana bantuan ditransfer ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan oleh penerima.

Realisasi Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000.

Capaian output tercapai 1.000 orang atau 100% dari target 1.000 orang.

Berdasarkan data hingga akhir tahun 2025, status pelaporan penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- LPJ Lengkap sebanyak 982 orang senilai Rp14.730.000.000.
- LPJ Tidak Lengkap sebanyak 10 orang senilai Rp150.000.000.
- Belum Unggah LPJ sebanyak 8 orang senilai Rp120.000.000.

Terdapat rekomendasi pengembalian dana atas nama Sunil Rizaldi (ID TKML: 577836) sebesar Rp15.000.000, karena usaha yang diajukan bukan milik pribadi. Status Setoran tersebut sebagai berikut:

- Telah Disetor sebesar Rp7.500.000 dengan NTPN 4FOD38JOC7JS8OSB tanggal 10 November 2025.
- Sisa Kewajiban sebesar Rp7.500.000 belum terselesaikan hingga 31 Desember 2025.

2. Ditjen PHI dan JSK

Ditjen PHI & JSK memiliki 2 (dua) program bantuan untuk masyarakat sebagai berikut:

Tabel 116 Program Bantuan untuk Masyarakat pada Satker PHI & JSK

No	Program Bantuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	1.200.000.000.000	1.199.999.999.950	100,00%
2	Bantuan Subsidi Upah (BSU)	10.200.000.000.000	9.629.083.200.000	94,40%
	JUMLAH	11.400.000.000.000	10.829.083.199.950	94,99%

Tujuan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah. Penerima Dana Iuran Peserta adalah Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai Peserta. Pemenuhan syarat penerima Dana Iuran Peserta tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi anggaran Program JKP hingga Desember 2025 menunjukkan adanya pelampauan pagu sebagai berikut:

- Pagu Anggaran 2025 sebesar Rp1.200.000.000.000
- Total Tagihan Masuk dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.715.173.246.845.
- Tagihan Netto (Setelah Penyesuaian) sebesar Rp1.714.759.387.877.

Mengingat total tagihan melebihi pagu yang tersedia, pembayaran hanya dapat dilakukan hingga sebagian bulan September 2025 dengan rincian:

- Total Dana yang Dibayarkan sebesar Rp1.199.999.999.950 (Maksimal pagu).

- Sisa Tagihan Belum Terbayar (Carry Over) sebesar Rp514.759.387.887

Selain sisa tagihan tahun 2025, masih terdapat kewajiban pembayaran iuran JKP yang tercatat sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.140.340.788.305 sesuai revidi BPKP No PE.12.03/LHP-217/D104/2/2024 tgl 31 Desember 2024 atas tagihan JKP bulan Desember 2022 s.d. Desember 2023.

b. Bantuan Subsidi Upah

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 diberikan kepada Peserta Aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU) yang menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku bagi wilayah yang memiliki UMK/UMP di atas Rp3.500.000

Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan, yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000.

Anggaran Program BSU TA 2025 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos TK) telah disahkan melalui Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-535/AG/AG.3/2025 tanggal 18 Juni 2025. Program ini telah dilaksanakan sepenuhnya dan berakhir pada bulan September 2025. Realisasi keuangan pada akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya (Akun 526312) sebagai berikut:

- Pagu Anggaran sebesar Rp10.200.000.000.000.
- Total Realisasi sebesar Rp9.629.083.200.000.
- Persentase Capaian sebesar 94,40%.

Capaian penyaluran bantuan kepada pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

- Target Penetapan sebanyak 16.048.472 Pekerja/Buruh.
- Realisasi Penyaluran sebanyak 15.256.536 Pekerja/Buruh.
- Persentase Capaian sebesar 95,07%.

Tabel 117 Penyaluran Program BSU Tahun 2025

No	Tahap	Ditetapkan	Sukses Salur	% Sukses Salur	Gagal Salur	% Gagal Salur
A. BANK						
1	Tahap I	3.697.836	3.648.408	98,66%	49.428	1,34%
2	Tahap II	2.249.276	2.231.434	99,21%	17.842	0,79%
3	Tahap III - Bank	1.819.354	1.811.143	99,55%	8.211	0,45%
4	Tahap IV - Bank	2.494.307	2.471.354	99,08%	22.953	0,92%
Sub Total (Bank)		10.260.773	10.162.339	99,04%	98.434	0,96%
B. PT. POS INDONESIA						
1	Tahap III - PT. Pos	3.702.412	3.271.997	88,37%	430.415	11,63%
	PT. Pos Susulan I	856.009	791.219	92,43%	64.790	7,57%
2	Tahap IV - PT. Pos	1.180.316	991.533	84,01%	188.783	15,99%
	TAHAP IV SUSULAN	48.962	39.448	80,57%	9.514	19,43%
Sub Total (PT. Pos)		5.787.699	5.094.197	88,02%	693.502	11,98%
TOTAL		16.048.472	15.256.536	95,07%	791.936	4,93%

Dalam proses penyaluran BSU melalui perbankan maupun PT Pos Indonesia, terdapat kegagalan penyaluran kepada 791.936 pekerja/buruh dengan total nilai mencapai Rp475.161.600.000. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain rekening dorman serta kegagalan penyaluran melalui PT Pos Indonesia akibat penerima yang tidak ditemukan (telah mengundurkan diri atau alamat domisili tidak lengkap). Selain itu, penyaluran juga terhambat karena pekerja telah meninggal dunia atau sedang berada di pelayaran.

Dana bantuan yang gagal salur tersebut tersimpan pada Rekening Penyalur (RPL) dan telah disetorkan kembali ke kas negara. Penyetoran oleh Bank BNI, BSI, BTN, dan Bank Mandiri dilakukan pada bulan September, sedangkan pengembalian melalui Bank BRI dan PT Pos Indonesia dilakukan pada bulan Oktober.

Tabel 118 Pengembalian ke negara atas gagal salur BSU 2025

Bank Penyalur	No rekening	Tanggal Bayar	NTPN	Nilai Setoran (Rp)
BNI	1939957841	29/09/2025	F99847NASB9O5CO8	2.609.400.000
BRI	223301000302302	14/10/2025	9346545KT1R0VUV8	52.077.000.000
BSI	7777796528	26/09/2025	D56B5397D6DQ4CN7	13.200.000
BTN	00000603-01-30-000566-7	30/09/2025	37046397D6DQ4CP1	2.899.800.000
Mandiri	070-00-1254107-9	25/09/2025	DA3375UFSM4VBCQ2	1.461.000.000
Pos		01/10/2025	15A326QTCGPEJ5D5	416.101.200.000
Total				475.161.600.000

Penyaluran BSU melalui PT POS memerlukan biaya salur yang dialokasikan pada Belanja Jasa Lainnya dengan anggaran sebesar Rp117.725.000.000. Biaya salur yang sudah direalisasikan sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp70.539.531.950 atau 59,92% dari anggaran yang dibagi menjadi dua termin pembayaran:

- Pembayaran belanja barang Termin 1 sesuai Kontrak No.ADD.01 SP 100/PPK-BSU/PL.01.00/VII/2025 Tgl 18 Juli 2025 pada nomor SPM 363 tanggal 22 Juli 2025 dengan Nomor SP2D 259991330092648 sebesar Rp36.086.175.000.
- Pembayaran belanja barang Termin 2 sesuai Kontrak No.ADD.02 SP 100/PPK-BSU/PL.01.00/VIII/2025 Tgl 13 Agustus 2025 pada Nomor SPM 588 tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor SP2D 259991330155015 sebesar Rp34.453.356.950.

Program BSU 2025 mencatatkan sisa pagu anggaran pada dua akun utama, yaitu Akun 526312 (Belanja Barang Bantuan Pemerintah) sebesar Rp570.916.800.000 dan Akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar Rp47.185.468.000.

Menindaklanjuti sisa anggaran sebesar Rp618.102.268.000 tersebut, Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Kerja mengusulkan revisi anggaran untuk pengembalian ke BA BUN/Kas Negara. Usulan ini dituangkan dalam Nota Dinas No. 4/472/PR.01.00/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025, yang kemudian diperkuat melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan No. B-M/173/KU.01/X/2025 pada 20 Oktober 2025. Namun, usulan pengembalian sisa anggaran tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan melalui surat balasan No. S-703/MK.03/2025 tertanggal 6 November 2025.

3. Ditjen Binalavotas

a. Pembangunan Gedung Workshop Dan Pemberian Peralatan Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas

Bantuan diberikan kepada unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi Pondok Pesantren, Seminari, Pasraman/ Pesantian, Dharmasekka/ Pabbajja Samanera dan Shuyuan, dan Lembaga Keagamaan Non Pemerintah serta Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian kejuruan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Bentuk dan Jumlah Bantuan:

- Bantuan pembangunan gedung Workshop berupa bantuan yang diberikan dalam bentuk uang dengan pagu maksimal senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Khusus untuk wilayah Papua, bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan pagu maksimal senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bantuan Peralatan Pelatihan berupa bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dengan pagu maksimal senilai 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, tercatat realisasi bruto sebesar Rp64.850.000.000. Dari jumlah tersebut, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp700.000.000 yang berasal dari pengunduran diri dua lembaga penerima BLKK Tahap 1, yaitu Pondok Pesantren Al-Mubarakah (Kab. Cilacap) dan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (Kab. Ngada). Dengan demikian, total realisasi netto adalah Rp64.150.000.000 atau sebesar 73,91% dari total pagu anggaran senilai Rp86.792.303.000.

Pelaksanaan anggaran tahun ini sepenuhnya merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan efisiensi tersebut menyebabkan program penyaluran bantuan pada pos anggaran ini tidak dapat dilaksanakan atau dihentikan untuk mendukung penghematan.

b. Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas T.A. 2025

Penerima Bantuan adalah BLK Komunitas yang telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas dalam bentuk uang sebesar maksimal Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) per paket program pelatihan. Besaran tersebut dapat berbeda antara jenis program pelatihan karena dipengaruhi oleh kebutuhan bahan pelatihan dan harga bahan pelatihan di masing-masing jenis program pelatihan mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Estimasi Biaya Bahan Pelatihan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan program pelatihan non-desain komunikasi visual (computer operator assistant, operator komputer muda, practical office advance, dan program sejenis lainnya) jumlah besaran maksimal bantuan yang diberikan adalah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 2) Untuk kejuruan TIK dengan program pelatihan desain komunikasi visual (desain grafis, video editing, dan program sejenis lainnya) jumlah besaran maksimal bantuan yang diberikan adalah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- 3) Untuk kejuruan lain (las, listrik, menjahit, otomotif, alat berat, perkapalan, dan program sejenis lainnya) jumlah besaran maksimal bantuan yang diberikan adalah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025 senilai Rp44.440.792.173 atau 59,54% dari total anggaran Rp74.639.200.000.

Realisasi Belanja sebesar Rp44.440.792.173 terdapat pada akun 526112 (Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda). Anggaran tersebut direalisasikan pada Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi (Dit. Bina Lemlatvok) dalam bentuk penyaluran bantuan peralatan dan mesin bagi penerima bantuan BLKK Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Akun 117124 (Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat) sebesar Rp40.949.390.143. Anggaran tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin bantuan BLKK TA 2025 yang proses hibahnya masih dalam tahap penyelesaian (belum selesai dilaksanakan). Rincian peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 119 Akun 117124 (Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat)

NO	Nama Sub-Sub Kelompok	Kode	Uraian	Supplier	Total
1	Peralatan dan Mesin	1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.110/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.474.184.049
2		1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.112/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	213.300.995
3		1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 FMS BA.114/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	FATIH MAKMUR SEJAHTERA	2.003.144.850
4		1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.116/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	233.589.955
5		1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.118/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	228.474.045
6		1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.120/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
7		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.122/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
8		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.124/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
9		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.126/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
10		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.128/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
11		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.130/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
12		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.132/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
13		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.134/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.473.166.865
14		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.136/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.447.553.803
15		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.138/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.435.231.949
16		1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.140/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.403.527.164
17		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.142/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.366.970.104
18		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.144/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.032.505.396
19		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.146/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.390.156.791
20		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.148/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.400.030.924
21		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.150/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	848.085.801
22		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.152/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	3.083.718.355
23		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.154/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	476.667.300
24		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.156/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	2.254.972.104
25		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GA BA.158/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	GLORY ALBETA	22.091.597
26		1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.162/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.280.784
27		1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.164/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.336.284
28		1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.166/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.352.834
29		1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.168/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.398.444
30		1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.170/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.321.854
31		1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.172/KPIE-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	891.443.896
Grand Total					40.949.390.143

- 2) Sisa Nilai RPATA sebesar Rp3.491.402.030 merupakan nilai Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang belum menjadi utang pihak ketiga.

Tabel 120 Sisa Nilai RPATA pada Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

No	Uraian	Supplier	Total
1	BA.134/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	15.609.218
2	BA.136/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	23.413.268
3	BA.138/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	23.299.137
4	BA.140/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	38.957.972
5	BA.142/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	36.834.009
6	BA.144/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	23.229.694
7	BA.146/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	28.977.286
8	BA.148/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	19.465.178
9	BA.150/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.893.214
10	BA.3/KP/E-CAT/PPK.1/I/2026	GENCAR MATADA PERSADA	628.168.594
11	BA.1/KP/E-CAT/PPK.1/I/2026	FATIH MAKMUR SEJAHTERA	2.649.554.460
Grand Total			3.491.402.030

Namun, realisasi anggaran tidak dapat berjalan sepenuhnya karena merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan efisiensi tersebut menyebabkan program penyaluran bantuan pada pos anggaran ini dihentikan atau tidak dapat dilaksanakan seluruhnya guna mendukung penghematan nasional.

- c. Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam Paket Ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran

terdidik. Program ini dirancang sebagai jembatan (link and match) antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil industri.

Ketentuan Peserta dan Penyelenggara:

- Peserta magang merupakan WNI (memiliki NIK), lulusan Diploma/Sarjana (maksimal 1 tahun pasca-ijazah), dan terdaftar di Kemendikbudristek.
- Penyelenggara magang adalah Perusahaan yang memiliki akun SIAPkerja, terdaftar dalam Wajib Lapork Ketenagakerjaan, dan menyediakan mentor (1 mentor maksimal untuk 15 peserta).
- Kanal Pendaftaran dilakukan secara daring melalui maganghub.kemnaker.go.id.

Manfaat bagi Peserta:

- Uang Saku diberikan setiap bulan (maksimal 6 bulan) berdasarkan tingkat kehadiran, dengan besaran setara UMK/UMP yang berlaku sesuai ketentuan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.
- Peserta mendapatkan jaminan JKK (Kecelakaan Kerja) dan JKM (Kematian) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
- Peserta yang lulus akan mendapatkan Sertifikat Pemagangan sebagai bukti kompetensi.

Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025 sebesar Rp337.853.045.040 atau 75,09% dari anggaran sebesar Rp449.924.800.000 dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Pemagangan Nasional	449.924.800.000	362.548.186.819	24.695.141.779	337.853.045.040	75,09

Rincian Pengembalian sebesar Rp24.695.141.779 melalui Bank Himbara sebagai berikut:

Bank Himbara	Pengembalian (Rp)
BRI	8.708.166.439
BNI	6.127.159.091
Mandiri	7.041.087.285
BSI	2.346.003.890
BTN	472.725.074
Total	24.695.141.779

Capaian output tercatat sebanyak 100.532 peserta, atau setara dengan 100,53% dari target sebanyak 100.000 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa target program pemagangan lulusan Perguruan Tinggi telah tercapai bahkan melampaui target. Realisasi anggaran mencapai 75% dari pagu yang tersedia, sehingga terdapat deviasi fisik positif sebesar 0,53% dan deviasi keuangan sebesar -25,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efisien, dengan capaian output yang melebihi target meskipun didukung oleh realisasi anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

B.2.3.3. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp47.737.549.926

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp47.737.549.926 dan Rp562.786.810.387.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.737.549.926 atau 38,69% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp123.369.247.000.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 121.

Tabel 121 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	200.000.000	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.875.827.000	17.072.696.562	7.021.497	17.065.675.065	21,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.406.837.000	28.741.098.861	-	28.741.098.861	71,13
Belanja Modal Lainnya	4.886.583.000	1.930.776.000	-	1.930.776.000	39,51
JUMLAH	123.369.247.000	47.744.571.423	7.021.497	47.737.549.926	38,69

Sedangkan Rincian Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 122.

Tabel 122 Rincian Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	13.469.240.000	12.848.503.661	-	12.848.503.661	95,39
Inspektorat Jenderal	200.000.000	196.092.600	-	196.092.600	98,05
Ditjen Binapenta & PKK	1.000.000.000	999.612.111	3.588.975	996.023.136	99,60
Ditjen PHI & JSK	7.212.500.000	6.999.000	-	6.999.000	0,10
Ditjen Binwasnaker & K3	7.455.653.000	2.580.517.927	3.432.522	2.577.085.405	34,57
Barembang Ketenagakerjaan	33.700.000.000	1.858.977.038	-	1.858.977.038	5,52
Ditjen Binalavotas	60.331.854.000	29.253.869.086	-	29.253.869.086	48,49
JUMLAH	123.369.247.000	47.744.571.423	7.021.497	47.737.549.926	38,69

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 123.

Tabel 123 Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	-	520.000.000	(520.000.000)	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.065.675.065	229.651.593.970	(212.585.918.905)	(92,57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.741.098.861	313.664.030.925	(284.922.932.064)	(90,84)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	3.356.751.658	(3.356.751.658)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	1.930.776.000	15.594.433.834	(13.663.657.834)	(87,62)
JUMLAH	47.737.549.926	562.786.810.387	(515.049.260.461)	(91,52)

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 turun 91,52% dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024.

B.2.3.3.1. Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi belanja modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 atau 0% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000.

Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada Tabel 124.

Tabel 124 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	200.000.000	-	-	-	-
JUMLAH	200.000.000	-	-	-	-

Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 125.

Tabel 125 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per Unit Eselon I per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	200.000.000	-	-	-	-
JUMLAH	200.000.000	-	-	-	-

Belanja Modal Tanah terdapat pada Direktorat Binalemlatvok Ditjem Binalavotas sebesar Rp200.000.000 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terealisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 126 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	30 November 2025 (Rp)	30 November 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	-	199.000.000	(199.000.000)	-
JUMLAH	-	199.000.000	(199.000.000)	-

B.2.3.3.2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp17.065.675.065

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.065.675.065 dan Rp229.648.181.670.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.065.675.065 atau 21,91% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp77.875.827.000.

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin disajikan pada Tabel 127.

Tabel 127 Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.875.827.000	17.072.696.562	7.021.497	17.065.675.065	26,72
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	14.000.000.000	-	-	-	-
JUMLAH	77.875.827.000	17.072.696.562	7.021.497	17.065.675.065	21,91

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 128.

Tabel 128 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I
per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	8.348.920.000	8.338.100.593	-	8.338.100.593	99,87
Inspektorat Jenderal	200.000.000	196.092.600	-	196.092.600	98,05
Ditjen Binapenta & PKK	1.000.000.000	999.612.111	3.588.975	996.023.136	99,60
Ditjen PHI & JSK	4.507.500.000	6.999.000	-	6.999.000	0,16
Ditjen Binwasnaker & K3	7.084.148.000	2.209.666.927	3.432.522	2.206.234.405	31,14
Barembang Ketenagakerjaan	32.206.000.000	415.119.938	-	415.119.938	1,29
Ditjen Binalavotas	24.529.259.000	4.907.105.393	-	4.907.105.393	20,01
JUMLAH	77.875.827.000	17.072.696.562	7.021.497	17.065.675.065	21,91

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin antara lain digunakan untuk:

1. Pengadaan Alat Komputer;
2. Pengadaan Alat Angkutan;
3. Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga;
4. Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
5. Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan
6. Peningkatan Server dan Storage untuk backup utama pusat data;
7. Pengadaan Alat Uji K3 untuk meningkatkan fungsi tusi Satker Balai K3;
8. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kejuruan BPVP;
9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Workshop.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 129.

Tabel 129 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.065.675.065	229.648.181.670	(212.582.506.605)	(92,57)
JUMLAH	17.065.675.065	229.648.181.670	(212.582.506.605)	(92,57)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 turun sebesar 92,57% dibandingkan 31 Desember 2024.

B.2.3.3.3. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp28.741.098.861

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp28.741.098.861 dan Rp313.664.030.925.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.741.098.861 atau 71,13% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp40.406.837.000.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada Tabel 130.

Tabel 130 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.561.325.000	27.086.343.343	-	27.086.343.343	91,63
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	65.000.000	-	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	69.000.000	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10.711.512.000	1.654.755.518	-	1.654.755.518	15,45
JUMLAH	40.406.837.000	28.741.098.861	-	28.741.098.861	71,13

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 131.

Tabel 131 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	4.824.500.000	4.414.592.668	-	4.414.592.668	91,50
Ditjen Binalavotas	35.582.337.000	24.326.506.193	-	24.326.506.193	68,37
JUMLAH	40.406.837.000	28.741.098.861	-	28.741.098.861	71,13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 132.

Tabel 132 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.086.343.343	225.543.922.750	(198.457.579.407)	(87,99)
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	-	14.491.400	(14.491.400)	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	932.015.538	(932.015.538)	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	11.931.920.405	(11.931.920.405)	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	197.734.993	(197.734.993)	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.654.755.518	75.043.945.839	(73.389.190.321)	(97,79)
JUMLAH	28.741.098.861	313.664.030.925	(284.922.932.064)	(90,84)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 turun sebesar 90,84% dibandingkan per 31 Desember 2024.

B.2.3.3.4. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal
Jalan Irigasi dan Jaringan
Rp0

Realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.800.277.158.

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Irigasi dan Jaringan yang awalnya dianggarkan sebesar Rp989.624.000 telah dilakukan revisi menjadi Rp0 sehingga tidak ada lagi pengadaan/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 133.

Tabel 133 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	1.458.646.458	(1.458.646.458)	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	-	23.610.000	(23.610.000)	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	-	127.061.700	(127.061.700)	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	-	713.350.000	(713.350.000)	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	1.034.083.500	(1.034.083.500)	(100,00)
JUMLAH	-	3.356.751.658	(3.356.751.658)	(100,00)

B.2.3.3.5. Realisasi Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp1.930.776.000

Realisasi belanja modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.930.776.000 dan Rp6.194.929.128.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.930.776.000 atau 39,51% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp4.886.583.000.

Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada Tabel 134.

Tabel 134 Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	3.021.078.000	116.067.900	-	116.067.900	3,84
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.865.505.000	1.814.708.100	-	1.814.708.100	97,28
JUMLAH	4.886.583.000	1.930.776.000	-	1.930.776.000	39,51

Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 135.

Tabel 135 Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya per Unit Eselon I
per 31 Desember 2025

Unit Es1	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	295.820.000	95.810.400	-	95.810.400	32,39
Ditjen PHI & JSK	2.705.000.000	-	-	-	-
Ditjen Binwasnaker & K3	371.505.000	370.851.000	-	370.851.000	99,82
Bareng Ketenagakerjaan	1.494.000.000	1.443.857.100	-	1.443.857.100	96,64
Ditjen Binalavotas	20.258.000	20.257.500	-	20.257.500	100,00
JUMLAH	4.886.583.000	1.930.776.000	-	1.930.776.000	39,51

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 136.

Tabel 136 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Modal Lainnya	116.067.900	9.389.291.934	(9.273.224.034)	(98,76)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.814.708.100	6.205.141.900	(4.390.433.800)	(70,75)
JUMLAH	1.930.776.000	15.594.433.834	(13.663.657.834)	(87,62)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Aset Lancar

Rp670.741.692.731

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp670.741.692.731 dan Rp829.956.654.974.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	263.374.984	(263.374.984)	(100,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	41.168.638	22.988.940	18.179.698	79,08
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	-	107.461.663.718	(107.461.663.718)	(100,00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	23.134.170	-	23.134.170	-
Piutang Bukan Pajak	623.783.157.587	627.740.714.006	(3.957.556.419)	(0,63)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(3.118.899.144)	3.138.878.710	19.979.566	(0,64)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	620.664.258.443	624.601.835.296	(3.937.576.853)	(0,63)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	62.642.021	(62.642.021)	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	-	313.210	313.210	-
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	-	62.328.811	(62.328.811)	-
Persediaan	50.013.131.480	97.544.463.225	(47.531.331.745)	(48,73)
Jumlah	670.741.692.731	829.956.654.974	-	(19,18)

C.1.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kemnaker per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp263.374.984.

Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 138 Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	263.374.984	(263.374.984)	(100,00)
JUMLAH	-	263.374.984	(263.374.984)	(100,00)

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 139 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binalavotas	-	263.374.984	(263.374.984)	(100,00)
JUMLAH	-	263.374.984	(263.374.984)	(100,00)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp263.374.984 terdapat pada Direktorat Binalematvok Ditjen Binalavotas dan telah disetor ke Kas Negara pada tahun 2025 dengan NTPN F3C323CIFT5BDHPE tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp155.053.000 dan NTPN D0E516QTC96GRESM tanggal 17 Januari 2025 sebesar Rp108.321.984

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp41.168.638

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi Kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.168.638 dan Rp22.988.940.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas seluruhnya berasal dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada masing-masing Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 140 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	174.755	-	174.755	-
Ditjen PHI & Jamsos	2.000.000	1.016.368	983.632	96,78
Ditjen Binalavotas	38.993.883	21.972.572	17.021.311	77,47
Total	41.168.638	22.988.940	18.179.698	79,08

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.168.638 terdapat pada:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp174.755

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp174.755 terdapat pada satuan kerja Politeknik Ketenagakerjaan yang berasal dari pengembalian belanja yang pada tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara. Setoran dilakukan pada tanggal 08 Januari 2026 dengan NTPN D4AB67NAV0R3UQSE.

2. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp2.000.000

Saldo Kas Lainnya merupakan saldo kas pada RPL Pengembalian BSU 2021 Bank BRI Nomor 223301000180302 per 31 Desember 2025 berupa pengembalian dana BSU TA 2021 dan belum disetor ke Kas Negara.

3. Ditjen Binalavotas sebesar Rp38.993.883

Saldo Kas Lainnya Pada Ditjen Binalavotas berasal dari uang persediaan, dan juga pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja dengan saldo yang terdapat pada:

Tabel 141 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Pada Ditjen Binalavotas

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
050302	BPVP Sidoarjo	12.745.140
451026	Satker Ditjen Binalavotas	1.019.622
452589	BPVP Sorong	9.236.778
452595	BPVP Ternate	1.647.378
452652	BBPVP Makassar	4.390.352
626132	Direktorat Bina Latvogan	9.954.613
Total		38.993.883

a. BPVP Sidoarjo sebesar Rp12.745.140

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp12.745.140 terdiri dari:

- 1) Pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2025 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 10 Februari 2026, masing-masing sebesar Rp196.387 dengan NTPN 85NO855DFRN51ULN dan Rp694.753 dengan NTPN 93AAF55DFRN51047.
- 2) Pengembalian uang makan PPPK bulan Desember 2025 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 10 Februari 2026 sebesar Rp1.744.000 dengan NTPN A357EONAOMR70UUK.
- 3) Pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2025 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 10 Februari 2026 sebesar Rp10.110.000 dengan NTPN F4F043CIG6C7VTB.

b. Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.019.622

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.019.622 merupakan saldo pada rekening Satker Disnaker Provinsi Riau (099006). Rekening dimaksud telah ditutup sesuai surat permohonan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2026 kepada PT Bank Mandiri dan sisa saldo telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN 462552G50C6A98QQ tanggal 29 April 2026.

c. BPVP Sorong sebesar Rp9.236.778

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada BPVP Sorong sebesar Rp9.236.778 berasal utang pajak tahun 2025 yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Setoran pajak dilakukan pada tahun 2026 dengan bukti setor sebagai berikut:

- 1) NTPN 02B244F9AOOGJI5V tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp6.958.050.
- 2) NTPN 865CC5BNS9BCJI1C tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp210.178.
- 3) NTPN 637170TJB5S89U63 tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp455.400.
- 4) NTPN FF38480VA9BV2QNL tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp1.613.150.

d. BPVP Ternate sebesar Rp1.647.378

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada BPVP Ternate sebesar Rp1.647.378 berasal utang pajak tahun 2025 yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Setoran pajak dilakukan pada tahun 2026 dengan bukti setor sebagai berikut:

- 1) NTPN 98E112MEASRLSOSJ tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp1.541.450.
- 2) NTPN 43DAB3IRRP8292J2 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp85.928.

e. BBPVP Makassar sebesar Rp4.390.352

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada BBPVP Makassar sebesar Rp4.390.352 berasal dari uang makan PNS di Satuan Pelayanan yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2025 dan masih berada di brankas Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, dana tersebut telah dibayarkan kepada pegawai pada bulan Januari 2026.

f. Dit. Bina Latvogan sebesar Rp9.954.613

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada Dit. Bina Latvogan sebesar Rp9.954.613 berasal dari bunga bank pada rekening penampungan Program Pemagangan Dalam Negeri dan disetor ke Kas Negara dengan bukti setor sebagai berikut:

- 1) NTPN 88A840NA0MO4JAQA tanggal 07 Januari 2026 sebesar Rp762.131.
- 2) NTPN 675146U8FGOQBDHN tanggal 06 Januari 2026 sebesar Rp9.092.482.
- 3) Terdapat dana yang masuk dari rekening yang tidak dikenal sebesar Rp100.000. Dana tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.988.940 telah disetor ke Kas Negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Satker Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp1.016.368 terdiri dari:

- a. Saldo Kas pada yang berasal dari pengembalian program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) untuk Pengembalian BSU 2021 pada Rekening Bank BNI nomor 1448275583 per 31 Desember 2024 disetor ke Kas Negara dengan NTPN E707A6U8F7L6OD4L tanggal 24 Maret 2025.
- b. Saldo Kas pada yang berasal dari pengembalian program BSU Tahun 2022 pada RPL untuk Pengembalian BSU 2022 pada Rekening Bank BSI nomor 7218898739 per per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.369 disetor ke Kas Negara dengan NTPN 710E56U8F7L6ODSV tanggal 24 Maret 2025.
- c. Saldo kas pada RKK DITJEN PHIJSTK KEMNAKER OPS Bank BRI Nomor 2233-01-000088-30-6 per per 31 Desember 2024. Saldo ini muncul karena kelebihan transaksi desimal, yang kemudian BP melakukan setor sebesar Rp10.000 sehingga masih terdapat saldo Rp9.999 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN 78E227QLV2AMB89J tanggal 24 April 2025.

2. Ditjen Binalavotas sebesar Rp21.972.572 terdapat pada:

- a. BPVP Bandung Barat sebesar Rp9.119.742 berasal dari pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2024. Setoran pajak dilakukan pada tahun 2025 dengan rincian:

Tabel 142 Setoran atas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada BPVP Bandung Barat 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tanggal	No. Dokumen	Jumlah Disetor (Rp)
1	Pembelian perlengkapan peserta (tas peserta) PBK NB UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	98F881PLT966J7H	422.400
		09/01/2025	FCB68746S8KSC2OT	57.600
2	Biaya pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi PBK UPTD Binaan	09/01/2025	A4DEF00QTJUSQUMG	67.800
3	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan komputer)	09/01/2025	4D3F30T8DEHG102B	141.750
4	Penggandaan modul kegiatan PBK Non Boarding UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	08A043IGSUBBQL93	704.000
		09/01/2025	C7F550T8DEK6A8E5	96.000
5	Pembelian perlengkapan peserta (tas) PBK MTU UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	3FFAA5BBSJG5DK25	221.200
		09/01/2025	F065B4EUCOTOQAQG	28.800
7	Penggandaan modul kegiatan PBK MTU UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	780CC746S8KV1K2F	352.000
		09/01/2025	222995BBSJG60V3Q	48.000
8	Perlengkapan peserta (alat tulis) kegiatan PBK MTU UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	D27D84EUCOTQUJEV	52.800
		09/01/2025	2DF4E2M3D3P1E3LP	7.200
9	Belanja komputer supply kegiatan PBK UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	91E811PLT96JMV3F	330.000
		09/01/2025	1B180746S8KTA7J3	45.000
10	Belanja ATK kegiatan PBK UPTD BLK Kab. Bandung Barat	09/01/2025	B82F12M3D3OTALNK	330.000
		09/01/2025	8228300QTK1N60GB	45.000
11	Belanja penggandaan kegiatan PBK Non Boarding UPTD BLK Kab. Subang	09/01/2025	3308E5BBSJG2C3UM	564.865
		09/01/2025	6A8160T8DEK41Q2L	77.027
12	Belanja pelaporan kegiatan PBK Non Boarding UPTD BLK Kab. Subang	09/01/2025	019780T8DEK9OERR	470.721
		09/01/2025	3E87E00QTK1O7QFB	64.189
13	Belanja perlengkapan peserta PBK NB Tahap I UPTD BLK Kota Cirebon	09/01/2025	437061PLT942843T	469.216
		09/01/2025	0C9320T8DEHJP5Q3	63.984
14	Belanja penggandaan modul PBK NB Tahap I UPTD BLK Kota Cirebon	09/01/2025	C45981PLT944PHJQ	625.680
		09/01/2025	19A713IGSU8SJ0GQ	85.320
15	Belanja penggandaan modul PBK Tahap 4 UPTD BLK Kota Cirebon	09/01/2025	5BD7000QTJVEQCSE	1.182.720
		09/01/2025	7F84E2M3D3MIKK7U	161.280
16	Belanja perlengkapan peserta PBK Tahap 4 BPVP Bandung Barat	09/01/2025	F0C042M3D3OQSMJQ	938.432
		09/01/2025	47AE64EUCOTJC7HJ	127.968
17	Belanja ATK administrasi kegiatan PBK Tahap 4 UPTD BLK Kota Cirebon	09/01/2025	749215BBSJG0UD2H	170.060
		09/01/2025	544EF5BBSJG0IC98	23.190
18	Belanja komputer supply kegiatan PBK Tahap 4 UPTD BLK Kota Cirebon	09/01/2025	090934EUCOTL7MTJ	140.800
		09/01/2025	102E42M3D3OS4KPR	19.200
19	Pekerjaan pengadaan laundry PBK Boarding Batch 10 BPVP Bandung Barat	09/01/2025	8D1D700QTK1KS27Q	95.040
20	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan printer) BPVP Bandung Barat	09/01/2025	0A2CE5BBSJDFATMD	313.500
21	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan printer dan komputer) BPVP Bandung Barat	09/01/2025	5A3BF4EUCOV2H6OE	577.000
Jumlah				9.119.742

- b. BPVP Surakarta sebesar Rp10.000.000 yang berasal dari uang saku Pelatihan Berbasis Kompetensi yang belum dibayarkan kepada peserta pelatihan. Pada tahun 2025, uang saku tersebut telah disalurkan kepada peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. BPVP Ternate sebesar Rp2.852.830 berasal dari pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2024. Setoran pajak dilakukan pada tahun 2025 dengan rincian:

Tabel 143 Setoran atas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada BPVP Ternate 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tanggal	No. Dokumen	Jumlah Disetor (Rp)
1	PPH Biaya Jamuan Makan Tamu	07/02/2025	07FC5746V7BDM00E	2.880
2	Pungut Pajak PPH 23 dan PPN Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Penggadaan	07/02/2025	332O03IGVT1S54TA	902.000
3	Pungut Pajak PPH 23 dan PPN Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Penggadaan	07/02/2025	E2CAF67PFCP1AM1A	123.000
4	Pungut Pajak PPH 23 Biaya pembelian konsumsi rapat-rapat biasa dan Pengecekan dokumen untuk keperluan Audit ISO sistem manajemen Mutu.	07/02/2025	74E1B00R0IOAIHRT	11.400
5	Pajak Uang Makan ASN Bulan Desember Tahun 2024 Pada Kantor BPVP Ternate	06/01/2025	3EOC12M3D34NG9DP	1.687.750
6	Pajak Uang Makan PPPK Bulan Desember Tahun 2024 Pada Kantor BPVP Ternate	06/01/2025	64A060T8DDVU6S86	125.800
Total Kas Lainnya dan Setara Kas BPVP Ternate				2.852.830

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar
Dimuka (*Prepaid*)
Rp0

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp107.461.663.718.

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2025 seluruhnya berasal dari akun Belanja Barang Dibayar Di Muka.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Menurut Eselon I sebagai berikut:

Tabel 144 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binapenta & PKK	-	105.537.884.349	(105.537.884.349)	(100,00)
Ditjen Binalavotas	-	1.923.779.369	(1.923.779.369)	(100,00)
JUMLAH	-	107.461.663.718	(107.461.663.718)	(100,00)

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Menurut Satuan Kerja disajikan sebagai berikut.

Tabel 145 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Menurut Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
02604	259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	-	5.651.714.000	(5.651.714.000)	(100,00)
02604	626041	Direktorat Bina PKK	-	99.886.170.349	(99.886.170.349)	(100,00)
Ditjen Binapenta & PKK			-	105.537.884.349	(105.537.884.349)	(100,00)
02613	452542	BBPVP Bandung	-	129.709.892		
02613	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	-	1.794.069.477	(1.794.069.477)	(100,00)
Ditjen Binalavotas			-	1.923.779.369	(1.794.069.477)	(93,26)
JUMLAH			-	107.461.663.718	(107.331.953.826)	(99,88)

Sebagai implementasi PMK 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bahwa akun Belanja Barang Dibayar Dimuka yang berasal dari Belanja Bantuan Untuk Masyarakat tidak disajikan pada Neraca Laporan Keuangan, seluruh satuan kerja yang memiliki akun Belanja Dibayar Dimuka melakukan jurnal koreksi sehingga saldo per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp0 (nihil).

Selanjutnya monitoring atas Bantuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum diperoleh Laporan Pertanggungjawabannya diungkapkan pada Pengungkapan Lainnya.

C.1.4. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak entitas tapi belum diterima uangnya atau belum ditagih sampai akhir periode akuntansi.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp23.134.170 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.134.170 terdapat pada Sekretariat Jenderal. Pendapatan tersebut berasal dari penyewaan tanah dan bangunan kepada PT Pegadaian untuk “The Gade Coffee and Gold” yang berlokasi di Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan seluas 30 m². Nilai sewa ditetapkan sebesar Rp83.283.000 untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 1 Maret 2025 berdasarkan Surat Persetujuan KPKNL Jakarta III Nomor S-352/MK/KNL.0703/2025 tanggal 13 November 2025. Dengan demikian, pendapatan sewa yang diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima untuk periode 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.134.170.

Tabel 146 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pada Sekretariat Jenderal

Harga Sewa untuk 3 Tahun	:	83.283.000
Harga Sewa Per Tahun (3 Tahun)	:	27.761.000
Harga Sewa Per Bulan (12 Bulan)	:	2.313.417
Harga Sewa 10 Bulan (1 Maret - 31 Desember 2025)	:	23.134.170

PT. Pegadaian telah melakukan pembayaran atas sewa dimaksud pada tanggal 30 April 2026 dengan NTPN 1F78D0NA0N1N1G9C sebesar Rp32.387.833 untuk masa sewa 1 Maret 2025 s.d. 30 April 2026.

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan

Pajak

Rp623.783.157.587

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp623.783.157.587 dan Rp627.740.714.006 yang seluruhnya berupa Piutang Lainnya.

Tabel 147 Rincian Piutang Lainnya Menurut Eseon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /	%
Sekretariat Jenderal	82.440.714	335.881.677	(253.440.963)	(75,46)
Inspektorat Jenderal	-	1.868.133	(1.868.133)	(100,00)
Ditjen Binapenta & PKK	621.244.246.929	625.458.455.127	(4.214.208.198)	(0,67)
Ditjen PHLD & Jamsos	779.776.085	303.387.620	476.388.465	157,02
Ditjen Binwasnaker dan K3	44.599.682	-	44.599.682	-
Barenbang	128.115.447	127.813.454	301.993	0,24
Ditjen Binalavotas	1.503.978.730	1.513.307.995	(9.329.265)	(0,62)
JUMLAH	623.783.157.587	627.740.714.006	(3.957.556.419)	(0,63)

1. Sekretariat Jenderal

Piutang Lainnya pada Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp82.440.714 dan Rp335.881.677.

Mutasi Piutang Lainnya Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 148 Mutasi Piutang Lainnya Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025

No	Kode Satker	Satker	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	450938	Satker Sekretariat Jenderal	209.887.902	26.576.057	209.887.902	26.576.057
2	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	125.993.775	56.951.389	127.080.507,00	55.864.657
		JUMLAH	335.881.677	83.527.446	336.968.409	82.440.714

a. Satker Sekretariat Jenderal

Mutasi Tambah:

Piutang Lainnya pada satker Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.576.057 terdiri dari:

- 1) Piutang Lainnya sebesar Rp6.721.328 merupakan pengembalian belanja TA 2025 atas Void BAST Nomor SPBy 08283/PB/450938/2025 tanggal 26 Desember 2025. Piutang ini sudah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN FD8266U8FGPA8FSL tanggal 22 Januari 2026.
- 2) Piutang Lainnya sebesar Rp19.854.729 berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor/Ramp Gedung TA 2025 yang dilaksanakan oleh PT Rim Konsultan Indonesia. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi akibat kesalahan perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada item pekerjaan *Railing Stainless Steel 304* dengan volume pekerjaan sebesar 12,70 m. Harga satuan pekerjaan yang semula ditetapkan sebesar Rp2.860.000/m harus dikoreksi menjadi Rp1.296.635,53/m. Atas

kelebihan pembayaran tersebut telah dibentuk Piutang Lainnya sebesar Rp19.854.729 dan telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN FD4E361QVMFM81OA pada tanggal 17 April 2026.

Sedangkan Piutang Lainnya pada satker Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2024 sebesar Rp209.887.902 seluruhnya telah disetor ke Kas Negara dengan rincian:

- 1) Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2024 pada anak satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp24.153.748 yang disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149 Setoran atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Bulan Desember TA 2024

No	Penyetor	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Biro Kerja Sama	07/01/2025	663CA3CIFT5A3AOS	2.428.225
2	Biro Kerja Sama	07/01/2025	01C456U8F7EROUFN	183.072
3	Biro Keuangan dan BMN	08/01/2025	4F3321JNG80HFG47	2.187.937
4	Biro Keuangan dan BMN	08/01/2025	2BC337QLV218ATJG	91.903
5	Biro Keuangan dan BMN	08/01/2025	40A8E2G502ITSSKD	1.573.284
6	Biro Umum	08/01/2025	CE8AD55DFIA35CKG	9.674.193
7	Biro Umum	08/01/2025	DCBCA2G502ITUCMM	149.983
8	Biro Organisasi dan SDMA	08/01/2025	2525848VVNNMNP1V	4.984.810
9	Biro Humas	16/01/2025	69B4C3CIFT5HTEB5	2.880.341
Total				24.153.748

- 2) Kelebihan pembayaran Daftar Pengeluaran Riil pada perjalanan dinas tahun anggaran yang lalu sebesar Rp19.581.200 dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tahun 2025 dengan rincian:

Tabel 150 Setoran atas Kelebihan Pembayaran Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas TAYL pada Sekretariat Jenderal

No	Unit	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Biro Keuangan dan BMN	02/01/2025	558FC2G4VPC1R93K	11.483.200
2	Biro Kerja Sama	05/02/2025	ADF5E61QV3LJF8LR	8.098.000
Total				19.581.200

- 3) Tindak lanjut atas hasil audit kepatuhan Program Dukungan Manajemen pada Biro Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.576.554 dengan penyetoran ke kas negara pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 151 Setoran atas Hasil Audit Kepatuhan Program Dkungan Manajemen
Biro Umum TA 2024

No	Unit	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	PT Turacon Wirasta	08/01/2025	2BC337QLV218ATJG & 40A8E2G502ITSSKD	4.347.000
2	PT Viasta Sentral Prima	08/01/2025	4F3321JNG80HFG47	4.465.181
3	PT Falah Eka Cahaya	08/01/2025	2525848VVNNMNP1V	2.288.497
4	PT Mega Kreasi Bersinar	08/01/2025	CE8AD55DFIA35CKG & DCBCA2G502ITUCMM	1.460.000
5	PT Ardiatun Jaya Saing	07/01/2025	663CA3CIFT5A3AOS & 01C456U8F7EROUFN	72.000
6	PT Locita Maha	31/01/2025	512617QLV21V0TOH	16.974.523
7	PT Sutmarindo Jaya Mandiri	31/01/2025	673A51JNG8185HSO	4.953.225
8	PT Dalika Maju Mandiri	03/02/2025	C89A93CIFT60VSVB	78.243.378
9	PT Alexis Cipta Furniture	31/01/2025	794156U8F7FIJUQG	49.772.750
Total				162.576.554

- 4) Pengembalian pembayaran iuran BPJS Kesehatan PPNPN pada Biro Kerja Sama sebesar Rp3.576.400 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152 Setoran atas Pengembalian Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PPNPN
pada Biro Kerja Sama

No	Unit	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Biro Kerja Sama	14/01/2025	2BC337QLV218ATJG & 40A8E2G502ITSSKD	255.200
2	Biro Kerja Sama	14/01/2025	4F3321JNG80HFG47	1.531.200
3	Biro Kerja Sama	14/01/2025	2525848VVNNMNP1V	1.790.000
Total				3.576.400

b. PPSDM Ketenagakerjaan

Piutang Lainnya pada satker PPSDM Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.864.657 setoran pengembalian atas temuan Inspektorat Jenderal yang telah disetorkan ke kas negara pada tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153 Setoran Pengembalian atas Temuan Inspektorat Jenderal
Pada PPSDM Ketenagakerjaan TA 2025

No	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	29/01/2026	811A055DFRKO7PGH	3.449.772
2	02/03/2026	2B04149001571FAG	14.850.000
3	10/02/2026	0C9821JNGHDE0H1F	3.750.584
4	10/02/2026	E29590NA0MR1JKRA	8.203.077
5	27/02/2026	B600B7QLVBEOK284	4.145.000
6	27/02/2026	7A6291JNGHE1P2M9	286.651
7	27/02/2026	FA19A7QLVBEOAQU	1.291.100
8	06/02/2026	296673CIG6I6QKH3	177.050
9	06/02/2026	0211D490014J7KKI	2.250.000
10	16/04/2026	8E4B37QLVBKEUE68	4.200.000
11	16/04/2026	4597A6U8FH22HA39	4.067.700
12	16/04/2026	69E6D3CIG6FVDOFB	4.490.955
13	13/04/2026	60D931JNGHJF1RV9	4.702.768
Total			55.864.657

Sedangkan Piutang Lainnya pada satker PPSDM Ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp125.993.775 telah seluruhnya disetor ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 154 Setoran Atas Piutang Lainnya Pada PPSDM Ketenagakerjaan
Per 31 Desember 2024

No	Penyetor	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengembalian Kelebihan Honor Pengelola Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, TA 2024	27/03/2025	BCFEF6U8F7LC8BNO	4.636.000
2	Pengembalian kelebihan pembayaran honor KPA, TA 2024	27/03/2025	487C43CIFTBQKBD3	4.788.000
3	Pengembalian kelebihan mesin pompa air, TA 2024	27/03/2025	6A88E0NA0DKLDB29	2.435.000
4	Pengembalian Terdapat Kekurangan Volume Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Pembelian Meubelair	27/03/2025	1C2057QLV27OL53Q	7.678.000
5	Pengembalian terhadap Kekurangan Volume Pembelian Pemeliharaan dan Perlengkapan Asrama, CV Jaya Famama Diva	27/03/2025	F29A00NA0DKLD4BS	6.000.000
6	Pengembalian terhadap kemahalan harga pembelian pupuk organik CV Almahera Jaya	27/03/2025	79C6F7QLV27OL0RP	22.500.000
7	Pengembalian Paket Pengadaan langsung EO di Ibis Style Grand Central Bandung (Rakor)	27/03/2025	39C000NA0DKLD0E4	9.450.568
8	Pengembalian Pengadaan atas pembelian ATK CV Sibar Spartan dan CV Mentari Excellent	27/03/2025	C42603CIFTBQJUH3	54.501.552
9	Pengembalian karena terdapat pemahalan harga terhadap Paket Meeting Fullboard di Ibis Style Bogor	27/03/2025	4D7EA6U8F7LC7A8F	200.000
10	Pengembalian Kekurangan Volume Pada Pekerjaan Pemeliharaan PT RivadaSejahtera Abadi, TA. 2024	10/04/2025	F5D972G502RTCE67	13.804.655
Total				125.993.775

2. Ditjen Binapenta dan PKK

Piutang Lainnya pada Ditjen Binapenta & PKK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp621.244.246.929 dan Rp625.458.455.127.

Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Binapenta & PKK sebagai berikut:

Tabel 155 Mutasi Piutang Lainnya Ditjen Binapenta & PKK

Nama Satker	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
BBPKK Bandung Barat	20.260.024	4.130.091	20.260.024	4.130.091
Satker Ditjen Binapenta dan PKK	-	53.935.320	-	53.935.320
Dit. Bina PKK	625.438.195.103	-	4.586.138.512	620.852.056.591
BPKK Kendari	-	318.183.127	-	318.183.127
BPKK Bekasi	-	15.941.800	-	15.941.800
JUMLAH	625.458.455.127	392.190.338	4.606.398.536	621.244.246.929

a. BBPKK Bandung Barat

Piutang Lainnya pada BBPKK Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.130.091 dan Rp20.260.024.

Mutasi Tambah:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.130.091 disajikan sebagai berikut:

Tabel 156 Piutang Lainnya Pada BBPKK Bandung Barat

Tanggal Setor	NTPN	Uraian	Nilai
06/01/2026	F23DE61QVM6EUT9I	Pengembalian Uang Makan PPPK bulan Desember 2025	251.000
06/01/2026	B01451JNGHAGTT01	Pengembalian Uang Makan PNS bulan Desember 2025	450.000
05/02/2026	3C1CA3CIG6I81ID7	Pengembalian Selisih Berita Acara Stock Opname Nomor 3.2/8/UM.03.04/II/2026 tgl. 08 Januari 2026	6.591
05/02/2026	A9BF48N3F60IFHA3	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 229 ST. 3.1/333/OT.03/VI/2025 tgl 25 Juli 2025 a.n Agam Gumilang	14.500
05/02/2026	5503D61QVM9D8HOC	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 219 ST. 3.1/325/PK.01.03/VI/2025 tgl 22 Juli 2025 a.n Widi Wijanarko	65.500
05/02/2026	2FA50490014KEGK2	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 199 ST. 3.1/302/PK.01.03/VI/2025 tgl 09 Juli 2025 a.n Widi Wijanarko	124.500
05/02/2026	20149490014KEGEO	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 229 ST. 3.1/335/UM.06.00/VI/2025 tgl 28 Juli 2025 a.n Suci Ramadhaniawati	141.000
05/02/2026	C395C55DFRNRH83	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 234 ST. 3.1/344/KU.01/VI/2025 tgl 31 Juli 2025 a.n kin Sodikin	166.000
05/02/2026	87FB1490014KEHL6	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 255 ST. 3.1/355/OT.03/VI/2025 tgl 25 Juli 2025 a.n Aris Budiyanto	180.000
05/02/2026	FEAA63CIG6I81HVP	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 533 ST. 3.1/547/PK.03.03/XI/2025 tgl 20 November 2025 a.n Amalia Kusumawardhani	328.000
05/02/2026	3A0F57QLVBE62BC	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 533 ST. 3.1/547/PK.03.03/XI/2025 tgl 20 November 2025 a.n Nur Ikhsani	328.000
05/02/2026	665341JNGHDF7HR1	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 582 ST. 3.1/589/PK.03.03/XI/2025 tgl 08 Desember 2025 a.n Suci Ramadhaniawati	543.000
06/02/2026	1D56755DFRNR4A5	Pengembalian dana bantuan TKM Lanjutan 2025 an. Ahmad Arif id 395522	600.000
05/02/2026	63B5D1JNGHDF7H3T	Pengembalian Perjalanan Dinas SPM 316 ST. 3.1/440/PK.03.03/IX/2025 tgl 22 September 2025 a.n Iwan Darmawan	932.000
JUMLAH			4.130.091

Mutasi Kurang:

Piutang Lainnya pada BBPKK Bandung Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.260.024 telah seluruhnya disetor ke Kas Negara dengan rincian:

Tabel 157 Setoran Ke Kas Negara Piutang Lainnya
BPKK Bandung Barat Tahun 2024

Tanggal Bayar	NTPN	Uraian	Nilai
07-01-2025	6BB0661QVCSFBLK	Pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan jasa konsultasi perencanaan renovasi Aula BAST No. 3.1/4539/UM.01.04/BAST-PPK/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024	450.000
09-01-2025	151D061QVCSGJKE	Pengembalian Pembayaran Jasa Digitalisasi Arsip TA 2024 SPM 1047	12.066.224
14-01-2025	1393E0NAODEBDSP2	Temuan tijen 2024 Pengembalian Pembayaran Akomodasi Kegiatan Paket Meeting Fullboard	7.600.000
03-02-2025	5E1E87QLV21V0VL0	Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024 a.n HARTONO, ID 155938 Kab./Kota PONOROGO	40.000
06-02-2025	8B12E55DFID16ENF	Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024 a.n SARNU, ID 154021 Kab. Madiun	30.500
30-01-2025	49AF56U8F7BA6GN	Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024 a.n Eva Khodijah, ID 365210 Kab. Bandung	2.000
04-02-2025	719320NA0DHOS7OS	Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024a.n Rika Nofima, ID 155668 Kota Bukittinggi	1.000
04-02-2025	E4B2548VVNQIH6EU	Pengembalian Beban Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 a.n Merliani dan Dodi Sutanto	70.300
JUMLAH			20.260.024

b. Satker Ditjen Binapenta dan PKK

Piutang Lainnya pada Satker Satker Ditjen Binapenta dan PKK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp53.935.320 dan Rp0.

Piutang Ditjen Binapenta dan PKK senilai Rp53.935.320 merupakan pembayaran pengembalian ke kas negara berdasarkan temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal atas pengadaan jasa lainnya pada kegiatan penguatan kapasitas pengendalian Tenaga Kerja Asing tahun 2025 yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kepatuhan Nomor R-6/61/PW.10.00/XI/2025 tanggal 18 November 2025, terdapat pelanggaran etika pengadaan dimana keuntungan yang diperoleh dari kontrak Penyedia jasa yaitu PT. Sabena Sukses dan PT. Zalfalindo Jaya Abadi sebesar Rp53.935.320 tidak dapat dibayarkan dan harus dikembalikan ke kas negara.

Pengembalian atas temuan tersebut telah dilakukan pada tanggal 5 Januari 2026, namun terdapat kesalahan penggunaan akun di mana setoran dilakukan melalui akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya) yang seharusnya menggunakan akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu). Pengembalian tersebut terdiri dari tiga billing dengan rincian:

- 1) NTPN DFD84522CUE3F6VB sebesar Rp18.008.980
- 2) NTPN 7B0A7522CUE3F72F sebesar Rp16.354.051
- 3) NTPN BF252397D99AL749 sebesar Rp19.572.289.

Atas kesalahan tersebut, telah dilakukan koreksi akun oleh KPPN Jakarta VII sesuai Surat Nomor S-243/KPN.1207/2026 tanggal 28 Januari 2026, sehingga pencatatan telah disesuaikan ke akun 425912.

c. Direktorat Bina PKK

Piutang Lainnya pada Direktorat Bina PKK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp620.852.056.591 dan Rp625.438.195.103.

Tabel 158 Mutasi Piutang Lainnya Direktorat Bina PKK
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Bantuan	Piutang Awal	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Banprog dan PDTT 2019	276.949.863.429	276.949.863.429	-	1.891.385.300	275.058.478.129
3	Banprog 2020	315.160.339.764	315.160.339.764	-	-	315.160.339.764
4	Banprog 2021	33.590.100.000	33.327.991.910	16.820.000	2.711.573.212	30.633.238.698
JUMLAH		625.700.303.193	625.438.195.103	16.820.000	4.602.958.512	620.852.056.591

Piutang Lainnya pada Direktorat Bina PKK berasal dari Belanja Bantuan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 – 2021 yang pada Laporan Keuangan Tahun 2022 tercatat sebagai Belanja Barang Dibayar Dimuka dan dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Lainnya sebesar Rp625.700.303.193 berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKNN) yang ditandatangani secara *ex-officio* dan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga

Kerja dan Perluasan Kesempataan Kerja.

Upaya Penyelesaian Piutang:

1) Tahun 2023

- a) Penyetoran Ke Kas Negara sebesar Rp191.663.090 (bukti setor terlampir) setelah dilakukan penagihan kepada 43 penerima bantuan melalui Surat Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja.
- b) Penyetoran Ke Kas Negara sebesar Rp64.945.000 setelah dilakukan upaya mendatangi langsung lokasi 41 penerima bantuan. Upaya ini menghabiskan anggaran sebesar Rp296.114.594.
- c) Sehingga pada tahun 2023 nilai sisa saldo Piutang Lainnya pada Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja senilai Rp625.443.695.193 (Rp625.700.303.193 – Rp191.663.090 – Rp64.945.000).

2) Tahun 2024

- a) Penyetoran ke kas negara atas Piutang Lainnya Kegiatan TKM Mikro Kelompok Sablon Manual Goodie Bag Tahun 2021 senilai Rp5.500.000 sesuai NTPN E1D291JNFV91IRQL tanggal 30 Juli 2024.
- b) Penyelesaian dengan hasil verifikasi:
 - (1) Verifikasi bersama Tahap I antara Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan Inspektorat I atas LPJ Bantuan Pemerintah kepada masyarakat tahun 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan laporan hasil verifikasi Nomor R.6/75/PW.06/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor 1/1323/KU.06/VI/2024 terdapat sebanyak 2.666 kelompok dinyatakan lengkap LPJ dengan nilai Rp115.225.650.000.
 - (2) Pada tanggal 14 Juni 2024 dilaksanakan Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) terkait Penetapan Penghapusan Piutang terhadap Ditjen Binapenta dan PKK sebagaimana Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor 1/1323/KU.06/VI/2024. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Piutang Lainnya senilai Rp115.225.650.000 (Dit Bina PKK senilai Rp112.863.300.000 dan Setdijen Binapenta dan PKK senilai Rp2.362.350.000) berdasarkan hasil verifikasi Tim Itjen akan digunakan sebagai dasar untuk mengoreksi nilai piutang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 197 Tahun 2024 Tentang Koreksi Pencatatan Piutang Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 21 Agustus 2024.
 - (3) Verifikasi bersama Tahap II antara Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan Inspektorat I atas LPJ Bantuan Pemerintah kepada masyarakat tahun 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan laporan hasil verifikasi Nomor R.6/121/PW.06/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor 1/1724/KU.06/VIII/2024 terdapat sebanyak 1.485 LPJ dinyatakan lengkap dengan nilai Rp90.899.530.390.

- (4) Pada tanggal 6 Agustus 2024 dilaksanakan Sidang TPKN terkait Penetapan Penghapusan Piutang terhadap Ditjen Binapenta dan PKK sebagaimana Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor 1/1724/KU.06/VIII/2024. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Piutang Lainnya senilai Rp90.899.530.390 (Dit Bina PKK senilai Rp79.864.000.000, BBPKK senilai Rp1.985.000.000, dan Setditjen Binapenta dan PKK senilai Rp9.050.530.390) berdasarkan hasil verifikasi Tim Itjen akan digunakan sebagai dasar untuk mengoreksi nilai piutang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Koreksi Pencatatan Piutang Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 23 September 2024. Sehingga per 31 Desember 2024 (Unaudited), saldo Piutang Lainnya pada Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja senilai Rp419.313.014.713 (Rp625.443.695.193 - Rp115.225.650.000 - Rp90.899.530.390 Rp5.500.000)
- (5) Hasil Verifikasi Tahap I dan II serta Hasil Sidang TPKN tersebut, pada rapat tripartit asersi final belum dapat dijadikan dasar koreksi pengurangan nilai piutang.
- (6) Sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp625.438.195.103 (Rp625.443.695.193 - Rp5.500.000).

3) Tahun 2025

- a) Diterbitkannya Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK Nomor 3/104/HK.03.01/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Negara atas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Tugas Pembantuan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun Anggaran 2019-2021 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/6/HK.04.00/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Jatuh Tempo Piutang Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.
- b) Dibentuknya Tim *Task Force* Penagihan dan Penatausahaan Piutang Negara atas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Tugas Pembantuan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun Anggaran 2019-2021 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK Nomor 3/105/HK.03.01/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 untuk penagihan piutang atas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Tugas Pembantuan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun Anggaran 2019-2021.
- c) Rapat perdana Tim *Task Force* dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025, disepakati bahwa Tim *Task Force* akan melakukan penagihan piutang dalam tiga gelombang, dengan prioritas pada gelombang pertama kepada penerima bantuan yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, disepakati bahwa rapat perkembangan atas pelaksanaan pengiriman surat penagihan piutang akan dilaksanakan secara berkala setiap tanggal 10 setiap bulannya.

- d) Terdapat arahan dari pimpinan sehubungan dengan adanya kekhawatiran bahwa proses penagihan berpotensi menimbulkan gejolak atau perhatian negatif di media sosial. Hal ini mempertimbangkan bahwa bantuan yang telah diberikan kepada kelompok atau masyarakat pada dasarnya dimaksudkan untuk dimanfaatkan dan tidak memuat klausul pengembalian. Oleh karena itu, guna menghindari potensi ketidakpuasan penerima bantuan serta dampak lain yang tidak diinginkan, dipandang perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam terkait apakah piutang dimaksud tetap akan ditagihkan kepada penerima bantuan atau dilakukan koreksi melalui reklasifikasi ke Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (BBDM), mengingat sumber piutang tersebut berasal dari BBDM.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Kementerian Ketenagakerjaan, yang diwakili oleh Tim Biro Keuangan dan BMN yang terdiri atas Kepala Biro Keuangan dan BMN, Koordinator Akuntansi dan Pelaporan, serta Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan, bersama dengan Direktorat Bina PKK yang diwakili oleh Direktur Bina PKK, telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan pada tanggal 06 Oktober 2025. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa pokok pembahasan sebagaimana berikut:

- (1) Pihak Kementerian Keuangan berpandangan bahwa Bantuan Pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersifat tunai (dalam bentuk uang), sehingga pencatatannya sebagai Piutang dinilai kurang tepat secara akuntansi.
 - (2) Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, akan menjadwalkan rapat lanjutan bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna membahas histori transaksi Piutang Lainnya pada Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK secara lebih komprehensif.
 - (3) Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPK dipandang perlu melakukan pertemuan tripartit untuk membahas penyelesaian Piutang Lainnya pada Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK.
 - (4) Kementerian Keuangan belum dapat mengambil keputusan terkait Piutang Lainnya pada Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK, mengingat masih diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK.
- e) Hasil Reviu yang tercantum dalam Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Nomor 6/1712/PW.10.00/IV/2026 sesuai dengan Nota Dinas Nomor 6/888/PW.02/IV/2026 tanggal 14 April 2026 menunjukkan bahwa terdapat pengurang piutang sebesar Rp4.586.138.512, dengan rincian:
- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK
- Tidak terdapat koreksi atas nilai Piutang atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 – 2021 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK yang berasal dari Tahun

Anggaran 2019, sehingga nilai piutang tetap sebesar Rp49.860.083.000.

(2) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja

a) Pada Tahun 2019, terdapat koreksi pengurang Nilai Piutang senilai Rp1.554.885.300 atas setoran:

- Bantuan Pemerintah skema Tenaga Kerja Mandiri TA 2019 sebesar Rp1.408.085.300 (NTPN: 1A21A48VURQ7B6PC tanggal 28 Januari 2022)
- Bantuan Pemerintah skema Padat Karya TA 2019 sebesar Rp146.800.000 (NTPN:84B156U8EBHCI1MV tanggal 28 Januari 2022)

Kedua bukti setor tersebut termuat pada LHP Laporan Keuangan Tahun 2021 (Hal.79) namun belum dihitung pada saat Penetapan Piutang atas Bantuan Pemerintah, sehingga mengkoreksi piutang yang semula tercatat sebesar Rp215.758.280.425 menjadi Rp214.203.395.125.

b) Pada Tahun 2020, tidak terdapat koreksi Nilai Piutang

c) Pada Tahun 2021, terdapat koreksi pengurang Nilai Piutang senilai Rp2.711.573.212 dikarenakan Terdapat masalah duplikasi atau kelebihan pencatatan piutang pada kelompok TKM Mikro dan Ultra Mikro. Hal tersebut terjadi karena Itjen melakukan verifikasi kelengkapan administrasi (Verval) secara "Penuh" (Full Value) sesuai nilai paket bantuan (Rp54,4 juta untuk Mikro dan Rp24 juta untuk Ultra Mikro). Namun, verifikasi tersebut mengabaikan (tidak memotong) nilai yang sebenarnya sudah dikembalikan oleh kelompok ke Kas Negara:

- Saldo piutang dari 22 kelompok TKM Mikro overstated sebesar Rp7.900.000.
- Saldo piutang dari 2 kelompok TKM Ultra Mikro overstated sebesar Rp20.100.000.

d) Berdasarkan Hasil Reviu, BPK telah melakukan uji petik terhadap nilai bantuan senilai total Rp3.792.000.000 yang terdiri atas Rp2.284.000.000 TKM Mikro , Rp408.000.000 TKM Ultra Mikro, dan Rp1.100.000.000 Padat Karya. Dari populasi tersebut yang menjadi temuan berdasarkan Lampiran 25 s.d 28 LHP LK 2021 adalah Rp1.052.426.788 yang terdiri atas Rp667.266.088 Bantuan TKM Mikro, Rp152.826.500 Bantuan TKM Ultra Mikro, dan Rp232.334.200 atas Bantuan Padat Karya. Berdasarkan perhitungan tersebut, populasi uji petik BPK yang Tidak menjadi saldo piutang adalah Rp2.739.573.212 (Rp3.792.000.000-Rp1.052.426.788).

(3) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat

(a) Tahun 2019

Nilai piutang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.331.500.000 menjadi Rp10.995.000.000 karena terdapat koreksi kurang sebesar Rp336.500.000 atas:

- Berdasarkan hasil pengujian aritmatik, menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyajian nilai piutang. Dalam Laporan Hasil PDTT BPK Tahun 2019 – 2021 disajikan nilai penerima bantuan yang tidak ada SPJ sebesar Rp730.000.000 sedangkan dalam Rincian Nilai Piutang pada Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited disajikan Rp716.500.000, sehingga terdapat selisih yang mengakibatkan **penambahan** piutang sebesar Rp13.500.000.
- Hasil perbandingan antara Rincian Penerima Bantuan pada Kertas Kerja Verifikasi dan Validasi Inspektorat Jenderal dengan Laporan Hasil PDTT BPK Tahun 2019 – 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian nilai Piutang yang terbentuk yaitu:
 - Terdapat Double Counting atas 1 Penerima bantuan yang dalam LHP PDTT BPK Tahun 2019 – 2021 telah terhitung tidak ada SPJ, namun pada hasil Verval Itjen dinyatakan “Tidak Lengkap” untuk skema inkubasi Bisnis Pengembangan Lembaga, sehingga mengakibatkan koreksi nilai piutang sebesar Rp50.000.000.
 - Terdapat *Double Counting* atas 6 penerima bantuan yang dalam LHP PDTT BPK Tahun 2019 – 2021 telah terhitung tidak ada SPJ, namun pada hasil Verval Itjen dinyatakan “Tidak Lengkap” untuk skema inkubasi Bisnis Tahap Awal Lembaga, sehingga mengakibatkan koreksi nilai piutang sebesar Rp300.000.000

(b) Nilai piutang sebesar Rp6.321.700.107 yang berasal dari Tahun Anggaran 2020 Tidak terdapat koreksi pengurangan, sehingga nilai piutang tetap sama.

(c) Nilai piutang sebesar Rp1.830.000.000 yang berasal dari Tahun Anggaran 2021 mengalami koreksi penambahan setelah dilakukan reviu sebesar Rp16.820.000 sehingga nilai piutang setelah koreksi menjadi Rp1.846.820.000. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kondisi berikut:

- Terdapat 1 penerima bantuan dengan skema TKM Lanjutan a.n Nova Novitasari dinyatakan “Lengkap” dalam verifikasi dan validasi Inspektorat Jenderal namun pada LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dinyatakan tidak memiliki bukti dukung yang memadai / Kurang SPJ sebesar Rp15.000.000 yang mengakibatkan adanya piutang Rp15.000.000.

- Terdapat 1 penerima bantuan dengan skema TKM Lanjutan a.n Viki Adi Setyawan dinyatakan “Lengkap” dalam verifikasi dan validasi Inspektorat Jenderal namun pada LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dinyatakan dari total bantuan sebesar Rp15.000.000 digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.820.000 yang mengakibatkan adanya piutang Rp1.820.000
- e) Pengurangan Saldo Piutang menjadi koreksi lainnya telah disepakati melalui sidang TPKN dengan nomor Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara No. BA-1.2/1373/KU.06/IV/2026 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2026. Berdasarkan Asersi Final, telah diputuskan bahwa nominal yang akan dikoreksi dari piutang adalah sebesar **Rp4.586.138.512**. Sehingga, per *Audited* 2025 saldo Piutang Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja adalah **Rp620.852.056.591**. Adapun data *By Name By Address* untuk Piutang pada Direktorat Bina PKK dapat diakses melalui <https://bit.ly/KertasKerjaPiutangBinapenta>.

d. BPKK Kendari

Piutang Lainnya pada BPKK Kendari per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp318.183.127 dan Rp0.

Piutang Lainnya sebesar Rp318.183.127 terdiri dari:

- 1) Piutang Lainnya yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran atas 6 (enam) pekerjaan pemeliharaan bangunan sebesar Rp49.719.000. Piutang Lainnya dimaksud telah disetor ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 159 Setoran atas Piutang Lainnya Akibat Kelebihan Pembayaran atas 6 (enam) pekerjaan pemeliharaan bangunan Tahun 2025 pada BPKK Kendari

No	NTPN	Tanggal Bayar	Setor	Keterangan
1	10A4C55DFRQ4255Q	11 Maret 2026	Rp3.752.000	Pekerjaan Selasar dan Parkiran
2	052A23CIG6LB807L	11 Maret 2026	Rp7.373.000	Pekerjaan Pengecatan pagar samping
3	7A98D1JNGHGIE0AO	11 Maret 2026	Rp8.595.000	Pekerjaan Pengecatan Dinding Luar
4	3F22161QVMCGF0E6	11 Maret 2026	Rp5.126.000	Pekerjaan Talang dan Dak
5	D7A563CIG6LB80K9	11 Maret 2026	Rp20.049.000	Pekerjaan Plafond Kantor
6	681AC6U8FGUSSOND	27 April 2026	Rp4.824.000	Pekerjaan Plafond Ruang Kepala
TOTAL			Rp49.719.000	

- 2) Piutang Lainnya sebesar Rp268.464.127 yang berasal dari pengembalian perjalanan dinas tidak dilaksanakan dan pembayaran realisasi perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dengan rincian:

Tabel 160 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada BPKK Kendari

No	Uraian	Nilai Temuan (Rp)	Sanggah (Rp)	NTPN	Tanggal Bayar	Setoran (Rp)
1	Perjalanan dinas tidak dilaksanakan	Rp203.477.000	Rp13.165.200	C8EF155DFRTKT769	27/04/2026	Rp190.311.800
2	Pembayaran realisasi perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	Rp86.346.730	Rp2.804.403	381350NA0N1MQOPS	27/04/2026	Rp4.553.177
			-	A171A6U8FH2DLT05	27/04/2026	Rp19.900.600
			-	879482G50C6I2OAG	30/04/2026	Rp91.250
			Rp5.390.000	C075A8N3F677HFQF	27/04/2026	Rp53.607.300
TOTAL		Rp289.823.730	Rp21.359.603			Rp268.464.127

e. BPKK Bekasi

Piutang Lainnya pada BPKK Bekasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.941.800 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Piutang Lainnya sebesar Rp15.941.800 disebabkan adanya kelebihan pembayaran belanja atas akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) tahun 2025 atas pekerjaan pengecatan eksterior gedung. Piutang Lainnya dimaksud telah diselesaikan dengan penyetoran ke Kas Negara tanggal 2 April 2026 dengan NTPN 12AE77QLVBK1NHAM.

3. Ditjen PHI dan Jamsos

Piutang Lainnya pada Ditjen PHI dan Jamsos per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp779.776.085 dan Rp303.387.620.

Tabel 161 Mutasi Piutang Lainnya Ditjen PHI dan Jamsos

No	Kode Satker	Nama Satker	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	451270	Ditjen PHI & Jamsos	303.387.620	779.776.085	303.387.620	779.776.085
		JUMLAH	303.387.620	779.776.085	303.387.620	779.776.085

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp779.776.085 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

- a. Piutang Lainnya sebesar Rp47.374.300 atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sesuai Laporan Hasil Verifikasi Itjen No R-6/03/PW.06/IX/2024 tanggal 24 September 2024 atas LHP BPK-RI No104B/LHP/XVI/05/2021. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 162 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 pada Ditjen PHI dan Jamsos

No	Uraian	NTPN	Tanggal	Setoran (Rp)
1	LMD (Dit. Syaker)	3A44F0NA0MO4H7P0	06/01/2026	4.965.900
2	ES (Dit. Syaker)	7222C490011M5876	06/01/2026	5.489.900
3	DG (Dit. Syaker)	E5D3D490011M58B8	06/01/2026	6.348.350
4	ZS (Dit. Syaker)	5E77D3CIG6FASL1R	07/01/2026	715.000
5	E dan TWI	393FD3CIG6FB3MV7	08/01/2026	3.765.450
6	AH (Dit. Syaker)	6150E2G50BSTK7CQ	08/01/2026	3.359.000
7	MS (Dit. PPHI)	D3AC43CIG6FGNJHR	14/01/2026	2.150.000
8	KN	2AA14490012ANKBG	29/01/2026	455.000
9	EY	30C3A2G50BTHJTJ5U	29/01/2026	1.891.000
10	DRJ	A0CAB8N3F5UB27HJ	30/01/2026	1.060.000
11	NPS (Dit. Jamsos)	9B0C52G50BSTK7AK	13/01/2026	17.174.700
JUMLAH				47.374.300

- b. Piutang Lainnya sebesar Rp5.500.000 atas pengembalian Belanja Honorarium sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 163 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Honorarium pada Diten PHI dan JSK Tahun 2025

No	Uraian	NTPN	Tanggal	Nominal
1	Dit. PPHI - Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber	8A958490011UAKJG	15/01/2026	200.000
2	Dit. Jamsos - Pengembalian Belanja Honor Narasumber Konsinyir Penyusunan Regulasi Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lokasi 101 Urban Jakarta Thamrin	090608N3F5U490HN	23/01/2026	300.000
3	Dit. PPHI - Pengembalian Belanja Jasa Profesi Honor Narasumber keg Konsultasi Teknis PPHI di PHI/MA di Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Desember 2025	B971661QVM72DI98	27/01/2026	1.000.000
4	Dit. HKP - Pengembalian Pembayaran honorarium narasumber keg Peningkatan Sistem Pengupahan Berbasis Produktivitas Wilayah Kota Bandung, 22 - 23 agustus 2025	62DAA0NA0MONVG66	28/01/2026	3.000.000
5	Dit. HKP - Pengembalian Pembayaran honorarium narasumber keg peningkatan tata kelola pengupahan bagi HRD provinsi Bali, 16 - 17 Oktober 2025	62DAA0NA0MONVG66	28/01/2026	1.000.000
JUMLAH				5.500.000

- c. Piutang Lainnya sebesar Rp2.099.000 atas pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 164 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

NO	URAIAN	NTPN	TANGGAL	NOMINAL
1	Dit. HKP - Pengembalian Pembayaran perjadiin keg Peningkatan Sistem Pengupahan Berbasis Produktivitas Wilayah Kota Bandung, 22 - 23 agustus 2025	62DAA0NA0MONVG66	28 Januari 2026	623.000
2	Dit. HKP - Pengembalian Belanja 524119 Keg Dialog dan Edukasi Kesetaraan Syarat Kerja Dalam Pengaturan PKB di Perusahaan di Tangerang, 22 - 23 Juli 2025.	4B9453CIG6FT6E5T	28 Januari 2026	250.000
3	Dit. Jamsos - Pengembalian Perjadiin Keg Konsultasi Publik di Pontianak dan Keg Peningkatan Akses Layanan Pasuruan Tgl 9 Jan 26	501428N3F5TSBHU1	19 Januari 2026	1.226.000
JUMLAH				2.099.000

- d. Piutang Lainnya sebesar Rp32.163.256 atas pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 165 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

No	Uraian	NTPN	Tanggal	Nominal
1	Dit. HKP - Setor Pengembalian perjadiin Keg Dialog dan Edukasi Kesetaraan Syarat Kerja Dalam Pengaturan PKB di Bandung, 18 - 19 September 2025.	4B9453CIG6FT6E5T	28 Januari 2026	950.000
2	Dit. HKP - Pengembalian perjadiin Kegiatan Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak Tingkat Kabupaten/Kota di Kota Jakarta, 11 s.d. 13 September 2025	3FBD255DFRKM0EPB	28 Januari 2026	5.840.000
3	Dit. Jamsos - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Money Implementasi JKP di Semarang sesuai ST No 4/826/HI.02.00/XII/2025	570DA1JNGHB1117V	23 Januari 2026	6.281.726
4	Dit. Jamsos - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas sesuai ST No 4/804/HI.02.00/XII/2025	1258E3CIG6FPR1CD	23 Januari 2026	11.286.530
5	Dit. PPHI - Pengembalian Belanja Uang Penginapan Narsum Keg Konsultasi Teknis PPHI di PHI/MA di Jakarta, 15 s.d. 17 Desember 2025	A7AE061QVM72DH92	27 Januari 2026	814.000
6	Setditjen - Pengembalian Belanja perjadiin dalam rangka Mengikuti Pelatihan Strategic Thinking Eselon I dan II Kementerian Ketenagakerjaan	0CCF38N3F5U7EG7L	27 Januari 2026	390.000
7	Dit. PPHI - Pengembalian Belanja perjadiin Biasa Evaluasi Peraturan Bidang HI di Prov. Jawa Barat	857727QLVBBR1GJG	26 Januari 2026	1.830.000
8	Dit. PPHI - Pengembalian Belanja Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Tidak Sesuai Ketentuan	8A958490011UAKJG	15 Januari 2026	2.248.000
9	Dit. PPHI - Pengembalian Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan	8A958490011UAKJG	15 Januari 2026	2.523.000
JUMLAH				32.163.256

- e. Piutang Lainnya sebesar Rp10.540.000 atas pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 166 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

NO	URAIAN	NTPN	TANGGAL	NOMINAL
1	Dit. HKP - Pengembalian Belanja perjadiin Paket Meeting dalam Kota Penyiapan Kebijakan Pengupahan di Provinsi DKI Jakarta, 22 s.d. 23 Mei 2025	3FBD255DFRKM0EPB	28 Januari 2026	260.000
2	Dit. Jamsos - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fullboard Meeting Regulasi Bidang Jamsos di Hotel Best Western Jakarta	501428N3F5TSBHU1	19 Januari 2026	9.770.000
3	Dit. PPHI - Pengembalian Transport Peserta dan Penyelenggara Keg Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI, 23 - 24 Oktober 2025	E64B561QVM72DHC6	27 Januari 2026	510.000
JUMLAH				10.540.000

- f. Piutang Lainnya sebesar Rp5.735.500 atas Pengembalian Honor Tim Pelaksana Kegiatan sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan dengan NTPN 716E77QLVBBULBCC tanggal 30 Januari 2025.
- g. Piutang Lainnya sebesar Rp24.036.983 atas Pengembalian Belanja Bahan sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 167 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Bahan Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

No	Uraian	NTPN	Tanggal	Nominal
1	Dit. PPHI - pengembalian Benja Pengadaan ATK dan Komputer Supply Belum Sesuai Ketentuan	8A958490011UAKJ G	15 januari 2026	8.414.000
2	Dit. PPHI - pengembalian Belanja Pengadaan Perlengkapan Peserta Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	8A958490011UAKJ G	15 januari 2026	702.800
3	Dit. HKP - Pengembalian Belanja ATK dan Komputer Supplies Keg Rapat Kerja Pembahasan dan Perumusan Kebijakan UM 2026 di Bandung, 5 s.d 7 September 2025	3FBD255DFRKM0E PB	28 Januari 2026	365.188
4	Dit. HKP - Pengembalian Belanja ATK dan Komputer Supplies Keg Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak, 11 s.d 13 September 2025	3FBD255DFRKM0E PB	28 Januari 2026	342.625
5	Dit. HKP - Pengembalian Belanja Bahan ATK Keg Dialog dan Edukasi KSK di Tangerang, Surabaya, Bandung, Aceh	4B9453CIG6FT6E5 T	28 Januari 2026	5.977.875
6	Dit. HKP - pengembalian konsumsi rapat dan belanja bahan bidang HK	79F4F8N3F5U7KF7 R	27 Januari 2026	448.500
7	Dit. HKP - pengembalian konsumsi rapat dan belanja bahan bidang PPPKB	03FFD2G50BTGPU 8S	27 Januari 2026	7.785.995
JUMLAH				24.036.983

- h. Piutang Lainnya sebesar Rp1.500.000 atas Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan *monthly* Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025. Piutang Lainnya dimaksud

telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 3FBD255DFRKM0EPB tanggal 28 Januari 2026.

- i. Piutang Lainnya sebesar Rp5.172.740 atas adanya kelebihan pembayaran belanja pada akun beban pemeliharaan lainnya Tahun 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 9D7A861QVMF8TH42 tanggal 2 April 2026.
- j. Piutang Lainnya sebesar Rp82.493.293 atas pengembalian kelebihan pembayaran pada akun belanja bahan dan akun belanja honor output kegiatan Tahun Anggaran 2025 sesuai LHP Audit Kepatuhan ITJEN Nomor:6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 168 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Bahan dan Honor Output Kegiatan Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

No	Uraian	NTPN	Tanggal	Nominal (Rp)
1	Honor Yang tidak layak dibayarkan atas nama AWI	B08C855DFRNDRG3T	20 Februari 2026	2.295.000
2	Honor Yang tidak layak dibayarkan atas nama AI	58A3B6U8FGSC1BM7	24 Februari 2026	2.380.000
3	Honor Yang tidak layak dibayarkan atas nama DHU	E8C8F1JNGHGBQ8IL	02 Maret 2026	3.060.000
4	Honor Yang tidak layak dibayarkan atas nama PW	60CC155DFRPTE8G9	02 Maret 2026	5.355.000
5	Honor Yang tidak layak dibayarkan atas nama C.HW	CB72E6U8FGUV9UCJ	13 Maret 2026	6.502.500
6	Honor Yang tidak layak dibayarkan atas nama DK	D4CC46U8FGUSUE8L	11 Maret 2026	11.475.000
7	Setditjen - Pengembalian terkait Pertanggungjawaban Biaya Belanja Konsumsi Rapat Internal Bidang PEP	30DD90NA0MRL761E	24 Februari 2026	1.650.000
8	Dit. BMHI - Pengembalian belanja bahan pada Dit BMHI	97F4D0NA0MTVG5UE	06 Maret 2026	4.000.000
9	Dit. KPPHI - Pengembalian belanja bahan berupa ATK, Komputer supplies dan perlengkapan peserta	4890361QVMC9T4AC	02 Maret 2026	44.844.293
10	Setditjen - Pengembalian terkait Pertanggungjawaban Biaya Belanja Konsumsi Rapat Internal Bidang SDMAO	3E1833CIG6IQE62P	26 Februari 2026	931.500
JUMLAH				82.493.293

- k. Piutang Lainnya sebesar Rp44.816.360 atas adanya kelebihan pembayaran pada akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun Anggaran 2025 sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:

Tabel 169 Setoran Piutang Lainnya atas Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

NO	Uraian	NTPN	Tanggal	Nominal (Rp)
1	Dit KPPHI - Kelebihan pembayaran belanja dari pemahalan pengadaan paket meeting dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp22.518.440-	4890361QVMC9T4AC	02 Maret 2026	22.518.440
2	Dit. BMHI - Pemahalan pembayaran hotel sebesar Rp2.700.000,-	4F3E36U8FGUMB631	04 Maret 2026	2.700.000
3	Setditjen - Biaya perjalanan dinas atas nama SS	7D2CC3CIG6L4K8KT	02 Maret 2026	72.500
4	Dit BMHI - Pembayaran taksi/transport bandara yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Total Rp9.243.420 dan Dit BMHI - sewa kendaraan yang tidak sesuai	8F0D28N3F63F564V	03 Maret 2026	15.645.420
5	Setditjen -Pengembalian Biaya perjalanan dinas	C47F249001AQVNFU	13 Apr 2026	2.780.000
6	Setditjen- Biaya perjalanan dinas atas nama AI, YNP, RVP	C08EA1JNGHE1K5UV	24 Februari 2026	1.100.000
JUMLAH				44.816.360

- l. Piutang Lainnya sebesar Rp8.550.000 atas kelebihan pembayaran pada akun Belanja Jasa Profesi Tahun Anggaran 2025 sesuai LHP Audit Kepatuhan Inspektorat Jenderal Nomor 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN A285955DFRPTH613 tanggal 4 Maret 2026.
- m. Piutang Lainnya sebesar Rp468.000.000 atas pengembalian dana BSU Tahun 2025 berstatus Berhasil Salur pada BNI dan PT Pos Indonesia yang berhasil ditagihkan kepada 780 orang. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor berikut:
 - 1) NTPN C17FB0NA0N1AIEPA tanggal 15 April 2026 sebesar Rp454.800.000
 - 2) NTPN B4E907QLVBKEVU24 tanggal 16 April 2025 sebesar Rp13.200.000.
- n. Piutang Lainnya sebesar Rp 17.980.419 atas pengembalian kelebihan pembayaran akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2025 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN E9C0B6U8FH217M8R tanggal 14 April 2026
- o. Piutang Lainnya sebesar Rp23.814.234 atas pengembalian kelebihan pembayaran pada akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun Anggaran 2025. Piutang Lainnya dimaksud telah disetorkan ke Kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 170 Setoran Piutang Lainnya atas Pengembalian Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Tahun 2025 pada Ditjen PHI dan Jamsos

NO	Uraian	NTPN	Tanggal	Nominal (Rp)
1	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK (Lamp 2)	8505A8N3F6738NLT	24 Apr 2026	12.149.850
2	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran hotel pada perjalanin a.n SJ	E44DE8N3F676111J	28 Apr 2026	2.744.000
3	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran hotel a.n E.N	4604155DFRTKU115	28 Apr 2026	1.372.000
4	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan biaya hotel (melebihi) SBM a.n. LF - ABM - HT - NF	B851C61QVMG1A6UQ	27 Apr 2026	1.438.400
5	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK (Lamp 3)	D7F350NA0N1JJNMI	24 Apr 2026	1.151.924
6	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan biaya hotel (melebihi) SBM a.n. AHG	300256U8FH2DMCRR	27 Apr 2026	1.628.000
7	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan biaya bensin a.n. LF	9C13E61QVMG1A7B0	27 Apr 2026	20.050
8	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran transportasi pada perjalanin a.n SJ	DBA128N3F676112H	28 Apr 2026	105.010
9	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK a.n. AE	A0F9E6U8FH2AEBMD	24 Apr 2026	130.000
10	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK a.n. AW dan TMY	038E655DFRTHKBLN	24 Apr 2026	1.135.000
11	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK a.n. AMO	88E132G50C6CDBNM	24 Apr 2026	130.000
12	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK a.n. AP, EY, KN, LK, NR, dan RO (Jamsos)	FF0000NA0N1JJBKU	24 Apr 2026	1.170.000
13	Pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Ditjen PHJJSK a.n. RZ dan SH	F0A4E1JNGHK00BI5	24 Apr 2026	640.000
JUMLAH				23.814.234

Mutasi Kurang:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.387.620 telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembalian ke kas negara atas Audit BPK sesuai LHP Nomor 86/HP/XVI/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas Pelaksanaan Pengadaan SIM P3HI TA 2013 (biaya langsung personil yg belum diyakini kewajarannya - verifikasi ITJEN) dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN 5331748VVNNS098G tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp106.875.000.
- b. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sesuai LHP Nomor R-6/182/PW.10.00/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN 792E148VVNNS0HLU tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp1.000.000.
- c. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Publikasi sesuai LHP Inspektorat Jenderal dengan Surat Perintah Nomor 6/708/PW.01/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN 8DF687QLV21TVLT1 tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp9.000.000.
- d. Pengembalian atas Pertanggungjawaban Belanja Perjadin di Setditjen PHI dan Jamsos TA 2020 sesuai LHP Nomor 104B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN 08AE748VVNODF3BG tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp61.072.000.
- e. Pengembalian Belanja Perjadin Narasumber Kegiatan Dialog dan Edukasi Faskes di Aceh tanggal 8 - 9 Agustus 2024 dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN 042052G502J36I4O tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp1.529.900.
- f. Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Dialog Pembentukan Arbitrase HI dan Konsiliasi HI pada Kawasan Industri di Provinsi Jawa Barat dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN ABAD255DFIAHAIKU tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp2.423.000.
- g. Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Dialog Pembentukan Arbitrase HI dan Konsiliasi HI pada Kawasan Industri di Provinsi Jawa Barat dan disetor ke Kas Negara dengan NTPN 6181E55DFIAHAIS4 tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp430.000.
- h. Pengembalian belanja bahan atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 Nomor R-6/75/PW.10.00/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp23.652.581 yang terdiri dari:
 - 1) Dit. Jamsos dengan NTPN 7AABE1JNG89OQC0S tanggal 17 April 2025 sebesar Rp650.000.
 - 2) Dit. HKP dengan NTPN 717F16U8F7NTM3NJ pada tanggal 11 April 2025 sebesar Rp1.762.500.
 - 3) Dit. KPPHI dengan NTPN 59D822G502PBV45R sebesar Rp10.559.000 dan NTPN 4072C55DFIGH64D8 sebesar Rp10.681.081 pada tanggal 24 Maret 2025.

- i. Pengembalian belanja jasa lainnya atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 Nomor R-6/75/PW.10.00/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 pada Dit. BMHI dengan NTPN D03BF7QLV2AA1ADM tanggal 11 April 2025 sebesar Rp45.523.578.
- j. Pengembalian belanja jasa profesi atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 Nomor R-6/75/PW.10.00/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp9.240.000 terdiri dari:
 - 1) Dit. BMHI sebesar Rp8.900.000 dengan NTPN D03BF7QLV2AA1ADM tanggal 11 April 2025.
 - 2) Dit. HKP sebesar Rp340.000 dengan NTPN 717F16U8F7NTM3NJ tanggal 11 April 2025.
- k. Pengembalian perjalanan dinas luar kota atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 Nomor R-6/75/PW.10.00/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp5.483.491 terdiri dari:
 - 1) Dit. PPHI sebesar Rp2.721.091 dengan 3 (tiga) kali setor yaitu:
 - a. NTPN 6115E55DFICUV3JB tanggal 4 Februari 2025 sebesar Rp1.612.300.
 - b. NTPN 431140NA0DH0U34T tanggal 4 Februari 2025 sebesar Rp840.000.
 - c. NTPN B1D7B55DFIJAEDU1 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp268.791.
 - 2) Dit. Jamsos dengan NTPN 7AABE1JNG89OQC0S pada tanggal 17 April 2025 sebesar Rp2.517.700.
 - 3) Dit. HKP dengan NTPN 717F16U8F7NTM3NJ tanggal 11 April 2025 sebesar Rp244.700.
- l. Pengembalian perjalanan dinas biasa atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 Nomor R-6/75/PW.10.00/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp14.142.720 yang terdiri dari:
 - 1) Dit. Jamsos dengan NTPN 7AABE1JNG89OQC0S tanggal 17 April 2025 sebesar Rp6.132.500.
 - 2) Dit. KPPHI sebesar Rp4.871.120 dengan 2 (dua) kali setor yaitu:
 - a) NTPN BCA8555DFIGH64K2 tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp3.471.120
 - b) NTPN 4466C1JNG86VI4SR sebesar Rp1.400.000 tanggal 24 Maret 2025.
 - 3) Setditjen dengan NTPN DA2043CIFTEHMOV5B pada tanggal 17 April 2025 sebesar Rp369.100.
 - 4) Dit BMHI sebesar Rp2.770.000 yaitu NTPN D03BF7QLV2AA1ADM tanggal 11 April 2025 dan NTPN CB7327QLV2AA3TMV tanggal 11 April 2025

- m. Pengembalian atas Laporan Hasil Verifikasi atas Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pertanggungjawaban Beban Perjadin di Ditjen PHI Tahun 2020 Nomor R-6/03/PW.06/IX/2024 tanggal 24 September 2024 pada Dit Syaker terdiri dari:

Tabel 171 Pengembalian Balanja Perjalanan Dinas Ditjen PHI dan Jamsos
Tahun 2020

No	Nama	Tanggal	NTPN	Setoran (Rp)
1	AYZ	12 Februari 2025	35D5D0NA0DH8OIH5	3.156.450
2	KN	12 Februari 2025	37F0161QVCVJ6IRP	3.431.450
3	AAA	12 Februari 2025	BC91A0NA0DH8OCUH	2.260.000
4	WWM	12 Februari 2025	6DE2A2G502M180M	2.650.000
5	BGPD	12 Februari 2025	9284B0NA0DH8OH25	3.193.000
6	AR	12 Februari 2025	7303848VVNQQC8EQ	2.505.000
7	BY	12 Februari 2025	E0E0E1JNG83L5HQO	3.261.450
8	AFA	12 Februari 2025	D9F1D3CIFT8DVHE5	2.558.000
Total				23.015.350

4. Ditjen Binwasnaker dan K3

Piutang Lainnya pada Ditjen Binwasnaker dan K3 per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp44.599.682 dan Rp0. Piutang bukan pajak terdapat pada Satuan Kerja Ditjen Binwasnaker dan K3.

Piutang Lainnya Ditjen Binwasnaker dan K3 disebabkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember 2025 yang telah dicairkan 100 persen tanpa adanya potongan keterlambatan dan ketidakhadiran pegawai ASN dan PPPK. Adapun rincian data kelebihan tukin dan uang makan tersebut terdapat pada surat Nota Dinas Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/715/KP.11.08/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 hal Pemberitahuan Penerimaan Tunjangan Kinerja, Uang Makan dan Pengembalian Pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 172 Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Bulan Desember 2025
Pada Ditjen Binwasnaker dan K3

No.	Unit Kerja	Tunjangan Kinerja		Uang Makan		Jumlah
		ASN (512411)	P3K (512414)	ASN (511129)	P3K (511628)	
1	Setditjen	970.734	599.031	7.649.500	3.476.100	12.695.365
2	Dit. Bina Sistem	1.108.362	156.632	3.194.300	738.150	5.197.444
3	Dit. Kelembagaan	439.644	83.843	2.420.850	983.750	3.928.087
4	Dit. Bina Pengujian	970.890	156.581	4.978.850	2.702.650	8.808.972
5	Dit. Bina Wasuji	592.258	115.985	5.116.450	1.018.000	6.842.693
6	Dit. Bina Riksa	950.285	491.987	3.822.350	1.862.500	7.127.122
	Total	5.032.173	1.604.059	27.182.300	10.781.150	44.599.682

5. Barenbang Ketenagakerjaan

Piutang Lainnya pada Barenbang Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp128.115.447 dan Rp127.813.454.

Tabel 173 Mutasi Piutang Lainnya Barenbang

No	Kode Satker	Nama Satker	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	452677	Barenbang	127.813.454	128.115.447	127.813.454	128.115.447
		JUMLAH	127.813.454	128.115.447	127.813.454	128.115.447

Mutasi Tambah:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.115.447 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembalian Hasil Verifikasi Itjen R-6/04/PW.06/IX/2024 atas tindak lanjut temuan BPK terkait DPR 2020 sebesar Rp27.737.000. Telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 174 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas atas Daftar Pengeluaran Riil Barenbang Ketenagakerjaan Berdasarkan Hasil Verifikasi Itjen Itjen R-6/04/PW.06/IX/2024

No	NTPN	Taggal	Jumlah Setor(Rp)
1	7E6ED3CIG6FHT64L	15 Januari 2026	7.279.000
2	432B61QVM6SFMD4	20 Januari 2026	1.270.000
3	6A0243CIG6FST4CH	26 Januari 2026	350.000
4	6892B3CIG6I7T22F	5 Februari 2026	2.650.000
5	A6B463CIG6I7TH9B	5 Februari 2026	1.200.000
6	5E7AA61QVM9D4JLM	5 Februari 2026	288.000
7	FB71B1JNGHGDGDBGJ	6 Februari 2026	14.700.000
JUMLAH			27.737.000

- b. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 8 (Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Paket Pelatihan Belum Sesuai Ketentuan). Telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp28.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 175 Pengembalian Belanja Paket Pelatihan atas Hasil Verifikasi Itjen Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 8 Pada Barenbang

No	NTPN	Taggal	Jumlah Setor(Rp)
1	7370B7QLVBBNOTM1	23 Januari 2026	3.000.000
2	5A8436U8FGSEGG64	27 Februari 2026	25.000.000
JUMLAH			28.000.000

- c. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 9 (Belanja Jasa Lainnya Pembuatan Infografik dan Videografik). Telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN 3769E49001265CLG Tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp14.228.600.
- d. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 1 (Langganan SMS OTP Belum Sesuai Ketentuan). Telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN E1AB51JNGHB0URCB Tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp93.881.
- e. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 7 (Konsumsi Snack Rapat). Telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN C35906U8FGPBDLLF Tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp8.784.000.
- f. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 8 (Pemahalan Harga Pada Pembayaran Konsumsi Rapat). Telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN C5BA57QLVBBNQMS8 Tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp2.212.000.

- g. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 (Konsumsi Rapat Tidak Sesuai Ketentuan) sebesar Rp1.220.000. Telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176 Pengembalian Belanja Konsumsi Rapat Barenbang Ketenagakerjaan atas Hasil Verifikasi Itjen R-6/75/PW.10.00/XII/2025

No	NTPN	Taggal	Jumlah Setor(Rp)
1	96B9755DFRKJTH9	23 Januari 2026	360.000
2	793631JNGHB0VVLJ	23 Januari 2026	140.000
3	E411B0NA0MOKNT2	23 Januari 2026	720.000
JUMLAH			1.220.000

- h. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 (Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber) yang disetorkan ke kas negara dengan NTPN 2263D0NA0MOKJ03A tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp2.700.000.
- i. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 (Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan) yang disetorkan ke kas negara dengan NTPN CCD2D2G50BTDD138 tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp1.627.900.
- j. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Poin 10 (Pemeliharaan Perangkat *Data Center*) yang disetorkan ke kas negara dengan NTPN 09D9E3CIG6FPQH27 tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp11.395.000.
- k. Kelebihan Pembayaran Langganan Sewa Komputasi Awan SIAPkerja periode Desember 2025 yang disetorkan ke kas negara dengan NTPN C8F28490012CV0LO tanggal 31 Januari 2026 sebesar Rp17.171.566.
- l. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 24 (Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan) sebesar Rp3.825.500 yang disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Barenbang Ketenagakerjaan atas Hasil Verifikasi Itjen No:6/75/PW.10.00/XII/2025

No	NTPN	Taggal	Jumlah Setor(Rp)
1	D69D32G50BVO7N6M	2 Februari 2026	2.200.000
2	272364900145EU4	3 Februari 2026	1.325.000
3	6E9878N3F60IBDL9	5 Februari 2026	300.500
JUMLAH			3.825.500

- n. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 23 terkait Bukti Pertanggungjawaban Keuangan tidak Lengkap untuk Biaya Pembelian Konsumsi Rapat yang disetorkan ke kas negara dengan NTPN 4DE9B8N3F60IDE77 tanggal 5 Februari 2026 sebesar Rp5.700.000.
- o. Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Point 27 terkait Kelebihan Belanja Konsumsi Pelatihan Diklat Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang disetorkan ke kas negara dengan NTPN DA36161QVM9D6EAS tanggal 5 Februari 2026 sebesar Rp3.420.000.

Mutasi Kurang:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp127.813.454 telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Kelebihan Uang Makan Bulan Desember 2024 a.n SN dengan NTPN ECD0F48VVNNOT8NK tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp139.400.
- Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 a.n LC dengan NTPN 126D83CIFT5HOE2N tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp79.102.
- Pengembalian TLHA Itjen Nomor R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 6 atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2024 yang disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp4.902.192 dengan rincian:

Tabel 178 Pengembalian TLHA Itjen atas Kelebihan Pembayaran TUKIN 2024 di Barenbang

No	Tanggal	NTPN	Setoran (Rp)
1	6 Februari 2025	F39280NA0DH350LM	553.438
2	11 Februari 2025	7EB6248VVNQ7F5S	857.770
3	20 Februari 2025	F73DF48VVNR268RN	297.791
4	21 Februari 2025	9A5562G502MADP67	475.773
5	25 Februari 2025	D49D80NA0DHKVLNB	2.564.590
6	3 Maret 2025	003C73CIFTB4AN65	152.830
Total			4.902.192

- Pengembalian kelebihan gaji bulan Februari s.d April 2024 a.n IND (sesuai Kepmenaker No 52 Tahun 2024) dengan NTPN 5FD4F55DFIDEISFC tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp17.903.700.
- Pengembalian gaji bulan November s.d Desember 2024 a.n IND (Sesuai Kepmenaker No 325 Tahun 2024) dengan NTPN 80F4B61QVCVQVSMI tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp6.245.600.
- Pengembalian Hasil Verifikasi Itjen Nomor R-6/04/PW.06/IX/2024 atas tindak lanjut temuan BPK terkait DPR 2020 sebesar Rp50.818.000 yang disetor ke Kas Negara dengan rincian:

Tabel 179 Pengembalian Hasil Verifikasi ITJEN atas Tindak lanjut BPK Yang di Setor Ke Kas Negara di Barenbang

No	Tanggal	NTPN	Setoran (Rp)
1	8 Januari 2025	368CC3CIFT5AB4GP	12.874.000
2	9 Januari 2025	92CD82G502IV0LKO	1.158.000
3	5 Februari 2025	E9D7B3CIFT878KCH	1.550.000
4	21 Februari 2025	2E1EE55DFIDFK9FM	10.191.000
5	21 Februari 2025	B0F4F48VVNR37Q38	3.111.000
6	10 Maret 2025	3C80C61QVD2G9IMQ	2.670.000
7	10 Maret 2025	3838B61QVD2G9ISK	288.000
8	14 Maret 2025	FB41B2G502P33SUG	986.000
9	18 Maret 2025	4AA202G502P6G61Q	3.615.000
10	19 Maret 2025	1E72C61QVD2P5A2S	1.000.000
11	20 Maret 2025	7191E2G502P7HN87	6.136.000
12	24 Maret 2025	1964F0NA0DKJ6K8P	2.200.000
13	10 April 2025	695F955DFIJ3NHL2	5.039.000
Total			50.818.000

- g. Pengembalian TLHA Itjen Nomor R-6/54/PW.10.00/XII/2024 pada Pusbangjak Poin 12 (Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas Pembelian Tiket Moda Transportasi Udara) dengan NTPN B9CA461QVCVDIVCQ tanggal 6 Februari 2025 sebesar Rp505.000.
- h. Pengembalian TLHA Itjen R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 1d pada Setbarenbang (Beban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan) yang disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.926.000 dengan rincian:

Tabel 180 Pengembalian TLHA Itjen Pada Setbarenbang Yang di Setor Ke Kas Negara di Barenbang

No	Tanggal	NTPN	Setoran (Rp)
1	20 Februari 2025	DBA1E3CIFT8LP8EP	2.500.000
2	4 Maret 2025	E542B1JNG86BJMH7	426.000
Total			2.926.000

- i. Pengembalian TLHA Itjen Nomor R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 16 pada Pusdatik Barenbang (Pertanggungjawaban Beban Barang pada Pusdatik Belum Sesuai Ketentuan) dengan NTPN F4CA21JNG83U0BED tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp5.900.000.
- j. Pengembalian TLHA Itjen Nomor R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 19 pada Pusdatik Barenbang (Pengadaan Barang dalam rangka Pemeliharaan belum dapat diyakini kebenarannya) dengan NTPN BDEE848VVNR37BVJ tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp1.173.660.
- k. Pengembalian atas TLHP BPK tahun 2021 sesuai LHP Nomor 67.B/LHP/XVI/05/2022 (Jasa Konsultan Pusbangjak) yang disetor ke Kas Negara sebesar Rp31.000.00 dengan rincian:

Tabel 181 Pengembalian atas TLJP BPK Tahun 2021 Yang di Setor Ke Kas Negara di Barenbang

No	Tanggal	NTPN	Setoran (Rp)
1	27 Februari 2025	3369B55DFIDK4JNL	10.000.000
2	10/04/2025	33A6861QVD5G4RG3	21.000.000
Total			31.000.000

- l. Pengembalian kelebihan gaji THR Tahun 2024 an. IND (sesuai Kepmenaker No. 52 Tahun 2024) dengan NTPN 8DF660NA0DHOANKD tanggal 3 Maret 2025 sebesar Rp6.220.800
6. Ditjen Binalavotas
- Piutang Lainnya pada Ditjen Binalavotas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp1.503.978.730 dan Rp1.513.307.995.

Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Binalavotas sebagai berikut:

Tabel 182 Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Binalavotas

Kode Satker	Nama Satker	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
035636	BPVP Surakarta	2.080.000	-	2.080.000	-
050302	BPVP Sidoarjo	7.872.760	39.149.050	7.872.760	39.149.050
065106	BPVP Banda Aceh	-	109.300.631	-	109.300.631
089378	BPVP Padang	7.767.969	-	7.767.969	-
191206	BPVP Bantaeng	-	29.472.846		29.472.846
209255	BPVP Kendari	-	14.941.699	43.375	14.898.324
426531	BPVP Serang	178.284.128	-	178.284.128	-
451108	BPVP Samarinda	8.819.150	-	8.819.150	-
452652	BBPVP Makassar	-	3.223.694	498.581	2.725.113
626131	Dit. Binalelatvok	1.308.483.988	-	11.878.450	1.296.605.538
626132	Dit Bina Lavogan	-	11.827.228	-	11.827.228
JUMLAH		1.513.307.995	207.915.148	217.244.413	1.503.978.730

a. BPVP Surakarta

Piutang Lainnya pada BPVP Surakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp0 dan Rp2.080.000.

Mutasi Kurang:

Piutang lainnya pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2.080.000 merupakan Pengembalian Bantuan Program BLKK Mustaqim T.A. 2024 yang disetorkan pada 20 Maret 2025 dengan NTPN 27BD63CIFTBJURMA.

b. BPVP Sidoarjo

Piutang Lainnya pada BPVP Sidoarjo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp39.149.050 dan Rp7.872.760.

Mutasi Tambah:

- 1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas belanja bahan pelatihan pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp25.362.050 dan telah disetor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 183 Pengembalian Hasil Kelebihan Bayar Belanja Pelatihan
Pada BPVP Sidoarjo

No	NTPN	Tanggal	Jumlah Setor(Rp)
1	1267149001B8B18K	27 Apr 2026	19.744.750
2	B2EC061QVMG15IA8	27 Apr 2026	4.379.200
3	D0F3E8N3F676C1AL	27 Apr 2026	1.238.000
4	89D8655DFRTKUA5B	28 Apr 2026	100
JUMLAH			25.362.050

- 2) Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp12.122.000 yang disetor ke kas negara dengan NTPN A0BE255DFRTKOIG3 tanggal 27 April 2026.

- 3) Pengembalian kelebihan tunjangan umum pegawai pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp1.665.000 dan telah disetor ke kas negara sesuai dengan NTPN 9EC5A61QVMG1D61K tanggal 28 April 2026.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang piutang lainnya sebesar Rp7.872.760 merupakan reklasifikasi masuk dari akun Belanja Barang Dibayar Dimuka yang seharusnya disetor ke Kas Negara sesuai surat tagihan Nomor 2.21/1495/PW.10.01/X/2024 Tanggal 08 Oktober 2024.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pelunasan dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp7.872.760 dengan rincian setoran sebagai berikut:

Tabel 184 Penyetoran ke Kas Negara Bantuan Program LHP BPK RI 2023

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengembalian Bantuan Program LHP BPK RI 2023 BLKK Imam Syafii Surabaya	26/02/2025	9FE3B48VVNR6KEG9	6.000.000
2	Pengembalian Bantuan program LHP BPK RI 2023 BLKK Imam Syafii Surabaya	09/07/2025	849640NA0DVRROPP	1.872.760
JUMLAH				7.872.760

c. BPVP Banda Aceh

Piutang Lainnya pada BPVP Banda Aceh per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp109.300.631 dan Rp0.

Mutasi Tambah:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp109.300.631 merupakan pengembalian belanja yang telah disetorkan ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 185 Penyetoran ke Kas Negara Pada BPVP Banda Aceh

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengembalian kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber Softskills atas Temuan BPK Desember 2025	06 Januari 2026	BE5CE7QLVBB6NN8D	36.465.000
2	Penyetoran Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Softskills atas Temuan BPK Desember 2025	06 Januari 2026	130293CIG6F8MRTD	19.890.000
3	Penyetoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Pembimbing Ojt PBL Batch IV Tahun Anggaran 2025	10 Februari 2026	B609055DFRN45HNF	6.712.500
4	Penyetoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Saku OJT PBL LP3I Tahun Anggaran 2025 di BPVP Banda Aceh	10 Februari 2026	4B4900NA0MR64FH6	4.720.000
5	Penyetoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Saku OJT PBL IV Tahun Anggaran 2025 di BPVP Banda Aceh	10 Februari 2026	4102F3CIG6BBF6D	16.640.000
6	Penyetoran Pengembalian biaya Keperluan Pengadaan Jasa Alih Daya Tenaga Pengemudi, Pramukantor, dan Resepsionis Termin 13, SPK No. 2.8/11316/UM.02.01/XII/2024 Tgl 31/12/24 BAST No. 2.8/8928/UM.02.01/XII/2025	28 Januari 2026	12B0155DFRKGCRIE	24.873.131
JUMLAH				109.300.631

d. BPVP Padang

Piutang Lainnya pada BPVP Padang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp0 dan Rp7.767.969.

Mutasi Kurang:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.767.969 merupakan Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang telah disetorkan ke Kas Negara.

Tabel 186 Mutasi Piutang Lainnya pada BPVP Padang

No.	Uraian	Akun	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengembalian BLKK Mardatih Bukik Kandung	425912	07/01/2025	9E5B91JNG80H9NVN	73.200
2	Pengembalian BLKK Baitu Anfa Unas Kab Tebo	425912	08/01/2025	C66C748VNNNIRVS	5.200
3	Pengembalian Belanja BLK K Ruhama Baina Anas	425912	15/01/2025	DD4BA7QLV21FP9TI	31.201
4	Pengembalian Belanja Barang BLKK Al Iffat	425912	21/01/2025	CE82755DFIAIC75	683.200
5	Pengembalian Banprog BLK M Natsir	425912	06/02/2025	154177QLV2432D87	272.000
6	Pengembalian Banprog PBK LPKS Nazea Atas Temuan Audit Kepatuhan Tahun 2024	425912	18/02/2025	0F0AB7QLV24HFIGA	3.200
7	Pengembalian perjalanan dinas UPTD BLK Padang Panjang atas temuan Audit Kepatuhan Tahun 2024	425912	18/02/2025	427066U8F7I52E8C	250.000
8	Pengembalian Banprog PBK BLKK Darul aula Sarolangaun Atas temua audit kepatuhan tahun 2024	425912	20/02/2025	C651F6U8F7I52GKJ	30.000
9	Pemngembalian banprog PBK BLKK Buya Ronah atas temuan audit kepatuhan tahun 2024	425912	20/02/2025	004F83CIFT8JEHRI	640.000
10	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas atas temuan audit kepatuhan tahun 2024	425912	25/02/2025	A42410NA0DHG6EM	1.360.000
11	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas atas temuan audit kepatuhan tahun 2024	425912	25/02/2025	BBBFE1JNG83SU6AJ	1.546.300
12	Pengembalian Uang saku Peserta UPTD BLK Padang Aro	425912	25/02/2025	77FDC6U8F7IBP3AN	120.000
13	Pengembalian uang saku peserta UPTD BLK Padang aro	425912	03/03/2025	476D92G502MH2LOT	60.000
14	Pengembalian Banprog BLKK Iqra	425912	17/03/2025	93D7848VVNT0IVK7	272.000
15	Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai (PNS dan PPPK) Bulan Desember Tahun 2024	425911	17/04/2025	D3C323CIFTEHLT5U	2.421.668
Total					7.767.969

e. BPVP Bantaeng

Piutang Lainnya pada BPVP Bantaeng per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp29.472.846 dan Rp0.

Mutasi Tambah:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.472.846 merupakan pengembalian belanja yang telah disetorkan ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 187 Penyetoran ke Kas Negara Pada BPVP Bantaeng

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah Setor (Rp)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pemeliharaan	3 Februari 2026	24B583CIG6I5MDAD	1.652.640
Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja Pemeliharaan/Perbaikan Tembok Pagar Kantor BPVP Bantaeng berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan telah dibayar lunas	3 Februari 2026	DC33B7QLVBE3NG64	2.283.300
Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja seragam pada pekerjaan pengadaan tenaga alih daya BPVP berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan telah dibayar lunas	6 Apr 2026	280D155DFRSRCCS1	17.240.000
Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran BPJS dalam pengadaan tenaga alih daya BPVP Bantaeng dan telah dibayar lunas	5 Februari 2026	A600F3CIG6I6QFTT	7.186.906
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas tunjangan umum pegawai tugas belajar dan telah dibayar lunas	28 Apr 2026	486003CIG6OT3G3B	1.110.000
JUMLAH			29.472.846

f. BPVP Kendari

Piutang Lainnya pada BPVP Bantaeng per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp14.898.324 dan Rp0.

Mutasi Tambah:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.941.699 merupakan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tahun anggaran yang lalu yang telah disetorkan ke Kas Negara.

Tabel 188 Penyetoran ke Kas Negara Pada BPVP Kendari

No	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah Setor (Rp)
1	5944961QVMCGH98D	10 Maret 2026	1.848.000
2	4F7B71JNGHGIG9F9	10 Maret 2026	5.386.000
3	2372C2G50C2UT9C0	10 Maret 2026	4.586.000
4	91F161JNGHK38G3D	28 April 2026	2.158.324
5	EA4790NA0N1MRG7Q	28 April 2026	929.000
JUMLAH			14.907.324

g. BPVP Serang

Piutang Lainnya pada BPVP Serang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp178.284.128.

Mutasi Kurang:

Mutasi Piutang Lainnya Pada BBPVP serang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp178.284.128 sebagai berikut:

1) Pengembalian kegiatan pelatihan sebesar Rp27.302.400

Tabel 189 Mutasi Piutang Lainnya (Pengembalian Kegiatan Pelatihan)
Pada Satker BPVP Serang

No.	Uraian	Akun	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Bantuan Program Global Skills / LPK Swasta Tahun 2024 (1 Paket) - LPKS Mutiara Cilegon	425912	05/03/2025	1F6DD6U8F7KO6N5I	300.000
2	Bantuan Program BLK Komunitas Tahun 2024 (1 Paket) - BLKK Al Mubarak Serang	425912	06/03/2025	1F7B455DFIFVCNU6	38.400
3	Bantuan Program BLK Komunitas Tahun 2024 (2 Paket) - BLKK Ponpes Sirojul Athfal	425912	17/03/2025	8EDF31JNG86MNL0	21.720.000
4	Bantuan Program BLK Komunitas Tahun 2024 (2 Paket) - BLKK Assalamiyah Maja	425912	07/03/2025	C274B61QVD2BPONU	2.710.000
5	Bantuan Program BLK Komunitas Tahun 2024 (2 Paket) - BLKK Ponpes Darul Huda Cikoneng	425912	05/03/2025	B7C476U8F7KO6PGI	2.534.000
Total					27.302.400

2) Pengembalian Belanja Modal Renovasi dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp141.272.938

Tabel 190 Mutasi Piutang Lainnya (Pengembalian Belanja Modal Renovasi dan Belanja Pemeliharaan) Pada Satker BPVP Serang

No.	Uraian	Akun	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengadaan Jasa Renovasi Asrama Seruni 1 - CV. Inti Prakarsa	425913	11/03/2025	2B11448VVNTNH007	7.546.739
2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Perbaikan Asrama Seruni 1 - CV. Inti Prakarsa	425912	11/03/2025	FF5DA6U8F7KS00ER	14.989.827
3	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Perbaikan Toilet, Keramik dan Plafond - CV. Inti Prakarsa	425912	11/03/2025	013A96U8F7KSNRG9	17.064.783
4	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Pemasangan Paving Block - CV. Karya Mutiara Abadi	425912	11/03/2025	F5DF22G502OUMR10	5.795.058
5	Pengadaan Jasa Renovasi Gerbang - CV Karya Prima Graha	425913	11/03/2025	A768E3CIFTBB3PQ3	55.868.573
6	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Perbaikan Pintu, Jendela, Saklar dan Stop Kontak - CV. Karya Prima Graha	425912	11/03/2025	76F1E55DFIG3TQDG	1.260.000
7	Pengadaan Jasa Renovasi Ruang Terbuka Kios Siapkerja - PT. Sinar Jaya Mukti	425913	11/03/2025	575476U8F7KSNONK	3.779.701
8	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Perbaikan Workshop PLC Ex TIK, Instalasi Listrik Asrama dan Kanopi Membran - PT. Sinar Jaya Mukti	425912	11/03/2025	1E99261QVD2GANLG	3.352.228
9	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Perbaikan Gedung Utama, Kios Siapkerja dan Genset MUT - PT. Sinar Jaya Mukti	425912	11/03/2025	66C5C2G502OUMMLT	5.745.327
10	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat Pekerjaan Pengecatan Dinding Dalam Seruni 1 - PT. Sinar Jaya Mukti	425912	11/03/2025	0D80A0NA0DK5SLAN	2.916.536
11	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor Pekerjaan Perbaikan Jalan dan Jalur Difabel - PT. Tri Samira Jaya	425912	11/03/2025	93AF561QVD2GAKK9	22.954.166
Total					141.272.938

3) Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp9.708.790

Tabel 191 Mutasi Piutang Lainnya (Pengembalian Belanja Pegawai) Pada Satker BPVP Serang

No.	Uraian	Akun	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai TAYL Tunjangan Kinerja a.n Joko Riyadi bulan Desember 24 SPM 03443A tgl 11 Des 24	425911	23/01/2025	B54F51JNG80VJJBP	4.948.000
2	Pengembalian kelebihan pmbayaran blnja pegawai Tunjangan Kinerja a.n Sally Hannah M, bulan Agustus s.d Des 24 SPM no 02472A; 02938A; 03223A; 03435A; 03443A	425911	17/04/2025	79D1B6U8F7O27PO7	4.760.790
Total					9.708.790

h. BPVP Samarinda

Piutang Lainnya pada BPVP Samarinda per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp8.819.150.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang Piutang Lainnya sebesar Rp8.819.150 berasal dari:

- 1) Temuan Audit Kinerja sesuai LHP Inspektorat Jenderal TA 2024 sebesar Rp5.380.400 sudah disetorkan ke kas negara sebagai berikut:

Tabel 192 Mutasi Kurang Piutang Lainnya (Temuan Audit Kinerja) Pada Satker BPVP Samarinda

No.	Uraian	Akun	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	Pengembalian kelebihan pembayaran Pengadaan Bahan Pelatihan Otomotif, Bangunan, dan Pariwisata Batch 1 2.11/204/SPK.PPK/UM.02/II/2024 15-01-2024 (CV. 2 Putra Perkasa)	425912	07/01/2025	4BA1861QVCSB201B	747.700
2	Pengembalian kelebihan pembayaran Pengadaan Bahan Pelatihan Pariwisata, TIK, Bisnis Manajemen, Teknologi Pengolahan Pertanian dan Fashion Technology Batch 4 no.2.11/1262/SPK.PPK/UM.02/II/2024 (CV. Mulawarman)	425912	07/01/2025	2FE8D2G502IPDVGJ	1.641.500
3	Pengembalian kelebihan pembayaran kontrak Pengadaan Bahan PBK batch 2 dengan no kontrak 2.11/542/SPK.PPK/Um.02/II/2024 tgl 07-02-2024 CV. 2 PUTRA PERKASA	425912	08/01/2025	EAD007QLV213RVPB	2.991.200
Total					5.380.400

- 2) Temuan Audit Kinerja LHP Inspektorat Jenderal TA 2024 sebesar Rp3.438.750 sesuai surat tagihan Nomor 2.1.1/95/UM.02.00/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

i. BBPVP Makassar

Piutang Lainnya pada BBPVP Makassar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.725.113 dan Rp0. Adapun rincian Piutang Lainnya pada BBPVP Makassar sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai atas tunjangan umum pegawai tugas belajar dan telah dibayar lunas sesuai dengan:
 - a) NTPN EC0ED6U8FH2DO0PD tanggal 27 April 2026 sebesar Rp1.110.000
 - b) NTPN 068A20NA0N1MT0OI tanggal 27 April 2026 sebesar Rp1.110.000
- 2) Setoran sewa rumah dinas Tahun 2025 yang dilakukan pada tanggal 27 April 2026 sesuai dengan NTPN 02D7F7QLVBKQ4QSM sebesar Rp505.113.

j. Direktorat Bina Lemlatvok

Piutang Lainnya pada Ditjen Bina Lemlatvok per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.296.122.510 dan Rp1.308.483.988.

Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Bina Lemlatvok sebagai berikut:

Mutasi Kurang:

Tabel 193 Mutasi Piutang Lainnya pada Ditjen Bina Lemlatvok

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		31 Des 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	CV Ribka Puteri Sejati	532.038.138	-	-	532.038.138
2	BLKK Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado	400.000.000	-	-	400.000.000
3	BLKK Yayasan Sabilul Ulum Al Hidayah Sidoarjo	350.000.000	-	-	350.000.000
5	Pengakuan Piutang Lainnya atas hasil verifikasi dan validasi belanja dibayar dimuka sesuai surat Inspektorat Jenderal Kemnaker Nomor R-6/28/PW.06/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024	26.445.850	-	11.878.450	14.567.400
JUMLAH		1.308.483.988	-	11.878.450	1.296.605.538

- 1) Piutang Lainnya dari CV. Ribka Puteri Sejati sebesar Rp532.038.138 merupakan jaminan uang muka PT. Asuransi Rama Satria Wibawa atas belanja barang yaitu peralatan dan mesin dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang dilakukan oleh penyedia barang yaitu pada CV. Ribka Puteri Sejati.

Piutang terjadi atas kontrak pengadaan peralatan pelatihan UPTD BLK sebesar Rp2.660.190.691 dengan kontrak Nomor SP.139/KP/PPK.2/XI/2020 pada tanggal 12 November 2020 dengan uang muka sesuai SP2D Nomor 201821303045715 tanggal 16 Desember 2020. Dan juga dengan jaminan Uang Muka PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor 36.1103.11.20.285012.010 pada tanggal 12 November 2020 sebesar Rp532.038.138.

CV. Ribka Puteri Sejati tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2021. Namun PT. Asuransi Rama Satria Wibawa belum melakukan penyetoran atas piutang tersebut.

Tindak lanjut yang dilakukan Direktorat Bina Lemlatvok yaitu:

- Bina Lemlatvok segera melakukan penagihan setelah kontrak berakhir kepada CV. Ribka Puteri Sejati melalui surat nomor B.01/KP/PPK.2/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan via whatsapp kepada Direktur CV. Ribka Puteri Sejati.
- Pada tanggal 11 Januari 2021, PPK Bina Lemlatvok menugaskan pegawai untuk mendatangi langsung PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dan melakukan upaya pencairan atas jaminan tersebut, namun belum ada tanggapan.
- Pada tanggal 20 Januari 2022, Direktur Bina Lemlatvok mengirimkan surat pengaduan kepada Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor SR-6/EP.1211/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal tindak lanjut pengaduan bahwa surat pengaduan telah di register/input melalui APPK dan sudah diterima oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme

penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK.

- e) Atas jawaban dari PUJK, Direktur Bina Lemlatvok mengirim surat Klaim Jaminan dengan nomor 601/131/LP.01.02/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 berikut dokumen pendukung yang diminta.
 - f) Atas piutang ini sudah diajukan surat kepada Ketua TPKN Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/4797/KU.02.001/IX/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohonan Pengajuan Usulan TPKN Dit. Lemlatvok dan BBPVP Bandung).
- 2) Piutang lainnya sebesar Rp400.000.000 berupa piutang penyaluran bantuan gedung dalam bentuk uang yang dikenakan terhadap BLKK Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara (PPNM) Bolaang Mongondow. Piutang berasal karena adanya kendala antara pihak yayasan dengan kepala desa setempat sehingga pembangunan gedung BLKK tidak dapat dilanjutkan. Atas kegagalan penyelesaian pembangunan tersebut, yayasan diwajibkan mengembalikan seluruh dana bantuan senilai Rp500.000.000 ke Kas Negara. Pihak lembaga telah melakukan pengembalian sebagian sebesar Rp100.000.000 pada 11 November 2022 dengan NTPN: 5796755DEN9SB5MP, sehingga menyisakan saldo piutang sebesar Rp400.000.000. Sisa dana tersebut awalnya tersaji sebagai akun Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2022, namun kemudian dilakukan koreksi pencatatan ke akun Piutang berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 12 Mei 2023 dengan kewajiban pemenuhan jaminan yang valid. Sebagai tindak lanjut penyelesaian, atas piutang ini sudah diajukan surat kepada Ketua TPKN Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/4797/KU.02.001/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohonan Pengajuan Usulan TPKN Dit. Lemlatvok dan BBPVP Bandung.
- 3) Piutang lainnya sebesar Rp350.000.000 berupa piutang penyaluran bantuan gedung dalam bentuk uang yang dikenakan terhadap BLKK Yayasan Sabilul Ulum Al Hidayah (SUAH) Sidoarjo merupakan temuan atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Piutang terjadi karena Yayasan SUAH mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, namun belum melakukan pengembalian dana tersebut ke kas negara. Atas sisa dana yang belum dikembalikan, telah disampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai dasar koreksi pencatatan dari akun Belanja Dibayar di Muka menjadi akun Piutang, dengan kewajiban melampirkan jaminan yang valid. Sebagai tindak lanjut penyelesaian piutang ini, telah diajukan surat kepada Ketua TPKN Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/4797/KU.02.001/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohonan Pengajuan Usulan TPKN Direktorat Lemlatvok dan BBPVP Bandung.
- 4) Pengakuan Piutang Lainnya sebesar Rp26.445.850 merupakan hasil verifikasi dan validasi belanja dibayar dimuka yang harus dikembalikan ke Kas Negara sesuai surat Inspektorat Jenderal Kemnaker Nomor R-6/28/PW.06/XII/2024 tanggal 30 Juni 2025.
- a) Yayasan Pelangi Kasi Sesama sebesar Rp2.490.500 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN 7F51855DFJALECC1 tanggal 1 Desember 2025.

b) Yayasan Ta'limul Qur'an sebesar Rp9.387.950 yang telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN FD5FF7QLV24E95JP tanggal 17 Februari 2025.

Sampai dengan 31 Desember 2025, masih terdapat satu lembaga yaitu Yayasan Anak Papua Cerdas Cermat sebesar Rp14.567.400 yang belum melakukan pengembalian ke Kas Negara.

k. Dit. Binalavogan

Piutang Lainnya pada Dit. Binalavogan per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.827.228 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Piutang Lainnya tersebut merupakan pengembalian uang saku tahun 2025 untuk 3 orang peserta magang, yang terjadi akibat kelebihan pembayaran pada tahun 2025 dan telah dikompensasikan dengan uang saku pada bulan Maret 2026.

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
(Rp3.118.899.144)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp3.118.899.144) dan (Rp3.138.878.710)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Tabel 194 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(412.205)	(1.679.409)	1.267.204	(75,46)
Inspektorat Jenderal	-	(9.341)	9.341	(100,00)
Ditjen Binapenta & PKK	(3.106.221.236)	(3.127.292.276)	21.071.040	(0,67)
Ditjen PHI & JSK	(3.898.881)	(1.516.939)	(2.381.942)	157,02
Ditjen Binwasnaker & K3	(222.998)	-	(222.998)	-
Barenbang	(640.578)	(639.068)	(1.510)	0,24
Ditjen Binalavotas	(7.503.246)	(7.741.677)	238.431	(3,08)
Jumlah	(3.118.899.144)	(3.138.878.710)	19.979.566	(0,64)

Seluruh Piutang Lainnya (Piutang Bukan Pajak) dalam kategori Piutang Lancar dengan penyisihan sebesar 0,5% dari nilai Piutang.

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp62.642.021

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 195 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	-	7.400.000	(7.400.000)	(100,00)
Ditjen Binalavotas	-	55.242.021	(55.242.021)	-
Jumlah	-	62.642.021	(62.642.021)	-

1. Sekretariat Jenderal

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp7.400.000.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.400.000 yang terdapat pada Biro Kerjasama merupakan pembebanan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap JN pada Tahun 2024 atas kelalaian menghilangkan kendaraan dinas roda 2 (dua) Honda Supra tipe NF 125 TRF Tahun 2010 warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 6877 SQV.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tagihan tersebut telah dilakukan pelunasan dengan penyetoran ke kas negara sesuai NTPN FEF487QLV21EMDAE tanggal 14 Januari 2025 sebesar Rp7.400.000

2. Ditjen Binalavotas

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Ditjen Binalavotas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp55.242.021.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp55.242.021 terdapat pada BPVP Belitung yang berasal dari temuan kelebihan pembayaran pengadaan alat selam pada tahun 2021 sesuai LHP BPK Nomor 67B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp115.242.021.

Temuan tersebut diakui sebagai piutang dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKNN) tanggal 9 Februari 2023 atas nama RF yang menyatakan bahwa jaminan piutang berupa BPKB mobil Merk Brio R.S 1.2 tahun 2016 nomor polisi BL 1498 JA, nomor rangka/NIK/VIN MHRDD1890GJ700289 dan nomor mesin L12B31803500. Pada tahun 2025 telah dilakukan pelunasan dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp55.242.021.

Rincian setoran sebagai berikut:

Tabel 196 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Pada Ditjen Binalavotas

Piutang Awal			Rp	115.242.021
Setoran s.d. 2024			Rp	60.000.000
Setoran 2025				
1	03/02/2025	C84570NA0DERQFTL	Rp	50.000.000
2	22/07/2025	7345F55DFISD3VMV	Rp	5.242.021
Piutang TGR BPVP Belitung 2025			Rp	-

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp313.210) dengan rincian:

Tabel 197 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	-	(37.000)	37.000	(100,00)
Ditjen Binalavotas	-	(276.210)	276.210	(100,00)
Jumlah	-	(313.210)	313.210	(100,00)

Persediaan
Rp50.013.131.480

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*Supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.013.131.480 dan Rp97.544.463.225.

Tabel 198 Rincian Persediaan Menurut Jenis Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
117111	Barang Konsumsi	8.463.943.029	5.259.092.952	3.204.850.077	60,94
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	97.489.254	128.588.014	(31.098.760)	(24,18)
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	40.949.390.143	43.415.393.423	(2.466.003.280)	(5,68)
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	-	48.428.609.000	(48.428.609.000)	-
117131	Bahan Baku	361.723.371	61.427.000	300.296.371	488,87
117199	Persediaan Lainnya	140.585.683	251.352.836	(110.767.153)	(44,07)
Jumlah		50.013.131.480	97.544.463.225	(47.531.331.745)	(48,73)

Sedangkan rincian Persediaan Menurut Eselon I disajikan sebagai berikut.

Tabel 199 Rincian Persediaan Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	775.168.270	644.125.351	131.042.919	20,34
Inspektorat Jenderal	9.087.400	8.728.000	359.400	4,12
Ditjen Binapenta & PKK	502.002.906	629.899.699	(127.896.793)	(20,30)
Ditjen PHI & JSK	113.303.931	98.064.325	15.239.606	15,54
Ditjen Binwasnaker & K3	590.196.648	176.964.294	413.232.354	233,51
Barembang Ketenagakerjaan	61.714.500	191.398.700	(129.684.200)	(67,76)
Ditjen Binalavotas	47.961.657.825	3.480.093.583	44.481.564.242	1.278,17
Jumlah	50.013.131.480	5.229.273.952	44.783.857.528	856,41

1. Barang Konsumsi

Barang Konsumsi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.463.943.029 dan Rp5.259.092.952 menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 200 Barang Konsumsi Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es 1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	775.168.270	644.125.351	131.042.919	20,34
Inspektorat Jenderal	9.087.400	8.728.000	359.400	4,12
Ditjen Binapenta & PKK	412.822.406	659.718.699	(246.896.293)	(37,42)
Ditjen PHI & JSK	113.303.931	98.064.325	15.239.606	15,54
Ditjen Binw asnaker & K3	589.589.548	176.964.294	412.625.254	233,17
Barembang Ketenagakerjaan	61.714.500	191.398.700	(129.684.200)	(67,76)
Ditjen Binalavotas	6.502.256.974	3.480.093.583	3.022.163.391	86,84
	8.463.943.029	5.259.092.952	3.204.850.077	60,94

Barang Konsumsi pada Sekretariat Jenderal diantaranya berupa alat tulis kantor, komputer suplies, alat/bahan kegiatan kantor lainnya dan persediaan obat-obatan pada Klinik Pratama Kemnaker.

Barang Konsumsi pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp775.168.270 terdapat pada:

Tabel 201 Barang Konsumsi pada Sekretariat Jenderal

Kode Satker	Nama Satker	BA Stock Opname
450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	Nomor: 1/3762/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
450938	Biro Umum	Nomor: 1/1238/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
450938	Biro Hukum	Nomor: 1/4026/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
450938	Biro Humas	Nomor: 1/1242/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
450938	Biro Kerja Sama	Nomor: 1/2520/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
450938	Biro perencanaan dan Mk	Nomor: 1/883/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
450938	Biro Keuangan dan BMN	Nomor: 1/3761/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
450938	Biro OSDM	Nomor: 1/22/UM.03.02/I/2026 tanggal 23 Januari 2026.
		Total Barang Konsumsi Setjen

b. Inspektorat Jenderal

Barang Konsumsi pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp9.087.400 berupa alat tulis kantor, komputer suplies, alat/bahan kegiatan kantor lainnya sesuai dengan Berita Acara *Stock Opname* Barang Persediaan Nomor 6/2926/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

c. Ditjen Binapenta dan PKK

Barang Konsumsi pada Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp412.822.406 berupa alat tulis kantor, komputer *suplies*, alat/bahan kegiatan kantor lainnya terdapat pada:

Tabel 202 Barang Konsumsi pada Ditjen Binapenta dan PKK

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	94.143.083
451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	305.114.019
690634	BPKK Bekasi	13.565.304
		Total Barang Konsumsi Ditjen Binapenta dan PKK
		412.822.406

1) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp94.143.083

Pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp94.143.083 sesuai Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Nomor 3.1./8/UM.03.04/I/2026 tanggal 8 Januari 2026. Barang Konsumsi terdiri Alat Tulis Kantor (ATK), komputer *supplies*, bahan penunjang kedokteran dan alat kebutuhan kegiatan kantor lainnya.

2) Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp305.114.019

Pada Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp305.114.019 terdiri dari alat tulis, kertas, mouse dan lain-lain digunakan untuk sekretariat dan unit teknis di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan No Pada BPKK Bekasi sebesar Rp13.565.304 terdiri dari alat tulis kantor, berbagai kertas, mouse dan lain-lain sesuai Berita Acara *Stock Opname* persediaan periode semester II Tahun 2025 Nomor 3.8/41/UM.03/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.

3) BPKK Bekasi sebesar Rp13.565.304

Pada BPKK Bekasi sebesar Rp13.565.304 terdiri dari alat tulis kantor, berbagai kertas, mouse dan lain-lain sesuai Berita Acara *Stock Opname* persediaan periode semester II Tahun 2025 Nomor 3.8/41/UM.03/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.

d. Ditjen PHI dan JSK

Barang Konsumsi pada Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp113.303.931 berupa alat tulis kantor, komputer *supplies*, alat/bahan kegiatan kantor lainnya dengan BA *Opname Fisik* Nomor 4/2442/UM0302/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

e. Ditjen Binwasnaker dan K3

Barang Konsumsi pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp589.589.548 berupa alat tulis kantor, komputer *supplies*, alat/bahan kegiatan kantor lainnya, alat dan bahan penunjang laboratorium terdapat pada:

Tabel 203 Barang Konsumsi pada Ditjen Binwasnaker dan K3

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
350079	Balai K3 Bandung	452.373.669
350080	Balai Hiperkes dan K2 Surabaya	3.065.775
350081	Balai K3 Medan	58.611.110
350084	Balai K3 Jakarta	1.267.494
651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	74.271.500
Total Barang Konsumsi Ditjen Binwasnaker dan K3		589.589.548

1) Balai K3 Bandung sesuai dengan BA *Opname Fisik* No. 5.3/367/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

2) Balai Hiperkes dan K2 Surabaya sesuai dengan BA *Opname Fisik* No. 5.6/156/UM.04.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) Balai K3 Medan sesuai dengan BA *Opname Fisik* No. 5.2/13/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

4) Balai Besar K3 Jakarta BA *Opname Fisik* dengan BA *Opname Fisik* No. 5.5/329/KU.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

5) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai dnegan BA *Opname Fisik* No.

5/75/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan No. 5/79/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

f. Barenbang Ketenagakerjaan

Barang Konsumsi pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp61.714.500 berupa alat tulis kantor, komputer suplies, alat/bahan kegiatan kantor lainnya sesuai dengan Berita Acara *Stock Opname* Fisik sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan Berita Acara *Stock Opname* Fisik Nomor 7/99/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp48.148.000.
- 2) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Berita Acara *Stock Opname* Fisik Nomor 7/437/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.
- 3) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Berita Acara *Stock Opname* Fisik Nomor 7/3313/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp9.156.150.
- 4) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Berita Acara *Stock Opname* Fisik No: 7/134/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.410.350.

g. Ditjen Binalavotas

Barang Konsumsi pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp6.502.256.974 berupa alat tulis kantor, komputer suplies, alat/bahan kegiatan kantor lainnya, penunjang kegiatan kantor, dan sisa bahan pelatihan terdapat pada:

Tabel 204 Barang Konsumsi pada Ditjen Binalavotas

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
021212	BPVP Bandung Barat	579.483.300
035636	BPVP Surakarta	85.583.450
050302	BPVP Sidoarjo	58.100
051102	BPVP Banyuwangi	842.116.670
065106	BPVP Banda Aceh	2.250.950
089378	BPVP Padang	174.430.600
191206	BBPVP Bantaeng	70.031.360
209255	BPVP Kendari	17.571.398
219228	BPVP Ambon	50.658.653
230302	BPVP Lombok Timur	12.020.000
352630	BPVP Pangkep	66.764.800
352631	BPVP Belitung	1.272.000
426531	BBPVP Serang	457.268.854
451026	Satker Ditjen Binalavotas	135.817.657
451094	BBPVP Medan	70.857.770
451108	BPVP Samarinda	63.207.213
452533	Sekretariat BNSP	2.273.845.782
452542	BBPVP Bandung	597.222.996
452558	BBPVP Bekasi	607.911.959
452589	BPVP Sorong	63.824.112
452609	BBPVP Semarang	2.660.000
452652	BBPVP Makassar	290.763.500
626131	Direktorat Bina Lemlatvok	34.935.850
626132	Direktorat Bina Latvogan	1.700.000
Total Barang Konsumsi Ditjen Binalavotas		6.502.256.974

2. Bahan Untuk Pemeliharaan

Bahan Untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp97.489.254 dan Rp128.588.014 terdapat pada:

Tabel 205 Bahan Untuk Pemeliharaan Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binwasnaker & K3	607.100	-	607.100	-
Ditjen Binalavotas	96.882.154	128.588.014	(31.705.860)	(24,66)
Jumlah	97.489.254	128.588.014	(31.098.760)	(24,18)

Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp97.489.254 terdapat pada

a. Ditjen Binwasnaker sebesar Rp607.100

Bahan Untuk Pemeliharaan Pada Ditjen Binwasnaker terdapat pada satker Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp607.100 berada dalam kondisi baik.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp96.882.154 berupa perlengkapan perawatan dan kebersihan kantor terdapat pada:

Tabel 206 Barang Untuk Pemeliharaan Pada Ditjen Binalavotas

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
035636	BPVP Surakarta	831.900
089378	BPVP Padang	4.448.900
209255	BBPVP Kendari	2.407.770
426531	BBPVP Serang	5.323.020
451026	Satker Ditjen Pembinaan dan Produktivitas	3.259.129
452542	BBPVP Bandung	41.574.100
452558	BBPVP Bekasi	39.037.335
Total Bahan untuk Pemeliharaan Ditjen Binalavotas		96.882.154

- 1) BPVP Surakarta sebesar Rp831.900 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Nomor 2.10/10/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 2) BPVP Padang sebesar Rp4.448.900 yang berasal dari koreksi pengadaan perlengkapan rumah tangga berupa persediaan barang konsumsi yang masih tersedia per 31 Desember 2025 berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 2.15/41/KU.08.03/IV/2026 tanggal 28 April 2026.
- 3) BPVP Kendari sebesar Rp2.407.770 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Nomor 2.13/2760/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 4) BBPVP Serang sebesar Rp5.323.020 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Nomor: 2.3/134/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 5) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp3.259.129 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Nomor 2/4675/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 6) BBPVP Bandung sebesar Rp41.574.100 merupakan koreksi pencatatan sisa perlengkapan asrama sebagai persediaan Barang Konsumsi pada periode 14 berdasarkan Surat Keterangan Kepala BBPVP Bandung Nomor 2.11/197/UM.03.02/IV/2026 tanggal 28 April 2026.

7) Ditjen BBPVP Bekasi sebesar Rp39.037.335 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Nomor: 2.4/21/UM.03.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3. Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp40.949.390.143 dan Rp43.415.393.423 terdapat pada:

Tabel 207 Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binalavotas	40.949.390.143	43.415.393.423	(2.466.003.280)	(5,68)
Jumlah	40.949.390.143	43.415.393.423	(2.466.003.280)	(5,68)

Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp40.949.390.143 terdapat pada Ditjen Binalavotas di satker Dit. Bina Lemlatvok. Peralatan dan mesin tersebut merupakan peralatan dan mesin yang ditujukan kepada penerima bantuan BLKK Tahun Anggaran 2025 namun proses hibah belum selesai dilaksanakan. Rincian peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 208 Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Kode	Uraian	Supplier	Jumlah (Rp)
1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.110/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.474.184.049
1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.112/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	213.300.995
1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 FMS BA.114/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	FATIH MAKMUR SEJAHTERA	2.003.144.850
1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.116/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	233.589.955
1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.118/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	228.474.045
1010501004001900	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.120/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.122/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.124/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.126/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.128/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.130/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.132/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	13.397.700
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.134/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.473.166.865
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.136/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.447.553.803
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.138/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.435.231.949
1010501004001910	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.140/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.403.527.164
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.142/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.366.970.104
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.144/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.032.605.396
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.146/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.390.156.791
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 BCA BA.148/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	BERKAH CAHAYA ABADI	3.400.030.924
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.152/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	3.083.718.355
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.154/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	476.667.300
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.156/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	2.254.972.104
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 GA BA.158/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	GLORY ALBETA	22.091.597
1010501004001920	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.162/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.280.784
1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.164/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.336.284
1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.166/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.352.934
1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.168/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.398.444
1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 WIN BA.170/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	WIJAYAKUSUMA INTER NUSA	35.321.854
1010501004001930	Peralatan BLKK 2025 GMP BA.172/KP/E-CAT/PPK.1/XI/2025	GENCAR MATADA PERSADA	891.443.896
JUMLAH			40.949.390.143

Per 31 Desember 2025 bantuan berupa peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat teralokasi senilai Rp40.949.390.143 dengan rincian tabel sebagai berikut:

TAHUN	PENERIMA	SELESAI SK	PROGRES PENYELESAIAN SK	SUDAH PERSETUJUAN	BELUM PERSETUJUAN	JUMLAH
2025	BLKK	-	-	-	-	40.949.390.143
Total 2025		-	-	-	-	40.949.390.143

Persediaan diserahkan kepada masyarakat Tahun 2025 merupakan bantuan berupa peralatan dan mesin yang diserahkan kepada Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Sampai dengan periode pelaporan belum ada pengajuan persetujuan hibah kepada Pengguna Barang (PB) sehingga masih tersaji dalam Neraca.

4. Bahan Baku

Bahan Baku per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp361.723.371 dan Rp61.427.000 menurut Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 209 Bahan Baku Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binalavotas	361.723.371	61.427.000	300.296.371	488,87
Jumlah	361.723.371	61.427.000	300.296.371	488,87

Bahan Baku Pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp217.736.600 terdapat pada:

Tabel 210 Bahan Baku Pada Ditjen Binalavotas

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
021212	BPVP Bandung	54.827.000
050302	BPVP Sidoarjo	137.938.771
209255	BBPVP Kendari	20.379.600
452242	BBPVP Bandung	6.048.000
452595	BBPVP Ternate	142.400.000
452652	BBPVP Makassar	130.000
Total Bahan Baku Ditjen Binalavotas		361.723.371

- BPVP Bandung Barat sebesar Rp54.827.00 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik (*Stock Opname*) Persediaan Nomor 2.17/48/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- BPVP Sidoarjo sebesar Rp137.938.771 merupakan Pencatatan atas barang persediaan hasil uji petik BPK di BPVP Sidoarjo tanggal 10 Februari 2026 dan didukung Surat Keterangan Kepala BPVP Sidoarjo Nomor 2.21/4871/UM.03.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- BPVP Kendari sebesar Rp20.379.600 berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan Nomor 2.13/2760/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- BBPVP Bandung sebesar Rp6.048.000 merupakan pencatatan sisa bahan kegiatan *service gratis* sebagai persediaan Bahan Baku berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Nomor 2.5/20/UM.03.02/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas Persediaan BPK Nomor 99/BAPF/Subtim.1/LK-

2025/KEMNAKER/02/2026 tanggal 23 Februari 2026.

- e. BPVP Ternate sebesar Rp142.400.000 berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Fisik Nomor 2.14/358/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- f. BBPVP Makassar sebesar Rp130.000 berdasarkan Berita Acara *Opname Fisik* Nomor 2.13/717/UM.03.04/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025.

5. Persediaan Lainnya

Persediaan Lainnya sebesar Rp140.585.683 terdapat pada:

Tabel 211 Persediaan Lainnya Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binapenta dan PKK	89.180.500	170.181.000	(81.000.500)	(47,60)
Ditjen Binalavotas	51.405.183	81.171.836	(29.766.653)	(36,67)
Jumlah	140.585.683	251.352.836	(110.767.153)	(44,07)

a. Ditjen Binapenta sebesar Rp89.180.500

Persediaan Lainnya terdapat pada BBPCK Bandung Barat terdiri dari obat-obatan untuk keperluan ruang kesehatan, dan tanaman. Terdapat nilai hibah keluar persediaan lainnya pada pelaporan semester 1 yaitu hibah hewan kuda dewasa sebanyak 2 ekor senilai Rp30.000.000 dan Kambing 1 ekor senilai Rp2.200.000 sesuai BAST Hibah BMN Berupa Persediaan Hewan Ternak BBPCK Bandung Barat Kepada Yayasan Sayid Intaniyah, Nomor 3.1/1602/UM.03.03/V/2025 dan 0177/YASIN/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp51.405.183

Tabel 212 Persediaan Lainnya Pada Ditjen Binalavotas

Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
021212	BPVP Bandung Barat	33.149.800
219228	BPVP Ambon	101.200
426531	BBPVP Serang	14.911.546
451026	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	2.040.341
452652	BBPVP Makassar	1.202.296
Total Persediaan Lainnya Ditjen Binalavotas		51.405.183

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp33.149.800

Persediaan Lainnya berupa tanaman anggrek, domba, ikan, ayam, jeruk, pohon mangga berdasarkan Berita Acara *Opname Fisik* (Stock *Opname*) Persediaan Nomor 2.17/48/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

2) BPVP Ambon sebesar Rp101.200

Persediaan Lainnya berupa obat padat dan obat lainnya sesuai dengan Berita Acara *Opname Fisik* Nomor 2.15/1335/KU.07.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) BBPVP Serang sebesar Rp14.911.546

Persediaan Lainnya berupa sisa bahan pelatihan kejuruan listrik berupa komponen peralatan Listrik dan lain-lain Berita Acara *Opname Fisik* Nomor 2.3/134/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

4) Ditjen Binalavotas sebesar Rp2.040.341

Persediaan Lainnya pada satker Ditjen Binalavotas Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Nomor 2/4675/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

5) BBPVP Makasar sebesar Rp1.202.296

Persediaan lainnya terdiri atas persediaan Kotak P3K 2 buah dan sisa peralatan pelatihan berdasarkan Berita Acara *Opname Fisik* Nomor 2.13/717/UM.03.04/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025.

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap

Rp11.810.263.086.567

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.810.263.086.567 dan Rp12.219.100.490.118

Aset Tetap Kemnaker per 31 Desember 2025 merupakan aset tetap dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemnaker termasuk satker *eks* Tugas Pembantuan *inaktif* yang proses likuidasinya belum selesai.

Rincian Aset Tetap Menurut Akun per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 213 Aset Tetap Menurut Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	7.696.554.936.101	7.734.394.714.054	(37.839.777.953)	(0,49)
Peralatan dan Mesin	3.632.250.069.370	3.523.536.676.853	108.713.392.517	3,09
Gedung dan Bangunan	3.785.415.290.937	3.762.417.550.990	22.997.739.947	0,61
Jalan Irigasi dan Jaringan	126.640.647.532	118.234.756.188	8.405.891.344	7,11
Aset Tetap Lainnya	17.035.446.536	17.700.658.119	(665.211.583)	(3,76)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	271.054.960.523	498.536.196.333	(227.481.235.810)	(45,63)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	15.528.951.350.999	15.654.820.552.537	(125.869.201.538)	(0,80)
Akumulasi Penyusutan	(3.718.688.264.432,00)	(3.435.720.062.419,00)	(282.968.202.013)	8,24
Nilai Buku Aset Tetap	11.810.263.086.567	12.219.100.490.118	(408.837.403.551)	(3,35)

C.2.1. Tanah

Tanah

Rp7.696.554.936.101

Aset Tanah yang dimiliki Kemnaker per tanggal per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.696.554.936.101 dan Rp7.734.394.714.054.

Rincian Nilai Tanah Kemnaker pada masing-masing Unit Eselon I terdapat pada tabel berikut.

Tabel 214 Rincian Tanah Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	3.115.438.716.000	3.115.438.716.000	-	-
Ditjen Binapenta dan PKK	267.431.035.000	267.431.025.000	10.000	0,00
Ditjen Binwasnaker & K3	336.695.750.000	336.695.750.000	-	-
Ditjen Binalavotas	3.976.989.435.101	4.014.829.213.054	(37.839.777.953)	(0,94)
Jumlah	7.696.554.936.101	7.734.394.704.054	(37.839.767.953)	(0,49)

Mutasi aset tetap – Tanah sebagai berikut

Tabel 215 Mutasi Aset Tetap - Tanah

Tanah Per 31 Desember 2024		Rp 7.734.394.714.054
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	241.095.760.274
Transfer Masuk	Rp	187.787.047
Hibah Masuk	Rp	1.648.037.047
Reklasifikasi Masuk	Rp	631.248.587.000
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	Rp	(383.500.000)
Koreksi Susulan	Rp	(241.095.760.274)
Transfer Keluar	Rp	(187.787.047)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(631.248.587.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(39.104.315.000)
Tanah Per 31 Desember 2025		Rp 7.696.554.936.101

Mutasi Tambah:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp241.095.760.274 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berasal dari koreksi pemecahan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 216 Mutasi Tambah (Koreksi Saldo Awal) pada Mutasi Aset Tetap-Tanah

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai	Ket
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	4.734	159.450.590.827	KP2MI
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	2.424	81.645.169.447	BNSP

2. Transfer Masuk sebesar Rp187.787.047

Transfer Masuk sebesar Rp187.787.047 terdapat pada satker BPVP Pangkep berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan dari satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor S9375/WPB.12/2025 tanggal 24 Desember 2025.

3. Hibah Masuk sebesar Rp1.648.037.047

- a. Hibah Masuk Tanah sebesar Rp1.460.250.000 pada BPVP Lombok Timur merupakan Hibah dari P187emda Lombok Timur berdasarkan Surat Hibah Barang Milik Daerah Nomor 2/956/UM.03.02/V/2025 tanggal 30 Mei 2021.
- b. Hibah Masuk Tanah sebesar Rp187.787.047 pada satker Ditjen merupakan hibah tanah milik pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor S9375/WPB.12/2025 tanggal 24 Desember 2025.

4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp631.248.587.000 terdapat pada:

Tabel 217 Mutasi Aset Tetap - Tanah pada Reklasifikasi Masuk

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	035636	BPVP Surakarta	26.189.859.000
026.13	065106	BPVP Banda Aceh	45.472.500.000
026.13	452589	BPVP Sorong	383.500.000
026.13	452595	BPVP Ternate	522.981.000
026.13	452609	BBPVP Semarang	558.009.747.000
026.13	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	670.000.000
Ditjen Binalavotas			631.248.587.000
Reklasifikasi Masuk			631.248.587.000

a. BPVP Surakarta

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp26.189.859.000 berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan seluas 4.504 M2 yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.10/168/UM.03.02/XI/2025 tanggal 4 Desember 2025.

b. BPVP Banda Aceh

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp45.472.500.000 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 30.000 M2 yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025.

c. BPVP Sorong

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp383.500.000 berupa Tanah Lapangan Parkir Konblok seluas 500 M2 yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Lapangan Apel/Upacara sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

d. BPVP Ternate

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp522.981.000 berupa Tanah Untuk Latihan Lainnya yang sebelumnya dicatat sebagai berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.14/384 /UM.03.00/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

e. BBPVP Semarang

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp558.009.747.000 berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan seluas 40.560 M2 yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/1001/UM.03.02/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

f. Dit. Lemlatvok

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp670.000.000 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 60.753 M2 yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3229/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Susulan sebesar Rp241.095.760.274

Koreksi Susulan sebesar Rp241.095.760.274 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal cq Biro Umum merupakan koreksi kurang yang berasal tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 5 kuantitas 10.050 m2 sebesar Rp338.504.106.000 yang dipecah menjadi 3 NUP terdiri dari:

a. Koreksi susulan pengurangan sebesar Rp241.095.760.274 menjadi NUP baru terbagi:

- 1) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 7 seluas 4.734 m² dengan nilai Rp159.450.590.827 mengalami perubahan status penggunaan karena sebagian tanah tersebut akan dialihstatuskan kepada KP2MI.
- 2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 8 dengan kuantitas 2.424 m2 dengan nilai Rp81.645.169.447 pada BNSP.

- b. Nilai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 5 menjadi kuantitas 2.892 m2 sebesar Rp97.408.345.726 (Rp338.504.106.000-Rp241.095.760.274) (NUP tidak berubah untuk tanah ex PHI).

Sebagian tanah akan dilakukan alih status penggunaan kepada KP2MI dan akan dihibahkan ke Disnaker Provinsi DKI Jakarta untuk tanah ex PHI sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025.

2. Transfer Keluar sebesar Rp187.787.047

Transfer Keluar sebesar Rp187.787.047 pada Satker Ditjen Binalavotas berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan kepada BPVP Pangkep sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/4879/UM.03.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp631.248.587.000 terdapat pada:

Tabel 218 Mutasi Aset Tetap - Tanah pada Reklasifikasi Masuk

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	035636	BPVP Surakarta	26.189.859.000
026.13	065106	BPVP Banda Aceh	45.472.500.000
026.13	452589	BPVP Sorong	383.500.000
026.13	452595	BPVP Ternate	522.981.000
026.13	452609	BBPVP Semarang	558.009.747.000
026.13	626131	Dit Bina Lemlatvok	670.000.000
Ditjen Binalavotas			631.248.587.000
Reklasifikasi Masuk			631.248.587.000

a. BPVP Surakarta sebesar Rp26.189.859.000

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp26.189.859.000 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah menjadi Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan seluas 4.504 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.10/168/UM.03.02/XI/2025 tanggal 4 Desember 2025.

b. BPVP Banda Aceh sebesar Rp45.472.500.000

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp45.472.500.000 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 30.000 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025.

c. BPVP Sorong sebesar Rp383.500.000

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp383.500.000 berupa Tanah Lapangan Apel/Upacara menjadi Tanah Lapangan Parkir Konblok seluas 500 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/ 2025 tanggal 4 Desember 2025.

d. BPVP Ternate sebesar Rp522.981.000

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp522.981.000 berupa berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah menjadi Tanah Untuk Latihan Lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.14/384 /UM.03.00/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

e. BBPVP Semarang sebesar Rp558.009.747.000

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp558.009.747.000 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah menjadi Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan seluas 40.560 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/1001/UM.03.02/XII/2025 tanggal 29

Desember 2025.

- f. Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp670.000.000

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp670.000.000 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 60.753 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3229/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp383.500.000

Koreksi Pencatatan sebesar Rp383.500.000 terdapat pada satker BPVP Sorong berupa Tanah Lapangan Parkir Konblok sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/ 2025 tanggal 4 Desember 2025.

5. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp39.104.315.000

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp39.104.315.000 pada satuan kerja BBPVP Bekasi yang merupakan koreksi atas luasan dan nilai tanah akibat pencatatan ganda (*double counting*) dengan Kementerian Perindustrian. Koreksi tersebut didasarkan pada Berita Acara Nomor BA.373/SJ/UM/1999 atas tanah seluas 7.000 m² senilai Rp39.104.315.000 sesuai dengan nilai yang tercatat pada Kementerian Perindustrian.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp3.632.250.069.370

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.632.250.069.370 dan Rp3.523.536.676.853.

Rincian Nilai Peralatan dan Mesin Kemnaker pada masing-masing Unit Eselon I sebagai berikut

Tabel 219 Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	187.651.063.230	185.735.444.813	1.915.618.417	1,03
Inspektorat Jenderal	13.254.097.952	13.210.465.352	43.632.600	0,33
Ditjen Binapenta & PKK	125.315.879.431	129.366.655.810	(4.050.776.379)	(3,13)
Ditjen PHI & JSK	38.371.085.054	41.644.804.376	(3.273.719.322)	(7,86)
Ditjen Binwasnaker & K3	548.211.958.138	551.560.015.265	(3.348.057.127)	(0,61)
Barenbang	177.045.422.577	180.624.418.957	(3.578.996.380)	(1,98)
Ditjen Binalavotas	2.542.400.562.988	2.421.394.872.280	121.005.690.708	5,00
Jumlah	3.632.250.069.370	3.523.536.676.853	108.713.392.517	3,09
Akumulasi Penyusutan	(2.869.094.839.908)	(2.690.051.223.269)	(179.043.616.639)	6,66
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	763.155.229.462	833.485.453.584	(70.330.224.122)	(8,44)

Mutasi aset tetap – Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 220 Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024		Rp	3.523.536.676.853
Mutasi Tambah			
Saldo Awal	Rp	14.225.611.729	
Pembelian	Rp	25.841.142.494	
Transfer Masuk	Rp	76.425.958.997	
Hibah Masuk	Rp	4.087.633.156	
Reklasifikasi Masuk	Rp	155.934.036.336	
Perolehan Lainnya	Rp	227.018.080.040	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	193.038.865	
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	387.158.427	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	6.999.000	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	9.963.433.609	
Koreksi Susulan	Rp	123.484.560	
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah dihentikan Penggunaan	Rp	15.484.109.337	
Mutasi Kurang			
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(1.428.538.909)	
Transfer Keluar	Rp	(76.425.958.997)	
Hibah Keluar	Rp	(4.130.333.528)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(169.120.929.704)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(100.706.169.183)	
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp	(360.628.000)	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	(68.804.735.712)	
Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025		Rp	3.632.250.069.370
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.869.094.839.908)	
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025		Rp	763.155.229.462

Mutasi Tambah:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp14.225.611.729 terdapat pada:

Tabel 221 Mutasi Tambah (Koreksi Saldo Awal) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	87.488.850
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	11.836.790.379
Sekretariat Jenderal			11.924.279.229
026.08	350081	Balai K3 Medan	9.435.000
026.08	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	232.758.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			242.193.000
026.13	452533	Sekretariat BNSP	2.059.139.500
Ditjen Binalavotas			2.059.139.500
Koreksi Saldo Awal			14.225.611.729

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.924.279.229

- 1) Politeknik Ketenagakerjaan

Koreksi Saldo Awal pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp87.488.850 atas 1 (satu) unit *Portable Generating Set* sebesar Rp72.188.850 dan 9 buah Rambu-Rambu sebesar Rp15.300.000.

- 2) Satker Sekretariat Jenderal

Koreksi Saldo Awal pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.836.790.379 berupa sepeda motor, AC Split, Laptop, *Meubelair*, Peralatan Personal Komputer berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 November 2025, 1/1121/UM.03/XI/2025 tanggal 26 November 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

- b. Ditjen Binwasnaker dan K3

- 1) Balai K3 Medan sebesar Rp9.435.000

Koreksi Saldo Awal pada Balai K3 Medan sebesar Rp9.435.000 merupakan transaksi yang dilakukan dikarenakan ketidaksesuaian kode barang atas peralatan mesin berupa pengadaan A.C sebanyak 1 unit yang dalam pengadaannya tergabung dengan gedung bangunan untuk periode tahun yang lalu dengan Surat Keterangan KPB Nomor 5.2/9/UM.03.04/V/2024 tanggal 21 Mei 2025.

- 2) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebesar Rp232.758.000

- a) Koreksi Saldo Awal pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp228.820.000 merupakan transaksi tindak lanjut dari hasil inventarisasi program Kementerian Ketenagakerjaan atas aset ber KIB tahun 2025 berupa 1 unit Bus senilai Rp25.320.000 dan 1 (satu) unit Mini Bus senilai Rp203.500.000. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/122/KU.07.04/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 berupa:

Tabel 222 Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin Ditjen Binwasnaker dan K3

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH Rp
Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	25.320.000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	203.500.000
Total	2	228.820.000

- b) Koreksi Saldo Awal pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp3.938.000 dilakukan untuk memperbaiki kesalahan data BMN pada transaksi Hibah Keluar (Aset Henti) yang seharusnya dicatat sebagai Tandu (NUP 12) senilai Rp1.540.000 terinput sebagai Tandu Lipat (NUP 12). Koreksi Saldo Awal dilakukan sesuai dengan surat keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/15/KU.07.04/I/2026 tanggal 5 Januari 2026.

c. Ditjen Binalavotas

Koreksi Saldo Awal pada Ditjen Binalavotas tercatat pada Satker Sekretariat BNSP sebesar Rp2.059.139.500. Koreksi berupa aset Bangunan Gedung tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.1/11/UM.03.02/II/2026 tanggal 2 Februari 2026.

2. Pembelian sebesar Rp25.841.142.494 terdapat pada:

Tabel 223 Mutasi Tambah (Pembelian) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	1.340.062.134
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	6.661.022.559
	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	29.999.150
	626011	Pusat Pasar Kerja	299.501.000
Sekretariat Jenderal			8.330.584.843
026.02	259031	Inspektorat Jenderal	196.092.600
Inspektorat Jenderal			196.092.600
026.04	690634	BPKK Bekasi	999.612.111
Ditjen Binapenta dan PKK			999.612.111
026.08	350079	Balai K3 Bandung	83.450.000
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	149.957.501
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	1.976.259.426
Ditjen Binwasnaker dan K3			2.209.666.927
026.11	452677	Barembang Ketenagakerjaan	426.604.620
Barembang Ketenagakerjaan			426.604.620
026.13	089378	BPVP Padang	2.545.000
	451026	Satker Ditjen Binalavotas	2.164.727.843
	452558	BBPVP Bekasi	879.687.651
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	10.631.620.899
Ditjen Binalavotas			13.678.581.393
Pembelian			25.841.142.494

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp8.330.584.843

- 1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp1.340.062.134 berupa personal komputer, alat penyimpan perlengkapan kantor, *Meubelair*, Alat rumah tangga lainnya dan lain-lain.
- 2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.661.022.559 pada Biro Umum berupa alat kantor, alat komunikasi, alat rumah tangga, komputer, AC dan *meubelair*.

- 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp29.999.150 berupa Personal Komputer, Pompa, Lemari dan lain-lain.
- 4) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp299.501.000, berupa alat berat, alat kantor dan rumah tangga dan komputer.

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp196.092.600

Pembelian pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp196.092.600 diantaranya digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin berupa *Notebook* sebanyak 22 unit.

c. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp999.612.111

Pembelian Ditjen Binapenta dan PKK pada Satker BPKK Bekasi sebesar Rp999.612.111 dengan rincian sebagaia berikut:

Tabel 224 Pembelian Peralatan dan Mesin Pada Ditjen Binapenta dan PKK

No	Transaksi	Nama barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Pembelian	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	3.499.830
2	Pembelian	Tangga Aluminium	1	5.550.000
3	Pembelian	Rak Besi	40	44.000.000
4	Pembelian	Gordyn/Kray	75	113.220.000
5	Pembelian	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.999.200
6	Pembelian	Mimbar/Podium	1	4.250.000
7	Pembelian	CCTV - Camera Control Television System	6	17.966.460
8	Pembelian	Dispenser	1	2.299.920
9	Pembelian	Lap Top	11	126.850.001
10	Pembelian	Kursi Roda	1	4.690.749
11	Pembelian	A.C. Split	30	281.684.001
12	Pembelian	Televisi	4	318.518.000
13	Pembelian	A.C. Split	3	24.495.000
14	Pembelian	Televisi	2	48.778.950
15	Pembelian	Microwave	1	1.810.000
JUMLAH				999.612.111

- 1) Pembelian Kulkas Laktasi untuk kebutuhan ruang Laktasi sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp3.499.830 pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan Nomor EP-01K21PS18331YE99PCVFP4N3ZH.
- 2) Pembelian Tangga Teleskopik sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp5.550.000 pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan Nomor 105/KW/TK/VIII/2025.
- 3) Pembelian Barang Milik Negara berupa 40 Unit rak arsip kantor dengan nilai Rp44.000.000 tanggal 25 Agustus 2025 dengan Nomor BAST.55/BPKK-BKS/PBJ-epurc/VII/2025.
- 4) Pembelian Zebra Blind (Gordyn) sebanyak 75 Unit dengan nilai Rp113.220.000 pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan Nomor BAST.54/BPKK-BKS/PBJ-epurc/VII/2025.
- 5) Pembelian Alat rumah Tangga Lainnya yaitu Mesin Kopi sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp1.999.200 pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan Nomor Invoice 36.4.20250710.12.
- 6) Pembelian Podium sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp4.250.000 pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan Nomor 105/KW/TK/VIII/2025.

- 7) Pembelian Barang Milik Negara berupa 6 Unit CCTV dengan nilai Rp17.966.460 dengan Nomor 3.8/50-BAST-UM.01.04/VIII/2025
 - 8) Pembelian Dispenser untuk kebutuhan ruang Laktasi sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp2.299.920 pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan Nomor EP 01K21PS18331YE99PCVFP4N3ZH.
 - 9) Pembelian Laptop sebanyak 11 Unit dengan nilai Rp126.850.000 pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor BAST.52/BPKK-BKS/PBJ-epurc/VII/2025
 - 10) Pembelian Kursi Roda sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp4.690.749 pada tanggal 08 Desember 2025 dengan nomor SPK 211/KW/TK/XII/2025.
 - 11) Pembelian AC Split sebanyak 30 Unit dengan nilai Rp281.684.000 pada tanggal 25 Juli 2025 dengan Nomor BAST.43/BPKK-BKS/PBJ-epurc/VII/2025.
 - 12) Pembelian TV Interaktif sebanyak 4 Unit dengan nilai Rp318.518.000 pada tanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor BAST.41/BPKK-BKS/PBJ-epurc/VII/2025.
 - 13) Pembelian AC Split sebanyak 3 Unit dengan nilai Rp24.295.000 pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan Nomor Kuitansi 105-KTS/X/CLA-2025.
 - 14) Pembelian Smart TV 86 Inch dan 43 Inch sebanyak masing-masing 1 Unit dengan nilai Rp41.619.450 dan Rp7.159.500 pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan nomor 172/KW/TK/X/2025.
 - 15) Pembelian Microwave sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp1.810.000.
- d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp2.209.666.927.
- 1) Balai K3 Bandung sebesar Rp83.450.000 berupa:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin berupa *Dispenser* senilai Rp6.450.000 berdasarkan SP2D Nomor 250221301001120 tanggal 28 Februari 2025.
 - b) Pembelian peralatan dan mesin berupa *Air Conditioner* (AC) senilai Rp25.000.000 berdasarkan SP2D Nomor 25022130100111 tanggal 28 Februari 2025.
 - c) Pembelian peralatan dan mesin berupa Lemari Kayu dan Meubelair Lainnya senilai Rp49.500.000 dan Rp2.500.000 berdasarkan SP2D Nomor 250221302002380 tanggal 14 Maret 2025.
 - 2) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp149.957.501 berupa:
 - a) Pembelian berdasarkan BAST No. 5.5/366/KU.07.03/XII/2025 tanggal 8 Bulan Desember 2025 sebesar Rp118.000.000 berupa *Spectrophometer* sebanyak 1 Unit dan Unit Alat Laboratorium Lainnya sebanyak 3 buah.
 - b) Pembelian berdasarkan BAST No. 5/5/377/KU.07.03/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp24.465.001 berupa *Air Sampler* sebanyak 2 Unit dan Unit laboratorium lainnya sebanyak 3 Unit.
 - c) Pembelian berdasarkan BAST No. 5/5/378/KU.07.03/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp7.492.500 berupa *Nondestructive Test* (NDT) *Device* Lainnya.

3) Satker Ditjen Binwansaker dan K3 sebesar Rp1.976.259.426 berupa:

Tabel 225 Pembelian Peralatan dan Mesin pada
Satker Ditjen Binwansaker dan K3

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH Rp
Coffee Maker	1	17.743.350
Televisi	1	8.591.400
A.C. Cassete	3	96.590.000
Kursi Besi/Metal	35	77.933.100
Meja Kerja Kayu	12	258.779.850
A.C. Split	4	38.475.000
Rak Server	1	2.753.000
Stabilisator	1	7.709.000
Spliter HDMI	2	3.330.000
Audio Patch Panel	1	2.990.000
Microphone/Wireless MIC	1	7.048.000
Power Supply Microphone	1	14.040.000
Lap Top	46	999.923.076
A.C. Split	1	10.850.250
Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	79.587.000
Camera Conference	1	16.206.000
Lap Top	16	333.710.400
Total	149	1.976.259.426

e. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp426.604.620 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 226 Pembelian Peralatan dan Mesin
Pada Barenbang Ketenagakerjaan

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH Rp
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	4.899.540
Lemari Besi/Metal	2	4.598.000
Dispenser	6	11.999.988
Lap Top	3	67.499.766
Papan Tulis Kaca	1	1.900.000
Lap Top	3	56.099.844
Gordyin/Kray	1	11.484.682
Wireless Access Point	5	12.625.000
Switch	1	7.000.000
Note Book	4	98.500.000
Solar Cell	1	23.700.000
Peralatan Jaringan Lainnya	6	48.234.300
Wireless Access Point	6	16.816.500
Switch	5	40.181.000
Modem	5	21.066.000
Total	50	426.604.620

f. Ditjen Binalavotas sebesar Rp13.678.581.393

Pembelian pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp13.678.581.393 terdapat pada:

- 1) BPVP Padang sebesar Rp2.545.000 berupa CPU komputer sesuai dengan SP2D Nomor 3100202006 tanggal 31 Desember 2025.
- 3) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp2.164.727.843 atas Pengadaan Peralatan Komputer berupa Printer sesuai dengan SP2D Nomor 251821303006084 tanggal 8 Mei 2025 dan Peralatan Komputer berupa Printer sesuai dengan SP2D Nomor 251821702000101 tanggal 14 Maret 2025.
- 4) BBPVP Bekasi sebesar Rp879.687.651 berupa Alat Kantor, Alat Komunikasi, Alat Rumah Tangga, A.C. Split dan lain-lain.
- 5) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi sebesar Rp10.631.620.899 merupakan pembelian Alat Peraga Pelatihan sesuai dengan SP2D Nomor 259991301003341 tanggal 14 Januari 2025.

3. Transfer Masuk sebesar Rp76.425.958.997

Tabel 227 Transfer Masuk Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	4.209.283.750
	450990	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	867.050.000
Sekretariat Jenderal			5.076.333.750
026.04	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	1.405.439.960
	690634	BPKK Bekasi	899.360.000
Ditjen Binapenta dan PKK			2.304.799.960
026.08	350084	Balai K3 Jakarta	14.223.000
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	1.036.227.500
Ditjen Binwasnaker dan K3			1.050.450.500
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	621.429.228
	035636	BPVP Surakarta	3.246.727.238
	050302	BPVP Sidoarjo	7.081.492.084
	051102	BPVP Banyuwangi	86.000.000
	065106	BPVP Banda Aceh	1.063.638.982
	089378	BPVP Padang	5.943.159.885
	191206	BPVP Bantaeng	1.249.590.989
	209255	BPVP Kendari	2.788.231.570
	219228	BPVP Ambon	988.258.982
	230302	BPVP Lombok Timur	1.359.694.759
	352630	BPVP Pangkep	467.303.982
	352631	BPVP Belitung	5.244.299.982
	426531	BBPVP Serang	451.833.902
	451026	Ditjen. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	704.314.250
	451094	BBPVP Medan	3.569.762.815
	451108	BPVP Samarinda	4.706.115.528
	452533	Sekretariat BNSP	903.521.500
	452542	BBPVP Bandung	5.152.279.395
	452558	BBPVP Bekasi	2.359.555.418
	452589	BPVP Sorong	10.742.054.776
	452595	BPVP Ternate	2.424.000.520
	452609	BBPVP Semarang	615.530.769
	452652	BBPVP Makassar	5.543.589.095
	626131	Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	246.038.138
	626132	Direktorat Bina Latvogan	435.951.000
Ditjen Binalavotas			67.994.374.787
Transfer Masuk			76.425.958.997

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.076.333.750

1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.209.283.750

Transfer Masuk pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.209.283.750 diantaranya:

- Transfer Masuk sebesar Rp3.589.932.000 dari Barenbang Ketenagakerjaan berdasarkan BAST Nomor 7/001/UM.02.02/PDTIK-PPK-BAST/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 berupa filing cabinet kayu sebanyak 1 Unit, meja kerja besi/metal sebanyak 8 unit, kursi besi/metal sebanyak 18 unit, meja rapat sebanyak 1 unit, camera conference sebanyak 1 unit, Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 2 unit, P.C Unit sebanyak 4 unit, display sebanyak 2 unit, bracket standing peralatan sebanyak 1 unit, rak besi sebanyak 2 unit, loudspeaker sebanyak 2 unit, audio amplifier sebanyak 1 unit, audia mixing stationer sebanyak 1 unit, papan tulis kaca sebanyak 1 unit, all band receiver sebanyak 2 unit, wireless sebanyak 1 unit, battery charge sebanyak 3 unit, dan switch sebanyak 1 unit.
- Transfer Masuk sebesar Rp397.791.750 dari Ditjen PH dan Jamsos berdasarkan BAST Nomor 4/955/UM.03.02/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 berupa Jeep dengan merk *Mitsubishi Pajero sport exceed* 4x2 sebanyak 1 Unit.

- c) Transfer Masuk sebesar Rp221.560.000 dari Barenbang Ketenagakerjaan berdasarkan Nomor BAST 7/376/UM.03.01/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 berupa MiniBus (penumpang 14 orang kebawah) merk Toyota Rush.
- 2) Transfer Masuk pada PPSDM Ketenagakerjaan dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp867.050.000 merupakan Personal Computer, Pick Up dan Tablet PC berdasarkan BAST Nomor 1/2368/UM.03.01/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025, 1/4584/UM.03.01/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan 1/3741/UM.03.01/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.
- b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp2.304.799.960
- 1) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp1.405.439.960

Transfer Masuk Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp1.405.439.960 merupakan transfer masuk peralatan mesin dari BBPKK Bandung Barat dan dari BPKK Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 228 Mutasi Tambah (Transfer masuk) pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Satker Ditjen Binapenta dan PKK

No	Satker Asal	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Keterangan
1	BBPKK Bandung Barat	Bracket Standing Peralatan	2	Buah	4.933.000	BAST Nomor 3.1/1421/UM.03/V/2025 tanggal 8 Mei 2025
2	BBPKK Bandung Barat	Lemari Besi/Metal	3	Buah	14.870.000	
3	BBPKK Bandung Barat	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	35.700.000	
4	BBPKK Bandung Barat	Televisi	5	Buah	282.780.500	
5	BBPKK Bandung Barat	Serial Scanner/Printer	1	Buah	11.550.000	
6	BBPKK Bandung Barat	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah	2.900.000	
7	BBPKK Bandung Barat	Video Conference	1	Buah	28.500.000	
8	BBPKK Bandung Barat	Meja Ruang Tamu	2	Buah	8.135.000	
9	BBPKK Bandung Barat	Dispenser	3	Buah	6.450.000	
10	BBPKK Bandung Barat	Flip Chart	3	Buah	4.260.000	
11	BBPKK Bandung Barat	Filing Cabinet Besi	1	Buah	4.550.000	
12	BBPKK Bandung Barat	A.C. Split	8	Buah	244.550.000	
13	BBPKK Bandung Barat	Sofa	5	set	28.950.000	
14	BBPKK Bandung Barat	Kursi Besi/Metal	32	Buah	68.745.000	
15	BBPKK Bandung Barat	Meja Kerja Besi/Metal	3	Buah	60.750.000	
16	BBPKK Bandung Barat	Meja Kerja Kayu	6	Buah	25.850.000	
17	BBPKK Bandung Barat	Alat Penghancur Kertas	2	Buah	7.500.000	
18	BBPKK Bandung Barat	Laci Box	17	Buah	27.200.000	
19	BBPKK Bandung Barat	P.C Unit	2	Buah	59.500.000	
20	BPKK Bekasi	CCTV - Camera Control Television System	6	Buah	17.966.460	BAST nomor 3.8/670/UM.03/IX/2025 tanggal 16 Oktober 2025
21	BPKK Bekasi	Rak Besi	40	Buah	44.000.000	
22	BPKK Bekasi	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	415.800.000	
Total					1.405.439.960	

- 2) BPKK Bekasi sebesar Rp899.360.000
- a) Transfer Masuk dari Sekretariat Ditjen Binapenta dan PKK berupa 1 Unit kendaraan dinas roda empat tipe Xpander 1.5L Exceed 4x2 A/T senilai Rp220.000.000 sesuai BAST Nomor 3/2577/UM.03/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.
- b) Transfer Masuk dari Sekretariat Ditjen Binapenta dan PKK berupa 21 Unit Microphone Table Stand senilai Rp142.000.000 sesuai BAST Nomor 2/2713/UM.03/V/2025 tanggal 30 Mei 2025.
- c) Transfer Masuk dari Sekretariat Ditjen Binapenta berupa dua unit sepeda motor sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 3/5639/UM.03/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025:
- (1) Honda Vario 125 CBS MMC VIN 2018 sebesar Rp17.980.000
- (2) Yamaha Lexi VVA SSS Tahun 2021 sebesar Rp20.000.000

- d) Transfer Masuk Barang Milik Negara dari Sekretariat Ditjen Binapenta dan PKK berupa Jeep Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ Tahun 2017 sebesar Rp499.380.000 sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 3/5639/UM.03/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.050.450.500.
- c) Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp1.050.450.500
 - 1) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp14.223.000, merupakan transaksi tindak lanjut atas transfer masuk berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari Satuan Kerja Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Balai Besar K3 Jakarta dan Nomor 5/4/UM.03.02/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.
 - 2) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.036.227.500 berasal dari:
 - a) Satker Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp6.000.000, merupakan serah terima aset dikarenakan adanya proses likuidasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2024 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi NTT dengan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor: 5/219/UM.03.00/IX/2025 tanggal 8 September 2025.
 - b) Biro Umum, Sekretariat Jenderal senilai Rp1.030.227.500, merupakan serah terima aset Inventaris di Ruang Bina Sistem lantai 6 Gedung A pengadaan Biro Umum tahun 2023, sehingga perlu dilakukan serah terima dari Biro Umum ke Satker Ditjen Binwasnaker dan K3. Transaksi Transfer Masuk dilakukan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 5/3373/UM.03.01/IX/2025 tanggal 24 September 2025.
- d) Ditjen Binalavotas sebesar Rp67.994.374.787
 - 1) BPVP Bandung Barat Rp621.429.228

Transfer masuk sebesar Rp621.429.228 dari Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/434/UM.03.01/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 berupa Led Videotron Cabinet Indoor Fixed 4.0- V1.
 - 2) BPVP Surakarta sebesar Rp3.246.727.238

Terdapat transfer masuk sebesar Rp3.246.727.238 dengan rincian sebagai berikut:

 - a) Transfer Masuk sebesar Rp1.116.656.118 dari Ditjen Binalavotas sesuai dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Sofa, Meja Kerja Kayu, PC, Kursi Besi, Lemari Besi, Scanner dan TV sesuai BAST Nomor 2/392/UM.03.01/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 berupa.
 - (2) Beberapa peralatan pendukung multimedia dan dokumentasi, yaitu *camera digital, gimbal tripod, tripod camera, microphone, multiscan proyektor, microphone/wireless MIC*, serta lampu *blitz* kamera sesuai BAST Nomor 058/BAST-KEMENAKER/SUN/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
 - (3) Televisi dan *drone* sebagai sarana pendukung kegiatan operasional dan dokumentasi sesuai BAST Nomor BA/22/LTN-P2411-11092309/AAP/XII/2024 bulan Desember 2024.

- (4) Mebelair yang terdiri atas meja rapat, meja kerja kayu dan lemari besi/metal sesuai BAST Nomor 039/MEUBELAIR-STB/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.
 - (5) Kursi besi/metal dan lemari besi/metal sesuai BAST Nomor 047/BAST/GS/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024.
 - (6) Sofa sesuai BAST Nomor 008/BAST/DSP/XII/24 tanggal 14 Desember 2024.
 - b) Transfer Masuk sebesar Rp2.130.071.120 dari Direktorat Bina Lemlatvok sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/21/LP.01/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 berupa berbagai peralatan pelatihan, peralatan bengkel dan teknik, peralatan laboratorium dan pengolahan, perlengkapan teknologi informasi, serta mebelair dan perlengkapan pendukung lainnya.
- 3) BPVP Sidoarjo sebesar Rp7.081.492.084
- Transfer Masuk sebesar Rp7.081.492.084 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Mesin bubut sebesar Rp68.100.000 dari BBPVP Bandung dengan surat keterangan Nomor 2.21/4144/UM.03.01/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025.
 - b) Peralatan dan mesin sebesar Rp4.757.801.908 dari Direktorat Bina Lemlatvok dengan surat keterangan Nomor 2/13/LP.01/XI/2025 tanggal 28 November 2025.
 - c) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.122.531.376 dari Direktorat Bina Lemlatvok dengan surat keterangan Nomor: 2/3/LP.01/IX/2025 tanggal 23 September 2025.
 - d) MiniBus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp514.700.000 dari Setditjen Binalavotas dengan surat keterangan Nomor 2/3421/UM.03.01/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
 - e) Peralatan dan mesin sebesar Rp618.358.800 dari Setditjen Binalavotas dengan surat keterangan Nomor: 2/838/UM.03.01/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- 4) BPVP Banyuwangi sebesar Rp86.000.000
- Transfer Masuk sebesar Rp86.000.000 berupa 5 Personal Komputer Lainnya dari Satker Ditjen Binalavotas berdasarkan surat keterangan Nomor 2/839/UM.03.01/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- 5) BPVP Banda Aceh sebesar Rp1.063.638.982
- Transfer masuk sebesar Rp1.063.638.982 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/668/UM.03.01/IV/2025 tanggal 16 April 2025 berupa NoteBook, Meja Kerja Kayu, Meja Rapat, Kursi Besi dan Portable AC.
- 6) BPVP Padang sebesar Rp5.943.159.885
- 7) Transfer masuk sebesar Rp5.943.159.885 dari satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/692/UM.03.01/IV/2025 tanggal 17 April 2025 berupa Kursi, Lemari, Meja Kerja, Meja Rapat, Sofa dan *Video Wall*.

8) BPVP Bantaeng sebesar Rp1.249.590.989

Transfer Masuk sebesar Rp1.249.590.989 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp863.203.982 dari Direktorat Bina Lemlatvok dengan surat keterangan Nomor 2/24/LP.01/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.
- b) Peralatan dan mesin sebesar Rp386.387.007 dari Setditjen Binalavotas dengan surat keterangan Nomor 2/647/UM.03.01/IV/2025 tanggal 15 April 2025.

9) BPVP Kendari sebesar Rp2.788.231.570

Transfer masuk sebesar Rp2.788.231.570 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/786/UM.03.01/IV/2025 tanggal 28 April 2025 berupa Kursi, Scanner, Meja Kerja, Lemari, NoteBook dan Meja Rapat.

10) BPVP Ambon Rp988.258.982

Transfer masuk sebesar Rp988.258.982 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Berita Acara TKTM Nomor 2.15/691/UM.03.01/IV/2025 tanggal 16 April 2025 berupa Sofa, Lemari Besi, Rak Besi dan Kursi Besi.

11) BPVP Lombok Timur sebesar Rp1.359.694.759

Transfer masuk sebesar Rp1.359.694.759 dari Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/756/UM.03.01/IV/2025 tanggal 30 Mei 2025 dan 2/757/UM.03.01/IV/2025 tanggal 24 April 2025 berupa TV, Lemari Besi, Video Monitor dan Printer.

12) BPVP Pangkep Rp467.303.982

Transfer masuk sebesar Rp467.303.982 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/646/UM.03.01/IV/2025 tanggal 15 April 2025 berupa NoteBook.

13) BPVP Belitung sebesar Rp5.244.299.982

Transfer masuk sebesar Rp5.244.299.982 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/909/UM.03.04/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 berupa Meja Rapat, TV dan Kursi Besi.

14) BBPVP Serang sebesar Rp451.833.902

Transfer masuk sebesar Rp451.833.902 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima TKTM Nomor 2/1226/UM.03.01/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 berupa TV, PC, Portable AC dan Sofa.

15) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp704.314.250

Transfer Masuk sebesar Rp704.314.250 dengan rincian sebagai berikut:

- a) *MiniBus* (Penumpang 14 Orang ke bawah) sebesar Rp556.314.250 dari Direktorat Bina Lemlatvok sesuai Surat Keterangan Nomor 2/1/LP.01/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- b) *Sirion* dari Sekretariat BNSP sebesar Rp148.000.000 sesuai Surat Keterangan Nomor 2.1/1680/UM.03.01/VIII/2025 tanggal 20 Oktober 2025.

16) BBPVP Medan sebesar Rp3.569.762.815

Transfer Masuk sebesar Rp3.569.762.815 dari satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/1088/UM.03.01/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 berupa sofa, tv, *notebook*, PC, *Portable AC*, meja ruang tamu dan printer.

17) BPVP Samarinda sebesar Rp4.706.115.528

Transfer Masuk sebesar Rp4.706.115.528 dari satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Berita Acara TKTM Nomor 2/391/UM.03.01/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 berupa kursi besi, sofa, lemari besi, meja kerja kayu dan *notebook*.

18) Sekretariat BNSP sebesar Rp903.521.500

Transfer Masuk sebesar Rp903.521.500 dari satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Berita Acara TKTM Nomor 2/3192/UM.03.01/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 berupa paket *Barie Gate* 1 Line dan 2 *Line*, Laptop Acer dan Laptop HP dan Mobil Honda CRV sesuai Berita Acara TKTM Nomor 2/3192/UM.03.01/X/2025 tanggal 8 September 2025.

19) BBPVP Bandung sebesar Rp5.152.279.395

Transfer masuk pada BBPVP Bandung sebesar Rp5.152.279.395 dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Wastafel Portable*, Alat Laboratorium Makanan Lainnya, Kompor Gas (Alat Dapur), Oven Gas, Alat Dapur Lainnya sebesar Rp161.486.570 dari BBPVP Bekasi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.4/2/UM.03.01/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.
- b) Sofa, *Portable AC*, Lemari Es dan *Dispenser* sebesar Rp151.347.673 dari satker Ditjen Binalavotas berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2/435/UM.03.01/III/2025 tanggal 12 Maret 2025.
- c) Mesin frais senilai Rp28.111.148 dari BPVP Sidoarjo sesuai Surat Keterangan Nomor 2.21/4144/UM.03.01/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025.
- d) Peralatan dan mesin senilai Rp2.466.225.004 dari Direktorat Bina Lemlatvok dengan Surat Keterangan Nomor 2/10/LP.01/XI/2025 tanggal 11 November 2025.
- e) Peralatan dan mesin senilai Rp847.000.000 dari Direktorat Bina Lemlatvok dengan Surat Keterangan Nomor 2/107/LP.01/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.
- f) *Minibus* sebesar Rp560.400.000 dari Satker Ditjen Binalavotas berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2/3420/UM.03.01/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
- g) Peralatan dan mesin senilai Rp937.709.000 dari Direktorat Bina Lemlatvok sesuai Surat Keterangan Nomor 2/80/LP.01/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025

20) BBPVP Bekasi sebesar Rp2.359.555.418

Transfer masuk sebesar Rp2.359.555.418 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Alat Dapur Lainnya, Kompor Gas, *Oven Gas*, *Wastafel Portable*, Alat Lab Makanan sebesar Rp2.344.855.418 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.4/2/UM.03.01/II/2025 tanggal 18

Februari 2025 dan Portable AC sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/514/UM.03.01/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.

- b) Meja Resepsionis sebesar Rp14.700.000 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/1266/UM.03.01/VI/202 tanggal 13 Juni 2025.

21) BPVP Sorong

Transfer masuk sebesar Rp10.742.054.776 dengan rincian sebagai berikut:

- a) PC, Meja Rapat, Scanner, meja Kerja Kayu, Printer, Kursi Besi dan lemari Besi sebesar Rp662.712.738 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/650/UM.03.01/IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- b) Peralatan dan mesin sebesar Rp9.953.337.038 dari Direktorat Bina Lemlatvok sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/29/LP.01/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.
- c) Peralatan dan mesin sebesar Rp126.005.000 dari BPVP Ambon sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.15/1332.1/UM.03.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

22) BPVP Ternate sebesar Rp2.424.000.520

Terdapat transfer masuk sebesar Rp2.424.000.520 dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Mic, Tripod Camera, Camera Digital, Kursi Besi, Multiscan Projector, PC, NoteBook, Gimbal Tripod, Lampu Blitz, Drone, Meja Kerja, TV, Printer, Portable AC* dan lemari besi sebesar Rp541.815.538 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai Surat Keterangan Nomor 2/651/UM.03.01/IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- b) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.882.184.982 dari Dit.Lemlatvok sesuai Surat Keterangan Nomor 2/27/LP.01/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

23) BBPVP Semarang sebesar Rp615.530.769

Terdapat transfer masuk sebesar Rp615.530.769 dari Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/1222/UM.03.01/VI/2025 tanggal 11 juni 2025 berupa personal computer, CPU, *Note Book, Filling Kabinet*, Kursi Besi, *Video Monitor* dan *Scanner*.

24) BBPVP Makassar sebesar Rp5.543.589.095

Transfer masuk sebesar Rp5.543.589.095 dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Personal computer, CPU, NoteBook, Filling Kabinet*, Kursi Besi, *Video Monitor* dan *Scanner* sebesar Rp1.383.185.650 dari Satker Ditjen Binalavotas sesuai Surat Keterangan Nomor 2/666/UM.03.01/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
- b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.160.403.445 dari Dit. Lemlatvok sesuai Surat Keterangan Nomor 2/23/LP.01/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025.

25) Direktorat Bina Lemlatvok sebesar Rp246.038.138

Terdapat transfer masuk dari satker Ditjen Binalavotas dengan Berita Acara Nomor 2/2901/UM.03.01/IX/2025 tanggal 23 September 2025 berupa laptop, printer, PC, lemari besi dan kamera digital.

26) Direktorat Bina Latvogan sebesar Rp435.951.000

Terdapat transfer masuk dari Ditjen Binalavotas dan Dit Bina Lemlatvok dengan Berita Acara Nomor: 2/2911/UM.03.01/IX/2025 tanggal 23 September 2025 dan Nomor:2/22/LP.01/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 berupa kursi besi dan meja rapat.

4. Hibah Masuk sebesar Rp4.087.633.156 terdapat pada Ditjen Binalvotas terdiri dari:

a. BPVP Banda Aceh sebesar Rp60.800.000

Hibah masuk pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp60.800.000 dari Renewable Energy Skills Development (RESK) berupa alat peraga lainnya pada Paket Pembelajaran Mikro Hidro Surat Keterangan Nomor 2.8/4304/KU.07/IX/2025 tanggal 19 September 2025.

b. Satker Ditjen Binalavotas Rp4.026.833.156

Hibah Masuk pada Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp4.026.833.156 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta Kemenkeu Nomor S-4349/WPB.12/2025 dan BAST Hibah Nomor 2/1540/UM.03.00/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024.

5. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp193.038.865 terdapat pada:

Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp193.038.865 terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan berupa alat rumah tangga (*meubelair*).

6. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp155.934.036.336

Tabel 229 Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik ketenagakerjaan	1.144.985.090
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	5.268.860.882
	450990	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.053.113.350
		Sekretariat Jenderal	9.466.959.322
026.02	259031	Inspektorat Jenderal	1.062.500.000
		Inspektorat jenderal	1.062.500.000
026.04	259322	BBPKK Bandung barat	255.551.850
	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	1.266.205.070
	690633	BPKK Kendari	5.300.000
	690634	BPKK Bekasi	44.058.000
		Ditjen Binapenta dan PKK	1.571.114.920
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	2.500.699.739
		Ditjen PHI dan Jamsos	2.500.699.739
026.08	350079	Balai K3 Bandung	1.712.115.000
	350080	Balai Hiperkes dan K2 Surabaya	2.045.394.800
	350081	Balai K3 Medan	11.440.700
	350083	Balai K3 Samarinda	1.263.917.500
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	6.264.332.000
	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	11.675.625.900
		Ditjen Binwasnaker dan K3	22.972.825.900
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	196.400.000
		Barenbang Ketenagakerjaan	196.400.000
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	554.610.100
	035636	BPVP Surakarta	3.131.735.250
	050302	BPVP Sidoarjo	1.255.047.640
	051102	BPVP Banyuwangi	747.495.170
	065106	BPVP Banda Aceh	2.680.766.018
	089378	BPVP Padang	4.212.564.417
	191206	BPVP Bantaeng	1.716.940.764
	209255	BPVP Kendari	2.213.176.103
	219228	BPVP Ambon	1.752.098.076
	230302	BPVP Lombok Timur	770.436.600
	352630	BPVP Pangkep	540.883.000
	352631	BPVP Belitung	1.034.333.250
	426531	BBPVP Serang	1.470.597.169
	451026	Dit. Bina Lavotas	4.347.882.113
	451094	BBPVP Medan	2.018.228.120
	451108	BPVP Samarinda	9.802.077.899
	452533	Sekretariat BNSP	2.081.393.300
	452542	BBPVP Bandung	1.133.586.727
	452558	BBPVP Bekasi	1.999.543.683
	452589	BPVP Sorong	2.360.524.882
	452595	BPVP Ternate	2.497.586.846
	452609	BBPVP Semarang	2.351.967.469
	452652	BBPVP Makassar	3.335.684.550
	626131	Dit. Bina Lemlatvok	64.154.377.309
		Ditjen Binalavotas	118.163.536.455
		Reklasifikasi Masuk	155.934.036.336

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.466.959.322 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi Masuk pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp1.144.985.090 berupa Kendaraan Roda 4, *Car Washer*, *Access Point*, *Rescue Jaring Harness* yang merupakan koreksi temuan Itjen.
- 2) Reklasifikasi Masuk pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.268.860.882 berupa Alat Rumah Tangga, alat kantor dan Kendaraan Roda 4 dan lain-lain berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 November 2025, Nomor 1/700/UM.03/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 dan Nomor 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 3) Reklasifikasi Masuk pada PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp3.053.113.350 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya, Laptop, MiniBus, Lemari Bus dan lain-lain berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan Nomor 1/1493/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan 1/1975/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.062.500.000

Reklasifikasi masuk pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.062.500.000 berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor 6/2897/UM.03.02/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 berupa jeep.

c. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp1.571.114.920, terdiri dari:

1) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp255.551.850

- a) Reklasifikasi Masuk BBPKK Bandung Barat berupa Alat Peraga Pelatihan Lainnya sebesar Rp187.621.000 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Nomor 3.1/5226/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.
- b) Reklasifikasi Masuk berupa Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp48.665.850 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Nomor 3.1/5226/UM.03.02 /XII/ 2025 tanggal 24 Desember 2025.
- c) Reklasifikasi Masuk berupa Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang sebesar Rp19.250.000 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Nomor 3.1/5226/UM.03.02 /XII/ 2025 tanggal 24 Desember 2025.
- d) Reklasifikasi Masuk berupa gunting plat sebesar Rp15.000 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Nomor 3.1/5226/UM.03.02 /XII/ 2025 tanggal 24 Desember 2025.

(2) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp1.266.205.070

- a) Reklasifikasi Masuk Satker Ditjen Binapenta dan PKK berupa 1 unit minibus Mitsubishi Pajero sebesar Rp517.000.000 dan telah dilakukan koreksi perubahan nama barang menjadi *jeep* sesuai Surat Pernyataan Reklasifikasi Kode Barang BMN Nomor: 3/3640/UM.03.06/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.
- b) Reklasifikasi Masuk Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp300.000.000 berupa Sedan yang mulanya Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya menjadi Sedan berdasarkan surat keterangan reklasifikasi kode BMN Nomor 3/1168/UM.03.06/XII/2025.

- c) Reklasifikasi Masuk Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp449.205.070 Jeep yang mulanya dicatat sedan menjadi Jeep berdasarkan surat keterangan reklasifikasi kode BMN Nomor 3/1168/UM.03.06/XII/2025.

(3) BPKK Kendari sebesar Rp5.300.000

Reklasifikasi masuk pada BPKK Kendari senilai Rp5.300.000 atas aset berupa Pompa Air NUP 2. Langkah ini diambil berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 3.9/1341/UM.03/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 dikarenakan ketidaksesuaian kodifikasi barang, sehingga dilakukan penyesuaian ke kode Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use (3050206999).

(4) BPKK Bekasi sebesar Rp44.058.000 berupa:

- a) Reklasifikasi Masuk berupa 6 Unit *Air Cleaner* dengan nilai Rp35.400.000 karena adanya ketidaksesuaian kodefikasi akun BMN sesuai Surat Keterangan Kepala BPKK Bekasi Nomor 3.8/100/UM.03.03/II/2025 tanggal 8 Februari 2025.
- b) Reklasifikasi Masuk berupa 1 Unit Peralatan Olahraga Lainnya dengan nilai Rp8.658.000 karena adanya ketidaksesuaian kodefikasi akun BMN sesuai Surat Keterangan Kepala BPKK Bekasi dengan Nomor 3.8/100/UM.03.03/II/2025 pada tanggal 8 Februari 2025.

d. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp2.500.699.739

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.500.699.739 dilakukan untuk tindak lanjut hasil inventarisasi berupa perubahan kodesifikasi Alat Angkutan dengan surat keterangan KPB dengan nomor 4/2320/UM.03.00/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 sebanyak 15 unit.

e. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp22.972.825.900 terdiri dari:

1) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung sebesar Rp1.712.115.000

Reklasifikasi Masuk pada Balai K3 Bandung karena ketidaksesuaian kodefikasi barang sehingga perlu dilakukan penyesuaian kode barang sebesar Rp1.712.115.000, transaksi ini dilakukan dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Bandung Nomor 5.3/230/UM.03.04/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 berupa:

Tabel 230 Reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin pada Balai K3 Bandung

Nama Barang	Qty	Satuan	Nilai
Rescue Jaringan harness	6	Buah	24.255.000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	Unit	1.657.110.000
Sepeda Motor	2		30.750.000
	12		1.712.115.000

2) Balai Hiperkes dan KK Surabaty sebesar Rp2.045.394.800

Reklasifikasi masuk pada Balai Hiperkes dan KK Surabaya sebesar Rp2.045.394.800 dilakukan sebagai penyesuaian **kodifikasi** atas hasil inventarisasi aset BMN ber-KIB program Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini merujuk pada Berita Acara Sensus BMN Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/189/UM.03.02/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025. Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian **kodifikasi** barang pada berita acara tersebut, maka dilakukan penyesuaian kode barang berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna

Barang Balai Hiperkes dan KK Surabaya Nomor 5.12/101/UM.00.00/IV/2026 tanggal 22 April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Masuk Minibus sebesar Rp156.148.300 yang sebelumnya dicatat sebagai Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 4.
 - b) Reklasifikasi Masuk Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya sebesar Rp341.000.000 yang sebelumnya dicatat sebagai Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 3.
 - c) Reklasifikasi Masuk Mobil Unit Rontgen sebesar Rp264.000.000 yang sebelumnya dicatat sebagai Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 2.
 - d) Reklasifikasi Masuk Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya sebesar Rp196.350.000 yang sebelumnya dicatat sebagai Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 1.
 - e) Reklasifikasi Masuk Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya sebesar Rp444.400.000 yang sebelumnya dicatat sebagai Mobil *Ambulance* NUP 1.
 - f) Reklasifikasi Masuk Sepeda Motor NUP 2 sebesar Rp17.374.500 yang sebelumnya dicatat sebagai Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya NUP 2.
 - g) Reklasifikasi Masuk Sepeda Motor NUP 1 sebesar Rp17.374.500 yang sebelumnya dicatat sebagai Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya NUP 1.
 - h) Reklasifikasi Masuk Mini Bus NUP 2 sebesar Rp231.500.000 yang sebelumnya dicatat sebagai Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya NUP 2.
 - i) Reklasifikasi Masuk Mini Bus NUP 1 sebesar Rp365.120.000 yang sebelumnya dicatat sebagai Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya NUP 1.
 - j) Reklasifikasi Masuk *Rescue Rescue Jaring Harness* sebesar Rp4.042.500 yang sebelumnya dicatat sebagai *Full Body Harness* NUP 3.
 - k) Reklasifikasi Masuk *Rescue Jaring Harness* sebesar Rp4.042.500 yang sebelumnya dicatat sebagai *Full Body Harness* NUP 2.
 - l) Reklasifikasi Masuk *Rescue Jaring Harness* sebesar Rp4.042.500 yang sebelumnya dicatat sebagai *Full Body Harness* NUP 1.
- 3) Balai K3 Medan sebesar Rp11.440.700
- Reklasifikasi Masuk pada Balai K3 Medan sebesar Rp11.440.700 merupakan transaksi sesuai dengan hasil inventarisasi kementerian berupa aset Ber KIB. Dalam Berita Acara Inventarisasi terdapat ketidaksesuaian kodefikasi barang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kode barang Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/23/UM.03.04/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025
- 4) Balai K3 Samarinda sebesar Rp1.263.917.500
- Reklasifikasi Masuk pada Balai K3 Samarinda sebesar Rp1.263.917.500 merupakan transaksi sesuai dengan hasil inventarisasi kementerian berupa aset Ber KIB. Dalam Berita Acara Inventarisasi terdapat ketidaksesuaian kodefikasi barang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kode barang sesuai dengan surat keterangan kepala balai K3 Samarinda Nomor 5.4/005/UM.03.04/I/2026

tanggal 23 Januari 2026.

- 5) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp6.264.332.000 yang terdiri dari
- Reklasifikasi masuk pada Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp5.604.332.000 dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil inventarisasi kementerian berupa aset ber-KIB. Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi, terdapat ketidaksesuaian kodefikasi barang sehingga diperlukan penyesuaian kode barang sesuai klasifikasi yang berlaku. Transaksi reklasifikasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Balai Besar K3 Jakarta Nomor 5.5/145/UM.03/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
 - Reklasifikasi masuk pada Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp660.000.000 dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil inventarisasi aset ber-KIB pada Balai Besar K3 Jakarta. Penyesuaian tersebut dilaksanakan pada bulan November 2025 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Balai Besar K3 Jakarta Nomor 5.5/190/UM.03/XI/2025 tanggal 21 November 2025.

Tabel 231 Reklasifikasi Masuk Pada Balai K3 Jakarta

SEMULA		
Nama Barang	Qty	Nilai
Exkavator	-1	(660.000.000)
Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	-1	(385.000.000)
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	-1	(318.588.000)
Kendaraan Klinik	-2	(333.300.000)
Mobil Unit Rontgen	-1	(1.451.450.000)
Pompa Air	-1	(3.115.994.000)
	-7	(6.264.332.000)
MENJADI		
Nama Barang	Qty	Nilai
Excavator Lainnya	1	660.000.000
Hydrant	1	3.115.994.000
Kendaraan Klinik	1	1.451.450.000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	703.588.000
Mobil Ambulance	2	333.300.000
	7	6.264.332.000

- 6) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp11.675.625.900

Reklasifikasi Masuk pada Satker Ditjen. Binwasnaker dan K3 sebesar Rp11.675.625.900 dilakukan sebagai penyesuaian kodefikasi atas hasil inventarisasi aset BMN ber KIB program Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Berita Acara Sensus BMN Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/36/UM.03.04/XI/2025 tanggal 17 November 2025. Sehingga atas ketidaksesuaian kodefikasi tersebut dilakukan reklasifikasi keluar aset yang tidak sesuai kodefikasinya dan ditindaklanjuti dengan reklasifikasi masuk aset dengan kodefikasi yang sesuai dengan ketentuan. Adapun transaksi reklasifikasi keluar dan masuk dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 sebagai berikut:

- Nomor 5/35/KU.07.04/II/2026 tanggal 11 Februari 2026, rekalsifikasi keluar dan reklasifikasi masuk senilai Rp9.879.730.900.
 - Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026, reklasifikasi keluar masuk senilai Rp1.795.895.000.
- f. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp196.400.000
- Reklasifikasi masuk pada Barenbang sebesar Rp196.400.000 merupakan tindak lanjut atas hasil inventarisasi kendaraan. Terdapat penyesuaian kodifikasi pada satu unit kendaraan roda empat yang semula dicatat sebagai Jeep (3020101002) menjadi

Minibus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) (3020102003). Penyesuaian ini didasarkan pada Surat Keterangan Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar Nomor 7/289/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025..

g. Ditjen Binalavotas sebesar Rp118.163.536.455 terdiri dari:

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp554.610.100

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp554.610.100 berupa 6 *dummy* alat rumah tangga dan 2-unit mobil workshop sesuai dengan surat keterangan nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025.

2) BPVP Surakarta sebesar Rp3.131.735.250

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.131.735.250 berupa 8 *dummy* alat rumah tangga, 3 unit minibus, 19 *dummy* alat peraga pelatihan, dan unit jeep workshop sesuai dengan surat keterangan nomor 2.10/168/UM.03.02/XI/2025 tanggal 4 Desember 2025 dan 2.10/241/UM.01.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) BPVP Sidoarjo sebesar Rp1.255.047.640

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.255.047.640 berupa 9 *dummy* alat peraga pelatihan, dan 1 unit micro bus sesuai dengan surat keterangan nomor 2.21/4068/UM.03/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025.

4) BPVP Banyuwangi sebesar Rp747.495.170

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp747.495.179 berupa 1 *dummy* angkutan darat bermotor, 7 *dummy* alat rumah tangga lainnya dan 4 *dummy* alat peraga pelatihan sesuai dengan surat keterangan nomor 2.22/126/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

5) BPVP Banda Aceh sebesar Rp2.680.766.018

a) Rekalsifikasi Masuk berupa A.C. Split dengan nominal sebesar Rp46,000,000 semula Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) berdasarkan surat keterangan nomor 2.8/55/UM.03.02/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025

b) Rekalsifikasi Masuk berupa kendaraan bermotor dan peralatan mesin dengan nominal sebesar Rp2.634.766.018 berdasarkan surat keterangan nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025

6) BPVP Padang sebesar Rp4.212.564.417

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp4.212.564.417 berupa kendaraan bermotor dan peralatan mesin sesuai dengan surat keterangan nomor 2.9/87/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

7) BPVP Bantaeng sebesar Rp1.716.940.764

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.716.940.764 berupa kendaraan bermotor dan peralatan mesin sesuai dengan surat keterangan nomor 2.19/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

8) BPVP Kendari sebesar Rp2.213.176.103

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.213.176.103 berupa kendaraan bermotor dan peralatan mesin sesuai dengan surat keterangan nomor 2.13/2557/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 dan

2.13/2800/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

9) BPVP Ambon sebesar Rp1.752.098.076

BPVP Ambon terdapat Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.752.098.076 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp. 145.770.000 yang terdiri dari 3 *dummy* Alat Peraga Pelatihan Lainnya berupa Alat Peraga Pelatihan Lainnya dengan nominal sebesar Rp80,500,000 dan 3 Buah Lap Top berupa Lap Top dengan nominal sebesar Rp60,690,000 berdasarkan SK No. 2.15/136/UM.03.01/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 serta 1 Buah Kursi Besi/Metal berupa Kursi Besi/Metal dengan nominal sebesar Rp4,580,000 semula Lemari Besi/Metal berdasarkan BA TKTM No. 2.15/691/UM.03.01/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
- b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.606.328.076 yang terdiri kendaraan bermotor dan peralatan mesin berdasarkan Surat keterangan nomor 2.15/182/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 BPVP Lombok Timur sebesar Rp770.436.600.

10) BPVP Lombok Timur Rp770.436.600

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp770.436.600 berupa kendaraan bermotor dan peralatan mesin sesuai dengan surat keterangan nomor 2.18/486/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

11) BPVP Pangkep sebesar Rp540.883.000

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp540.883.000 berupa kendaraan bermotor jeep dan alat peraga pelatihan sesuai dengan surat keterangan nomor 2.23/5626/UM.03.02/2025 tanggal 9 Desember 2025.

12) BPVP Belitung sebesar Rp1.034.333.250

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.034.333.250 berupa kendaraan bermotor, perlaatn mesin, dan alat peraga pelatihan sesuai dengan surat keterangan nomor 2.24/119/UM.03.02/XI/2025 tanggal 27 November 2025 dan 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

13) BBPVP Serang sebesar Rp1.470.597.169

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.470.597.169 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya sebesar Rp39.346.560 yang semula dicatat sebagai Sepeda Motor berdasarkan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/177/UM.03.00/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.
- b) Kendaraan Bermotor, Peralatan Mesin, Dan Alat Peraga Pelatihan sebesar Rp1.431.250.609 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

14) Satker Dit. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp4.347.882.113

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp4.347.882.113 berupa kendaraan bermotor, peralatan mesin, dan alat peraga pelatihan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/4255/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025.

15) BBPVP Medan sebesar Rp2.018.228.120

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.018.228.120 berupa kendaraan bermotor, peralatan mesin, dan alat peraga pelatihan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.2/338/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

16) BPVP Samarinda sebesar Rp9.802.077.899

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp9.802.077.899 berupa kendaraan bermotor, peralatan mesin, dan alat peraga pelatihan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.11/ 0086 /UM.03.04/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan 2.11/ 0265A /UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025.

17) Sekretariat BNSP sebesar Rp2.081.393.300

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.081.393.300 berupa kendaraan bermotor dan peralatan mesin, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/15/UM.03.02/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025, 2.1/17/UM.03.02/VII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, 2.1/18/UM.03.02/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan 2.1/34/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

18) BBPVP Bandung sebesar Rp1.133.586.727

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.133.586.727 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, alat peraga pelatihan lainnya, dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.5/10029/UM.03.02/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

19) BBPVP Bekasi sebesar Rp1.999.543.683

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.999.543.683 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.4/203/UM.03.02/XI/2025 tanggal 28 November 2025.

20) BPVP Sorong sebesar Rp2.360.524.882

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.360.524.882 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/ 2025 tanggal 4 Desember 2025

21) BPVP Ternate sebesar Rp2.497.586.846

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.497.586.846 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, alat peraga pelatihan lainnya dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.14/384 /UM.03.00/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025

22) BBPVP Semarang sebesar Rp2.351.967.469

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.351.967.469 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, alat peraga pelatihan lainnya dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/949/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025

23) BBPVP Makassar sebesar Rp3.335.684.550

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.335.684.500 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, alat peraga pelatihan lainnya dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025.

24) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi sebesar Rp64.154.377.309

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp64.154.377.309 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, alat peraga pelatihan lainnya, perkakas khusus dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/ /LP.01/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 dan 2/3229/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

7. Perolehan Lainnya sebesar Rp227.018.080.040

Tabel 232 Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	948.995.775
Sekretariat Jenderal			948.995.775
026.04	690634	BPKK Bekasi	12.400.000
Ditjen Binapenta dan PKK			12.400.000
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	3.337.000
Ditjen PHI dan Jamsos			3.337.000
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	13.745.682
Barenbang Ketenagakerjaan			13.745.682
026.13	035636	BPVP Surakarta	3.342.000
	050302	BPVP Sidoarjo	52.730.700
	051102	BPVP Banyuwangi	51.465.306.828
	089378	BPVP Padang	1.750.000
	191206	BPVP Bantaeng	13.559.760
	209255	BPVP Kendari	22.807.888
	426531	BBPVP Serang	199.918.193
	451026	Satker Ditjen Binalavotas	3.581.246.000
	452542	BBPVP Bandung	185.995.391
	452558	BBPVP Bekasi	12.408.300
	452609	BBPVP Semarang	47.496.900
	452652	BBPVP Makassar	86.394.545.700
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	84.058.493.923
Ditjen Binalavotas			226.039.601.583

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp948.995.775

Perolehan lainnya sebesar Rp933.609.775 terdapat pada Satker Sekretariat Jenderal yang terdiri dari:

- 1) Perolehan lainnya sebesar Rp933.609.775 disebabkan oleh kesalahan kodefikasi dan kuantitas atas aset berupa alat kantor, meubelair, AC split, dan peralatan rumah tangga, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, Nomor 1/700/UM.03/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025, dan Nomor 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 2) Perolehan lainnya sebesar Rp15.386.000 merupakan jurnal koreksi audited atas pendapatan Aset Tetap yang berasal dari akun belanja 521111 (Peralatan dan Mesin), berdasarkan hasil audit kepatuhan program dukungan manajemen pada Biro Umum. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor 1.5/235/UM.03/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, atas aset berupa *vacuum cleaner*, peralatan rumah tangga lainnya (*home use*), dispenser, dan karpet.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp12.400.000

Perolehan Lainnya sebesar Rp12.400.000 BPKK Bekasi atas Pencatatan Kembali BMN yang terhapuskan karena kesalahan input NUP dalam transaksi BMN melalui Lelang, dengan perolehan lainnya berupa 1 Unit Motor Suzuki senilai Rp2.400.000 dan telah dikoreksi sesuai surat pernyataan kronologi kesalahan input transaksi BMN nomor 3.8/922/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

c. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp3.337.000

Perolehan lainnya sebesar Rp3.337.000 merupakan transaksi perolehan lainnya sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026, berupa sofa sebanyak 1 unit dengan kode barang 3050201005.

d. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp13.745.682

1) Perolehan lainnya sebesar Rp11.484.682 adalah hasil koreksi catat atas kuantitas belanja barang yang belum tepat berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan atas Koreksi Catat Aset Nomor: 7/132/UM.03.00/IX/2025 Tanggal 18 September 2025.

2) Perolehan lainnya sebesar Rp2.261.000 pada unit Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan yang berasal dari belanja barang (akun 52). Perolehan tersebut berupa 1 (satu) unit Harddisk Eksternal/Portable yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap. Transaksi ini didasarkan pada Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang (KPB) Barenbang Ketenagakerjaan Nomor 7/400/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

e. Ditjen Binalavotas sebesar Rp226.039.601.583

1) BPVP Surakarta sebesar Rp3.342.000

Perolehan lainnya sebesar Rp3.342.000 berupa 1 *dummy* alat pendingin lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R-6/30/PW.10.00/IX/2025 tanggal 4 September 2025.

2) BPVP Sidoarjo sebesar Rp52.730.700

a) Perolehan lainnya sebesar Rp15.402.000 berupa Teko Listrik, Tabung Gas, Lemari Kayu, Meja makan Kayu, Peralatan Personal Komputer Lainnya, Meja Ruang Tamu dan *Grinder* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.21/392/UM.03.00/IV/2025 tanggal 8 April 2025.

b) Perolehan lainnya sebesar Rp8.127.200 merupakan pencatatan bahan pelatihan yang menjadi aset berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPVP Sidoarjo Nomor 2.21/4872/UM.03.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa peralatan *gimbal* stabilizer, dan printer label.

c) Perolehan lainnya sebesar Rp29.201.500 merupakan Pencatatan bahan pelatihan yang menjadi aset berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPVP Sidoarjo Nomor 2.21/4872/UM.03.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa peralatan printer label, *barcode scanner*, dan *portable microphone*.

3) BPVP Banyuwangi sebesar Rp51.465.306.828

a) Perolehan lainnya sebesar Rp40.116.911.752 merupakan Pencatatan pecah nilai peralatan dan mesin sebesar berupa *Tourist equipment* berdasarkan Surat Ketepatan BPVP Banyuwangi Tentang Koreksi Pencatatan BMN

Pada BPVP Banyuwangi Nomor 2.26/71/UM.03.00/IV/2026.

- b) Perolehan lainnya sebesar Rp11.348.395.076 merupakan pencatatan pecah nilai peralatan dan mesin sebesar berupa *Welding equipment* berdasarkan Surat Ketepatan BPVP Banyuwangi Tentang Koreksi Pencatatan BMN Pada BPVP Banyuwangi Nomor 2.26/71/UM.03.00/IV/2026.
- 4) BPVP Padang sebesar Rp1.750.000
Perolehan Lainnya pada BPVP Padang sebesar Rp1.750.000 merupakan pengadaan 1 unit *kettle* yang dibeli menggunakan akun Persediaan (521811), namun memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan Surat Keterangan KPA Nomor 2.15/45/KU.08.03/IV/2026 tanggal 29 April 2026.
- 5) BPVP Bantaeng sebesar Rp13.559.760
Perolehan lainnya pada BPVP Bantaeng sebesar Rp13.559.760 merupakan Pencatatan belanja pemeliharaan yang menjadi aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan SPK No. SPK.010/ BPVP-BNTG/ V/ 2025 tanggal 19 Mei 2025 berupa pembuatan rak arsip (custom) sebanyak 6 buah senilai Rp12.216.000 ditambah PPN 11%.
- 6) BPVP Kendari sebesar Rp22.807.888
Perolehan lainnya sebesar Rp22.807.888 berupa Kompor *Freestanding Teka* FS 604, *Westafel* Cuci Piring, *Exhaust* merek Linea by Teka, dan Meja dapur susun Mr. dapur 1000x505x1400mm sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 2.13/003.SPK/BPVP-KDI/PPK-KU/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025.
- 7) BBPVP Serang sebesar Rp199.918.193
BBPVP Serang terdapat perolehan lainnya sebesar Rp199.918.193 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Perolehan lainnya sebesar Rp173.457.067 berupa Personal Komputer Lainnya, *Router*, Peralatan Komputer Lainnya, *Switch*, *Wireless Access Point*, dan Alat Rumah Tangga Lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/404/UM.03.00/IX/2025 Tanggal 22 September 2025.
 - b) Perolehan lainnya sebesar Rp26.461.126 berupa 4 buah printer dan 1 buah scanner sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/737/UM.03.00/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
- 8) Dit. Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas sebesar Rp3.581.246.000
Perolehan lainnya sebesar Rp3.581.246.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/239/UM.03.04/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 berupa Meja Kerja, Rak, Kursi, *Multiscan Projector*, *Mic*, *Gimbal Tripod*, *Dispenser*, *Wireless Mic*, *Tripod Camera*, *Voice Recorder*, *Lampu Blitz*, *Camera Conference*, *Lemari Es*, *Camera Digital*, *Handy Talky*, Lemari Besi dan Kursi Besi.
- 9) BBPVP Bandung sebesar Rp185.995.391
Perolehan Lainnya sebesar Rp185.995.391 Pada Peralatan dan mesin yang terdiri dari :
 - a) Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan Gedung Serbaguna sesuai kontrak no PL28.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/VI/2025 sebagai aset tetap Peralatan dan

Mesin (NUP baru) (Rp 124,649,341);

- b) Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan mess pimpinan sesuai kontrak no PL05.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/II/2025 sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin / Meubeler (NUP Baru) (Rp 62,955,550).

10) BBPVP Bekasi sebesar Rp12.408.300

Perolehan Lainnya pada BBPVP Bekasi sebesar Rp12.408.300 berupa 2 buah televisi merk LG UHD *Smart* TV 55 Inch sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 00001 tanggal 31 Desember 2025.

11) BBPVP Semarang sebesar Rp47.496.900

Perolehan lainnya pada BBPVP Semarang sebesar Rp47.496.900 Perolehan lainnya sebesar Rp47.496.900 berupa 1 (satu) unit *Network Attach Storage* (NAS) dan 1 (satu) buah *Uninterruptible Power Supply* (UPS).

12) BBPVP Makassar sebesar Rp86.394.545.700

Perolehan lainnya sebesar Rp86.394.545.700 sesuai surat Nomor: 2/666/UM.03.01/IV/2025 tanggal 16 April 2025 berupa *Scanner*, PC, Lemari Besi, Sofa, *Note Book*, Kursi Besi, Printer, Meja Ruang Tamu, Meja Kerja dan Meja Rapat.

13) Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp84.058.493.923

Direktorat Bina Lemlatvok terdapat Perolehan lainnya sebesar Rp84.058.493.923 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Perolehan lainnya sebesar Rp1.015.000.000 berupa alat peraga pelatihan lainnya sesuai dengan Surat Keterangan SP.74/PB-ECAT/KPV/PPK.1/XI/2024 tanggal 3 Januari 2025.
- b) Perolehan lainnya sebesar Rp613.400.000 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan 2/ /LP.01/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
- c) Perolehan lainnya sebesar Rp9.575.207.014 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan 2/ /LP.01/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
- d) Perolehan lainnya sebesar Rp6.170.663.968 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan 2/ /LP.01/IX/2025 tanggal 9 September 2025.
- e) Perolehan lainnya sebesar Rp22.303.848.020 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan 2/ /LP.01/XI/2025 tanggal 31 November 2025.
- f) Perolehan lainnya sebesar Rp44.380.374.921 berupa peralatan pelatihan/workshop, peralatan laboratorium, peralatan IT, serta perlengkapan pendukung perkantoran dan failitas pembelajaran sesuai dengan Surat Keterangan 2/ / LP.01/XI/2025.

8. Reklsifikasi Masuk dari persediaan sebesar Rp387.158.427

Tabel 233 Mutasi Tambah (Reklasifikasi masuk Dari Persediaan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.05	451270	Dit. PHI dan Jamsos	16.000.000
Ditjen PHI dan Jamsos			16.000.000
026.08	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	341.000.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			341.000.000
026.13	051102	BPVP Banyuwangi	18.480.000
	209255	BPVP Kendari	11.678.427
Ditjen Binalavotas			30.158.427
Perolehan Lainnya			387.158.427

a. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp16.000.000

Reklasifikasi Masuk pada Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp16.000.000 merupakan transaksi tindak lanjut atas temuan pemeriksaan internal berupa tiang bendera stainless sebanyak 10 unit dengan nilai satuan Rp1.600.000 dengan surat keterangan KPB Nomor: 4/1381/UM.03.04/IX/2025 tanggal 11 September 2025.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp341.000.000

Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp341.000.000 terdapat pada satuan kerja Ditjen Binwasnaker dan K3 merupakan transaksi karena adanya kesalahan input transaksi reklas berupa Mobil Unit Kesehatan Masyarakat NUP 28 senilai Rp341.000.000 sebagai tindaklanjut ketidaksesuaian kodefikasi inventarisasi aset ber KIB. Transaksi yang dilakukan ialah reklasifikasi keluar ke persediaan seharusnya transaksi yang dilakukan ialah transaksi reklasifikasi keluar dalam aplikasi SAKTI modul aset tetap. Sehingga untuk menindaklanjuti reklasifikasi keluar ke persediaan dilakukan transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan Surat keterangan Seditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026.

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp30.158.427

- 1) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan pada Ditjen Binalvotas sebesar Rp18.480.000 terdapat pada BPVP Banyuwangi berupa peralatan bengkel lainnya sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 2.22/235/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 2) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan pada Ditjen Binalvotas sebesar Rp11.678.427 terdapat pada BPVP Kendari sesuai dengan Surat Berita Acara Reklasifikasi Barang Persediaan ke Aset Tetap Nomor: 2.13/1072/UM.03.04/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 berupa Vacuum Pump.

9. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp6.999.000

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp6.999.000 terdapat pada Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker merupakan pembelian transaksi yang dilakukan untuk menambah nilai barang berupa tablet PC terhadap pembelian yang dilakukan berupa hardcase keyboard sebanyak 1 unit.

10. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp9.963.433.609

Tabel 234 Mutasi Tambah (Koreksi Pencatatan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	11.951.800
Sekretariat Jenderal			11.951.800
026.08	350081	Balai K3 Medan	22.399.733
	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	46.897.500
Ditjen Binwasnaker dan K3			69.297.233
026.13	426531	BBPVP Serang	1.113.250.576
	626131	Dir. Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	8.768.934.000
Ditjen Binalavotas			9.882.184.576
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah			9.963.433.609

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.951.800

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp11.951.800 terdapat pada Sekretariat Jenderal berupa Alat Kantor dan Mixer Sound Sistem berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum nomor: 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 November 2025. Koreksi pencatatan ini diakibatkan kesalahan kodefikasi dan kuantitas.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp69.297.233

1) Balai K3 Medan sebesar Rp22.399.733

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Balai K3 Medan sebesar Rp22.399.733. Transaksi ini merupakan dampak dari perubahan kode barang sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi aset kementerian (aset ber-KIB) atas item sabuk pengaman lainnya. Langkah koreksi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor: 5.2/25/UM.03.04/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

2) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp46.897.500

Koreksi Pencatatan Nilai bertambah pada satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp46.897.500 atas pemeliharaan Alat Uji Ultrasonic (NUP 1). Kapitalisasi biaya ini mengubah nilai perolehan aset dari Rp291.000.000 menjadi Rp337.897.500 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 5/32/KU.07.04/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp9.882.184.576

1) BBPVP Serang sebesar Rp1.113.250.576

Koreksi Nilai Bertambah sebesar Rp1.112.040.576 berupa CNC *Milling Machine* berupa EMCO *Concept Mill*, alat peraga pelatihan lainnya, PC unit, *Microphone Table Stand*, dan *Server* sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor: 2.3/344/UM.03.00/IX/2025 tanggal 3 September 2025.

2) Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp8.768.934.000

Koreksi Nilai Bertambah sebesar Rp8.768.934.000 atas Peralatan Pelatihan UPTP yang dibiayai melalui mekanisme perpanjangan kesempatan (RPATA). Pada tahun 2024, aset tersebut telah dicatat sebesar 50% sebagai KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dan telah dilakukan koreksi pencatatan pada tahun yang sama. Saat pembayaran sisa kontrak diselesaikan pada tahun 2025,

nilai aset perlu dikoreksi bertambah agar mencerminkan total nilai perolehan secara utuh sesuai kontrak.

11. Koreksi Susulan sebesar Rp123.484.560

Tabel 235 Mutasi Tambah (Koreksi Susulan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	18.979.000
	450938	Sekretariat Jenderal	5.001.660
	626011	Pusat Pasar kerja	5.115.000
Sekretariat Jenderal			29.095.660
	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	94.388.900
Ditjen Binwasnaker dan K3			94.388.900
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah			123.484.560

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp29.095.660

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp18.979.000

Koreksi Susulan pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp18.979.000 atas pengadaan CCTV. Langkah ini diambil untuk mengoreksi kesalahan kodifikasi, di mana pembelian yang semula dibebankan pada akun pemeliharaan seharusnya dikapitalisasi sebagai penambahan nilai aset. Tindakan ini merujuk pada Surat Keterangan Nomor 1/1669/UM.03.00/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

2) Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.001.660

Koreksi Susulan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.001.660 berupa *Portable Generating Set*, koreksi pencatatan ini diakibatkan kesalahan kodifikasi dan kuantitas berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum nomor: 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp5.115.000

Koreksi Susulan pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp5.115.000 berupa keyboard berdasarkan Surat keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Nomor 1/2463/UM.01.03/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp94.388.900

Koreksi Susulan pada satuan kerja Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp94.388.900 guna memperbaiki nilai perolehan BMN yang belum ter-input pada NUP yang bersangkutan. Transaksi ini melibatkan koreksi nilai aset AC Split dan Generator yang dialihkan ke akun Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya serta Mobil Ambulans. Langkah ini merujuk pada Surat Keterangan Seditjen Nomor: 5/30/KU.07.04/II/2026 tertanggal 5 Februari 2026.

12. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp15.484.109.337

Tabel 236 Mutasi Tambah (Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Satker Sekretariat Jenderal	309.500.000
Sekretariat jenderal			309.500.000
026.04	690633	BPKK Kendari	60.848.000
Ditjen Binapenta dan PKK			60.848.000
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	24.572.000
Ditjen PHI dan Jamsos			24.572.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	1.089.969.100
	350080	Balai K3 Medan	7.500.000
	350083	Balai K3 samarinda	4.765.818.937
	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	8.696.687.300
Ditjen Binwasnaker dan K3			14.559.975.337
02.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	27.614.000
Barenbang Ketengakerjaan			27.614.000
026.13	089378	BPVP Padang	367.770.000
	352631	BPVP Belitung	131.850.000
	452652	BBPVP Makassar	1.980.000
Ditjen Binalavotas			501.600.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif			15.484.109.337

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp309.500.000

Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya sebesar Rp309.500.000 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa Kendaraan Roda 4 (jeep) dan *Camera Digital* pada Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja nomor: 1/316/UM.03.00/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025.

- b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp60.848.000

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp60.848.000 pada satker BPKK Kendari berupa lemari penyimpanan, partisi dan kursi *fiber*.

- c. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp24.572.000

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp24.572.000 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi aset alat angkutan berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda dua lainnya (Kode Barang: 3020104999). Langkah ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4/2320/UM.03.00/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

- d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp793.449.1000

- 1) Balai K3 Bandung sebesar Rp1.089.969.100

- a) Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp572.056.600 pada Balai K3 Bandung Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Nomor:5.3/26/UM.03.04/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 berupa *Exposure Time Meter* 1 unit, *Stack Sampler* 1 unit, Kursi Besi/Metal 4 unit, Meja Komputer 2 unit.

- b) Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp213.892.500 pada Balai K3 Bandung Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Nomor: 5.3/220/UM.03.04/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 senilai Rp213.892.500 berupa: *Audiometer* 2 unit, *EKG Monitor* 2 Unit, *Vacum Pump* 4 unit.
- c) Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp304.020.000 pada Balai K3 Bandung Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Nomor: 5.3/257/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp304.020.000 berupa *Filling Cabinet* Kayu dan *Vibration Meter*.
- 2) Balai K3 Medan sebesar Rp7.500.000
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp7.500.000 pada Balai K3 Medan Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor: 5.2/14/UM.03.04/VII/2025 tanggal 24 Juni 2025 berupa 3 buah meja kerja besi/metal.
- 3) Balai K3 Samarinda sebesar Rp4.765.818.937
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp4.765.818.937 pada Balai K3 Makassar Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan No 5.4/010/UM.03.04/II/2026 tgl 18 Februari 2026.
- 4) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp8.696.687.300
 - a) Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp2.123.047.200 pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Nomor 5/30/KU.07.04/II/2026 tanggal 5 Februari 2025 berupa mobil ambulance sebanyak 5 unit kendaraan bermotor khusus alinnya sebanyak 2 unit, *Pulse generator*, *A.C Split*, *Portable Generating Set*, dan *Generator Set*.
 - b) Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp6.232.640.100 pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Nomor 5/35/KU.07.04/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 berupa *full body Harness*, *Portable Generating set*, tandu lipat dan mobil *ambulance*.
 - c) Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp341.000.000 pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2025 berupa mobil unit kesehatan masyarakat NUP 28.
- e. Barenbang Ketegakerjaan sebesar Rp27.614.000
Penggunaan kembali BMN Pada Barenbang Ketengakerjaan yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp27.614.000 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi Kendaraan Tahun 2025 dengan Nomor: BA Sensus BMN 7/203/UM.03.02/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025, sekaligus akan dipergunakan kembali berupa 2 unit kendaraan sepeda motor di unit kerja Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan sebagai

bentuk optimalisasi kendaraan operasional di lingkungan Barenbang Ketenagakejaan.

f. Ditjen Binalavotas sebesar Rp501.600.000

1) BBPVP Padang sebesar Rp367.770.000

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang sebesar Rp367.770.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.9/86/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa 2 unit station wagon, 1 unit sedan, dan 2 unit jeep.

2) BBPVP Belitung sebesar Rp131.850.000

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp131.850.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.3/174/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 berupa Cnc Milling Machine dan Alat Peraga lainnya.

3) BBPVP Makassar sebesar Rp1.980.000

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp1.980.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SP.88/PB-ECAT/KPV/PPK.1/XI/2024 tanggal 6 Januari 2025 berupa Alat Peraga lainnya.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Kurang

Koreksi Pencatatan Nilai Kurang sebesar Rp1.428.538.909 terdapat pada:

Tabel 237 Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan Nilai Kurang)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	53.506.965
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	1.333.371.088
Sekretariat Jenderal			1.386.878.053
026.04	259322	BBPKK Bandung	16.639.260
	690634	BPKK bekasi	3.588.975
Ditjen Binapenta			20.228.235
026.08	350079	Balai K3 Bandung	3.432.522
Ditjen Binwasnaker dan K3			3.432.522
026.13	352631	BPVP Belitung	3.000.000
	426531	BBPVP Serang	99
	451026	Dit. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	15.000.000
Ditjen Binalavotas			18.000.099
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang			1.428.538.909

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.333.371.088

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp53.506.965

a) Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp52.918.965 berupa 9 unit Laptop berdasarkan Surat Keterangan Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Nomor B-1.10/1014/KU.08.01/IV/2026 tanggal 13 April 2026.

b) Koreksi pencatatan nilai berkurang 1 unit Televisi sebesar Rp588.000 berdasarkan Surat Keterangan Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Nomor B-1.10/1014/KU.08.01/IV/2026 tanggal 13 April 2026.

2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.333.371.088

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada Satker Sekretariat Jenderal senilai Rp1.333.371.088 berupa Kendaraan Roda 2 (sepeda motor), meubelair, alat kantor dan lain-lain berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum nomor 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025; 1/700/UM.03/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025; 1/1121/UM.03/XI/2025 tanggal 26 November 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Koreksi pencatatan nilai berkurang ini diakibatkan kesalahan kodifikasi dan kuantitas.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp20.228.235

1) BBPKK Bandung Barat Sebesar Rp16.639.260

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada BBPKK Bandung Barat senilai Rp16.639.260 sesuai surat keterangan koreksi perubahan nilai berkurang BMN Nomor: 3.1/1605/UM.03.04/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 berupa alat pemanas *prosesing* dan *genset*.

2) BPKK Bekasi sebesar Rp3.588.975

Koreksi pengurangan nilai aset pada BPKK Bekasi berupa *Smart TV LG 86"* senilai Rp3.588.975 dengan Nomor R-6/64/PW.10.00/XI/2025 pada tanggal 22 Desember 2025 atas kelebihan pembayaran.

c. Ditjen Binwasnaker sebesar Rp3.432.522

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada Ditjen Binwasnaker terdapat pada Balai K3 Bandung senilai Rp3.432.522 merupakan transaksi Pengurangan Nilai Aset karena adanya hasil temuan Inspektorat Jenderal Kemnaker RI sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor 6/57.A/PW.10.00/IX/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Audit Kepatuhan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung Tahun Anggaran 2025 terkait temuan nomor 7.a yaitu Kelebihan Pembayaran Pengadaan AC sebesar Rp3.432.522, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Bandung Nomor 5.3/252/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp18.000.099

1) BPVP Belitung sebesar Rp3.000.000

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada BPVP Belitung sebesar Rp3.000.000 dikarenakan Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.3/174/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 berupa *Cnc Milling Machine* dan alat peraga lainnya.

2) BBPVP Serang sebesar Rp99

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada BBPVP Serang sebesar Rp99 dikarenakan Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SP.88/PB-ECAT/KPV/PPK.1/XI/2024 tanggal 6 Januari 2025 berupa Alat Peraga lainnya.

3) Dit Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp15.000.000

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada Dit Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp15.000.000 dikarenakan Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SP.88/PB-ECAT/KPV/PPK.1/XI/2024 tanggal 6 Januari 2025 berupa alat peraga lainnya.

2. Transfer Keluar sebesar Rp76.425.958.997

Tabel 238 Mutasi Kurang (Transfer Keluar)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	1.897.277.500
Sekretariat Jenderal			1.897.277.500
026.04	259322	BBPKK Bandung	927.673.500
	451139	Dit. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PKK	899.360.000
	690634	BPKK Bekasi	477.766.460
Ditjen Binapenta dan PKK			2.304.799.960
026.05	451270	Satker Ditjen PHI & JSK	397.791.750
Ditjen PHI dan JSK			397.791.750
026.08	249015	Disnakertrans Provinsi NTT	6.000.000
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	14.223.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			20.223.000
026.11	452677	Barenbang	3.811.492.000
Barenbang			3.811.492.000
026.13	050302	BPVP Sidoarjo	28.111.148
	219228	BPVP Ambon	126.005.000
	451026	Dit. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	14.261.659.713
	452533	Sekretariat BNSP	148.000.000
	452542	BBPVP Bandung	577.900.357
	452558	BBPVP Bekasi	161.486.570
	626131	Dit. Bina Lemiatvok	52.691.211.999
Ditjen Binalavotas			67.994.374.787
Transfer Keluar			76.425.958.997

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.897.277.500

Transfer Keluar sebesar Rp1.897.277.500 pada Satker Sekretariat Jenderal berupa:

- 1) *Personal Computer* sebanyak 23 unit ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) sebesar Rp395.600.000 yang berdasarkan BAST Nomor 1/4584/UM.03.01/XII/2024 pada tanggal 13 Desember 2024.
- 2) *Kitchen Set*, kursi besi/metal, lemari kayu, *locker*, meja kerja kayu, meja rapat, sofa, dan Tempat Tidur Kayu ke Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.030.227.500 yang berdasarkan BAST Nomor 1/3373/UM.03.01/IX/2025 pada tanggal 24 September 2025.
- 3) Mobil *Pick Up Merk* Mitsubishi sebanyak 1 (satu) unit ke PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp436.000.000 yang berdasarkan BAST Nomor 1/3741/UM.03.01/XII/2025 pada tanggal 30 Desember 2025.
- 4) *Tablet PC Merk iPad* sebanyak 1 (satu) unit ke PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp35.450.000 yang berdasarkan BAST Nomor 1/2368/UM.03.01/XII/2025 pada tanggal 1 Desember 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp2.304.799.960

1) BBPKK Bandung sebesar Rp927.673.500

Transfer keluar senilai Rp927.673.500 berupa 2 Unit Sepeda Motor, 8 buah A.C *Split*, dan ATK lainnya.

2) Dit Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PKK sebesar Rp899.360.000

Transfer keluar senilai Rp899.360.000 berupa 1 Unit Mini bus, 21 buah

Microphone, dan 1 unit Jeep.

3) BPKK Bekasi sebesar Rp477.766.460

Transfer keluar senilai Rp477.766.460 berupa 6 buah CCTV, 1 Unit Mini Bus dan 40 buah Rak besi.

c. Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp397.791.750

Transfer keluar senilai Rp397.791.750 berasal dari penyerahan aset ke Sekretariat Jenderal c.q Biro Umum berupa Alat angkutan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 4/955/UM.03.02/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.

d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp20.223.000 terdapat pada:

1) Disnakertrans Provinsi NTT

Transfer keluar Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp6.000.000, merupakan serah terima aset dikarenakan adanya proses likuidasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2024 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor:5/219/UM.03.00/IX/2025 tanggal 8 September 2025.

2) Satker Ditjen Binwasnaker & K3

Transfer keluar Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp14.223.000 merupakan transaksi transfer keluar dari Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk Balai K3 Jakarta dikarenakan adanya serah terima 1 (satu unit sepeda motor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Balai Besar K3 Jakarta Nomor: 5/4/UM.03.02/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.

e. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp3.811.492.000

Transfer keluar Pada Barenbang sebesar Rp3.811.492.000 terdiri dari:

1) Transfer keluar antar eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan ke Biro Umum Sekretariat Jenderal sebanyak 53 unit dengan total nilai Rp3.589.932.000 dengan Nomor: berita acara 7/001/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.

2) Transfer keluar antar eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dari Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan ke Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sebanyak 1 unit Mini Bus dengan total nilai Rp221.560.000 dengan Nomor berita acara 7/376/UM.03.01/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025.

f. Ditjen Binalavotas sebesar Rp67.994.374.787

1) BPVP Sidoarjo sebesar Rp28.111.148

Transfer Keluar sebesar Rp28.111.148 berupa 2 buah mesin frais sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.21/4144/UM.03.01/XII/20 tanggal 17 Desember 2025.

2) BPVP Ambon sebesar Rp126.005.000

Transfer Keluar sebesar Rp126.005.000 berupa 1 buah fiber optic operating, 1 buah fiber optic test set, 1 buah *time domain reflectometer*, 1 buah *optical*

power meter sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.15/1332.1/UM.03.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) Dit. Pembinaan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp14.261.659.713

Transfer Keluar sebesar Rp14.261.659.713 berupa alat tulis kantor, alat rumah tangga, kamer, dan alat kantor lainnya.

4) Sekretariat BNSP sebesar Rp148.000.000

Transfer Keluar sebesar Rp148.000.000 berupa 1 *dummy* kendaraan dinas bermotor sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/1680/UM.03.01/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

5) BBPV Bandung Sebesar Rp577.900.357

Transfer Keluar sebesar Rp577.900.357 berupa *Booth Oven Heshbon, Kohands, dan Heshbon HIT511* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.5/79/UM.03.02/VIII/2025 Tanggal 22 Agustus 2025.

6) BBPVP Bekasi Sebesar Rp161.486.570

Transfer Keluar sebesar Rp161.486.570 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.4/2/UM.03.01/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 berupa *Mixer 2 buah dan Bread Slicer 1 buah, Cabinet Gas Stove 4 Burner, Baking Oven 2 Deck, Sink Table, dan Electric Proofer dan Cooling Rack Trolley.*

7) Dit. Bina Lemlatvok Rp52.691.211.999

Transfer Keluar sebesar Rp52.691.211.999 berupa alat tulis kantor, alat rumah tangga, kamera, dan alat kantor lainnya.

3. Hibah Keluar sebesar Rp4.130.333.528

Tabel 239 Mutasi Kurang (Hibah Keluar pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450990	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.702.011.340
Sekretariat Jenderal			1.702.011.340
026.02	259031	Inspektorat Jenderal	152.460.000
Sekretariat Jenderal			152.460.000
026.04	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	821.045.128
	690634	BPKK Bekasi	119.770.000
Ditjen Binapenta dan PKK			940.815.128
026.08	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	24.904.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			24.904.000
026.13	050302	BPVP Sidoarjo	129.250.000
	051102	BPVP Banyuwangi	1.180.893.060
Ditjen Binalavotas			1.310.143.060
Hibah Keluar			4.130.333.528

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.702.011.340

Hibah Keluar sebesar Rp1.702.011.340 terdapat pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan transfer keluar barang milik negara berupa peralatan dan mesin *Non* TIK dengan Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) peralatan dan mesin yang diserahkan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mujahidin dengan no. B-1/260/UM.03.03/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, dan Berita Acara Serah Terima nomor 1/4365//UM.03.03/VII/2024 dan 010/MDTA-AM/08/2024 tanggal 4 Juli 2024.

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp152.460.000

Hibah Keluar sebesar Rp152.460.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-14/MK.6/KNL.0703/2025 Tanggal 23 Januari 2025 Hal Persetujuan Hibah BMN Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Sebesar Rp152.460.000

c. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp940.815.128

a. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp821.045.128

Hibah Keluar dari Ditjen Binapenta dan PKK ke beberapa Yayasan, Pondok Pesantren, dan Dinas Tenaga Kerja senilai Rp821.045.128 terdiri dari:

- a) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dengan SK Hibah Nomor 1/697/UM.03.03/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- b) Hibah ke YPI Nahdlatul Wathan Bogor dengan SK Hibah Nomor 1/153/UM.03.03/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.
- c) Hibah Ke Yayasan Citra Bangsa Depok dengan SK Hibah Nomor 1/361/UM.03.03/IX/2025 tanggal 26 September 2025.
- d) Hibah Ke Pondok Pesantren Ash Shidiqiyyah dengan SK Hibah Nomor 1/367/UM.03.03/IX/2025 tanggal 29 September 2025.
- e) Hibah Ke Yayasan Al Ahsan Asnawi Darussalam dengan SK Hibah Nomor 1/360/UM.03.03/IX/2025 tanggal 26 September 2025.
- f) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wajo dengan SK Hibah Nomor 1/478/UM.03.03/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 berupa Sepeda Motor sebanyak 3 unit senilai Rp44.016.000

b. BPKK Bekasi sebesar Rp119.770.000

Hibah Keluar pada satker Satker Ditjen Binapenta & PKK sebesar Rp777.029.128 dan BPKK Bekasi sebesar Rp119.770.000 diserahkan ke Yayasan Siti Fatimah sesuai BAST Nomor: 3.8/420/UM.03.03/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dan Yayasan Ash Shiddiqiyyah Nomor: 3.8/419/UM.03.03/XI/2024 tanggal 26 November 2024

d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp24.904.000

Hibah Keluar pada Satuan Kerja Ditjen Binwasnaker sebesar Rp24.904.000 merupakan transaksi hibah aset Thermometer untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Aset BMN Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/460/UM.03.03/XII/2025 tanggal 10 desember 2025.

e. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.310.143.060

1) BPVP Sidoarjo sebesar Rp129.250.000

Hibah Keluar pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp129.250.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 1/408/UM.03.03/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 berupa alat peraga pelatihan lainnya.

2) BPVP Banyuwangi sebesar Rp1.180.893.060

Hibah Keluar pada BPVP Banyuwangi sebesar Rp1.180.893.060 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hibah sebanyak 1 buah berupa *Scanner (Universal Tester)* dan 1 buah berupa *Toolkit* Perbengkelan dengan jumlah Rp99.000.000 berdasarkan SK 1/351/UM.03.03/IX/2025 tanggal 23 September 2025.
- b) Hibah sebanyak 1 *dummy* berupa Alat Peraga Pelatihan Lainnya sebesar Rp166.071.400 berdasarkan SK 1/489/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- c) Hibah sebanyak 1 buah berupa Mesin Kompresor sebesar Rp27.720.000, 1 buah berupa *Diagnostik Set* sebesar Rp49.107.300, dan 1 buah Peralatan Bantu Lainnya sebesar Rp 54.202.060 berdasarkan SK 1/351/UM.03.03/IX/2025 tanggal 23 September 2025.
- d) Hibah sebanyak 2 buah berupa Peralatan Bengkel Lainnya sebesar Rp613.147.760 berdasarkan SK 1/489/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- e) Hibah sebanyak 2 buah berupa *Tune Up Tester* (alat laboratorium logam, mesin dan listrik) sebesar Rp30.964.000, buah berupa Lainnya (alat laboratorium lainnya) sebesar Rp63.680.540 dan 2 *dummy* berupa alat pendingin lainnya sebesar Rp77.000.000 berdasarkan SK 1/351/UM.03.03/IX/2025 tanggal 23 September 2025.

4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp169.120.929.704

Tabel 240 Mutasi Kurang (Rekalsifikasi Keluar)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	1.144.985.090
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	5.268.860.882
	450990	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.053.113.350
Sekretariat Jenderal			9.466.959.322
026.02	259031	Inspektorat Jenderal	1.062.500.000
Inspektorat Jenderal			1.062.500.000
026.04	259322	BBPKK Bandung	255.551.850
	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	1.266.205.070
	690633	BPKK Kendari	5.300.000
	690634	BPKK Bekasi	44.058.000
Ditjen Binapenta dan PKK			1.571.114.920
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	2.500.699.739
Ditjen PHI dan Jamsos			2.500.699.739
026.08	350079	Balai K3 Bandung	1.712.115.000
	350080	Balai Hiperkes dan K2 Surabaya	2.045.394.800
	350081	Balai K3 Medan	11.440.700
	350083	Balai K3 Samarinda	1.263.917.500
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	6.264.332.000
	651870	Ditjen Binwasnaker dan K3	11.675.625.900
Ditjen Binwasnaker dan K3			22.972.825.900
02.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	196.400.000
Barenbang Ketenagakerjaan			196.400.000
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	554.610.100
	035636	BPVP Surakarta	3.131.735.250
	050302	BPVP Sidoarjo	1.255.047.640
	051102	BPVP Banyuwangi	747.495.170
	065106	BPVP Banda Aceh	2.680.766.018
	089378	BPVP Padang	4.218.614.417
	191206	BPVP Bantaeng	1.716.940.764
	209255	BPVP Kendari	2.200.258.986
	219228	BPVP Ambon	1.752.098.076
	230302	BPVP Lombok Timur	770.436.600
	352630	BPVP Pangkep	540.883.000
	352631	BPVP Belitung	1.034.333.250
	426531	BBPVP Serang	15.242.166.054
	451026	Dit. Binalavotas	4.347.882.113
	451094	BBPVP Medan	2.018.228.120
	451108	BPVP Samarinda	9.802.077.899
	452533	Sekretariat BNSP	2.081.393.300
	452542	BBPVP Bandung	1.133.586.727
	452558	BBPVP Bekasi	1.999.543.683
	452589	BPVP Sorong	2.360.524.882
	452595	BPVP Ternate	2.497.586.846
	452609	BBPVP Semarang	2.351.967.469
	452652	BBPVP Makassar	2.765.076.150
	626131	Dit. Bina Lemlatvok	64.147.177.309
Ditjen Binalavotas			131.350.429.823
Reklasifikasi Keluar			169.120.929.704

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.466.959.322

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp1.144.985.090

Reklasifikasi Keluar pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp1.144.985.090 berupa Kendaraan Roda 4, *Car Washer*, *Access Point*, *Rescue Jaring Harnes* yang merupakan koreksi temuan Itjen.

2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.268.860.882

Reklasifikasi Keluar pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.268.860.882 berupa Kendaraan Roda 4, Alat rumah tangga dan alat kantor berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor: 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 November 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Surat Keterangan Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja nomor: 1/317/UM.03.00/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025;

3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.053.113.350

Reklasifikasi Keluar pada Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan sebesar Rp3.053.113.350 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya, Laptop, Mini Bus, Lemari Bus dan lain-lain.

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.062.500.000

Reklasifikasi Keluar pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.062.500.000 berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor: 6/2897/UM.03.02/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025 berupa *jeep*.

c. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp1.571.114.920

1) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp255.551.850

Reklasifikasi Keluar pada BBPKK Bandung Barat berupa Alat Peraga Pelatihan Lainnya sebesar Rp255.831.850 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Nomor 3.1/5226/UM.03.02 /XII/ 2025 tanggal 24 Desember 2025.

2) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp 1.266.205.070

a) Reklasifikasi keluar berupa 1 unit mini bus Mitsubishi Pajero sebesar Rp517.000.000 dan telah dilakukan koreksi perubahan nama barang menjadi *jeep* sesuai Surat Pernyataan Reklasifikasi Kode Barang BMN Nomor: 3/3640/UM.03.06/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.

b) Reklasifikasi Keluar berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya sebesar Rp300.000.000 dan telah dilakukan koreksi perubahan nama barang menjadi Sedan berdasarkan surat keterangan reklasifikasi kode BMN Nomor 3/1168/UM.03.06/XII/2025.

c) Reklasifikasi Keluar berupa sedan sebesar Rp449.205.070 dan telah dilakukan koreksi perubahan nama barang menjadi Jeep berdasarkan surat keterangan reklasifikasi kode BMN Nomor 3/1168/UM.03.06/XII/2025.

3) BPKK Kendari sebesar Rp5.300.000

Reklasifikasi Keluar pada BPKK Kendari sebesar Rp5.300.000 berupa Pompa air NUP 2 berdasarkan Surat Keterangan Nomor:3.9/1341/UM.03/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 karena ketidaksesuaian kodefikasi barang.

Sehingga direkomendasikan untuk dirubah ke kodefikasi alat rumah tangga lainnya home use (3050206999).

4) BPKK Bekasi sebesar Rp44.058.000 berupa:

- a) Reklasifikasi Keluar berupa 6 unit *Air Cleaner* dengan nilai Rp35.400.000 karena adanya ketidaksesuaian kodefikasi akun BMN sesuai Surat Keterangan Kepala BPKK Bekasi Nomor: 3.8/100/UM.03.03/II/2025 pada tanggal 8 Februari 2025.
- b) Reklasifikasi Keluar berupa 1 unit Peralatan Olahraga Lainnya dengan nilai Rp8.658.000 karena adanya ketidaksesuaian kodefikasi akun BMN sesuai Surat Keterangan Kepala BPKK Bekasi dengan Nomor: 3.8/100/UM.03.03/II/2025 pada tanggal 8 Februari 2025.

d. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp2.500.699.739

Reklasifikasi Keluar pada Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp2.500.699.739 tindak lanjut hasil inventarisasi berupa perubahan kodesifikasi Alat Angkutan dengan surat keterangan KPB dengan nomor 4/2320/UM.03.00/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 sebanyak 15 unit berupa Station wagon sebanyak 9 unit, mini bus (penumpang 14 orang kebawah) sebanyak 1 unit, kendaraan bermotor penumpang lainnya sebanyak 3 unit, dan kendaraan bermotor beroda dua lainnya sebanyak 2 unit.

e. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp22.972.825.900 terdapat pada:

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp1.712.115.000

Reklasifikasi keluar ini dilakukan menindaklanjuti hasil inventarisasi Kementerian berupa aset Ber KIB. Dalam Berita Acara Inventarisasi terdapat ketidaksesuaian kodefikasi barang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kode barang. Transaksi sebesar Rp1.712.115.000 ini dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Bandung Nomor: 5.3/230/UM.03.04/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 berupa kendaraan bermotor, mini bus, dan baju pengaman.

2) Balai Hiperkes Dan K2 di Surabaya sebesar Rp2.045.394.800

Reklasifikasi keluar pada Balai Hiperkes dan K3 Surabaya dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 5.12/101/UM.00.00/IV/2026 tanggal 22 April 2026. Reklasifikasi ini dilakukan sebagai penyesuaian atas ketidaksesuaian kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan hasil sensus BMN per KIB. Adapun aset yang dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Keluar Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 4 menjadi Mini Bus sebesar Rp156.148.300.
- b) Reklasifikasi Keluar Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 3 sebesar Rp341.000.000 menjadi Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya.
- c) Reklasifikasi Keluar Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 2 sebesar Rp264.000.000 menjadi Mobil Unit *Rontgen*.
- d) Reklasifikasi Keluar Mobil Kesehatan Masyarakat NUP 1 sebesar Rp196.350.000 menjadi Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya.
- e) Reklasifikasi Keluar Mobil Ambulance NUP 1 sebesar Rp444.400.000

menjadi Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya.

- f) Reklasifikasi Keluar Kendaraan Bermotor Beroda dua Lainnya NUP 2 sebesar Rp17.374.500 menjadi sepeda Motor NUP 2.
 - g) Reklasifikasi Keluar Kendaraan Bermotor Beroda dua Lainnya NUP 1 sebesar Rp17.374.500 menjadi sepeda Motor NUP 1.
 - h) Reklasifikasi Keluar Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya NUP 2 sebesar Rp231.500.000 menjadi Mini Bus NUP 2.
 - i) Reklasifikasi Keluar Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya NUP 1 sebesar Rp365.120.000 menjadi Mini Bus NUP 1
 - j) Reklasifikasi Keluar Full Body Harness NUP 3 sebesar Rp4.042.500 menjadi *Rescue Jaring Harnes*.
 - k) Reklasifikasi Keluar Full Body Harness NUP 2 sebesar Rp4.042.500 menjadi *Rescue Jaring Harnes*.
 - l) Reklasifikasi Keluar Full Body Harness NUP 1 sebesar Rp4.042.500 menjadi *Rescue Jaring Harnes*.
- 3) Balai K3 Medan sebesar Rp11.440.700
- Reklasifikasi keluar pada Balai K3 Medan sebesar Rp11.440.700 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi kementerian atas aset ber-KIB, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kode barang, yaitu 1 unit pompa angin dan 1 unit *pompa portable*, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Samarinda Nomor:5.2/23/UM.03.04/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.
- 4) Balai K3 Samarinda sebesar Rp1.263.917.500
- Reklasifikasi keluar pada Balai K3 Samarinda sebesar Rp1.263.917.500 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi Kementerian atas aset BMN ber-KIB, sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Samarinda Nomor 5.4/005/UM.03.04/I/2026 tanggal 23 Januari 2026.
- 5) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp6.264.332.000 berasal dari:
- d) Reklasifikasi masuk senilai Rp5.604.332.000 ini dilakukan menindaklanjuti transaksi reklasifikasi masuk BBK3 Jakarta sesuai dengan hasil inventarisasi kementerian berupa aset Ber KIB. Dalam Berita Acara Inventarisasi terdapat ketidaksesuaian kodefikasi barang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kode barang. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBK3 Jakarta Nomor:5.5/145/UM.03/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
 - e) Reklasifikasi masuk senilai Rp660.000.000. Pada bulan November 2025, Balai K3 Jakarta kembali menindaklanjuti hasil inventarisasi aset ber KIB sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBK3 Jakarta Nomor: 5.5/UM.03/XI/2025 tanggal November 2025.
- 6) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp11.675.625.900
- Reklasifikasi Keluar pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp11.675.625.900 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi aset BMN ber-KIB pada program Kementerian Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui penyesuaian kodefikasi, sesuai dengan Berita Acara Sensus BMN Kuasa Pengguna Barang Nomor:5/36/UM.03.04/XI/2025 tanggal 17 November 2025.

Atas ketidaksesuaian kodefikasi tersebut, dilakukan reklasifikasi keluar atas aset dengan kodefikasi yang tidak sesuai dan ditindaklanjuti dengan reklasifikasi masuk atas aset dengan kodefikasi yang sesuai ketentuan, berdasarkan Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 sebagai berikut:

- a) Nomor:5/35/KU.07.04/II/2026 tanggal 11 Februari 2026, berupa reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk senilai Rp9.879.730.900
 - b) Nomor:5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026, berupa reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk senilai Rp1.795.895.000.
- f. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp196.400.000
- Reklasifikasi Keluar Pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp196.400.000 merupakan tindaklanjut hasil inventarisasi kendaraan, terdapat 1 kendaraan roda empat yang salah pencatatan kode barang semula dicatat sebagai jeep (3020101002) diubah menjadi Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah (3020102003) Nomor: surat keterangan reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar 7/289/UM.03.02/XII/2025 tanggal 04 Desember 2025.
- g. Ditjen Binalavotas sebesar Rp131.350.429.823
- 1) BPVP Bandung Barat
Reklasifikasi Keluar sebesar Rp554.610.100 pada BPVP Bandung Barat berupa 6 unit pompa air dan 2 unit Mobil Latih berdasarkan surat keterangan Nomor:2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025.
 - 2) BVPP Surakarta
Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.131.735.250 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Reklasifikasi keluar sebesar Rp93.000.000 berupa 8 buah kursi besi/metal dan 2 unit mobil latih berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.10/241/UM.01.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - b) Reklasifikasi keluar sebesar Rp3.038.735.250 berupa 2 unit mesin diesel, 3 unit pick up, 1 unit metal locator, 4 unit minibus, 4 unit sepeda motor, dan 7 unit *station wagon* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.10/168/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.
 - 3) BPVP Sidoarjo
Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.255.047.640 pada BPVP Sidoarjo berupa 9 unit mobil workshop dan 1 *dummy* Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya berdasarkan surat keterangan Nomor 2.21/4068/UM.03/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025.
 - 4) BPVP Banyuwangi
Reklasifikasi Keluar sebesar Rp747.495.170 pada BPVP Banyuwangi berupa 1 unit *station wagon*, 2 unit minibus, 1 *dummy* pompa lainnya, 1 unit air compresor, 1 unit pan mixer, 6 unit pompa air berdasarkan surat keterangan Nomor:2.22/119/UM.03.02/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025.
 - 5) BPVP Banda Aceh
Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.680.766.018 pada BPVP Aceh dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Keluar berupa 5 Buah *Portable Air Conditioner* (Alat Pendingin berupa dengan nominal sebesar Rp46.000.000 berdasarkan surat keterangan Nomor:2.8/55/UM.03.02/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.
 - b) Reklasifikasi keluar berupa peralatan dan mesin dengan nominal sebesar Rp2.634.766.018 berdasarkan surat keterangan Nomor:2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025.
- 6) BPVP Padang
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.218.614.417 pada BPVP Padang berupa peralatan dan mesin berdasarkan surat keterangan nomor 2.9/87/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.
- 7) BPVP Bantaeng
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.716.940.764 pada BPVP Bantaeng berupa peralatan dan mesin berdasarkan surat keterangan Nomor 2.19/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.
- 8) BPVP Kendari
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.200.258.986 pada BPVP Kendari berupa kendaraan dan mesin berdasarkan surat keterangan Nomor 2.13/2557/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.
- 9) BPVP Ambon
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.752.098.076 pada BPVP Ambon dengan rincian sebagai berikut:
- a) Reklasifikasi Keluar berupa 3 Buah P.C Unit berupa P.C Unit sebesar Rp60.690.000 menjadi Laptop, 3 Unit Sepeda Motor berupa Sepeda Motor dengan nominal sebesar Rp80.500.000 menjadi Alat Peraga Pelatihan Lainnya berdasarkan SK No. 2.15/136/UM.03.01/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.
 - b) Reklasifikasi Keluar berupa dan 1 Buah Lemari Besi/Metal berupa Lemari Besi/Metal sebesar Rp4.580.000 menjadi Kursi Besi/Metal berdasarkan BA TKTU No. 2.15/691/UM.03.01/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
 - c) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.606.328.076 berupa kendaraan dan mesin berdasarkan surat keterangan Nomor 2.15/182/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.
- 10) BPVP Lombok Timur
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp770.436.600 pada BPVP Lombok Timur berupa kendaraan dan mesin berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.18/486/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.
- 11) BPVP Pangkep
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp540.883.000 pada BPVP Pangkep berupa 1 unit station wagon, 2 unit sepeda motor, dan 1 unit pompa air berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.23/5626/UM.03.02/2025 tanggal 9 Desember 2025.

12) BPVP Belitung

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.034.333.250 pada BPVP Belitung dengan rincian sebagai berikut :

- a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp586.955.750 berupa 1 unit pick up, 1 unit mini bus, 3 *dummy* kendaraan dinas bermotor perorangan, 1 unit station wagon, dan 1 *dummy* kendaraan bermotor penumpang lain berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.24/119/UM.03.02/XI/2025 tanggal 27 November 2025.
- b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp447.377.500 berupa 10 *dummy* peralatan selam lainnya, 18 unit *dive lights*, dan 23 unit *bouyancy compensator device* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

13) BBPVP Serang

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp15.242.166.054 pada BBPVP Serang dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Keluar berupa 2 Unit Sepeda Motor dengan nominal sebesar Rp39,346,560 berdasarkan Surat keterangan kepala bbpvp serang nomor: 2.3/177/um.03.00/vi/2025 tanggal 2 juni 2025 dan 35 *dummy* peralatan Komputer Lainnya dengan nominal sebesar R13.771.568.885 berupa Software Komputer berdasarkan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor: 2.3/174/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.
- b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.431.250.609 berupa peralatan dan mesin berdasarkan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

14) Ditjen Binalavotas

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.347.882.113 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2/4255/UM.03.04/XI/2025 Tanggal 28 November 2025.

15) BBPVP Medan

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.018.228.120 pada BBPVP Medan berupa kednaraan bermotor dan perlatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.2/338/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

16) BPVP Samarinda

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp9.802.077.899 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.11/ 0086 /UM.03.04/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 berupa lemari besi dan Surat Keterangan Nomor:2.11/ 0265A /UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa pompa air, mini bus, sepeda motor, traktor, kapal *passenger*, mobil latih, dan peralatan bengkel.

17) Sekretariat BNSP

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.081.393.300 pada Sekretariat BNSP dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi keluar sebesar Rp129.184.000 berupa 5 buah shredder sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/14/UM.03.02/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.

- b) Reklasifikasi keluar sebesar Rp61.363.000 berupa 1 buah *zoom lens*, 1 buah *digital camera*, dan 1 buah kamera digital sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/15/UM.03.02/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
- c) Reklasifikasi keluar sebesar Rp9.295.000 berupa 1 buah tv monitor dan 1 buah flashlight stroboscope sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/16/UM.03.02/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
- d) Reklasifikasi keluar sebesar Rp100.000.000 berupa 3 buah ac sentral sesuai dengan Surat Keterangan nomor 2.1/17/UM.03.02/VII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- e) Reklasifikasi keluar sebesar Rp1.781.551.300 berupa 4 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/18/UM.03.02/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan Nomor 2.1/34/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

18) BBPVP Bandung

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.133.586.727 pada BBPVP Bandung berupa 8 unit service car, 1 *dummy* alat pengangkat, 2 unit station wagon, 1 unit air compresor, 1 unit jack, 5 unit sepeda motor, dan 1 unit dynamo electric sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.5/10029/UM.03.02/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

19) BBPVP Bekasi

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.999.543.683 berupa *Dispenser*, *Jeep* dan Mini Bus, Alat Simulator Pendidikan dan Peralatan Bengkel sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.4/203/UM.03.02/XI/2025 tanggal 28 November 2025.

20) BPVP Sorong

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.360.524.882 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

21) BPVP Ternate

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.497.586.846 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga lainnya, alat peraga pelatihan lainnya dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.14/384 /UM.03.00/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

22) BBPVP Semarang

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.351.967.469 pada BBPVP Semarang dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp460.960.000 berupa 12 buah CPU, 8 buah PC, dan 3 buah PC. Unit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/447/KU.07.04/IX/2025 Tanggal 3 September 2025.
- b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.891.277.469 berupa 8 unit sepeda motor, 2 unit mobil *workshop*, 1 unit mini bus, 3 unit mobil latih, 1 unit *speed boat*, dan 3 unit pompa air sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/949/UM.03.02/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025.

23) BBPVP Makassar

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.765.076.150 pada BBPVP Makassar berupa Tandu, Mobil *Workshop*, Alat Rumah Tangga dan Alat Peraga Pelatihan Lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025

24) Direktorat Bina Kelembagaan PelatihanVokasi

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp64.147.177.309 pada Dit. Lemlatvok berupa kendaraan dan peralatan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/114/LP.01/XII/2025 tanggal 14 Desember 2025.

5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp100.706.169.183

Tabel 241 Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	9.003.000
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	12.249.433.632
	626011	Pusat Pasar Kerja	31.662.593
Sekretariat Jenderal			12.290.099.225
026.08	350081	Balai K3 Medan	22.399.733
	651870	Ditjen binwasnaker dan K3	94.388.900
Ditjen Binwasnaker dan K3			116.788.633
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	11.484.682
Barenbang Ketenagakerjaan			11.484.682
026.13	065106	BPVP Banda Aceh	30.400.000
	426531	BBPVP Serang	1.113.055.393
	451026	Ditjen. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	1.872.293.650
	452558	BBPVP Bekasi	12.408.300
	452652	BBPVP Makassar	462.532.600
	626131	Dit. Bina Lemlatvok	84.797.106.700
Ditjen Binalavotas			88.287.796.643
Koreksi Pencatatan			100.706.169.183

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.290.099.225

1. Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp9.003.000

Koreksi Pencatatan pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp9.003.000 berupa *Ascender* yang merupakan hasil koreksi temuan Itjen.

2. Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.249.433.632

Koreksi Pencatatan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.249.433.632 berupa Alat rumah tangga, Alat kantor, meubelair dan lain-lain berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum nomor: 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025; 1/700/UM.03/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025; 1/1121/UM.03/XI/2025 tanggal 26 November 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Koreksi pencatatan ini diakibatkan kesalahan kodefikasi dan kuantitas.

3. Pusat Pasar Kerja sebesar Rp31.662.593

Koreksi Pencatatan pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp31.662.593 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Koreksi pencatatan sebesar Rp5.115.000 berupa *keyboard* menjadi *laptop* berdasarkan Surat keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Nomor 1/2463/UM.01.03/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.
 - b) Koreksi pencatatan sebesar Rp26.547.593 berupa rak kayu menjadi bangunan gedung kantor permanen berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Nomor 1/751/UM.01.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
- b. Ditjen Binwasnaker dan K3
1. Balai K3 Medan sebesar Rp22.399.733
 Koreksi Pencatatan pada Balai K3 Medan senilai Rp22.399.733 merupakan transaksi untuk mengoreksi nilai aset-aset yang merupakan bagian kelengkapan dari aset utama untuk kemudian dilakukan koreksi tambah pada Sabuk Pengaman lainnya (3150204999) NUP 5 dasar dari transaksi ini ialah Surat Keterangan Balai K3 Medan Nomor 5.2/25/UM.03.04/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 berupa perlengkapan *rescure*, tali *kamantel static*, *trawing anchor*, *carabiner kecil*, dan *pulley*.
 2. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp94.388.900
 Koreksi Pencatatan pada Ditjen Binwasnaker senilai Rp94.388.900 merupakan penyesuaian pencatatan aset yang telah dilakukan kapitalisasi ke Mobil Ambulance dan Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya berupa A.C Split dan Generator yang merupakan bagian dari kendaraan tersebut yang sebelumnya tercatat secara terpisah. Dasar koreksi ini ialah Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/30/KU.07.04/II/2026 tanggal 5 Februari 2025 berupa A.C *Split*, *Generator set*, *portable generating*, *pulse generator* (alat ukur *universal*).
- c. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp11.484.682
 Koreksi Pencatatan sebesar Rp11.484.682 merupakan perbaikan atas ketidaktepatan dalam pencatatan Barang Milik Negara (BMN) berupa *Gordyin/Kray* pengadaan tahun 2025 yang pencatatannya digabungkan nilai perolehannya dalam satu kuantitas barang berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan atas Koreksi Catat Aset Nomor: 7/132/UM.03.00/IX/2025 Tanggal 18 September 2025.
- d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp88.287.796.643 terdapat pada:

Tabel 242 Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Ditjen Binalavotas

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	RUPIAH
1	065106	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh	30.400.000
2	426531	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang	1.113.055.393
3	451026	Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1.872.293.650
4	452558	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi	12.408.300
5	452652	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	462.532.600
6	626131	Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	84.797.106.700
JUMLAH			88.287.796.643

1) BPVP Banda Aceh

Koreksi pencatatan pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp30.400.000 merupakan

Hibah masuk pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp.30.400.000 dari *Renewable Energy Skills Development* (RESK) berupa alat peraga lainnya pada Paket Pembelajaran Mikro Hidro Surat Keterangan Nomor 2.8/4304/KU.07/IX/2025 tanggal 19 September 2025. Aset hibah berupa paket pembelajaran *mikro hidro* TA 2025 yang dilakukan akibat kesalahan penggunaan akun sumber dana, yaitu dari Hibah Dalam Negeri (HDN) menjadi Hibah Luar Negeri (HLN) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 Audited serta arahan HAI-DJPb nomor #20260420-WLEGCC.

2) BBPVP Serang

Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.113.055.393 pada BBPVP Serang sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/344/UM.03.00/IX/2025 tanggal 3 September 2025 berupa peralatan komputer lainnya, *microphone cable*, dan kabel UTP.

3) Ditjen Binalavotas

Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.872.293.650 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/4088/UM.03.03/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa peralatan dan mesin.

4) BBPVP Bekasi

Koreksi Pencatatan sebesar Rp12.408.300 pada BBPVP Bekasi berupa 1 buah televisi menjadi 2 NUP sesuai dengan nomor surat keterangan 0001 tanggal 31 Desember 2025.

5) BBPVP Makassar

Koreksi Pencatatan sebesar Rp462.532.600 untuk membatalkan pencatatan aset tetap pada NUP 166 dan 167 (Kode Barang 3030212017). Koreksi ini diperlukan karena barang yang bersumber dari PHLN Maritim tersebut merupakan barang habis pakai yang sudah digunakan dalam pelatihan, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai Peralatan dan Mesin.

6) Dit. Lemlatvok

Koreksi Pencatatan sebesar Rp84.797.106.700 pada Dit. Bina Lemlatvok sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2/ /LP.01/VII/2025 dan Nomor 2/ /LP.01/IX/2025 berupa koreksi pencatatan pengadaan peralatan pelatihan.

6. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp360.628.000

Tabel 243 Mutasi Kurang (Reklasifikasi Keluar) ke Persediaan pada Mutasi Aset Tetap-
Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	651870	Ditjen binwasnaker dan K3	341.000.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			341.000.000
026.13	035636	BBPVP Semarang	1.148.000
	051102	BPVP Banyuwangi	18.480.000
Ditjen Binalavotas			19.628.000
Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan			360.628.000

a. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp341.000.000

Reklasifikasi keluar dari Persediaan sebesar Rp341.000.000 pada satuan kerja Ditjen Binwasnaker dan K3 terjadi akibat kesalahan pencatatan transaksi reklasifikasi berupa Mobil Unit Kesehatan Masyarakat NUP 28 sebagai tindak lanjut ketidaksesuaian kodefikasi hasil inventarisasi aset ber-KIB. Transaksi tersebut seharusnya dicatat sebagai reklasifikasi keluar aset tetap pada aplikasi SAKTI modul Aset Tetap, bukan sebagai reklasifikasi keluar Persediaan, sesuai dengan Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp

1) BPVP Surakarta sebesar Rp1.148.000

Reklasifikasi Keluar ke Persediaan pada BPVP Surakarta sebesar Rp1.148.000 berupa alat dapur lainnya berdasarkan SK Nomor 2.10/212/UM.03.02/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025.

2) BPVP Banyuwangi sebesar Rp18.480.000

Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp18.480.000 pada Satker BPVP Banyuwangi merupakan penyesuaian atas barang Rusak Berat berdasarkan SK Nomor: 2.22/142/UM.03.02/IX/2025 tertanggal 23 September 2025.

7. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp68.804.735.712

Tabel 244 Mutasi Kurang (Penghentian Aset Dari Penggunaan)
pada Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	100.626.000
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	6.377.749.283
	450990	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	757.377.000
	626011	Pusat Pasar Kerja	396.143.104
Sekretariat Jenderal			7.631.895.387
026.04	259322	BBPKK Bandung	1.369.116.793
	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	2.293.828.177
	690633	BPKK Kendari	266.164.157
	690634	BPKK Bekasi	233.484.000
Ditjen Binapenta dan PKK			4.162.593.127
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	2.926.835.572
Ditjen PHI dan Jamsos			2.926.835.572
026.08	350079	Balai K3 Bandung	1.025.359.600
	350081	Balai K3 Medan	252.128.802
	350082	Balai K3 Makassar	958.148.300
	350083	Balai K3 Samarinda	2.619.743.176
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	453.000.000
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	16.100.300.991
Ditjen Binwasnaker dan K3			21.408.680.869
02.11	452677	Barembang Ketenagakerjaan	223.984.000
Barembang Ketenagakerjaan			223.984.000
026.13	050302	BPVP Sidoarjo	2.880.979.774
	051102	BPVP Banyuwangi	495.754.006
	065106	BPVP Banda Aceh	1.393.795.020
	219228	BPVP Ambon	4.793.535.134
	230302	BPVP Lombok timur	1.978.166.404
	451094	BBPVP Medan	10.653.092.865
	452542	BBPVP Bandung	9.487.623.906
	452652	BBPVP Makassar	1.980.000
	626132	Dit. Binalavogan	765.819.648
Ditjen Binalavotas			32.450.746.757
Penghentian Aset Dari Penggunaan			68.804.735.712

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.631.895.387

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp100.626.000

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp100.626.000 terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan berupa Penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 1/504/UM.03.03/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.377.749.283

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.377.749.283 merupakan perubahan kondisi aset yang akan diusulkan penghapusan karena kondisi rusak berat, dan juga akan dilakukan penghibahan. Penghentian aset dari penggunaan ini berdasarkan Surat Keterangan Kepala:

- a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja nomor:1/345/UM.03.00/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025. Peralatan dan mesin tersebut berupa *software computer*;
- b) Biro Umum nomor: 1/807/UM.03/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025; 1/1020/UM.03/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Peralatan dan mesin tersebut berupa kendaraan roda 2 dan 4, peralatan *personal computer*, meja kayu dan lain-lain.

3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp757.377.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan sebesar Rp757.377.000 berupa kendaraan Roda 4 dan AC Split berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan nomor 1/472/UM.03.03/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 dan 1/1979/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

4) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp396.143.104

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp396.143.104 berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Kondisi dan Henti Guna Barang Milik Negara Pusat Pasar Kerja Nomor 1/2082/KU.07/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp4.162.593.127

1) BBPKK Bandung sebesar Rp1.369.116.793

Penghentian asset dari penggunaan pada satker BBPKK Bandung Barat sebesar Rp1.369.116.793 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 3.1/3007/UM.03.03/IX/2025 tanggal 26 September 2025.

Tabel 245 Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin BBPKK Bandung

No	UAKPB	Nama Barang	Jumlah	RUPIAH
1	BBPKK Bandung	Stabilizer/UPS	25	36.250.000
2	BBPKK Bandung	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	7	7.446.845
3	BBPKK Bandung	Telephone Mobile	19	188.151.234
4	BBPKK Bandung	Camera Digital	8	73.053.800
5	BBPKK Bandung	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	4	7.047.000
6	BBPKK Bandung	P.C Unit	48	389.973.009
7	BBPKK Bandung	Note Book	21	234.885.200
8	BBPKK Bandung	Camera Electronic	5	32.737.500
9	BBPKK Bandung	Alat Pembersih Lainnya	2	7.496.134
10	BBPKK Bandung	Lap Top	32	392.076.071
JUMLAH				1.369.116.793

2) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp2.293.828.177

Penghentian aset dari penggunaan Pada satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp2.293.828.177 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan Surat Keterangan Nomor:3/9535/UM.03.03/VI/2024 Tanggal 7 Juni 2024.
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan denga Surat Keterangan Nomor:3/2173/UM.03.03/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan SK Penghapusan Nomor:1/687/UM.03.03/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 berupa Sepeda Motor sebanyak 5 unit senilai Rp76.363.500.
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan Surat Keterangan Nomor:3/4584/UM.03.03/IX/2025 tanggal 22 September 2025.
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan Surat Keteranga Nomor:3/4909/UM.03.03/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 berupa Kendaraan Jeep, 1 unit senilai Rp399.170.000.
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan Surat Keterangan Nomor:3/709/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) BPKK Kendari sebesar Rp266.164.157

- Penghentian aset dari penggunaan pada satker BPKK Kendari sebesar Rp25.950.000 dengan Surat Keterangan Nomor:3.9/696/UM.03/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025 berupa laptop, televisi, kursi *fiber glass*/plastik,kursi besi.
- Penghentian aset dari penggunaan pada satker BPKK Kendari sebesar Rp240.214.157 Surat Keterangan Nomor: 3.9/1007/UM.03/IX/2025 Tanggal 24 September 2025 berupa lemari kayu, lemari katalog, meja kerja besi/metal, meja kerja kayu, kursi kayu, Kasur, partisi, sofa, lemari penyimpanan, laptop, printer, dan *gordyin/kray*.

4) BPKK Bekasi sebesar Rp233.484.000

Penghentian aset dari penggunaan pada satker BPKK Bekasi sebesar Rp233.484.000 berupa 50 buah AC Split dengan Surat Keterangan Nomor 3.8/300/UM.03.03/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

c. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp2.926.835.572

Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp2.926.835.572 dilakukan karena peralatan dan mesin tersebut sudah tidak digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta akan dilakukan pengelolaan BMN lebih lanjut. Transaksi ini merupakan tindak lanjut atas hasil inventarisasi yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor: 4/2320/UM.03.00/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, yang terdiri dari 5.476 unit meja kerja kayu dan 2 unit sepeda motor.

d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp21.408.680.869

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp1.025.359.600

Penghentian aset pada Balai K3 Bandung sebesar Rp1.025.359.600 aset dilakukan setelah dilakukan verifikasi menyatakan bahwa aset dalam kondisi rusak berat, sehingga Aset BMN harus dihentikan dari penggunaannya dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan Usul Henti Guna Kepala Balai K3 Bandung Nomor: 5.3/221/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 berupa:

Tabel 246 Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Bandung

No	Nama Barang	Jumlah	RUPIAH
1	Alat Laboratorium Umum Lainnya	1	229.944.000
2	Alat Sampling Gas Buang	1	153.970.000
3	Dosimeter	1	4.567.000
4	Higt Volume Air Sampler	1	18.700.000
5	Law Volume Dust Sampler (Alat Laboratorium Kl	1	17.600.000
6	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1	45.980.000
Jumlah		6	470.761.000

- b) Surat Keterangan Usul Henti Guna Kepala Balai K3 Bandung Nomor 5.3/325/UM.03,03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp554.598.600

Tabel 247 Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Bandung

No	Nama Barang	Jumlah	RUPIAH
1	Alat Laboratorium Umum Lainnya	1	60.060.000
2	Alat Ukur	1	475.000
3	Gas Sampler	1	82.500.000
4	Microscope Binoculair	1	56.100.000
5	Noise Dosimeter	1	111.161.600
6	Portable CO Analyzer	1	2.132.000
7	Tensimeter	3	1.820.000
8	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1	240.350.000
Jumlah		10	554.598.600

2) Balai K3 Medan sebesar Rp252.128.802

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan pada Satker Balai K3 Medan sebesar Rp252.128.802 berupa alat laboratorium dan Meja kursi kantor dikarenakan pada saat ini kondisi Rusak Berat dan akan dilakukan Pelelangan, sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Kondisi Barang Nomor 5.2/26/UM.03.04/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248 Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Medan

No	Nama Barang	Jumlah	RUPIAH
1	Data Logger (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	1	36.100.000
2	Facsimile	1	5.000.000
3	Ion Meter	1	23.650.000
4	Kursi Besi/Metal	21	15.735.250
5	Lainnya (Alat Laboratorium Kesehatan Kerja)	1	3.300.000
6	Lap Top	2	24.750.000
7	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan	1	10.000.000
8	Meja Kerja Kayu	11	17.523.552
9	Snellen Chard	1	22.000.000
10	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, C	1	49.500.000
11	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	1	14.520.000
12	Universal Air Sampling Pump	1	7.700.000
13	Vacum Pump	1	22.350.000
	Jumlah	44	252.128.802

3) Balai K3 Makassar sebesar Rp958.148.300

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan pada Satker Balai K3 Makassar sebesar Rp958.148.300 sesuai dengan Surat Kepala Balai K3 Makassar Nomor: 5.1/046/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa:

Tabel 249 Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai K3 Makassar

Kode Baramg	Nama Barang	Jumlah	RUPIAH
3070106006	Audiometer (Alat Kedokteran Tht)	2	132.260.700
3080601007	Water Quality Analyzer System	1	210.375.000
3080202999	Instrument Probe/Sensor Lainnya	1	75.570.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	38	39.945.000
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	430.870.000
3080110025	Combustion Tester	1	60.517.600
3050201008	Meja Rapat	4	3.660.000
3080155009	Hb. Meter	1	4.950.000
	Jumlah	49	958.148.300

4) Balai K3 Samarinda sebesar Rp2.619.743.176

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan pada Satker Balai K3 Samarinda sebesar Rp2.619.743.176 merupakan transaksi yang dilakukan pencatatan henti guna aset kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi satker Balai K3 Samarinda sesuai dengan surat keterangan no 5.4/009/UM.03.04/II/2026 tgl 13 Februari 2026.

5) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp453.000.000

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan pada Satker Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp453.000.000. Penghentian aset ini dilakukan setelah dilakukan verifikasi menyatakan bahwa aset dalam kondisi rusak berat, sehingga Aset BMN harus dihentikan dari penggunaannya, sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN No. 5.5/202/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa *truck carane* senilai Rp358.000.000 dan *forlift* senilai Rp95.000.000.

6) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp16.100.300.991

Penghentian Aset Dari Penggunaan pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp16.100.300.991 akibat dari Transaksi Penghentian ini dilakukan sebagai administrasi pengelolaan aset BMN berdasarkan:

- a) Surat Keterangan perbaikan pencatatan Kuasa Pengguna Barang Nomor: 5/1/UM.03.00/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 senilai Rp497.159.520. Transaksi ini dilakukan dikarenakan akan dilakukannya usulan penghapusan aset BMN yang berada di Disnakertrans Kalimantan Barat berupa:

Tabel 250 Penghentian Aset Pada Peralatan Mesin Balai 3 Makassar

Nama Barang	Jumlah	RUPIAH
Baju Tahan Api	1	15.019.400
Proteksi Lingkungan Lainnya	1	82.874.000
<i>Thermal Imaging Camera</i>	2	273.646.120
<i>Tool Electrical Set</i>	1	125.620.000
Jumlah	5	497.159.520

- b) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang atas Pencatatan Aplikasi SAKTI Nomor: 5/82/KU.07.04/IX/2025 tanggal 24 September 2025. Transaksi senilai Rp382.030.000 merupakan transaksi dikarenakan penyesuaian administrasi atas Surat Keputusan Penghapusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 1/325/UM.03.03/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 (lelang BMN hasil penarikan wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat) berupa alat proteksi radiasi senilai Rp262.900.000 dan *Earth /Ground Tester* senilai Rp119.130.000.
- c) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang atas Pencatatan Aplikasi SAKTI Nomor: 5/88/KU.07.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 senilai Rp46.420.000. Penghentian Aset ini dilakukan karena penyesuaian administrasi pencatatan atas Surat Keputusan Penghapusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-1/155/UM.03.03/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 (Penghapusan BMN di Jambi) berupa anemometer senilai Rp7.480.000 dan *Infrared Thermometer* senilai Rp38.940.000.
- d) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor: 5/122/KU.07.04/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025. Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 senilai Rp25.320.000. Merupakan penghentian aset berupa 1 (satu unit Mini Bus) dikarenakan bus ini sudah tidak digunakan sebagai pendukung tugas dan fungsi Ditjen Binwasnaker dan K3. Bus saat ini berlokasi di Balai K3 Yogyakarta yang direncanakan akan dilakukan penghapusan melalui lelang.
- e) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/16/KU.07.04/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 senilai Rp6.300.688.025. Transaksi ini dilakukan karena alat senilai Rp610.955.000 mengalami rusak berat dan aset senilai Rp5.689.733.025 berada di luar Ditjen Binwasnaker dan K3 sehingga pemanfaatannya digunakan oleh satker diluar kementerian dan harus dilakukan penghentian aset dari penggunaan.

- f) Surat Keterangan 5/15/KU.07.04/I/2026 tanggal 25 Januari 2026 senilai Rp18.515.000 berupa alat pemadam kebakaran NUP 43 senilai Rp3.500.000 dan infrared thermometer NUP 8 senilai Rp15.015.000. Transaksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/490/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 (penghapusan Gudang Bekasi).
 - g) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/30/KU.07.04/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 senilai Rp2.123.047.200. Transaksi dilakukan untuk persiapan penghapusan aset BMN berupa kendaraan URC melalui lelang yang berada di kantor BBPVP Medan.
 - h) Surat keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/35/KU.07.04/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 senilai Rp6.232.640.100, merupakan penyesuaian dari transaksi tindak lanjut hasil inventarisasi aset BMN ber KIB.
 - i) Surat keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 senilai Rp341.000.000 berupa Mobil Ambulance NUP 2 milik anak satker Ditjen Binwasnaker dan K3 (002).
 - j) Surat keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/33/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 senilai Rp133.481.146.
- e. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp223.984.000
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp223.984.000 merupakan penghentian aset dari penggunaan sebanyak 16 unit UPS dikarenakan perubahan kondisi barang tersebut dari baik menjadi rusak berat sehingga dihentikan status penggunaan barang. Nomor surat keterangan perubahan kondisi dan penghentian aset dari penggunaan 7/748/UM.03.00/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
- f. Ditjen Binalavotas sebesar Rp32.450.746.757 terdapat pada:
- 1) BPVP Sidoarjo
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp2.880.979.774 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.21/1375/UM.03.03/VII/2025 berupa penghentian aset berupa lemari besi, peralatan mesin yang ada di *workshop*, peralatan bengkel kayu dan lain-lain.
- 2) BPVP Banyuwangi
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp495.754.006 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.22/142/UM.03.02/IX/2025 tanggal 23 September 2025 berupa penghentian aset berupa peralatan dan mesin.
- 3) BPVP Aceh
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp1.393.795.020 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.8/5525/UM.03.03/VII/2024 tanggal 20 Nopember 2024 berupa peralatan mesin bengkel.
- 4) BPVP Ambon
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp4.793.535.134, sesuai Surat SK Menaker No. 1/619/UM.03.03/XI/2024 tanggal 2 Juli 2024 berupa Sepeda Motor dan Peralatan mesin Lainnya.

5) BPVP Lombok Timur

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp1.978.166.404, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.18/138/UM.03.02/IV/2025 tanggal 12 Oktober 2020 berupa alat peraga *Kitchen*.

6) BBPVP Medan

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp10.653.092.865, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 1/526/UM.03.03/X/2020 tanggal 24 April 2025 berupa *wheel crane, wheel tractor, grader dan wheel loader*.

7) BBPVP Bandung

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp9.487.623.906 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-1/371/UM.03.03/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 berupa penghentian aset peralatan dan mesin.

8) BBPVP Makassar

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp1.980.000, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025 berupa *Yamaha Force Bebek*.

9) Dit. Bina Pemagangan

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp765.819.648, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-1/545/UM.03.03/VIII/2025I tanggal 28 Agustus 2025 berupa Lemari Kayu, Alat Pembersih Lainnya, dan Gambar Presiden/Wakil Presiden.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp3.785.415.290.937

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.785.415.290.937 dan Rp3.762.417.550.990.

Rincian Nilai Gedung dan Bangunan Kemnaker pada masing-masing Unit Eselon I terdapat pada tabel berikut:

Tabel 251 Rincian Gedung dan Bangunan Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	737.223.994.800	746.695.950.413	(9.471.955.613)	(1,27)
Ditjen Binapenta & PKK	105.358.045.678	104.826.750.678	531.295.000	0,51
Ditjen Binwasnaker & K3	170.691.485.920	128.383.511.703	42.307.974.217	32,95
Ditjen Binalavotas	2.772.141.764.539	2.782.341.594.196	(10.199.829.657)	(0,37)
Gedung dan Bangunan	3.785.415.290.937	3.762.247.806.990	23.167.483.947	0,62

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 252 Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	Rp	3.762.417.550.990
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	6.754.266.747
Pembelian	Rp	189.312.987
Transfer Masuk	Rp	10.418.646.977
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	220.575.403.717
Reklasifikasi Masuk	Rp	1.271.250.779.666
Perolehan Lainnya	Rp	77.900.796.623
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	694.481.601
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	57.440.398.079
Pengembangan Melalui KDP	Rp	44.998.838.385
Koreksi Susulan	Rp	30.132.052.821
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	925.138.500
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(148.914.693.970)
Transfer Keluar	Rp	(10.418.646.977)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(1.278.871.417.908)
Koreksi Pencatatan	Rp	(257.206.954.021)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(2.870.663.280)
Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025	Rp	3.785.415.290.937
Akumulasi Penyusutan	Rp	(778.923.848.542)
Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	Rp	3.006.491.442.395

Mutasi Tambah:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp6.754.266.747

Tabel 253 Koreksi Saldo Awal - Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	499.798.000
Sekretariat Jenderal			499.798.000
026.13	035636	BPVP Surakarta	126.711.822
	050302	BPVP Sidoarjo	173.278.499
	230302	BPVP Lombok Timur	110.500.000
	451108	BPVP Samarinda	5.684.895.446
	452533	Sekretariat BNSP	159.082.980
Ditjen Binalavotas			6.254.468.747
Koreksi Saldo Awal			6.754.266.747

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp499.798.000

Saldo awal sebesar Rp499.798.000 terdapat pada satker Politeknik Ketenagakerjaan atas aset yang belum dibukukan pada tahun 2022. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1/3917/UM.03.02/XII/2025, nilai tersebut mencakup reklasifikasi hasil inventarisasi BMN berupa 1-unit Bangunan Olahraga Terbuka dan 2-unit Gedung Pos Jaga.

- b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp6.254.468.747

- 1) BPVP Surakarta sebesar Rp126.711.822

Saldo awal sebesar Rp126.711.822 berupa Gedung Pos Jaga Permanen

(Gedung Pos Satpam Kerten) sebanyak 1-unit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.10/T.03.B03/UM.02/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

2) BPVP Sidoarjo sebesar Rp173.278.499

Saldo awal sebesar Rp173.278.499 berupa Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Jaga Pantau dan Pos Jaga II) sebanyak 2-unit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.21/4077/UM.03/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025.

3) BPVP Lombok Timur Rp110.500.000

Saldo awal sebesar Rp110.500.000 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan (bangunan Green House Melon) sebanyak 1-unit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.18/528/UM.03.02/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.

4) BPVP Samarinda sebesar Rp5.684.895.446

Saldo awal sebesar Rp5.684.895.446 berupa Bangunan Kantin sebanyak 2-unit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.11/0298/UM.03.04/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

5) Sekretariat BNSP sebesar Rp159.082.980

Saldo awal sebesar Rp159.082.980 berupa Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 2-unit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/12/UM.03.02/II/2026 tanggal 02 Februari 2026.

2. Pembelian sebesar Rp189.312.987

Tabel 254 Pembelian - Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	142.137.987
Sekretariat Jenderal			142.137.987
026.13	451026	Satker Ditjen Binalavotas	47.175.000
Ditjen Binalavotas			47.175.000
Pembelian			189.312.987

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp142.137.987

Pembelian sebesar Rp142.137.987 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (Biro Umum) berupa Bangunan Rumah *Genset*.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp47.175.000

Pembelian pada Ditjen Binaavotas sebesar Rp47.175.000 terdapat pada satker Ditjen Binalavotas berupa *Standing Sign* Gedung Vokasi.

3. Transfer Masuk sebesar Rp10.418.646.977

Transfer Masuk pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp10.418.646.977 dari Biro Umum Sekretariat Jenderal atas aset berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sesuai Surat Keterangan Nomor 1/561/UM.03.01/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.

4. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp220.575.403.717

Tabel 255 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	350083	Balai K3 Samarinda	4.865.303.800
Ditjen Binwasnaker dan K3			4.865.303.800
026.13	051102	BPVP Banyuwangi	187.314.790.769
	065106	BPVP Banda Aceh	4.391.082.244
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	24.004.226.904
Ditjen Binalavotas			215.710.099.917
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP			220.575.403.717

a. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp4.865.303.80

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp4.865.303.800 merupakan pendefinitifan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang dibangun melalui KDP Tahun Anggaran 2024. Total nilai kontrak pembangunan Gedung Laboratorium K3 adalah sebesar Rp34.979.668.917. Namun, dikarenakan pencatatan KDP terbagi ke dalam dua NUP, maka proses definitif aset dilakukan melalui dua transaksi, yaitu:

- 1) Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp4.865.303.800 (NUP 6).
- 2) Pengembangan dengan KDP senilai Rp30.114.365.117 (NUP 7).

Transaksi ini didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyelesaian Pekerjaan 100% dari pihak konsultan pengawas sebagai berikut:

- 1) PT. Ganesha Pratama Consultant, Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025 hal Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3.
- 2) CV. Jf Karya Persada, Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025 hal Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp215.710.099.917

- 1) BPVP Banyuwangi sebesar Rp187.314.790.769

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada BPVP Banyuwangi sebesar Rp187.314.790.769 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor SP.22/04/UM.01.04/VII/2022 tanggal 28 November 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.

- 2) BPVP Banda Aceh sebesar Rp4.391.082.244

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp4.391.082.244 sesuai dengan Surat Keterangan 2.8/665/UM.02.01/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen.

- 3) Direktorat Bina Bina Lemlatvok sebesar Rp24.004.226.904

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada Bina Lemlatvok sebesar Rp24.004.226.904 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3226/LP.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan Dan Gedung Pos Jaga Permanen.

5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.271.250.779.666

Tabel 256 Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	25.563.482.383
	450938	Sekretariat Jenderal	5.117.478.424
Sekretariat Jenderal			30.680.960.807
026.04	259322	BBPKK Bandung	19.029.301.556
	690633	BPKK Kendari	1.423.718.100
	690634	BPKK Bekasi	417.781.000
Ditjen Binapenta dan PKK			20.870.800.656
026.08	350083	Balai K3 Samarinda	86.940.536.050
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	22.831.879.246
Ditjen Binwasnaker dan K3			109.772.415.296
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	22.858.018.158
	035636	BPVP Surakarta	95.955.004.328
	050302	BPVP Sidoarjo	27.097.261.882
	051102	BPVP Banyuwangi	4.827.757.678
	065106	BPVP Banda Aceh	31.652.775.743
	089378	BPVP Padang	51.082.460.262
	191206	BPVP Bantaeng	4.362.933.052
	209255	BPVP Kendari	31.461.767.486
	219228	BPVP Ambon	58.096.036.393
	230302	BPVP Lombok Timur	25.386.694.508
	352630	BPVP Pangkep	21.365.461.850
	352631	BPVP Belitung	4.561.946.162
	426531	BBPVP Serang	91.743.543.619
	451026	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	584.888.640
	451094	BBPVP Medan	116.954.479.834
	451108	BPVP Samarinda	45.903.622.480
	452542	BBPVP Bandung	53.316.527.905
	452558	BBPVP Bekasi	20.467.510.273
	452589	BPVP Sorong	21.190.085.903
	452595	BPVP Ternate	142.820.755.800
	452609	BBPVP Semarang	70.149.120.156
	452652	BBPVP Makassar	91.148.251.781
	626131	Direktorat Binalematvok	54.384.253.155
	626132	Direktorat Binalavogon	22.555.445.859
Ditjen Binalavotas			1.109.926.602.907
Reklasifikasi Masuk			1.271.250.779.666

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp30.680.960.807

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp25.563.482.383

Reklasifikasi Masuk pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp25.563.482.383 merupakan pengerjaan renovasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 257 Reklasifikasi Masuk Gedung Bangunan

Pada Politeknik Ketenagakerjaan

No	Semula	Menjadi	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	Bangunan Laboratorium Permanen	8.901.404.137
2	Asrama Permanen	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	14.074.198.061
3	Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2.429.277.835
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gedung instalasi lainnya	158.602.350
Jumlah			25.563.482.383

2) Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.117.478.424

Reklasifikasi Masuk pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.117.478.424 pada Biro Umum yang semula dicatat sebagai Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen dan Bangunan Gudang Tertutup Permaen menjadi Bangunan Gedung Arsip Permanen berdasarkan Surat Keterangan

Kepala Biro Umum Nomor 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp20.870.800.656

1) BBPKK Bandung sebesar Rp19.029.301.556

Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp 19.029.301.556 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Kode Barang Milik Negara Nomor 3.1/5226/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 258 Reklasifikasi Masuk Gedung Bangunan
Pada BBPKK Bandung

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	10.207.509.377
Bangunan Gazebo	1	70.549.000
Bangunan Terbuka Lainnya	1	196.318.000
Bangunan Lainnya	1	174.827.027
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5	1.286.625.178
Bangunan Kesehatan Lainnya	1	337.804.274
Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	440.842.000
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	3	189.974.000
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	14	6.124.852.700
Jumlah		19.029.301.556

2) BPKK Kendari sebesar Rp1.423.718.100

Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan pada BPKK Kendari sebesar Rp1.423.718.100. Gedung beralih fungsi dari Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen sesuai Surat Keterangan Pencatatan BMN Nomor 3.9/1341/UM.03/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

3) BPKK Bekasi sebesar Rp417.781.000

Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan pada BPKK Bekasi sebesar Rp417.781.000 sesuai Surat Pernyataan Reklasifikasi Kode Barang Milik Negara Nomor 3.8/733/UM.03/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 berupa Bangunan Parkir Terbuka Permanen dan Bangunan Gedung Instalasi Lainnya yang semula dicatat sebagai Bangunan Tempat Parkir dan Bangunan Rumah Genset.

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp109.772.415.296

1) Balai K3 Samarinda sebesar Rp86.940.536.050

Reklasifikasi masuk pada Balai K3 Samarinda Rp86.940.536.050 merupakan transaksi untuk memperbaiki kode barang atas NUP Bangunan Gedung Kantor Laboratorium Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen sesuai dengan Surat Keterangan Plt. Kepala Balai K3 Samarinda Nomor 5.4/154a/UM.03.04/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

2) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp22.831.879.246

Reklasifikasi masuk pada Balai Besar K3 Jakarta Rp22.831.879.246 merupakan transaksi yang dilakukan sebagai tindak lanjut inventarisasi aset ber KIB program Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak sesuai kodefikasi .atas gedung dan bangunan semula tercatat sebagai Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5 dan NUP 1 masing - masing senilai Rp19.983.357.246 dan Rp2.848.522.000 menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan NUP 1

dan NUP 2 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Jakarta Nomor 5.5/203/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.109.926.602.907

- 1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp22.858.018.158 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Taman Lainnya, Gedung Pos Jaga Permanen, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Terbuka Lainnya, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, dan Taman Permanen.
- 2) BPVP Surakarta sebesar Rp95.955.004.328 Nomor 2.10/168/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 terdiri dari:
 - a) Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen yang semula dicatat sebagai Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen senilai Rp249.112.000.
 - b) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan yang semula dicatat sebagai Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen senilai Rp95.705.892.328.
- 3) BPVP Sidoarjo sebesar Rp27.097.261.882 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.21/4077/UM.03/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 dan Surat Nomor 2.21/4068/UM.03/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, dan Asrama Permanen.
- 4) BPVP Banyuwangi sebesar Rp4.827.757.678 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.22/174/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Surat Nomor 2.22/126/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Instalasi Lainnya, dan Bangunan Lainnya.
- 5) BPVP Banda Aceh sebesar Rp31.652.775.743 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Rumah Genset, Bangunan Parkir Tertutup Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen, Pagar Permanen, Taman Permanen, Bangunan Kantin, dan Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.
- 6) BPVP Padang sebesar Rp51.082.460.262 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.9/87/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 terdiri dari:

a)	Bangunan Rumah Genset
b)	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
c)	Bangunan Parkir Terbuka Permanen
d)	Gapura
e)	Taman Permanen
f)	Bangunan Gudang Lainnya
g)	Gedung Pos Jaga Permanen
h)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
i)	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
j)	Bangunan Kantin
k)	Bangunan Gudang Tertutup Permanen
l)	Bangunan Gedung Arsip Permanen
m)	Bangunan Gedung Kantor Lainnya
n)	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
o)	Gedung Garasi/Pool Permanen
p)	Bangunan Gedung Kantor Permanen

- 7) BPVP Bantaeng sebesar Rp4.362.933.052 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.19/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen, dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya.
- 8) BPVP Kendari sebesar Rp31.461.767.486 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.13/2557/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen, Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gedung Kantor Lainnya, dan Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen.
- 9) BPVP Ambon sebesar Rp58.096.036.393 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.15/182/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen, dan Selasar.
- 10) BPVP Lombok Timur sebesar Rp25.386.694.508 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.23/5626/UM.03.02/2025 tanggal 09 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Lainnya, Pagar Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen, Bangunan Rumah Genset, Bangunan Parkir Tertutup Permanen, dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya serta Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen.
- 11) BPVP Pangkep sebesar Rp21.365.461.850 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gedung Instalasi Lainnya, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen.
- 12) BPVP Belitung sebesar Rp4.561.946.162 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 terdiri dari Gedung Pos Jaga Permanen dan Gedung Kantor Permanen yang semula tercatat sebagai Bangunan Gedung Kantor Lainnya dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen.
- 13) BBPVP Serang sebesar Rp91.743.543.619 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Kantin, Gedung Olah Raga Tertutup Permanen, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.
- 14) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp584.888.640 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/4255/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 terdiri dari Bangunan Kantin dan Gedung Pos Jaga Permanen.
- 15) BBPVP Medan sebesar Rp116.954.479.834 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.2/338/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, dan Bangunan Gudang Tertutup Permanen.
- 16) BPVP Samarinda sebesar Rp45.903.622.480 sesuai dengan Surat Keterangan Surat Nomor 2.11/0266A/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 dan

Surat Nomor 2.11/0299/UM.03.04/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Terbuka Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Kanopi, Bangunan Rumah Genset, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

- 17) BBPVP Bandung sebesar Rp53.316.527.905 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.5/10029/UM.03.02/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, dan Bangunan Gedung Arsip Permanen.
- 18) BBPVP Bekasi sebesar Rp20.467.510.273 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.4/203/UM.03.02/XI/2025 tanggal 28 November 2025 terdiri dari Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Bangunan Lainnya, Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, dan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen.
- 19) BPVP Sorong sebesar Rp21.190.085.903 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Rumah Genset, Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Kantin, dan Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.
- 20) BPVP Ternate sebesar Rp142.820.755.800 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.14/384/UM.03.00/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Taman Permanen, Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, Bangunan Rumah Genset, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Bangunan Terbuka Lainnya.
- 21) BBPVP Semarang sebesar Rp70.149.120.156 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/949/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 dan Surat Nomor 2.6/989/UM.03.02/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 BBPVP Makassar sebesar Rp54.384.253.155 terdiri dari Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Rumah Genset, Selasar, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen.
- 22) Ditjen Bina Lemlatvok sebesar Rp22.555.445.859 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025 terdiri dari:

a)	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen
b)	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
c)	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
d)	Taman Permanen
e)	Pagar Permanen
f)	Bangunan Rumah Genset
g)	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
h)	Pagar Permanen
i)	Asrama Permanen
j)	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen
k)	Gedung Pos Jaga Semi Permanen
l)	Bangunan Gudang Tertutup Permanen
m)	Gedung Garasi/Pool Permanen
n)	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
o)	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen
p)	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen
q)	Bangunan Parkir Terbuka Permanen
r)	Selasar
s)	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
t)	Bangunan Gedung Kantor Lainnya

23) Dit. Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan sebesar Rp22.555.445.859 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/29/UM.03.02/XII/2030 tanggal 8 Desember 2025 terdiri dari Bangunan Gedung Instalasi Lainnya dan Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.

6. Perolehan Lainnya sebesar Rp77.900.796.623

Tabel 259 Perolehan lainnya Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	2.232.933.685
	035636	BPVP Surakarta	71.871.744
	426531	BPVP Serang	168.048.450
	452652	BBPVP Makassar	75.427.942.744
Ditjen Binalavotas			77.900.796.623
Perolehan lainnya			77.900.796.623

Perolehan Lainnya sebesar Rp77.900.796.623 pada Ditjen Binalavotas terdiri dari:

a. BPVP Bandung Barat

Perolehan Lainnya sebesar Rp2.232.933.685 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, Bangunan Terbuka Lainnya, dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.

b. BPVP Surakarta

Perolehan Lainnya sebesar Rp71.871.744 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.10/PL.05.SPK.01/UM.02/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025 berupa Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Satpam belakang).

c. BBPVP Serang

Perolehan Lainnya sebesar Rp168.048.450 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor: 2.3/600/UM.03.00/XI/2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan.

b. BBPVP Makassar

Perolehan Lainnya sebesar Rp75.427.942.744 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/103/UM.03.06/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025 berupa Koreksi pencatatan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 11.

7. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp694.481.601

Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp694.481.601 terdapat pada satker Politeknik Ketengakerjaan berupa pengerjaan renovasi Gedung Pendidikan Dan Latihan dan pengerjaan pemasangan *paving block* di area Gedung Asrama Permanen (Gedung Pendidikan Dan Latihan).

8. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp57.440.398.079

Tabel 260 Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	123.762.099
Sekretariat Jenderal			123.762.099
026.08	350081	Balai K3 Medan	199.944.000
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	161.718.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			361.662.000
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	219.857.219
	035636	BPVP Surakarta	2.036.391.918
	051102	BPVP Banyuwangi	8.725.365.493
	089378	BPVP Padang	127.221.000
	191206	BPVP Bantaeng	176.626.028
	352631	BPVP Belitung	103.204
	426531	BBPVP Serang	668.105.983
	451026	Ditjen Binalavotas	47.175.000
	451108	BPVP Samarinda	1.309.836.871
	452542	BBPVP Bandung	293.640.213
	452589	BPVP Sorong	6.427.889.540
	452652	BBPVP Makassar	30.640.880.200
	626131	Direktorat Binalematvok	6.281.881.311
Ditjen Binalavotas			56.954.973.980
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah			57.440.398.079

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp123.762.099

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Sekretariat Jenderal terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan terdiri dari:

- 1) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan sebesar Rp121.551.185.
- 2) Bangunan Gedung Laboratorium Permanen sebesar Rp2.210.914.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp361.662.000

1) Balai K3 Medan sebesar Rp199.944.000

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Balai K3 Medan sebesar Rp199.944.000 dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset Gudang Tertutup (NUP 1), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian nilai pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (NUP 1). Transaksi ini didasarkan pada Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/24/UM.03.04/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

2) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp161.718.000

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp161.718.000 merupakan transaksi sebagai tindaklanjut hasil inventarisasi

BMN aset ber KIB program kementerian ketenagakerjaan. Setelah dilakukan inventarisasi tim menyatakan bahwa Bangunan Gudang Lainnya NUP 1 merupakan bagian gedung yang tidak dapat dipisahkan dari Gedung NUP sehingga dilakukan koreksi pencatatan atas Bangunan Gudang NUP 1 dan ditindaklanjuti dengan koreksi bertambah senilai Rp161.718.000 pada Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan NUP 1 transaksi ini sesuai dengan Surat Keterangan Plt. Kepala Balai K3 Jakarta Nomor 5.5/205/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp40.723.257.564

1) BPVP Bandung Barat

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Bandung Barat sebesar Rp219.857.219 pada Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:

- a) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp179.782.938 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan;
- b) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar sebesar Rp53.274.281 berupa pencatatan kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pemeliharaan Penggantian Atap Kaca Green House yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (NUP 17) berdasarkan SPK No. 2.17/35/PPK/UM.02/III/2025 tgl. 14 Maret 2025.

2) BPVP Surakarta

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Surakarta sebesar Rp2.036.391.918 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.10/214/UM.03.02/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

3) BPVP Banyuwangi

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Banyuwangi sebesar Rp8.725.365.493 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.22/107/UM.03.00/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 berupa Gedung Serbaguna, Workshop, Gedung Kantor Utama, Taman, Area Parkir Siswa, dan Gapura.

4) BPVP Padang

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Padang sebesar Rp127.221.000 terdiri dari:

- a) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp57.553.000 atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (NUP 17) berdasarkan SPK Nomor SPK.2.9/3286/KU.02.01/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 oleh CV Puti Rasani.
- b) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp69.668.000 atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (NUP 17) berdasarkan SPK Nomor SPK.2.9/3286/KU.02.01/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 oleh CV Puti Rasani.

5) BPVP Bantaeng

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Bantaeng sebesar Rp176.626.028 terdiri dari:

- a) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp133.300.508 merupakan koreksi kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa pemeliharaan perbaikan tembok pagar kantor.
- b) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp30.192.000 merupakan koreksi atas kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kantor, gedung asrama, kios 3in1, *workshop*, dan gedung olahraga sesuai SPK Nomor 010/BPVP-BNTG/V/2025.
- c) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp13.133.520 merupakan koreksi atas kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kantor, gedung asrama, kios 3in1, *workshop*, dan gedung olahraga sesuai SPK Nomor 010/BPVP-BNTG/V/2025 untuk pekerjaan pemasangan dan perbaikan atap Spandek Gudang Material.

6) BPVP Belitung

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Belitung sebesar Rp103.204 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.24/126/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Pagar Permanen.

7) BBPVP Serang

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BBPVP Serang sebesar Rp668.105.983 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan.

8) Satker Ditjen Binalavotas

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp47.175.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/4024/UM.03.04/XI/2025 tanggal 19 November 2025 berupa *sign standing* Bangunan Kantor Permanen.

9) BPVP Samarinda

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada BPVP Samarinda sebesar Rp1.309.836.871 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.11/0265B/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen.

10) BBPVP Bandung

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BBPVP Bandung sebesar Rp293.640.213 terdiri dari:

- a) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp47.702.562 merupakan koreksi Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan taman Asrama Gelatik sesuai kontrak Nomor PL06.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/II/2025.

- b) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp57.514.415 merupakan koreksi Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan dapur Gedung Serbaguna sesuai kontrak Nomor PL18.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/III/2025.
- c) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp44.908.502 merupakan koreksi Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan Gedung Serbaguna sesuai kontrak Nomor PL28.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/VI/2025.
- d) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp31.080.295 merupakan koreksi Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan perbaikan plafond sesuai kontrak Nomor PL74.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XI/2025.
- e) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp49.926.903 merupakan koreksi Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan paving block sesuai kontrak Nomor PL91.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 sebagai penambahan nilai aset tetap Gedung Bangunan Asrama Gelatik.
- f) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp 62.507.536 merupakan koreksi Kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan sumur Asrama Rajawali sesuai kontrak Nomor PL103.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025.

11) BPVP Sorong

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker BPVP Sorong sebesar Rp6.427.889.540 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/74/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Dember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen.

12) BBPVP Makassar

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada BPVP Makassar sebesar Rp30.640.880.200 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/103.1/UM.03.06/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan Gedung Olah Raga Tetutup Permanen.

13) Dit. Bina Lemlatvok

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada satker Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp6.281.881.311 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3228/LP.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Pagar Lainnya, Pagar Lainnya, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, dan Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.

9. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp44.998.838.385

Tabel 261 Pengembangan Melalui KDP Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	577.922.065
Sekretariat Jenderal			577.922.065
026.04	690633	BPKK Kendari	196.380.000
Ditjen Binapenta dan PKK			196.380.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	3.688.519.627
	350083	Balai K3 Samarinda	30.114.365.117
	350084	Balai K3 Jakarta	3.575.765.951
Ditjen Binwasnaker dan K3			37.378.650.695
026.13	089378	BPVP Padang	6.128.525.625
	219228	BPVP Ambon	717.360.000
Ditjen Binalavotas			6.845.885.625
Pengembangan Melalui KDP			44.998.838.385

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp577.922.065

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp577.922.065 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (Biro Umum) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Rumah Negara Golongan Tipe I Tipe A Permanen.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp196.380.000

Pengembangan melalui KDP pada BPKK Kendari sebesar Rp196.380.000 dicatatkan berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan BMN Nomor 3.9/610/UM.03/VI/2025. Pekerjaan ini meliputi pemasangan plafon pada Kantor BPKK Kendari yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruangan. Meskipun bukan berupa penggantian komponen lama, transaksi ini tetap dicatat sebagai KDP melalui Modul Aset aplikasi SAKTI sesuai dengan arahan KPPN Kendari, mengingat penginputan awal dilakukan melalui Modul Komitmen pada akun belanja modal gedung dan bangunan.

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp37.378.650.695

Pengembangan Melalui KDP pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp37.378.650.695, merupakan transaksi pengembangan atas BMN yang sudah tercatat sebelumnya (bukan menjadi aset baru) yang berasal dari penyelesaian pekerjaan melalui tahapan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdapat di satuan kerja:

- 1) Balai K3 Bandung berupa penambahan nilai pada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 senilai sebesar Rp3.688.519.627 yang berasal dari Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan NUP 2 dan sudah didefinisikan menjadi Gedung dan Bangunan sesuai dengan Surat Keterangan Pengembangan dengan KDP Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Balai K3 Bandung Nomor 5.3/11a/UM.03.04/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.
- 1) Balai K3 Jakarta berupa penambahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5 senilai Rp3.575.765.951 yang berasal dari Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dan sudah didefinisikan menjadi Gedung dan Bangunan sesuai dengan Surat Keterangan Pengembangan dengan KDP Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Balai Besar K3 Jakarta Nomor 5.5/127/UM.03.04/VI/2025

tanggal 26 Juni 2025.

- 2) Balai K3 Samarinda berupa penambahan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 senilai Rp30.114.365.117 yang berasal dari proses pembangunan melalui KDP NUP 7 pada tahun 2024. Transaksi ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang berasal dari:

- a) PT. Ganesha Pratama Consultant sesuai Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3 Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025.
- b) CV. JF Karya Persada sesuai Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3 Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025.

- d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp6.845.885.625

Pengembangan Melalui KDP pada Ditjen Binalavotas K3 sebesar Rp6.845.905.625 terdapat pada:

1. BPVP Padang

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp6.128.525.625 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.9/105/KU.02.01/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

2. BPVP Ambon

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp717.360.000 sesuai dengan Surat Keterangan Kontrak Nomor: 2.15/SPK.75/UM.02/XI/2024 dan Nomor: 2.15/1613/UM.02/XI/2024 tanggal 21 Januari 2025 berupa Bangunan Gedung Kesehatan Lainnya.

10. Koreksi Susulan sebesar Rp30.132.052.821

Tabel 262 Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	2.650.645.416
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	852.166.255
	626011	Pusat Pasar Kerja	26.547.593
Sekretariat Jenderal			3.529.359.264
026.04	259322	BBPKK Bandung	4.258.282.353
Ditjen Binapenta dan PKK			4.258.282.353
026.13	050302	BPVP Sidoarjo	4.574.899.689
	219228	BPVP Ambon	1.230.974.550
	426531	BBPVP Serang	123.990.687
	452609	BBPVP Semarang	16.414.546.278
Ditjen Binalavotas			22.344.411.204
Koreksi Susulan			30.132.052.821

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.529.359.264

- 1) Satker Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp2.650.645.416

Koreksi Susulan terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp2.650.645.416 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 263 Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan

Pada Politeknik Ketenagakerjaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	471.477.150
2	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	158.602.350
3	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	280.102.936
4	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	296.206.980
5	Bangunan Kantin	198.216.000
6	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1.246.040.000
Jumlah		2.650.645.416

2) Satker Sekretariat Jenderal Kemnaker

Koreksi Susulan sebesar Rp852.166.255, berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Parkir Tertutup Permanen dan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen merupakan kapitalisasi (penambahan nilai) ke dalam BMN definitif atas transaksi koreksi pencatatan dengan rincian berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor: 1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp26.547.593

Koreksi Susulan pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp26.547.593 berupa rak kayu menjadi Bangunan /Gedung Kantor Permanen berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Nomor 1/751/UM.01.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp4.258.282.353

Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp4.258.282.353 sesuai surat keterangan koreksi pencatatan Barang Milik Negara Nomor 3.1/5273/UM.03.02/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 3.1/5274/UM.03.02/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 264 Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan

Pada Ditjen Binapenta dan PKK

Deskripsi	Nilai (Rp)
Koreksi Susulan Asrama Permanen	48.547.000
Koreksi Susulan Asrama Permanen	2.602.401.803
Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.449.724.550
Koreksi Susulan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	157.609.000
Jumlah	4.258.282.353

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp22.344.411.204

1) BPVP Sidoarjo

Koreksi Susulan pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp4.574.899.689 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.21/4077/UM.03/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan.

2) BPVP Ambon

Koreksi Susulan pada BPVP Ambon sebesar Rp1.230.974.550 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.15/189/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan.

3) BBPVP Serang

Koreksi Susulan sebesar Rp123.990.687 terdapat pada satker BBPVP Serang sesuai Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/175/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 berupa Bangunan Tempat Parkir dan Asrama Permanen.

4) BBPVP Semarang

Koreksi Susulan pada BBPVP Semarang sebesar Rp16.414.546.278 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.6/981/UM.03.02/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 dan Nomor 2.6/1013/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 desember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

11. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp925.138.500.

Tabel 265 Penggunaan Kembali BMN Yang sudah Dihentikan Penggunaan Aktif Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	547.805.000
	451108	BPVP Samarinda	11.351.500
	452652	BBPVP Makassar	365.982.000
Ditjen Binalavotas			925.138.500
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan Penggunaan Aktif			925.138.500

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebagai berikut:

a. BPVP Bandung Barat

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp547.805.000 atas 1 Unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.11/0231/UM.03.04/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

b. BPVP Samarinda

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp11.351.500 atas 1 Unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.11/0231/UM.03.04/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

b. BBPVP Makassar

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp365.982.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/275/UM.03.06/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Pagar Tembok tersebut setelah dilakukan koreksi pencatatan kodnisi barang, dilakukan perubahan dari Aset yang tidak digunakan menjadi penggunaan kembali BMN (masuk di Bangunan berupa Tugu).

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp148.914.693.970

Tabel 266 Koreksi Pencatatan Nilai berkurang Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	407.208.914
Sekretariat Jenderal			407.208.914
026.04	259322	BBPKK Bandung Barat	2.437.000
	690633	BPKK Kendari	2.477.000
Ditjen Binapenta dan PKK			4.914.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	75.883.288
	350081	Balai K3 Medan	9.435.000
	350082	Balai Besar K3 Makassar	19.405.990
Ditjen Binwasnaker dan K3			104.724.278
026.13	050302	BPVP Sidoarjo	100.000.000
	051102	BPVP Banyuwangi	139.817.122.627
	219228	BPVP Ambon	73.447.232
	230302	BPVP Lombok Timur	3.861.000
	352630	BPVP Pangkep	96.496.010
	352631	BPVP Belitung	64.393.394
	451026	Ditjen. Binalavotas	90.210.998
	451094	BBPVP Medan	2.719.260
	451108	BPVP Samarinda	5.684.895.446
	452533	Sekretariat BNSP	2.059.139.500
	452652	BBPVP Makassar	55.853.200
	626131	Dit. Bina Lemlatvok	349.708.111
Ditjen Binalavotas			148.397.846.778
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang			148.914.693.970

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp407.208.914

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp407.208.914 terdapat pada satker Politeknik Ketenagakerjaan berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp4.914.000

1) BBPKK Bandung Barat

Koreksi Pencatatan berkurang pada satker BBPKK Bandung Barat sebesar Rp2.437.000 berupa pengembalian belanja atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Asrama E BBPKK SPM 1253 tahun 2023 a.n PT. Inovasi Multi Kreasi sesuai Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai Berkurang BMN Nomor 3.1/1605/UM.03.04/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

2) BPKK Kendari

Koreksi Pencatatan berkurang pada satker BBPKK Bandung Barat sebesar Rp2.477.000 berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Nomor 3.9/1342/UM.03/XII/2025 atas hasil transaksi dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp104.724.278

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp75.883.288

Koreksi pencatatan nilai berkurang pada Balai K3 Bandung sebesar Rp75.883.288 merupakan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal

Kementerian Ketenagakerjaan RI sesuai LHA Nomor 6/57.A/PW.10.00/IX/2025 tanggal 29 September 2025. Koreksi ini dilakukan atas pengakuan biaya perjalanan dinas dan honorarium pengelola teknis yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 5.3/253/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

2) Balai K3 Medan sebesar Rp9.435.000

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp9.435.000 pada Balai K3 Medan dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 5.2/9/UM.03.02/V/2025 tanggal 21 Mei 2025. Koreksi ini merupakan langkah pemisahan pencatatan atas aset AC Split yang sebelumnya tercatat menyatu dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1. Nilai tersebut dikeluarkan dari akun Gedung dan Bangunan untuk selanjutnya diinput sebagai saldo awal pada akun Peralatan dan Mesin.

3) Balai Besar K3 Makassar sebesar Rp19.405.990

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp19.405.990 dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan terkait kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi Kantor Balai K3 Makassar. Koreksi ini didasarkan pada pengembalian dana oleh PT Cipta Agora Lestari melalui NTPN 49E077QLV2ADEN74 tertanggal 11 April 2025, serta didukung oleh Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang Nomor 5.1/022/UM.03.02/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025.

d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp148.397.846.778

1) BPVP Sidoarjo sebesar

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp100.000.000 sesuai Surat Keterangan Nomor 2.21/1292.1/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen.

2) BBPVP Banyuwangi

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp139.817.122.627 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPVP Banyuwangi Nomor 2.26/71/UM.03.00/IV/2026 tanggal 27 April 2026.

3) BPVP Ambon

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp73.447.232 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.15/1336/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung *Talent Corner*.

4) BPVP Lombok Timur sebesar Rp3.861.000

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp3.861.000 sesuai Surat Keterangan Nomor: 2.18/184/UM.02.01/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 berupa Taman Lainnya.

5) BPVP Pangkep sebesar Rp96.496.010

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp96.496.010 sesuai Surat Keterangan Nomor 2.23/2476/UM.03.04/VII/2025 tanggal 16 Juni 2025

berupa Bangunan Gedung Pertemuan Permanen.

6) BPVP Belitung sebesar Rp64.393.394

- a) Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp38.321.841 sesuai Surat Keterangan Nomor 2.24/79/UM.03.04/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 berupa Pagar Permanen, Meja Lipat, *Backdrop* TV dan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen.
- b) Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp26.071.553 sesuai Surat Keterangan Nomor: 2.24/126/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Pagar Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Dan Bangunan Gedung Kantor Lain.

7) Satker Ditjen Binalavotas

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp90.210.998 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sesuai Surat Keterangan Nomor:2/4674/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/955/UM.03.04/II/2026 tanggal 31 Desember 2025.

8) BBPVP Medan

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp2.719.260 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.2/KU.07.03/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 berupa Koreksi perubahan nilai berkurang pada Bangunan Asrama Permanen.

9) BPVP Samarinda

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp5.684.895.446 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.11/0297/UM.03.04/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 berupa Bangunan Asrama Permanen.

10) Sekretariat BNSP

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp2.059.139.500 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.1/11/UM.03.02/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

11) BBPVP Makassar sebesar Rp55.853.200

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp55.853.200 sesuai Surat Keterangan Nomor: 2.12/240/UM.03.06/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 berupa pembangunan Gedung *Workshop* pariwisata.

12) Dit. Bina Lemlatvok

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp349.708.111 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3227/LP.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Koreksi berkurang karena ada pengembalian jasa konsultasi pengawasan tahun 2022.

2. Transfer Keluar sebesar Rp10.418.646.977

Transfer Keluar sebesar Rp10.418.646.977 dari satker Sekretariat Jenderal ke Ditjen Binalavotas sesuai BAST Nomor: 1/561/UM.03.01/III/2025 tanggal 14 Februari 2025 berupa bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen yaitu Masjid Kav. 44 yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan dengan luas 1.996 m².

3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.278.871.417.908

Tabel 267 Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	25.563.482.383
	450938	Sekretariat Jenderal	5.117.478.424
Sekretariat Jenderal			30.680.960.807
026.04	259322	BBPKK Bandung	19.029.301.556
	690633	BPKK Kendari	1.423.718.100
	690634	BPKK Bekasi	417.781.000
Ditjen Binapenta dan PKK			20.870.800.656
026.08	350083	Balai K3 Samarinda	86.940.536.050
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	22.831.879.246
Ditjen Binwasnaker dan K3			109.772.415.296
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	23.054.424.671
	035636	BPVP Surakarta	95.955.004.328
	050302	BPVP Sidoarjo	30.141.820.881
	051102	BPVP Banyuwangi	4.827.757.678
	065106	BPVP Banda Aceh	31.652.775.743
	089378	BPVP Padang	51.082.460.262
	191206	BPVP Bantaeng	4.362.933.052
	209255	BPVP Kendari	31.461.767.486
	219228	BPVP Ambon	58.096.036.393
	230302	BPVP Lombok Timur	28.906.159.848
	352630	BPVP Pangkep	21.365.461.850
	352631	BPVP Belitung	4.561.946.162
	426531	BBPVP Serang	91.743.543.619
	451026	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	385.809.030
	451094	BBPVP Medan	117.926.277.834
	451108	BPVP Samarinda	45.903.622.480
	452542	BBPVP Bandung	53.316.527.905
	452558	BBPVP Bekasi	20.467.510.273
	452589	BPVP Sorong	21.190.085.903
	452595	BPVP Ternate	142.908.244.800
	452609	BBPVP Semarang	70.149.120.156
	452652	BBPVP Makassar	91.148.251.781
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	54.384.253.155
	626132	Direktorat Bina Lavogan	22.555.445.859
Ditjen Binalavotas			1.117.547.241.149
Reklasifikasi Keluar			1.278.871.417.908

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp30.680.960.807

1) Politeknik Ketenagakerjaan

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp25.563.482.383 Politeknik Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 268 Reklasifikasi Keluar Gedung dan bangunan

Pada Politeknik Ketenagakerjaan

No	Semula	Menjadi	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	Bangunan Laboratorium Permanen	8.901.404.137
2	Asrama Permanen	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	14.074.198.061
3	Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2.429.277.835
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gedung instalasi lainnya	158.602.350
Jumlah			25.563.482.383

2) Sekretariat Jenderal

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp5.117.478.424 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal c.q Biro Umum yang semula dicatat sebagai Rumah

Negara Golongan I Tipe A Permanen dan Bangunan Gudang Tertutup Permaen menjadi Bangunan Gedung Arsip Permanen berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum nomor:1/567/UM.03/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

b. Ditjen Binapenta dan K3

1) BBPKK Bandung sebesar Rp19.029.301.556

Reklasifikasi Keluar pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp19.029.301.556 sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Kode Barang Milik Negara Nomor 3.1/5226/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 terdiri dari:

a)	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
b)	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
c)	Bangunan Untuk Kandang
d)	Bangunan Gudang Tertutup Permanen
e)	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
f)	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
g)	Bangunan Lainnya
h)	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
i)	Gedung Pos Jaga Permanen
j)	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen
k)	Bangunan Gedung Kantor Permanen

2) BPKK Kendari sebesar Rp1.423.718.100

Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan pada BPKK Kendari sebesar Rp1.423.718.100. Gedung beralih fungsi menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen yang semula dicatat sebagai Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan sesuai Surat Keterangan Pencatatan BMN Nomor 3.9/1341/UM.03/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

3) BPKK Bekasi sebesar Rp417.781.00

Reklasifikasi Keluar pada BPKK Bekasi sebesar Rp417.781.000 sesuai Surat Pernyataan Reklasifikasi Kode Barang Milik Negara Nomor 3.8/733/UM.03/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 terdiri dari Bangunan Parkir Terbuka Permanen yang semula dicatat sebagai Bangunan Tempat Parkir dan Bangunan Gedung Instalasi Lainnya yang semula dicatat sebagai Bangunan Rumah Genset.

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp109.772.415.296

1 Balai K3 Samarinda sebesar Rp86.940.536.050

Reklasifikasi Keluar pada Balai K3 Samarinda Rp86.940.536.050 merupakan transaksi untuk memperbaiki kode barang atas NUP Bangunan Gedung Kantor Laboratorium Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, sesuai dengan Surat Keterangan Plt. Kepala Balai K3 Samarinda Nomor 5.4/154a/UM.03.04/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

2 Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp22.831.879.246

Reklasifikasi Keluar pada Balai Besar K3 Jakarta Rp22.831.879.246 merupakan transaksi untuk memperbaiki kode barang atas NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan semula tercatat sebagai Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5 dan NUP 1 masing - masing senilai Rp19.983.357.246 dan

Rp2.848.522.000 dan dilakukan reklas menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan NUP 1 dan NUP 2 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Jakarta Nomor 5.5/203/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.117.547.241.149

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp23.054.424.671

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Bandung Barat sebesar Rp23.054.424.671 sesuai Surat Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan, Gedung Pos Jaga, Taman Permanen, Bangunan Penampung Sampah, Dan Bangunan Gedung Pertemuan.

2) BPVP Surakarta sebesar Rp95.955.004.328

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Surakarta sebesar Rp95.955.004.328 sesuai Surat Nomor 2.10/241/UM.01.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Nomor 2.10/168/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen menjadi Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen dan Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.

3) BPVP Sidoarjo sebesar Rp30.141.820.881

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp30.141.820.88 sesuai Surat Nomor 2.21/4068/UM.03/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 atas Bangunan Fasilitas Umum Lainnya, Rumah Sederhana, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan menjadi Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen dan Asrama Permanen.

4) BPVP Banyuwangi sebesar Rp4.827.757.678

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Banyuwangi sebesar Rp4.827.757.678 sesuai Surat Nomor 2.22/174/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 atas Bangunan Lainnya, Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Instalasi Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, dan Bangunan Lainnya.

5) BPVP Banda Aceh sebesar Rp31.652.775.743

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp31.652.775.743 sesuai Surat Nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 terdiri dari:

- a) Bangunan Parkir Terbuka Permanen
- b) Bangunan Penerangan Taman
- c) Gedung Garasi/Pool Permanen
- d) Bangunan Terbuka Lainnya
- e) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
- f) Bangunan Gedung Kantor Permanen
- g) Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
- h) Bangunan Tempat Parkir
- i) Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
- j) Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya
- k) Bangunan Lainnya
- l) Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
- m) Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen

6) BPVP Padang sebesar Rp51.082.460.262

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Padang sebesar Rp51.082.460.262 sesuai Surat Nomor 2.9/87/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan, Gedung Kantor, Gedung Pertemuan, Gudang, Rumah Ibadah, Kantin, Rumah Genset, Gapura, Mess, Dan Taman.

7) BPVP Bantaeng sebesar Rp4.362.933.052

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Bantaeng sebesar Rp4.362.933.052 sesuai Surat Nomor 2.19/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa bangunan gedung pendidikan dan latihan, bangunan kantor, dan bangunan parkir.

8) BPVP Kendari sebesar Rp31.461.767.486

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Kendari sebesar Rp31.461.767.486 sesuai Surat Nomor 2.13/2557/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen menjadi Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen, Bangunan Gedung Kantor Lainnya.

9) BPVP Ambon sebesar Rp58.096.036.393

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Ambon sebesar Rp58.096.036.393 sesuai Surat Nomor 2.15/182/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, Bangunan Kesehatan Lainnya, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen, dan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen, dan Selasar.

10) BPVP Lombok Timur sebesar Rp28.906.159.848

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Lombok Timur sebesar Rp28.906.159.848 sesuai Surat Nomor 2.18/486/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Lainnya, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Bangunan Tempat Parkir, dan Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen menjadi Bangunan Lainnya, Pagar Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen, Bangunan Rumah Genset, Bangunan Parkir Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Kantor Lainnya, dan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen.

11) BPVP Pangkep sebesar Rp21.365.461.850

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Pangkep sebesar Rp21.365.461.850 sesuai Surat Nomor 2.23/5626/UM.03.02/2025 tanggal 09 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen, Bangunan Rumah Genset, Bangunan Terbuka Lainnya, dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gedung Instalasi Lainnya, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen.

12) BPVP Belitung sebesar Rp4.561.946.162

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Belitung sebesar Rp4.561.946.162 sesuai Surat Nomor 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen menjadi Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

13) BBPVP Serang sebesar Rp91.743.543.619

Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Serang sebesar Rp91.743.543.619 sesuai Surat Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen, Bangunan Rumah Genset, Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, Bangunan Tempat Parkir, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Kantin, Gedung Olah Raga Tertutup Permanen, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

14) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp385.809.030

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp385.809.030 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/4255/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya menjadi Bangunan Kantin dan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya menjadi Gedung Pos Jaga Permanen.

15) BBPVP Medan sebesar Rp117.926.277.834

Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Medan sebesar Rp117.926.277.834 sesuai Surat Nomor 2.2/338/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Parkir Tertutup Permanen, Hotel Permanen, Gedung Garasi/Pool Permanen, Bangunan Fasilitas Umum Lainnya, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dan Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, dan Bangunan Gudang Tertutup Permanen.

16) BPVP Samarinda sebesar Rp45.903.622.480

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp45.696.352.980 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.11/ 0266A /UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, Asrama Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Terbuka Lainnya, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Kanopi, Bangunan Rumah Genset, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

17) BBPVP Bandung sebesar Rp53.316.527.905

Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Bandung sebesar Rp53.316.527.905 sesuai Surat Nomor 2.5/10029/UM.03.02/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen menjadi Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, dan Bangunan Gedung Arsip Permanen.

18) BBPVP Bekasi sebesar Rp20.467.510.273

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp20.467.510.273 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.4/203/UM.03.02/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Bangunan Tempat Parkir, Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, dan Bangunan Lainnya menjadi Bangunan Kantin, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Dan Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan, Dan Bangunan Lainnya.

19) BPVP Sorong sebesar Rp21.190.085.903

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Sorong sebesar Rp21.190.085.903 sesuai Surat Nomor 2.16/104/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa Bangunan Lainnya, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen menjadi Bangunan Rumah Genset, Bangunan

Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Kantin, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan,

20) BPVP Ternate sebesar Rp142.820.755.800

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Ternate sebesar Rp142.820.755.800 sesuai Surat Nomor 2.14/384/UM.03.00/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 berupa:

- a) Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
- b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
- c) Gedung Garasi/Pool Permanen
- d) Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen
- e) Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya
- f) Bangunan Lainnya
- g) Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya
- h) Bangunan Fasilitas Umum Lainnya
- i) Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya
- j) Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
- k) Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
- l) Bangunan Parkir Terbuka Permanen

menjadi

- a) Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen
- b) Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
- c) Taman Permanen
- d) Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan
- e) Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya
- f) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
- g) Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
- h) Bangunan Rumah Genset
- i) Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
- j) Bangunan Terbuka Lainnya

21) BBPVP Semarang sebesar Rp70.149.120.156

Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Semarang sebesar Rp70.149.120.156 sesuai Surat Nomor 2.6/949/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 berupa:

- a) Bangunan Gedung Kantor Permanen
- b) Bangunan Tempat Parkir
- c) Bangunan Lainnya
- d) Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen

menjadi

- a) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
- b) Bangunan Rumah Genset
- c) Selasar
- d) Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen
- e) Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

22) BBPVP Makassar sebesar Rp91.148.251.781

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp91.148.251.781 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025 berupa:

- a) Bangunan Gudang Tertutup Permanen
- b) Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
- c) Bangunan Tempat Parkir
- d) Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
- e) Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
- f) Taman Semi Permanen
- g) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
- h) Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
- i) Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya
- j) Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan
- k) Taman Lainnya

menjadi

- a) Bangunan Gudang Tertutup Permanen
- b) Bangunan Parkir Terbuka Permanen
- c) Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
- d) Gedung Olah Raga Tertutup Permanen
- e) Bangunan Gedung Kantor Permanen
- f) Taman Permanen
- g) Pagar Permanen
- h) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan

23) Ditjen Bina Lemlatvok sebesar Rp54.384.253.155

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp46.000.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/ /LP.01/IX/2025 tanggal 2 September 2025 berupa rumah negara Golongan III Tipe C, D dan E Permanen dan Surat Keterangan Nomor 2/3229/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa bangunan gedung instalasi lainnya dan bangunan gedung pendidikan dan latihan.

- a) Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen
- b) Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen
- c) Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen
- d) Bangunan Gedung Kantor Permanen
- e) Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
- f) Pagar Lainnya
- g) Flat/Rumah Susun Lainnya
- h) Gedung Pos Jaga Permanen
- i) Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
- j) Bangunan Tempat Parkir
- k) Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
- l) Taman Lainnya
- m) Gedung Garasi/Pool Permanen
- n) Bangunan Gudang Tertutup Permanen
- o) Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
- p) Bangunan Gedung Kantor Permanen
- q) Bangunan Gedung Kantor Lainnya
- r) Bangunan Gedung Kantor Lainnya
- s) Bangunan Gudang Tertutup Permanen
- t) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

menjadi

- a) Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen
- b) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
- c) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
- d) Taman Permanen
- e) Pagar Permanen
- f) Bangunan Rumah Genset
- g) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
- h) Pagar Permanen
- i) Asrama Permanen
- j) Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen
- k) Gedung Pos Jaga Semi Permanen
- l) Bangunan Gudang Tertutup Permanen
- m) Gedung Garasi/Pool Permanen
- n) Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
- o) Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen
- p) Gedung Garasi/Pool Semi Permanen
- q) Bangunan Parkir Terbuka Permanen
- r) Selasar
- s) Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan
- t) Bangunan Gedung Kantor Lainnya

24) Dit. Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan sebesar Rp22.555.445.859

Reklasifikasi Keluar pada Dit. Bina Lavogan sebesar Rp22.555.445.859 sesuai Surat Nomor 2/29/UM.03.02/XII/2030 tanggal 8 Desember 2025 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dan sesuai Surat Nomor 2/3229/UM.03.04/XII/2025 berupa Bangunan Lainnya menjadi Bangunan Gedung Instalasi Lainnya dan Bangunan Gedung Kantor Permanen menjadi Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.

4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp257.206.954.021

Tabel 269 Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	3.182.455.751
	450938	Sekretariat Jenderal	142.137.987
Sekretariat Jenderal			3.324.593.738
026.04	259322	BBPKK Bandung	3.918.453.353
Ditjen Binapenta dan PKK			3.918.453.353
026.08	350081	Balai K3 Medan	199.944.000
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	161.718.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			361.662.000
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	2.412.716.623
	035636	BPVP Surakarta	2.036.391.918
	050302	BPVP Sidoarjo	5.234.162.914
	051102	BPVP Banyuwangi	8.531.827.493
	209255	BPVP Kendari	6.532.505.012
	219228	BPVP Ambon	1.230.974.550
	426531	BBPVP Serang	668.105.983
	451026	Ditjen Binalavotas	47.175.000
	451108	BPVP Samarinda	1.309.836.871
	452589	BPVP Sorong	5.873.093.933
	452609	BBPVP Semarang	16.409.596.278
	452652	BBPVP Makassar	193.033.977.044
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	6.281.881.311
Ditjen Binalavotas			249.602.244.930
Koreksi Pencatatan			257.206.954.021

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.324.593.738

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp3.182.455.751

Koreksi Pencatatan pada Politeknik Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 270 Koreksi Pencatatan Gedung Bangunan
Pada Politeknik Ketenagakerjaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gedung laboratorium hasil inventarisasi BMN untuk dijadikan KDP	442.197.300
2	Gedung bangunan lainnya berubah alih nama menjadi bangunan gedung perpustakaan permanen	1.246.040.000
3	gedung bangunan kantor permanen	295.559.500
4	gedung bangunan kantor lainnya	147.359.000
5	gedung bangunan instalasi lainnya	158.602.350
6	gedung bangunan pendidikan dan latihan	572.930.416
7	Asrama permanen	121.557.185
8	gedung bangunan kantin	198.216.000
Jumlah		3.182.461.751

2) Sekretariat jenderal sebesar Rp142.137.987

Koreksi Pencatatan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp142.137.987 berupa Bangunan Rumah Genset berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum nomor:1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp3.918.453.353

Koreksi Pencatatan pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp3.918.453.353 sesuai surat keterangan koreksi pencatatan Barang Milik Negara Nomor 3.1/5273/UM.03.02/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 271 Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan pada BBPKK Bandung Barat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagar Permanen	212.248.000
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	703.812.303
3	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	164.920.550
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.284.804.000
5	Asrama Permanen	1.395.059.500
6	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	157.609.000
Jumlah		3.918.453.353

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp361.662.000

1) Balai K3 Medan sebesar Rp199.944.000

Koreksi Pencatatan pada Balai K3 Medan sebesar Rp199.944.000 merupakan transaksi karena adanya koreksi pencatatan Gudang Tertutup NUP 1 dan ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/24/UM.03.04/XII/2025/2025 tanggal 24 Desember 2025.

2) Balai besar K3 Jakarta sebesar Rp161.718.000

Koreksi Pencatatan pada Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp161.718.000 merupakan transaksi sebagai tindaklanjut hasil inventarisasi BMN aset ber KIB program kementerian ketenagakerjaan. Setelah dilakukan inventarisasi tim menyatakan bahwa Bangunan Gudang Lainnya NUP 1

merupakan bagian gedung yang tidak dapat dipisahkan dari Gedung NUP sehingga dilakukan koreksi pencatatan atas Bangunan Gudang NUP 1 dan ditindaklanjuti dengan koreksi bertambah senilai Rp161.718.000 pada Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan NUP 1 transaksi ini sesuai dengan Surat Keterangan Plt. Kepala Balai K3 Jakarta Nomor 5.5/205/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp249.602.244.930

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp2.412.716.623

Koreksi pencatatan 1 unit bangunan gedung sebesar Rp2.232.933.685 split menjadi 3 NUP Gedung dan 2 unit *dummy* bangunan gedung masuk ke penambahan nilai gedung sebesar Rp179.782.938 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025.

2) BPVP Surakarta sebesar Rp2.036.391.918

Koreksi pencatatan bangunan gedung instalasi lainnya NUP 1, nilai bertambah digabung dengan bangunan gedung pendidikan dan latihan NUP 3, bangunan gedung kantor permanen NUP 2 dan 5, nilai bertambah digabung dengan bangunan gedung kantor permanen NUP 1, taman dan pagar permanen sesuai Surat Keterangan Nomor 2.10/213/UM.03.02/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

3) BPVP sidoarjo sebesar Rp5.234.162.914

Koreksi pencatatan pagar permanen, bangunan gedung pertemuan permanen, taman lainnya, taman permanen dan bangunan gedung pendidikan dan latihan lainnya sesuai Surat Keterangan Nomor 2.21/4077/UM.03/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025.

4) BPVP Banyuwangi sebesar Rp8.531.827.493

Koreksi Pencatatan sebesar Rp8.531.827.493 sesuai Surat Keterangan Nomor: 2.22/107/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 berupa Bangunan Gedung Instalasi, Taman, Pagar, bangunan Kolam, Bangunan Gedung Tempat Parkir dan Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan.

5) BPVP Kendari sebesar Rp6.532.505.012

Koreksi Pencatatan sebesar Rp6.532.505.012 merupakan koreksi pencatatan barang milik negara berupa aset tetap gedung dan bangunan yang mengalami *double* catat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Subbagian Umum BPVP Kendari Nomor:2.13/2804/UM.03.04/XII/2025.

6) BPVP Ambon sebesar Rp1.230.974.550

Koreksi pencatatan berupa bangunan gedung kantor permanen, bangunan bengkel/hanggar permanen, rumah negara Golongan I Tipe A permanen, pagar permanen sesuai Surat Keterangan Nomor 2.15/1330/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

7) BBPVP Serang sebesar Rp668.105.983

Koreksi Pencatatan berupa pagar permanen dan tugu peringatan lainnya sesuai Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.

8) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp47.175.000

Koreksi Pencatatan sebesar Rp47.175.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/4088/UM.03.03/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 berupa bangunan gedung kantor permanen.

9) BPVP Samarinda sebesar Rp1.309.836.871

Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.309.836.871 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.11/ 0267A /UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Bangunan Gudang Terbuka Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen.

10) BPVP Sorong sebesar Rp5.873.093.933

Koreksi Pencatatan sebesar Rp5.873.093.933 atas Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, Saluran Pembuang, Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/74/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

11) BBPVP Semarang sebesar Rp16.409.596.278

Koreksi Pencatatan sebesar Rp16.409.596.278 atas Asrama Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.6/981/UM.03.03/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025.

12) BBPVP Makassar sebesar Rp193.033.977.044

Koreksi pencatatan sebesar Rp193.033.977.044 atas Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin pada Bangunan Gedung Pendidikan Permanen BLK Maritim sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/103.1/UM.03.06/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan Surat Keterangan Nomor:2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025.

13) Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp6.281.881.311

Koreksi pencatatan sebesar Rp6.281.881.311 atas Bangunan Gedung Kantor Permanen pembangunan fisik dan jasa pengawasan calon satpel Prabumulih sesuai Surat Keterangan Nomor 2/3227/LP.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

5. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp2.870.663.280

Tabel 272 Penghentian Aset Dari Penggunaan Gedung dan Bangunan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	15.540.000
	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	873.427.000
Sekretariat Jenderal			888.967.000
026.13	219228	BPVP Ambon	171.261.280
	451108	BPVP Samarinda	842.076.000
	452595	BPVP Ternate	968.359.000
Ditjen Binalavotas			1.981.696.280
Penghentian Aset Dari Penggunaan			2.870.663.280

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp888.967.000

1) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp15.540.000

Penghentian Aset dari Penggunaan Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp15.540.000 berupa Gedung Pos Jaga Permanen.

2) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp873.427.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan sebesar Rp873.427.000 berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen berdasarkan surat keputusan Menteri ketenagakerjaan nomor 1/477/UM.03.03/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.981.696.280

1) BPVP Ambon sebesar Rp171.261.280

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp171.261.280 sesuai Surat Keterangan Menaker Nomor 1/618/UM.03.03/XI/2024 tanggal 20 November 2024 berupa Bangunan Lainnya.

2) BPVP Samarinda sebesar Rp842.076.000

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp842.076.000 sesuai Surat Keterangan Nomor 1/653/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 berupa Pagar, Bangunan Menara, dan Rumah Negara Golongan II.

3) BPVP Ternate sebesar Rp968.359.000

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp968.359.000 sesuai Surat Keterangan Nomor 1/84/UM.03.03/II/2029 tanggal 18 Februari 2025 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe E dan D Permanen.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi dan
Jaringan
Rp126.640.647.532

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126.640.647.532 dan Rp118.234.756.188.

Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp126.640.647.532 menurut akun sebagai berikut:

Tabel 273 Jalan Irigasi Jaringan Menurut Akun
Per 31 Desember 2025

Akun	Uraian Akun	Nilai (Rp)
134111	Jalan dan Jembatan	63.491.528.009
134112	Irigasi	39.937.527.392
134113	Jaringan	23.211.592.131
Jalan Irigasi dan Jembatan		126.640.647.532

Jalan Irigasi Jaringan menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 274 Jalan Irigasi Jaringan Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	5.550.223.413	5.550.223.413	-	-
Ditjen Binapenta & PKK	3.892.036.918	4.231.865.918	(339.829.000)	(8,03)
Ditjen Binwasnaker & K3	335.390.000	344.038.200	(8.648.200)	(2,51)
Barenbang	2.019.222.720	2.019.222.720	-	-
Ditjen Binalavotas	114.843.774.481	106.089.405.937	8.754.368.544	8,25
Jumlah	126.640.647.532	118.234.756.188	8.405.891.344	7,11
Akumulasi Penyusutan	(70.382.992.267)	(62.848.312.513)	(7.534.679.754)	11,99
Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56.257.655.265	55.386.443.675	871.211.590	1,57

Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 275 Mutasi Jalan Irigasi dan jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024	Rp 118.234.756.188
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	Rp 485.984.726
Reklasifikasi Masuk	Rp 16.228.988.953
Perolehan Lainnya	Rp 946.493.517
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 1.970.079.000
Koreksi Susulan	Rp 348.251.176
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp 19.811.275.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Manual	Rp (4.092.025.000)
Reklasifikasi Keluar	Rp (9.171.276.228)
Koreksi Pencatatan	Rp (2.193.087.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (15.928.792.800)
Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025	Rp 126.640.647.532
Akumulasi Penyusutan	Rp (70.382.992.267)
Nilai Buku Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025	Rp 56.257.655.265

Mutasi Tambah:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp485.984.726

Koreksi Saldo Awal terdapat pada BPVP Sidoarjo sesuai dengan Surat keterangan Nomor 2.21/4077/UM.03/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 berupa Embung/Waduk Lapangan.

2. Rekalsifikasi masuk sebesar Rp16.228.988.953

Tabel 276 Reklasifikasi Masuk Jalan Irigasi dan jaringan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.04	259322	BBPKK Bandung	45.872.000
	690634	BPKK Bekasi	316.388.000
Ditjen Binapenta dan PKK			362.260.000
026.13	021212	PVP Bandung Barat	3.091.440.413
	050302	BPVP Sidoarjo	3.044.558.999
	065106	BPVP Banda Aceh	214.927.000
	230302	BPVP Lombok Timur	3.519.465.340
	352631	BPVP Belitung	2.179.571.668
	426531	BBPVP Serang	721.292.094
	451094	BBPVP Medan	1.273.619.000
	452595	BPVP Ternate	87.489.000
	626131	Direktorat Bna Lemlatvok	103.536.250
	626132	Direktorat Bina Lavogan	1.630.829.189
Ditjen Binalavotas			15.866.728.953
Reklasifikasi Masuk			16.228.988.953

a. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp362.260.000

1) BBPKK Bandung sebesar Rp45.872.000

Reklasifikasi masuk pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp45.872.000 berupa Saluran Drainase yang sebelumnya tercatat sebagai Bangunan Air Irigasi Lainnya. Penyesuaian tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Reklasifikasi Kode Barang Milik Negara Nomor 3.1/5226/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

2) BPKK Bekasi sebesar Rp316.388.000

Reklasifikasi Masuk pada BPKK Bekasi sebesar Rp316.388.000 berupa Penampungan Air Hujan (PAH) yang sebelumnya tercatat Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Nomor 3.8/733/UM.03/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp15.866.728.953

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp3.091.440.413

Reklasifikasi Masuk pada BPVP Bandung Barat sebesar Rp3.091.440.413 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 berupa Bangunan Gedung Instalasi Lainnya.

2) BPVP Sidoarjo sebesar Rp3.044.558.999

Reklasifikasi Masuk pada BPVP Sidoarjo sebesar Rp3.044.558.99 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.21/4068/UM.03/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 berupa Bangunan Fasilitas Umum Lainnya

3) BPVP Banda Aceh sebesar Rp214.927.000

Reklasifikasi Masuk pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp214.927.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 berupa Sumur Gali (SGL) yang sebelumnya tercatat sebagai Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi).

4) BPVP Lombok Timur sebesar Rp3.519.465.340

Reklasifikasi Masuk pada BPVP Lombok Timur sebesar Rp3.519.465.340 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.18/486/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bangunan Talud Penahan dan Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum yang sebelumnya dicatat sebagai Bangunan Lainnya NUP 1 s.d 4.

5) BPVP Belitung sebesar Rp2.179.571.668

Reklasifikasi Masuk pada BPVP Belitung sebesar Rp 2.179.571.668 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan yang sebelumnya dicatat sebagai Saluran Pembuang.

6) BBPVP Serang sebesar Rp721.292.094

Reklasifikasi Masuk pada BBPVP Serang sebesar Rp721.292.094 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Jembatan Lainnya yang sebelumnya dicatat sebagai Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi) kode barang 5020106016 NUP 2.

7) BBPVP Medan sebesar Rp1.273.619.000

Reklasifikasi Masuk pada BBPVP Medan sebesar Rp 1.273.619.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.2/338/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan.

8) BPVP Ternate sebesar Rp87.489.000

Reklasifikasi Masuk pada BPVP Ternate sebesar Rp 87.489.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.14/384 /UM.03.00/XII/2025 Tanggal 5 Desember 2025 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang sebelumnya dicatat sebagai Bangunan Fasilitas Umum Lainnya.

9) Direktorat Bina Lemlatvok sebesar Rp103.536.250

Reklasifikasi Masuk pada Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp 103.536.250 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3229/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan, Saluran Drainage dan Sumur Artetis yang semula dicatat sebagai Saluran Lalu Lintas Air, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya dan Saluran Drainage.

10) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan sebesar Rp1.630.829.189

Reklasifikasi Masuk pada Dit. Bina Pemagangan sebesar Rp1.630.829.189 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2/29/UM.03.02/XII/2026 Tanggal 5 Desember 2025 berupa Saluran Pembuang yang semula dicatat sebagai Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah.

3. Perolehan Lainnya sebesar Rp946.493.517,00

Tabel 277 Perolehan Lainnya Jalan Irigasi dan jaringan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	209255	BPVP Kendari	6.617.117
	230302	BPVP Lombok Timur	369.268.000
	452652	BBPVP Makassar	570.608.400
Ditjen Binalavotas			946.493.517
Perolehan Lainnya			946.493.517

Perolehan Lainnya pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp946.493.517 terdapat pada:

- a. BPVP Lombok Timur sebesar Rp369.268.000 berupa 2 unit bangunan talud penahan berupa talud penahan depan Gedung CPMI Rp199.092.000 dan talud penahan belakang gedung *talent corner* Rp170.176.000 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.18/529/UM.03.02/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.
 - b. BPVP Kendari sebesar Rp6.617.117 yaitu 1 *dummy* penutup filter kolam taman BPVP Kendari berdasarkan surat keterangan Nomor 00219/BPVP-KDI/2025 tanggal 16 September 2025.
 - c. BBPVP Makasar sebesar Rp570.608.400 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/103/UM.03.06/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 berupa instalasi pusat pengatur listrik lainnya. Perolehan Lainnya pada jalan, irigasi dan jaringan ini seharusnya dikoreksi menjadi peralatan dan mesin.
4. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.970.079.000

Tabel 278 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Irigasi dan jaringan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	451108	BPVP Samarinda	162.639.000
026.13	452589	BPVP Sorong	1.807.440.000
Ditjen Binalavotas			1.970.079.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah			1.970.079.000

Koreksi Pencatatan Nilai bertambah sebesar Rp1.970.079.000 terdiri dari:

- a. BPVP Samarinda sebesar Rp162.639.000 sesuai dengan Surat Keterangan 2.11/0265B/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa jalan khusus kompleks.
 - b. BPVP Sorong sebesar Rp1.807.440.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/74/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa saluran *drainage*.
5. Koreksi Susulan sebesar Rp348.251.176
- Koreksi Susulan sebesar Rp348.251.176 terdapat pada satuan kerja BBPVP Serang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/175/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 berupa bangunan tempat parkir, jalan khusus komplek dan asrama permanen.
6. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif Pada Ditjen Binwasnaker sebesar Rp19.811.275.000

Penggunaan Kembali BMN yang Telah Dihentikan dari Penggunaan Aktif senilai Rp19.811.275.000 pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3. Transaksi ini merupakan tindak lanjut atas LHP BPK RI Nomor: 116.b/LHP/XVI/05/2023 dan Surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor 6/229/PW.10/2024 terkait aset Jaringan Pengawasan yang tidak diketahui keberadaannya.

Langkah ini diambil sebagai prasyarat administratif untuk melakukan koreksi pengurangan nilai aset sebesar Rp4.092.025.000 (terkait beban Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Jaringan yang sebelumnya dikapitalisasi). Mengingat aset tersebut sudah berstatus dihentikan dari penggunaan, maka diaktifkan kembali terlebih dahulu agar proses koreksi dapat dilakukan. Transaksi ini didasarkan pada Surat Keterangan KPB Nomor: 5/113/KU.07.04/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Manual sebesar Rp4.092.025.000

Koreksi Manual senilai Rp4.092.025.000 pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebagai tindak lanjut atas reviu Inspektorat Jenderal terhadap aset Jaringan Pengawasan Ketenagakerjaan pengadaan tahun 2008. Berdasarkan hasil pengujian dokumen, pengadaan tersebut merupakan biaya Sosialisasi dan Pelatihan, sehingga tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap. Transaksi koreksi pada Neraca ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/113/KU.07.04/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp9.171.276.228

Tabel 279 Reklasifikasi Keluar Jalan Irigasi dan jaringan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.04	259322	BBPKK bandung	45.872.000
	690634	BPKK Bekasi	316.388.000
Ditjen Binapenta dan PKK			362.260.000
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	2.895.033.900
	065106	BPVP Banda Aceh	214.927.000
	209255	BPVP Kendari	6.617.117
	352631	BPVP Belitung	2.179.571.668
	426531	BBPVP Serang	721.292.094
	451026	Ditjen Binalavotas	199.079.610
	451094	BBPVP Medan	301.821.000
	452652	BBPVP Makassar	570.608.400
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	89.236.250
	626132	Direktorat Bina Lavogan	1.630.829.189
Ditjen Binalavotas			8.809.016.228
Reklasifikasi Keluar			9.171.276.228

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp9.171.276.228 terdapat pada:

a. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp362.260.000

1) BBPKK Bandung sebesar Rp45.872.000

Reklasifikasi Keluar Irigasi pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp45.872.000 berdasarkan Surat Keterangan Reklasifikasi Kode Barang Milik Negara Nomor: 3.1/5226/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 berupa Bangunan Air Irigasi Lainnya menjadi Saluran Drainage.

2) BPKK Bekasi sebesar Rp316.388.000

Reklasifikasi Keluar pada BPKK Bekasi sebesar Rp316.388.000 berdasarkan surat pernyataan reklasifikasi kode barang milik negara Nomor 3.8/733/UM.03/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebanyak 1 unit menjadi Penampungan Air Hujan (PAH).

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp8.809.016.228

1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp2.895.033.900

Reklasifikasi Keluar pada BPVP Bandung Barat sebesar Rp2.895.033.900 sesuai surat keterangan Nomor 2.17/296/UM.03.02/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025 berupa Bangunan Air Irigasi Lainnya menjadi Bangunan Bak

- Kontrol/Manhole dan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya menjadi Bangunan Penampung Air Baku.
- 2) BPVP Banda Aceh sebesar Rp214.927.000
- Reklasifikasi Keluar pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp214.927.000 sesuai surat keterangan Nomor 2.8/7936/KU.07.04/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 berupa Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) menjadi Sumur Gali (SGL).
- 3) BPVP Kendari sebesar Rp6.617.117
- Reklasifikasi Keluar pada BPVP Kendari sebesar Rp6.617.117 sesuai surat keterangan Nomor 2.13/2800/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa instalasi lain-lain.
- 4) BPVP Belitung sebesar Rp2.179.571.668
- Reklasifikasi Keluar pada BPVP Belitung sebesar Rp2.179.571.668 sesuai surat keterangan Nomor: 2.24/121/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan.
- 5) BBPVP Serang sebesar Rp721.292.094
- Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Serang sebesar Rp721.292.094 sesuai surat keterangan Nomor 2.3/684/UM.03.00/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi) menjadi Jembatan Lainnya (Kode barang 5010299999 NUP 1).
- 6) Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp199.079.610
- Reklasifikasi Keluar pada Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp199.079.610 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/4255/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Saluran Penyimpanan Air.
- 7) BBPVP Medan sebesar Rp301.821.000
- Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Medan sebesar Rp301.821.000 sesuai surat keterangan Nomor 2.2/338/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) menjadi Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan.
- 8) BBPVP Makassar sebesar Rp570.608.400
- Reklasifikasi Keluar pada BBPVP Makassar sebesar Rp570.608.400 sesuai surat keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025 berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya.
- 9) Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp89.236.250
- Reklasifikasi Keluar pada Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp89.236.250 sesuai surat keterangan Nomor: 2/3229/UM.03.04/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 berupa Saluran Lalu Lintas Air, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya, dan Saluran Drainage menjadi Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan dan Sumur Artetis.
- 10) Dit. Bina Lavogan sebesar Rp1.630.829.189
- Reklasifikasi Keluar pada Dit. Bina Pemagangan sebesar Rp1.630.829.189 sesuai surat keterangan Nomor: 2/29/UM.03.02/XII/2028 Tanggal 7 Desember 2025 berupa Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah menjadi Saluran

Pembuang (5020504001).

3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.193.087.000

Tabel 280 Koreksi Pencatatan Jalan Irigasi dan jaringan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.04	259322	BBPKK bandung	339.829.000
Ditjen Binapenta dan PKK			339.829.000
026.13	451108	BPVP Samarinda	162.639.000
	452589	BPVP Sorong	1.690.619.000
Ditjen Binalavotas			1.853.258.000
Koreksi Pencatatan			2.193.087.000

a. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp339.829.000

Koreksi Pencatatan Irigasi pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp339.829.000 sesuai Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor 3.1/5273/UM.03.02/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 4 unit.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.853.258.000

1) BPVP Samarinda

Koreksi Pencatatan sebesar Rp162.639.000 terdapat pada Ditjen Binalavotas satuan kerja BPVP Samarinda sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.11/0265B/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025 berupa Jalan Khusus Komplek.

2) BPVP Sorong sebesar Rp1.690.619.000

Koreksi Pencatatan pada BPVP Sorong sebesar Rp1.690.619.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.16/74/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa 2-unit Saluran Pembuang.

4. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp15.928.792.800

Tabel 281 Penghentian Aset dari Penggunaan Jalan Irigasi dan jaringan

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	350084	Balai Besar K3 Jakarta	8.648.200
	651870	Satker Ditjen. Binwasnaker dan K3	15.719.250.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			15.727.898.200
026.13	451108	BPVP Samarinda	28.784.000
	452609	BBPVP Semarang	172.110.600
Ditjen Binalavotas			200.894.600
Penghentian Aset dari Penggunaan			15.928.792.800

1) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp8.648.200

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Balai K3 Jakarta sebesar Rp8.648.200, merupakan penghentian penggunaan Jaringan Listrik Lainnya NUP 1 senilai Rp8.648.200 karena aset tersebut rusak berat dan tidak lagi digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Besar K3 Jakarta sehingga harus dilakukan penghentian aset sesuai dengan Surat Keterangan Plt. Kepala Balai Besar K3 Jakarta Nomor 5.5/202/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

2) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp15.719.250.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp15.719.250.000, merupakan untuk menghentikan kembali jaringan yang sudah tidak digunakan sebagai pendukung tugas dan fungsi Ditjen Binwasnaker dan K3. Transaksi ini sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/113/KU.07.04/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

a. Ditjen Binalavotas sebesar Rp200.894.600

1) BPVP Samarinda sebesar Rp28.784.000

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp28.784.000 merupakan perubahan kondisi aset yang akan diusulkan penghapusan karena kondisi rusak berat, dan juga akan dilakukan penghibahan.

2) BBPVP Semarang sebesar Rp172.110.600

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp172.110.600 merupakan perubahan kondisi aset yang akan diusulkan penghapusan karena kondisi rusak.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp17.035.446.536

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.035.446.536 dan Rp17.700.658.119.

Aset Tetap Lainnya Menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 282 Rincian Aset Tetap Lainnya Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	1.475.038.582	2.135.868.365	(660.829.783)	(30,94)
Ditjen Binapenta & PKK	575.871.745	585.237.145	(9.365.400)	(1,60)
Ditjen PHI & JSK	4.259.200	14.859.200	(10.600.000)	(71,34)
Ditjen Binwasnaker & K3	310.237.200	322.537.200	(12.300.000)	(3,81)
Barenbang	156.024.400	156.024.400	-	-
Ditjen Binalavotas	14.514.015.409	14.486.131.809	27.883.600	0,19
Jumlah	17.035.446.536	17.700.658.119	(665.211.583)	(3,76)
Akumulasi Penyusutan	(286.583.715)	(272.606.275)	(13.977.440)	5,13
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya	16.748.862.821	17.428.051.844	(679.189.023)	(3,90)

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Tabel 283 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024		Rp	17.700.658.119
Mutasi Tambah			
Saldo Awal	Rp	116.156.250	
Pembelian	Rp	92.239.200	
Transfer Masuk	Rp	12.000.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp	6.050.000	
Perolehan Lainnya	Rp	126.206.908	
Mutasi Kurang			
Koreksi Susulan	Rp	(116.156.250)	
Transfer Keluar	Rp	(12.000.000)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(3.024.000)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(121.346.808)	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(765.336.883)	
Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025	Rp	17.035.446.536	
Akumulasi Penyusutan	Rp	(286.583.715)	
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	Rp	16.748.862.821	

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp116.156.250

Koreksi Saldo Awal sebesar Rp116.156.250 terdapat pada Sekretariat Jenderal pada satker PPSDM Ketenagakerjaan berupa Monografi dengan surat keterangan Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan Nomor 1/341/UM.03.04/IV/2025 tanggal 22 April 2025.

2. Pembelian sebesar Rp92.239.200

Tabel 284 Pembelian Aset Tetap lainnya

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	71.981.700
Sekretariat Jenderal			71.981.700
026.13	451026	Satker Ditjen Binalavotas	20.257.500
Ditjen Binalavotas			20.257.500
Pembelian			92.239.200

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp71.981.700

Pembelian sebesar Rp71.981.700 terdapat pada satker Politeknik Ketenagakerjaan berupa buku digital perpustakaan.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp20.257.500

Pembelian sebesar Rp20.257.500 berupa 3 buah hiasan dinding ukuran 158x68 cm dan 5 buah lukisan dan frame ukuran 75x120 cm yang terdapat pada Satker Ditjen Binalavotas sesuai SP2D Nomor 259991320541310 tanggal 29 Oktober 2025.

3. Transfer Masuk sebesar Rp12.000.000

Transfer Masuk sebesar Rp12.000.000 terdapat pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp12.000.000 berasal dari Transfer Keluar Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara. Aset tetap lainnya berupa *monografi* ini diterima sebagai tindak lanjut atas proses Likuidasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2024. Transaksi tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Nomor 5/237/UM.03.00/IX/2025 tanggal 26 September 2025.

4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp6.050.000

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp6.050.000 terdapat pada BPVP Padang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.9/87/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa 1 *dummy* barang bercorak kesenian lainnya yang semua dari *figure*.

5. Perolehan Lainnya sebesar Rp126.206.908

a. Barenbang Ketenagakerjaan

Perolehan Lainnya Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp119.976.400 berupa monografi sebanyak 57 buah.

b. BPVP Padang

Perolehan Lainnya BPVP Padang sebesar Rp6.230.508 berupa pengadaan Koleksi Perpustakaan sebanyak 34 eksemplar berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 2.15/45/KU.08.03/IV/2026.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Susulan sebesar Rp116.156.250

Koreksi Susulan sebesar Rp116.156.250 terdapat pada Sekretariat Jenderal satuan Kerja PPSDM Ketenagakerjaan berupa *Monografi*.

2. Transfer Keluar sebesar Rp12.000.000

Transfer Keluar merupakan sebesar Rp12.000.000 pada Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara merupakan pengalihan aset tetap lainnya berupa *monografi* kepada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari proses Likuidasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2024, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 5/237/UM.03.00/IX/2025 tanggal 26 September 2025.

3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.024.000

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.024.000 terdapat pada satuan kerja BPVP Banda Aceh berupa Naskah/Manuskrip Berbahan Kulit Kayu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/5726/UM.03.02/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp121.346.808

a) Barenbang Ketenagakerjaan

Koreksi Pencatatan pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp119.976.400 berupa *monografi* sebanyak 57 buah.

b) BPVP Padang

Koreksi Pencatatan pada BPVP Padang sebesar Rp1.370.408 berupa buku karena terdapat pencatatan ganda berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 2.15/45/KU.08.03/IV/2026.

5. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp765.336.883

Tabel 285 Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Tetap lainnya

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	273.248.800
	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	459.562.683
Sekretariat Jenderal			732.811.483
026.04	259322	BBPKK Bandung	1.865.400
	451139	Satker Ditjen Binapenta dan PKK	7.500.000
Ditjen Binapenta dan PKK			9.365.400
026.05	451270	Satker Ditjen PHI dan Jamsos	10.600.000
Ditjen PHI dan Jamsos			10.600.000
026.08	651870	Satker Ditjen Binwasnaker dan K3	12.300.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			12.300.000
026.13	452542	BBPVP Bandung	260.000
Ditjen Binalavotas			260.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan			765.336.883

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp732.811.483

1) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp273.248.800

Penghentian aset dari penggunaan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp273.248.800 berupa buku lainnya, monografi, dan referensi berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Nomor 1/1243/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

2) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp459.562.683

Penghentian aset dari penggunaan pada PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp459.562.683 berupa *Monografi* dengan Surat Keterangan Nomor 1/341/UM.03.04/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dan referensi dengan Surat Keterangan Nomor 1/1979/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp9.365.400

1) BBPKK Bandung sebesar Rp1.865.400

Penghentian Aset Dari Penggunaan pada BBPKK Bandung Barat sebesar Rp1.865.400 atas aset berupa domba dan sapi perah sesuai Surat Nomor 3.1/4071/UM.03.03/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.

2) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp7.500.000

Penghentian Aset Dari Penggunaan Aset Lainnya berupa Buku Lainnya dengan nilai Rp7.500.000 sesuai Surat Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMN Nomor B-1/527/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dan Risalah Lelang Nomor 382/07.03/2025-01 tanggal 17 November 2025.

3) Penghapusan Aset Lainnya pada Ditjen Binapenta dan PKK berupa Buku Lainnya dengan nilai Rp7.500.000 sesuai Surat Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMN Nomor B-1/527/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dan Risalah Lelang Nomor 382/07.03/2025-01 tanggal 17 November 2025.

c. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp10.600.000

Penghentian aset dari penggunaan pada Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp10.600.000 merupakan transaksi penghentian penggunaan BMN dengan nama barang *Slide* merupakan transaksi tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan TAYL, aset tersebut tidak diketahui keberadaannya dan hasil dari penelusuran bahwa kondisi barang tersebut sudah rusak dan tidak digunakan lagi, sesuai dengan Surat Keterangan KPB Nomor 4/1880/UM.03.04/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

d. Ditjen Binwasnaker sebesar Rp12.300.000

Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp12.300.000 merupakan transaksi penghentian aset dikarenakan kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Ditjen Binwasnaker dan K3 sehingga perlu dilakukan penghentian aset dari penggunaan. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Seditjen Binwasnaker dan K3 Nomor:

1. Nomor 5/16/KU.07.04/I/2026 tanggal 25 Januari 2026 senilai Rp300.000 berupa 3 buah DVD (Video) pada anak satker Ditjen Binwasnaker dan K3 (002).

2. Nomor 5/37/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 senilai Rp12.000.000 merupakan transaksi penghentian aset yang berasal dari transfer Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, dikarenakan kondisi rusak berat.

e. Ditjen Binalavotas sebesar Rp260.000

Penghentian Aset Dari Pengguna sebesar Rp260.000 terdapat pada satker BBPVP Bandung sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-1/371/UM.03.03/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 berupa *Monografi*.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Rp271.054.960.523

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp271.054.960.523 dan Rp498.536.196.333.

Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 286 Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	2.351.448.704	-	2.351.448.704	-
Ditjen Binwasnaker & K3	-	41.071.138.128	(41.071.138.128)	(100,00)
Ditjen Binalavotas	268.703.511.819	457.465.058.205	(188.761.546.386)	(41,26)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	271.054.960.523	498.536.196.333	(227.481.235.810)	(45,63)

Tabel 287 Mutasi KDP

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024	Rp 498.536.196.333
Mutasi Tambah	
Saldo Awal KDP	Rp 26.373.452.604
Perolehan/Penambahan KDP	Rp 1.281.802.065
Pengembangan KDP	Rp 37.486.958.653
Mutasi Kurang	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp (220.575.403.717)
Pengembangan Melalui KDP	Rp (44.998.838.385)
Koreksi Pencatatan KDP	Rp (26.438.755.304)
Penghentian Sementara KDP	Rp (393.752.000)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	Rp (216.699.726)
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	Rp 271.054.960.523

Mutasi Tambah:

- Saldo Awal KDP sebesar Rp26.373.452.604

Tabel 288 Koreksi Saldo Awal KDP

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	442.197.300
Sekretariat Jenderal			442.197.300
026.13	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	25.931.255.304
Ditjen Binalavotas			25.931.255.304
Perolehan/Penambahan KDP			26.373.452.604

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp442.197.300

Saldo Awal sebesar Rp442.197.300 terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan berupa koreksi susulan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 289 Koreksi Saldo Awal KDP Pada Politeknik Ketenagakerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya	198.927.000
Bangunan Lantai Jemur Permanen	144.780.000
Perencanaan Gedung Lab Permanen	98.490.300
Konstruksi Dalam Pengerjaan	442.197.300

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp25.931.255.304

Saldo Awal KDP sebesar Rp25.931.255.304 terdapat pada Direktorat Lemlatvok sesuai dengan Surat Keterangan 2/3226/LP.01/XII/2025 tanggal 31 Desember dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan BLK Prabumulih 2021.
- 2) Pengadaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan BLK UPTP Prabumulih 2022 diantaranya:
 - 1) *Main Gate* dan Pos Jaga BLK Prabumulih.
 - 2) Pagar Keliling Area Lahan BLK Prabumulih.
 - 3) Jalan Kawasan BLK Prabumulih.
 - 4) *Drainase* Kawasan dan Dinding Penahan Tanah BLK Prabumulih.
 - 5) Gedung Kantor BLK dan LSP BLK Prabumulih.
 - 6) Gedung Kios 3 in 1 BLK Prabumulih Workshop Type A BLK Prabumulih.
 - 7) *Powerhouse* BLK Prabumulih.
 - 8) Pos Jaga Belakang BLK Prabumulih.

2. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp1.281.802.065

Tabel 290 Perolehan/Penambahan KDP

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	577.922.065
Sekretariat Jenderal			577.922.065
026.04	690633	BPKK Kendari	196.380.000
Ditjen Binapenta dan PKK			196.380.000
026.13	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	507.500.000
Ditjen Binalavotas			507.500.000
Perolehan/Penambahan KDP			1.281.802.065

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp577.922.065

Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp577.922.065 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp196.380.000

Pengembangan melalui KDP sebesar Rp196.380.000 dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan BMN Nomor 3.9/610/UM.03/VI/2025. Pekerjaan ini berupa pemasangan plafon kantor yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruangan. Meskipun bukan berupa penggantian komponen lama, transaksi ini diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada aplikasi SAKTI.

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp507.500.000

Perolehan/penambahan KDP sebesar Rp507.500.000 terdapat pada Direktorat Bina Lemlatvok sesuai dengan Surat Keterangan Nomor SP.74/PB-ECAT/KPV/PPK.1/XI/2024 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pengadaan Peralatan Pelatihan UPTP Kejuruan *Woodworking* Satpel Jayapura.

3. Pengembangan KDP sebesar Rp37.486.958.653 terdiri dari:

Tabel 291 Pengembangan KDP

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	2.108.178.404
Sekretariat Jenderal			2.108.178.404
026.08	350079	Balai K3 Bandung	22.129.482
	350083	Balai K3 Samarinda	1.108.504.320
	350084	Balai K3 Jakarta	42.182.565
Ditjen Binwasnaker dan K3			1.172.816.367
	051102	BPVP Banyuwangi	24.195.542.059
	065106	BPVP Banda Aceh	1.280.675.923
	089378	BPVP Padang	2.305.480.184
	219228	BPVP Ambon	35.949.400
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	6.388.316.316
Ditjen Binalavotas			34.205.963.882
Pengembangan KDP			37.486.958.653

a. Sekretariat jenderal sebesar Rp2.108.178.404

Pengembangan KDP sebesar Rp2.108.178.404 pada Sekretariat Jenderal terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan berupa Bangunan Gedung *Workshop* K3.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.172.816.367 terdapat pada:

- 1) Balai K3 Bandung berupa penambahan nilai pada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 sebesar Rp22.129.482 untuk penyelesaian pengerjaan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2, yang berasal dari sisa pembayaran KDP tahun 2024 (Kas RPATA) dengan rincian pekerjaan:

Tabel 292 Pengembangan KDP pada Balai K3 Bandung

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	PT Aryo Prima Konsultan	Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi	12.667.320
2	PT Prisma Karya Utama	Jasa Konsultasi Pengawasan	475.298
5	PT Triharja Jasa Utama	Pelaksana Kontruksi Renovasi	8.986.864
TOTAL			22.129.482

2) Balai K3 Samarinda sebesar Rp1.108.504.320

Pengembangan KDP sebesar Rp1.108.504.320 untuk penyelesaian pengerjaan Gedung Laboratorium K3 (bangunan dengan NUP baru) yang berasal dari sisa pembayaran KDP tahun 2024 (Kas RPATA CV. JF Karya Persada - Paket pekerjaan konstruksi lanjutan KDP gedung laboratorium K3).

3) Balai Besar K3 Jakarta senilai Rp42.182.565

Pengembangan KDP sebesar Rp42.182.565 untuk penyelesaian pengerjaan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 senilai Rp42.182.565 untuk

penyelesaian pengerjaan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5 yang berasal dari sisa pembayaran KDP tahun 2024 (Kas RPATA) PT. Dirgamaya Daya Dharmalaksana - Pekerjaan Rehabilitasi Gedung TUK Tahap II Balai Besar K3 Jakarta (Pelapisan *Façade*).

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp34.205.963.882

1) BPVP Banyuwangi

Pengembangan KDP sebesar Rp24.195.542.059 dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan *Austria International Project* GmbH. Transaksi ini mencakup Proyek Pengadaan Peralatan, Pekerjaan Konstruksi, serta Jasa Pelatihan dan Pendampingan Teknis, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Nomor SP.22/04/UM.01.04/VII/2022 tanggal 9 Juli 2025 dan Surat Keterangan Nomor 2.22/37/KU.03/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025.

2) BPVP Banda Aceh

Pengembangan KDP sebesar Rp1.280.675.923 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/665/UM.02.01/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 berupa pengerjaan gedung dan bangunan.

3) BPVP Padang

Pengembangan KDP sebesar Rp2.305.480.184 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.9/105/KU.02.01/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 berupa pembayaran termin final pembangunan bangunan gedung kantor utama.

4) BPVP Ambon

Pengembangan KDP sebesar Rp35.949.400 untuk bangunan kesehatan lainnya (Gedung *Talent Corner*) sesuai berita acara sebagai berikut:

Tabel 293 Pengembangan KDP pada BPVP Ambon

BAST	Tanggal	Nilai (Rp)
Nomor 2.15/14/UM.02/I/2025	05/01/2025	32.354.000
Nomor 2.15/BAST.75/UM.02/I/2025	05/01/2025	360.000
Nomor 2.15/06/UM.02/I/2025	05/01/2025	3.235.400
Total		35.949.400

5) Direktorat Bina Lemlatvok

Pengembangan KDP sebesar Rp6.388.316.316 sesuai dengan Surat Nomor SP.04/PK/KPV/PPK.1/IX/202 dan SP.01/PK/KPV/PPK.1/IX/2024 tanggal 08 dan 14 Januari 2025 berupa pengadaan pembangunan BLK Sampit dan pembangunan Fisik BLK Tanah Bumbu.

Mutasi Kurang:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp220.575.403.717

Tabel 294 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	350083	Balai K3 Samarinda	4.865.303.800
Ditjen Binwasnaker dan K3			4.865.303.800
026.13	051102	BPVP Banyuwangi	187.314.790.769
	065106	BPVP Banda Aceh	4.391.082.244
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	24.004.226.904
Ditjen Binalavotas			215.710.099.917
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP			220.575.403.717

a. Ditjen Binwanaker sebesar Rp4.865.303.800

Penyelesaian Pembangunan melalui KDP senilai Rp4.865.303.800 merupakan Pendefinitifan Gedung Laboratorium Permanen hasil pembangunan KDP tahun 2024 terbagi menjadi dua transaksi dikarenakan pembagian NUP pada sistem. Dari total nilai kontrak sebesar Rp34.979.668.917, dilakukan transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp4.865.303.800 pada NUP 6, serta Pengembangan dengan KDP senilai Rp30.114.365.117 pada NUP 7.

Transaksi ini dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang berasal dari:

- 1) PT. Ganesha Pratama Consultant sesuai Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3 Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025.
- 2) CV. JF Karya Persada sesuai Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3 Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp215.710.099.917

1) BPVP Banyuwangi sebesar Rp187.314.790.769

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada BPVP Banyuwangi sebesar Rp187.314.790.769 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor SP.22/04/UM.01.04/VII/2022 tanggal 28 November 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan.

2) BPVP Banda Aceh sebesar Rp4.391.082.244

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp4.391.082.244 terdapat pada BPVP Banda Aceh sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.8/665/UM.02.01/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen.

3) Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp24.004.226.904

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp24.004.226.904 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/3226/LP.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Workshop type A* BLK Prabumulih.
- b) Pos jaga belakang BLK Prabumulih.
- c) Pagar keliling area lahan BLK Prabumulih.
- d) *Main gate* dan pos jaga BLK Prabumulih.
- e) Pengadaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan BLK UPTP Prabumulih 2022.
- f) Jalan Kawasan BLK Prabumulih.
- g) *Drainase* Kawasan dan Dinding Penahan Tanah BLK Prabumulih.
- h) Gedung Kantor BLK dan LSP BLK Prabumulih.
- i) Gedung Kios 3 in 1 BLK Prabumulih.

j) *Powerhouse* BLK Prabumulih.

2. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp44.998.838.385 pada:

Tabel 295 Pengembangan Melalui KDP

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	577.922.065
Sekretariat Jenderal			577.922.065
026.04	690633	BPKK Kendari	196.380.000
Ditjen Binapenta dan PKK			196.380.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	3.688.519.627
	350083	Balai K3 Samarinda	30.114.365.117
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	3.575.765.951
Ditjen Binwasnaker dan K3			37.378.650.695
026.13	089378	BPVP Ambon	6.128.525.625
	219228	BPVP Padang	717.360.000
Ditjen Binalavotas			6.845.885.625
Pengembangan Melalui KDP			44.998.838.385

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp577.922.065

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp577.922.065 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa Gedung Kantor Permanen dan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp196.380.000

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp196.380.000 terdapat pada BPKK Kendari berupa pemasangan plafond kantor BPKK Kendari sesuai Surat Keterangan Pencatatan Barang Milik Negara Nomor 3.9/610/UM.03/VI/2025.

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp37.378.650.695

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp3.688.519.627

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp3.688.519.627 merupakan penambahan nilai pada Kantor Permanen NUP 1 yang berasal dari Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan NUP 2 sesuai Surat Keterangan Pengembangan dengan KDP Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Bandung Nomor 5.3/11a/UM.03.04/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.

2) Balai K3 Samarinda sebesar Rp30.114.365.117

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp30.114.365.117 merupakan penambahan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 yang berasal dari proses pembangunan melalui KDP NUP 7 pada tahun 2024. Transaksi ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang berasal dari:

- PT. Ganesha Pratama Consultant sesuai Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3 Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025.
- CV. JF Karya Persada sesuai Berita Acara Serah Terima Lanjutan Pengawasan KDP Gedung Laboratorium K3 Nomor 5.4/007/UM.02.04/II/2025 tanggal 15 Februari 2025.

3) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp3.575.765.951

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp3.575.765.951 merupakan penambahan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5 yang berasal dari Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan NUP 2 sesuai Surat Keterangan Pengembangan dengan KDP Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar K3 Jakarta Nomor 5.5/127/UM.03.04/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025.

d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp6.845.885.625

1) BPVP Padang

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp6.128.525.625 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.9/105/KU.02.01/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 berupa pembangunan lanjutan gedung kantor utama.

2) BPVP Ambon

Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp717.360.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Kontrak Nomor: 2.15/SPK.75/UM.02/XI/2024 dan Kontrak No. 2.15/1613/UM.02/XI/2024 tanggal 11 November 2024 berupa Bangunan Kesehatan Lainnya (Gedung *Talent Corner*).

3. Penghentian Sementara KDP sebesar Rp393.752.000

Tabel 296 Penghentian Sementara KDP

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.13	089378	BPVP Padang	121.752.000
	452595	BPVP Ternate	272.000.000
Ditjen Binalavotas			393.752.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP			393.752.000

Penghentian sementara KDP sebesar Rp393.752.000 terdapat pada Ditjen Binalavotas yang terdiri dari:

a. BPVP Padang

Penghentian sementara KDP sebesar Rp121.752.000 terdapat pada Satuan Kerja BPVP Padang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.9/69/UM.03/XI/2025 tanggal 14 November 2025 berupa Pembangunan Pendopo/Aula Terbuka.

b. BPVP Ternate

Penghentian sementara KDP sebesar Rp272.000.000 terdapat pada Satuan Kerja BPVP Ternate sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.14/208/UM.03.00/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 berupa *Land Clearing*.

4. Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp26.438.755.304

Koreksi pencatatan KDP sebesar Rp26.438.755.304 terdapat pada Direktorat Bina Lemlatvok sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2/ /LP.01/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pengadaan Peralatan pelatihan UTP Kejuruan *Woodworking* BPVP Jayapura.

5. Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp216.699.726

a. Politeknik Ketenagakerjaan

Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp198.927.000 pada Politeknik Ketenagakerjaan merupakan hasil reklasifikasi atas pekerjaan pembangunan kanopi

gedung baru (Gedung PAP) berdasarkan kontrak Nomor 1/1922/SPK/XI/2022 menjadi penambahan nilai aset Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp198.927.000 (NUP 2).

b. BBPVP Semarang

Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp17.772.726 pada BBPVP Semarang Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.6/935/UM.03.03/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 berupa Gedung Dan Bangunan Dalam Pengerjaan.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

(Rp3.718.688.264.432)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp3.718.688.264.432) dan (Rp3.435.720.062.419).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 297 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.632.250.069.370	(2.869.094.839.908)	763.155.229.462
Gedung dan Bangunan	3.785.415.290.937	(778.923.848.542)	3.006.491.442.395
Jalan dan Jembatan	63.491.528.009	(47.772.183.657)	15.719.344.352
Irigasi	39.937.527.392	(13.452.600.506)	26.484.926.886
Jaringan	23.211.592.131	(9.158.208.104)	14.053.384.027
Aset Tetap Lainnya	17.035.446.536	(286.583.715)	16.748.862.821
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.561.341.454.375	(3.718.688.264.432)	3.842.653.189.943

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp680.646.667 dan Rp739.166.667.

Rincian Piutang Jangka Panjang sebagai Berikut:

Tabel 298 Rincian Piutang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Piutang Jangka Panjang

Rp680.646.667

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1.471.897.354	1.467.897.354	4.000.000	0,27
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.467.917.354)	(1.467.897.354)	(20.000)	0,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	3.980.000	-	3.980.000	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.353.333.334	1.478.333.334	(125.000.000)	(8,46)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(676.666.667)	(739.166.667)	62.500.000	(8,46)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (NETTO)	676.666.667	739.166.667	(62.500.000)	(8,46)
	680.646.667	739.166.667	(58.520.000)	(7,92)

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan

TP/TGR

Rp1.471.897.354

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.471.897.354 dan Rp1.467.897.354.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 299 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Es1	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binapenta dan PKK	4.000.000	-	4.000.000	-
Ditjen Binalavotas	1.467.897.354	1.467.897.354	-	-
Jumlah	1.471.897.354	1.467.897.354	4.000.000	0,27

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.471.897.354 terdapat pada :

1. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp4.000.000

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Ditjen Binapenta dan PKK berasal dari kehilangan sepeda motor berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Nomor R-6/33/PW.10.00/IX/2025 tanggal 4 September 2025 sebesar Rp20.000.000.

Piutang tersebut terdiri atas:

- Honda Vario Tahun 2016 Nomor Polisi B 3468 SQC atas nama Rsm sebesar Rp9.000.000.
- Honda Vario Nomor Polisi B 3351 SQF atas nama SYF sebesar Rp11.000.000.

Dari total piutang tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp16.000.000, sehingga sisa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Ditjen Binapenta dan PKK per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.000.000. Adapun rincian jumlah piutang yang telah disetor sebagai berikut:

Tabel 300 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Pada Ditjen Binapenta dan PKK

No	Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Setoran			Saldo Piutang 31 Desember 2025 (Rp)
			Tanggal	NTPN	Nilai Setoran (Rp)	
1	Rsm	9.000.000	30/09/2025	1E6126U8F87C125V	1.000.000	4.000.000
			13/10/2025	81A9861QVDNEJA8G	1.000.000	
			20/10/2025	0CD6161QVDNLB1DE	1.000.000	
			03/11/2025	5E9AA1JNG8U6CF67	1.000.000	
			04/12/2025	CB6DC0NA0EEQLS88	1.000.000	
2	SYF	11.000.000	03/11/2025	D1C537QLV2UT7H2E	11.000.000	-
Total		20.000.000				4.000.000

2. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.467.897.354

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.467.897.354 terdapat pada BBPVP Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) a.n. Suryansyah sebesar Rp1.365.397.354.

Sesuai temuan BPK dalam rangka pemeriksaan di BBPLK Bekasi yang dituangkan pada LHP Nomor 18/HP/XVI/01/2013 tanggal 17 Januari 2013 terdapat temuan yang merupakan kelalaian Bendahara Pengeluaran antara lain:

- 1) Terdapat pertanggungjawaban ganda terhadap honorarium pengajar Politeknik Negeri Jakarta, honorarium pengajar pelatihan berbasis kompetensi, diklat dasar calon instruktur dan Up Grading di BBPLK Bekasi sebesar Rp926.550.000 – pajak sebesar Rp29.743.750 = Rp896.806.250.
- 2) Pengelolaan kas bendahara pengeluaran Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK Bekasi tidak memadai sebesar Rp562.091.104.
- 3) Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM Tahap I tanggal 25 Februari 2013 a.n. Suriyansah dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 2218 di Desa Keluaran Selat Hulu Kab Kapuas Prov Kalimantan Tengah sebesar Rp896.806.250. SKTJM Tahap II tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp562.091.104 dengan kesanggupan angsuran sebesar Rp1.000.000 setiap bulannya.
- 4) Tidak ada lagi setoran pengembalian atas piutang tersebut oleh debitur sejak awal tahun 2021 yang disebabkan debitur meninggal dunia pada bulan Desember 2020.
- 5) Berdasarkan laporan hasil kajian Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan PDTT Tahun 2011 dan 2012 mengenai perkembangan tindak lanjut kerugian negara yang telah dilaporkan secara berkala, bahwa hasil pembahasan dan pengumpulan dokumen serta penjelasan dari pihak terkait diperoleh fakta bahwa istri dan ahli waris yang bersangkutan tidak mampu untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) karena ketidakmampuan dari segi ekonomi keluarga berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat.
- 6) Dari penyeteroran terakhir yang dilakukan pada bulan Desember 2020, total temuan yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp93.500.000 dan sampai saat ini belum ada penyeteroran lagi (pasif selama 12 bulan) walaupun sisa temuan masih sangat banyak yaitu sebesar Rp1.365.397.354. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai temuan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan tersebut diusulkan sebagai temuan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
- 7) Sesuai dengan surat keputusan BPK RI Nomor 187.TP.09-2023/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Almarhum Saudara Suriyansyah Bendahara Pengeluaran Balai Besar Latihan Kerja Negeri Cevest Bekasi Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2011 atau Ahli Warisnya, Surat BPK RI Nomor 36/S/II/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Pembebanan Kerugian Negara, Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor:

R-M/161/KU.06/IX/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Penghapusan Perbendaharaan pada Kementerian Ketenagakerjaan kepada Kementerian Keuangan.

- b. Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi a.n. Thamrin sebesar Rp102.500.000
- 1) Sesuai dengan temuan BPK Nomor: 25/Sub-Tim PDTT/Binalavotas/11/2012 Tanggal 19 November 2012 bahwa pendapatan atas penggunaan gedung KITCC Ciracas tidak dilaporkan dan tidak disetorkan sebesar Rp117.500.000.
 - 2) Pada tahun 2011 BBPLK Bekasi merupakan satker BLU dimana penggunaan uang yang diperoleh melalui PNPB dapat langsung digunakan kemudian baru disahkan oleh KPPN.
 - 3) Pada tahun 2011 terdapat kerjasama antara BBPLK Bekasi dengan PT. VIP yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas gedung KITCC Ciracas. PT. VIP telah membayarkan uang sewa gedung KITCC Ciracas sebesar Rp117.500.000,00 yang diterimakan oleh kasubbag umum dan kepegawaian (Drs. Thamrin, MM).
 - 4) Uang sewa tersebut yang seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada bendahara penerimaan BBPLK Bekasi, tetapi tidak dilaporkan. Menurut Drs. Thamrin, MM. Uang tersebut langsung digunakan untuk pemeliharaan (pembangunan jalan disekitar gedung KITCC Ciracas), pengeluaran operasional dan kebersihan. Pada saat ini telah diterbitkan surat tagihan kepada Drs. Thamrin, MM (Kasubbag Umum dan Kepegawaian sebagai pengganti SPKMKNN).
 - 5) Surat tagihan tersebut berupa surat teguran dengan dua tahap. Tahap I dengan Nomor: surat: B.320/BBPLK-BKS/IV/2017 pada bulan April 2017 dan tahap II dengan Nomor: surat: B.825/BBPLK-BKS/VII/2019 pada Tanggal 29 Juli 2019.
 - 6) Telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas nama Thamrin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 301 Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi a.n. Thamrin

Piutang TGR		Rp	117.500.000,00
Setoran Tahun 2022-2023 (mutasi kurang)			
Tgl	NTPN	Setoran	
31/08/22	DFE1E0N9V15J31OU	Rp	5.000.000,00
27/10/22	B362E2G4V7G8DQCK	Rp	5.000.000,00
17/01/23	2B4107QLUFDFK25I	Rp	5.000.000,00
Jumlah		Rp	15.000.000,00
Saldo Piutang Tagihan TGR 31 Desember 2024		Rp	102.500.000,00

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Tagihan TP/TGR
(Rp1.467.917.354)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp1.467.917.354) dan (Rp1.467.897.354).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 302 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR

Debitur	Piutang TGR (Rp)	Kategori	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan (Rp)
Rsm	4.000.000	Lancar	0,50%	(20.000)
Suriyansyah	1.365.397.354	Macet	100,00%	(1.365.397.354)
Thamrin	102.500.000	Macet	100,00%	(102.500.000)
Jumlah	1.471.897.354			(1.467.917.354)

C.3.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang
Lainnya sebesar
Rp1.353.333.334

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.353.333.334 dan Rp1.478.333.334.

Piutang Jangka Panjang Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hasil migrasi dari Piutang Bagian Lancer TP/TGR ke Piutang Jangka Panjang Lainnya di aplikasi SAKTI Modul Piutang karena piutang Ditjen Binwasnaker dan K3 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga.

Piutang Ditjen Binwasnaker dan K3 berasal dari Temuan BPK atas Pengadaan Sistem Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2011 oleh PT. Multidata Rancana Prima (MRP) sesuai LHP Nomor 47/HP/XVI/05/2012 tanggal 14 Mei 2012.

1. Temuan Pemeriksaan

Kelebihan Pembayaran yang Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak, Pemahalan Harga, Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pembayaran Ganda sebesar Rp2.070.270.658 pada Pekerjaan Sistem Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. Rekomendasi BPK

- Menginstruksikan KPA/PPK pada Ditjen PPK untuk menarik, menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan copy bukti setor kepada BPK atas kelebihan pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, pemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran ganda biaya langsung personil yang dilaksanakan oleh PT. Multidata Rancana Prima sebesar Rp2.070.270.658.
- Memperingatkan KPA, PPK Panitia PBJ dan penerima barang yang telah lalai menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tindak Lanjut

- a. Menakertrans melalui surat Nomor: B.131/MEN/SJ-KU/VIII/2012 Tanggal 9 Juli 2012 perihal kelebihan pembayaran yang tidak sesuai spesifik kontrak, pemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran pada Sistem Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan, memerintahkan untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tersebut dan memperingatkan KPA, PPK dan panitia penerima barang yang telah lalai melaksanakan kewajibannya.
- b. PPK Program PTKPSPK (Ditjen PPK melalui surat Nomor: B.781/PPTKPSPK/VII/2012 Tanggal 9 Juli 2012 telah meminta kepada Direktur Utama PT. Multidata Rancana Prima untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan copy bukti setor ke BPK.
- c. PT. Multidata Rancana Prima telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKN pada Tanggal 29 Oktober 2012 dan telah melakukan penyetoran sebesar Rp119.300.000 yaitu melalui NTPN 1000030005140207 tanggal 13 September 2012 sebesar Rp69.300.000 dan NTPN 0803090408051306 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp50.000.000,
- d. Karena penyetoran ke Kas Negara tidak dilakukan sesuai jadwal, maka kemudian diberikan teguran kepada PT. Multidata Rancana Prima untuk menyelesaikan sisa kerugian Negara sebanyak 3 (tiga kali sebagai berikut:
 - 1) Surat Nomor: B.310/SES-PPK/XI/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Batas Pembayaran Denda.
 - 2) Surat Nomor: B.43/SES-PPK/II/2015 Tanggal 20 Februari 2015 Perihal Pembayaran Kerugian Negara.
 - 3) Surat Nomor: B.111/SETBINWASK3/XI/2016 Tanggal 11 Nopember 2016 Perihal Pembayaran Kerugian Negara.

Tindak Lanjut yang Dilakukan Tahun 2020

1. Ditjen Binwasnaker dan K3 bermaksud status piutang ditingkatkan kualitasnya menjadi macet karena tidak ada pembayaran sampai dengan saat ini, maka kami telah membuat surat teguran kembali kepada PT Multidata Rancana Prima dengan Nomor: 5/299/KU.06/I/2020 Tanggal 16 Juni 2020 untuk menyelesaikan sisa kerugian Negara.

Pada Tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Kemenkumham dan LKPP untuk melacak keberadaan dan status PT dimaksud, dari hasil penelusuran dengan melakukan koordinasi dengan Instansi tersebut diatas, diketahui sebagai berikut:

 - a. Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan SPT Nomor: 5/395/KU.02/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020 Pegawai kami mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM tetapi karena dalam kondisi pandemi Covid-19 kami tidak bisa bertemu langsung dan hanya diperbolehkan berkomunikasi melalui Whatsapp dengan hasil bahwa PT tersebut sudah tidak ada dalam database.
 - b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sesuai dengan SPT Nomor: 5/396/KU.02/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020 Pegawai kami mendatangi Kantor LKPP tetapi karena dalam kondisi pandemi Covid-19 kami tidak bisa bertemu langsung dan hanya dapat mengakses data melalui Website dengan hasil bahwa PT. M RP tidak ditemukan datanya.

2. Berdasarkan Hasil Rapat Pemantauan Data TLHP BPK RI yang dilakukan pada semester I dan triwulan III tahun 2020 dengan Tim Pemantauan BPK RI di ruang rapat Itjen bahwa secara pemantauan sudah dianggap selesai tetapi secara kerugian Negara karena sudah penetapan piutang maka pengurusan piutang Negara agar diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KPKNL-DJKN).
3. Pada Penyusunan LK II TA 2020 di Green Peak, Ditjen APK juga mengusulkan Tim TPKN yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar berkoordinasi dengan KPKNL dan segera menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan untuk dilakukan pengurusan dan penagihannya. Apabila upaya pengurusan yang dilakukan PUPN telah maksimal dan telah diterbitkannya Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), maka proses selanjutnya adalah penghapusan yang dapat dilakukan dengan cara penghapusan bersyarat dan/atau penghapusan mutlak.

Tindak Lanjut yang Dilakukan Tahun 2022

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mengadakan beberapa kali pertemuan rapat dengan Komisaris PT. Multidata Rancana Prima untuk membahas tindak lanjut dari Piutang PT. Multidata Rancana Prima:

1. Surat Undangan perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara atas Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 s.d. 2012 dengan Nomor: Surat: 5/280/KU.06/VI/2022 Tanggal 08 Juni 2022.
2. Surat Undangan perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara atas Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 s.d. 2012 dengan Nomor: Surat: 5/361/KU.06/VII/2022 Tanggal 13 Juli 2022.
3. Surat Undangan perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara atas Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 s.d. 2012 dengan Nomor: Surat: 5/510/KU.06/IX/2022 Tanggal 22 September 2022.
4. Dari hasil pembahasan rapat yang di dampingi oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan akan diterbitkan kembali Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKN) yang mencantumkan nilai jaminan atas sisa TGR yang harus dibayarkan oleh PT. Multidata Rancana Prima. Adapun jaminan yang disampaikan sampai dengan Laporan Keuangan Triwulan III ini sebanyak 3 bidang tanah yang disertai sertifikat (foto terlampir).
5. Bagian keuangan akan melakukan penelusuran atas jaminan tersebut untuk mengetahui letak / lokasi serta harga perkiraan.
6. Dari beberapa hasil pertemuan rapat tersebut, PT. Multidata Rancana Prima melakukan pembayaran angsuran piutang sebagai bukti keseriusan dalam menyelesaikan piutang dimaksud melalui NTPN BD33E61QUHGLH0LU tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp10.970.658.
7. Surat Tugas Nomor: 5/950/KU.02/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022 perihal Percepatan penyelesaian TLHP BPK atas Pengadaan Sistem Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilakukan PT. Multidata Rancana Prima. Tim TLHP Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan pemeriksaan terhadap daftar jaminan untuk penerbitan Kembali Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKN pada Tanggal 26-28 Desember ke Kota Palangkaraya Provinsi

Kalimantan Tengah dengan hasil bahwa Surat Tanah yang akan menjadi jaminan SPKMKN telah sesuai dengan surat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN Kalimantan Tengah). Berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: berkas: 23512/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa terdapat sebidang tanah yang terletak di Menteng Kecamatan Jekan Raya dengan NIB. 15010302.08411 telah diterbitkan Sertifikat dengan nama pemegang Doddy Nasiruddin Ahmad QQ PT. Multidata Rencana Prima dengan status hak guna bangunan dengan luas 1227 m2.

Tindak Lanjut yang Dilakukan Tahun 2023

1. Ditjen Binwasnaker dan K3 mengadakan rapat terkait penerbitan SPKMKN serta penyerahan Jaminan atas penutupan piutang PT. Multidata Rancana Prima melalui surat Undangan Rapat Nomor: 5/197/KU.06/IV/2023 Tanggal 06 April 2023.
2. Isi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKN) Tanggal 10 April 2023 menyatakan bahwa Direktur Utama PT. Multidata Rancana Prima, Bapak Doddy Nasiruddin Ahmad menyanggupi akan membayar piutang tersebut dengan menyetorkan ke Kas Negara di Bank HIMBARA dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak menandatangani SPKMKN secara angsuran 24 (dua puluh empat) kali angsuran @Rp80.833.333 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) rupiah.
3. Jaminan yang tertera pada SPKMKN PT. Multidata Rancana Prima yaitu bukti kepemilikan Tanah (status Hak Guna Bangunan), Luas 1.227M2 (seribu dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) lokasi di provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng dengan bukti pemilikan sertifikat Nomor: 713.
4. Berdasarkan Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Erick, Frizal, Win & Rekan Nomor 00585/2.0130-01/PI/05/0086/1/XI/2019 tanggal 29 November 2019 atas Jaminan PT. Multidata Rancana Prima menginformasikan bahwa Nilai Pasar Jaminan Tanah tersebut sebesar Rp1.227.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta) Rupiah.
5. PT. Multidata Rancana Prima melakukan pembayaran angsuran pertamanya sejak SPKMKN tersebut diterbitkan, berikut rinciannya:

Tabel 303 Pembayaran PT Multidata Rancana Prima
Piutang jangka Panjang Lainnya (Tindak Lanjut Pada Tahun 2023)

No.	Uraian	No. NTPN	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	SSBP	6BD7A61QUQKR3SL0	31-MAY-23	80.833.333
2.	SSBP	CDFFF0N9VRIF63LI	30-SEP-23	25.000.000
3.	SSBP	698287QLUFVJFR66/1	30-SEP-23	30.833.333
4.	SSBP	E866E61QUR3PP98I	30-OCT-23	25.000.000
5.	SSBP	721241JNFMAROGB3	30-NOV-23	25.000.000
JUMLAH				186.666.666

Tindak Lanjut yang Dilakukan Tahun 2024

PT Multidata Rancana Prima masih melakukan angsuran pembayarannya dengan rincian berikut ini:

Tabel 304 Pembayaran PT Multidata Rancana Prima
Pada Piutang jangka Panjang Lainnya (Tindak Lanjut Pada Tahun 2024)

No.	Uraian	No. NTPN	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	SSBP	7C2807QLUONM051Q	23 Januari 2024	25.000.000
2.	SSBP	B06452G4VPCERMTH	28 Februari 2024	25.000.000
3.	SSBP	C49863CIFK4N36CA	24 'April 2024	25.000.000
4.	SSBP	7A7F855DF9CI0KP6	27 Mei 2024	25.000.000
5.	SSBP	71C4548VVET2PIML	26 Juni 2024	25.000.000
6.	SSBP	91B7E1JNFV8TEAAE	30 Juli 2024	25.000.000
7.	SSBP	6F8E56U8EUQ9EUQM	27 Agustus 2024	25.000.000
8.	SSBP	0A81C3CIFKJPKUAI	30 September 2024	25.000.000
9.	SSBP	36F6F7QLUPL2RUO	28 Oktober 2024	25.000.000
10.	SSBP	9E2FF7QLUPLJ01TB	28 Nopember 2024	25.000.000
11.	SSBP	EC7003CIFKSLBG4R	27 Desember 2024	25.000.000
JUMLAH				275.000.000

Tindak Lanjut yang Dilakukan Tahun 2025

Pada tahun 2025, PT MRP telah melakukan penyetoran sebagai berikut:

Tabel 305 Pembayaran PT Multidata Rancana Prima
Pada Piutang jangka Panjang Lainnya (Tindak Lanjut Pada Tahun 2025)

No.	Uraian	No. NTPN	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	SSBP	9969F1JNG83FKO69/1	28-FEB-25	25.000.000
2.	SSBP	375CE55DFIJ74OCI/1	30-APR-25	25.000.000
3.	SSBP	08E5148VVO3SHUOP/1	30-MAY-25	25.000.000
4.	SSBP	ADED861QVD90LNJ9	'01-JUN-25	25.000.000
5.	SSBP	967827QLV2MGLTQL	25 Agustus 2025	25.000.000
JUMLAH				125.000.000

Sampai dengan 31 Desember 2025, progress penyelesaian piutang PT MRP sebagai berikut:

Tabel 306 Pembayaran PT Multidata Rancana Prima
Pada Piutang jangka Panjang Lainnya (Per 31 Desember 2025)

Piutang Awal (2012)	Rp	2.070.270.658,00
Setoran:		
Tahun 2012	Rp	69.300.000,00
Tahun 2014	Rp	50.000.000,00
Tahun 2022	Rp	10.970.658,00
Tahun 2023	Rp	186.666.666,00
Tahun 2024	Rp	275.000.000,00
Tahun 2025	Rp	125.000.000,00
Saldo piutang PT.MRP per 31 Desember 2025	Rp	1.353.333.334,00

Pada Tahun 2025 Ditjen Binwasnaker telah melakukan rapat pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara berdasarkan Surat Undangan Nomor B-5/40/KU.06/X/2025 yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2025 bersama PT MRP. Pada rapat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa:

- 1) PT. MRP akan melanjutkan penyelesaian pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran secara angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara.
- 2) Selama periode pembayaran angsuran tersebut, PT. MRP tetap menunggu proses pelelangan atau penjualan aset jaminan. Hasil pelelangan atau penjualan aset dimaksud akan diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan kewajiban dan digunakan untuk mempercepat penyelesaian sisa kewajiban yang masih terutang.

C.3.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp676.666.667) dan (Rp739.166.667).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 307 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Debitur	Piutang TGR (Rp)	Kategori	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan (Rp)
PT. MRP	1.353.333.334	Ragu-Ragu	50,00%	(676.666.667)
Jumlah	1.353.333.334			(676.666.667)

C.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp262.197.183.304 dan Rp1.199.507.493.414.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 308 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Tak Berwujud	187.464.587.434	142.924.822.176	44.539.765.258	31,16
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	133.766.100	(133.766.100)	(100,00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	55.225.820.682	263.785.149.569	(208.559.328.887)	(79,06)
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	-	747.738.900.000	(747.738.900.000)	(100,00)
Aset Lain-lain	557.304.096.246	573.767.425.299	(16.463.329.053)	(2,87)
Jumlah	799.994.504.362	1.728.350.063.144	(928.355.558.782)	(53,71)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(537.797.321.058)	(528.842.569.730)	(8.954.751.328)	1,69
Nilai Buku Aset Lainnya	262.197.183.304	1.199.507.493.414	(937.310.310.110)	(78,14)

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp187.464.587.434

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, namun secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Nilai ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp187.464.587.434 dan Rp142.924.822.176.

Aset Tak Berwujud (ATB) menurut Akun sebagai berikut:

Tabel 309 Aset Tak Berwujud Menurut Akun

Akun	Uraian Akun	Nilai (Rp)
162151	Software	181.032.971.288
162161	Lisensi	6.265.191.800
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	166.424.346
Aset Tak Berwujud		187.464.587.434

Aset Tak Berwujud Menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 310 Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	405.024.346	4.359.101.000	(3.954.076.654)	(90,71)
Ditjen Binapenta & PKK	14.345.727.635	14.345.727.635	-	-
Ditjen Binwasnaker & K3	3.127.044.000	4.413.879.300	(1.286.835.300)	(29,15)
Barenbang	46.978.353.845	48.188.877.770	(1.210.523.925)	(2,51)
Ditjen Binalavotas	122.608.437.608	71.617.236.471	50.991.201.137	71,20
Jumlah ATB (Bruto)	187.464.587.434	142.924.822.176	44.539.765.258	31,16
Akumulasi Amortisasi	(148.045.599.783)	(112.405.697.623)	(35.639.902.160)	31,71
Nilai Buku ATB	39.418.987.651	30.519.124.553	8.899.863.098	29,16

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 311 Mutasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024		Rp 142.924.822.176
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	513.332.775
Pembelian	Rp	367.130.300
Pengembangan Melalui KDP	Rp	324.372.100
Transfer Masuk	Rp	513.332.775
Reklasifikasi Masuk	Rp	13.918.258.885
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	1.280.800.500
Perolehan Lainnya	Rp	47.412.256.998
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	Rp	(513.332.775)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(74.250.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(19.202.136.300)
Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025	Rp	187.464.587.434
Akumulasi Penyusutan	Rp	(148.045.599.783)
Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025	Rp	39.418.987.651

Mutasi Tambah:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp513.332.775

Koreksi Saldo Awal terdapat pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp513.332.775 sesuai dengan Surat Keterangan ND 2/283/UM.03.02/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp180.500.000 berupa aplikasi e-training.kemnaker.go.id dan Surat Keterangan Nomor 2/3295/UM.03.04/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025 sebesar Rp332.832.775 berupa *Software Inaskills*.

2. Pembelian sebesar Rp367.130.300

Tabel 312 Pembelian Aset Tak Berwujud

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	23.828.700
Sekretariat Jenderal			23.828.700
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	343.301.600
Barenbang Ketenagakerjaan			343.301.600
Pembelian			367.130.300

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp23.828.700

Pembelian sebesar Rp23.828.700 terdapat pada Politeknik Ketenagakerjaan Sekretariat Jenderal berupa buku digital perpustakaan.

b. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp343.301.600

Pembelian *software* sebesar Rp343.301.600 berupa pembelian 4 buah *software computer*, dengan rincian:

- 1) Penambahan Fitur Aplikasi Internal - Aplikasi Pengukuran Produktivitas Perusahaan sebesar Rp90.576.000 berdasarkan SPK Nomor 7/510/UM.02/PDTIK-PPK-SPK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025.
- 2) Penambahan Fitur Aplikasi Internal - Pengembangan Aplikasi Lapor Menteri Ketenagakerjaan sebesar Rp66.050.000 berdasarkan SPK Nomor 7/530/UM.02/PDTIK-PPK-SPK/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025.
- 3) Penambahan Fitur Aplikasi Internal-Pelatihan Peningkatan Produktivitas Nasional sebesar Rp93.906.000 berdasarkan SPK Nomor 7/465/UM.02/PDTIK-PPK-SPK/VIII/2025.
- 4) Penambahan Fitur Aplikasi Internal-Aplikasi Penghargaan Produktivitas Paramakarya sebesar Rp92.769.600 berdasarkan SPK Nomor 7/530/UM.02/PDTIK-PPK-SPK/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

3. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp324.372.100

Pengembangan Melalui KDP terdapat pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp324.372.100 (*software computer*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 313 Pengembangan Melalui KDP pada Barenbang Ketenagakerjaan

Uraian	Termin II (2025) (Rp)	Termin I (2024) (Rp)
Aplikasi WLKP	96.700.000	47.630.100
Aplikasi SISWANAKER	93.906.000	86.136.000
Total	190.606.000	133.766.100
Total (Termin I dan Termin II)		324.372.100

4. Transfer Masuk sebesar Rp513.332.775

Transfer masuk pada Barenbang Ketengakerjaan berupa *software* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp513.332.775, dengan rincian:

- a. *Software E-Training* sebesar Rp180.500.000 berdasarkan Berita Acara Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tahun Anggaran 2025 Nomor 2/1762/UM.03.01/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
- b. *Software Inaskills* sebesar Rp332.832.775 berdasarkan Berita Acara Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tahun Anggaran 2025 Nomor 2/3678/UM.03.01/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp13.845.818.885

Tabel 314 Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	72.440.000
Sekretariat Jenderal			72.440.000
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	74.250.000
Barenbang Ketenagakerjaan			74.250.000
026.13	426531	BBPVP Serang	13.771.568.885
Ditjen Binalavotas			13.771.568.885
Reklasifikasi Masuk			13.918.258.885

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp72.440.000

Reklasifikasi masuk pada Politeknik Ketengakerjaan sebesar Rp72.440.000 berupa Video *Sitplan* Denah Gedung Polteknaker dengan kode barang 8010101999 dan NUP 1 berdasarkan dokumen Surat Keterangan Reklasifikasi BMN KIB Politeknik Ketenagakerjaan Nomor 1/3917/UM.03.02/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025. Alasan Reklasifikasi Masuk karena adanya kesalahan kodefikasi pencatatan BMN pada aplikasi SAKTI dan tindak lanjut temuan ITJEN.

b. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp74.250.000

Reklasifikasi masuk pada Barenbang Ketengakerjaan berupa lisensi sebesar Rp74.250.000 berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Barenbang Ketenagakerjaan terkait Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk BMN Nomor:7/2267/UM.03.00/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 315 Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud Pada Barenbang

Semula			Menjad			Keterangan
Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Nama Barang	
8010101001	1781	Software Komputer	8010101002	845	Lisensi	Navicat Premium V12
8010101001	1782	Software Komputer	8010101002	846	Lisensi	Navicat Premium V12
8010101001	1783	Software Komputer	8010101002	847	Lisensi	Navicat Premium V12

c. BBPVP Serang sebesar Rp13.771.568.885

Reklasifikasi Masuk pada BBPVP Serang sebesar Rp13.771.568.885 terdapat pada BBPVP Serang yang semula Perangkat Komputer Lainnya menjadi *Software* Komputer sesuai Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor:2.3/174/UM.03.00/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.

6. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.280.800.500

Tabel 316 Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Aset Tak Berwujud

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	370.851.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			370.851.000
026.11	452677	Barembang Ketenagakerjaan	909.949.500
Barembang Ketenagakerjaan			909.949.500
Pengembalian Nilai Aset (Langsung)			1.280.800.500

a. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp370.851.000

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp370.851.000 terdapat pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 merupakan:

- 1) Pengembangan Sistem Teman K3 Modul Digitalisasi Sertifikasi dan Lisensi K3 di Direktorat Bina Kelembagaan senilai Rp199.800.000, sesuai resume kontrak PT. Media Base Teknologi Nomor 5/1414/KU.02.01/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
- 2) *Software Komputer* NUP 788 Aplikasi Teman K3 dilakukan pengembangan nilai aset (langsung) yaitu Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web yang dilakukan oleh Direktorat Bina Pengujian K3 melalui PT Media Base Teknologi senilai Rp171.051.000.

b. Barembang Ketenagakerjaan sebesar Rp909.949.500

- 1) Pengembangan Nilai Aset (langsung) sebesar Rp59.163.000 berupa pengembalian dari pembelian *software* computer Penambahan Fitur Aplikasi Internal - E-Pengantar Kerja berdasarkan SPK Nomor 7/511/UM.02/PDTIK-PPK-SPK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025.
- 2) Pengembalian dari Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp850.786.500 (*software*) komputer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 317 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)
Pada Barembang Ketenagakerjaan

Nomor Dokumen	Uraian BMN	Nama Sftware/ Aplikasi	Rupiah
B02257	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SSCHaHOC PHI	90.600.000
B022512	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi E-Performance	60.700.000
B02254	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	79.050.000
B022513	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi Jobfair	90.500.000
B022510	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	76.500.000
B02256	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	45.565.500
B022511	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	77.922.000
B02259	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	77.700.000
B02258	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	57.000.000
B02253	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	98.235.000
B02255	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Aplikasi SIAPkerja	97.014.000
Pengembalian Nilai Aset Langsung Pada Barembang			850.786.500

7. Perolehan Lainnya sebesar Rp47.412.256.998

Tabel 318 Perolehan Lainnya Pada Aset Tak Berwujud

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	626011	Pusat Pasar Kerja	55.461.646
Sekretariat Jenderal			55.461.646
026.13	051102	BPVP Banyuwangi	47.130.795.352
	626131	Dit. Bina Lemlatvok	226.000.000
Ditjen Binalavotas			47.356.795.352
Perolehan Lainnya			47.412.256.998

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp55.461.646

Perolehan Lainnya sebesar Rp55.461.646 pada satker Pusat Pasar Kerja berupa pembelian Aplikasi Navicat Premium 17 sebesar Rp27.749.870 dan pembelian Navicat Premium 17 Perpetual License sebesar Rp27.711.776 yang menggunakan akun belanja sewa lalu dicatat menjadi Aset Tak Berwujud Lainnya.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp47.356.795.352

1) BPVP Banyuwangi

Perolehan Lainnya sebesar Rp47.130.795.352 terdapat pada BPVP Banyuwangi berupa ATB *e-Education Component* berdasarkan Surat Ketetapan Kepala BPVP Banyuwangi Nomor 2.26/71/UM.03.00/IV/2026 tanggal 27 April 2026.

2) Dit. Bina Lemlatvok

Direktorat Lemlatvok mencatatkan perolehan lainnya senilai Rp226.000.000 untuk *Sanako Study 1200 Multimedia Language Laboratory System* pada Satpel Batam. Perolehan ini mencakup *Classroom Pack (1 Teacher & 16 Students licenses)* serta *examination modules*.

Mutasi Kurang:

1. Transfer Keluar sebesar Rp513.332.775

Transfer Keluar senilai total Rp513.332.775 dari Satker Ditjen Binalavotas dialokasikan kepada dua unit kerja, yaitu:

- Barenbang Kemnaker berupa aplikasi e-training.kemnaker.go.id berdasarkan Nota Dinas Nomor ND 2/283/UM.03.02/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
- Pusdatik Kemnaker berupa *software* Inaskills berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2/3678/UM.03.01/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp74.250.000

Reklasifikasi keluar lisensi sebesar Rp74.250.000 terdapat pada Barenbang Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Barenbang Ketenagakerjaan terkait Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk BMN Nomor 7/2267/UM.03.00/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 319 Reklasifikasi Keluar Aset Tak Berwujud Pada Barenbang

Semula			Menjadi			Keterangan
Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Nama Barang	
8010101001	1781	Software Komputer	8010101002	845	Lisensi	Navicat Premium V12
8010101001	1782	Software Komputer	8010101002	846	Lisensi	Navicat Premium V12
8010101001	1783	Software Komputer	8010101002	847	Lisensi	Navicat Premium V12

3. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp19.202.136.300

Tabel 320 Penghentian Aset Dari Penggunaan Aset Tak Berwujud

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	4.105.807.000
Sekretariat Jenderal			4.105.807.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	44.000.000
	350081	Balai K3 Medan	259.473.800
	350082	Balai K3 Makassar	269.439.500
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker dan K3	1.084.773.000
Ditjen Binwasnaker dan K3			1.657.686.300
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	3.301.479.900
Barenbang Ketenagakerjaan			3.301.479.900
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	98.892.750
	051102	BPVP Banyuwangi	74.720.000
	089378	BPVP Padang	31.350.000
	209255	BPVP Kendari	73.610.000
	230302	BPVP Lombok Timur	86.900.000
	451026	Dit. Bina Lavotas	232.065.500
	451094	BBPVP Medan	153.272.272
	452542	BBPVP Bandung	8.991.037.600
	452609	BBPVP Semarang	285.014.978
	452652	BBPVP Makassar	62.800.000
	626132	Dit. Binalavoga	47.500.000
Ditjen Binalavotas			10.137.163.100
Penghentian Aset Dari Penggunaan			19.202.136.300

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.105.807.000

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp4.105.807.000 terdapat pada Sekretariat Jenderal yang berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kepala Biro OSDMA Nomor 1/2361/UM.03/IV/2025 tanggal 29 April 2025 berupa *Software* Komputer.
2. Surat Keterangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1/2625/KU.07/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa *software* komputer yaitu aplikasi revisi Biro Keuangan dan BMN.
3. Surat Keterangan Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Nomor 1/339/UM.03/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 berupa *software* komputer.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.657.686.300

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp44.000.000

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp44.000.000 merupakan transaksi yang dilakukan sebagai rangkaian administrasi penghapusan atas *software* komputer berupa *Website* (bk3bandung.kemnaker.go.id) dengan kondisi rusak berat dan sudah tidak bisa digunakan sebagai penunjang tugas dan fungsi Balai K3 Bandung. Transaksi ini, dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Henti Guna Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Bandung Nomor:5.3/25/UM.03.03/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.

2) Balai K3 Medan sebesar Rp259.473.800

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Balai K3 Medan sebesar Rp259.473.800 merupakan transaksi yang dilakukan karena aset sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan sebagai penunjang tugas dan fungsi Balai K3 Medan berupa software komputer NUP 2 Aplikasi Simpelkan dan Sinotra Rp248.173.000 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/28/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 dan Aplikasi Software Komputer NUP 3 Aplikasi Simora senilai Rp11.300.000 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/30/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

3) Balai K3 Makassar sebesar Rp269.439.500

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Balai K3 Makassar sebesar Rp269.439.500 merupakan transaksi yang dilakukan sebagai rangkaian administrasi penghapusan atas software komputer berupa Aplikasi Klik ABG karena sudah tidak bisa digunakan sebagai penunjang tugas dan fungsi Balai K3 Makassar, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Makassar Nomor 5.1/009/UM.03.02/II/2026 tanggal 13 Februari 2026.

4) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.084.773.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.084.773.000 merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas ATB sehingga Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan inventarisasi Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor:5/31/UM.03.02/XI/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun transaksi penghentian aset tak berwujud dari penggunaan sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/122/KU.07.04/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025.

c. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp3.301.479.900

- 1) Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp3.119.429.900 merupakan tindak lanjut dari *software* yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dikarenakan kondisi sudah rusak berat/using/kadaluarsa masa penggunaannya. Surat keterangan KPB Barenbang Ketenagakerjaan Nomor: 7/747/UM.03.00/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, dan sudah diusulkan proses penghapusan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 321 Mutasi Tambah (Penghentian Aset Dari Penggunaan)
Pada Barenbang

Nama Barang	Kuantitas	Total Nilai (Rp)
Aplikasi Gis (Arcgis)	1	1.021.900.000
Aplikasi Datamart Excell	1	95.000.000
Aplikasi E-Modul	1	45.125.000
Aplikasi Executive Report	1	98.250.000
Aplikasi Reformasi Birokrasi	1	880.004.900
Aplikasi Spip	1	96.550.000
Aplikasi Sistem Command Center	1	684.100.000
Software Backup	1	198.500.000
Total		3.119.429.900

- 2) Penghentian aset dari penggunaan merupakan tindak lanjut dari lisensi yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dikarenakan kondisi sudah rusak berat/using/kadaluasa masa penggunaannya. Surat pernyataan KPB Barenbang Ketenagakerjaan Nomor:7/1464/UM.03.00/IX/2025 tanggal 29 September 2025 berupa barang *Navicat Premium V12* sebanyak 3 sebesar Rp74.250.000 dan sudah diusulkan proses penghapusan.
 - 3) Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp107.800.000 merupakan tindak lanjut dari lisensi yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dikarenakan kondisi sudah rusak berat/using/kadaluasa masa penggunaannya, dan sudah diusulkan proses penghapusan.
- d. Ditjen Binalavotas sebesar Rp10.137.163.100
- 1) BPVP Bandung Barat
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp98.892.750 berupa sistem pelatihan terintegrasi Aplikasi SIMPEL berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPVP Bandung Barat Nomor 2.17/301/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - 2) BPVP Banyuwangi
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp74.720.000 berupa *Software Komputer* reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.22/101/UM.03.03/V/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
 - 3) BPVP Padang sebesar Rp31.350.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp31.350.000 berupa *Software Wilcom E4 Decorating* berdasarkan Surat Keterangan Nomor B1/682/UM.03.03/XI/2025 tanggal 11 November 2025.
 - 4) BPVP Kendari sebesar Rp73.610.000
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp73.610.000 berupa *Software Pelatihan Desain Grafis* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.13/3210/UM.03.04/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
 - 5) BPVP Lombok Timur sebesar Rp86.900.000
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp86.900.000 berupa *Software Komputer* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.18/138/UM.03.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025.
 - 6) Satker Ditjen Binalavotas
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp232.065.500 berupa *Software* berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Direktorat Binalavotas Nomor 2/7474/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - 7) BBPVP Medan
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp153.272.272 berupa *Windows Server Microsoft Server 2008, Aplikasi SIMPEL, Absensi Digital, dan E Letter* berdasarkan Surat Keterangan Plt. Kepala BBPVP Medan Nomor 2.8/13/UM.03.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

8) BBPVP Bandung

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp8.991.037.600 berupa *software* komputer berdasarkan Surat Keterangan Plt. Kepala BBPVP Bandung Nomor 2.5/12042/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

9) BBPVP Semarang

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp285.014.978 berupa *Software* Komputer berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.6/629/UM.03.03/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

10) BBPVP Makassar

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp62.800.000 berupa *software* komputer berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang BBPVP Makassar Nomor 2.13/056/KU.07.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

11) Dit. Binalatvogan

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp47.500.000 berupa Penghapusan ATB (*Software*) SIMRAT berdasarkan Surat Keterangan Direktur Binalatvogan Nomor: 2.4/426/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp133.766.100.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Pada tahun 2024 terdapat pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp133.766.100 dengan rincian:

Tabel 322 Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Tahun 2024
yang Diselesaikan Tahun 2025

Uraian Pekerjaan	Penyedia	No SPPP	Tanggal SPPP	Nilai Kontrak (Rp)	Termin I (Rp)
Penambahan Fitur Siswasnaker	PT. Adhyamitra Tata Sarana	7/440/UM.02/PDTIK.PPK-SPPP/II/2024	1 Juli 2024	431.000.000	86.136.000,00
Penambahan Fitur WLKP	PT. Adhyamitra Tata Sarana	7/647/UM.02/PDTIK.PPK-SPPP/III/2024	22 Agustus 2024	238.000.000	47.630.100,00
Total				669.000.000	133.766.100

Pada Tahun Anggaran 2024, pekerjaan Penambahan Fitur WLKP dan Penambahan Fitur Siswasnaker dilaksanakan dengan pembayaran Termin pertama diberikan sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan (inc. PPN), namun dalam proses pelaksanaan terjadi keterlambatan pekerjaan melebihi dari 5% (minus atau cidera janji). Sehingga, Barenbang Ketenagakerjaan mengirimkan Surat Teguran PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Nomor 7/1702/UM.02/STG-PDTIK-PPK/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal: Teguran III (Keterlambatan Pekerjaan Terhadap Pekerjaan Penambahan Fitur WLKP) dan Surat Teguran PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Nomor 7/1709/UM.02/STG-PDTIK-PPK/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal Teguran III (Keterlambatan Pekerjaan Terhadap Pekerjaan Penambahan Fitur Siswasnaker) kepada PT. Adhyamitra Tata Sarana.

Berdasarkan Surat Keputusan Kontrak (Wanprestasi) Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Nomor 7/49/UM.02/PDTIK/I/2025 tanggal 10 Januari 2025. Sehubungan dengan pekerjaan Penambahan Fitur Siswasnaker No 7/440/UM.02/PDTIK-PPK-SPPP/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, bahwa keputusan kontrak dikategorikan kesalahan penyedia jasa akibat ketidakmampuan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan Penambahan Fitur Siswasnaker TA 2024 sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara *Reviu* Pengembangan Siswasnaker. Atas dasar tersebut penyedia diusulkan masuk Daftar Hitam dalam proses pengadaan.

Pada Tahun 2025, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan NUP 1 dan 2 telah selesai pekerjaannya pada tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran belanja modal berupa Penambahan Fitur Aplikasi Internal - WLKP sesuai dengan BAST No 7/1671/UM.02/PDTIK-PPK-BAP/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dan BAP No 7/1678/UM.02/PDTIK-PPK-BAP/XI/2025 tanggal 11 November 2025 berdasarkan SP2D Nomor: 259991320704534 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp96.700.000.
2. Pembayaran belanja modal berupa Penambahan Fitur Aplikasi Internal - SISWASNAKER sesuai BAST No 7/1916/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 dan BAP No 7/1920/UM.02/PDTIK-PPK-BAP/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 berdasarkan SP2D Nomor 259991311434687 tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp93.906.000.

C.4.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp55.225.820.682*

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.225.820.682 dan Rp263.785.149.569.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Dana yang dibatasi penggunaannya ini berupa dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun dengan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Tabel 323 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	2.275.121.483
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	507.806.620
	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	1.328.094.684
	626011	Pusat Pasar Kerja	1.497.300.113
Sekretariat Jenderal			5.608.322.900
026.02	259031	Inspektorat Jenderal	165.222.000
Inspektorat Jenderal			165.222.000
026.04	259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	212.488.763
	626041	Direktorat Bina PKK	1.137.560.000
Ditjen Binapenta dan PKK			1.350.048.763
026.08	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	264.393.723
Ditjen Binwasnaker dan K3			264.393.723
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	7.814.280.139
Barenbang Ketenagakerjaan			7.814.280.139
026.13	035636	BPVP Surakarta	57.438.000
	051102	BPVP Banyuwangi	136.714.000
	065106	BPVP Banda Aceh	217.259.440
	219228	BPVP Ambon	181.733.880
	352631	BPVP Belitung	112.362.177
	426531	BBPVP Serang	133.750.000
	451094	BBPVP Medan	209.345.000
	451108	BPVP Samarinda	250.751.407
	452542	BBPVP Bandung	451.365.620
	452558	BBPVP Bekasi	78.519.254
	626131	Direktorat Bina Lemlatvok	38.194.314.379
Ditjen Binalavotas			40.023.553.157
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya			55.225.820.682

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.608.322.900

a. Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp2.275.121.483

Dana yang dibatasi penggunaannya pada Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp2.275.121.483 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 324 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Pada Politeknik Ketenagakerjaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan <i>Workshop</i> K3	1.829.535.680
2	Pengawas Pembangunan <i>Workshop</i> K3	193.389.750
3	Pembayaran Jasa Alih Daya <i>Security</i>	87.082.319
4	Pembayaran Jasa <i>Cleaning Service</i>	100.504.012
5	Pembayaran Jasa Pramubakti	64.609.722
Jumlah		2.275.121.483

b. Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.497.300.113

Dana yang dibatasi penggunaannya pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.497.300.113 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 325 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025
Pada Sekretariat Jenderal

NO	NAMA SUPPLIER	NOMOR KONTRAK	NOMOR BAST/BAPP	TANGGAL BAST/ BAPP	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI (Rp)	Lanjut Tahun Anggaran	Keterangan
1	PT BAYAN BANGUN SELARAS	SP. 1/01/UM.02.01/III/2025	1/01H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	59991302000222	08-01-2026	57.035.421	TIDAK	Pekerjaan Pembayaran gaji tenaga alih daya Biro Humas
2	PT CAKRADATA TEKNOLOGI INDONESIA	SP. 10/01/UM.02.01/III/2025	1/10H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	59991302001711	09-01-2026	6.700.000	TIDAK	Pekerjaan Pembuatan Monitoring Akun
3	PT BINOKULAR MEDIA UTAMA	SP. 12/01/UM.02.01/IV/2025	1/12H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	59991302000183	08-01-2026	19.998.500	TIDAK	Pekerjaan Pembuatan Monitoring & Analisis Media Cetak, Online
4	PT BAYAN BANGUN SELARAS	SP. 23/01/UM.02.01/III/2025	1/23H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	59991302000218	08-01-2026	47.346.192	TIDAK	Pekerjaan Pembayaran gaji tenaga out sourcing kehumasan Biro
5	PT IVONESIA SOLUSI DATA	SP. 8/01/UM.02.01/III/2025	1/08H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	59991303002173	08-01-2026	10.000.000	TIDAK	Pekerjaan Layanan Pengelolaan Media Sosial
6	PT CAKRADATA TEKNOLOGI INDONESIA	SP. 9/01/UM.02.01/III/2025	1/09H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	59991301002094	09-01-2026	15.000.000	TIDAK	Pekerjaan Pembuatan Monitoring & Analisis Media Sosial
7	PT. GARDA JAYA SENTIKA	1/1/UM.02.00/I/2025	1/853/KU.02.00/XII/2025	31-12-2025	618200000000461	07-01-2026	472.330.000	TIDAK	Biaya Operasional Petugas Keamanan (Outsourcing) Gatsu 51
8	PT.RIVADA SEJAHTERA ABADI	1/2/UM.0200/I/2025	1/854/KU.02.00/XII/2025	31-12-2025	618200000000461	07-01-2026	412.030.000	TIDAK	Biaya Operasional Petugas Kebersihan (Outsourcing) Gatsu 51
9	PT. AJAWI MUBAROK	1/5/UM.02.00/I/2025	1/855/KU.02.00/XII/2025	31-12-2025	618200000000461	07-01-2026	456.860.000	TIDAK	Biaya Operasional Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Gatsu 51
RPATA							1.497.300.113		

c. PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.328.094.684

Dana yang dibatasi penggunaannya pada PSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.328.094.684 berupa pembayaran yang masuk ke dalam RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. RPATA digunakan untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran. Dana tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun rincian dana yang dibatasi penggunaannya pada PPSDM Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Tenaga Alih Daya *Call Center*, Tenaga Alih Daya *Call Center*, *Driver*, *Pramubhakti*, *Pramutaman*, *Resepsionis*, Teknisi Kelistrikan, *Kliner Junior* PPSDM Ketenagakerjaan TA. 2025 selama 2 bulan PT. Natria Bifalfis Sukses dengan Nomor Kontrak EP01K7620WXE0H0XJXX4CE9MZQXJ tanggal 15 Oktober 2025 sebesar Rp463.865.824.
- 2) Belanja Jasa Lainnya Tenaga Alih Daya untuk *Security* PT. Komando Trisula Perkasa dengan Nomor Kontrak SPK.1/16/KU.02.01/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 sebesar Rp106.289.820.
- 3) Kontrak biaya Program Kegiatan Pelatihan *Strategic Thinking* Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan TA 2025 PT. Trustco Cipta Madania dengan Nomor Kontrak EP01KCRR77WS6RFQP4B7CDE65NGG tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp757.939.040.

d. Pusat Pasar Kerja sebesar Rp507.806.620

Dana yang dibatasi penggunaannya pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp507.806.620 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 326 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025
Pada Pusat Pasar Kerja

NO	Uraian	Nomor dan Tanggal Kontrak	NILAI (Rp)
1	Paket Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan Pusat Pasar Kerja Tahun 2025	1/5285-PPK/KU.02.01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	56.840.000
2	Paket Pengadaan Jasa Outsourcing Alih Daya Pusat Pasar Kerja Tahun 2025	1/5285-PPK/KU.02.01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	331.916.620
3	Paket Pengadaan Jasa Outsourcing Alih Daya Bulan Oktober s.d Desember Pusat Pasar Kerja Tahun 2025	1/3737-PPK/KU.02.01/X/2024 tanggal 1 Oktober 2025	95.250.000
4	Paket Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Alih Lead Front End Engineer Aplikasi KarirHub Pusat Pasar Kerja	1/3721-PPK/KU.02.01/IX/2024 tanggal 30 September 2025	9.900.000
5	Paket Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Alih System Architect Aplikasi KarirHub Pusat Pasar Kerja	1/3722-PPK/KU.02.01/IX/2024 tanggal 30 September 2025	9.900.000
6	Terjadi kesalahan pendaftaran kontrak untuk pembayaran melalui RPATA untuk Paket Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Pusat Petugas Kebersihan Bulan Oktober s.d Desember di Pasar Kerja Tahun 2025 yang seharusnya sebesar Rp95.250.000 namun didaftarkan sebesar Rp99.250.000, selisih sebesar Rp4.000.000 telah dihilangkan	SPM Nomor 00004T tanggal 2 Januari 2026	4.000.000
RPATA			507.806.620

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp165.222.000

Dana di Rekening Penampungan per 31 Desember 2025 pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp165.222.000. Mutasi dana di Rekening Penampungan pada Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 327 Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Pada Inspektorat Jenderal

Keterangan	Nominal (Rp)
Saldo Awal Dana Rekening Penampungan RPATA	165.222.000
Pembayaran Kepada Pihak Ketiga s.d. 31 Desember 2025	165.222.000
Total Pembayaran kepada Pihak Ketiga s.d. 08 Januari 2026	165.222.000
Saldo Akhir	-

a. Saldo awal dana rekening penampungan RPATA sebesar Rp165.222.000

- 1) Paket Pengadaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 PT. Binajasa Abadikarya dengan Nomor Kontrak 6/8/UM.02.01/I/2025 sebesar Rp158.077.000.
- 2) Paket Pengadaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Pengemudi) Tahun 2025 PT. Binajasa Abadikarya dengan Nomor Kontrak 6/2/UM.02.01/SPK/VII/2025 sebesar Rp7.145.000.

b. Pembayaran kepada pihak ketiga sampai dengan 8 Januari 2026 sebesar Rp165.222.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 328 Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Pada Inspektorat Jenderal

Kode Satker	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Supplier	Nilai RPATA (Rp)	Nomor SP2D
259031	6/8/UM.02.01/I/2025	Paket Pengadaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025	PT. BINAJASA ABADIKARYA	158.077.000	261820000000633 Tanggal 08 Januari 2026
259031	6/2/UM.02.01/SPK/VII/2025	Paket Pengadaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Pengemudi) Tahun 2025	PT. BINAJASA ABADIKARYA	7.145.000	261820000000664 Tanggal 08 Januari 2026
Total				165.222.000	

3. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp1.350.048.763

a. BBPKK Bandung Barat

BBPKK Bandung Barat Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sebesar Rp212.488.763 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 329 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Pada BBPKK Bandung Barat

No.	Nomor dan Tgl SP2D		Uraian	Nilai (Rp)
1	259990302015197	22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01JZ2094E1ZYCMQ7EZ2GVHR67D untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Pramubakti Administrasi dan Pengemudi Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	23.493.672
2	259990302015134	22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JX75G1MB4C5ZKQ0E6Q0FC6 untuk Jasa Langganan Internet BBPKK Bandung Barat Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	28.860.000
3	259990302015133	22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01JZPH7YNT61FR84DW2RZ8FT4 untuk Pengadaan Jasa Outsourcing SPPKK Dumai Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	43.539.021
4	259990302015196	22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JZ2CR6E29FQ9M9S7KDPG9HMH untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Petugas Keamanan Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	46.954.460
5	259990302015194	22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JYZJAK7SFWQBSTSQSTBJVP1F6 untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	69.641.610
Jumlah				212.488.763

b. Direktorat Bina PKK

Direktorat Bina PKK Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sebesar Rp1.137.560.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket Belanja Jasa Lainnya Tenaga Alih Daya Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan PT Ajavi Mubarak dengan nomor kontrak 3/25/KU.02.01/II/2025 senilai Rp473.620.000. Kontrak tersebut telah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 261820000000172 tanggal 6 Januari 2026 atas BAST 3/773/KU.02.01/XII/2025 atas BAST 3/773/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 2) Paket Belanja Jasa Lainnya Sewa Laptop Bidang Tenaga Kerja Mandiri Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan PT Ayooklik Airmas Perkasa dengan nomor kontrak 3/135/KU.02.01/VI/2025 senilai Rp26.000.000. Kontrak tersebut telah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 261820000000162 tanggal 5 Januari 2026 atas BAST dengan nomor 3/771/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 3) Paket Belanja Jasa Lainnya Tenaga Alih Daya Bidang Padat Karya Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan PT Ajavi Mubarak dengan nomor kontrak 3/133/KU.02.01/VI/2025 senilai Rp58.365.000. Kontrak tersebut telah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 261820000000244 tanggal 6 Januari 2026 atas BAST dengan Nomor B.3/779/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 4) Paket Belanja Jasa Lainnya Tenaga Alih Daya Bidang Tenaga Kerja Mandiri Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan PT Ajavi Mubarak dengan nomor kontrak 3/165/KU.02.01/VII/2025 senilai Rp65.000.000. Kontrak tersebut telah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 261820000000295 tanggal 6 Januari 2026 dan BAST dengan nomor 3/783/KU.02.01/XII/2025

tanggal 31 Desember 2025.

- 5) Paket Belanja Jasa Lainnya Tenaga Ahli Pemeliharaan Sistem Bizhub Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan Wakid Ali Muntoha dengan nomor kontrak 3/112/KU.02.01/VI/2025 senilai Rp8.745.000. Kontrak tersebut telah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 261820000000166 tanggal 6 Januari 2026 dan BAST dengan nomor 3/777/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
- 6) Paket Belanja Jasa Lainnya Tenaga Alih Daya Bidang Tenaga Kerja Mandiri Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dengan PT Ajavi Mubarak dengan nomor kontrak 3/134/KU.02.01/VI/2025 senilai Rp505.830.000. Kontrak tersebut telah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 261820000000164 tanggal 6 Januari 2026 dan BAST dengan nomor 3/781/KU.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

4. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp264.393.723

Dana di Rekening Penampungan per 31 Desember 2025 terdapat pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp264.393.723 merupakan RPATA kontrak tahun 2025 untuk pembayaran Jasa diantaranya:

- a) RPATA atas Kontrak Nomor B.II/02.14/PPTKPSPK-SES/II/2025 untuk Belanja jasa Lainnya Kelancaran Administrasi Ditjen Binwasnaker dan K3 (Pramukantor) Bulan Desember 2025 SPM Nomor 01569T/651870/2025 tanggal 22-12-2025 sebesar Rp42.958.755.
- b) RPATA atas Kontrak Nomor B.V/05.09/PPTKPSPK-SES/V/2025 untuk Belanja Jasa Lainnya Kelancaran Administrasi Ditjen Binwasnaker dan K3 (Pengemudi dan Pramukantor) Bulan Desember 2025 SPM Nomor 01572T/651870/2025 tanggal 22-12-2025 sebesar Rp23.240.829.
- c) RPATA atas Kontrak Nomor B.II/02.07/PPTKPSPK-SES/II/2025 untuk Belanja Jasa Lainnya Kelancaran Administrasi Ditjen Binwasnaker dan K3 (Pramukantor) Bulan Desember 2025 SPM Nomor 01570T/651870/2025 tanggal 22-12-2025 sebesar Rp92.842.012.
- d) RPATA atas Kontrak Nomor B.X/10.08/PPTKPSPK-SES/X/2025 untuk Belanja Keperluan Perkantoran Bulan Desember 2025 SPM Nomor 01571T/651870/2025 tanggal 22-12-2025 sebesar Rp80.120.782.
- e) RPATA atas Kontrak Nomor B.II/02.20/PPTKPSPK-SES/II/2025 untuk Belanja Jasa Lainnya Kelancaran Administrasi Kegiatan (TU WASUJIK3) Bulan Desember 2025 SPM Nomor 01573T/651870/2025 tanggal 22-12-2025 sebesar Rp25.231.345.

5. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp7.814.280.139

Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025 Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp7.814.280.139 terdiri dari:

Tabel 330 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025
Pada Barenbang Ketenagakerjaan

Nama Pekerjaan	RPATA Penampungan (Rp)	RPATA Pembayaran (Rp)	RPATA Penihilan (Rp)
Langganan Bandwith Jaringan Komunikasi Data ISP 1 dan VPN IP	185.197.600	185.197.600	-
langganan Bandwith Jaringan Komunikasi Data ISP 2	213.200.000	213.200.000	-
langganan Bandwith Jaringan Komunikasi Data ISP 3	270.600.000	270.600.000	-
Langganan Layanan Metro P@P Bandwith 1 Gbps	70.877.140	70.877.140	-
Langganan Bandwith Jaringan Komunikasi Data ISP 1 dan VPN IP (Rumah Dinas Wakil Menteri)	45.000.000	45.000.000	-
Langganan Layanan Up To Oxygen 1 Gbps (Rumah Dinas Menteri)	45.000.000	45.000.000	-
Langganan Layanan Up To Oxygen Jl. Veteran	15.000.000	15.000.000	-
Langganan Bandwith Jaringan Komunikasi Data Kantor Pasker	42.300.000	42.300.000	-
Langganan Bandwith Jaringan Komuikasi Kantor Lavotas	244.000.000	244.000.000	-
Langganan Layanan Metro E-Call center	5.228.100	5.228.100	-
Langganan Layanan SIP Trunking Call Center	16.583.400	16.583.400	-
Tenaga Ahli Data Engineering	5.450.000	5.450.000	-
Langganan Sewa Komputasi Awan SiapKerja	2.000.000.000	1.996.005.837	3.994.163
Langganan Nomor Layanan Call Center	16.594.500	16.594.500	-
Peningkatan Kapasitas Bandwith Sewa Layanan Metro P2P	117.792.978	117.792.978	-
Pekerjaan Penambahan Fitur Aplikasi Internal (Penambahan Fitur Aplikasi Pemagangan Luar Negeri Versi 2)	76.500.000	76.500.000	-
Pekerjaan Penambahan Fitur Aplikasi Internal (Aplikasi AYO Magang Vokasi)	77.700.000	77.700.000	-
Pekerjaan Penambahan Fitur Aplikasi Internal (Perizinan Jobfair)	90.500.000	90.500.000	-
Pekerjaan Penambahan Fitur Aplikasi Internal (Aplikasi Layanan Asesmen Wirausaha)	77.922.000	77.922.000	-
Langganan SMS Premium (OTP/Broadcast)	2.620.044.000	2.619.902.393	141.607
Pekerjaan Penambahan Fitur Aplikasi Internale-Performance	60.700.000	60.700.000	-
Pendampingan Surveillance Audit SMK ISO/IEC 27001:2022	72.150.000	72.150.000	-
Licence Data Transmission Service	186.258.000	186.258.000	-
Licence Email Service Verification	165.000.000	165.000.000	-
Licence Anti Virus End Point Enterprise	886.023.221	886.023.221	-
Belanja Jasa Liannya, Tenaga Alih Daya Meliputi Sekretaris, Penegemudi, dan Pamu Helpdesk Barenbang Ketenagakerjaan 2025+28:30	208.659.200	208.659.200	-
Jumlah	7.814.280.139	7.810.144.369	4.135.770

6. Ditjen Binalavotas sebesar Rp40.023.553.157

Dana yang dibatasi penggunaannya ini berupa dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun dengan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dengan rincian sebagai berikut:

- a. BPVP Surakarta sebesar Rp57.438.000 merupakan Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor:2.10/PE.06.SP.01/UM.02/IV/2025 untuk Pengadaan alih daya (tenaga keamanan) di BPVP Surakarta.
- b. BPVP Banyuwangi sebesar Rp136.714.000
 - 1) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor SPK.01/PPK-BPVPBWI/I/2025 untuk paket pekerjaan penyedia pekerja tenaga alih daya *resepsionis*, layanan pelanggan, sekretaris, petugas kebersihan, dan pramutaman bulan januari s.d desember 2025 sebesar Rp79.866.000.
 - 2) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor SPK.05/PPK-BPVPBWI/I/2025 untuk paket pekerjaan penyedia pekerja tenaga alih daya untuk keamanan dan pengemudi bulan januari s.d desember 2025 sebesar Rp56.848.000.
- c. BPVP Banda Aceh sebesar Rp217.259.440
 - 1) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.8/11315/UM.02.01/XII/2024 untuk pengadaan jasa alih daya tenaga (*outsourcing*) keamanan sebesar Rp75.205.191.
 - 2) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.8/11316/UM.02.01/XII/2024 untuk pengadaan jasa alih daya tenaga pengemudi, pramukantor, dan *resepsionis* sebesar Rp142.054.249.

- d. BPVP Ambon sebesar Rp181.733.880 merupakan Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.15/SPK.39/UM.02/X/2025 untuk pengadaan jasa *outsourcing* bulan November-Desember 2025.
- e. BPVP Belitung sebesar Rp112.362.177 merupakan Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JHKZ40B4X81WF72VX795V2A1 untuk pengadaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) petugas keamanan, kebersihan, pengemudi, dan pramubakti BPVP Belitung.
- f. BBPVP Serang sebesar Rp133.750.000 merupakan Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor P.06/1/E-PURCHASING-1-SP/PPK-BBPVP/I-25 untuk pengadaan jasa *outsourcing* (alih daya).
- g. BBPVP Medan sebesar Rp209.345.000
 - 1) Pengisian RPATA sebesar Rp73.549.000 atas Kontrak Nomor 2.2/2/UM.01.04/I/2025 untuk jasa petugas satpam dan koordinator satpam.
 - 2) Pengisian RPATA sebesar Rp135.796.000 atas Kontrak Nomor 2.2/4/UM.01.04/I/2025 untuk jasa petugas kebersihan, pengemudi, sekretaris, dan *toolman*.
- h. BPVP Samarinda sebesar Rp250.751.407
 - 1) Pengisian RPATA sebesar Rp31.529.337 atas Kontrak Nomor 2.11/85/SP.PPK/UM.02.00/I/2025 untuk pengadaan tenaga alih daya TA. 2025 di BPVP Samarinda.
 - 2) Pengisian RPATA sebesar Rp44.931.167 atas Kontrak Nomor 2.11/2535/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk pengadaan tenaga kebersihan TA. 2025 di BPVP Samarinda.
 - 3) Pengisian RPATA sebesar Rp33.416.000 atas Kontrak Nomor 2.11/2537/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk pengadaan tenaga keamanan TA. 2025 di BPVP Samarinda.
 - 4) Pengisian RPATA sebesar Rp37.970.040 atas Kontrak Nomor 2.11/85/SP.PPK/UM.02.00/I/2025 untuk pengadaan tenaga alih daya TA. 2025 di BPVP Samarinda.
 - 5) Pengisian RPATA sebesar Rp41.540.301 atas Kontrak Nomor 2.11/2537/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk pengadaan tenaga keamanan TA. 2025 di BPVP Samarinda.
 - 6) Pengisian RPATA sebesar Rp61.364.562 atas Kontrak nomor 2.11/2535/sp.ppk/um.02.00/xii/2024 untuk pengadaan tenaga kebersihan TA. 2025 di BPVP Samarinda.
- i. BBPVP Bandung sebesar Rp451.365.620
 - 1) Pengisian RPATA sebesar Rp29.969.340 atas Kontrak Nomor PL103.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 untuk pemeliharaan sumur asrama rajavali
 - 2) Pengisian RPATA sebesar Rp32.538.196 atas Kontrak Nomor PL103.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 untuk pemeliharaan sumur asrama rajavali.
 - 3) Pengisian RPATA sebesar Rp100.927.347 atas Kontrak Nomor PL.92.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 untuk belanja jasa *cleaning service* BBPVP Bandung Bulan Desember 2025.

- 4) Pengisian RPATA sebesar Rp64.113.600 atas Kontrak Nomor PL90.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 untuk jenis konsultasi pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*).
 - 5) Pengisian RPATA sebesar Rp59.747.755 atas Kontrak Nomor 2.5/02/UM.02.05/I/2025 untuk belanja jasa *outsourcing security* BBPVP Bandung.
 - 6) Pengisian RPATA sebesar Rp147.069.382 atas Kontrak Nomor 2.5/01/UM.02.05/I/2025 untuk belanja jasa *outsourcing office support*, jasa *outsourcing driver*, jasa *cleaning service* di BBPVP Bandung.
 - 7) Pengisian RPATA sebesar Rp17.000.000 atas Kontrak Nomor 2.5/192/UM.01.01/III/2025 untuk Jasa Langganan Internet Bulan Maret-Desember 2025.
- j. BBPVP Bekasi sebesar Rp78.519.254
- 1) Pengisian RPATA sebesar Rp5.017.469 atas Kontrak Nomor SP.01/BBPVP-BKS/PBJ-ePurc/II/2025 untuk pengadaan jasa leader petugas kebersihan pada BBPVP Bekasi tahun anggaran 2025.
 - 2) Pengisian RPATA sebesar Rp73.501.785 atas Kontrak Nomor SP.03/BBPVP-BKS/PBJ-EPURC/III/2025 untuk pengadaan jasa petugas keamanan pada BBPVP Bekasi TA 2025.
- k. Direktorat Bina Lemlatvok sebesar Rp38.194.314.379
- 1) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp628.168.594 atas Kontrak Nomor EP-01K862A2EZP3T9VA4YZ4RXY275 untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
 - 2) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp2.254.972.104 atas Kontrak Nomor EP-01K7ESJ90W4EPS12VNY0AKNV93 untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
 - 3) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp891.443.896 atas Kontrak Nomor EP-01K7S5K0A33AV40MTN0B0FG84B untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas
 - 4) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp2.649.554.460 atas Kontrak Nomor EP-01K7SBM3WQKXRAFH65E2JNTNZB untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
 - 5) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.055.835.090 atas Kontrak Nomor EP-01K6MXSN4Y31ZPC4WGGWZJVXNQ untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
 - 6) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.470.967.071 atas Kontrak Nomor EP-01K6FA1R4HTF1MXBQH6TWA57DF untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
 - 7) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.083.718.355 atas Kontrak Nomor EP-01K74E8Y8MH7YV7CSRYTGJ06YP untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
 - 8) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp35.398.444 atas Kontrak Nomor EP-01KBYNA71E2FSJJ2GCEZVA4QQ9 untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.

- 9) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp476.667.300 atas Kontrak Nomor EP-01K7EGMEG0BDNKC0PQKH5C834V untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 10) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.419.496.102 atas Kontrak Nomor EP-01K719FMCH6BQZVA331GSSDM7A untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 11) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp35.336.284 atas Kontrak Nomor EP-01KBQW3F08N2N382F9KKFPKFW5 untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
- 12) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp22.091.597 atas Kontrak Nomor EP-01KC1E6A0NGEX231F1F2Q7XSMK untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
- 13) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp35.352.934 atas Kontrak Nomor EP-01KBYCTQR66VVMF4SHH36B8FQE untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
- 14) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.442.485.136 atas Kontrak Nomor EP-01K6J5QV8CCWSCQ3NGJVESGGZG untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 15) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.403.804.113 atas Kontrak Nomor EP-01K6MPG68K2KTZEZZEMC7R2YF9 untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 16) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.488.776.083 atas Kontrak Nomor EP-01K5ZMVPFNXY5M6EEMFNK8CEP untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 17) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp35.280.784 atas Kontrak Nomor EP-01KBQJMMRNJZ29WGY36NKQVF0 untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
- 18) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp851.979.015 atas Kontrak Nomor EP-01K743RYQA7HBZA4VGM2GV436Z untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 19) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp35.321.854 atas Kontrak Nomor EP-01KBYQXREG17NT8P98JYSV5ZG6 untuk pengadaan peralatan berbasis komunitas.
- 20) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.419.134.077 atas Kontrak Nomor EP-01K7104JK4T4AJRRA1DHSSWYEH untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.
- 21) Pengisian bagian RPATA sebesar Rp3.458.531.086 atas Kontrak Nomor EP-01K6HR8JZP88X6PHEMPRA4C9J untuk pengadaan peralatan bantuan berbasis komunitas.

C.4.4. Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi

Dana Penjaminan Pihak
Ketiga Retensi Rp0

Nilai Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp747.738.900.000.

Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi pada Ditjen Binapenta dan PKK telah diserahkan kepada Kementerian P2MI/BP2MI pada tanggal 30 Januari 2025 sesuai dengan BAST Bilyet Deposito Jaminan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor B-3/566/PK.02.00/1/2025 tanggal 30 Januari 2025 dengan rincian:

1. Bilyet Deposito 489 P3MI Aktif:
 - a. 711 lembar bilyet Bank BNI dari 387 P3MI dengan total nominal Rp537.675.000.000.
 - b. 125 lembar bilyet Bank BRI dari 116 P3MI dengan total nominal Rp149.980.000.000
 - c. 50 lembar bilyet Bank Mandiri dari 44 P3MI dengan total nominal Rp44.900.000.000
 - d. 1 lembar bilyet Bank Bumi Daya dari 1 P3MI dengan total nominal \$34,600
2. Bilyet Deposito yang telah dicabut Tahun 2012-2024 dan belum diserahkan:
 - a. 50 lembar bilyet Bank BNI dari 29 P3MI dengan total nominal Rp20.250.000.000
 - b. 4 lembar bilyet Bank BRI dari 4 P3MI dengan total nominal Rp1.500.000.000
 - c. 6 lembar bilyet Bank Mandiri dari 5 P3MI dengan total nominal Rp2.750.000.000
3. Bilyet Deposito P3MI yang telah dicabut izinnya dan belum melakukan permohonan pengembalian serta tidak dapat dilacak keberadaanya:
 - a. 5 lembar bilyet Bank BNI dari 5 P3MI dengan total nominal Rp1.000.000.000
 - b. 2 lembar bilyet Bank BRI dari 2 P3MI dengan total nominal Rp95.000.000
 - c. 2 lembar bilyet Bank Bumi Daya dari 2 P3MI dengan total nominal Rp380.000.000
4. Uang Tunai sejumlah Rp1.183.900.000 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah dengan rincian:
 - a. Sisa pencairan deposito uang jaminan pelindungan Pekerja Migran Indonesia PT Mafan Samudra Jaya sejumlah Rp273.900.000 beserta dokumen pendukung.
 - b. Sisa pencairan deposito uang jaminan pelindungan Pekerja Migran Indonesia PT Ramzy Cahaya Karya sejumlah Rp910.000.000 beserta dokumen pendukung.

C.4.5. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain sebesar
Rp557.304.096.246,

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp557.304.096.246 dan Rp573.767.425.299

Aset Lain-Lain Kemnaker terdiri dari:

1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Rp539.332.040.324.
2. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp17.578.303.922.
3. Kontruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi sebesar Rp393.752.000.

Aset Lain-lain Menurut Eselon I sebagai berikut:

Tabel 331 Rincian Aset Lain-lain Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	11.788.225.079	3.753.507.372	8.034.717.707	214,06
Ditjen Binapenta & PKK	35.960.944.292	39.603.655.221	(3.642.710.929)	(9,20)
Ditjen PHI dan JSK	13.644.469.620	10.562.654.582	3.081.815.038	29,18
Ditjen Binwasnaker & K3	253.660.943.837	286.860.455.464	(33.199.511.627)	(11,57)
Barenbang	3.751.462.900	253.613.000	3.497.849.900	1.379,21
Ditjen Binalavotas	238.498.050.518	231.733.539.660	6.764.510.858	2,92
Jumlah ATB (Bruto)	557.304.096.246	572.767.425.299	(15.463.329.053)	(2,70)
Akumulasi Amortisasi	(407.123.793.722)	(513.000.348.981)	105.876.555.259	(20,64)
Nilai Buku ATB	150.180.302.524	59.767.076.318	90.413.226.206	151,28

Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 332 Mutasi Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024	Rp	573.767.425.299
Mutasi Tambah		
Transfer Masuk (Henti Guna)	Rp	1.452.466.500
Penghentian Sementara KDP	Rp	393.752.000
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	375.839.296
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	107.571.664.975
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp	(1.192.675.953)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	Rp	(1.452.466.500)
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	Rp	(12.082.457.663)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	(36.220.522.837)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	(75.308.928.871)
Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025	Rp	557.304.096.246
Akumulasi Penyusutan	Rp	(407.123.793.722)
Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025	Rp	150.180.302.524

Mutasi Tambah:

1. Transfer Masuk (Henti Guna) sebesar Rp1.452.466.500

Tabel 333 Transfer Masuk (Henti Guna) Aset Lain-Lain

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	666.376.500
Ditjen Binwasnaker & K3			666.376.500
026.13	451026	Satker Ditjen Binalavotas	786.090.000
Ditjen Binalavotas			786.090.000
Transfer Masuk (Henti Guna)			1.452.466.500

- a. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp666.376.500

Transfer Masuk (Henti Guna) pada Ditjen Binwasnaker sebesar Rp666.376.500 terdapat pada satuan kerja Satker Ditjen Binwasnaker dan K3. Transaksi ini sebagai tindaklanjut atas transaksi transfer keluar aset BMN henti guna untuk penyelesaian likuidasi aset dana dekonsentrasi tahun 2024 yang berasal dari satuan kerja:

- 1) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp88.250.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur dan satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/551/UM.03.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 berupa *overhead projector*, P.C Unit, *Printer* dan *Uninterruptible Powe Supply* (UPS).
- 2) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp148.428.500 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/222/UM.03.00/IX/2025 tanggal 9 September 2025 berupa laptop, meja computer, mesin ketik listrik, dan lain-lain.
- 3) Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp303.198.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/237/UM.03.00/IX/2025 tanggal 26 September 2025 berupa alat Kesehatan, alat laboratorium, lemari kayu, lemari besi/metal, *wireless* dan lain-lain.
- 4) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp106.750.000 dan aset ekstrakom senilai Rp4.500.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara dan Satker Ditjen Binwasnaker da K3 Nomor 5/225/UM.03.00/IX/2025 tanggal 26 September 2025 berupa *audio visual*, brankas, CPU, laptop, printer, rak kayu dan kepeerluan kantor lainnya.
- 5) Disnakertrans Provinsi Bangka Belitung senilai Rp19.750.000 sesuai Berita Acara Serah Terima Aset BMN antara Disnakertrans Provinsi Bangka Belitung dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/183/UM.03.00/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

- b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp786.090.000

- 1) Transfer Masuk (Henti Guna) pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp784.640.000 terdapat pada satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 413/Disnakertrans.ses/2025, 900.1.3.10/17/2025, 413/Disnakertrans.ses/2025, 6116/KU.03.07/Lattas, 000.3.4/891/BAST/DTT-

MU/XI/2025,000/475/2025 tanggal 3 September 2025 berupa *Camera Digital, Uninterruptible Power Supply (UPS), P.C Unit, Scanner (Universal Tester), Sound System, Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci), Printer (Peralatan Personal Komputer), Mesin Fotocopy Electronic, Tripod Camera, Film Projector, Kursi Fiber Glas/Plastik, Lap Top, Overhead Projector, A.C. Window, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) , Stabilizer/UPS, Kursi Fiber Glas/Plastik, Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci), Handy Cam, Uninterrupted Power Supply (UPS), Proyektor Romad Complet, Camera Electronic, Monografi, Note Book, Naskah/Manuskrip Berbahan Kertas, Facsimile, CD/VCD/DVD/LD, Star Fand, dan Meja Komputer .*

- 2) Transfer Masuk (Henti Guna) pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.450.000 terdapat pada satker Ditjen Binalavotas sesuai dengan Surat Keterangan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 560/110 tanggal 11 Maret 2025, telah dilakukan serah terima barang berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan nilai perolehan sebesar Rp1.450.000, yang telah diterima dalam kondisi baik dan dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin.

2. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp107.571.664.975

Tabel 334 Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Lain-Lain

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	100.626.000
	450938	Sekretariat Jenderal	10.772.345.083
	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	2.090.366.683
	626011	Pusat Pasar Kerja	396.143.104
Sekretariat Jenderal			13.359.480.870
026.04	259322	BBPKK Bandung	1.370.982.193
	451139	Satker Ditjen Binapenta dan PKK	2.301.328.177
	690633	BPKK Kendari	266.164.157
	690634	BPKK Bekasi	233.484.000
Ditjen Binapenta dan PKK			4.171.958.527
026.05	451270	Satker Ditjen PHI dan Jamsos	2.937.435.572
Ditjen PHI dan Jamsos			2.937.435.572
026.08	350079	Balai K3 Bandung	1.069.359.600
	350081	Balai K3 Medan	511.602.602
	350082	Balai K3 Makassar	1.227.587.800
	350083	Balai K3 Samarinda	2.619.743.176
	350084	Balai Besar K3 Jakarta	461.648.200
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	32.916.623.991
Ditjen Binwasnaker & K3			38.806.565.369
026.11	452677	Barenbang Ketenagakerjaan	3.525.463.900
			3.525.463.900
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	98.892.750
026.13	050302	BPVP Sidoarjo	2.880.979.774
	051102	BPVP Banyuwangi	570.474.006
	065106	BPVP Banda Aceh	1.393.795.020
	089378	BPVP Padang	31.350.000
	209255	BPVP Kendari	73.610.000
	219228	BPVP Ambon	4.964.796.414
	230302	BPVP Lombok Timur	2.065.066.404
	451026	Satker Ditje Binalvotas	232.065.500
	451094	BBPVP Medan	10.806.365.137
	451108	BPVP Samarinda	870.860.000
	452542	BBPVP Bandung	18.478.921.506
	452595	BPVP Ternate	968.359.000
	452609	BBPVP Semarang	457.125.578
	452652	BBPVP Makassar	64.780.000
	626132	Direktorat Bina Lavogan	813.319.648
Ditjen Binalavotas			44.770.760.737
Penghentian Aset Dari Penggunaan			107.571.664.975

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp13.359.480.870
- 1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp100.626.000
Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp100.626.000 berupa *Power Distribution Board*.
 - 2) Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.772.345.083
Penghentian aset dari penggunaan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.772.345.083 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Biro Humas Nomor 1/1243/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa alat penghancur kertas, *battery charge*, *battery charger* (peralatan studio audio), *blitzzzer* dan lain-lain.
 - b) Surat Keterangan Biro Organisasi dan SDMA Nomor 1/2987/UM.03.03/VII/2025 pada tanggal 8 Juli 2025 berupa minibus (penumpang 14 orang kebawah) dan sepeda motor.
 - c) Surat Keterangan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Nomor 1/847/UM.03.00/XII/2025 pada tanggal 22 Desember 2025 berupa sepeda motor.
 - d) Surat Keterangan Biro Umum Nomor 1/1020/UM.03/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 dan Nomor 1/1236/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa *filing cabinet* kayu, kasur/*spring bed*, *kitchen set*, kursi besi/metal dan lain-lain.
 - 3) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp2.090.366.683
Penghentian aset dari penggunaan pada PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp2.090.366.683 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Nomor 1/472/UM.03.03/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 berupa *Station Wagon* sebanyak 2 unit sebesar Rp284.370.000.
 - b) Surat Keterangan Nomor 1/341/UM.03.04/IV/2025 tanggal 22 April 2025 berupa Monografi sebanyak 1.068 buah sebesar Rp447.087.683;
 - c) Surat Keterangan Nomor 1/477/UM.03.03/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 berupa bangunan gedung tempat ibadah permanen sebanyak 1 unit sebesar Rp873.427.000.
 - d) Surat Keterangan Nomor 1/1979/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 berupa referensi sebanyak 128 buah sebesar Rp12.475.000 dan A.C. *Split* sebanyak 88 buah sebesar Rp473.007.000.
 - 4) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp396.143.104
Penghentian Aset dari Penggunaan pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp396.143.104 berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Kondisi dan Henti Guna Barang Milik Negara Pusat Pasar Kerja Nomor 1/2082/KU.07/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025.
- b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp4.171.958.527
- 1) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp1.370.982.193
Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp1.369.116.793 sesuai surat Nomor 3.1/5021/UM.03.03/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 berupa P.C. unit, *stabilizer*/ups, alat *pemebrsig*, laptop, *notebook*, kamera digital, *telephone mobile*, mesin ketik.
 - 2) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp2.301.328.177
Penghentian Aset Dari Penggunaan Pada satker Ditjen Binapenta dan PKK

sebesar Rp2.301.328.177 sesuai BAST Nomor 1/544/UM.03.03/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. berupa alat-alat keperluan kantor, lemari, kursi, P.C. unit, sepeda motor.

3) BPKK Kendari sebesar Rp266.164.157

Penghentian Aset Dari Penggunaan pada BPKK Kendari sebesar Rp266.164.157 sesuai Surat Nomor 3.9/696/ UM.03/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 berupa laptop, televisi, kursi fiber, kursi besi, lemari, laptop, sofa.

4) BPKK Bekasi sebesar Rp233.484.000

Penghentian Aset Dari Penggunaan Pada BPKK Bekasi sebesar Rp233.484.000 sebanyak 50 unit AC Split sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor 3.8/30/UM.03.03/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

c. Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp2.937.435.572

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp2.937.435.572 sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi berupa perubahan kodefikasi Alat Angkutan dengan Surat Keterangan KPB Nomor 4/2320/UM.03.00/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 sebanyak 2 unit sebesar Rp24.572.000 dan transaksi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Tahun 2024 berupa *booth* Zona Integritas yang tidak digunakan kembali sesuai dengan fungsinya sebanyak 1 unit sebesar Rp10.600.000, dan tindak lanjut atas evaluasi LBMN terhadap Aset Tetap berkondisi Rusak Berat berupa Meja Kerja Kayu sebanyak 5.476 unit sebesar Rp2.902.263.572, dengan tindak lanjut berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4/2249/UM.03.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp38.806.565.369

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp1.069.359.600

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Balai K3 Bandung sebesar Rp1.069.359.600 berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Kepala Balai K3 Bandung Nomor 5.3/256/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp554.598.600, dilakukan karena BMN tersebut akan diusulkan penjualan dan sudah tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai K3 Bandung;
- b) Surat Keterangan Usul Henti Guna Kepala Balai K3 Bandung Nomor 5.3/221/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp470.761.000 berupa:

Tabel 335 Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Balai K3 Bandung

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Sum of Nilai (Rp)
Alat Laboratorium Umum Lainnya	1	dummy	229.944.000
Alat Sampling Gas Buang	1	Buah	153.970.000
<i>Dosimeter</i>	1	Buah	4.567.000
<i>Higt Volume Air Sampler</i>	1	Buah	18.700.000
<i>Law Volume Dust Sampler</i> (Alat Laboratorium Klimatologi)	1	Buah	17.600.000
Unit Alat Laboratorium Lainnya	1	dummy	45.980.000
	6		470.761.000

- c) Surat Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Bandung Nomor 5.3/24/UM.03.03/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 sebesar Rp44.000.000 merupakan perubahan kondisi *Software* dari Baik menjadi Rusak Berat sebanyak 1 *dummy* berupa *Website* (bk3bandung.kemnaker.go.id).

2) Balai K3 Medan sebesar Rp511.602.602

Penghentian Aset pada Balai K3 Medan sebesar Rp511.602.602 berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5/27/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp252.128.802, penghentian dilakukan karena aset dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk mendukung tugas dan fungsi Balai K3 Medan.
- b) Penghentian aset sebesar Rp259.473.800 merupakan penghentian aset yang disebabkan karena aset sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dalam kondisi rusak berat (tidak digunakan) sehingga tidak lagi dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai K3 Medan, yang terdiri dari:
 - (1) *Software* Komputer NUP 2 berupa Aplikasi Simpelkan dan Sinotra sebesar Rp248.173.000, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/28/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025; dan
 - (2) *Software* Komputer NUP 3 berupa Aplikasi Simora sebesar Rp11.300.000, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/30/UM.03.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025. Balai K3 Samarinda sebesar Rp1.227.587.800

3) Balai Makassar sebesar Rp1.227.587.800

Penghentian Aset pada Balai Makassar sebesar Rp2.619.743.176 berdasarkan:

- a) Surat Kepala Balai K3 Makassar Nomor 5.1/046/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp958.148.300 berupa *audiometer*, *water quality analizy*, *instrument probe*, kursi besi/metal, kendaraan bermotor khusus lainnya, meja rapat, hb meter.
- b) Surat Keterangan Kepala Balai K3 Makassar Nomor:5.1/009/UM.03.02/II/2026 tanggal 13 Februari 2026, transaksi penghentian aset dilakukan karena BMN tersebut akan diusulkan untuk penghapusan dan sudah tidak dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai K3 Makassar. Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp269.439.500.

4) Balai K3 Samarinda sebesar Rp2.619.743.176

Penghentian aset dari penggunaan pada Balai K3 Samarinda sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Samarinda Nomor 5.4/009/UM.03.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026. Penghentian aset dilakukan karena aset berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai K3 Samarinda berupa peralatan laboratorium, peralatan laboratorium kesehatan/kedokteran, peralatan optik dan pengamatan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, peralatan furnitur dan pendukung kantor/laboratorium, peralatan elektronik dan utilitas, peralatan umum lainnya. Atas aset tersebut akan diusulkan untuk dilakukan lelang.

5) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp32.916.623.991

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp32.916.623.991 berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Perubahan Pencatatan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/1/UM.03.00/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 sebesar Rp497.159.520 berupa:

Tabel 336 Penghentian Aset dari Penggunaan Berdasarkan
Suket Nomor 5/1/UM.03.00/III/2025 tanggal 26 Maret
Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Baju Tahan Api	1	15.019.400
Tool Electrical Set	1	125.620.000
Proteksi Lingkungan Lainnya	1	82.874.000
Thermal Imaging Camera	2	273.646.120
Total	5	497.159.520

- b) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang atas Pencatatan Aplikasi SAKTI Nomor 5/82/KU.07.04/IX/2025 tanggal 24 September 2025. Transaksi senilai Rp382.030.000 merupakan transaksi dikarenakan penyesuaian administrasi atas Surat Keputusan Penghapusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1/325/UM.03.03/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 (lelang BMN hasil penarikan wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat) berupa:

Tabel 337 Penghentian Aset dari Penggunaan Berdasarkan
Suket Nomor 5/82/KU.07.04/IX/2025 tanggal 24 September 2025
Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3

Nama Barang	Jml	Satuan	Sum of Nilai (Rp)
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	1	dummy	262.900.000
Earth / Ground Tester	1	Buah	119.130.000
	2		382.030.000

- c) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang atas Pencatatan Aplikasi SAKTI Nomor 5/88/KU.07.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 senilai Rp46.420.000. Penghentian Aset ini dilakukan karena penyesuaian administrasi pencatatan atas Surat Keputusan Penghapusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor:B-1/155/UM.03.03/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 (Penghapusan BMN di Jambi).

Tabel 338 Penghentian Aset dari Penggunaan Berdasarkan
Suket Nomor 5/88/KU.07.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025
Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3

Nama Barang	Jml	Satuan	Nilai (Rp)
Anemometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	Buah	7.480.000
Infrared Thermometer	3	Buah	38.940.000
Total	4		46.420.000

- d) Surat Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/113/KU.07.04/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 sebesar Rp15.719.250.000. Transaksi ini merupakan tindak lanjut atas reviu Inspektorat Jenderal terhadap aset Jaringan Tahun 2008 pada Ditjen Binwasnaker dan K3. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung, disimpulkan bahwa pengadaan jaringan pengawasan ketenagakerjaan Tahun 2008 senilai Rp4.092.025.000 merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Sistem Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset jaringan. Atas dasar tersebut, Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan koreksi pencatatan pada neraca laporan keuangan sebesar Rp4.092.025.000, sehingga nilai aset jaringan yang semula tercatat sebesar Rp19.811.275.000 menjadi Rp15.719.250.000.

- e) Surat Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor:5/113/KU.07.04/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 senilai Rp15.719.250.000. Transaksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas reviu Inspektorat Jenderal atas Jaringan 2008 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen pendukung maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan jaringan pengawasan ketenagakerjaan tahun 2008 senilai Rp4.092.025.000 merupakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan koreksi pencatatan pada neraca laporan keuangan senilai Rp4.092.025.000 sehingga nilai Jaringan yang semula sebesar Rp19.811.275.000 menjadi Rp15.719.250.000.
- f) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/122/KU.07.04/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025. Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 senilai Rp25.320.000. Merupakan penghentian aset berupa 1 unit Bus dikarenakan bus ini sudah tidak digunakan sebagai pendukung tugas dan fungsi Ditjen Binwasnaker dan K3. Bus saat ini berlokasi di Balai K3 Yogyakarta yang direncanakan akan dilakukan penghapusan melalui lelang;
- g) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/16/KU.07.04/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 senilai Rp6.300.688.025. transaksi ini dilakukan karena alat senilai Rp610.955.000 mengalami rusak berat dan aset senilai Rp5.689.733.025 berada di luar Ditjen Binwasnaker dan K3 sehingga pemanfaatannya digunakan oleh satker diluar kementerian dan harus dilakukan penghentian aset dari penggunaan;
- h) Surat Keterangan 5/15/KU.07.04/I/2026 tanggal 25 Januari 2026 senilai Rp18.515.000 berupa alat pemadam kebakaran NUP 43 senilai Rp3.500.000 dan infrared thermometer NUP 8 senilai Rp15.015.000. Transaksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/490/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 (penghapusan Gudang Bekasi);
- i) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/30/KU.07.04/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 senilai Rp2.123.047.200. Transaksi dilakukan untuk persiapan penghapusan aset BMN berupa kendaraan URC melalui lelang yang berada di kantor BBPVP Medan;
- j) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/35/KU.07.04/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 senilai Rp6.232.640.100, merupakan penyesuaian dari transaksi tindak lanjut hasil inventarisasi aset BMN ber KIB;
- k) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 senilai Rp341.000.000 berupa Mobil Ambulance NUP 2 milik anak satker Ditjen Binwasnaker dan K3 (002);
- l) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/33/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 senilai Rp133.481.146.
- m) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/16/KU.07.04/I/2026 tanggal 25 Januari 2026 senilai Rp300.000 berupa 3 buah DVD (Video) pada anak satker Ditjen Binwasnaker dan K3 (002). Penghentian ini dilakukan karena aset telah rusak dan tidak digunakan lagi dalam mendukung tugas dan fungsi Ditjen Binwasnaker dan K3.

- n) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/37/KU.07.04/I/2026 tanggal 13 Februari 2026 senilai Rp12.000.000 merupakan transaksi penghentian aset yang berasal dari transfer Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, dikarenakan kondisi rusak berat dan aset berada di luar satker kementerian dan sudah tidak digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satker Ditjen Binwasnaker dan K3, maka dilakukan penghentian.
- o) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/122/KU.07.04/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 senilai Rp1.084.773.000 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas ATB sehingga Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan inventarisasi Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/31/UM.03.02/XI/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 6) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp461.648.200

Penghentian aset dari penggunaan pada Balai Besar K3 Jakarta sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Balai Besar K3 Jakarta Nomor 5/5/202/UM.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, transaksi ini dilakukan karena aset telah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi Balai K3 Jakarta berupa:

Tabel 339 Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Balai Besar K3 Jakarta

URAIAN	QTY	JUMLAH
Truck Crane	1	358.000.000
Forklift	1	95.000.000
Jaringan Listrik Lainnya	1	8.648.200
Total	3	461.648.200

- e. Barenbang Ketenagakerjaan Sebesar Rp3.525.463.900

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Barenbang Ketenagakerjaan Sebesar Rp3.525.463.900 terdapat pada:

- 1) Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp223.984.000 merupakan penghentian aset dari penggunaan sebanyak 16 unit UPS dikarenakan perubahan kondisi barang tersebut dari baik menjadi rusak berat sehingga dihentikan status penggunaan barang. Surat Keterangan Perubahan Kondisi Dan Penghentian Aset Dari Penggunaan Nomor 7/748/UM.03.00/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
- 2) Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp3.119.429.900 merupakan tindak lanjut dari software yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dikarenakan kondisi sudah rusak berat/using/kadaluarsa masa penggunaannya. Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Barenbang Ketenagakerjaan Nomor 7/747/UM.03.00/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, dan sudah diusulkan proses penghapusan.

Tabel 340 Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Barenbang Ketenagakerjaan

Nama Barang	Kuantitas	Total Nilai (Rp)
Aplikasi Gis (Arcgis)	1	1.021.900.000
Aplikasi Datamart Excell	1	95.000.000
Aplikasi E-Modul	1	45.125.000
Aplikasi Executive Report	1	98.250.000
Aplikasi Reformasi Birokrasi	1	880.004.900
Aplikasi Spip	1	96.550.000
Aplikasi Sistem Command Center	1	684.100.000
Software Backup	1	198.500.000
Total	8	3.119.429.900

- 3) Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp74.250.000 merupakan tindak lanjut dari lisensi yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dikarenakan kondisi sudah rusak berat/using/kadaluasa masa penggunaannya. Surat pernyataan KPB Barenbang Ketenagakerjaan Nomor 7/1464/UM.03.00/IX/2025 tanggal 29 September 2025 berupa Navicat Premium V12, dan sudah diusulkan proses penghapusan.
 - 4) Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp107.800.000 merupakan tindak lanjut dari lisensi yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dikarenakan kondisi sudah rusak berat/using/kadaluasa masa penggunaannya, dan sudah diusulkan proses penghapusan.
- f. Ditjen Binalavotas sebesar Rp44.770.760.737

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp44.770.760.737 terdapat pada:

- 1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp98.892.750

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Bandung Barat sebesar Rp98.892.750 berupa sistem pelatihan terintegrasi Aplikasi SIMPEL berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPVP Bandung Barat Nomor 2.17/301/UM.03.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

- 2) BPVP Sidoarjo sebesar Rp2.880.979.774

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Sideoarjo sebesar Rp2.880.979.774 berupa penghentian penggunaan peralatan dan mesin sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 1/653/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.

- 3) BPVP Banyuwangi sebesar Rp570.474.006

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Banyuwangi (352631) sebesar Rp570.474.006 yaitu penghentian penggunaan peralatan dan mesin sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 2.22/142/UM.03.02/IX/2025 tanggal 23 September 2025.

- 4) BPVP Banda Aceh sebesar Rp1.393.795.020

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Banda Aceh sebesar Rp1.393.795.020 berupa perubahan kondisi Peralatan dan Mesin sesuai dengan Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Nomor 2.8/5525/UM.03.03/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024.

- 5) BPVP Padang sebesar Rp31.350.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Padang sebesar Rp31.350.000 berupa penghentian penggunaan aset tidak berwujud dengan Surat Keterangan

Nomor B-1/682/UM.03.03/XI/2025 tanggal 11 November 2025.

6) BPVP Kendari sebesar Rp73.610.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Kendari sebesar Rp73.610.000

Berupa penghentian penggunaan Software Pelatihan Desain Grafis dengan Surat Keterangan Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Nomor 2.13/3210/UM.03.04/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

7) BPVP Ambon sebesar Rp4.964.796.414

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Ambon sebesar Rp4.964.796.414 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SK Menaker No. 1/619/UM.03.03/XI/2024 tanggal 20 November 2024 berupa sepeda motor yamaha vixion dan bangunan toilet dan sesuai Surat Keterangan SK Menaker No.1/344/UM.03.00/IX/2025 tanggal 19 September 2025 berupa peralatan bengkel.

8) BPVP Lombok Timur sebesar Rp2.065.066.404

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Lombok Timur sebesar Rp2.065.066.404 yang berasal dari:

- a) Surat Keterangan Nomor B-1/449/UM.03.03/VI/2025 tanggal 30 Juli 2025 berupa software komputer dan sesuai Surat Keterangan Nomor 1/349/UM.03.00/IX/2025 tanggal 22 September 2025 berupa peralatan rumah tangga dan peralatan bengkel sebesar Rp1.978.166.404.
- b) Penghentian penggunaan Software Komputer dengan Surat Keterangan Nomor 2.18/138/UM.03.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025 sebesar Rp86.900.000

9) Satker Ditjen Binalavotas

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp232.065.500 berupa 1 unit *Software* Microsoft Windows Server 2008, 17 unit *Software* Microsoft Windows 8.1 Pro, 1 unit *software* Microsoft Office *Home and Student*, dan 1 unit *software* Aplikasi sitem layanan pada Dit Produktivitas berdasarkan surat keterangan Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 2/7474/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025

10) BBPVP Medan sebesar Rp10.653.092.865

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BBPVP Medan (451094) sebesar Rp10.653.092.865 yaitu penghentian aset dari penggunaan berupa penghentian penggunaan peralatan dan mesin sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 2.2/3/KU.07/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

11) BPVP Samarinda sebesar Rp870.860.000

Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Samarinda sebesar Rp870.860.000 berupa penghentian penggunaan Pagar Permanen, Bangunan Menara/Bak Penampung/*Reservoir* Air Minum NUP 01 dan Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 1/653/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.

12) BBPVP Bandung sebesar Rp18.478.921.506

- a) Penghentian Aset dari Penggunaan BBPVP Bandung sebesar Rp9.487.883.906 sesuai Surat Persetujuan Penjualan Peralatan Dan Mesin dengan nilai perolehan di bawah 100juta rupiah Nomor B1/371/UM.03.03/V/2025 tanggal 14 Mei 2025.

- b) Penghentian Aset dari Penggunaan BBPVP Bandung sebesar Rp8.991.037.600 berupa Penghentian ATB berupa *software* komputer sesuai Surat Keterangan Plt. Kepala BBPVP Bandung Nomor 2.5/12042/UM.03.02/XII/2025.
- 13) BPVP Ternate sebesar Rp968.359.000
Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPVP Ternate sebesar Rp968.359.000 berupa Penghentian penggunaan Rumah Negara yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen 1 unit sebesar Rp65.039.000 dan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 10 unit dengan sebesar Rp903.320.000 dengan Surat Keterangan Nomor 1/84/UM.03.03/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.
- 14) BBPVP Semarang sebesar Rp457.125.578
Penghentian Aset dari Penggunaan pada BBPVP Semarang (452609) sebesar Rp457.125.578 yaitu penghentian penggunaan peralatan dan mesin sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.172.110.600 sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 2.6/291/UM.03.03/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan penghentian Aset Tak berwujud berupa *software* sebanyak 47 unit dengan nilai perolehan Rp.285.014.968 sesuai dengan surat keterangan perubahan kondisi dan penghentian penggunaan BMN Nomor 2.6/629/UM.03.03/ X/2015 tanggal 13 Oktober 2025.
- 15) BBPVP Makassar sebesar Rp64.780.000
 - a) Penghentian Aset dari Penggunaan pada BBPVP Makassar sebesar Rp1.980.000 berupa penghentian penggunaan motor Yamaha Force Bebek I dengan surat keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06XI/2025 tanggal 5 November 2025.
 - b) Penghentian Aset dari Penggunaan pada BBPVP Makassar sebesar Rp62.800.000 berupa *software* komputer berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang BBPVP Makassar Nomor 2.13/056/KU.07.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 16) Dit. Binalavogan sebesar Rp813.319.648
 - a) Penghentian Aset dari Penggunaan pada Dit. Binalavogan sebesar Rp765.819.648 berupa penghentian penggunaan peralatan dan mesin dengan Surat Keterangan Nomor B-1/545/UM.03.03/VIII/2025I tanggal 28 Agustus 2025.
 - b) Penghentian Aset dari Penggunaan pada Dit. Binalavogan sebesar Rp47.500.000 berupa penghapusan ATB (*software*) SIMRAT berdasarkan Surat Keterangan Direktur Binalavogan Nomor 2.4/426/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 3. Penghentian Sementara KDP sebesar Rp393.752.000
 - a) BPVP Ternate berupa Perencanaan *Land Clearing* untuk pembangunan BLK Sofifi yang tidak memiliki kelanjutan realisasi pengerjaan fisiknya sebesar Rp272.00.000 dengan surat keterangan Kuasa Pengguna Barang BPVP Ternate Nomor 2.14/208/UM.03.00/V/2025 tanggal 9 Mei 2025.
 - b) BPVP Padang berupa Pembangunan Pendopo/Aula Terbuka sebesar Rp121.752.000 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.9/69/UM.03/XI/2025 tanggal 14 November 2025.

4. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp375.839.296.

Tabel 341 Mutasi Tambah (Pencatatan Pembatalan)
Barang Yang Mau dihapuskan Pada Mutasi Aset Lain-Lain

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	9.500.000
Sekretariat Jenderal			9.500.000
026.05	451270	Satker Ditjen PHI & JSK	306.746.466
Ditjen PHI & JSK			306.746.466
026.13	230302	BPVP Lombok Timur	57.612.830
	452652	BBPVP Makassar	1.980.000
Ditjen Binalavotas			59.592.830
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan			375.839.296

a. Sekretariat jenderal sebesar Rp9.500.000

Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp9.500.000 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa kamera digital berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Hukum Nomor 1/2325/UM.03.00/X/2025 tanggal 14 Agustus 2025.

b. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp306.746.466

Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp306.746.466 pada Ditjen PHI dan Jamsos untuk melakukan pengajuan ulang pemindahtanganan berupa penjualan secara *scrap* sebanyak 11 unit dan telah mendapatkan persetujuan pemindahtanganan oleh KPKNL Jakarta III Nomor S-169/MK/KNL.0703/20205 tanggal 7 Juli 2025, dengan surat keterangan KPB Nomor 4/562/UM.03.00/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

Ditjen Binalvotas sebesar Rp59.592.830

3) BPVP Lombok timur sebesar Rp57.612.830

Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satuan kerja BPVP Lombok timur sebesar Rp57.612.830.

4) BBPVP Makassar sebesar Rp1.980.000

Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.980.000 pada BBPVP Makassar berupa 2 unit sepeda motor sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06XI/2025 tanggal 5 November 2025

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan sebesar Rp1.192.675.953

Tabel 342 Mutasi Kurang (Penghapusan Pada Mutasi Aset Lain-Lain)

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	53.602.000
Sekretariat Jenderal			53.602.000
026.04	451139	Satker Ditjen Binapenta dan PKK	581.935.000
	690633	BPKK Kendari	149.110.357
Ditjen Binapenta dan PKK			731.045.357
026.08	651870	Satker Ditjen Binwasnaker dan K3	408.028.596
Ditjen Binwasnaker dan K3			408.028.596
Penghapusan			1.192.675.953

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp53.602.000

Penghapusan sebesar Rp53.602.000 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa *station wagon* dan sepeda motor berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Nomor 1/774/UM.03.03/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp731.045.357

Penghapusan Barang pada Satker Ditjen Binapenta dan PKK serta BPKK Kendari sebesar Rp731.045.307 sesuai Kepmenaker Nomor 1/354/UM.03.03/IX/2025 tentang Penghapusan BMN tanggal 23 September 2025 berupa *minibus*, *jeep*, kasur, lemari, dan alat lainnya.

c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp408.028.596

Penghapusan pada Ditjen Binwasnaker dan K3 merupakan penghapusan peralatan dan mesin sebanyak 1.379 barang sebesar Rp408.028.596 berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/150/UM.03.03/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp110.805.646.
- 2) Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Setditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 1/234/UM.03.03/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 senilai Rp166.296.900.
- 3) Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/230/UM.03.03/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 (penghapusan aset BMN di Jawa Timur -100 juta) senilai Rp69.543.650.
- 4) Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Setditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 1/233/UM.03.03/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025 (Penghapusan Inventaris Kantor Gedung ex Bina K3 Cempaka Putih) senilai Rp61.382.400.

2. Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp1.452.466.500

Tabel 343 Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) Aset Lain-Lain

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.08	139017	Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat	148.428.500
	169013	Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur	88.250.000
	179020	Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara	303.198.000
	209019	Dinas Transnaker Provinsi Sulawesi Tenggara	106.750.000
	309024	Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.750.000
Ditjen Binwasnaker & K3			666.376.500
026.13	029014	Disnakertrans Provinsi Jawa Barat	110.390.000
	099006	Disnakertrans Provinsi Riau	147.250.000
	209020	Dinas Transnaker Provinsi Sulawesi Tenggara	107.240.000
	219010	Dinas Nakertrans Provinsi Maluku	98.350.000
	289010	Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	221.250.000
	319018	Disnaker, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	83.450.000
	340021	Disnaker Daerah Provinsi Sulawesi Barat	18.160.000
Ditjen Binalavotas			786.090.000
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)			1.452.466.500

a. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp666.376.500

Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan) pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp666.376.500 terdapat pada:

- 1) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp148.428.500 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/222/UM.03.00/IX/2025 tanggal 9 September 2025.
- 2) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp88.250.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur dan satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/551/UM.03.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024.
- 3) Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp303.198.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/237/UM.03.00/IX/2025 tanggal 26 September 2025.
- 4) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp106.750.000 dan aset ekstrakomtabel senilai Rp4.500.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/225/UM.03.00/IX/2025 tanggal 26 September 2025
- 5) Disnakertrans Provinsi Bangka Belitung senilai Rp19.750.000, sesuai Berita Acara Serah Terima Aset BMN antara Disnakertrans Provinsi Bangka Belitung dan Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 5/183/UM.03.00/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

b. Ditjen Binalavotas sebesar Rp786.090.000

Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan) pada Ditjen Binalavotas sebesar Rp786.090.000 terdapat pada:

- 1) Disnakertrans Prov. Jawa Barat sebesar Rp110.390.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 6116/KU.03.07/Lattas tanggal 4 September 2025.
- 2) Disnakertrans Prov. Riau sebesar Rp147.250.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 413/Disnakertrans.ses/2025 tanggal 8 September 2025.
- 3) Distransnaker Prov. Sultra sebesar Rp107.240.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 560/110 tanggal 3 September 2025.
- 4) Disnakertrans Prov. Maluku sebesar Rp98.350.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 900.1.3.10/17/2025 tanggal 8 September 2025.
- 5) Disnakertrans Prov. Maluku Utara sebesar Rp221.250.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 000.3.4/891/BAST/DTT-MU/XI/2025 tanggal 23 September 2025.
- 6) DPMESDM-Naker Prov. Gorontalo sebesar Rp83.450.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 560/DTKESDMTRANS/738.a/IX/2025 tanggal 8 September 2025.
- 7) Disnakertrans Prov. Sulbar sebesar Rp18.160.000 berupa likuidasi aset tetap satker dekonsentrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 000/475/2025 Tanggal 3 September 2025.

3. Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp12.082.457.663

Tabel 344 Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) Aset Lain-Lain

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.04	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	3.899.823.165
Ditjen Binapenta dan PKK			3.899.823.165
026.08	350084	Balai Besar k3 Jakarta	477.400.000
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	4.700.545.954
Ditjen Binwasnaker dan K3			5.177.945.954
026.13	451026	Satker Ditjen Binalavotas	3.004.688.544
Ditjen Binwasnaker dan K3			3.004.688.544
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)			12.082.457.663

a. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp3.899.823.165

Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp3.899.823.165 pada satker Ditjen Binapenta dan PKK atas asset BKOL sebanyak 1.116 unit Peralatan Mesin dihibahkan ke beberapa Dinas Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah Ke Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Surat Keputusan Nomor 1/203/UM.03.03/V/2025 Tanggal 27 Mei 2025.
- 2) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singigi dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 3) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18

Desember 2024.

- 4) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pelalawan dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 5) Hibah Ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 6) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 7) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 8) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 sejumlah 39 unit.
- 9) Hibah Ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 10) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto, dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 11) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, dengan Surat Keputusan Nomor 1/646/UM.03.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 12) Hibah Ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Surat Keputusan Nomor 1/655/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 13) Hibah Ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, dengan Surat Keputusan Nomor 1/655/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 14) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara, dengan Surat Keputusan Nomor 1/655/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 15) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai, dengan Surat Keputusan Nomor 1/655/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 16) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Keputusan Nomor 1/655/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 17) Hibah Ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat, dengan Surat Keputusan Nomor 1/655/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 18) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, dengan Surat Keputusan Nomor 1/182/UM.03.03/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.
- 19) Hibah Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, dengan Surat Keputusan Nomor 1/123/UM.03.03/III/2025 tanggal 03 Maret 2025.
- 20) Hibah Ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, dengan Surat Keputusan Nomor 1/121/UM.03.03/III/2025 tanggal 03 Maret 2025.
- 21) Hibah Ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Surat Keputusan Nomor 1/122/UM.03.03/III/2025 tanggal 03 Maret 2025.

b. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp5.177.945.954

Pengurangan melalui Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp5.177.945.954 terdapat pada satuan kerja:

- 1) Balai K3 Jakarta ke Disnakertrans Sumatera Barat dan Disnaker Provinsi Lampung sebesar Rp477.400.000 sesuai dengan:
 - a) Surat Keputusan Penghapusan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/166/UM.03.03/IV/2025 tanggal 21 April 2025, Hibah Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat berupa Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya NUP 4 tahun 2014 senilai Rp238.700.000.
 - b) Surat Keputusan Penghapusan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/166/UM.03.03/IV/2025 tanggal 21 April 2025, Hibah Disnakertrans Provinsi Lampung berupa Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya NUP 1 tahun 2014 senilai Rp238.700.000.
- 2) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp4.700.545.954
 - a) Surat Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/101/KU.07/XI/2025 tanggal 4 November 2025 Hibah antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan Disnakertrans Provinsi D.I. Yogyakarta senilai Rp576.507.541 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/406/UM.03.03/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Penghapusan BMN Pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 berupa:

Tabel 345 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/406/UM.03.03/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 Pada Ditjen Binwasnaker dan K3

Nama	Jumlah	Nilai (Rp)
<i>Ampere Meter / Clamp Meter</i>	1	5.280.000
<i>Anemometer</i> (Alat Pengukur Keadaan Alam)	3	108.482.550
<i>Emergency Kit</i>	2	84.480.000
<i>Full Body Harness</i>	3	12.127.500
<i>Knife Hand</i>	3	4.521.000
<i>Lux Meter</i> (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	1	3.617.646
<i>Montle Heater</i>	1	32.994.500
<i>Personal Heat Stress Monitor</i>	3	72.382.143
<i>Pulse Generator</i> (Alat Ukur Universal)	1	30.000.000
<i>Singgle Shock tube Initiator</i>	3	8.992.500
Tandu Lipat	2	7.876.000
<i>Thermometer</i> (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	7.040.000
<i>Vibration Monitor</i>	2	198.713.702
Total	26	576.507.541

- b) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/15/KU.07.04/I/2026 tanggal 25 Januari 2026 senilai Rp3.369.283.913, merupakan hibah keluar antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Disnaker Provinsi Lampung khususnya UPTD K3 Lampung berupa aset alat uji sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/490/UM.03.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- c) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/17/KU.07.04/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 senilai Rp310.354.500, merupakan hibah antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Disnakertrans Provinsi DIY sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Hibah Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/666/UM.03.03/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.
- d) Surat Keterangan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/134/KU.07.04/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 senilai Rp444.400.000 merupakan hibah antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dan

Disnaker Kota Dumai berupa Mobil Ambulance NUP 46 senilai Rp444.400.000 sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Hibah Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/459/UM.03.03/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025.

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp3.004.688.54

Hibah Keluar (BMN Yang Di Hentikan) Ditjen Binalavotas sebesar Rp3.004.688.544 terdapat pada satker Ditjen Binalavotas berupa Sepeda Motor, Bangunan dan Peralatan Lain-lain sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1/424/UM.03.03/XI/2025 tanggal 14 November 2025.

4. Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp36.220.522.837

Tabel 346 Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif Aset Lain-Lain

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	450938	Sekretariat Jenderal	309.500.000
Sekretariat jenderal			309.500.000
026.04	690633	BPKK Kendari	60.848.000
Ditjen Binapenta dan PKK			60.848.000
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	24.572.000
Ditjen PHI dan Jamsos			24.572.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	1.089.969.100
	350081	Balai K3 Medan	7.500.000
	350083	Balai K3 Samarinda	4.765.818.937
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	28.507.962.300
Ditjen Binwasnaker dan K3			34.371.250.337
026.11	452677	Barembang Ketenagakerjaan	27.614.000
Barembang Ketenagakerjaan			27.614.000
026.13	021212	BPVP Bandung Barat	547.805.000
	089378	BPVP Padang	367.770.000
	352631	BPVP Belitung	131.850.000
	451108	BPVP Samarinda	11.351.500
	452652	BBPVP Makasaar	367.962.000
Ditjen Binalavotas			1.426.738.500
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif			36.220.522.837

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp309.500.000

Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp309.500.000 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa kendaraan roda 4 dan *camera digital* berdasarkan Surat Keterangan Kepala Perencanaan dan Manajemen Kinerja Nomor 1/316/UM.03.00/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025.

b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp60.848.000

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan Ditjen Binapenta dan PKK pada BPKK Kendari sebesar Rp60.848.000 berupa:

Tabel 347 Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif pada Ditjen Binapenta dan PKK

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	Partisi	16	Buah	44.480.000
2	Lemari Penyimpan	2	Buah	11.368.000
3	Kursi Fiber Glas/Plastik	5	Buah	5.000.000
total				60.848.000

c. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp24.572.000

Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp24.572.000 merupakan transaksi reklasifikasi dari aset tetap tindak lanjut hasil inventarisasi berupa perubahan kodesifikasi alat angkutan dengan surat keterangan KPB Nomor 4/2320/UM.03.00/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp34.371.250.337

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp1.089.969.100

Penggunaan kembali pada Balai K3 Bandung dilakukan karena aset sudah dilakukan perbaikan dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai K3 Bandung, sesuai dengan:

- a) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Bandung Nomor 5.3/26/UM.03.04/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 sebesar 572.056.600.
- b) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Bandung Nomor 5.3/220/UM.03.04/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 senilai Rp213.892.500 berupa audiometer, EKG monitor dan vacuum pump berupa meja *computer*, *stack sampler*, *exposure time* meter, kursi besi, metal.
- c) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Balai K3 Bandung Nomor 5.3/257/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp304.020.000 berupa 1 buah *filling cabinet dan vibration meter* yang telah selesai diperbaiki sehingga dapat digunakan kembali sebagai pendukung tugas dan fungsi BK3 Bandung.

2) Balai K3 Medan sebesar Rp7.500.00

Penggunaan kembali pada Balai K3 Medan sebesar Rp7.500.00 berupa 3 buah meja kerja besi/metal. Transaksi ini dilakukan karena BMN tersebut sudah diperbaiki dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai K3 Medan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai K3 Medan Nomor 5.2/14/UM.03.04/VII/2025 tanggal 24 Juni 2025.

3) Balai K3 Samarinda sebesar Rp4.765.818.937

Penggunaan kembali pada Balai K3 Samarinda sebesar Rp4.765.818.937 dilakukan karena aset diperoleh dari transaksi transfer masuk (henti guna) yang berasal dari satker Ditjen Binwasnaker dan K3 tahun 2024. Namun karena perolehan aset tidak aktif dan sudah tidak digunakan oleh satker Binwasnaker dan K3, maka agar dapat digunakan dan dilakukan pemeliharaan oleh Balai K3 Samarinda maka harus dilakukan transaksi penggunaan kembali atas aset tersebut Surat Keterangan Kepala Balai K3 Samarinda Nomor 5.4/010/UM.03.04/II/2026 tanggal 18 Februari 2026.

4) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp28.507.962.300

- a) Tindaklanjut reviu Inspektorat Jenderal atas Jaringan 2008 pada Ditjen Binwasnaker dan K3 atas TLHP BPK tahun 2008 sebesar Rp19.811.275.000.
- b) Surat Keterangan Nomor 5/30/KU.07.04/II/2026 tanggal 5 Februari 2025 transaksi penggunaan kembali aset BMN senilai Rp2.123.047.200 dikarenakan aset berupa kendaraan akan dilakukan koreksi penambahan nilai melalui transaksi koreksi susulan namun aset telah dilakukan penghentian penggunaan sehingga untuk melakukan koreksi susulan perlu dilakukan pengaktifan aset terlebih dahulu.

- c) Surat Keterangan Nomor 5/35/KU.07.04/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 senilai Rp6.232.640.100 transaksi penggunaan kembali dilakukan untuk menyesuaikan ketidaksesuaian kodefikasi atas hasil inventarisasi aset BMN ber KIB program Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Berita Acara Sensus BMN Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/36/UM.03.04/XI/2025 tanggal 17 November 2025.
- d) Surat Keterangan Nomor 5/34/KU.07.04/II/2026 tanggal 13 Februari 2025, transaksi penggunaan kembali dilakukan sebagai penyesuaian kodefikasi atas hasil inventarisasi aset BMN ber KIB program Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Berita Acara Sensus BMN Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/36/UM.03.04/XI/2025 tanggal 17 November 2025. Transaksi ini terdapat pada aset anak satker Ditjen Binwasnaker dan K3 (002) berupa Mobil Unit Kesehatan Masyarakat NUP 28 senilai Rp341.000.000.
- e. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp27.614.000
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp27.614.000 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi Kendaraan Tahun 2025 dengan BA Sensus BMN Nomor 7/203/UM.03.02/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025, sekaligus akan dipergunakan kembali berupa 2-unit kendaraan sepeda motor di unit kerja Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan sebagai bentuk optimalisasi kendaraan operasional di lingkungan Barenbang Ketenagakejaan.
- f. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.426.738.500
- 1) BPVP Bandung Barat sebesar Rp547.805.000
- Penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaan aktif pada BPVP Belitung sebesar Rp547.805.000 berupa 1-unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.11/0231/UM.03.04/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025.
- 2) BPVP Padang sebesar Rp367.770.000
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada BPVP Belitung sebesar Rp367.770.000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 2.9/86/UM.03.02/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 berupa 2-unit *station wagon*, 1 unit sedan, dan 2-unit jeep.
- 3) BPVP Belitung sebesar Rp131.850.000
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada BPVP Belitung sebesar Rp131.850.000 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi KIB sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:2.24/119/UM.03.02/XI/2025 Tanggal 27 November 2025.
- 4) BPVP Samarinda sebesar Rp11.351.500
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada BPVP Samarinda sebesar Rp11.351.500 merupakan reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebanyak 1-unit rumah negara golongan II Tipe B permanen berupa rumah negara golongan II Tipe B Permanen NUB 02 dengan nominal sebesar Rp11,351,500 menjadi berdasarkan surat keterangan Nomor 2.11/ 0231 /UM.03.04/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025.
- 5) BBPVP Makassar sebesar Rp367.962.000
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada BBPVP Makassar sebesar Rp367.962.000 merupakan eklasifikasi tugu/tanda batas administrasi (pagar tembok) setelah dilakukan perubahan kondisi dan

dikeluarkan dari aset yang tidak digunakan sehingga direklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/275/UM.03.06/VIII/2025 Tanggal 7 Agustus 2025.

5. Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp75.308.928.871 terdapat pada:

Tabel 348 Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan Aset Lain-Lain

Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
026.01	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	100.626.000
	450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	3.674.458.362
	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	1.196.076.801
Sekretariat Jenderal			4.971.161.163
026.04	259322	BBPKK Bandung	1.865.400
	451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	1.947.534.477
	690633	BPKK Kendari	956.978.057
	690634	BPKK Bekasi	216.575.000
Ditjen Binapenta dan PKK			3.122.952.934
026.05	451270	Ditjen PHI dan Jamsos	137.795.000
Ditjen PHI dan Jamsos			137.795.000
026.08	350079	Balai K3 Bandung	44.000.000
	350081	Balai K3 Medan	1.042.690.900
	350083	Balai K3 Samarinda	282.148.790
	651870	Satker Ditjen Binwasnaker & K3	30.680.012.419
Ditjen Binwasnaker dan K3			32.048.852.109
026.13	051102	BPVP Banyuwangi	570.474.006
	089378	BPVP Padang	71.070.000
	209255	BPVP Kendari	73.610.000
	219228	BPVP Ambon	4.964.796.414
	230302	BPVP Lombok Timur	2.127.489.754
	352631	BPVP Belitung	123.044.980
	426531	BPVP Serang	382.881.420
	451094	BPVP Medan	10.652.702.865
	451108	BPVP Samarinda	870.860.000
	452533	Sekretariat BNSP	2.212.596.406
	452542	BPVP Bandung	9.979.031.594
	452595	BPVP Ternate	968.359.000
	452609	BPVP Semarang	302.971.578
	452652	BPVP Makassar	1.980.000
	626132	Direktorat Bina Lavogan	1.726.299.648
Ditjen Binalavotas			35.028.167.665
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan			75.308.928.871

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.971.161.163

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp100.626.000

Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp100.626.000 sesuai Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/504/UM.03.03/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.674.458.36

Pencatatan barang yang mau dihapuskan pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.674.458.36 yang berdasarkan:

- Surat Keterangan Kepala Biro Organisasi dan SDMA Nomor S57/MK.6/KNL.0703/2025 pada tanggal 17 Maret 2025 berupa sepeda motor dan minibus (penumpang 14 orang kebawah).
- Surat Keterangan Kepala Biro Hukum Nomor 1/1236/UM.03/XII/2025 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 1/1020/UM.03/X/2025 pada tanggal 28 Oktober 2025 berupa kendaraan roda 2 dan 4, laptop, *kitchen set* dan lain-lain.

- c) Surat Keterangan Kepala Biro Kerja Sama Nomor 1/316/UM.03.03/IX/2025 pada tanggal 4 September 2025 dan 1/313/UM.03.03/IX/2025 pada tanggal 3 September 2025 berupa sepeda motor dan minibus (penumpang 14 orang kebawah).
- 3) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.196.076.801
Pencatatan barang yang mau dihapuskan pada Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.196.076.801 berupa bangunan gedung tempat ibadah permanen.
- b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp3.122.952.934
 - 1) BBPKK Bandung sebesar Rp1.865.400
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada BBPKK Bandung merupakan domba dan sapi perah sesuai Surat Nomor 3.1/4071/UM.03.03/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
 - 2) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp1.947.534.477
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Pada satker Ditjen Binapenta dan PKK sesuai dengan:
 - a) Surat Persetujuan Penghapusan Nomor 1/495/UM.03.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
 - b) Surat Persetujuan Penghapusan Nomor B-1/531/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.
 - c) Surat Persetujuan Penghapusan Nomor B-1/571/UM.03.03/IX/2025 tanggal 4 September 2025.
 - 3) BPKK Kendari sebesar Rp956.978.057
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Pada BPKK Kendari sebesar Rp956.978.057 sesuai dengan:
 - a) Surat Persetujuan Penghapusan Nomor 3.9/776/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
 - b) Surat Persetujuan Penghapusan Nomor 3.9/1017/UM.03.03/IX/2025 tanggal 24 September 2025.
 - 4) BPKK Bekasi sebesar Rp216.575.000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Pada BPKK Bekasi sebesar Rp216.575.000 sesuai dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor 1/262/UM.03.00/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025.
- c. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp137.795.000
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan sebesar Rp137.795.000 merupakan tindaklanjut pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa peralatan dan mesin LCD/infocus, layar Infokus, A.C. *Slide proyektor*, laptop dan *Notebook*, dan telah diterbitkan SK Penghapusan Nomor 1/415/UM.03.03/XI/2025 tanggal 5 November 2025.
- d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp32.048.852.109
 - 1) Balai K3 Bandung sebesar Rp44.000.000
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan Pada Balai K3 Bandung Pencatatan

Barang yang mau dihapuskan senilai Rp44.000.000, transaksi sebagai administrasi pengelolaan penghapusan aset BMN melalui penjualan lelang berupa *Software* dari Baik menjadi Rusak Berat sebanyak 1 *dummy* berupa Website (bk3bandung.kemnaker.go.id).

2) Balai K3 Medan sebesar Rp1.042.690.900

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan Pada Balai K3 Medan Rp1.042.690.900 dengan transaksi sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Penghapusan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/154/UM.03.03/IV/2025 tanggal 8 April 2025 senilai Rp269.187.000, merupakan transaksi penghapusan aset BMN melalui mekanisme penjualan lelang sebagai bagian dari administrasi pengelolaan BMN, berupa sepeda motor dan minibus.
- b) Surat Keputusan Penghapusan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/464/UM.03.03/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 senilai Rp773.503.900, merupakan transaksi penghapusan aset BMN melalui mekanisme penjualan lelang sebagai bagian dari administrasi pengelolaan BMN, berupa lemari dan peralatan lainnya.

3) Balai K3 Samarinda sebesar Rp282.148.790

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan Pada Balai K3 Samarinda Rp282.148.790 merupakan transaksi sebagai administrasi pengelolaan penghapusan aset BMN melalui penjualan lelang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/465/UM.03.03/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025.

4) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp30.680.012.419

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan Pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp30.680.012.419 merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Transaksi dilakukan karena adanya rencana penjualan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin melalui lelang, Dasar transaksi tersebut adalah:

- a) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Ditjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/122/KU.07.04/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 senilai Rp1.084.773.000 berupa Software Komputer sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas ATB sehingga Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan inventarisasi Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya.
- b) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/1/UM.03.00/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 sebesar Rp642.851.020.
- c) Berita Acara Penelitian Harga Limit Nomor 5/1/UM.03.03/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp17.218.135.975 dan pada Anak Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 (002) senilai Rp1.142.541.500.
- d) Surat Keterangan KPB Nomor 5/82/KU.07.04/IX/2025 tanggal 24 September 2025 senilai Rp603.050.800 tentang perubahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI.
- e) Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/81/KU.07.04/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang perubahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI senilai Rp102.372.600.
- f) Surat Persetujuan Penjualan Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-1/155/UM.03.03/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang persetujuan penjualan BMN Pada Ditjen Binwasnaker dan K3 (Aset BMN yang berada di wilayah Jambi) senilai Rp9.682.982.141.

- g) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/87/KU.07.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 senilai Rp194.321.383.
- h) Surat Keterangan Pencatatan Aplikasi SAKTI Kuasa Pengguna Barang Nomor 5/89/KU.07.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 senilai Rp9.184.000.
- e. Ditjen Binalavotas sebesar Rp35.028.167.665
Pencatatan barang yang mau dihapuskan Ditjen Binalavotas sebesar Rp35.028.167.665
Terdapat pada:
 - 1) BPVP Banyuwangi sebesar Rp570.474.006
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Banyuwangi sebesar Rp570.474.006 berdasarkan SK 2.22/229/UM.03.03/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 berupa *whiteboard*, *printer*, *tangga*, *PC*, *kursi* dan *perkakas kantor* lainnya.
 - 2) BPVP Padang sebesar Rp71.070.000
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Padang Rp71.070.000 sesuai dengan:
 - a) Surat Keterangan Nomor B-1/682/UM.03.03/XI/2025 tanggal 17 November 2025 menjadi dasar transaksi sebesar (Rp31.350.000) berupa aset tidak berwujud, yaitu *software Wilcom E4 Decorating*.
 - b) Surat Keterangan Nomor 1/479/UM.03.03/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 menjadi dasar transaksi sebesar (Rp39.720.000) berupa 2 (dua) unit kendaraan, yaitu mobil Kijang dan Suzuki Carry.
 - 3) BPVP Kendari sebesar Rp73.610.000
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Kendari Rp73.610.000 sebanyak 14 *dummy Software* Komputer berupa *Software* Komputer berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2.13/2521/UM.03.03/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025.
 - 4) BPVP Ambon (219228) sebesar Rp4.964.796.414
Pencatatan barang yang mau dihapuskan pada BPVP Ambon berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat SK Menaker Nomor 1/344/UM.03.00/IX/2025 tanggal 19 September 2025.
 - 5) BPVP Lombok Timur (230302) sebesar Rp2.127.489.754
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Lombok Timur sebesar Rp2.127.489.754 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-1/449/UM.03.03/VI/2025 tanggal 30 Juli 2025, Surat Keterangan Nomor 1/349/UM.03.00/IX/2025 tanggal 22 September 2025, Surat Keterangan Nomor 1/481/UM.03.00/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - 6) BPVP Belitung sebesar Rp123.044.980
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Belitung sebesar Rp123.044.980 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1/325/UM.03.03/IX/2025 tanggal 16 September 2025.
 - 7) BBPVP Serang sebesar Rp382.881.420
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BBPVP Serang sebesar Rp382.881.420 berupa sepeda motor, peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BBPVP Serang Nomor 2.3/238/UM.03.00/VII/2025 tanggal 18 Juni 2025.

8) BBPVP Medan sebesar Rp10.652.702.865

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BBPVP Medan sebesar Rp10.652.702.865 berupa sepeda motor, peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1/526/UM.03.03/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Surat Keterangan Nomor 2.2/1/KU.07/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Surat Keterangan Nomor 2.2/21/UM.03.03/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.

9) BPVP Samarinda sebesar Rp870.860.000

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Samarinda sebesar Rp870.860.000 merupakan penghentian penggunaan pagar permanen, bangunan menara/bak penampung/reservoir air minum nup 01 dan bangunan rumah negara Golongan II Tipe D Permanen sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 1/653/UM.03.03/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.

10) Sekretariat BNSP sebesar Rp2.212.596.406

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada Sekretariat BNSP sebesar Rp2.212.596.406 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1/324/UM.03.03/IX/2025 tanggal 15 September 2025.

11) BBPVP Bandung sebesar Rp9.979.031.594

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BBPVP Bandung sebesar Rp9.979.031.594 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-1/371/UM.03.03/V/2025 tanggal 14 Mei 2025.

12) BPVP Ternate sebesar Rp968.359.000

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BPVP Ternate sebesar Rp968.359.000 yaitu penghentian penggunaan rumah negara yang terdiri dari

- a) Rumah negara Golongan II Tipe E Permanen 1-unit sebesar Rp65.039.000
- b) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 10-unit dengan sebesar Rp903.320.000 dengan surat keterangan 1/84/UM.03.03/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.

13) BBPVP Semarang sebesar Rp302.971.578

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BBPVP Semarang sebesar Rp302.971.578 berupa bangunan tempat sampah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:S-274/MK/KNL.0901/2025 tanggal 8 Agustus 2025 dan *Software* Komputer sesuai Surat Keterangan Nomor B-1/786/UM.03.03/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

14) BBPVP Makassar sebesar Rp1.980.000

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada BBPVP Makassar sebesar Rp1.980.000 berupa Sepeda Motor sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2.12/420/UM.03.06/XI/2025 tanggal 5 November 2025.

15) Direktorat Binalavogan sebesar Rp1.726.299.648

Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan pada Direktorat Binalavogan sebesar Rp1.726.299.648 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-1/545/UM.03.03/VIII/2025l tanggal 28 Agustus 2025.

C.4.7. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp537.797.321.058)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp537.797.321.058) dan (Rp528.842.569.730).

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 349 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Aset Tak Berwujud	187.464.587.434	(130.673.527.336)	56.791.060.098
Software	181.032.971.288	(128.785.893.526)	52.247.077.762
Lisensi	6.265.191.800	(1.887.633.810)	4.377.557.990
ATB Lainnya	166.424.346	-	166.424.346
Aset Lain-Lain	556.910.344.246	(407.123.793.722)	149.580.319.049
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	539.332.040.324	(389.751.721.275)	149.580.319.049
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	17.578.303.922	(17.372.072.447)	206.231.475
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	744.374.931.680	(537.797.321.058)	206.371.379.147

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp1.333.024.695.556

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp1.333.024.695.556 dan Rp2.074.259.186.302.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 350 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Utang kepada Pihak Ketiga	1.330.279.151.979	2.072.858.512.346	(742.579.360.367,00)	(35,8239)
Pendapatan Diterima Dimuka	2.734.659.421	1.125.326.400	1.609.333.021	143,01
Uang Muka dari KPPN	-	263.374.984	(263.374.984,00)	(100,0000)
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.884.156	11.972.572	(1.088.416,00)	(9,0909)
Jumlah	1.333.024.695.556	2.074.259.186.302	(741.234.490.746,00)	(35,7349)

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp1.330.279.151.979

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.330.279.151.979 dan Rp2.072.858.512.346.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga menurut masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 351 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga menurut masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	6.579.114.907	4.323.089.979	2.256.024.928	52,19
Inspektorat Jenderal	188.240.051	156.172.810	32.067.241	20,53
Ditjen Binapenta & PKK	1.943.932.766	749.954.843.375	(748.010.910.609)	(99,74)
Ditjen PHI & JSK	1.140.561.271.521	1.140.340.788.305	220.483.216	0,02
Ditjen Binwasnaker & K3	804.071.018	3.619.596.160	(2.815.525.142)	(77,79)
Barenbang	9.712.964.470	9.218.679.464	494.285.006	5,36
Ditjen Binalavotas	170.489.557.246	165.245.342.253	5.244.214.993	3,17
Jumlah	1.330.279.151.979	2.072.858.512.346	(742.579.360.367)	(35,82)

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga menurut akun disajikan sebagai berikut.

Tabel 352 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Menurut Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.422.344.176	926.732.771	2.495.611.405	269,29
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	133.897.604.507	1.960.050.263	131.937.554.244	6.731,34
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.192.959.203.296	1.322.232.829.312	(129.273.626.016)	(9,78)
212192	Dana Pihak Ketiga	-	747.738.900.000	(747.738.900.000)	(100,00)
Jumlah		1.330.279.151.979	2.072.858.512.346	(742.579.360.367,00)	(35,82)

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp3.422.344.176 terdiri dari:

Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Menurut Eselon I sebagai berikut:

Tabel 353 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Menurut Eselon I

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	863.001.473	196.528.934	666.472.539	339,12
Inspektorat Jenderal	22.583.819	6.766.510	15.817.309	233,76
Ditjen Binapenta & PKK	529.921.375	127.557.643	402.363.732	315,44
Ditjen PHI & JSK	220.483.216	-	220.483.216	-
Ditjen Binwasnaker & K3	376.606.502	64.964.227	311.642.275	479,71
Barembang Ketenagakerjaan	326.373.966	7.070.666	319.303.300	4.516
Ditjen Binalavotas	1.083.373.825	523.844.791	559.529.034	107
Jumlah	3.422.344.176	926.732.771	2.495.611.405	269,29

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp863.001.473

Tabel 354 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Sekretariat Jenderal

Akun	Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212111	02601	352632	Politeknik Ketenagakerjaan	71.272.045
212111	02601	450938	Sekretariat Jenderal	733.882.076
212111	02601	450990	PPSDM Ketenagakerjaan	1.946.640
212111	02601	626011	Pusat Pasar kerja	55.900.712
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar - Sekretariat Jenderal				863.001.473

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp71.272.045

- Pembayaran kekurangan gaji bulan Desember 2025 untuk 2 pegawai sebesar Rp268.642.
- Pembayaran kekurangan uang makan PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp451.000 untuk 1 pegawai.
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja susulan PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp4.061.773 untuk 1 pegawai.
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 sebesar Rp42.122.274 untuk 41 pegawai.
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp19.956.957 untuk 21 pegawai.
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 sebesar Rp4.250.312 untuk 1 pegawai.
- Pembayaran kekurangan gaji bulan Desember 2025 sebesar Rp161.087.

2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp733.882.076

- Pembayaran kekurangan Uang Makan PNS bulan Desember TA 2025 sebesar Rp183.277.000.
- Pembayaran kekurangan Uang Makan PPPK bulan Desember TA 2025 sebesar Rp57.372.000.
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja PNS TA 2025 sebesar Rp373.023.279.
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja PPPK TA 2025 sebesar Rp96.833.344.

- e) Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 untuk 3 Pegawai Biro Hukum sebesar Rp1.152.009.
- f) Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja CPNS TA. 2025 Rp22.224.444.
- 3) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.946.640
 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.946.640 merupakan pembayaran tunjangan kinerja CPNS bulan Juli-Desember Tahun 2025 a.n. Dhien Wangi Negara dengan nomor SPP 00106 tanggal 30 April 2026.
- 4) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp55.900.712
 - a) Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan November dan Desember Tahun 2025 sebesar Rp8.525.188 untuk 1 Pegawai Pusat Pasar Kerja berdasarkan SPP 00015T tanggal 29 Januari 2026.
 - b) Kekurangan Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan KGB bulan Agustus–September dan Desember Tahun 2025 sebesar Rp1.317.676 untuk 9 pegawai atau 27 jiwa berdasarkan SPP 00011T tanggal 8 Januari 2026.
 - c) Kekurangan Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji bulan November 2025–Desember 2025 sebesar Rp2.632.520 untuk 2 pegawai berdasarkan SPP 00012T tanggal 8 Januari 2026.
 - d) Jurnal koreksi atas kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja CPNS tahun 2025 sebesar Rp43.425.328.
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp22.583.819
 - 1) Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2025 untuk 1 Pegawai sebesar Rp323.429 sesuai SP2D Nomor 261820000004671.
 - 2) Pembayaran belanja pegawai gaji susulan PPPK bulan Oktober, November dan Desember sebesar Rp10.383.093 sesuai SP2D Nomor 261820000007547.
 - 3) Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Desember 2025 atas nama Amirulloh, S.E sebesar Rp258.266 sesuai SP2D Nomor 261820000008848
 - 4) Pembayaran belanja pegawai uang makan bulan Oktober, November dan Desember 2025 sebesar Rp1.924.000 sesuai SP2D Nomor 261820000008292.
 - 5) Kekurangan tunjangan kinerja CPNS bulan Mei Tahun 2025 sebesar Rp9.695.031 untuk 43 Pegawai yang belum dibayarkan.
- c. Ditjen Binapenta & PKK sebesar Rp529.921.375

Tabel 355 Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Pada Ditjen Binapenta dan PKK

Akun	Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212111	02604	259322	BBPKK Bandung	49.827.677
		451139	Satker Ditjen Binapenta & PKK	432.372.712
		690633	BPKK Kendari	11.414.216
		690634	BPKK Bekasi	36.306.770
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar - Ditjen Binapenta & PKK				529.921.375

- 1) BBPKK Bandung sebesar Rp49.827.677
 - a) Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada BBPKK Bandung sebesar Rp4.649.148 merupakan kekurangan tunjangan fungsional dan tunjangan PPh PNS Bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025 untuk 1 pegawai atau 1 jiwa SPM 0051 tanggal 20 Februari 2026 dengan Nomor SP2D 260220000006130 tanggal 20 Februari 2026.
 - b) Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada BBPKK Bandung sebesar Rp8.848.992 merupakan kekurangan tunjangan kinerja bulan November s.d. Desember tahun 2025 untuk 1 Pegawai SPM 0062 tanggal 26 Februari 2026 dengan Nomor SP2D 260220000007514 tanggal 27 Februari 2026.
 - c) Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada BBPKK Bandung sebesar Rp11.235.441 merupakan jurnal pengakuan atas kekurangan pembayaran beban pegawai berupa kekurangan gaji PNS bulan Agustus 2022 s.d. Desember 2024 untuk 1 pegawai atau 1 jiwa SPM 0051 tanggal 20 Februari 2026 dengan Nomor SP2D 260220000006130 tanggal 20 Februari 2026.
 - d) Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada BBPKK Bandung sebesar Rp24.503.184 merupakan jurnal pengakuan atas kekurangan pembayaran beban pegawai berupa kekurangan tunjangan kinerja CPNS Bulan Mei s.d. Desember tahun 2025.
- 2) Satker Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp432.272.712
 - a) Uang Makan PNS dan CPNS bulan Desember 2025 untuk 275 pegawai senilai Rp169.324.000, sesuai dengan SPM Nomor 00005A tanggal 13 Januari 2026.
 - b) Uang Makan PPPK bulan Desember 2025 untuk 82 pegawai senilai Rp53.042.000, sesuai dengan SPM Nomor 00007A tanggal 13 Januari 2026.
 - c) Kekurangan gaji PNS bulan Desember 2025 untuk 56 pegawai atau 161 jiwa dikarenakan Kenaikan Gaji Berkala sebesar Rp8.373.485, sesuai dengan SPM Nomor 00041A tanggal 06 Februari 2026.
 - d) Kekurangan pembayaran beban pegawai berupa tunjangan kinerja PNS bulan November dan Desember tahun 2025 kepada 14 pegawai sebesar Rp25.926.690 berdasarkan SPM Nomor 0068A tanggal 20 Februari 2026 yang terdiri dari:
 - (1) Perubahan penilaian kinerja pegawai sebesar Rp6.879.516.
 - (2) Perubahan jabatan dari Jabatan Pelaksana menjadi Jabatan Fungsional sebesar Rp1.336.076.
 - (3) Perubahan kelas jabatan akibat kenaikan jenjang pada Jabatan Fungsional sebesar Rp17.711.098.
 - e) Kekurangan pembayaran beban pegawai sebesar Rp175.706.537 sesuai Surat Keterangan Nomor B-3.1/2830/KU.06.00/IV/2026 tanggal 30 April 2026.
- 3) BPKK Kendari sebesar Rp11.414.216

Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada BPKK Kendari sebesar Rp11.414.216 merupakan kekurangan atas pembayaran Tunjangan Kinerja

CPNS Bulan Mei s/d Desember tahun 2025 sesuai Surat Keterangan Nomor 3.9/428/KU.02.01/IV/2026 tanggal 30 April 2026.

4) BPKK Bekasi sebesar Rp36.306.770

- a) Kekurangan gaji pegawai yang terdiri dari 2 orang pegawai dengan perubahan jabatan fungsional ahli pertama menjadi ahli muda. 1 orang pegawai dengan perubahan jabatan pelaksana menjadi fungsional ahli muda senilai Rp4.603.712 sesuai (SPM 007).
- b) Kekurangan tunjangan kinerja pegawai yang terdiri dari 2 orang pegawai dengan perubahan jabatan fungsional ahli pertama menjadi ahli muda. 1 orang pegawai dengan perubahan jabatan pelaksana menjadi fungsional ahli muda senilai Rp11.204.049 sesuai dengan SPM 034.
- c) Kekurangan Tunjangan Kinerja CPNS bulan Mei s.d. Desember tahun 2025 senilai Rp20.499.009 sesuai Surat Keterangan Nomor 3.8/322/KU.01/IV/2026 tanggal 28 April 2026.

d. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp220.483.216

Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Ditjen PHI dan Jamsos per 31 Desember 2025 tercatat Rp220.483.216. Nilai tersebut merupakan kewajiban atas:

- 1) Pengakuan kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja CPNS bulan Juni s.d. Desember Tahun 2025 sebesar Rp215.784.076. Pengakuan tersebut telah direviu oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Nota Nomor 6.4/184/PW.02/V/2026 tanggal 5 Mei 2026 dan didukung Surat Pernyataan KPA Nomor 4.1/573/KU.02/V/2026 tanggal 4 Mei 2026.
- 2) Pengakuan atas kekurangan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp4.699.140 berupa kekurangan Tunjangan Kinerja pegawai yang melaksanakan tugas belajar pada Ditjen PHI dan Jamsos Tahun 2025.

e. Ditjen Binwasnaker & K3 sebesar Rp376.606.502

Tabel 356 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Ditjen Binwasnaker dan K3

Akun	Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212111	02608	350079	Balai K3 Bandung	26.064.545
		350081	Balai K3 Medan	24.202.596
		350082	Balai K3 Makassar	15.420.262
		350083	Balai K3 Samarinda	14.634.253
		350084	Balai Besar K3 Jakarta	37.522.603
		651870	Satker Dijen Binwasnaker & K3	258.762.243
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar - Ditjen Binwasnaker dan K3				376.606.502

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp26.064.545

Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Balai K3 Bandung per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp26.064.545. Nilai tersebut merupakan kewajiban atas:

- a) Kekurangan tunjangan kinerja Bulan Desember 2025 yang dibayarkan di tahun 2026 sebesar untuk 2 pegawai sebesar Rp752.000, berdasarkan SP2D Nomor 260220000000805 tanggal 12 Januari 2026.

- b) Kekurangan tunjangan kinerja Bulan Desember 2025 yang dibayarkan di tahun 2026 sebesar untuk 2 pegawai Bandung sebesar Rp660.874, berdasarkan SP2D Nomor 260220000000796 tanggal 12 Januari 2026.
 - c) Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja CPNS bulan Mei s.d. Desember 2025 sebesar Rp24.651.671 yang masih harus dibayar untuk 8 pegawai.
- 2) Balai K3 Medan sebesar Rp24.202.596
- a) Kekurangan uang makan bulan Desember 2025 yang dibayarkan di tahun 2026 sebesar Rp10.489.000 untuk 18 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 0008 dan SP2D Nomor 261230000001435 tanggal 19 Januari 2026.
 - b) Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja CPNS bulan Mei s.d. Desember 2025 sebesar Rp13.713.596 yang masih harus dibayar untuk 9 pegawai.
- 3) Balai K3 Makassar sebesar Rp15.420.262
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Balai K3 Makassar sebesar Rp15.420.262 merupakan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja CPNS bulan Mei s.d. Desember 2025 yang masih harus dibayar untuk 7 pegawai.
- 4) Balai K3 Samarinda sebesar Rp14.634.253
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Balai K3 Samarinda sebesar Rp14.634.253 merupakan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja CPNS bulan Mei s.d. Desember 2025 yang masih harus dibayar untuk 17 pegawai.
- 5) Balai Besar K3 Jakarta Rp37.522.603
- a) Kekurangan gaji bulan November s.d. Desember 2025 sebesar Rp2.727.600 untuk 1 pegawai/3 jiwa, sesuai SPM Nomor 00005T tanggal 9 Januari 2026.
 - b) Kekurangan gaji PNS bulan Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp934.136 untuk 6 pegawai/15 jiwa, sesuai SPM Nomor 00017T tanggal 3 Februari 2026.
 - c) Kekurangan tunjangan kinerja PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp3.036.886 untuk 10 pegawai, sesuai SPM Nomor 00008T tanggal 13 Januari 2026.
 - d) Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja CPNS bulan Mei s.d. Desember 2025 sebesar Rp30.823.981 yang masih harus dibayar untuk 14 pegawai.
- 6) Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp258.762.243
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Satker Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp258.762.243 merupakan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja CPNS Bulan Mei s.d. Desember 2025 yang masih harus dibayar untuk 92 pegawai.

f. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp326.373.966

- 1) Kekurangan uang belanja pegawai berupa gaji susulan bulan Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp7.607.175 untuk 1 pegawai/1 jiwa (3 bulan), berdasarkan SPM Nomor 00033 tanggal 13 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000002598 tanggal 14 Januari 2026.
- 2) Kekurangan uang belanja pegawai berupa gaji susulan PPPK bulan Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp9.630.456 untuk 1 pegawai/3 jiwa (3 bulan), berdasarkan SPM Nomor 00034 tanggal 14 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000002735 tanggal 14 Januari 2026.
- 3) Kekurangan uang belanja pegawai berupa uang makan PPPK bulan Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp1.470.000 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00037 tanggal 21 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000004061 tanggal 21 Januari 2026.
- 4) Pembayaran belanja pegawai berupa uang makan bulan Oktober 2025 sebesar Rp703.000 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00039 tanggal 22 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000004403 tanggal 22 Januari 2026.
- 5) Kekurangan uang belanja pegawai berupa uang makan bulan November 2025 sebesar Rp444.000 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00040 tanggal 22 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000004412 tanggal 22 Januari 2026.
- 6) Kekurangan uang belanja pegawai berupa uang makan bulan Desember 2025 sebesar Rp333.000 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00041 tanggal 22 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000004405 tanggal 22 Januari 2026.
- 7) Kekurangan uang tunjangan kinerja susulan bulan November 2025 sebesar Rp3.584.967 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00045 tanggal 26 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000005054 tanggal 26 Januari 2026.
- 8) Kekurangan uang tunjangan kinerja susulan bulan Oktober 2025 sebesar Rp3.558.932 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00044 tanggal 26 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000005053 tanggal 26 Januari 2026.
- 9) Kekurangan uang tunjangan kinerja susulan bulan Desember 2025 sebesar Rp3.537.750 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00046 tanggal 26 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000005052 tanggal 26 Januari 2026.
- 10) Kekurangan uang tunjangan kinerja susulan PPPK bulan Oktober 2025 sebesar Rp3.124.377 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00047 tanggal 26 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000005086 tanggal 27 Januari 2026
- 11) Kekurangan uang tunjangan kinerja susulan PPPK bulan November 2025 sebesar Rp3.134.250 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00048 tanggal 26 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000005085 tanggal 27 Januari 2026.
- 12) Kekurangan uang tunjangan kinerja susulan PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp3.132.840 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00049 tanggal 26 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000005084 tanggal 27 Januari 2026.
- 13) Kekurangan uang makan bulan Desember 2025 sebesar Rp369.000 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00059 tanggal 5 Februari 2026 dan SP2D Nomor 261820000007889 tanggal 5 Februari 2026.

- 14) Kekurangan tunjangan kinerja susulan PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp3.126.352 untuk 1 pegawai, berdasarkan SPM Nomor 00060 tanggal 6 Februari 2026 dan SP2D Nomor 261820000008246 tanggal 6 Februari 2026.
- 15) Kekurangan tunjangan kinerja PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp5.285.897 untuk 1 pegawai a.n. HB, berdasarkan SPM Nomor 00071 tanggal 18 Februari 2026 dan SP2D Nomor 261820000011404 tanggal 18 Februari 2026.
- 16) Kekurangan gaji bulan Desember 2024 s.d. Desember 2025 sebesar Rp4.293.179 untuk 2 pegawai/2 jiwa, berdasarkan SPM Nomor 00117 tanggal 17 Maret 2026 dan SP2D Nomor 261820000025282 tanggal 17 Maret 2026, terkait kenaikan pangkat a.n. RS bulan Desember 2024 s.d. Desember 2025 dan adanya SK Struktural a.n. LH dari November 2025 s.d. Desember 2025.
- 17) Kekurangan gaji bulan Desember 2025 sebesar Rp2.194.634 untuk 16 pegawai/45 jiwa, berdasarkan SPM Nomor 00131 tanggal 2 April 2026 dan SP2D Nomor 261820000028799 tanggal 2 April 2026.
- 18) Kekurangan tunjangan kinerja CPNS Barenbang Ketenagakerjaan bulan Mei s.d. Desember 2025 sebesar Rp270.844.157, berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Barenbang Nomor 7.1/195/KU.08.03/V/2026 tanggal 4 Mei 2026.

g. Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.083.373.825

Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp1.083.373.825 Ditjen Binalavotas merupakan kekurangan gaji dan tunjangan kinerja akibat penambahan CPNS dan P3K, serta mutasi dan promosi pegawai. Selain itu, terdapat kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja CPNS periode Mei sampai dengan Desember 2025 pada seluruh satker di bawah Ditjen Binalavotas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 357 Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Ditjen Binalavotas

Kode Es 1	Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212111	02613	021212	BPVP Bandung Barat	27.037.604
		035636	BPVP Surakarta	13.895.227
		050302	BPVP Sidoarjo	54.798.357
		051102	BPVP Banyuwangi	9.405.929
		065106	BPVP Banda Aceh	12.543.580
		089378	BPVP Padang	52.220.688
		191206	BPVP Bantaeng	38.849.056
		209255	BPVP Kendari	22.233.639
		219228	BPVP Ambon	20.515.157
		230302	BPVP Lombok Timur	40.411.800
		352630	BPVP Pangkep	30.835.347
		352631	BPVP Belitung	44.991.904
		426531	BBPVP Serang	20.996.806
		451026	Satker Ditjen Binalavotas	176.804.689
		451094	BBPVP Medan	80.630.145
		451108	BPVP Samarinda	41.759.872
		452533	Sekretariat BNSP	31.652.367
		452542	BBPVP Bandung	19.381.438
		452558	BBPVP Bekasi	27.005.834
		452589	BPVP Sorong	65.116.902
		452595	BPVP Ternate	16.397.623
		452609	BBPVP Semarang	165.910.166
		452652	BBPVP Makassar	69.979.695
Ditjen Binalavotas				1.083.373.825

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp133.897.604.507

Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Menurut Eselon I sebagai berikut:

Tabel 358 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Menurut Eselon I

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	810.449.525	903.787.603	(93.338.078,00)	(10,3274)
Inspektorat Jenderal	434.232	-	434.232	-
Ditjen Binapenta & PKK	63.962.628	-	63.962.628	-
Ditjen Binw asnaker & K3	163.070.793	-	163.070.793	-
Barenbang	-	519.250	(519.250,00)	(100,00)
Ditjen Binalavotas	132.859.687.329	1.055.743.410	131.803.943.919	12.484
Jumlah	133.897.604.507	1.960.050.263	131.937.554.244	6.731,34

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp810.449.525

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp810.449.525 terdapat pada Satker Sekretariat Jenderal.

Tabel 359 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Pada Sekretariat Jenderal

Akun	Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212112	02601	450938	Sekretariat Jenderal	746.052.523
		450990	PPSDM Ketenagakerjaan	56.575.797
		626011	Pusat Pasar kerja	7.821.205
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Sekretariat Jenderal				810.449.525

1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp746.052.523

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp746.052.523 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran PPK Biro Umum Nomor 00017T tanggal 14 Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan listrik bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp738.453.799.
- Tagihan air bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp880.052.
- Tagihan telepon bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp6.718.672.

2) PSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp56.575.797

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada PSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp56.575.797 berupa tagihan penggunaan listrik PSDM bulan Desember 2025 sesuai Invoice Nomor AGA.04/UP3.cdt/2026/450990 tanggal 6 Januari 2026.

3) Pusat Pasar Kerja sebesar Rp7.821.205

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Pusat Pasar Kerja sebesar Rp7.821.205 berupa Beban Langganan Air periode bulan Desember 2025 berdasarkan Nomor Tagihan 678752545054 tanggal 1 Desember 2025 untuk Masa Bayar s.d 20 Januari 2026.

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp434.232

Belanja barang yang masih harus dibayar pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp434.232 merupakan kekurangan pembayaran belanja barang berupa abodemen langganan telepon dengan nomor layanan 0215250348 selama 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

c. Ditjen Binapenta dan PKK Rp63.962.628

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Binapenta dan PKK Rp63.962.628 terdapat pada Satker BPKK Bekasi yang terdiri dari:

- 1) Pembayaran tagihan atas listrik senilai Rp61.381.672 (SPM 006) yang dibayarkan pada Bulan Januari 2026.
- 2) Pembayaran langganan air senilai Rp2.314.600 (013) yang dibayarkan pada Bulan Januari 2026.
- 3) Pembayaran tagihan rekening telepon senilai Rp266.356 (SPM 005) bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2026.

d. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp163.070.793

Tabel 360 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Pada Ditjen Binwasnaker

Akun	Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212112	02608	350079	Balai K3 Bandung	20.898.184
		350081	Balai K3 Medan	19.996.276
		350083	Balai K3 Samarinda	46.032.346
		350084	Balai Besar K3 Jakarta	76.143.987
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar - Ditjen Binwasnaker dan K3				163.070.793

1) Balai K3 Bandung sebesar Rp20.898.184

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Balai K3 Bandung sebesar Rp20.898.184 merupakan kekurangan pembayaran listrik bulan Desember 2025.

2) Balai K3 Medan sebesar Rp19.996.276

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Balai K3 Medan sebesar Rp19.996.276 merupakan Jurnal Kekurangan pembayaran listrik bulan Desember 2025.

3) Balai K3 Samarinda sebesar Rp46.032.346

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Balai K3 Samarinda sebesar Rp46.032.346 merupakan Jurnal Kekurangan pembayaran listrik, telepon dan air bulan Desember 2025.

4) Balai K3 Jakarta sebesar Rp76.143.987

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Balai K3 Jakarta sebesar Rp76.143.987 merupakan Jurnal penyesuaian kekurangan pembayaran langganan listrik dan air bulan Desember 2025.

e. Ditjen Binalavotas sebesar Rp132.859.687.329

Belanja barang yang masih harus dibayar per-31 Desember 2025 tercatat sebesar sebesar Rp132.859.687.329. Nilai tersebut merupakan kewajiban atas:

- 1) Tagihan listrik, air, telepon dan internet hingga 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp503.866.375 yang terdapat pada satker:

Tabel 361 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet Pada Ditjen Binalavotas

Kode Es1	Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212112	02613	021212	BPVP Bandung Barat	27.434.432
		051102	BPVP Banyuwangi	8.967.700
		426531	BBPVP Serang	112.933.731
		451108	BPVP Samarinda	41.355.473
		452558	BBPVP Bekasi	85.490.500
		452589	BPVP Sorong	92.724.945
		452609	BBPVP Semarang	63.629.224
		452652	BBPVP Makassar	71.330.370
Ditjen Binalavotas				503.866.375
Jumlah				503.866.375

- 2) Kekurangan uang saku peserta pemagangan periode Desember Tahun 2025 sebesar Rp132.355.820.954 pada Ditjen Bina Lavogan dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 362 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Kekurangan Uang Saku Peserta Pemagangan Pada Ditjen Binalavogan

Periode Magang	Jumlah (Rp)
Batch 1	20.478.526.991
Batch 1B	1.035.993.275
Batch 2	60.433.308.113
Batch 3	50.407.992.585
	132.355.820.964

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.192.959.203.296

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Menurut Eselon I sebagai berikut:

Tabel 363 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Menurut Eselon I

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	4.905.663.909	3.222.773.442	1.682.890.467	52,22
Inspektorat Jenderal	165.222.000	149.406.300	15.815.700	10,59
Ditjen Binapenta & PKK	1.350.048.763	2.088.385.732	(738.336.969,00)	(35,35)
Ditjen PHI & JSK	1.140.340.788.305	1.140.340.788.305	-	-
Ditjen Binwasnaker & K3	264.393.723	3.554.631.933	(3.290.238.210,00)	(92,56)
Barenbang	9.386.590.504	9.211.089.548	175.500.956	1,91
Ditjen Binalavotas	36.546.496.092	163.665.754.052	(127.119.257.960,00)	(77,67)
Jumlah	1.192.959.203.296	1.322.232.829.312	(129.273.626.016,00)	(9,78)

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.905.663.909

1) Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp1.576.462.492

- a) Pembayaran jasa alih daya Security PT Bintang Mitra Pratama Tahun 2025 sebesar Rp87.082.319.
- b) Pembayaran jasa alih daya Pramubakti PT Bintang Mitra Pratama Tahun 2025 sebesar Rp64.609.722.
- c) Pembayaran jasa alih daya Cleaning Service PT Bintang Mitra Pratama Tahun 2025 sebesar Rp100.504.012.
- d) Pembayaran pengawasan pembangunan Workshop K3 oleh PT Daya Cipta Kreasi Bersama sebesar Rp145.243.437.
- e) Pembayaran pengawasan pembangunan Workshop K3 oleh PT Karya Cipta Artha Mandiri sebesar Rp1.178.848.247.
- f) Pengembalian belanja LS yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp174.755.

2) Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.497.300.113

Tabel 364 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Pada Satker Sekretariat Jenderal

NO	NAMA SUPPLIER	NOMOR KONTRAK	NOMOR BAST/BAPP	TANGGAL BAST/BAPP	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	PT BAYAN BANGUN SELARAS	SP. 1/01/UM.02.01/III/202	1/01H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	57.035.421	Pekerjaan Pembayaran gaji tenaga alih daya Biro Humas
2	PT CAKRADATA TEKNOLOGI INDONESIA	SP. 10/01/UM.02.01/III/202	1/10H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	6.700.000	Pekerjaan Pembuatan Monitoring Akun
3	PT BINOKULAR MEDIA UTAMA	SP. 12/01/UM.02.01/IV/202	1/12H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	19.998.500	Pekerjaan Pembuatan Monitoring & Analisis Media Cetak, Online dan Elektronik
4	PT BAYAN BANGUN SELARAS	SP. 23/01/UM.02.01/VIII/2	1/23H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	47.346.192	Pekerjaan Pembayaran gaji tenaga out sourcing kehumasan Biro Humas
5	PT IVONESIA SOLUSI DATA	SP. 8/01/UM.02.01/III/202	1/08H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	10.000.000	Pekerjaan Layanan Pengelolaan Media Sosial
6	PT CAKRADATA TEKNOLOGI INDONESIA	SP. 9/01/UM.02.01/III/202	1/09H/UM.01.04/XII/2025	31-12-2025	15.000.000	Pekerjaan Pembuatan Monitoring & Analisis Media Sosial
7	PT. GARDA JAYA SENTIKA	1/1/UM.02.00/I/2025	1/853/KU.02.00/XII/2025	31-12-2025	472.330.000	Biaya Operasional Petugas Keamanan (Outsourcing) Gatsu 51
8	PT.RIVADA SEJAHTERA ABADI	1/2/UM.0200/I/2025	1/854/KU.02.00/XII/2025	31-12-2025	412.030.000	Biaya Operasional Petugas Kebersihan (Outsourcing) Gatsu 51
9	PT. AJAVI MUBAROK	1/5/UM.02.00/I/2025	1/855/KU.02.00/XII/2025	31-12-2025	456.860.000	Biaya Operasional Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Gatsu 51
TOTAL					1.497.300.113	

3) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp1.328.094.684

- a) Pembayaran tenaga alih daya *call center*, tenaga alih daya *call center*, *driver*, pramubhakti, pramutaman, *resepsionis*, teknisi kelistrikan, kliner junior PPSDM Ketenagakerjaan TA. 2025 selama 2 bulan PT. Natria

Bifalfis Sukses dengan Nomor Kontrak
EP01K7620WXE0H0XJXX4CE9MZQXJ tanggal 15 Oktober
2025 sebesar Rp463.865.824.

- b) Belanja jasa lainnya tenaga alih daya untuk *security* PT. Komando Trisula Perkasadengan Nomor Kontrak SPK.1/16/KU.02.01/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 sebesar Rp106.289.820.
- c) Kontrak biaya Program Kegiatan Pelatihan *Strategic Thingking* Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan TA 2025 PT. Trustco Cipta Madania dengan Nomor Kontrak EP01KCRR77WS6RFQP4B7CDE65NGG tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp757.939.040.
- d) Tagihan penggunaan listrik bulan desember PT. PLN (Persero) dengan Invoice No. AGA.04/UP3.cdt/2026/450990 tanggal 6 Januari 2026 sebesar Rp. 56.575.797.
- 4) Pusat pasar Kerja sebesar Rp503.806.620

Tabel 365 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Pada Satker Pusat Pasar Kerja

NO	Uraian	Nomor dan Tanggal Kontrak	NILAI (Rp)
1	Paket Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan Pusat Pasar Kerja Tahun 2025	1/5285-PPK/KU.02.01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	56.840.000
2	Paket Pengadaan Jasa Outsourcing Alih Daya Pusat Pasar Kerja Tahun 2025	1/5285-PPK/KU.02.01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	331.916.620
3	Paket Pengadaan Jasa Outsourcing Alih Daya Bulan Oktober s.d Desember Pusat Pasar Kerja Tahun 2025	1/3737-PPK/KU.02.01/X/2024 tanggal 1 Oktober 2025	95.250.000
4	Paket Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Alih Lead Front End Engineer Aplikasi KarirHub Pusat Pasar Kerja	1/3721-PPK/KU.02.01/IX/2024 tanggal 30 September 2025	9.900.000
5	Paket Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Alih System Architect Aplikasi KarirHub Pusat Pasar Kerja	1/3722-PPK/KU.02.01/IX/2024 tanggal 30 September 2025	9.900.000
RPATA			503.806.620

- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp165.222.000

Utang kepada pihak ketiga lainnya ini berupa dana di Rekening Penampungan – Kementerian/Lembaga. Rincian atas dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 366 Utang Kepada Pihak Ketiga
Pada Inspektorat Jenderal

Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Supplier	Nilai RPATA (Rp)
259031	Inspektorat Jenderal	6/8/UM.02.01/I/2025	Paket Pengadan Tenaga Ahli Daya (Outsourcing) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025	PT. BINAJASA ABADIKARY A	Rp 158.077.000
259031	Inspektorat Jenderal	6/2/UM.02.01/SPK/VI	Paket Pengadan Tenaga Ahli Daya (Outsourcing) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Pengemudi) Tahun 2025	PT. BINAJASA ABADIKARY A	Rp 7.145.000
Total					Rp 165.222.000

- c. Ditjen Binapenta & PKK sebesar Rp1.350.048.763

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.350.048.763 merupakan dana Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) atas pembayaran kontraktual yang memiliki Berita Acara Serah Terima tanggal 31 Desember 2025 pada Satker

Direktorat Bina PKK dan Satker BBPKK Bandung Barat dengan rincian sebagai berikut:

1) Satker Dit. Bina PKK sebesar Rp1.137.560.000

Tabel 367 Utang Kepada Pihak Ketiga Pada Dit. Bna PKK

No	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai Kontrak Pembayaran RPATA (Rp)
1	PT AJAVI MUBAROK	3/25/KU.02.01/II/2025	261820000000172	06/01/2026	473.620.000
2	PT AYOOKLIK AIRMAS PERKASA	3/135/KU.02.01/II/2025	261820000000162	06/01/2026	26.000.000
3	PT AJAVI MUBAROK	3/133/KU.02.01/II/2025	261820000000244	06/01/2026	58.365.000
4	PT AJAVI MUBAROK	3/165/KU.02.01/II/2025	261820000000295	06/01/2026	65.000.000
5	WAKID ALI MUNTOHA	3/112/KU.02.01/II/2025	261820000000166	06/01/2026	8.745.000
6	PT AJAVI MUBAROK	3/134/KU.02.01/II/2025	261820000000164	06/01/2026	505.830.000
Total					Rp 1.137.560.000

2) BBPKK Bandung Barat sebesar Rp212.488.763

Tabel 368 Utang Kepada Pihak Ketiga
Pada BBPKK Bandung Barat

No.	Nomor dan Tgl SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	259990302015197 22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01JZ2094E1ZYCMQ7EZ2GVHR67D untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Pramubakti Administrasi dan Pengemudi Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	23.493.672
2	259990302015134 22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JX75G1MB4C5KZKQ0E6Q0FC6 untuk Jasa Langganan Internet BBPKK Bandung Barat Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	28.860.000
3	259990302015133 22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01JZPH7YNT61FR84DW2RZZ8FT4 untuk Pengadaan Jasa Outsourcing SPPKK Dumai Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	43.539.021
4	259990302015196 22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JZ2CR6E29FQ9M9S7KDPG9HMH untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Petugas Keamanan Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	46.954.460
5	259990302015194 22-12-2025	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JYZJAK7SFWQBTSQSTBJVP1F6 untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan Bulan Juli s.d Desember Tahun 2025	69.641.610
Jumlah			212.488.763

d. Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp1.140.340.788.305

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.140.340.788.305 merupakan Pembayaran iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bulan Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 sesuai dengan Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor:PE.12.03/LHP-217/D104/2/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Semula tagihan Iuran Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditagihkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp1.419.856.082.696 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 369 Tagihan BPJS Ketenagakerjaan atas iuran peserta JKP pada 2023

No	Bulan	Tahun	Jumlah (tagihan) (Rp)	Nilai (Rp)
1	Desember	2022	12.396.939	102.918.534.711,15
2	Januari	2023	8.489.612	70.213.392.493,86
3	Februari	2023	9.684.131	82.233.122.194,04
4	Maret	2023	10.253.372	87.587.845.976,22
5	April	2023	9.357.573	80.198.939.551,33
6	Mei	2023	10.314.587	88.098.167.252,03
7	Juni	2023	9.798.197	83.809.554.715,39
8	Juli	2023	10.328.969	88.222.715.754,63
9	Agustus	2023	10.316.907	88.304.594.829,88
10	September	2023	10.199.941	86.974.005.979,84
11	Oktober	2023	10.534.969	89.873.251.845,77
12	November	2023	10.440.702	88.999.326.471,60
13	Desember	2023	11.992.214	102.907.336.528,77
TOTAL				1.140.340.788.304,51

telah dilakukan reviu oleh BPKP melalui LHP Nomor PE.12.03/LHP-217/D104/2/2024 tanggal 31 Desember 2024, tagihan iuran peserta Program JKP periode Desember 2022 hingga Desember 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 370 Hasil Reviu BPKP atas Tagihan BPJS Ketenagakerjaan atas iuran peserta JKP pada Desember 2022 dan 2023

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Iuran Bulan	Tagihan (Rp)	Kelebihan / Kekurangan	Tagihan (Rp)
1	B/140/012023	9 Jan 2023	DES 2022	119.325.782.790,85	(322.968.249,74)	119.002.814.541,11
2	B/768/022023	7 Feb 2023	JAN 2023	84.850.265.991,53	(21.667.710,46)	84.828.598.281,07
3	B/1524/032023	7 Mar 2023	FEB 2023	101.543.242.263,50	(79.233.248,86)	101.464.009.014,64
4	B/2298/042023	10 Apr 2023	MAR 2023	109.639.710.288,43	(199.173.292,53)	109.440.536.995,90
5	B/2818/052023	8 Mei 2023	APR 2023	101.016.123.134,75	(242.811.382,77)	100.773.311.751,98
6	B/3662/062023	7 Jun 2023	MEI 2023	111.806.496.271,66	(360.233.743,13)	111.446.262.528,53
7	B/4523/072023	7 Jul 2023	JUN 2023	105.408.539.859,08	(48.516.016,69)	105.360.023.842,39
8	B/5170/082023	7 Agu 2023	JUL 2023	111.582.320.631,61	(47.781.751,02)	111.534.538.880,59
9	B/6100/092023	7 Sep 2023	AGT 2023	111.417.270.184,01	(199.271.564,56)	111.217.998.619,45
10	B/6779/102023	9 Okt 2023	SEP 2023	109.802.163.695,00	(255.386.622,93)	109.546.777.072,07
11	B/7603/112023	7 Nov 2023	OKT 2023	113.224.433.406,34	(44.957.285,06)	113.179.476.121,28
12	B/8488/122023	7 Des 2023	NOV 2023	112.930.607.474,93	(501.200.636,34)	112.429.406.838,59
13	B/104/012024	8 Jan 2024	DES 2023	129.735.477.013,25	(103.148.805,11)	129.632.328.208,14
TOTAL				1.422.282.433.004,94	(2.426.350.309,20)	1.419.856.082.695,74

Pada proses penyusunan anggaran tahun 2026, utang pembayaran JKP dari Desember 2022 hingga Desember 2023 telah disampaikan dalam Trilateral Meeting beserta pagu anggaran dan alokasi anggarannya. Utang pembayaran tersebut juga telah diajukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR terkait penyusunan RKA K/L 2026 sebagai usulan tambahan anggaran. Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan Surat Nomor B-M/123/KU.01/IX/2025 tanggal 4 September 2025 kepada Menteri Keuangan perihal Penyampaian Permohonan Tambahan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026. Dalam surat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2.100.000.000.000 untuk penyelesaian utang JKP 2021–2023 dan kekurangan iuran JKP tahun 2026. Namun, hingga pagu alokasi anggaran resmi ditetapkan, pagu anggaran iuran JKP tetap tidak mengalami perubahan.

e. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp264.393.723

- 1) Dana RPATA senilai Rp42.958.755 dialokasikan untuk penyelesaian pembayaran jasa pramukantor Ditjen Binwasnaker dan K3 periode Desember 2025. Transaksi ini merujuk pada Kontrak No. B.II/02.14/PPTKPSPK-SES/II/2025 dan SPM No. 01569T/651870/2025 tanggal 22 Desember 2025.
- 2) Dana RPATA senilai Rp23.240.829 dialokasikan untuk pembayaran jasa pengemudi dan pramukantor Ditjen Binwasnaker dan K3 bulan Desember 2025. Realisasi ini didasarkan pada Kontrak Nomor B.V/05.09/PPTKPSPK-SES/V/2025 dan SPM Nomor 01572T/651870/2025 tertanggal 22 Desember 2025.
- 3) Dana RPATA senilai Rp92.842.012 dialokasikan untuk pembayaran jasa pramukantor Ditjen Binwasnaker dan K3 bulan Desember 2025. Realisasi ini merujuk pada Kontrak No. B.II/02.07/PPTKPSPK-SES/II/2025 dan SPM No. 01570T/651870/2025 tanggal 22 Desember 2025.
- 4) Dana RPATA senilai Rp80.120.782 dialokasikan untuk memenuhi Belanja Keperluan Perkantoran bulan Desember 2025. Realisasi ini didasarkan pada Kontrak Nomor B.X/10.08/PPTKPSPK-SES/X/2025 dan SPM Nomor 01571T/651870/2025 tertanggal 22 Desember 2025.
- 5) Dana RPATA senilai Rp25.231.345 dialokasikan untuk pembayaran Belanja Jasa Lainnya (TU WASUJIK3) bulan Desember 2025. Realisasi ini merujuk pada Kontrak No. B.II/02.20/PPTKPSPK-SES/II/2025 dan SPM No. 01573T/651870/2025 tertanggal 22 Desember 2025.

f. Barenbang Ketengakerjaan sebesar Rp9.386.590.504

- 1) Belanja Kontraktual yang dibayarkan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun RPATA – Pembayaran sebesar Rp7.866.593.419.

NO 1	URAIAN 2	NO DOKUMEN 3	TGL DOK 4	NILAI 5
1	Pemeliharaan Data Center	7/1957/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	19-12-2025	56.449.050
2	LANGGANAN SMS PREMIUM (OTP/BROADCAST)	7/1985/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	23-12-2025	2.619.902.393
3	LICENSE EMAIL SERVICE VERIFICATION	7/1995/UM.02/PDTIK-PPK-BAST-LISTRAF/XII/2025	24-12-2025	165.000.000
4	PEKERJAAN PENAMBAHAN FITUR APLIKASI INTERNAL (APLIKASI AYO MAGANG VOKASI)	7/1996/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	26-12-2025	77.700.000
5	PEKERJAAN PENAMBAHAN FITUR APLIKASI INTERNAL (PENAMBAHAN FITUR APLIKASI PEMAGANGAN LUAR NEGERI VERSI 2)	7/1997/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	26-12-2025	76.500.000
6	PEKERJAAN PENAMBAHAN FITUR APLIKASI INTERNAL (APLIKASI LAYANAN ASESMEN WIRUSAHA)	7/1998/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	26-12-2025	77.922.000
7	PEKERJAAN PENAMBAHAN FITUR APLIKASI INTERNAL (PERIZINAN JOBFAR)	7/1999/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	90.500.000
8	Licence Data Transmission Service	7/2002/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	24-12-2025	186.258.000
9	PEKERJAAN PENAMBAHAN FITUR APLIKASI INTERNAL PERFORMANCE	7/2010/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	29-12-2025	60.700.000
10	Licence Anti Virus End Point Enterprise	7/2018/UM.02/PDTIK-PPK-BAST-LISTRAF/XII/2025	30-12-2025	886.023.221
11	TENAGA AHLI DATA ENGINEERING	7/2022/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	5.450.000
12	PENDAMPINGAN SURVEILLANCE AUDIT SMK ISO/IEC 27001:2022	7/2025/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	72.150.000
13	LANGGANAN LAYANAN UP TO OXIGEN 1 GBPS (RUMAH DINAS MENTERI)	7/2027/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	45.000.000
14	LANGGANAN BANDWITH JARINGAN KOMUNIKASI DATA ISP 1 DAN VPN IP(RUMAH DINAS WAKIL MENTERI)	7/2028/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	45.000.000
15	LANGGANAN LAYANAN UP TO OXIGEN JL. VETERAN	7/2029/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	15.000.000
16	LANGGANAN NOMOR LAYANAN CALL CENTER	7/2032/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	16.594.500
17	LANGGANAN LAYANAN SIP TRUNKING CALL CENTER	7/2035/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	16.583.400
18	LANGGANAN LAYANAN METRO-E CALL CENTER	7/2036/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	5.228.100
19	LANGGANAN BANDWIDTH JARINGAN KOMUNIKASI DATA ISP 1 DAN VPN IP	7/2090/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	185.197.600
20	Langganan Layanan Metro P2P Bandwith 1 Gbps	7/2091/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	70.877.140
21	LANGGANAN BANDWIDTH JARINGAN KOMUNIKASI DATA ISP 3	7/2092/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	270.600.000
22	LANGGANAN BANDWIDTH JARINGAN KOMUNIKASI DATA KANTOR LAVOTAS	7/2093/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	244.000.000
23	LANGGANAN BANDWIDTH JARINGAN KOMUNIKASI DATA ISP 2	7/2094/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	213.200.000
24	LANGGANAN BANDWIDTH JARINGAN KOMUNIKASI DATA KANTOR PASKER	7/2095/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	42.300.000
25	PENINGKATAN KAPASITAS BANDWIDTH SEWA LAYANAN METRO P2P	7/2096/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	117.792.978
26	LANGGANAN SEWA KOMPUTASI AWAN SIAPKERJA	7/2097/UM.02/PDTIK-PPK-BAST/XII/2025	31-12-2025	1.996.005.837
27	Belanja jasa lainnya, Tenaga Alih Daya meliputi Sekretaris, Pengemudi, dan Pramuka Helpdesk Barenbang Ketenagakerjaan 2025	BAST. 7/003.12/KU.02.01/PPK-SET/XII/2025	31-12-2025	208.659.200
TOTAL UTANG KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA				7.866.593.419

- 2) Tunggakan Tahun Anggaran Lalu sebesar Rp1.519.997.085, dengan rincian sebagai berikut:
- Tunggakan Tahun Anggaran Lalu Pekerjaan Pengadaan Lisensi Container Platform sebesar Rp1.459.459.461.
 - Tunggakan Tahun Anggaran Lalu Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Utama *Data Center* (Termin 2) sebesar Rp56.449.050.

- c) Tunggakan Tahun Anggaran Lalu Pekerjaan Langganan Bandwidth Jaringan Komunikasi Data ISP I dan VPN IP (Koneksi VPN IP TKA 1 Mbps (Termin 12 sebesar Rp4.088.574.

g. Ditjen Binalavotas sebesar Rp36.546.496.092

Rincian utang pihak ketiga yang berasal dari RPATA yang memiliki progres pekerjaan berupa BAST atau BAPP hingga tanggal 31 Desember 2025 tetapi belum dilakukan pembayaran pada tanggal yang sama. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 371 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Pada Ditjen Binalavotas

Kode Es1	Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
212191	02613	035636	BPVP Surakarta	57.438.000
		051102	BPVP Banyuwangi	136.714.000
		065106	BPVP Banda Aceh	217.259.440
		219228	BPVP Ambon	181.733.880
		352631	BPVP Belitung	112.362.177
		426531	BBPVP Serang	133.750.000
		451094	BBPVP Medan	209.345.000
		451108	BPVP Samarinda	250.751.407
		452542	BBPVP Bandung	451.365.620
		452558	BBPVP Bekasi	78.519.254
		452652	BBPVP Makassar	4.390.352
		626131	Direktorat Bina Lemlatvok	34.702.912.349
		626132	Direktorat Bina Lavogan	9.954.613
Ditjen Binalavotas				36.546.496.092
Utang Kepada Pihak ketiga Lainnya				36.546.496.092

- 1) BPVP Surakarta memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp57.438.000 yaitu Saldo utang karena pengajuan Rekening Penampungan RPATA.
- 2) BPVP Banyuwangi memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp136.714.000 yaitu saldo utang karena pengajuan Rekening Penampungan RPATA dan sudah dilakukan pembayaran dengan Nomor SP2D 261000000000105 dan 261000000000104 pada 05 Januari 2026 berupa:
 - a) Pembayaran Paket Pekerjaan Penyedia Pekerja Tenaga Alih Daya Resepsionis, Layanan Pelanggan, Sekertaris, Petugas Kebersihan, dan Pramutaman sebesar Rp79.866.000.
 - b) Pembayaran Paket Pekerjaan Penyedia Pekerja Tenaga Alih Daya Untuk Keamanan dan Pengemudi sebesar Rp56.848.000.
- 3) BPVP Banda Aceh memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp217.259.440 saldo utang karena pengajuan Rekening Penampungan RPATA dan sudah terbit SP2d di bulan Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pengadaan untuk keperluan pengadaan jasa alih daya tenaga keamanan Termin 13 sesuai SPK No 2.8/11315/UM.02.01/XII/2024 Tanggal 31/12/24, BAST No 2.8/8929/UM.02.01/XII/2025 Tanggal 31/12/25, BAP No 2.8/8931/UM.02.01/XII/2025 tanggal 31/12/25 senilai Rp75.205.191.
 - b) Pembayaran belanja barang keperluan pengadaan jasa alih daya tenaga pengemudi, pramu kantor, resepsionis Termin 13 SPK No 2.8/11316/UM.02.01/XII/2024 tanggal 31/12/25 BAST No

2.8/8928/UM.02.01/XII/2025 tanggal 31/12/25 BAP No
2.8/8931/UM.02.01/XII/2025 tanggal 31/12/25 sebesar Rp142.054.249.

- 4) BPVP Ambon sebesar Rp181.733.880 karena atas pengajuan RPATA.
- 5) BPVP Belitung memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp112.362.177 karena atas pengajuan RPATA.
- 6) BBPVP Serang memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp133.750.000 karena atas pengajuan RPATA.
- 7) BBPVP Medan memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp209.345.000 karena atas pengajuan RPATA.
- 8) BPVP Samarinda memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp250.751.407 karena atas pengajuan RPATA dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.11/85/SP.PPK/UM.02.00/I/2025 untuk Pengadaan Tenaga Alih Daya TA. 2025 di BPVP Samarinda sebesar Rp31.529.337.
 - b) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.11/2535/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk Pengadaan Tenaga Kebersihan TA. 2025 di BPVP Samarinda sebesar Rp44.931.167.
 - c) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.11/2537/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk Pengadaan Tenaga Keamanan TA. 2025 di BPVP Samarinda sebesar Rp33.416.000.
 - d) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.11/85/SP.PPK/UM.02.00/I/2025 untuk Pengadaan Tenaga Alih Daya TA. 2025 di BPVP Samarinda sebesar Rp37.970.040.
 - e) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.11/2537/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk Pengadaan Tenaga Keamanan TA. 2025 di BPVP Samarinda sebesar Rp41.540.301.
 - f) Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2.11/2535/SP.PPK/UM.02.00/XII/2024 untuk Pengadaan Tenaga Kebersihan TA. 2025 di BPVP Samarinda sebesar Rp61.364.562.
- 9) BBPVP Bandung memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp451.365.620 yaitu saldo utang karena pengajuan Rekening Penampungan RPATA dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran jasa langganan internet bulan Maret-Desember 2025 sebesar Rp17.000.000 sesuai Kontrak Nomor 2.5/192/UM.01.01/III/2025 tanggal 1 Maret 2025.
 - b) Belanja Jasa *Outsourcing Security* BBPVP Bandung sebesar Rp59.747.755 sesuai Kontrak Nomor 2.5/02/UM.02.05/I/2025 tanggal 2 Januari 2025.
 - c) Konsultasi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Analysis*) sebesar Rp64.113.600 sesuai Kontrak Nomor PL90.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025.

- d) Belanja Jasa *Outsourcing Office Support*, Jasa *Outsourcing driver*, Jasa *Cleaning Service* BBPVP Bandung sebesar Rp147.069.382 sesuai Kontrak Nomor:2.5/01/UM.02.05/I/2025 tanggal 2 Januari 2025.
 - e) Belanja Jasa *Cleaning Service* BBPVP Bandung Bulan Desember 2025 sebesar Rp100.927.347 sesuai Kontrak Nomor PL.92.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025.
 - f) Pemeliharaan Sumur Asrama Rajawali sebesar Rp62.507.536 sesuai Kontrak Nomor PL103.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025.
- 10) BBPVP Bekasi memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp78.519.254 atas pengajuan RPATA.
- 11) BBPVP Makassar memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp4.390.352 yang merupakan uang makan PNS di Satuan Pelayanan BBPVP Makassar yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2025 dan masih tersimpan di brankas Bendahara Pengeluaran. Uang makan tersebut telah disalurkan kepada pegawai pada Januari 2026 sebagai pembayaran atas hak uang makan ASN bulan Desember 2025.
- 12) Dit. Bina Lemlatvok sebesar Rp34.702.912.349 memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp34.702.912.349 yaitu Saldo Utang Pihak Ketiga Lainnya berdasarkan BAST Pekerjaan Per Tanggal 31 Desember 2025 dengan nomor kontrak sebagai berikut:
- a) BA.134/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.473.166.865
 - b) BA.136/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.447.553.803
 - c) BA.138/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.435.231.949
 - d) BA.140/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.403.527.164
 - e) BA.142/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.366.970.104
 - f) BA.144/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.032.605.396
 - g) BA.148/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.400.030.924
 - h) BA.150/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp848.085.801
 - i) BA.146/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.390.156.791
 - j) BA.154/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp476.667.300
 - k) BA.152/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp3.083.718.355
 - l) BA.156/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp2.254.972.104
 - m) BA.172/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp891.443.896
 - n) BA.162/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp35.280.784
 - o) BA.164/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp35.336.284
 - p) BA.166/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp35.352.934
 - q) BA.168/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp35.398.444
 - r) BA.170/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp35.321.854
 - s) BA.158/KP/E-CAT/PPK.1/XII/2025 sebesar Rp22.091.597

- 13) Direktorat Bina Lavogan memiliki utang pihak ketiga sebesar Rp9.954.613 berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari bunga bank pada rekening penampungan program pemagangan dalam negeri.

C.5.2. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

PendapatanSewa
Diterima Dimuka
Rp2.734.659.421

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan keadaan pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.734.659.421 dan Rp1.125.326.400.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 122.

Tabel 372 Pendapatan Diterima Dimuka Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	2.494.641.019	1.110.206.400	1.384.434.619	124,70
Ditjen Binalavotas	240.018.402	15.120.000	224.898.402	-
Jumlah	2.734.659.421	1.125.326.400	1.384.434.619	123,03

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.494.641.019 terdapat pada:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.489.375.186

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.489.375.186 diperoleh dari beberapa transaksi pembayaran diantaranya:

- 1) Sewa lahan parkir kendaraan bermotor dengan PT Antara Persada Sukses sebesar Rp616.666.667 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/01/UM.01.03/I/2024 senilai Rp1.000.000.000 untuk jangka waktu 60 bulan (1 Februari 2024 s.d. 31 Januari 2029). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp200.000.000 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp616.666.667 karena masa sewa masih berlangsung.
- 2) Sewa lahan usaha mikro Kedai Minuman Kopi dengan Rumah Kopi Nusantara sebesar Rp7.707.917 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/04/UM.03/V/2024 senilai Rp18.499.000 untuk jangka waktu 36 bulan (1 April 2024 s.d. 31 Maret 2027). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp6.166.333 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.707.917 karena masa sewa masih berlangsung.
- 3) Sewa tempat pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi selular GSM-UMTS dengan PT Komet Infra Nusantara sebesar Rp10.359.033 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/03/UM.03/II/2021 senilai Rp310.771.000 untuk jangka waktu 60 bulan (1 Maret 2021 s.d. 28 Februari 2026). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp62.154.200 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.359.033 karena masa sewa masih berlangsung.
- 4) Sewa lahan untuk layanan perbankan dengan PT BNI sebesar Rp589.200.937 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/02/UM.01.03/IV/2025 senilai Rp785.601.249 untuk jangka waktu 36 bulan (1 April 2025 s.d. 31 Maret 2028). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar

Rp196.400.312 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp589.200.937 karena masa sewa masih berlangsung

- 5) Sewa lahan untuk layanan perbankan dengan PT BRI sebesar Rp982.354.750 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/03/UM.01.03/IV/2025 senilai Rp1.178.825.700 untuk jangka waktu 48 bulan (1 Mei 2025 s.d. 30 April 2029). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp196.470.950 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp982.354.750 karena masa sewa masih berlangsung.
- 6) Sewa lahan untuk usaha dagang Koperasi Pegawai Negeri Depnaker “PELITA” sebesar Rp45.276.705 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/04/UM.01.03/IV/2025 senilai Rp90.553.410 untuk jangka waktu 12 bulan (1 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2026). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp45.276.705 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.276.705 karena masa sewa masih berlangsung.
- 7) Sewa ruang pita frekuensi radio seluler dengan PT Dhost Telekomunikasi Nusantara (Indosat) sebesar Rp176.207.733 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/05/UM.01.03/IV/2025 senilai Rp188.794.000 untuk jangka waktu 60 bulan (1 September 2025 s.d. 31 Agustus 2030). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp12.586.267 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp176.207.733 karena masa sewa masih berlangsung.
- 8) Sewa lahan untuk layanan ATM dengan PT Bank Mandiri sebesar Rp59.566.111 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/06/UM.01.03/IV/2025 senilai Rp63.070.000 untuk jangka waktu 36 bulan (1 November 2025 s.d. 30 Oktober 2028). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp3.503.889 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.566.111 karena masa sewa masih berlangsung.
- 9) Pemanfaatan sewa lahan untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan Dharma Wanita Persatuan Kemnaker sebesar Rp2.035.333 berdasarkan Perjanjian Nomor 1/02/UM.03/II/2023 senilai Rp36.636.000 untuk jangka waktu 36 bulan (1 Maret 2023 s.d. 28 Februari 2026). Sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp12.212.000 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.035.333 karena masa sewa masih berlangsung.

b. PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp5.265.833

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp5.265.833 merupakan jurnal penyesuaian sewa ATM BNI sesuai dengan kontrak Nomor:1/14/UM.01/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

2. Ditjen Binalavotas sebesar Rp240.018.402 terdapat pada:

a. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp119.756.452

Pendapatan Diterima Dimuka pada Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp119.756.452 terdiri dari:

- 1) Pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa ATM BNI sebesar Rp68.876.746 selama 32 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 14 Agustus 2028 dengan NTPN E921155DFIUTUGPA tanggal 14 Agustus 2025.

- 2) Pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa gedung kantin vokasi sebesar Rp28.692.375 selama 7 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 16 Juli 2026 dengan NTPN C851D7QLV2JAFBB1 tanggal 16 Juli 2025.
 - 3) Pendapatan sewa dibayar dimuka atas Sewa Penempatan Minimarket Koperasi Gedung Vokasi Kemnaker Gatsu 44 sebesar Rp 22.187.331 selama 11 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 11 November 2026 dengan NTPN 221697QLV2V0G6PC tanggal 11 November 2025.
- b. Sekretariat BNSP sebesar Rp111.444.200
- Pendapatan Diterima Dimuka pada Sekretariat BNSP sebesar Rp111.444.200 terdiri dari:
- 1) Pendapatan Diterima Dimuka atas perpanjangan sewa sebagian ruangan/bangunan di Gedung Sekretariat BNSP untuk Kantor Kas Bank BRI periode 1 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 sebesar Rp15.920.600 yang dibayar pada 27 Maret 2025 dengan NTPN B853E7QLV27NI5RG.
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka atas perpanjangan sewa sebagian ruangan/bangunan di Gedung Sekretariat BNSP untuk Kantor Kas Bank BRI periode 1 Maret 2026 s.d 28 Februari 2027 sebesar Rp95.523.600 per tahun, yang dibayar pada 27 Maret 2025 dengan NTPN D835E2G502PD46U7.
- c. BBPVP Bandung sebesar Rp6.657.750
- Pendapatan Diterima Dimuka pada BBPVP Bandung sebesar Rp6.657.750 terdiri dari:
- 1) Pendapatan sewa dibayar dimuka Sewa Kantin atas nama Nono Rustiana selama 11 bulan sebesar Rp2.219.250 mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 30 November 2026 NTPN 7524E0NA0EFDLPSQ tanggal setor 24 Desember 2025 (sewa kantin mulai 1 Desember 2025 sampai 30 November 2026).
 - 2) Pendapatan sewa dibayar dimuka Sewa Kantin atas nama Mohamad Saefudin Slamet selama 11 bulan sebesar Rp2.219.250 mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 30 November 2026 NTPN 9E1931JNG91Q2P6B tanggal setor 24 Desember 2025 (sewa kantin mulai 1 Desember 2025 sampai 30 November 2026).
 - 3) Pendapatan sewa dibayar dimuka Sewa Kantin atas nama Agus Suhendan selama 11 bulan sebesar Rp2.219.250 mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 30 November 2026 NTPN 7BD058N3ETKTAOCV tanggal setor 29 Desember 2025 (sewa kantin mulai 1 Desember 2025 sampai 30 November 2026).
- d. BBPVP Semarang sebesar Rp2.160.000
- Pendapatan Diterima Dimuka pada BBPVP Semarang sebesar Rp2.160.000 merupakan Pencatatan Jurnal Penyesuaian Jurnal Pembalik untuk Keperluan Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan bangunan Periode Agustus-Desember TA. 2025 dan 1 Januari – 1 Maret TA 2026 yang sudah dibayarkan pada TA. 2024. Berdasarkan Memo Penyesuaian No.011/Jurnal Penyesuaian/2025 tanggal 31-12-2025 senilai Rp2.160.000.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp263.374.984

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo tersebut merupakan akun penyeimbang Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 373 Rincian Uang Muka KPPN per Eselon I
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binalavotas	-	263.374.984,00	(263.374.984,00)	(100,00)
Total	-	263.374.984,00	(263.374.984,00)	(100,00)

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek
Rp10.884.156

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.884.156 dan Rp11.972.572

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan berupa utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 374 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binalavotas	10.884.156	11.972.572	- 1.088.416	(9,09)
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.884.156	11.972.572	- 1.088.416	(9,09)

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 375 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Kode Akun	Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
219511	026.13	452589	BPVP Sorong	9.236.778
219511	026.13	452595	BPVP Ternate	1.647.378
Ditjen Binalavotas				10.884.156
Utang Jangka Pendek Lainnya				10.884.156

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.884.156 terdapat pada:

1. BPVP Sorong sebesar Rp9.236.778

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPVP Sorong berasal dari pemungutan pajak

tahun 2025 yang disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2026 dengan bukti setor sebagai berikut:

- a. NTPN 02B244F9A00GJI5V tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp6.958.050.
 - b. NTPN 865CC5BNS9BCJI1C tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp210.178.
 - c. NTPN 637170TJB5S89U63 tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp455.400.
 - d. NTPN FF38480VA9BV2QNL tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp1.613.150.
2. BPVP Ternate sebesar Rp1.647.378.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPVP Sorong berasal dari pemungutan pajak tahun 2025 yang disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2026 dengan bukti setor sebagai berikut:

- a. NTPN 98E112MEASRLSOSJ tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp1.561.450.
- b. NTPN 43DAB3IRRP8292J2 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp85.928.

C.6. EKUITAS

Ekuitas

Rp11.410.857.913.713

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp11.410.857.913.713 dan Rp12.175.044.618.871.

Rincian lebih lanjut ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp10.980.690.341.186)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp10.980.690.341.186) dan (Rp2.994.563.844.917).

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2025 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp2.220.904.684.019 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp13.201.595.025.205.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 376.

Tabel 376 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Operasional	2.220.904.684.019	2.231.019.645.725	(10.114.961.706)	(0,45)
Beban Operasional	13.201.595.025.205	5.225.583.490.642	7.976.011.534.563	152,63
Jumlah Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.980.690.341.186)	(2.994.563.844.917)	(7.986.126.496.269)	266,69

Tabel 377 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(330.784.819.456)	(413.387.316.306)	82.602.496.850	(19,98)
Inspektorat Jenderal	(41.739.021.784)	(59.305.676.861)	17.566.655.077	(29,62)
Ditjen Binapenta & PKK	1.898.598.709.772	1.416.931.886.513	481.666.823.259	33,99
Ditjen PHI & JSK	(10.558.817.235.565)	(1.380.631.810.027)	(9.178.185.425.538)	664,78
Ditjen Binwasnaker & K3	(111.839.318.277)	(175.034.191.132)	63.194.872.855	(36,10)
Barenbang	(156.251.010.526)	(223.959.305.123)	67.708.294.597	(30,23)
Ditjen Binalavotas	(1.679.857.645.350)	(2.159.177.431.981)	479.319.786.631	(22,20)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.980.690.341.186)	(2.994.563.844.917)	(7.986.126.496.269)	266,69

D.1.1. Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Kegiatan
Operasional
Rp2.220.904.684.019

Jumlah Pendapatan Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.220.904.684.019 dan Rp2.231.019.645.725.

Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Lainnya Bukan Pajak.

Rincian Pendapatan Kegiatan Operasional per Eselon I disajikan pada Tabel 378.

Tabel 378 Rincian Pendapatan Kegiatan Operasional per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	3.307.861.003	4.392.282.097	(1.084.421.094)	(24,69)
Ditjen Binapenta & PKK	2.115.217.169.156	2.111.019.236.035	4.197.933.121	0,20
Ditjen PHI & JSK	99.202.301	2.156.968	97.045.333	4.499,15
Ditjen Binwasnaker & K3	98.004.622.286	107.486.956.123	(9.482.333.837)	(8,82)
Barenbang	14.453.048	876.942	13.576.106	-
Ditjen Binalavotas	4.261.376.225	8.118.137.560	(3.856.761.335)	(47,51)
Jumlah Pendapatan Kegiatan Operasional	2.220.904.684.019	2.231.019.645.725	(10.114.961.706)	(0,45)

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNB

Lainnya

Rp2.220.904.684.019

Pendapatan Operasional pada Kemnaker per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.220.904.684.019 merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Lainnya Bukan Pajak.

Jumlah Pendapatan PNB Lainya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.220.904.684.019 dan Rp2.231.019.645.725.

Rincian Pendapatan PNB Lainya disajikan pada Tabel 379.

Tabel 379 Rincian Pendapatan PNB Lainya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,680,020,197	3,770,028,558	(90,008,361)	(2.39)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	98,315,000	2,088,000	96,227,000	-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	19,235,000	(19,235,000)	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,257,297,435	900,125,000	357,172,435	39.68
Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	2,115,170,217,600	2,110,979,565,900	4,190,651,700	0.20
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	96,100,386,200	106,244,927,364	(10,144,541,164)	(9.55)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,450,064,500	4,684,045,750	(3,233,981,250)	(69.04)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	97,400,423	6,369	97,394,054	1,529,189.10
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,489,969,988	4,398,027,484	(2,908,057,496)	(66.12)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	97,012,676	21,596,300	75,416,376	349.21
Pendapatan Denda Lainnya	1,464,000,000			
Jumlah PNB Lainya	2,220,904,684,019	2,231,019,645,725	(10,114,961,706)	(0.45)

Rincian PNPB Lainnya masing-masing Eselon I disajikan pada Tabel 380

Tabel 380 Rincian Pendapatan PNPB Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	3,307,861,003	4,392,282,097	(1,084,421,094)	(24.69)
Ditjen Binapenta & PKK	2,115,217,169,156	2,111,019,236,035	4,197,933,121	0.20
Ditjen PHI & JSK	99,202,301	2,156,968	97,045,333	4,499.15
Ditjen Binwasnaker & K3	98,004,622,286	107,486,956,123	(9,482,333,837)	(8.82)
Barenbang	14,453,048	876,942		
Ditjen Binalavotas	4,261,376,225	8,118,137,560	(3,856,761,335)	(47.51)
JUMLAH PNPB LAINNYA	2,220,904,684,019	2,231,019,645,725	(10,114,961,706)	(0.45)

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 381 Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2025 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,680,020,197	5,270,928,220	(1,590,908,023)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	98,315,000	98,315,000	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,257,297,435	1,252,083,150	5,214,285
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	1,860,000	(1,860,000)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1,809,251,051	(1,809,251,051)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	602,180,571	(602,180,571)
Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	2,115,170,217,600	2,115,170,217,600	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	96,100,386,200	96,100,386,200	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,450,064,500	1,450,064,500	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	97,400,423	97,406,796	(6,373)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	73,537,051	(73,537,051)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	140,000,000	(140,000,000)
Pendapatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,489,969,988	1,489,969,988	-
Pendapatan Denda Lainnya	1,464,000,000	1,464,000,000	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	97,012,676	96,003,053	1,009,623
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	328,632,305	(328,632,305)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	9,274,474,381	(9,274,474,381)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1,905,172,605	(1,905,172,605)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	6,541,702	(6,541,702)
TOTAL	2,220,904,684,019	2,236,631,024,173	(15,726,340,154)

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp15.726.340.154 terdapat pada:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.590.908.023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Sekretariat Jenderal Kemnaker	1. Jurnal balik atas pendapatan sewa akrual per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.098.621.567 2. Jurnal pengakuan atas pendapatan sewa akrual per 31 Desember 2025 sebesar 2.489.375.186 3. Jurnal Koreksi atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas Sewa Cafe "The Gade Coffe and Gold" senilai Rp.23.134.170 sejak 1 Maret - 31 Desember 2025	1,367,619,449
2	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	1. Jurnal balik atas jurnal pendapatan diterima dimuka penyesuaian sewa bangunan untuk ATM dengan no. perjanjian 1/14/UM.01/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp11.584.833 2. Jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa rumah dinas dari potongan SPM no. 001, 002, 007, 008, 015, 022, 035, 036, dan 062 sebesar Rp4.709.172 3. Jurnal penyesuaian terhadap pendapatan dibayar dimuka sewa bangunan untuk ATM dengan nomor perjanjian 1/14/UM.01/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp5.265.833	(1,609,828)
3	Ditjen Binalavotas	1. Jurnal Koreksi Pendapatan Diterima Di Muka atas Sewa Gedung Kantin Gedung Vokasi Kemnaker Gatsu 44 sebesar Rp28.692.375 2. Jurnal Koreksi Biaya sewa untuk penempatan 1 (satu) unit Mesin ATM PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di Gedung Vokasi Kemnaker selama 3 tahun sebesar Rp68.876.746 3. Jurnal Koreksi Pendapatan Diterima Di Muka atas Sewa Penempatan Minimarket Koperasi Gedung Vokasi Kemnaker Gatsu 44 sebesar Rp22.187.331	119,756,452
4	BBPVP Bandung	Jurnal pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Pendapatan atas pemanfaatan BMN (sewa kantin) atas nama Agus Suhenda, Nono Rustiana dan Mohamad Saefudin Slamet selama 1 tahun	6,657,750
5	BBPVP Semarang	Jurnal Balik dan Jurnal Penyesuaian untuk Keperluan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan TA.2025 dan TA.2026 yang sudah dibayarkan pada TA.2024	(12,960,000)
6	Sekretariat BNSP	Jurnal atas Pembayaran perpanjangan sewa sebagian ruangan/bangunan di Gedung Sekretariat BNSP untuk Kantor Kas Bank BRI periode 1 Maret 2025 s.d 28 Februari 2026 sebesar Rp95.523.600 per tahun, yang dibayar pada 27 Maret	111,444,200
TOTAL			1,590,908,023

2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp5.214.285 terdapat pada:
 - a. Satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan yang merupakan Jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa rumah dinas dari potongan SPM no. 001, 002, 007, 008, 015, 022, 035, 036, dan 062 sebesar Rp4.709.172
 - b. Satker BBPVP Makassar yang merupakan Jurnal koreksi pendapatan sewa rumah negara an Alamsyah Arsyad periode Februari 2024 sd. Oktober 2025 sebesar Rp505.113
 - c. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.860.000
 - d. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.809.251.051
 - e. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp602.180.571
 - f. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp6.373 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Ditjen PHI dan Jamsos	Jurnal Balik atas saldo kas pada RPL Pengembalian BSU 2022 Bank BSI nomor 7218898739 per 31 Desember 2024 berupa pendapatan jasa lembaga keuangan	6.369
2	Ditjen PHI dan Jamsos	Jurnal Balik Setoran jasa giro pada RPL 182 PS PHIJSTK U PGMBL BSU 22 BSI No.7218898739	4
TOTAL			6.373

- g. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp73.537.051.
- h. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar Rp140.000.000.
- i. Pendapatan Anggaran Lain-Lain terdapat pada:
 - 1) Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp9.999 yang merupakan Jurnal Balik atas saldo kas pada RKK DITJEN PHIJSTK KEMNAKER OPS Bank BRI nomor 2233-01-000088-30-6 per 31 Desember 2024.
 - 2) Ditjen Binalavotas sebesar Rp1.019.622 yang merupakan setoran penutupan rekening satker Disnaker Prov Riau (099006) yang sudah disetor tanggal 22 April 2026.
- j. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp328.632.305.
- k. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp9.274.474.381.
- l. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.905.172.605.
- m. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.541.702.

D.1.2. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan
Operasional
Rp13.201.595.025.205

Jumlah Beban Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.201.595.025.205 dan Rp5.225.583.490.642. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional.

Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 382.

Tabel 382 Rincian Beban Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Beban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pegawai	669,155,319,775	502,631,108,631	166,524,211,144	33.13
Beban Persediaan	20,451,724,896	30,513,751,717	(10,062,026,821)	(32.98)
Beban Barang dan Jasa	666,351,563,054	1,200,815,833,268	(534,464,270,214)	(44.51)
Beban Pemeliharaan	94,527,621,631	153,282,248,756	(58,754,627,125)	(38.33)
Beban Perjalanan Dinas	253,429,615,110	1,066,681,444,727	(813,251,829,617)	(76.24)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	11,107,338,789,065	1,865,039,362,424	9,242,299,426,641	495.56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	390,398,497,588	406,765,986,904	(16,367,489,316)	(4.02)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(58,105,914)	(146,245,785)	88,139,871	(60.27)
Jumlah Beban Kegiatan Operasional	13,201,595,025,205	5,225,583,490,642	7,976,011,534,563	152.63

Rincian Beban Operasional per Eselon I disajikan pada Tabel 383

Tabel 383 Rincian Beban Operasional per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	334,092,680,459	417,779,598,403	(83,686,917,944)	(20.03)
Inspektorat Jenderal	41,739,021,784	59,305,676,861	(17,566,655,077)	(29.62)
Ditjen Binapenta & PKK	216,618,459,384	694,087,349,522	(477,468,890,138)	(68.79)
Ditjen PHI & JSK	10,558,916,437,866	1,380,633,966,995	9,178,282,470,871	664.79
Ditjen Binwasnaker & K3	209,843,940,563	282,521,147,255	(72,677,206,692)	(25.72)
Barenbang	156,265,463,574	223,960,182,065	(67,694,718,491)	(30.23)
Ditjen Binalavotas	1,684,119,021,575	2,167,295,569,541	(483,176,547,966)	(22.29)
Jumlah Beban Kegiatan Operasional	13,201,595,025,205	5,225,583,490,642	7,976,011,534,563	152.63

D.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp666.155.319.775

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp669.155.319.775 dan Rp502.631.108.631.

Rincian Beban Pegawai Menurut Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 384.

Tabel 384 Rincian Beban Pegawai Menurut Akun
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	181,647,520,962	162,789,877,676	18,857,643,286	11.58
Beban Pembulatan Gaji PNS	2,807,233	2,303,072	504,161	21.89
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	12,264,631,233	11,686,017,794	578,613,439	4.95
Beban Tunj. Anak PNS	3,570,347,736	3,390,985,060	179,362,676	5.29
Beban Tunj. Struktural PNS	3,774,907,870	3,652,071,601	122,836,269	3.36
Beban Tunj. Fungsional PNS	27,004,474,532	26,680,161,164	324,313,368	1.22
Beban Tunj. PPh PNS	2,111,785,063	2,013,914,771	97,870,292	4.86
Beban Tunj. Beras PNS	9,595,475,300	8,717,951,520	877,523,780	10.07
Beban Uang Makan PNS	26,497,145,450	17,068,371,100	9,428,774,350	55.24
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	304,745,000	270,375,000	34,370,000	12.71
Beban Tunjangan Umum PNS	3,534,082,884	2,046,202,414	1,487,880,470.0	72.71
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	145,785,744	271,163,288	(125,377,544)	(46.24)
Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	-	450,447,470	(450,447,470)	(100.00)
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-	50,747,182	(50,747,182)	-
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	284,375,000	284,375,000	-	-
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	348,272,000	-	348,272,000	-
Beban Gaji Pokok PPPK	32,343,626,781	16,857,757,831	15,485,868,950	91.86
Beban Pembulatan Gaji PPPK	510,875	215,098	295,777	137.5
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,928,373,230	896,198,050	1,032,175,180	115.17
Beban Tunjangan Anak PPPK	503,224,860	212,232,270	290,992,590	137.11
Beban Tunjangan Struktural PPPK	46,185,000	-	46,185,000	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,933,877,000	2,585,217,000	348,660,000	13.49
Beban Tunjangan Beras PPPK	1,789,406,505	819,070,200	970,336,305	118.47
Beban Uang Makan PPPK	5,840,251,180	2,286,874,350	3,553,376,830	155.38
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	-	7,459,396	(7,459,396)	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	19,500,000	18,800,000	700,000	3.72
Beban Tunjangan Umum PPPK	625,340,000	-	625,340,000	-
Beban Uang Honor Tetap	2,821,977,250	2,779,638,900	42,338,350	1.52
Beban Uang Lembur	4,072,463,000	4,870,926,650	(798,463,650)	(16.39)
Beban Uang Lembur PPPK	912,624,000	352,251,750	560,372,250	159.08
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	301,849,293,644	213,131,044,877	88,718,248,767	41.63
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	42,382,310,443	18,438,458,147	23,943,852,296	129.86
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	669,155,319,775	502,631,108,631	166,524,211,144	33.13

Rincian Beban Pegawai Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 385.

Tabel 385 Rincian Beban Pegawai Menurut Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	93,676,103,957	72,953,862,795	20,722,241,162	28.40
Inspektorat Jenderal	24,182,932,999	18,027,242,977	6,155,690,022	34.15
Ditjen Binapenta & PKK	66,298,334,143	47,866,668,393	18,431,665,750	38.51
Ditjen PHI & JSK	39,856,352,371	29,196,753,638	10,659,598,733	36.51
Ditjen Binwasnaker & K3	91,951,504,598	68,379,068,457	23,572,436,141	34.47
Barenbang	26,462,271,507	18,764,245,749	7,698,025,758	41.02
Ditjen Binalavotas	326,727,820,200	247,443,266,622	79,284,553,578	32.04
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	669,155,319,775	502,631,108,631	166,524,211,144	33.13

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 386 Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2025
Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji Pokok PNS	181,647,520,962	181,654,632,553	(7,111,591)
Beban Pembulatan Gaji PNS	2,807,233	2,807,873	(640)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	12,264,631,233	12,264,612,163	19,070
Beban Tunj. Anak PNS	3,570,347,736	3,570,710,592	(362,856)
Beban Tunj. Struktural PNS	3,774,907,870	3,769,044,694	5,863,176
Beban Tunj. Fungsional PNS	27,004,474,532	27,007,767,932	(3,293,400)
Beban Tunj. PPh PNS	2,111,785,063	2,111,224,575	560,488
Beban Tunj. Beras PNS	9,595,475,300	9,595,475,300	-
Beban Uang Makan PNS	26,497,145,450	26,257,186,300	239,959,150
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	304,745,000	304,745,000	-
Beban Tunjangan Umum PNS	3,534,082,884	3,538,217,884	(4,135,000)
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	145,785,744	145,785,744	-
Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau	348,272,000	348,272,000	-
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	284,375,000	284,375,000	-
Beban Gaji Pokok PPPK	32,343,626,781	32,329,685,081	13,941,700
Beban Pembulatan Gaji PPPK	510,875	510,898	(23)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,928,373,230	1,927,619,780	753,450
Beban Tunjangan Anak PPPK	503,224,860	503,074,170	150,690
Beban Tunjangan Struktural PPPK	46,185,000	46,185,000	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,933,877,000	2,934,397,000	(520,000)
Beban Tunjangan Beras PPPK	1,789,406,505	1,788,609,885	796,620
Beban Uang Makan PPPK	5,840,251,180	5,807,423,530	32,827,650
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	19,500,000	19,500,000	-
Beban Tunjangan Umum PPPK	625,340,000	624,245,000	1,095,000
Beban Uang Honor Tetap	2,821,977,250	2,821,977,250	-
Beban Uang Lembur	4,072,463,000	4,072,463,000	-
Beban Uang Lembur PPPK	912,624,000	912,624,000	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	301,849,293,644	299,766,166,522	2,083,127,122
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	42,382,310,443	42,272,584,684	109,725,759
TOTAL	669,155,319,775	666,681,923,410	2,473,396,365

Selisih Beban Pegawai menurut LO dan LRA sebesar Rp2.473.396.365 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Gaji Pokok PNS sebesar (Rp7.111.591) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Politeknik Ketenagakerjaan	Jumal akrual atas kekurangan gaji PNS	(551,000)
2	Sekretariat Jenderal Kemnaker	Jumal balik belanja pegawai yang masih harus dibayar karena adanya kenaikan pangkat Tahun 2024	(2,236,318)
3	Pusat Pasar Kerja	Jumal atas kekurangan gaji pegawai	1,298,600
4	Inspektorat Jenderal	Jumal atas kekurangan gaji pegawai	(2,684,534)
5	BBPKK Bandung Barat	Jumal balik atas kekurangan gaji pegawai PNS bulan Desember 2024	(114,000)
6	Ditjen Binapenta dan PKK	Jumal kekurangan pembayaran gaji dan jumal balik kekurangan gaji PNS	(3,749,600)
7	Balai K3 Medan	Jumal Balik atas Jumal Akrual Tahun 2024	(1,584,000)
8	Balai K3 Makassar	Jumal balik atas kekurangan gaji pegawai	(7,598,800)
9	Balai K3 Jakarta	Jumal Penyesuaian Akrual untuk Pembayaran Kekurangan Gaji bulan Oktober tahun 2025 s.d. bulan Januari tahun 2026 untuk 6 pegawai/15 jiwa.	815,000
10	Balai K3 Samarinda	Jumal balik atas kekurangan gaji bulan Agustus 2024 untuk 1 orang pegawai	(238,100)
11	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jumal balik atas kekurangan gaji pegawai	(4,833,000)
12	Barenbang	Jumal balik atas kekurangan gaji tahun 2024, jumal atas kekurangan gaji tahun 2025 dan jumal balik atas pengembalian gaji tahun 2024	24,616,385
13	BPVP Surakarta	Jumal balik atas kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan Desember 2024)	(125,300)
14	BBPVP Serang	Jumal balik atas kekurangan gaji pegawai	(9,371,700)
15	BPVP Samarinda	Jumal balik atas kekurangan gaji kenaikan pangkat	(54,800)
16	BBPVP Bandung	Jumal atas kekurangan gaji pegawai	558,072
17	BBPVP Makassar	Jumal atas kekurangan gaji pegawai	(467,196)
18	BPVP Sidoarjo	Jumal Manual atas Kekurangan Gaji Pokok Bulan Desember 2024 sebanyak 4 Pegawai/8 Jiwa an. Irawan, Rizki, Risky, Syafa- SPM 52 SP2D 251651303000236	(791,300)
TOTAL			(7,111,591)

2. Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar (Rp640) dapat dijelaskan sebagai berikut

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Politeknik Ketenagakerjaan	Jurnal akrual pembulatan gaji PNS atas kekurangan gaji PNS	115
2	Pusat Pasar Kerja	Jurnal akrual pembulatan gaji PNS atas kekurangan gaji PNS	460
3	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas pembulatan gaji PNS dan Jurnal Balik atas kekurangan gaji	(671)
4	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal balik atas pembulatan gaji PNS	1,237
5	Balai K3 Medan	Jurnal balik Pembulatan Gaji atas Kekurangan Gaji Bulan Januari - Desember 2024 1 pegawai sesuai dengan SP2D Nomor 251231302000643 tanggal 19-02-2025.	(360)
6	Balai K3 Makassar	Jurnal balik atas pembulatan gaji PNS	(26)
7	Balai K3 Samarinda	Jurnal pembulatan gaji atas kekurangan gaji bulan Agustus 2024 untuk 1 orang pegawai sesuai dengan SP2D Nomor 250461302001616 tanggal 12-03-2025	(48)
8	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jurnal akrual atas pembulatan gaji PNS	(1,132)
9	Barenbang	Jurnal balik atas pembulatan gaji	312
10	BPVP Surakarta	Pembulatan Gaji PNS (Jurnal balik Pengakuan belanja pegawai yang masih harus dibayar atas pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan Desember 2024)	(14)
11	BPVP Sidoarjo	Jurnal balik atas pembulatan gaji PNS	(281)
12	BBPVP Serang	Jurnal balik atas pembulatan gaji PNS	(729)
13	BBPVP Makassar	Jurnal balik atas pembulatan gaji PNS	(88)
14	BPVP Samarinda	Jurnal penyesuaian untuk mencatat Beban Belanja Pegawai dan Pengakuan Belanja	585
TOTAL			(640)

3. Beban Tunjangan Suami/istri PNS sebesar (Rp19.070) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Politeknik Ketenagakerjaan	Jurnal akrual atas tunjangan PNS	(29,720)
2	Pusat Pasar Kerja	Jurnal akrual atas tunjangan Suami/Istri PNS	84,080
3	Inspektorat Jenderal	Jurnal balik atas tunjangan PNS tahun 2024	(251,630)
4	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal balik atas tunjangan PNS tahun 2024	503,420
5	Balai K3 Makassar	Jurnal Balik atas tunjangan PNS tahun 2024	(759,880)
6	Balai K3 Jakarta	Jurnal atas tunjangan PNS tahun 2025	68,970
7	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jurnal balik atas tunjangan PNS	(322,200)
8	Barenbang	Jurnal Balik atas tunjangan PNS tahun 2024 dan Jurnal akrual atas tunjangan PNS tahun 2025	1,759,160
9	BPVP Surakarta	Jurnal balik atas tunjangan PNS	(12,530)
10	BPVP Sidoarjo	Jurnal balik atas tunjangan PNS	(41,350)
11	BPVP Samarinda	Jurnal balik atas tunjangan PNS	9,940
12	BBPVP Serang	Jurnal balik atas tunjangan PNS	(937,170)
13	BBPVP Makassar	Jurnal balik atas tunjangan PNS	(52,020)
TOTAL			19,070

4. Beban Tunjangan Anak PNS sebesar (Rp362.856) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Politeknik Ketenagakerjaan	Jurnal akrual atas tunjangan anak PNS	(572)
2	Pusat Pasar Kerja	Jurnal akrual atas tunjangan anak PNS	31.784
3	Inspektorat Jenderal	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024	(100.652)
4	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal Pengakuan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai berupa Kekurangan Gaji PNS Bulan Desember 2025 untuk 56 pegawai atau 161 jiwa dikarenakan Kenaikan Gaji Berkala	178.698
5	Balai K3 Jakarta	Jurnal atas tunjangan anak PNS tahun 2025	13.794
6	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024	(89.674)
7	Barenbang	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024 dan Jurnal Pengakuan atas Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai berupa Kekurangan Gaji	15.090
8	BPVP Surakarta	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024	(5.012)
9	BPVP Sidoarjo	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024	(19.624)
10	BPVP Samarinda	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024 dan Jurnal penyesuaian untuk mencatat kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan april-desember 2025 an Ediyono	3.976
11	BBPVP Serang	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024	(374.868)
12	BBPVP Makassar	Jurnal balik atas tunjangan anak PNS tahun 2024	(15.796)
TOTAL			(362.856)

5. Beban Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp5.863.176 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Sekretariat Jenderal Kemnaker	Jurnal balik atas tunjangan struktural PNS tahun 2024	(7,426,824)
2	Pusat Pasar Kerja	Jurnal akrual atas tunjangan struktural PNS tahun 2025	2,520,000
3	Barenbang	Jurnal akrual atas tunjangan struktural PNS	12,240,000
4	BPVP Sidoarjo	Jurnal balik atas tunjangan struktural PNS tahun 2024	(1,470,000)
TOTAL			5,863,176

6. Beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar (Rp3.293.400) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Inspektorat Jenderal	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2024	(1.800.000)
2	BBPKK Bandung Barat	Jurnal Pengakuan atas Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai	4.760.000
3	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2024	(3.083.400)
4	BPKK Bekasi	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2025	4.440.000
5	Balai K3 Bandung	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2024	(840.000)
6	Balai K3 Makassar	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2024	(1.920.000)
7	Balai K3 Jakarta	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2025	2.720.000
8	Ditjen Binw asnaker dan K3	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2024	(1.960.000)
9	Barenbang	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan fungsional tahun 2024	(1.600.000)
10	BPVP Sidoarjo	Jurnal atas tunjangan fungsional tahun 2024	(3.300.000)
11	BPVP Samarinda	Jurnal akrual atas tunjangan fungsional tahun 2024	(710.000)
TOTAL			(3.293.400)

7. Beban Tunjangan PPh PNS sebesar Rp560.488 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Pusat Pasar Kerja	Jurnal akrual atas tunjangan PPh tahun 2025	15,272
2	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas tunjangan PPh tahun 2025 dan Jurnal balik tahun 2024	(4,856)
3	BBPKK Bandung Barat	Jurnal Pengakuan atas Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai	480,060
4	BPKK Bekasi	Jurnal akrual atas tunjangan PPh tahun 2025	163,712
5	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	106,679
6	Balai K3 Bandung	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(13,280)
7	Balai K3 Makassar	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(124,524)
8	Balai K3 Samarinda	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(21,869)
9	Balai K3 Jakarta	Jurnal akrual atas tunjangan PPh tahun 2025	43,972
10	Ditjen Binwasnaker & K3	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(214,388)
11	Barenbang	Jurnal akrual atas tunjangan PPh tahun 2025 dan Jurnal balik tahun 2024	388,013
12	BPVP Sidoarjo	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(86,520)
13	BBPVP Serang	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(151,476)
14	BPVP Samarinda	Jurnal balik atas tunjangan PPh tahun 2024	(20,307)
TOTAL			560,488

8. Beban Uang Makan PNS sebesar Rp239.959.150 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Politeknik Ketenagakerjaan	Jurnal akrual atas uang makan bulan Des 2025	451.000
2	Sekretariat Jenderal Kemnaker	Jurnal akrual atas uang makan bulan Des 2025 dan jurnal balik uang makan tahun 2024	75.804.000
3	PPSDM Ketenagakerjaan	Jurnal atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Makan Pegawai PPSPDM Ketenagakerjaan yang Belum Sesuai Ketentuan TA. 2025	(1.291.100)
4	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal akrual atas uang makan bulan Des 2025 dan jurnal balik uang makan tahun 2024	154.760.300
5	BBPKK Bandung Barat	Jurnal Balik atas Pengembalian Beban Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 a.n Merliani dan Dodi Sutanto	70.300
6	BPKK Bekasi	Jurnal Balik atas Pembayaran Uang Makan Tahun 2024	(738.150)
7	Balai K3 Medan	Jurnal akrual atas kekurangan uang makan bulan Des 2025	10.489.000
8	Balai K3 Samarinda	Jurnal balik atas kekurangan uang makan bulan Des 2024	(333.000)
9	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jurnal akrual atas kekurangan uang makan bulan Des 2025	(27.182.300)
10	Barenbang	Jurnal akrual atas uang makan bulan Des 2025 dan jurnal balik uang makan tahun 2024	1.655.400
11	BPVP Sidoarjo	Pengembalian Kelebihan pembayaran Uang makan PNS Desember 2025	(10.110.000)
12	BPVP Sorong	Koreksi Uang Makan Desember 2025 yang baru dibayar Januari 2026 dengan detail: 1. No. SPM No. 0010A, No.SP2D 260660000000604 sebesar Rp8.217.150,00 2. No. SPM No. 00011A, No.SP2D 260660000000605 sebesar Rp19.665.550,00	27.882.700
13	BBPVP Semarang	Jurnal akrual atas uang makan bulan Des 2025 dan jurnal balik uang makan tahun 2024	8.501.000
TOTAL			239.959.150

9. Beban Tunjangan Umum PNS sebesar (Rp4.135.000) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Balai K3 Medan	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan umum PNS tahun 2024	(60,000)
2	Barembang	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan umum PNS dan jurnal akrual atas pengembalian tunjangan umum tahun 2025 dan jurnal balik atas tunjangan umum PNS tahun 2024	920,000
3	BPVP Sidoarjo	Pengembalian Kelebihan Tunjangan Umum Pegawai pada BPVP Sidoarjo dan telah dibayar lunas sesuai dengan NTPN 9EC5A61QVMG1D61K sebesar Rp1.665.000.	(1,665,000)
4	BPVP Bantaeng	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas tunjangan umum pegawai tugas belajar dan telah dibayar lunas sesuai dengan: - NTPN 486003CIG6OT3G3B tanggal 28 April 2026	(1,110,000)
5	BBPVP Makassar	Jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran tunjangan umum an. Halomoan Toba dan Nur Ansyari periode April sd. Oktober 2025	(2,220,000)
TOTAL			(4,135,000)

10. Beban Gaji Pokok PPPK sebesar Rp13.941.700 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas pembayaran belanja pegawai gaji susulan PPPK bulan Oktober - Desember 2025 untuk 1 pegawai	9.610.800
2	Ditjen Binw asnaker dan K3	Jurnal Balik - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Susulan PPPK Bulan Desember Tahun 2024	(3.203.600)
3	Barembang	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK Tahun 2025	7.534.500
TOTAL			13.941.700

11. Beban Pembulatan Gaji PPPK sebesar (Rp23) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas pembayaran belanja pegawai gaji susulan PPPK bulan Oktober - Desember 2025	33
2	Ditjen Binw asnaker dan K3	Jurnal balik atas pembulatan gaji PPPK tahun 2024	(92)
3	Barembang	Jurnal Akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK tahun 2025	36
TOTAL			(23)

12. Beban Tunjangan Suami/istri PPPK sebesar Rp753.450 pada satker Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang merupakan Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK Tahun 2025 berdasarkan SPM Nomor 00034 tanggal 14 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000002735 tanggal 14 Januari 2026.

13. Beban Tunjangan Anak PPPK sebesar Rp150.690 pada satker Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang merupakan Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK Tahun 2025 berdasarkan SPM Nomor 00034 tanggal 14 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000002735 tanggal 14 Januari 2026.

14. Beban Tunjangan Fungsional PPPK sebesar (Rp520.000) pada satker Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang merupakan Jurnal Balik - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Susulan PPPK Bulan Desember Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/1 Jiwa a.n. Asri Lestari sesuai dengan SP2D Nomor : 251821301000300 tanggal 31 Januari 2025.

15. Beban Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp796.620 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas pembayaran belanja pegawai gaji susulan PPPK bulan Oktober - Desember 2025	217.260
2	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jurnal Balik - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Susulan PPPK Bulan Desember Tahun 2024	(72.420)
3	Barenbang	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK Tahun 2025	651.780
TOTAL			796.620

16. Beban Uang Makan PPPK sebesar Rp32.827.650 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Sekretariat Jenderal Kemnaker	Jurnal penyesuaian belanja pegawai yang masih harus dibayar atas pembayaran beban Uang Makan PPPK Bulan Desember TA 2025	57,372,000
2	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas pembayaran belanja pegawai uang makan bulan Oktober - Desember 2025 untuk 1 pegawai	1,924,000
3	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal Balik Pembayaran Uang Makan PPPK	(12,220,200)
4	Balai K3 Makassar	Jurnal balik atas uang makan PPPK tahun 2024	(6,475,000)
5	Balai K3 Samarinda	Jurnal balik atas uang makan PPPK tahun 2024	(888,000)
6	Balai K3 Jakarta	Jurnal balik atas uang makan PPPK tahun 2024	(4,773,000)
7	Ditjen Binwasnaker dan K3	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai ASN dan PPPK Bulan Desember 2025	(10,781,150)
8	Barenbang	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan PPPK bulan Oktober s.d Desember 2025 untuk 1 pegawai berdasarkan SPM Nomor 00037 tanggal 21 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000004061 tanggal 21 Januari 2026	1,470,000
9	BBPVP Semarang	Jurnal akrual atas uang makan PPPK tahun 2025 dan Jurnal balik atas kekurangan uang makan PPPK Tahun 2024	8,943,000
10	BPVP Sidoarjo	Pengembalian Kelebihan pembayaran Uang makan PPPK Desember 2025	(1,744,000)
TOTAL			32,827,650

17. Beban Tunjangan Umum PPPK sebesar Rp1.095.000 terdapat pada:

- Inspektorat Jenderal sebesar Rp555.000 yang merupakan jurnal akrual atas pembayaran belanja pegawai gaji susulan PPPK bulan Oktober - Desember 2025.
- Barenbang sebesar Rp540.000 yang merupakan Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK berdasarkan SPM Nomor 00034 tanggal 14 Januari 2026 dan SP2D Nomor 261820000002735 tanggal 14 Januari 2026.

18. Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp2.083.127.122 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Uraian	Nilai
1	Sekretariat Jenderal	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	432,384,008
2	Inspektorat Jenderal	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	10,686,593
3	Ditjen Binapenta dan PKK	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	245,856,795
4	Ditjen PHI dan Jamsos	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	220,483,216
5	Ditjen Binwasnaker dan K3	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	333,824,903
6	Barenbang	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	290,674,519
7	Ditjen Binalavotas	Jurnal akrual atas Pembayaran Belanja Pegawai (51) berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Tahun 2025 dan Jurnal Balik atas kekurangan tunjangan kinerja	549,217,088
TOTAL			2,083,127,122

19. Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp109.725.759 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian	Nilai
1	Politeknik Ketenagakerjaan	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2025	19,956,957
2	Sekretariat Jenderal Kemnaker	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2025	96,833,344
2	PPSDM Ketenagakerjaan	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2024	(8,415,566)
3	Pusat Pasar Kerja	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2024	(1,664,544)
8	Balai K3 Samarinda	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2024	(4,595,150)
9	Balai K3 Jakarta	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2025	3,036,886
10	Ditjen Binwasnaker dan K3	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember 2025	(1,604,059)
11	Barenbang	Jurnal akrual atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2025	12,517,819
13	BPVP Padang	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2024	114,879
16	BBPVP Makassar	Jurnal balik atas kekurangan tunjangan kinerja/kegiatan/kinerja PPPK tahun 2024	(6,454,807)
TOTAL			109,725,759

D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp20.451.724.896

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah beban persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.451.724.896 dan Rp30.513.751.717.

Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 387.

Tabel 387 Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Persediaan Konsumsi	20,322,831,586	30,048,863,757	(9,726,032,171.00)	(32.37)
Beban Persediaan Bahan Baku	43,552,988	127,052,920	(83,499,932.00)	(65.72)
Beban Persediaan Lainnya	85,340,322	337,835,040	(252,494,718.00)	(74.74)
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	20,451,724,896	30,513,751,717	(10,062,026,821.00)	(32.98)

Rincian Beban Persediaan Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 388.

Tabel 388 Rincian Beban Persediaan Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	4,341,855,274	8,398,015,673	(4,056,160,399)	(48.30)
Inspektorat Jenderal	220,640,600	327,826,500	(107,185,900)	(32.70)
Ditjen Binapenta & PKK	1,614,251,395	2,398,289,758	(784,038,363)	(32.69)
Ditjen PHI & JSK	428,642,109	569,470,925	(140,828,816)	(24.73)
Ditjen Binwasnaker & K3	3,374,304,486	6,580,852,865	(3,206,548,379)	(48.73)
Barenbang	178,016,710	806,816,125	(628,799,415)	(77.94)
Ditjen Binalavotas	10,294,014,322	11,432,479,871	(1,138,465,549)	(9.96)
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	20,451,724,896	30,513,751,717	(10,062,026,821)	(32.98)

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan konsumsi	20,322,831,586	21,175,920,903	(853,089,317)
Beban Persediaan bahan baku	43,552,988	-	43,552,988
Beban persediaan lainnya	85,340,322	81,682,174	3,658,148
TOTAL	20,451,724,896	21,257,603,077	(805,878,181)

Selisih Beban Persediaan menurut LO dan LRA sebesar Rp805.878.181 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Satker	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	(2,065,886)	Jurnal penyesuaian atas koreksi antar beban
2	Inspektorat Jenderal	(359,400)	Mutasi persediaan antara pembelian sebesar Rp221.000.000 dikurangi habis pakai sebesar Rp220.640.600
3	BBPKK Bandung Barat	118,281,941	Selisih Beban persediaan
4	Direktorat Bina PKK	8,017,500	Saldo awal tahun 2025 dimana saldo tersebut sudah dilakukan pencatatan transaksi persediaan keluar sehingga menghasilkan Jurnal beban persediaan konsumsi
5	BPKK Bekasi	(2,219,304)	Selisih Beban persediaan
6	Ditjen Binapenta dan PKK	182,536,656	Selisih persediaan awal tahun dengan akhir tahun serta belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel untuk pembelian Headset Stereo
7	Ditjen PHI dan Jamsos	(33,039,606)	Penambahan persediaan konsumsi sepanjang tahun 2025 yang diakui menjadi saldo akhir persediaan sebesar Rp15.239.606 dan Reklasifikasi persediaan menjadi aset sebesar Rp17.800.000 berupa 13 unit tiang bendera stainless sebagai tindak lanjut temuan Inspektorat.
8	Ditjen Binwasnaker dan K3	(32,332,811)	Persediaan awal tahun dengan akhir tahun sebesar Rp(32.376.311) dan persediaan bahan baku sebesar Rp43.500
9	Barenbang	129,684,200	Pengurangan nilai persediaan 2025 dengan nilai persediaan 2024 audited (kenaikan hasil stock opname persediaan).
10	Ditjen Binalavotas	(1,096,839,371)	Selisih Beban persediaan
11	BPVP Padang	(77,542,100)	Koreksi pembelian Pengadaan yang menggunakan akun persediaan (521811)
TOTAL		(805,878,181)	-

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp666.351.563.054

Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan/entitas.

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp666.351.563.054 dan Rp1.200.815.833.268.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 389.

Tabel 389 Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	93.970.491.297	127.356.367.215	(33.385.875.918)	(26,21)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.574.000	625.259.490	(614.685.490)	(98,31)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	655.863.551	1.019.300.535	(363.436.984)	(35,66)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.559.865.599	14.493.822.706	(4.933.957.107)	(34,04)
Beban Barang Operasional Lainnya	12.852.245.762	19.155.123.901	(6.302.878.139)	(32,90)
Beban Bahan	183.744.885.114	530.701.694.392	(346.956.809.278)	(65,38)
Beban Honor Output Kegiatan	7.805.856.500	31.941.157.840	(24.135.301.340)	(75,56)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	43.791.394.709	12.612.582.770	31.178.811.939	247,20
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	-	727.000.000	(727.000.000)	(100,00)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	577.000.000	1.637.486.678	(1.060.486.678)	(64,76)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.323.147.175	967.265.696	355.881.479	36,79
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	24.600.000	(24.600.000)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	28.054.383.219	32.563.464.029	(4.509.080.810)	(13,85)
Beban Langganan Telepon	2.837.674.534	3.132.677.224	(295.002.690)	(9,42)
Beban Langganan Air	1.749.665.372	2.093.376.272	(343.710.900)	(16,42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.780.449.282	30.592.929.032	(9.812.479.750)	(32,07)
Beban Jasa Pos dan Giro	7.415.840	88.400.011	(80.984.171)	(91,61)
Beban Jasa Konsultansi	15.738.783.632	49.838.952.696	(34.100.169.064)	(68,42)
Beban Sewa	36.455.969.737	50.527.602.391	(14.071.632.654)	(27,85)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik	4.912.650.391	4.079.232.533	833.417.858	20,43
Beban Jasa Profesi	39.641.859.892	113.798.755.677	(74.156.895.785)	(65,16)
Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	-	2.449.506.161	(2.449.506.161)	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	161.881.387.448	170.252.583.151	(8.371.195.703)	(4,92)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	136.692.868	(136.692.868)	(100,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	666.351.563.054	1.200.815.833.268	(534.464.270.214)	(44,51)

Sedangkan rincian Beban Barang dan Jasa Menurut Eselon I Disajikan pada Tabel 390.

Tabel 390 Rincian Beban Barang dan Jasa Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	134,252,720,970	158,152,875,311	(23,900,154,341)	(15.11)
Inspektorat Jenderal	8,252,217,843	10,808,232,058	(2,556,014,215)	(23.65)
Ditjen Binapenta & PKK	40,820,711,172	152,269,935,566	(111,449,224,394)	(73.19)
Ditjen PHI & JSK	88,289,778,790	41,386,575,025	46,903,203,765	113.33
Ditjen Binwasnaker & K3	31,709,867,318	57,842,023,307	(26,132,155,989)	(45.18)
Barenbang	57,245,595,562	87,771,969,170	(30,526,373,608)	(34.78)
Ditjen Binalattas	305,780,671,399	692,584,222,831	(386,803,551,432)	(55.85)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	666,351,563,054	1,200,815,833,268	(534,464,270,214)	(44.51)

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Keperluan Perkantoran	93,970,491,297	93,996,729,612	(26,238,315)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10,574,000	10,574,000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	655,863,551	654,683,551	1,180,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9,559,865,599	9,556,177,099	3,688,500
Beban Barang Operasional Lainnya	12,852,245,762	12,855,582,762	(3,337,000)
Beban Bahan	183,744,885,114	186,692,449,110	(2,947,563,996)
Beban Honor Output Kegiatan	7,805,856,500	7,841,069,000	(35,212,500)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	43,791,394,709	19,620,850,393	24,170,544,316
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	577,000,000	577,000,000	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,323,147,175	1,139,460,763	183,686,412
Beban Langganan Listrik	28,054,383,219	27,860,929,096	193,454,123
Beban Langganan Telepon	2,837,674,534	2,831,990,788	5,683,746
Beban Langganan Air	1,749,665,372	1,744,841,856	4,823,516
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20,780,449,282	20,777,156,858	3,292,424
Beban Jasa Pos dan Giro	7,415,840	7,415,840	-
Beban Jasa Konsultan	15,738,783,632	15,738,783,632	-
Beban Sewa	36,455,969,737	36,477,135,466	(21,165,729)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik	4,912,650,391	4,912,650,391	-
Beban Jasa Profesi	39,641,859,892	39,721,677,392	(79,817,500)
Beban Jasa Lainnya	161,881,387,448	161,859,694,478	21,692,970
TOTAL	666,351,563,054	644,876,852,087	21,474,710,967

Selisih Beban Barang dan Jasa menurut LO dan LRA sebesar Rp21.474.710.967 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rp26.238.315 terdapat pada:

No	Unit Eselon I	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	(28.667.982)	Satker Sekretariat Jenderal Kemnaker yang merupakan adanya perbedaan pencatatan kode akun belanja dengan kode akun barang persediaan untuk pencetakan box arsip senilai Rp9.281.982, Jurnal koreksi atas pendapatan Aset Tetap yang berasal dari akun belanja 521111 sebesar Rp15.386.000 berupa Peralatan dan Mesin sesuai dengan hasil audit kepatuhan Itjen TA 2025 dan satker Pusat Pasar Kerja sebesar Rp4.000.000 yang merupakan terjadinya terjadi kesalahan pendaftaran kontrak untuk pembayaran melalui RPATA untuk Paket Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Pusat Petugas Kebersihan Bulan Oktober s.d Desember di Pasar Kerja Tahun 2025 yang seharusnya sebesar Rp95.250.000 namun di daftarkan sebesar Rp99.250.000, selisih sebesar Rp4000.000 telah dinihilkan sesuai dengan SPM Nomor 00004T tanggal 2 Januari 2026
2	Ditjen Binapenta dan PKK	1.860.400	Perubahan beban keperluan perkantoran menjadi beban bahan
3	Ditjen PHI dan Jamsos	(1.500.000)	Jurnal Penyesuaian Koreksi Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran Direktorat HKP sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly Itjen Bulan Desember 2025
4	Ditjen Binalavotas	2.069.267	1. Satker BPVP Sidoarjo karena Adanya ralat spm dari akun Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp 31.700.000 2. Satker BBPVP Serang sebesar Rp(5.203.827) yang merupakan jurnal balik dan jurnal untuk mengoreksi pendapatan perolehannya lainnya yang berasal dari belanja keperluan perkantoran (pembelian peralatan smart office dan fingerprint serta pembelian alat internet). 3. BPVP Bantaeng yang merupakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja seragam pada pekerjaan pengadaan tenaga alih daya BPVP berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan telah dibayar lunas
TOTAL		(26.238.315)	-

2. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp1.180.000 terdapat pada BPVP Bandung Barat (Ditjen Binalavotas) yang merupakan adanya ketidaksesuaian akun untuk pengiriman surat dinas yang harusnya dicatat di akun 521114 senilai Rp1.180.000 dicatat menggunakan akun 521211.
3. Beban Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp3.688.500 terdapat pada:
 - a) PPSDM Ketenagakerjaan sebesar Rp9.424.000 yang merupakan jurnal koreksi atas setoran pengembalian pembayaran staf pengelola keuangan (PPPK) Tahun 2024 sebesar Rp4.636.000 dan Jurnal Koreksi Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian pembayaran Honorarium KPA Tahun 2024 sebesar Rp4.788.000.
 - b) Ditjen PHI dan Jamsos sebesar (Rp5.735.500) yang merupakan Jurnal Penyesuaian Koreksi atas Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly Itjen Bulan Desember 2025.
4. Beban Barang Operasional Lainnya sebesar Rp3.337.000 terdapat pada satker Ditjen PHI dan Jamsos yang merupakan Jurnal Penyesuaian Koreksi atas Belanja Kursi di Direktorat BMHI sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly Itjen Bulan Desember 2025.

5. Beban Honor Output Kegiatan sebesar (Rp35.212.500) terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	PPSDM Ketenagakerjaan	(4,145,000)	Jurnal atas Pengembalian Pembayaran Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPSDM Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
2	Ditjen PHI dan Jamsos	(31,067,500)	Pengembalian kelebihan pembayaran akun belanja honor output kegiatan (521213) tahun 2025 berdasarkan LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 dan telah dibayar lunas sampai dengan 13 Maret 2026
TOTAL		(35,212,500)	-

6. Beban Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp24.170.544.316 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	(77.086.879)	1. Adanya jurnal penyesuaian atas pengembalian belanja TA 2025 atas Void BAST Nomor SPBy 08283/PB/450938/2025 tanggal 26 Desember 2025 sebesar Rp6.721.328 2. Jurnal koreksi yang berasal dari akun belanja 521219 sebesar Rp70.365.551 berupa barang Konsumsi sesuai dengan hasil audit kepatuhan itjen TA 2025
2	BPVP Sidoarjo	(31.700.000)	Adanya ralat spm dari akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp(31.700.000)
3	BPVP Banyuwangi	24.279.331.195	Koreksi Lainnya atas <i>Grand Total Professional Training of Teachers & Grand Total Training on Usage of e-Education Components</i>
TOTAL		24.170.544.316	-

7. Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar Rp183.686.412 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	915,750	Jurnal penyesuaian atas koreksi ketidaksesuaian akun belanja dengan akun BMN
2	Ditjen Binapenta dan PKK	(10,920,000)	Pada satker Ditjen Binapenta dan PKK selisih perbandingan realisasi beban barang dan jasa sebesar Rp(10.920.000) terdiri dari: •BAST Ekstrakomptabel namun memilih Aset Intrakomptabel sebesar Rp232.255.496 •Pengisian RPATA lainnya berbeda tahun dengan Realisasi RPATA Lainnya dan/atau Penihilan RPATA Lainnya sebesar Rp(243.175.496)
3	Barenbang	(11,484,682)	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel berupa biaya Pembelian Roller Blind sebesar Rp(11.484.682). Telah dilakukan koreksi Pencatatan Aset Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Catat Aset Nomor 7/132/UM.03.00/IX/2025 Tanggal 18 September 2025.
4	BPVP Padang	20,133,000	Adanya ketidaksesuaian kode akun yang terjadi karena belanja barang CCTV yang seharusnya dicatat pada akun 53211, dicatat pada akun 521252 karena pagu anggaran untuk akun 53211 BPVP Padang tidak tersedia dan Koreksi pembelian Pengadaan barang ekstrakomptabel sebanyak 44 buah
5	BPVP Ternate	142,400,000	Adanya koreksi akibat kesalahan penginputan pada kode akun Aset yang harusnya masuk kode akun persediaan pada pengadaan sepatu safety sesuai surat No. 2.14/382/UM.03.00/XII/2025 tanggal 2 Des 2025
6	BBPVP Bandung	1,609,500	Koreksi antar beban karena pencatatan pekerjaan pemeliharaan mess pimpinan sesuai kontrak no PL05.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/II/2025 sebagai perolehan aset ekstrakomptabel
7	Ditjen Binalavotas	41,032,844	Adanya transaksi gantung berdasarkan nomor dokumen BAST S-4349/WPB.12/2025 tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp20.419.000, Adanya koreksi terhadap hibah masuk yang diterima dari pt panasonic gobel indonesia yang sudah dilakukan pendetilan untuk di transfer keluar ke bbpvp medan berdasarkan nomor dokumen BAST 2/1540/UM/03.00/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp20.419.000, dan Adanya koreksi terhadap hibah masuk yang diterima dari USAID yang sudah dilakukan pendetilan berdasarkan nomor dokumen 72049723C00001 tanggal 27 November 2025 Rp194.844 yang berasal dari BAST Hibah Masuk
TOTAL		183,686,412	-

8. Beban Bahan sebesar (Rp2.947.563.996) terdapat pada:

No	Satker	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal Kemnaker	(64.500.000)	Adanya BAST ekstrakomptabel/jasa dan/atau Spby/SPP non BAST belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST ekstrakomptabel/jasa namun memilih aset intrakomptabel.
2	PPSDM Ketenagakerjaan	(4.067.700)	Jurnal atas Pengembalian belanja barang adanya pengajuan pertanggungjawaban ganda : seminar kit kegiatan Pelatihan Strategic Thingking Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan PT Trustco Cipta Madani TA.2025
3	Ditjen PHI dan Jamsos	(75.462.776)	Jurnal Penyesuaian Koreksi atas Belanja bahan Ditjen PHI dan Jamsos sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly ltjen Bulan Desember 2025
4	Ditjen Binapenta dan PKK	(1.860.400)	Perubahan beban bahan menjadi beban keperluan perkantoran
5	Balai K3 Bandung	(351.413.209)	Jurnal Perubahan beban bahan menjadi beban persediaan hasil stock opname fisik
6	Balai K3 Medan	(58.611.110)	Jurnal Perubahan beban bahan menjadi beban persediaan hasil stock opname fisik
7	Barenbang	(21.336.000)	Jurnal akrual Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA ltjen R-6/75/PW. 10.00/XII/2025
8	BBPVP Bandung	(409.067.549)	Jurnal koreksi manual untuk mencatat hasil opname fisik sisa bahan pelatihan senilai Rp 237.229.700
9	BBPVP Bekasi	(239.611.493)	Jurnal koreksi manual untuk mencatat hasil opname fisik sisa bahan pelatihan
10	BBPVP Makassar	(2.377.296)	Jurnal penyesuaian hasil opname fisik sisa bahan pelatihan senilai Rp2.377.296
11	BPVP Sidoarjo	(122.229.911)	Adanya ralat spm dari akun Belanja Bahan sebesar Rp(122.229.911)
12	BPVP Medan	(45.140.264)	Adanya jurnal penyesuaian hasil opname fisik sisa bahan pelatihan tahun 2025 dengan total Rp45.140.264
13	BBPVP Semarang	(47.496.900)	Adanya jurnal koreksi Kapitalisasi belanja bahan menjadi aset, berupa :Network Attach Storage (NAS), Harga perolehan Rp43.673.912,- Uninterruptible Power Supply (UPS), Harga perolehan Rp3.822.988,- berdasarkan tindak lanjut LHP audit Kepatuhan ltjen tahun 2025
14	BBPVP Serang	(242.935.025)	Jurnal atas pencatatan sisa bahan pelatihan tahun 2025 senilai Rp.216.473.899,- dan kapitalisasi belanja bahan menjadi aset berupa 1 unit scanner dan 4 unit printer senilai Rp.26.461.126,-
15	BPVP Bandung Barat	(1.180.000)	Adanya ketidak sesuaian akun untuk pengiriman surat dinas yang harusnya dicatat di akun 521114 senilai Rp. 1.180.000 dicatat menggunakan akun 521211
16	BPVP Belitung	(1.272.000)	Adanya jurnal penyesuaian hasil opname fisik sisa bahan pelatihan tahun 2025 sebesar Rp1.272.000 dengan BA Opname Fisik Nomor 2/24/16/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
17	BPVP Kendari	(27.174.672)	Jurnal Penyesuaian Pendapatan Perolehan Aset lainnya yang berasal dari hasil Opname Fisik Sisa Bahan Pelatihan
18	BPVP Pangkep	(22.208.000)	Adanya jurnal penyesuaian hasil opname fisik sisa bahan pelatihan tahun 2025 dengan total Rp22.208.000
19	BPVP Surakarta	(76.727.350)	Jurnal Koreksi Sisa Bahan Pelatihan Tahun 2025
20	BPVP Sidoarjo	(175.325.571)	Pencatatan atas barang persediaan dan pencatatan bahan pelatihan menjadi aset
21	BPVP Bandung Barat	(57.256.300)	Belanja Bahan untuk pengadaan ATK, bahan cetakan dan Komputer Supplies yang merupakan belanja persediaan barang konsumsi
22	BPVP Banyuwangi	(762.247.870)	Pencatatan Rincian Sisa Persediaan atas bahan pelatihan yang diadakan oleh UPTD Kabupaten/Kota dari Anggaran BPVP Banyuwangi
23	BPVP Padang	(126.042.600)	Pencatatan Sisa bahan pelatihan Tahun 2025
24	BPVP Lombok Timur	(12.020.000)	Pencatatan Sisa Persediaan Obat Tahun 2025
TOTAL		(2.947.563.996)	-

9. Beban Langganan listrik sebesar Rp193.454.123 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	(158.666.905)	Jurnal penyesuaian atas pembayaran belanja berupa tagihan listrik dan telepon bulan Desember Tahun 2025 pada satker Sekretariat Jenderal Kemnaker dan Jurnal balik belanja barang yang masih harus dibayar atas pembayaran belanja berupa tagihan listrik dan telepon bulan Desember Tahun 2024
2	PPSDM Ketenagakerjaan	56.575.797	Jurnal akrual berupa pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2026 atas penggunaan listrik bulan Desember 2025
3	BPKK Bekasi	61.381.672	Jurnal Pengakuan atas Tagihan Rekening Listrik Beban Pemakaian bulan Desember 2025 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2026
4	Balai K3 Bandung	20.898.184	Beban listrik yang masih harus dibayar bulan desember 2025
5	Balai K3 Medan	19.996.276	Jurnal Pembayaran Listrik yang masih harus dibayarkan.
6	Balai K3 Samarinda	41.504.320	Jurnal penyesuaian atas belanja barang listrik bulan Desember 2025
7	Balai K3 Jakarta	48.827.782	Jurnal Penyesuaian Akrual Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik.
8	BPVP Bandung Barat	3.610.008	Jurnal balik atas belanja barang listrik bulan desember 2024 dan Jurnal akrual atas belanja barang listrik desember 2025
9	BBPVP Serang	5.965.661	Jurnal balik atas belanja barang listrik bulan desember 2024 dan Jurnal akrual atas belanja barang listrik desember 2025
10	BPVP Samarinda	(7.614.000)	Jurnal balik atas belanja barang listrik bulan desember 2024 dan Jurnal akrual atas belanja barang listrik desember 2025
11	BBPVP Bekasi	32.789.521	Jurnal balik atas belanja barang listrik bulan desember 2024 dan Jurnal akrual atas belanja barang listrik desember 2025
12	BBPVP Semarang	(17.903.411)	Jurnal balik atas belanja barang listrik bulan desember 2024 dan Jurnal akrual atas belanja barang listrik desember 2025
13	BBPVP Makassar	28.314.273	Jurnal balik atas belanja barang listrik bulan desember 2024 dan Jurnal akrual atas belanja barang listrik desember 2025
14	BPVP Sorong	57.774.945	Koreksi Pembayaran Pemakaian Listrik Desember 2025 yang baru dibayar Januari 2026
TOTAL		193.454.123	-

10. Beban Langganan Telepon sebesar Rp5.683.746 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	51,773	Jurnal penyesuaian atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp6.718.672 dan Jurnal balik belanja barang yang masih harus dibayar atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp6.666.899
2	Inspektorat Jenderal	434,232	Merupakan transaksi Belanja Langganan Telepon menggunakan GUP dengan No dokumen 01132/PB/259031/2025.
3	BPKK Bekasi	266,356	Jurnal Pengakuan atas Tagihan Rekening Telepon Beban Pemakaian bulan Desember 2025 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2026
4	Balai K3 Samarinda	3,536,571	Jurnal penyesuaian atas belanja barang telepon bulan Desember 2025
5	BPVP Banyuwangi	7,000,200	Jurnal akrual atas pembayaran belanja beban langganan Internet bulan Desember 2025 yang dibayarkan bulan Januari 2026
6	BBPVP Serang	(6,943)	Jurnal penyesuaian atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp112.332 dan Jurnal balik belanja barang yang masih harus dibayar atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp119.275
7	BPVP Samarinda	3,737	Jurnal penyesuaian atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp70.337 dan Jurnal balik belanja barang yang masih harus dibayar atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp66.600
8	BBPVP Bekasi	(5,602,180)	Jurnal penyesuaian atas pembayaran belanja berupa tagihan internet bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp516.594 dan Jurnal balik belanja barang yang masih harus dibayar atas pembayaran belanja berupa tagihan telepon bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp6.118.774
TOTAL		5,683,746	-

11. Beban Langganan Air sebesar Rp4.823.516 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	880,052	Jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan Desember Tahun 2025
2	Pusat Pasar Kerja	7,821,205	Jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan Desember Tahun 2025
3	BPKK Bekasi	2,314,600	Jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan Desember Tahun 2025
4	Balai K3 Samarinda	991,455	Jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan Desember Tahun 2025
5	Balai K3 Jakarta	27,316,205	Jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan Desember Tahun 2025
6	BPVP Samarinda	(34,424,371)	Jurnal balik atas belanja barang air bulan desember 2024 sebesar Rp50.263.917 dan Jurnal Penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan desember 2025 sebesar Rp 15.839.546
7	BBPVP Bekasi	333,900	Jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan Desember Tahun 2025
8	BBPVP Makassar	(409,530)	Jurnal balik atas belanja barang air bulan desember 2024 sebesar Rp10.660.650 dan Jurnal Penyesuaian atas pembayaran tagihan air bulan desember 2025 sebesar Rp 10.251.120
TOTAL		4,823,516	-

12. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp3.292.424 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Barenbang	4,088,574	Jurnal Manual atas Pencatatan Tunggakan Tahun Anggaran Lalu Pekerjaan Langganan Bandwidth Jaringan Komunikasi Data ISP I dan VPN IP (Koneksi VPN IP TKA 1 Mbps) (Termin 12)
2	BBPVP Serang	(24,700)	Jurnal Balik langganan daya dan jasa lainnya tahun 2024 sebesar Rp862.750 dan jurnal akrual atas belanja langganan daya dan jasa lainnya (langganan listrik Satpel Lubuklinggau) bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026 sebesar Rp838.050
3	BPVP Samarinda	(771,450)	Jurnal Balik langganan daya dan jasa lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.868.240 dan jurnal akrual atas belanja langganan daya dan jasa lainnya (langganan internet) bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026 sebesar Rp2.096.790
TOTAL		3,292,424	-

13. Beban Sewa sebesar (Rp21.165.729) terdapat pada Barenbang Ketenagakerjaan yang merupakan:

- Jurnal Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara Terkait Pengembalian Kelebihan Pembayaran Langganan Sewa Komputasi Awan SIAPkerja Periode Desember 2025, 6766.FAB.02.056D.522141 sebesar (Rp17.171.566).
- Jurnal balik atas Pembayaran Listrik dan Air bulan Desember 2024 atas Penyewaan Gudang yang baru diterima tagihannya pada tanggal 8 Januari 2025 sesuai dengan tagihan Nomor 0014/UTL-JIEP/I/25 sebesar (Rp519.250).

- c) Pengembalian Belanja yang Berasal dari Potongan SPM yang belum terbit SP2D sebesar (Rp3.474.913).

14. Beban Jasa Profesi sebesar (Rp79.817.500) terdapat pada:

- a) Ditjen PHI dan Jamsos yang merupakan Pengembalian Belanja honorarium sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly Itjen Bulan Desember 2025 sebesar (Rp5.500.000).
- b) Ditjen PHI dan Jamsos yang merupakan Pengembalian kelebihan pembayaran akun belanja jasa profesi (522151) tahun 2025 berdasarkan LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 dan telah dibayar lunas pada 4 Maret 2026 dengan NTPN A285955DFRPTH613 sebesar (Rp8.550.000).
- c) Barenbang Ketenagakerjaan yang merupakan Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 (1.01.07) - 6769.PBK.001.051.D.522151 Narasumber sebesar (Rp2.700.000).
- d) BPVP Banda Aceh yang merupakan Jurnal Koreksi atas penyetoran Pengembalian kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber Softskills pada Balai Pelatihan Vokasi di BPVP Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, yang dilakukan tanggal 06-Januari 2026, NTPN BE5CE7QLVBB6NN8D sebesar (Rp36.465.000).
- e) BPVP Banda Aceh yang merupakan Jurnal Koreksi atas penyetoran Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Softskills pada Pelatihan Vokasi (PBK Batch VI 2025) di BPVP Banda Aceh, yang dilakukan tanggal 06-Januari 2026 sesuai dengan NTPN 130293CIG6F8MRTD sebesar (Rp19.890.000).
- f) BPVP Banda Aceh yang merupakan Jurnal Koreksi atas Penyetoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Pembimbing Ojt PBL Batch IV Tahun Anggaran 2025 di BPVP Banda Aceh, yang dilakukan tanggal 10 Februari 2026 sesuai dengan NTPN B609055DFRN45HNF sebesar (Rp6.712.500).

14. Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp21.692.970 terdapat pada:

- a) Satker PPSDM Ketenagakerjaan yang merupakan jurnal atas pengembalian pengadaan tenaga alih daya tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan kerugian negara TA. 2025 sebesar (Rp11.953.661).
- b) Satker Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp58.519.762 yang merupakan:
 - (1) Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen TA. 2025 SDMA Set.Barenbang (point 8) Pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas manajerial SDMA sebesar (Rp3.000.000)
 - (2) Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Poin 9, 6766.BMA.01.052A.522191 Infografik Rp8.122.600 dan Videografik Rp6.106.000 dengan total sebesar (Rp14.228.600)

- (3) Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Poin 1, 6624.EBA.994.002BC.522191 Langganan SMS OTP dan Broadcast sebesar (Rp93.881)
 - (4) Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen R-6/75/PW.10.00/XII/2025 Poin 10, 6766.FAB.02.056A.522191 Pemeliharaan Perangkat Data Center sebesar (Rp11.395.000)
 - (5) Jurnal Manual atas Pencatatan Tunggakan Tahun Anggaran Lalu Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Utama Data Center Rp56.449.050.
 - (6) BAST Ekstrakomptabel/Jasa dan/atau Spby/SPP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST Ekstrakomptabel/Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel sebesar Rp55.788.193
 - (7) Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen TA. 2025 SDMA Set.Barenbang (point 8) Pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas manajerial SDM sebesar (Rp25.000.000).
- c) Satker BPVP Banda Aceh yang merupakan Jurnal Koreksi atas Penyetoran Pengembalian biaya Keperluan Pengadaan Jasa Alih Daya Tenaga Pengemudi, Pramukantor, dan Resepsionis Termin 13, yang dilakukan tanggal 28 Januari 2026 sesuai dengan NTPN 12B0155DFRKGCRIE sebesar (Rp24.873.131)

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp94.527.621.631

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp94.527.621.631 dan Rp153.282.248.756.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 391.

Tabel 391 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.030.934.115	71.161.069.761	(42.130.135.646)	(59,20)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	858.774.768	835.329.965	23.444.803	2,81
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.125.860	294.335.103	(280.209.243)	(95,20)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.229.047.414	31.027.904.682	(11.798.857.268)	(38,03)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	320.972.313	330.460.590	(9.488.277)	(2,87)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.772.403.537	3.194.856.449	(422.452.912)	(13,22)
Beban Pemeliharaan Irigasi	-	20.949.030	(20.949.030)	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	968.068.849	2.662.331.953	(1.694.263.104)	(63,64)
Beban Pemeliharaan Lainnya	41.030.459.347	43.174.779.712	(2.144.320.365)	(4,97)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	261.193.428	495.210.511	(234.017.083)	(47,26)
Beban Persediaan Suku Cadang	2.042.000	9.770.000	(7.728.000)	(79,10)
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	39.600.000	75.251.000	(35.651.000)	(47,38)
Jumlah Beban Pemeliharaan	94.527.621.631	153.282.248.756	(58.754.627.125)	(38,33)

Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 392.

Tabel 392 Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	16.397.126.185	23.996.147.693	(7.599.021.508)	(31,67)
Inspektorat Jenderal	926.376.566	990.984.300	(64.607.734)	(6,52)
Ditjen Binapenta & PKK	5.069.051.376	7.920.575.795	(2.851.524.419)	(36,00)
Ditjen PHI & JSK	1.106.176.598	1.882.152.053	(775.975.455)	(41,23)
Ditjen Binw asnaker & K3	5.188.651.215	6.228.460.483	(1.039.809.268)	(16,69)
Barenbang	41.203.980.628	35.574.414.118	5.629.566.510	15,82
Ditjen Binalavotas	24.636.259.063	76.689.514.314	(52.053.255.251)	(67,88)
Jumlah Beban Pemeliharaan	94.527.621.631	153.282.248.756	(58.754.627.125)	(38,33)

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.030.934.115	30.281.185.738	(1.250.251.623)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	66.359.648	(66.359.648)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	858.774.768	858.774.768	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.125.860	14.125.860	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.229.047.414	19.229.047.414	-
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	23.984.400	(23.984.400)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	320.972.313	320.972.313	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.772.403.537	2.772.403.537	-
Beban Pemeliharaan Irigasi		-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	968.068.849	999.433.385	(31.364.536)
Beban Pemeliharaan Lainnya	41.030.459.347	39.613.656.676	1.416.802.671
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	261.193.428	-	261.193.428
Beban Persediaan Suku Cadang	2.042.000	-	2.042.000
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	39.600.000	-	39.600.000
TOTAL	94.527.621.631	94.179.943.739	347.677.892

Selisih Beban Pemeliharaan menurut LO dan LRA sebesar Rp347.677.892 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.250.251.623) terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	PPSDM Ketenagakerjaan	6.674.837	Jurnal Balik Atas Jurnal Koreksi Pencatatan Piutang atas Pengembalian kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan pada tanggal 10 April 2025 dengan nomor NTPN F5D972G502RTCE67
2	Ditjen Binapenta dan PKK	(196.380.000)	Kesalahan pencatatan menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sehingga membentuk KDP pada modul aset tetap. Telah dilakukan koreksi berdasarkan surat keterangan pencatatan BMN Nomor 3.9/610/UM.03/VI/2025 dan dicatat sebagai penambah nilai Aset Gedung dan Bangunan.
3	BPKK Kendari	(49.719.000)	Pengembalian kelebihan pembayaran atas enam pekerjaan pemeliharaan (akun beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)) tahun 2025 sebesar Rp49.719.000 berdasarkan KHP BPK terhadap pemeliharaan bangunan tahun 2025
4	BPKK Bekasi	(15.941.800)	Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja akun beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) tahun 2025 berdasarkan perhitungan bersama pemeriksa dan telah dibayar lunas pada tanggal 02 April 2026 dengan NTPN 12AE77QLVBK1NHAM
5	BPVP Bandung Barat	(40.074.281)	Pencatatan kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pemeliharaan Penggantian Atap Kaca Green House yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (NUP 17) berdasarkan SPK No. 2.17/35/PPK/UM.02/III/2025 tgl. 14 Maret 2025
6	BPVP Padang	(127.221.000)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
7	BPVP Bantaeng	(194.121.728)	Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
8	BPVP Kendari	(44.323.329)	Jurnal Penyesuaian Pendapatan Perolehan Aset lainnya yang berasal dari belanja barang diatas nilai kapitalisasi aset berupa Pekerjaan Rehab Ruang Kelas Perhotelan sebesar Rp22.807.888 dan penutup filter kolam taman BPVP Kendari sebesar Rp6.617.117, pengembalian kelebihan pembayaran
9	BBPVP Serang	(262.668.325)	Jurnal balik atas jurnal untuk pengembalian kelebihan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berdasarkan audit uji petik BPK pada LK TA 2024.
10	BPVP Sidoarjo	122.229.911	Adanya ralat spm dari akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 122.229.911
11	BBPVP Bandung	(448.706.908)	Adanya ralat spm ke akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp41.935.800
TOTAL		(1.250.251.623)	

2. Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.359.648 pada Ditjen Binalavotas.
3. Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp23.984.400) pada Ditjen Binalavotas.
4. Beban Pemeliharaan Jaringan sebesar (Rp31.364.536) terdapat pada:
 - a. Satker Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang merupakan adanya jurnal balik atas Setoran Pengembalian TLHA Itjen R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 19 Pusdatik Barenbang (Pengadaan Barang dalam rangka Pemeliharaan belum dapat diyakini kebenarannya) sebesar Rp1.173.660.

- b. Satker BBPVP Bandung sebesar (Rp32.538.196) yang merupakan kapitalisasi pekerjaan pemeliharaan sumur Asrama Rajawali sesuai kontrak no PL103.10-SPK/BBPVP-BDG-PPK/XII/2025 sebagai penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan.
5. Beban Pemeliharaan Lainnya sebesar Rp1.416.802.671 terdapat pada:
 - a. Satker Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang merupakan Jurnal Manual atas Pencatatan Tunggakan Tahun Anggaran Lalu Pekerjaan Pengadaan Lisensi Container Platform sebesar Rp Rp1.459.459.461
 - b. Satker Ditjen PHI dan Jamsos yang merupakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja akun beban pemeliharaan lainnya (523199) tahun 2025 berdasarkan perhitungan bersama pemeriksa dan telah dibayar lunas pada tanggal 2 April 2026 dengan NTPN 9D7A861QVMF8TH43 sebesar (Rp5.172.740)
 - c. Satker BPVP Sidoarjo yang merupakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja Bahan pelatihan pada BPVP Sidoarjo sebesar (Rp37.484.050).
6. Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp261.193.428 terdapat pada:

No	Unit Eselon I	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	500.000	Persediaan bahan untuk pemeliharaan
2	Ditjen Binwasnaker dan K3	29.124.776	Persediaan bahan untuk pemeliharaan
3	Ditjen Binalavotas	236.017.552	Persediaan bahan untuk pemeliharaan
4	BPVP Padang	(4.448.900)	Koreksi pengadaan perlengkapan rumah tangga yang merupakan persediaan barang konsumsi yang dibeli menggunakan akun Persediaan (521811) dan masih tersedia per 31 Desember 2025
TOTAL		261.193.428	

7. Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp2.042.000 pada BPVP Banda Aceh (Ditjen Binalavotas).
8. Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.600.000 terdapat pada BPVP Bantaeng (Ditjen Binalavotas).

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp253.429.615.110

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 253.429.615.110 dan Rp1.066.681.444.727.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada Tabel 393.

Tabel 393 Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	123.418.938.079,	456.266.715.031	(332.847.776.952)	(72,95)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.078.773.463,	22.457.063.083	(15.378.289.620)	(68,48)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.410.130.204,	208.541.335.970	(168.131.205.766)	(80,62)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.441.426.063,	312.745.661.960	(243.304.235.897)	(77,80)
Beban Perjalanan Dinas - Luar Negeri	12.353.846.556,	47.771.544.548	(35.417.697.992)	(74,14)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	726.500.745,	18.899.124.135	(18.172.623.390)	(96,16)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	253.429.615.110	1.066.681.444.727	(813.251.829.617)	(76,24)

Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 394.

Tabel 394 Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	42.377.800.317	111.435.334.711	(69.057.534.394)	(61,97)
Inspektorat Jenderal	6.891.828.460	27.838.828.664	(20.947.000.204)	(75,24)
Ditjen Binapenta & PKK	12.941.725.453	174.962.539.882	(162.020.814.429)	(92,60)
Ditjen PHI & JSK	72.116.176.357	142.524.040.389	(70.407.864.032)	(49,40)
Ditjen Binw asnaker & K3	45.599.438.288	110.385.740.131	(64.786.301.843)	(58,69)
Barenbang	4.430.669.478	43.668.188.138	(39.237.518.660)	(89,85)
Ditjen Binalavotas	69.071.976.757	455.866.772.812	(386.794.796.055)	(84,85)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	253.429.615.110	1.066.681.444.727	(813.251.829.617)	(76,24)

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp813.251.829.617 atau 76,24% yang disebabkan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Daerah (APBD) tanggal 22 Januari 2025.

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	123.418.938.079	123.796.279.135	(377.341.056)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.078.773.463	7.078.773.463	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.410.130.204	40.276.145.204	133.985.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.441.426.063	69.551.793.503	(110.367.440)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	12.353.846.556	12.353.846.556	-
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	726.500.745	726.500.745	-
TOTAL	253.429.615.110	253.783.338.606	(353.723.496)

Selisih Beban Perjalanan Dinas menurut LO dan LRA sebesar (Rp353.723.496) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar (Rp377.341.056) terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	PPSDM Ketenagakerjaan	(4,200,000)	Pengembalian belanja barang adanya Pertanggungjawaban Ganda kelebihan pembayaran UH perdin keg. Pelatihan Strategic Thingking untuk 7 pegawai TA.2025
2	BPKK Bekasi	(268,464,127)	Pengembalian perjalanan dinas tidak dilaksanakan dan pembayaran realisasi perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan (akun beban perjalanan dinas 524111) pada BPKK Kendari dan telah dibayar sebesar Rp268.372.877.
3	Ditjen PHI dan Jamsos	(90,350,829)	Pengembalian Perjadin Biasa sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly Itjen Bulan Desember 2025
4	Barenbang	3,877,600	a. Jurnal Balik Jurnal Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian TLHA Itjen R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Pusbangjak Poin 12 (Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas Pembelian Tiket Moda Transportasi Udara) sebesar Rp505.000 b. Jurnal Balik Jurnal Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian TLHA Itjen R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 1d Setbarebang (Beban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan) sebesar Rp2.926.000 c. Jurnal Balik Jurnal Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian TLHA Itjen R-6/54/PW.10.00/XII/2024 Point 16 Pusdatik Barenbang (Pertanggungjawaban Beban Barang pada Pusdatik Belum Sesuai Ketentuan) sebesar Rp5.900.000 d. Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 (1.01.04) - 6769.PBK.001.051.E Transport 107.500, Penginapan 1.520.400 e. Piutang Lainnya atas Setoran Pengembalian Negara sebagai TLHA Itjen Nomor R-6/75/PW.10.00/XII/2025 (1.01.04) - Point 24 Terkait Kelebihan Pembayaran Uang Perjalanan Dinas sebesar Rp3.825.500
5	BPVP Padang	3,156,300	Jurnal Balik Belanja Perjalanan Dinas Biasa
6	BPVP Banda Aceh	(21,360,000)	Jurnal Koreksi atas Penyetoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Saku OJT PBL LP3I Tahun Anggaran 2025 di BPVP Banda Aceh
TOTAL		(377,341,056)	

2. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp133.985.000 terdapat pada:

No	Unit Eselon I	Nilai	Keterangan
1	Ditjen PHI dan Jamsos	(156,940,000)	Jurnal Penyesuaian Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly ltjen Bulan Desember 2025
2	Ditjen Binwasnaker & K3	290,745,000	Ralat SPM Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota satker Ditjen Binwasnaker dan K3
3	BPVP Padang	180,000	Jurnal Balik Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota
TOTAL		133,985,000	

3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar (Rp110.367.440) terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal Kemnaker	64.500.000	Adanya BAST ekstrakomptabel/jasa dan/atau Spby/SPP non BAST belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST ekstrakomptabel/jasa namun memilih aset intrakomptabel
2	Ditjen PHI dan Jamsos	115.877.560	Jurnal Penyesuaian Belanja Perjadin Luar Kota sebagai Tindak Lanjut LHP Audit kepatuhan ITJEN No 6/11/PW.10.00/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 beserta tindak lanjut penugasan monthly ltjen Bulan Desember 2025 dan Pengembalian kelebihan pembayaran akun belanja Perjadin Paket Meeting Luar Kota (524119) tahun 2025
3	Ditjen Binwasnaker & K3	(290.745.000)	Ralat SPM Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota
TOTAL		(110.367.440)	

D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada Masy
Rp11.107.338.789.065

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah beban barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.107.338.789.065 dan Rp1.865.039.362.424.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 395.

Tabel 395 Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat	65.150.000.000	262.073.050.950	(196.923.050.950)	(75,14)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik	10.901.829.053.642	1.580.111.236.111	9.321.717.817.531	589,94
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual/Diserahkan ke Masyarakat	140.327.535.423	22.794.878.023	117.532.657.400	515,61
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	5.584.410	(5.584.410)	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	32.200.000	54.612.930	(22.412.930)	(41,04)
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.107.338.789.065	1.865.039.362.424	9.242.299.426.641	495,56

Sedangkan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 396.

Tabel 396 Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binapenta & PKK	78.062.309.905	295.767.384.060	(217.705.074.155)	(73,61)
Ditjen PHI & Jamsos	10.353.453.599.990	1.160.843.912.525	9.192.609.687.465	791,89
Ditjen Binalavotas	675.822.879.170	408.428.065.839	267.394.813.331	65,47
Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.107.338.789.065	1.865.039.362.424	9.242.299.426.641	495,56

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada tahun 2025 berasal dari:

1. Ditjen Binapenta dan PKK
 - a. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Padat Karya
 - b. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula
 - c. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan
2. Ditjen PHI dan Jamsos
 - a. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
 - b. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
3. Ditjen Binalavotas
 - a. Bantuan Pemerintah Pembangunan Gedung *Workshop* dan Pemberian Peralatan Pelatihan Vokasi Balai Latihan Kerja Komunitas
 - b. Bantuan Program Pemagangan Nasional

Realisasi LO per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat	65.150.000.000	64.150.000.000	1.000.000.000
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik	10.901.829.053.642	10.769.804.681.435	132.024.372.207
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual/Diserahkan ke Masyarakat	140.327.535.423	-	140.327.535.423
Beban Peralatan dan mesin untuk dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	44.440.792.173	(44.440.792.173)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	32.200.000	-	32.200.000
TOTAL	11.107.338.789.065	10.878.395.473.608	228.943.315.457

Selisih Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat menurut LO dan LRA sebesar Rp 228.943.315.457 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.000.000.000 terdapat pada Satker Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi.
2. Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki karakteristik sebesar Rp132.024.372.207 terdapat pada:

No	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	BBPKK Bandung Barat	73,500	a. Jurnal Balik atas Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024 a.n Eva Khodijah, ID 365210 Kab. Bandung sebesar Rp2.000 b. Jurnal Balik Pengakuan atas Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024 a.n HARTONO, ID 155938 Kab./Kota PONOROGO sebesar Rp40.000 c. Jurnal Balik atas Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024a.n Rika Nofilma, ID 155668 Kota Bukittinggi sebesar Rp1.000 d. Jurnal Balik atas Pengembalian Kekurangan SPJ Bantuan Sarana Usaha (BSU) kegiatan TKML Tahun Anggaran 2024 a.n SARNU, ID 154021 Kab. Madiun sebesar Rp30.500
2	Ditjen PHI dan Jamsos	(468,000,000)	Jurnal atas Pengembalian dana BSU 2025 berstatus Berhasil Salur pada BNI dan PT Pos Indonesia yang berhasil tagih sejumlah 780 orang yang telah dikembalikan ke Kas Negara dengan NTPN C17FB0NA0N1AIEPA tanggal 15 April 2026 dan NTPN B4E907QLVBKEVU24 tanggal 16 April 2026
3	BPVP Padang	2,010,001	Jurnal Balik Beban barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
4	BBPVP Serang	27,302,400	Jurnal Balik Beban barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
5	BBPVP Bandung	125,922,480	Jurnal untuk mencatat penyelesaian temuan Belanja Barang Dibayar di Muka LHP BPK RI TA 2022
		(6,929,900)	Jurnal untuk mencatat koreksi atas temuan Belanja Barang Dibayar di Muka LHP BPK RI TA 2022
6	Dit. Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	132,343,993,726	Pembayaran Uang Saku Peserta Pemagangan periode magang Des 2025
TOTAL		132,024,372,207	

3. Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp140.327.535.423 terdapat pada satker Direktorat Bina Lemlatvok (Ditjen Binalavotas).
4. Belanja Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44.440.792.173 terdapat pada satker Direktorat Bina Lemlatvok (Ditjen Binalavotas).
5. Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat sebesar Rp32.200.000 terdapat pada satker BBPKK Bandung Barat (Ditjen Binapenta dan PKK).

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp381.420.248.530

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp390.398.497.588 dan Rp406.765.986.904.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 397.

Tabel 397 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	250,372,743,049	267,460,156,689	(17,087,413,640)	(6.39)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	100,435,624,911	96,100,585,636	4,335,039,275	4.51
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,405,669,121	9,615,673,256	(6,210,004,135)	(64.58)
Beban Penyusutan Irigasi	1,161,332,312	1,085,868,188	75,464,124	6.95
Beban Penyusutan Jaringan	801,412,395	788,702,551	12,709,844	1.61
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	13,977,440	12,485,875	1,491,565	11.95
Beban Amortisasi Software	27,416,660,046	22,868,433,068	4,548,226,978	19.89
Beban Amortisasi Lisensi	635,621,680	599,019,180	36,602,500	6.11
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	152,196,775	60,578,850	91,617,925	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasional pemerintahan	6,003,259,859	8,174,483,611	(2,171,223,752)	(26.56)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	390,398,497,588	406,765,986,904	(16,367,489,316)	(4.02)

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 398.

Tabel 398 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp) ²	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	43,048,377,960	42,842,290,432	206,087,528.00	0.48
Inspektorat Jenderal	1,265,034,657	1,312,553,021	(47,518,364.00)	(3.62)
Ditjen Binapenta & PKK	11,810,196,287	12,909,641,935	(1,099,445,648.00)	(8.52)
Ditjen PHI & JSK	3,661,812,770	4,229,546,209	(567,733,439.00)	(13.42)
Ditjen Binwasnaker & K3	32,082,451,660	33,243,077,888	(1,160,626,228.00)	(3.49)
Barembang	26,744,928,179	37,376,170,482	(10,631,242,303.00)	(28.44)
Ditjen Binalavotas	271,785,696,075	274,852,706,937	(3,067,010,862.00)	(1.12)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	390,398,497,588	406,765,986,904	(16,367,489,316)	(4.02)

D.1.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
(Rp58.105.914)

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp58.105.914) dan (Rp146.245.785)

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada Tabel 399.

Tabel 399 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	(708)	708	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5,326,606	(9,421,387)	14,747,993	(156.54)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP TGR	(639,310)	639,310	(1,278,620)	(200.00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP TGR	(37,000)	37,000	(74,000)	(200.00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(256,210)	-	(256,210)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(62,500,000)	(137,500,000)	75,000,000	(54.55)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(58,105,914)	(146,245,785)	88,139,871	(60.27)

Sedangkan rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 400.

Tabel 400 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Menurut Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(1,304,204)	1,071,788	(2,375,992)	(221.68)
Inspektorat Jenderal	(9,341)	9,341	(18,682)	-
Ditjen Binapenta & PKK	1,879,653	(7,685,867)	9,565,520	(124.46)
Ditjen PHI & Jamsos	3,898,881	1,516,231	2,382,650	157.14
Ditjen Binwasnaker & K3	(62,277,002)	(138,075,876)	75,798,874	(54.90)
Barenbang	1,510	(1,621,717)	1,623,227	(100.09)
Ditjen Binalavotas	(295,411)	(1,459,685)	1,164,274	(79.76)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(58,105,914)	(146,245,785)	88,139,871	(60.27)

D.2. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp5.806.361.500

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.806.361.500 dan Rp19.140.035.277. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tersebut merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp51.083.798.901) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp56.890.160.401

Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 401.

Tabel 401 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(51.083.798.901)	(40.1506.850)	(50.682.292.051)	12.623,02
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56.890.160.401	19.541.542.127	37.348.618.274	191,2
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.806.361.500	19.140.035.277	(13.333.673.777)	(69,66)

Sedangkan Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional per Eselon I disajikan pada Tabel 402.

Tabel 402 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	977.551.406	2.134.032.235	(1.156.480.829)	(54,19)
Inspektorat Jenderal	1868.133	127.970.585	(126.102.452)	(98,54)
Ditjen Binapenta & PKK	2.245.653.693	5.322.371.704	(3.076.718.011)	(57,81)
Ditjen PHI & Jamsos	404.284.871	762.040.513	(357.755.642)	(46,95)
Ditjen Binwasnaker & K3	21463.348	921.906.064	(900.442.716)	(97,67)
Barembang	441.131.944	1886.515.464	(1445.383.520)	(76,62)
Ditjen Binalavotas	1714.408.105	7.985.198.712	(6.270.790.607)	(78,53)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.806.361.500	19.140.035.277	(13.333.673.777)	(69,66)

D.2.1. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit Pelepasan
Aset Non Lancar
(Rp51.083.798.901)

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar.

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp51.083.798.901) dan (Rp401.506.850). Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar tersebut

merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.413.291.622 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp53.497.090.523.

Tabel 403 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Pelepasan Aset Non Lancar
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,413,291,622	4,374,848,973	(1,961,557,351)	(44.84)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	53,497,090,523	4,776,355,823	48,720,734,700	1,020.04
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(51,083,798,901)	(401,506,850)	(50,682,292,051)	12,623.02

Sedangkan Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I disajikan pada Tabel 404.

Tabel 404 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Pelepasan Aset Non Lancar
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	225,557,912	701,950,382	(476,392,470)	(67.87)
Inspektorat Jenderal	-	24,057,500	(24,057,500)	-
Ditjen Binapenta & PKK	180,023,869	112,535,813	67,488,056	59.97
Ditjen PHI & Jamsos	-	74,304,000	(74,304,000)	(100.00)
Ditjen Binwasnaker & K3	(314,461,719)	(463,777,902)	149,316,183	(32.20)
Barenbang	163,322,745	(244,237,779)	407,560,524	-
Ditjen Binalavotas	(51,338,241,708)	(606,338,864)	(50,731,902,844)	8,366.92
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(51,083,798,901)	(401,506,850)	(50,682,292,051)	12,623.02

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp2.413.291.622

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.413.291.622 dan Rp4.374.848.973.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar disajikan pada Tabel 405.

Tabel 405 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,860,000	3,600,000	(1,740,000)	(48.33)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,809,251,051	2,034,578,529	(225,327,478)	(11.07)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	602,180,571	2,336,670,444	(1,734,489,873)	(74.23)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,413,291,622	4,374,848,973	(1,961,557,351)	(44.84)

Sedangkan rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I disajikan pada Tabel 406.

Tabel 406 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	712,389,000	805,304,650	(92,915,650)	(11.54)
Inspektorat Jenderal	-	47,040,000	(47,040,000)	-
Ditjen Binapenta & PKK	231,540,651	112,535,813	119,004,838	105.75
Ditjen PHI & Jamsos	-	74,304,000	(74,304,000)	-
Ditjen Binwasnaker & K3	269,100,326	1,434,971,710	(1,165,871,384)	(81.25)
Barenbang	163,322,745	-	163,322,745	-
Ditjen Binalavotas	1,036,938,900	1,900,692,800	(863,753,900)	(45.44)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,413,291,622	4,374,848,973	(1,961,557,351)	(44.84)

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp53.497.090.523

Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp53.497.090.523 dan Rp4.776.355.823.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berasal dari Beban Kerugian Pelepasan Aset.

Sedangkan rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I disajikan pada Tabel 407.

Tabel 407 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	486,831,088	103,354,268	383,476,820	371.03
Inspektorat Jenderal	-	22,982,500.00	(22,982,500)	-
Ditjen Binapenta & PKK	51,516,782	-	51,516,782	-
Ditjen PHI & Jamsos	-	-	-	-
Ditjen Binwasnaker & K3	583,562,045	1,898,749,612	(1,315,187,567)	(69.27)
Barenbang	-	244,237,779	(244,237,779)	-
Ditjen Binalavotas	52,375,180,608	2,507,031,664	49,868,148,944	1,989.13
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	53,497,090,523	4,776,355,823	48,720,734,700	1,020.04

Beban pelepasan aset non lancar berasal dari penghapusan aset melalui mekanisme penjualan terhadap aset yang masih memiliki nilai buku.

D.2.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp56.890.160.401

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.890.160.401 dan Rp19.541.542.127

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp57.090.484.655 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp200.324.254.

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 408.

Tabel 408 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	57.090.484.655	19.909.428.930	37.181.055.725	186,75
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.324.254	367.886.803	(167.562.549)	(45,55)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56.890.160.401	19.541.542.127	37.348.618.274	191,12

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I disajikan pada Tabel 409.

Tabel 409 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	751.993.494	1432.081.853	(680.088.359)	(47,49)
Inspektorat Jenderal	1.868.133	103.913.085	(102.044.952)	(98,20)
Ditjen Binapenta & PKK	2.065.629.824	5.209.835.891	(3.144.206.067)	(60,35)
Ditjen PHL & Jamsos	404.284.871	687.736.513	(283.451.642)	(41,22)
Ditjen Binwasnaker & K3	335.925.067	1.385.683.966	(1.049.758.899)	(75,76)
Barenbang	277.809.199	2.130.753.243	(1.852.944.044)	(86,96)
Ditjen Binalavotas	53.052.649.813	8.591.537.576	44.461.112.237	517,50
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56.890.160.401	19.541.542.127	37.348.618.274	191,12

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya
Rp57.090.484.655

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp57.090.484.655 dan Rp19.909.428.930.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 410.

Tabel 41 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Ketugian Negara Terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000	66.427.980	(46.427.980)	(69,89)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Ketugian Negara Terhadap Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000	124.309.686	(109.309.686)	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	303.331.587	131.120.293	(1007.874.706)	(76,87)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.880.629.271	13.590.308.679	(4.709.679.408)	(34,65)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	436.153.995	1.909.434.528	(1.473.280.533)	(77,16)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	65.204.800	1.182.154.264	(1.116.949.464)	(94,48)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.541.702	7.130.000	(588.298)	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	17.17.680.500	(17.17.680.500)	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	47.363.623.300	777.000	47.362.846.300	6.095.604,41
Surplus/(Defisit) - LO	57.090.484.655	19.909.428.930	37.181.055.725	186,75

Sedangkan rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I disajikan pada Tabel 411.

Tabel 411 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)2	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	753.693.494	1.432.364.853	(678.671.359)	(47,38)
Inspektorat Jenderal	1.868.133	103.913.085	(102.044.952)	(98,20)
Ditjen Binapenta & PKK	2.065.629.824	5.209.835.891	(3.144.206.067)	(60,35)
Ditjen PHL & Jamsos	404.284.871	687.736.513	(283.451.642)	(41,22)
Ditjen Binw asnaker &	335.925.067	1.385.683.966	(1.049.758.899)	(75,76)
Barenbang	277.809.199	2.130.753.243	(1.852.944.044)	(86,96)
Ditjen Binalavotas	53.251.274.067	8.959.141.379	44.292.132.688	494,38
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	57.090.484.655	19.909.428.930	37.181.055.725	186,75

D.2.2.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non
Operasional
Rp200.324.254

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp200.324.254 dan Rp367.886.803

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 412.

Tabel 412 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	18,135,000	(18,135,000)	(100.00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	51,330,320	75,209,504	(23,879,184)	(31.75)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	148,993,934	274,542,299	(125,548,365)	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200,324,254	367,886,803	(167,562,549)	(45.55)

Sedangkan rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I disajikan pada Tabel 413.

Tabel 413 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	1,700,000	283,000	1,417,000	500.71
Ditjen Binapenta & PKK	-	-	-	-
Ditjen Binwasnaker & K3	-	-	-	-
Ditjen Binalavotas	198,624,254	367,603,803	(168,979,549)	(45.97)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200,324,254	367,886,803	(167,562,549)	(45.55)

D.3.SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Defisit Laporan
Operasional
(Rp10.974.883.979.686)

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp10.974.883.979.686) dan (Rp2.975.423.809.640)

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah Defisit sebesar (Rp10.975.059.235.306) Nilai tersebut diperoleh dari Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp10.980.690.341.186) ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.806.361.500.

Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional disajikan pada Tabel 414.

Tabel 414 Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Surplus/(Defisit) - Kegiatan Operasional	(10.980.690.341.186)	(2.994.563.844.917)	(7.986.126.496.269)	266,69
Surplus/(Defisit) - Kegiatan Non Operasional	5.806.361.500	19.140.035.277	(13.333.673.777)	(69,66)
Surplus/(Defisit) - LO	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)	(7.999.460.170.046)	268,85

Sedangkan rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per Eselon I disajikan pada Tabel 415.

Tabel 415 Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(329.807.268.050)	(411.253.284.071)	81.446.016.021	(19,80)
Inspektorat Jenderal	(41.737.153.651)	(59.177.706.276)	17.440.552.625	(29,47)
Ditjen Binapenta & PKK	1.900.844.363.465	1.422.254.258.217	478.590.105.248	33,65
Ditjen PHI & Jamsos	(10.558.412.950.694)	(1.379.869.769.514)	(9.178.543.181.180)	665,17
Ditjen Binwasnaker & K3	(111.817.854.929)	(174.112.285.068)	62.294.430.139	(35,78)
Barenbang	(155.809.878.582)	(222.072.789.659)	66.262.911.077	(29,84)
Ditjen Binalavotas	(1.678.143.237.245)	(2.151.192.233.269)	473.048.996.024	(21,99)
Surplus/(Defisit) - LO	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)	(7.999.460.170.046)	268,85

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp12.175.044.618.871

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. adalah masing-masing sebesar Rp12.175.044.618.871 dan Rp13.144.914.312.894 Nilai Ekuitas Awal Tahun 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun 2024 *Audited*.

Rincian Ekuitas Awal per Eselon I sebagai berikut:

Tabel 416 Rincian Ekuitas Awal per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	3.767.013.307.856	3.858.966.077.268	(91.952.769.412)	(2,38)
Inspektorat Jenderal	3.257.352.494	2.484.234.621	773.117.873	31,12
Ditjen Binapenta & PKK	1.102.105.141.974	1.133.205.005.275	(31.099.863.301)	(2,74)
Ditjen PHI & JSK	(1.128.956.484.895)	12.620.955.819	(1.141.577.440.714)	(9.045,09)
Ditjen Binwasnaker & K3	603.196.446.353	558.756.187.904	44.440.258.449	7,95
Barenbang Ketenagakerjaan	48.011.538.003	75.325.409.075	(27.313.871.072)	(36,26)
Ditjen Binalavotas	7.780.417.317.086	7.503.556.442.932	276.860.874.154	3,69
Jumlah	12.175.044.618.871	13.144.914.312.894	(969.869.694.023)	(7,38)

E.2. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus/(Defisit) LO
(Rp10.974.883.979.686)

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Defisit sebesar (Rp10.974.883.979.686) dan (Rp2.975.423.809.640).

Surplus/(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional. kegiatan non operasional. dan kejadian luar biasa. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Rincian Surplus/(Defisit)-LO per Eselon I sebagai berikut:

Tabel 417 Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(329.807.268.050)	(411.253.284.071)	81.446.016.021	(19,80)
Inspektorat Jenderal	(41.737.153.651)	(59.177.706.276)	17.440.552.625	(29,47)
Ditjen Binapenta & PKK	1.900.844.363.465	1.422.254.258.217	478.590.105.248	33,65
Ditjen PHI & JSK	(10.558.412.950.694)	(1.379.869.769.514)	(9.178.543.181.180)	665
Ditjen Binwasnaker & K3	(111.817.854.929)	(174.112.285.068)	62.294.430.139	(35,78)
Barenbang Ketenagakerjaan	(155.809.878.582)	(222.072.789.659)	66.262.911.077	(29,84)
Ditjen Binalavotas	(1.678.143.237.245)	(2.151.192.233.269)	473.048.996.024	(21,99)
Jumlah	(10.974.883.979.686)	(2.975.423.809.640)	(7.999.460.170.046)	268,85

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
(Rp163.440.011.149)

Transaksi koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar (Rp163.440.011.149) dan (Rp1.250.964.807.628).

Rincian koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 418 Rincian koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Koreksi Nilai Persediaan	(90.030)	100.000	(190.030)	(190,03)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(28.449.574.010)	(2.727.156.429)	(25.722.417.581)	943,20
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	110.388.500	(1.154.825.710)	1.265.214.210	(109,56)
Koreksi Lainnya	(135.759.293.492)	(1.248.223.702.359)	1.112.464.408.867	(89,12)
Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Lainnya	658.557.883	1.140.776.870	(482.218.987)	(42,27)
Jumlah	(163.440.011.149)	(1.250.964.807.628)	1.087.524.796.479	(86,93)

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
(Rp90.030)

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp90.030) dan Rp 100.000.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut Eselon I disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 419 Koreksi Nilai Persediaan Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditjen Binapenta & PKK	-	100.000	(100.000)	(100)
Sekretariat Jenderal	1.700.000	-	1.700.000	-
Ditjen Binalavotas	(1.790.030)	-	(1.790.030)	-
Jumlah	(90.030)	100.000	(190.030)	(190)

Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp90.030) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp1.700.000 pada Satker Sekretariat Jenderal yang merupakan kesalahan pencatatan atau perhitungan nilai persediaan, koreksi ini dilakukan pada Biro Hukum dengan jenis persediaannya yaitu barang konsumsi berupa cetak blanko (Kop Garuda), cetakan (amplop kecil dinas), dan cetak map dinas (amplop besar dinas).
2. Terdapat Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp1.790.030) pada Satker Dirjen Binalavotas sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Dari Aset kaca mata safety, Baskom, dan mangkok salad sebesar (Rp97.970).
- b. Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi dari aset mata gergaji sebesar Rp4.000.
- c. Koreksi kuantitas Tambah atas Reklasifikasi dari aset gelas alcohol, mangkok salad, pisau, dan sendok *dessert* sebesar (Rp155.000).
- d. Koreksi Kuantitas Kurang atas Reklasifikasi dari aset berbagai jenis peralatan dapur lainnya sebesar Rp2.039.000.

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp658.557.883

Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN.

Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp658.557.883 dan Rp1.140.776.870.

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut Eselon I disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 420 Koreksi atas Reklasifikasi Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 [Rp]	Kenalkan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	518.628.251	-	518.628.251	-
Dirjen PHI & Jamsos	(1.800.000)	-	(1.800.000)	-
Dirjen Binwasnaker & K3	45.540.000	1.112.352.120	(1.066.812.120)	(95,91)
Dirjen Binalavotas	96.189.632	-	96.189.632	-
Barenbang Ketenagakerjaan	-	28.424.750	(28.424.750)	(100,00)
Jumlah	658.557.883	1.140.776.870	(482.218.987)	(42)

Koreksi atas Reklasifikasi sebesar Rp658.557.883 terdapat pada:

1. Koreksi atas Reklasifikasi terdapat pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp518.628.251 terdiri dari:
 - a. Koreksi atas Reklasifikasi yang berasal dari Satker Politeknik sebesar Rp94.085.393.
 - b. Koreksi atas reklasifikasi yang berasal dari Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp424.542.858.
2. Koreksi atas Reklasifikasi terdapat pada Satker Dirjen Binalavotas sebesar Rp96.189.632 sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI (Rp)
1	026.13.035636	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta	(152.729.730,)
2	026.13.051102	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi	(12.652.091,)
3	026.13.065106	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh	3.024.000,
4	026.13.089378	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang	(5.617.858,)
5	026.13.209255	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari	(1.276.500,)
6	026.13.451026	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	(22.208.915,)
7	026.13.452595	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate	(158.089.430,)
8	026.13.452609	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang	30.345.000,
9	026.13.626131	Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	223.015.892,
JUMLAH			(96.189.632)

a. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta sebesar (Rp152.729.730) yang terdiri:

- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp125.293.430.578) berupa alat rumah tangga lainnya, pakaian siswa, alat peraga pelatihan lainnya, kendaraan, tanah dan bangunan.
- 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp11.422.039.147
- 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp125.293.430.578 berupa alat rumah tangga lainnya, pakaian siswa, alat peraga pelatihan lainnya, kendaraan, tanah dan bangunan.
- 4) Reklasifikasi Keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp11.422.039.147)
- 5) Reklasifikasi Keluar ke Persediaan Alat Dapur Lainnya sebesar Rp1.148.000.
- 6) Akumulasi Penyusutan dari Reklasifikasi Keluar ke Persediaan Alat Dapur Lainnya sebesar (Rp459.200).
- 7) Reklasifikasi dari aset berupa alat peraga pelatihan sebesar (Rp153.418.530).

b. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi sebesar (Rp12.652.730) yang terdiri :

- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp5.640.961.648) berupa sepatu siswa, alat peraga pelatihan lainnya, alat rumah tangga lainnya, gedung dan bangunan.

- 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp702.068.793.
 - 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp125.293.430.578 berupa sepatu safety, peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan.
 - 4) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp709.128.484).
 - 5) Reklasifikasi Dari Aset sebesar (Rp39.240.400) berupa peralatan bengkel lainnya.
 - 6) Reklasifikasi ke Aset Workbench sebesar Rp18.480.000
 - 7) Reklasifikasi Keluar ke Persediaan Peralatan Bengkel Lainnya sebesar Rp18.480.000.
 - 8) Akumulasi penyusutan dari Reklasifikasi Keluar ke Persediaan Peralatan Bengkel Lainnya (Rp18.480.000).
 - 9) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan Peralatan Bengkel Lainnya (Rp18.480.000).
 - 10) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan Peralatan Bengkel Lainnya (Rp18.480.000).
 - 11) Akumulasi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan Peralatan Bengkel Lainnya Rp16.632.000.
- c. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh sebesar Rp3.024.000 yang terdiri dari:
- 8) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp80.020.968.761) berupa peralatan mesin, kendaraan, dan gedung bangunan.
 - 9) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp10.347.044.586.
 - 10) Reklasifikasi keluar sebesar Rp80.023.992.761 berupa peralatan mesin, kendaraan, dan gedung bangunan.
 - 11) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp10.347.044.586).
- d. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang sebesar (Rp5.617.858) yang terdiri:
- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp55.301.074.679) berupa peralatan mesin, kendaraan, dan gedung bangunan.
 - 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp9.797.551.525
 - 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp55.301.074.679 berupa peralatan mesin, kendaraan, dan gedung bangunan.
 - 4) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp9.803.169.383).

e. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Sebesar (Rp1.276.500) yang terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp33.668.643.589) berupa alat peraga lainnya, kendaraan, dan gedung bangunan.
- 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp4.736.502.808.
- 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp33.668.643.589 berupa peralatan mesin, kendaraan, dan gedung bangunan.
- 4) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp4.736.502.808).
- 5) Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap Ekstrakomptabel ke Persediaan berupa Botol sebesar (Rp1.276.500) dengan surat keterangan nomor 2.13/2557/UM.03.02/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.
- 6) Reklasifikasi ke Aset Pompa Vacuum Kolam Renang Portable sebesar Rp11.678.427.
- 7) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan Vacuum Pump sebesar (Rp11.678.427).

f. Ditjen Binalavotas sebesar (Rp22.208.915) terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap Ekstrakomptabel ke Persediaan sebesar Rp22.208.915 dengan surat keterangan nomor 2/4254/UM.03.04/XI/2025 tanggal 28 November 2025.
- 2) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp4.939.339.011) berupa alat peraga lainnya. alat rumah tangga lainnya. peralatan mesin. dan kendaraan.
- 3) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp1.887.552.167.
- 4) Reklasifikasi keluar sebesar Rp4.939.339.011 berupa alat peraga lainnya. alat rumah tangga lainnya. peralatan mesin. dan kendaraan.
- 5) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp1.887.552.167).

g. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate sebesar (Rp158.089.430) yang terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp125.293.430.578) berupa alat peraga lainnya. alat rumah tangga lainnya. pakaian siswa kendaraan. dan gedung bangunan.
- 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp11.422.039.147.
- 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp125.293.430.578 alat peraga lainnya. alat rumah tangga lainnya. pakaian siswa kendaraan. dan gedung bangunan.

- 4) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp11.422.039.147).
 - 5) Reklasifikasi Dari Aset peralatan dan mesin sebesar (Rp153.418.530).
 - 6) Reklasifikasi keluar ke Persediaan Vacuum Pump sebesar Rp 688.800.
- h. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang sebesar Rp30.345.000 yang terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp630.510.834.625) berupa peralatan dan mesin, alat rumah tangga lainnya, bangunan dan gedung, kendaraan, dan alat peraga pelatihan lainnya.
 - 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp23,005,327,752.
 - 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp630.510.834.625 berupa peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, dan kendaraan.
 - 4) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp22.974.982.752).
- i. Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi sebesar Rp223.015.892 yang terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi Masuk sebesar (Rp119.290.666.714) berupa alat rumah tangga lainnya, kendaraan, peralatan mesin, alat peraga pelatihan lainnya, gedung dan bangunan.
 - 2) Reklasifikasi masuk atas penyusutan aset tetap sebesar Rp66.317.758.415.
 - 3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp119.290.666.714 berupa peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, dan kendaraan.
 - 4) Reklasifikasi keluar atas penyusutan aset tetap sebesar (Rp66.094.742.523).

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
(Rp28.339.185.510)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp28.339.185.510) dan (Rp3.881.982.139). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan transaksi yang mengkoreksi aset namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi tetapi terjadi dikarenakan penambahan saldo awal, reklas keluar, reklas masuk, akumulasi penyusutan, transaksi normalisasi aset tetap dan transaksi BMN lainnya yang mempengaruhi aset tetap.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terdiri dari:

Tabel 421 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(28.449.574.010)	(2.727.156.429)	(25.722.417.581)	943,20
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	110.388.500	(1.154.825.710)	1.265.214.210	(109,56)
Jumlah	(28.339.185.510)	(3.881.982.139)	(24.457.203.371)	630,02

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 416.

Tabel 422 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(587.790.957)	1.986.565.862	(2.574.356.819)	(129,59)
Ditjen Binapenta & PKK	943.066.358	234.247.500	708.818.858	302,59
Ditjen PHI & JAMSOS	-	117.656.098	(117.656.098)	(100,00)
Ditjen Binwasnaker & K3	41.319.582	192.155.202	(150.835.620)	(78,50)
Barenbang	35.673.500	(1.079.051.000)	1.114.724.500	(103,31)
Ditjen Binalavotas	(28.771.453.993)	(5.333.555.801)	(23.437.898.192)	439,44
Jumlah	(28.339.185.510)	(3.881.982.139)	(24.457.203.371)	630,02

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp28.449.574.010 terdiri dari:

KODE SATKER	SATKER	JUMLAH (Rp)
026.01.352632	Politeknik Ketenagakerjaan	(195.537.437)
026.01.450938	Sekretariat Jenderal Kemnaker	(471.901.091)
026.01.450990	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	(40.042.834)
026.01.626011	Pusat Pasar Kerja	58.116.405
	SEKRETARIAT JENDERAL KEMNAKER	(649.364.957)
026.04.259322	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	957.985.603
026.04.690633	Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari	(2.732.315)
026.04.690634	Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi	(12.186.930)
	DITJEN BINAPENTA DAN PKK	943.066.358
026.08.350079	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung	(75.883.288)
026.08.350081	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan	20.945.803
026.08.350082	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	16.181.074
026.08.350084	Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta	91.532.569
026.08.651870	Ditjen. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	-
	DITJEN BINWASNAKER DAN K3	41.319.582
026.11.452677	Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan	2.261.000
	BARENANG	2.261.000
026.13.452542	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung	(83.601.140)
026.13.452558	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bekasi	(39.129.967.976)
026.13.452652	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar	(2.643.847.273)
026.13.451094	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Medan	(58.461.559)
026.13.452609	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Semarang	3.723.673.450
026.13.426531	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Serang	324.784.234
026.13.219228	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ambon	38.516.649
026.13.65106	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banda Aceh	(74.084.145)
026.13.21212	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung Barat	(95.687.647)
026.13.191206	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bantaeng	7.197.156
026.13.51102	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banyuwangi	(26.571.173)
026.13.352631	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Belitung	60.401.714
026.13.209255	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari	(5.971.771.815)
026.13.230302	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Lombok Timur	455.572.644
026.13.89378	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Padang	123.874.388
026.13.352630	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Pangkep	616.961
026.13.451108	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Samarinda	(86.437.911)
026.13.50302	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo	185.813.787
026.13.452589	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sorong	(876.508.122)
026.13.35636	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Surakarta	(74.052.649)
026.13.452595	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ternate	(19.221.593)
026.13.626131	Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	16.891.661.927
026.13.626132	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan	(74.746.338)
026.13.451026	Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	(403.531.005)
026.13.452533	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	(980.478.557)
	DITJEN BINALAVOTAS	(28.786.855.993)
	TOTAL	(28.449.574.010)

Penjelasan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp649.364.957) terdapat pada satker:

- 1) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp195.537.437) berasal dari Satker Politeknik Ketenagakerjaan dengan rincian koreksi berasal dari transaksi koreksi nilai asset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
- 2) Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi sebesar (Rp471.901.091) pada Satker Sekretariat Jenderal dengan rincian berasal dari transaksi koreksi nilai asset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai asset tetap non revaluasi merupakan transaksi yang mengkoreksi asset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi. namun terjadi dikarenakan

penambahan saldo awal, reklas keluar, reklas masuk, akumulasi penyusutan, transaksi normalisasi aset tetap dan transaksi BMN lainnya yang mempengaruhi aset tetap.

- 3) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Satker PPSDM Ketenagakerjaan sebesar (Rp40.042.834) yang berasal dari pencatatan perolehan aset.
 - 4) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Satker Pusat Pasar Kerja sebesar Rp58.116.405 merupakan koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari pencatatan perolehan ATB Lainnya sebesar Rp55.461.646 dan koreksi pencatatan Rak Kayu sebesar Rp2.654.759.
- b. Ditjen Binapenta dan PKK sebesar Rp943.066.358 terdapat pada satker:
- 1) Pada BBPKK Bandung Barat, terdapat koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp957.985.603. Nilai ini berasal dari transaksi koreksi non-revaluasi yang mencakup pengembalian pekerjaan konstruksi, kekurangan volume pekerjaan, serta pengadaan peralatan. Koreksi ini didasarkan pada Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai Berkurang BMN serta BAST Nomor: 3.1/1605/UM.03.04/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2) Koreksi pencatatan sebesar (Rp3.246.404.617) merupakan Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - 3) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar (Rp12.187.977) yang merupakan Pengembalian Pekerjaan Konstruksi Renovasi Asrama E BBPKK, Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Pemasangan ATS Genset dan Pengembalian Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Water Heater.
 - 4) Koreksi Perubahan Nilai Berkurang BMN senilai Rp2.437.000 atas Pengembalian Pekerjaan Konstruksi Renovasi Asrama E BBPKK SPM 1253 tahun 2023 a.n PT. Inovasi Multi Kreasi.
 - 5) Koreksi Perubahan Nilai Berkurang BMN senilai Rp6.639.260 atas Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Pemasangan ATS Genset.
 - 6) Koreksi Perubahan Nilai Berkurang BMN senilai Rp10.000.000 atas Pengembalian Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Water Heater SPM 344 a.n CV. Wei Teknologi Indonesia.
 - 7) Koreksi susulan sebesar Rp4.258.282.353 sesuai Surat Keterangan Pencatatan BMN Nomor 3.1/5273/UM.03.02/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 3.1/5274/UM.03.02/XII/2025

tanggal 30 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai
Koreksi Susulan Asrama Permanen	48.547.000
Koreksi Susulan Asrama Permanen	2.602.401.803
Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.449.724.550
Koreksi Susulan Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	157.609.000
Jumlah	4.258.282.353

- 8) Terdapat Reklasifikasi Masuk sebesar Rp41.714.156 sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi Kode BMN Nomor 3.1/5226/UM.03.02/XII/2025 serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 3.1/5227/UM.03.02/XII/2025 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2025 yang merupakan Reklasifikasi Masuk Saluran Drainage dan Alat Rumah Tangga Lainnya.
- 9) Pada BPKK Bekasi sebesar (Rp12.186.930) yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian kodefikasi akun BMN berupa:
 - a) Koreksi reklasifikasi kode BMN berupa 6 unit Air Cleaner dan 1 unit Peralatan Olahraga sesuai Surat Keterangan Kepala BPKK Bekasi Nomor 3.8/100/UM.03.03/II/2025 pada tanggal 05 Februari 2025
 - b) Penghentian aset dari penggunaan A.C. Split sebanyak 50 buah sesuai surat keterangan Kepala BPKK Bekasi Nomor 3.8/300/UM.03.03/V/2025 pada tanggal 21 Mei 2025
 - c) Koreksi reklasifikasi kode barang BMN bangunan air bersih menjadi penampungan air hujan sesuai surat pernyataan nomor 3.8/733/UM.03/X/2025 29 Oktober 2025
 - d) Koreksi pengurangan nilai aset atas pengadaan SmartTV LG 86 Inch sesuai surat pernyataan nomor 3.8/937/KU.06/XII/2025 pada tanggal 22 Desember 2025
- 10) Pada BPKK Kendari sebesar (Rp2.732.315) yang berasal dari koreksi reklas masuk aset tetap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp454.285, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.970 dan koreksi nilai kurang aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.477.000.
- c) Ditjen Binwasnaker dan K3 sebesar Rp41.319.582 terdapat pada:
 - 1) Balai K3 Medan sebesar Rp20.945.803 yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

- 2) Balai K3 Makassar sebesar Rp16.181.074 yang berasal dari koreksi pengurangan nilai gedung kantor Balai K3.
 - 3) Balai K3 Bandung sebesar (Rp75.883.288) yang merupakan koreksi atas temuan Inspektorat Jenderal Kemnaker RI sesuai laporan hasil audit nomor:6/57.A/PW.10.00/IX/2025 tanggal 29 September 2025 yaitu pengakuan biaya perjalanan dinas dan honorarium pengelola teknis sebagai penambah nilai Gedung dan bangunan, berdasarkan temuan tersebut dilakukan pengurangan nilai aset BMN berdasarkan surat no:5.3/253/UM.03.04/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - 4) Balai Besar K3 Jakarta sebesar Rp91.532.569 yang berasal dari selisih nilai penyusutan reklasifikasi aset yang memiliki masa manfaat yang berbeda.
 - 5) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 sebesar (Rp11.456.576) yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
- d. Barenbang sebesar Rp2.261.000 yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
- e. Ditjen Binalavotas sebesar (Rp28.786.855.993) yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan pada aset tetap beserta akumulasi penyusutannya pada satuan kerja Ditjen Binalavotas.
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Sebesar Rp110.388.500 terdiri dari:

KODE SATKER	SATKER	JUMLAH (Rp)
026.01.352632	Politeknik Ketenagakerjaan	61,574,000
026.011.452677	Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan	33,412,500
026.013.50302	Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	15,402,000
TOTAL		110,388,500

Penjelasan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal yang terdapat pada Satker Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp61.574.000
- b. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp33.412.500 yang merupakan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang merupakan perbaikan (koreksi) pencatatan asset berupa Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk BMN yang dikarenakan adanya kesalahan pencatatan klasifikasi kode barang (terlampir) berdasarkan Surat Keterangan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk Barang Milik Negara (BMN) Kuasa Pengguna Barang Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Nomor: 7/2267/UM.03.00/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

NO.	SEMULA			MENJADI			KETERANGAN
	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	
1.	8010101001	1781	Software Komputer	8010101002	845	Lisensi	Navicat Premium V12
2.	8010101001	1782	Software Komputer	8010101002	846	Lisensi	Navicat Premium V12
3.	8010101001	1783	Software Komputer	8010101002	847	Lisensi	Navicat Premium V12

c. Ditjen Binalavotas sebesar Rp15.402.000 yang terdapat pada Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo merupakan Perolehan Lainnya sebanyak 1 Buah Teko Listrik, 2 buah tabung gas, 1 lemari kayu, 1 meja makan kayu, 1 dummy peralatan personal komputer lainnya, 1 buah meja ruang tamu, dan 2 buah grinder berdasarkan surat keterangan nomor 2.21/392/UM.03.00/IV/2025 tanggal 8 April 2025.

E.3.4. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
(Rp135.759.293.492)

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan. Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.

Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp135.759.293.492) dan (Rp1.248.223.702.359)

Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 423.

Tabel 423 Koreksi Lain-Lain Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(226.964.081)	(10.532.738)	(216.431.343)	2.054,84
Inspektorat Jenderal	465.901	40.818	425.083	1.041,41
Ditjen Binapenta dan PKK	(110.112.327.609)	(110.329.251.123)	216.923.514	(0,20)
Ditjen PHI & JSK	93.491.243	(1.140.138.606.517)	1.140.232.097.760	(100,01)
Ditjen Binwasnaker & K3	2.671.200	(2.671.200)	5.342.400	(200,00)
Barenbang	(54.081.000)	83.277.822	(137.358.822)	(164,94)
Ditjen Binalavotas	(25.462.549.146)	2.174.040.579	(27.636.589.725)	(1.271,21)
Jumlah	(135.759.293.492)	(1.248.223.702.359)	1.112.464.408.867	(89,12)

Koreksi Lain-lain sebesar Rp (114.266.192.895) terdiri dari:

Penjelasan Koreksi lain-lain sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp226.964.081) terdapat pada:

a. Satker Sekretariat Jenderal sebesar (Rp157.343.876) sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kelebihan bayar Meubleair Gd Graha Kemnaker PT Alexis Cipta Furniture Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan Program Dukungan Manajemen di Biro Umum TA 2024 sebesar Rp49.772.750.
- 2) Adanya jurnal balik atas jurnal koreksi atas pembebanan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap Josenov Nazareth atas kelalaian menghilangkan kendaraan dinas roda 2 (dua) Honda Supra pada Tahun 2024 yang sudah dibayarkan dengan Nomor

NTPN: FEF487QLV21EMDAE tanggal bayar 14 Januari 2025 senilai Rp7.400.000.

- 3) Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan Program Dukungan Manajemen di Biro Umum TA 2024 atas Pengembalian kelebihan bayar atas Pengembalian kelebihan bayar dari PT Locita Maha Dana renov Guest House Ciloto sebesar Rp16.974.523, PT Sutmarindo Jaya Mandiri renov ruang kerja TU Sekjen sebesar Rp4.953.225, dan PT Dalika Maju Mandiri renov Masjid Gatsu 44 sebesar Rp78.243.378.
- b. Rincian Koreksi Lain-Lain per satker Politeknik Ketenagakerjaan sebesar Rp241.188 dari pengembalian belanja pegawai tahun 2023.
- c. Satker PPSDM sebesar (Rp69.861.393) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jurnal Pencatatan Piutang atas Setoran selisih pengadaan ATK dan supplies senilai Rp54.501.552.
 - 2) Jurnal Balik atas Jurnal Koreksi Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian kemahalan harga paket fullboard meeting tahun 2023 sebesar (Rp200.000).
 - 3) Jurnal Balik atas Jurnal Koreksi Pencatatan Piutang atas setoran kemahalan pembelian harga pupuk tahun 2023 sebesar (Rp22.500.000).
 - 4) Jurnal Balik atas Jurnal Koreksi Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian kekurangan volume pembelian perlengkapan asrama tahun 2023 sebesar (Rp6.000.000).
 - 5) Jurnal Pencatatan Piutang atas Setoran selisih pembayaran Event Organizer Rapat Koordinasi senilai Rp9.450.568.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp465.901 yang merupakan Jurnal balik Piutang atas Setoran Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar (Rp1.200.000), Jurnal balik atas kekurangan gaji pegawai Tahun 2023 yang sudah dibayarkan di bulan Februari 2025 sebesar Rp436.916 dan Jurnal balik atas kekurangan gaji pegawai Tahun 2021 yang sudah dibayarkan di bulan Februari 2025 sebesar Rp1.228.985.
3. Ditjen Binapenta & PKK sebesar (Rp110.112.327.609) terdapat pada:
 - a. Satker Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja sebesar (Rp104.449.378.168) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengembalian Kegiatan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2022 Kelompok Usaha Kecil-Kecilan Kelontong Berkah. Provinsi DKI Jakarta senilai (Rp20.000.000) sesuai dengan NTPN F91AB61QVCSREMBE Tanggal 21 Januari 2025;

- 2) Pengembalian Kegiatan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2022 Kelompok Astama. Sulawesi Selatan senilai (Rp1.000.000) sesuai dengan NTPN F558C1JNG80TDMIF Tanggal 21 Januari 2025;
- 3) Koreksi atas verifikasi Inspektorat Jenderal Bulan Agustus 2025 berdasarkan Nota Dinas 6/1675/PW.06/IX/2025 terkait dengan Nilai atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yang diverifikasi lengkap senilai (Rp25.303.675.071).
- 4) Pengembalian Kegiatan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2023 Kelompok Noer Hijab. Provinsi Jawa Barat senilai (Rp1.545.454) sesuai dengan NTPN 43B2848VVNNU5VHJ Tanggal 15 Januari 2025;
- 5) Pengembalian Kegiatan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2022 Kelompok Fatayat Mart, Provinsi Sumatera Utara senilai (Rp2.000.000) sesuai dengan NTPN C1A23ONA0EC7AAUM tanggal 18 November 2025.
- 6) Pengembalian Kegiatan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2024 A.N Iwan Suryawan, Provinsi Kalimantan Timur senilai (Rp5.000.000) sesuai dengan NTPN 782B37QLV2SP8B1U tanggal 05 November 2025.
- 7) Pengembalian kegiatan bantuan TKM Pemula Tahun 2024 A.N Ardiansyah,, Provinsi Banten senilai (Rp1.500.000) sesuai NTPN AC94B48N3ETHNVTUJ tanggal 21 November 2025.
- 8) Jurnal Balik atas Biaya Dibayar Dimuka sesuai dengan PMK 100 Tahun 2025 atas Bantuan Pemerintah Tahun 2022 Senilai Rp9.435.952.322.
- 9) Jurnal Balik atas Biaya Dibayar Dimuka sesuai dengan PMK 100 Tahun 2025 atas Bantuan Pemerintah Tahun 2023 Senilai Rp12.996.074.084.
- 10) Jurnal Balik atas Biaya Dibayar Dimuka sesuai dengan PMK 100 Tahun 2025 atas Bantuan Pemerintah Tahun 2024 Senilai Rp52.119.423.418.

b. Satker BBPCK Bandung Barat sebesar (Rp5.662.949.441) adalah sebagai berikut:

Akun	NTPN	Uraian	Jumlah
391119	CFA8155DFIPLAJ	Pengembalian temuan uji petik TKM L tahun 2022 an. Sherika Putri Abdela dengan ID TKM 33899	(15.000.000)
391119	4C0283CIFTKJ80VR	Pengembalian Temuan LHP Tahun Anggaran 2022 Samsiar dengan id TKM L 31655	(1.500.000)
391119	42E5D1JNG8I88NUT	Pengembalian Temuan TKML TA 2022 a.n Andi Makmur Burhanuddin, S.E. ID TKML 32832 Kota Makassar	(1.314.000)
391119	DC2CA6U8F80ILJVO	Pengembalian Temuan TKML TA. 2022 a.n Irfan Ilyas ID TKML 32747 Kota Makassar	(300.000)
391119	963D87QLV2JI9B6D	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan	(500.000)
391119	845602G5038AF72B	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan	(500.000)
391119	CC5050NA0E0AI3KN	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan pertama) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	(750.000)
391119	92D5748VOD055U5	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan kedua) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	(750.000)
391119	6D0C63CIFTTLTHVH	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan ketiga) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	(750.000)
391119		Jurnal Pengurangan BBDM Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Ditjen Binapenta dan Pkk TA 2022 S.D 2024 oleh Inspektorat Jenderal Tanggal 29 Agustus 2025 Senilai Rp3.220.987.767	(3.220.987.767)
391119	3955661QVDKUG6SJ	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan (Cicilan ke-3)	(500.000)
391119	ED4D255DFJ5GDR6B	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan keempat) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	(750.000)
391119	9D42B0NA0EC1FMED	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan (Cicilan ke-4)	(500.000)
391119	3FFE155DFJ8D0HUJ	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan kelima) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	(750.000)
391119	AECFD0NA0EFDKNRO	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan keenam) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	(750.000)
391119		Jurnal Koreksi BBDM berdasarkan PMK 100 Tahun 2025 atas Bantuan TKML Tahun 2022 tidak sesuai ketentuan berdasarkan hasil uji petik dilapangan	(666.600.000)
391119		Jurnal Koreksi BBDM berdasarkan PMK 100 Tahun 2025 atas Bantuan TKML Tahun 2023 yang menjadi Objek Uji Petik BPK RI	(68.500.000)
391119		Jurnal Koreksi BBDM berdasarkan PMK 100 Tahun 2025 atas Bantuan TKML Tahun 2024 yang belum Lengkap Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan 31 Desember 2025	(1.671.012.233)
391119		Jurnal koreksi untuk pengakuan atas kekurangan pembayaran beban pegawai berupa kekurangan Gaji PNS Bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2024 untuk 1 pegawai SPM 0051 pada tanggal 20 Februari 2026	(11.235.441)
Jumlah			(5.662.949.441)

4. Satker Ditjen PHI dan Jamsos sebesar Rp93.491.243 dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp27.417 berupa Jurnal Balik Penyisihan piutang pengembalian perjalanan dinas luar kota atas hasil audit kepatuhan Program pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 nomor: R-6/75/PW.10.00/1/2025 tgl 10 Jan 2025 Dit. PPHI. Dit. HKP dan Dit. Jamsos.
- Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp70.714 berupa Jurnal Balik Penyisihan Pengembalian perjalanan dinas biasa atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 nomor: R-6/75/PW.10.00/1/2025 tgl 10 Jan 2025 Dit. Jamsos. Dit. KPPHI. Dit. BMHI dan Setditjen.
- Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp227.618 berupa Jurnal Balik Penyisihan Pengembalian belanja jasa lainnya atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan

Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 nomor: R-6/75/PW.10.00/1/2025
tgl 10 Jan 2025 Dit. BMHI.

- d. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp46.200 berupa Jurnal Balik Penyisihan piutang Pengembalian belanja jasa profesi atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 nomor: R-6/75/PW.10.00/1/2025 tgl 10 Jan 2025 Dit. PPHI. Dit. HKP dan Dit. Jamsos.
- e. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp118.263 berupa Jurnal Balik Penyisihan piutang Pengembalian belanja bahan atas hasil audit kepatuhan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TA 2024 nomor: R-6/75/PW.10.00/1/2025 tgl 10 Jan 2025 Dit. BMHI dan Dit. HKP.
- f. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp115.077 berupa Jurnal balik Penyisihan piutang Pengembalian atas Laporan Hasil Verifikasi atas Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pertanggungjawaban Beban Perjadi di Ditjen PHI Tahun 2020 Nomor R-6/03/PW.06/IX/2024 tanggal 24/9/24 Dit Syaker.
- g. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp21.915 berupa Jurnal Balik atas Penyisihan piutang dari pengembalian belanja perjadi biasa kegiatan dialog dan edukasi Faskes di Aceh dan Dialog pembentukan arbitrase HI dan Konsiliasi HI dan Jawa Barat.
- h. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp889.735 berupa Jurnal balik atas Penyisihan piutang dari pengembalian belanja SIM P3HI. pekerjaan publikasi. LHP R-6/182 dan 104B/LHP.
- i. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp17.000.000 berupa Jurnal Balik Saldo dana pengembalian BSU pada RPL 182 DBDIT PHIJSTK UTK PENGEMBALIAN BSU 2021 BNI No.1448275583.
- j. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp7.000.000. berupa Jurnal Balik Saldo dana pengembalian BSU pada RPL 182 DBDIT PHIJSTK UTK PENGEMBALIAN BSU 2021 MDR No.0700010572241.
- k. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp20.600.000. berupa Jurnal Balik Saldo dana pengembalian BSU pada RPL 182 DBDIT PHIJSTK UTK PENGEMBALIAN BSU 2021 BRI No.223301000180302.
- l. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp4. berupa Jurnal Balik Setoran jasa giro pada RPL 182 PS PHIJSTK U PGMBL BSU 22 BSI No.7218898739.

- m. Terdapat koreksi lainnya sebesar Rp47.374.300 Tindak Lanjut Laporan Hasil Verifikasi Itjen No R-6/03/PW.06/IX/2024 tgl 24/09/2024 atas LHP BPK-RI No104B/LHP/XVI/05/2021 terkait Belanja Perjadin di Ditjen PHIJSK T.A 2020 – perjadin 2020.
5. Ditjen Binwasnaker sebesar Rp2.671.200 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan Gaji bulan April – Desember 2022 untuk 1 pegawai sesuai SP2D Nomor 251231302000644 pada tanggal 19 Februari 2025 sebesar Rp. 1.099.800 dan Rp. 45.000.
 - b. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Januari – Desember 2023 untuk 1 (satu) pegawai sesuai SP2D Nomor 251231302000645 pada tanggal 19 Februari 2025 sebesar Rp 60.000 dan Rp. 1.466.400.
6. Barenbang Ketenagakerjaan sebesar (Rp54.081.000) dengan rincian sebagai berikut
- a. Koreksi Lainnya sebesar Rp31.000.000 berupa Jurnal Balik Pencatatan Piutang atas Setoran Pengembalian atas TLHP BPK tahun 2021 sesuai LHP No: 67.B/LHP/XVI/05/2022 (Jasa Konsultan Pusbangjak) sebesar Rp31.000.000.
 - b. Jurnal Balik Piutang atas Setoran Pengembalian Hasil Verifikasi Itjen R 6/04/PW.06/IX/2024 atas tindak lanjut temuan BPK terkait DPR Tahun 2020 sebesar Rp50.818.000.
 - c. Jurnal Manual Piutang atas Setoran Pengembalian Hasil Verifikasi Itjen R6/04/PW.06/IX/2024 atas tindak lanjut temuan BPK terkait DPR Tahun 2020 sebesar Rp(8.899.000).
 - d. Jurnal Manual Piutang atas Setoran Pengembalian Hasil Verifikasi Itjen R6/04/PW.06/IX/2024 atas tindak lanjut temuan BPK terkait DPR Tahun 2020 sebesar Rp(18.838.000).
7. Ditjen Binalavotas sebesar (Rp25.462.549.146) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koreksi Lainnya pada satker BPVP Banyuwangi sebesar (Rp16.941.689.252) merupakan koreksi atas Grand Total Professional Training of Teachers & Grand Total Training on Usage of e-Education Components sebesar (Rp3.446.375.264) dan koreksi atas Grand Total Technical Assistance sebesar (Rp13.495.313.988)
 - b. Koreksi Lainnya pada Satker BPVP Aceh sebesar Rp2.379.999 merupakan koreksi kesalahan input tagihan honorarium tenaga peneliti kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik pengembangan workshop TIK, tidak terdapat SP2D, dan tidak terdapat kewajiban terhadap pihak ketiga.

- c. Koreksi Lainnya pada Satker BPVP Padang sebesar Rp1.523.511.764 merupakan Jurnal Balik Pembangunan kantor tahun 2023.
- d. Koreksi Lainnya pada Satker BBPVP Serang sebesar Rp472.241.863 merupakan koreksi lainnya yang berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang Pemeliharaan ke dalam nilai asrama permanen, jalan khusus dan bangunan tempat parkir.
- e. Koreksi Lainnya pada Satker Ditjen. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebesar (Rp493.237.000) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Koreksi Lainnya sebesar (Rp513.656.000) terbentuk karena Koreksi Jurnal Balik RPATA karena tidak terbentuknya akun ekstrakomtabel peralatan dan mesin karena pendetilan perolehan aset lainnya ekstrakomtabel.
 - 2) Koreksi Lainnya sebesar Rp550.112.650 terbentuk karena Koreksi Pencatatan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan menjadi Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu yang Belum Disahkan.
 - 3) Koreksi Lainnya Sebesar (550.112.650) yang merupakan Jurnal Balik kesalahan jurnal manual untuk menghilangkan Hibah yang Belum Disahkan.
 - 4) Koreksi Lainnya sebesar Rp20.419.000 terbentuk oleh Jurnal Koreksi Penyesuaian untuk Hibah Langsung dari PT. Panasonic Gobel Indonesia yang belum disahkan yang terjadi pencatatan ganda akibat pendetilan yang di detilkan tidak sesuai BAST yang sudah dikoreksi pencatatan asetnya tetapi menyisakan akun 218211.
- f. Koreksi Lainnya pada Satker BPVP Samarinda sebesar Rp1.677.480 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Koreksi Lainnya sebesar Rp1.458.250 merupakan koreksi atas akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang terbentuk dari Reklasifikasi Perolehan Lainnya ke persediaan sesuai Surat Tanggapan Tindak Lanjut Temuan BPK atas Audit Kinerja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat nomor 2.11/UM.03.04/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
 - 2) Koreksi Lainnya sebesar Rp219.230 merupakan Jurnal Eliminasi atas saldo penyisihan piutang.
- g. Koreksi Lainnya pada Satker Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi sebesar (Rp10.027.434.000) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi Lainnya sebesar (Rp507.500.000) Jurnal Koreksi pengakuan atas pembayaran RPATA kepada PT. Zhafira Karya Sukses dengan BAST nomor BA.02/KP/E-CAT/PPK.1/I/2025 tanggal 3 Jan 2025.
- 2) Koreksi Lainnya sebesar (Rp265.820.000) Jurnal Koreksi pengakuan atas pembayaran RPATA kepada PT. Lancar Berlian Berkah dengan BAST nomor BA.11/KP/E-CAT/PPK.1/I/2025 tanggal 6 Jan 2025.
- 3) Koreksi Lainnya sebesar (Rp340.375.000) Jurnal Koreksi pengakuan atas pembayaran RPATA kepada PT. Daya Sakti Perkasa dengan BAST nomor BA.14/KP/E-CAT/PPK.1/I/2025 tanggal 7 Jan 2025.
- 4) Koreksi Lainnya sebesar (Rp554.003.000) Jurnal Koreksi pengakuan atas pembayaran RPATA kepada PT. Batara Cemerlang Indonesia dengan BAST nomor BA.38/KP/E-CAT/PPK.1/I/2025 tanggal 13 Jan 2025.
- 5) Koreksi Lainnya sebesar (Rp4.019.109.000) Jurnal Koreksi pengakuan atas pembayaran RPATA kepada PT. Karya Pendidikan Bangsa dengan BAST nomor BA.14.a/KP/E-CAT/PPK.1/I/2025 tanggal 7 Jan 2025.
- 6) Koreksi Lainnya sebesar (Rp3.589.627.000) Jurnal Koreksi pengakuan atas pembayaran RPATA kepada PT. Batara Cemerlang Indoensia dengan BAST nomor BA.47/KP/E-CAT/PPK.1/I/2025 tanggal 30 Jan 2025.
- 7) Koreksi Lainnya sebesar (Rp500.000.000) merupakan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Kemnaker Tahun Anggaran 2023 terkait Bantuan Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
- 8) Koreksi Lainnya sebesar (Rp251.000.000) merupakan koreksi akun Belanja Dibayar Dimuka sesuai ketentuan PMK nomor 100 tahun 2025.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp10.374.137.285.677

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi antar entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lain (Diterima Dari Entitas Lain. Ditagihkan ke Entitas Lain. Transfer Masuk dan Transfer Keluar. dan Pengesahan Hibah Langsung) serta antar unit dalam Entitas Pelaporan itu sendiri (Transfer Masuk dan Transfer Keluar).

Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.374.137.285.677 dan Rp3.256.518.923.245.

Rincian Transaksi Antar Entitas disajikan pada Tabel 424.

Tabel 424 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.606.922.064.453	5.500.436.965.043	7.106.485.099.410	129,20
Diterima dari Entitas Lain	(2.236.638.369.173)	(2.257.426.143.716)	20.787.774.543	(0,92)
Transfer Keluar	(74.344.613.129)	(196.378.345.351)	122.033.732.222	(62,14)
Transfer Masuk	74.344.613.129	196.378.345.351	(122.033.732.222)	(62,14)
Pengesahan Hibah Langsung	484.913.747,00	9.472.294.110,00	(8.987.380.363,00)	(94,88)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.368.676.650,	4.035.807.808	(667.131.158,00)	(16,53)
Jumlah	10.374.137.285.677	3.256.518.923.245	7.117.618.362.432	2,19

Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Eselon 1 disajikan pada Tabel 425.

Tabel 425 Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	288.756.050.255,	317.324.481.535	(28.568.431.280)	(9,00)
Inspektorat Jenderal	40.649.994.760,	59.950.783.331	(19.300.788.571)	(32,19)
Ditjen Binapenta & PKK	(1.911.922.610.449)	(1.343.259.217.895)	(568.663.392.554)	42,33
Ditjen PHI & JSK	10.554.955.529.226,	1.378.313.279.219	9.176.642.250.007	665,79
Ditjen Binwasnaker & K3	82.264.787.899,	217.250.707.395	(134.985.919.496)	(62,13)
Barenbang	126.331.294.633,	195.726.267.015	(69.394.972.382)	(35,46)
Ditjen Binalavotas	1.193.102.239.353,	2.431.212.622.645	(1.238.110.383.292)	(50,93)
Jumlah	10.374.137.285.677	3.256.518.923.245	7.117.618.362.432	218,57

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kemnaker yang melibatkan kas negara pada Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp2.236.638.369.173) sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp12.606.922.064.453.

Rincian Diterima dari Entitas Lain Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 426.

Tabel 426 Diterima dari Entitas Lain Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(6.276.268.470)	(7.543.624.820)	1.267.356.350	(16,80)
Inspektorat Jenderal	(1.868.133)	(150.953.085)	149.084.952	(98,76)
Ditjen Binapenta & PKK	(2.117.472.390.444)	(2.116.360.431.757)	(1.111.958.687)	0,05
Ditjen PHI & JSK	(850.491.164)	(1.075.092.027)	224.600.863	(20,89)
Ditjen Binwasnaker & K3	(98.734.647.679)	(110.582.611.799)	11.847.964.120	(10,71)
Barenbang	(800.128.992)	(1.810.774.214)	1.010.645.222	(55,81)
Ditjen Binalavotas	(12.502.574.291)	(19.902.656.014)	7.400.081.723	(37,18)
Jumlah	(2.236.638.369.173)	(2.257.426.143.716)	20.787.774.543	(0,92)

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain Menurut Eselon I disajikan pada Tabel 427.

Tabel 427 Ditagihkan ke Entitas Lain Menurut Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	303.446.364.987	430.003.573.345	(126.557.208.358)	(29,43)
Inspektorat Jenderal	40.651.862.893	60.101.736.416	(19.449.873.523)	(32,36)
Ditjen Binapenta & PKK	205.549.779.995	775.635.579.915	(570.085.799.920)	(73,50)
Ditjen PHI & JSK	10.555.806.020.390	1.381.057.251.534	9.174.748.768.856	664,33
Ditjen Binwasnaker & K3	180.381.299.078	329.903.484.953	(149.522.185.875)	(45,32)
Barenbang Ketenagakerjaan	129.424.599.983	197.085.986.479	(67.661.386.496)	(34,33)
Ditjen Binalavotas	1.191.662.137.127	2.326.649.352.401	(1.134.987.215.274)	(48,78)
Jumlah	12.606.922.064.453	5.500.436.965.043	7.106.485.099.410	129,20

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL. dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar dan Transfer Masuk per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp74.344.613.129 dan Rp (74.344.613.129).

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Menurut Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 428 Transfer Keluar dan Transfer Masuk Menurut Unit Eselon I

Unit Eselon I	Transfer Keluar (Rp)	Transfer Masuk (Rp)	Selisih (Rp)
Sekretariat Jenderal	11.075.528.870	(11.075.528.870)	-
Ditjen Binapenta & PKK	1.322.091.180	(1.322.091.180)	-
Ditjen. PHI & Jamsos	-	-	-
Ditjen Binwasnaker & K3	176.939.360	(176.939.360)	-
Barenbang Ketenagakerjaan	2.293.176.358	(2.293.176.358)	-
Ditjen Binalavotas	59.476.877.361	(59.476.877.361)	-
Jumlah	74.344.613.129	(74.344.613.129)	-

Sedangkan Transfer Keluar dan Transfer Masuk Menurut Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 429 Transfer Keluar dan Transfer Masuk Menurut Satker

KODE ES 1	NAMA SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENERIMA	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK
02601	SEKRETARIAT JENDERAL KEMNAKER	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	(368.306.250)	368.306.250
		Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	(618.136.500)	618.136.500
		Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	(10.089.086.120)	10.089.086.120
02601 Total			(11.075.528.870)	11.075.528.870
02604	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	(833.296.150)	833296150
	Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	(358.966.460)	358966460
	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi	(129.828.570)	129828570
02604 Total			(1.322.091.180)	1.322.091.180
02605	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Sekretariat Jenderal Kemnaker	0	0
02605 Total			0	0

KODE ES 1	NAMA SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENERIMA	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK
02613	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Padang	-	-
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo	-	-
	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bekasi	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung	-	-
	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ambon	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sorong	60.733.585	60.733.585
	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung	-	-
	Dinas Nakertrans Provinsi Maluku	Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	37.350.000	37.350.000
	Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
		Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
		Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
		Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
		Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
		Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung	3.900.045.148	3.900.045.148
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bekasi	788.940.491	788.940.491
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar	4.160.403.445	4.160.403.445
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Medan	1.576.770.000	1.576.770.000
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Semarang	179.619.999	179.619.999
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ambon	638.300.840	638.300.840
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banda Aceh	638.300.840	638.300.840
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bantaeng	694.400.840	694.400.840
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Belitung	2.950.849.172	2.950.849.172
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari	2.471.428.570	2.471.428.570
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Lombok Timur	638.300.840	638.300.840
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Padang	3.572.217.522	3.572.217.522
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Pangkep	260.300.840	260.300.840
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Samarinda	4.324.762.228	4.324.762.228
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo	5.683.537.359	5.683.537.359
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sorong	9.953.337.038	9.953.337.038
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Surakarta	2.093.158.620	2.093.158.620
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ternate	1.456.858.698	1.456.858.698
		Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan	413.660.000	413.660.000
	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	516.577.518	516.577.518
	BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BANDUNG	Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan	-	-
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung	699.351.477	699.351.477
	BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BEKASI	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bekasi	816.929.950	816.929.950
	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar	954.832.523	954.832.523

KODE ES 1	NAMA SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENERIMA	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK
	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar	- 954.832.523	954.832.523
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Medan	- 1.240.012.655	1.240.012.655
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Semarang	- 379.394.030	379.394.030
		Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Serang	- 383.296.512	383.296.512
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ambon	- 85.605.000	85.605.000
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banda Aceh	- 152.660.000	152.660.000
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung Barat	- 559.286.316	559.286.316
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bantaeng	- 351.350.507	351.350.507
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banyuwangi	- 75.250.000	75.250.000
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Belitung	- 82.450.000	82.450.000
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari	- 255.203.000	255.203.000
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Lombok Timur	- 392.785.098	392.785.098
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Padang	- 1.543.850.360	1.543.850.360
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Pangkep	- 221.212.047	221.212.047
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Samarinda	- 260.837.970	260.837.970
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo	- 1.092.672.800	1.092.672.800
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sorong	- 553.758.984	553.758.984
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Surakarta	- 1.059.629.278	1.059.629.278
		Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Ternate	- 502.101.038	502.101.038
		Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	- 189.334.324	189.334.324
		Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan	- 20.061.900	20.061.900
		Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	- 569.274.999	569.274.999
	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Ditjen. Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas	-	-
02613	TOTAL		(59.476.877.361)	59.476.877.361
		TOTAL	(74.344.613.129)	74.344.613.129

Pengesahan Hibah
Langsung dan

Pengesahan Hibah
Langsung TAYL

Rp484.913.747 dan

Rp3.368.676.650

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp484.913.747 dan Rp3.368.676.650

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 430 Pengesahan Hibah Langsung dan
Pengesahan Hibah Langsung TAYL Menurut Unit Eselon I

Unit Eselon I	Pengesahan Hibah Langsung	Pengesahan Hibah Langsung TAYL
Ditjen Binalavotas	484.913.747	3.368.676.650
TOTAL	484.913.747	3.368.676.650

Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Binalavotas sebesar Rp484.913.747 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat Hibah Langsung pada Satker Ditjen Binalavotas sebesar Rp454.513.747 merupakan:
 - 1) Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dengan nominal sebesar RP266.726.700 dengan nomor surat keterangan 72049723C00001 tanggal 21 Mei 2025
 - 2) Hibah Masuk sebanyak 12740 m² Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan berupa Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan nominal sebesar Rp187.787.047 dengan nomor surat keterangan S9375/WPB.12/2025 tanggal 24 Desember 2025
- b. Terdapat Hibah Langsung pada Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh sebesar Rp30.400.000 yang merupakan Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk barang TA 2025 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor PA.02.12.2020 pada Tanggal 2/12/2020.

Saldo Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu pada 31 Desember 2025 sebesar Rp3.368.676.650 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hibah yang terdapat pada Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp1.460.250.000
- b. Hibah yang terdapat pada Satker Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dengan nilai sebesar Rp1.908.426.650

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp11.410.857.913.713

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.410.857.913.713 dan Rp12.175.044.618.871.

Rincian Nilai Ekuitas per Eselon I disajikan pada Tabel 431.

Tabel 431 Rincian Nilai Ekuitas per Eselon I
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Unit Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	3.725.667.663.274	3.767.013.307.856	(41.345.644.582)	(1,10)
Inspektorat Jenderal	2.170.659.504	3.257.352.494	(1.086.692.990)	(33,36)
Ditjen Binapenta & PKK	981.857.633.739	1.102.105.141.974	(120.247.508.235)	(10,91)
Ditjen PHl & JSK	(1.132.322.215.120)	(1.128.956.484.895)	(3.365.730.225)	0,30
Ditjen Binwasnaker & K3	573.732.910.105	603.196.446.353	(29.463.536.248)	(4,88)
Barenbang	18.514.546.554	48.011.538.003	(29.496.991.449)	(61,44)
Ditjen Binalavotas	7.241.236.715.657	7.780.417.317.086	(539.180.601.429)	(6,93)
Jumlah	11.410.857.913.713	12.175.044.618.871	(764.186.705.158)	(6,28)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Rekening Pemerintah

*Rekening
Pemerintah*

Rekening pemerintah yang aktif di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 terlampir, terdiri dari:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 47 rekening.
2. Rekening Bendahara Penerima sebanyak 1 (satu) rekening.
3. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 153 rekening.
4. Rekening Pengeluaran Lainnya sebanyak 45 Rekening terdiri dari:
 - a. Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 1 Rekening;
 - b. Ditjen PHI dan Jamsos sebanyak 25 Rekening;
 - c. Ditjen Binwasnaker dan K3 sebanyak 5 Rekening;
 - d. Ditjen Binalavotas sebanyak 14 Rekening.

F.2. Pengungkapan Capaian Ouput Per Fungsi

*Pengungkapan
Capaian Output Per
Fungsi*

Rincian pada Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing Fungsi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Ekonomi

Pelaksanaannya di antaranya untuk pengembangan BPVP, Bantuan sarana pelatihan baik pada BLKK maupun LPKS, Pengembangan Kompetensi, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Mandiri, Padat Karya, Layanan Perijinan TKA, Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengujian K3 dengan pagu mencapai Rp14.347.482.970.000 dan realisasi sebesar Rp11.932.630.147.313 atau 83,17% dengan rincian terlampir (Lampiran Monitoring Capaian Output Berdasarkan Fungsi).

2. Fungsi Pendidikan

Pelaksanaannya di antaranya untuk pembinaan LSP, sertifikasi instruktur dan tenaga pelatihan, bantuan program PBK, Peningkatan dan Pengembangan SDM, Pengembangan Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Industri dengan pagu mencapai Rp890.539.293.000 dan realisasi sebesar Rp671.350.389.712 atau 75,39% dengan rincian terlampir (Lampiran Monitoring Capaian Output Berdasarkan Fungsi).

F.3. Pengungkapan Capaian Program Prioritas Nasional

*Pengungkapan
Capaian Prioritas*

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024

Nasional

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Ketenagakerjaan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional II (*Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*), Prioritas Nasional III (*Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi*), Prioritas Nasional IV (*Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas*), dan Prioritas Nasional VI (*Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*) dari 8 (delapan) Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian pada Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. **PN II: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.**

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 2 kegiatan prioritas, yang tersebar di 2 Satuan kerja dengan pagu mencapai Rp367.210.000 dan realisasi sebesar Rp168.101.687 atau 45,78% dengan rincian terlampir.

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	KODE KEGIATAN	PAGU BELANJA	REALISASI	Persen (%)	TARGET VOLUME	SATUAN	REALISASI VOLUME
626011	PUSAT PASAR KERJA	DN	QMA	001	Informasi Pasar Kerja Pekerjaan Hijau	6618	288,910,000	90,245,000	31.24	1	Dokumen	1
451139	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DN	QMA	001	Dokumen Kamus Jabatan Seri Greenjobs	2173	78,300,000	77,856,687	99.43	1	Dokumen	1
02-2025 Total							367,210,000	168,101,687				

Penjelasan:

a. Satker Pusat Pasar Kerja

Pelaksanaannya di antaranya melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja, yang tersebar di Pusat Pasar Kerja dengan pagu mencapai Rp288.910.000 dan realisasi sebesar Rp90.245.000.

b. Satker Ditjen Binapenta dan PKK

Pelaksanaannya di antaranya melalui Dokumen Kamus Jabatan Seri Green Jobs, yang berada di Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja (PTK) dengan pagu mencapai Rp78.300.000 dan realisasi sebesar Rp77.856.687.

2. PN III: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 2 (dua) Satuan kerja dengan pagu mencapai Rp68.812.260.000 dan realisasi sebesar Rp67.296.263.274 atau 97,80% dengan rincian terlampir.

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	KODE KEGIATAN	PAGU BELANJA	REALISA SI	PERSEN (%)	TARGET VOLUME	SATUAN	REALISASI VOLUME
259322	BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DN	QDC	001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan	2175	7.937.260.000	7.639.080.346	96,24	1000	Orang	1000
			QEA	003	Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan	2175	15.000.000.000	14.992.500.000	99,95	1000	Orang	1000
626041	DIREKTORAT BINA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DN	QEA	001	Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula	2175	28.375.000.000	27.694.672.928	97,60	6500	Orang	5614
				002	Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tematik (Kemiskinan Ekstrem)	2175	17.500.000.000	16.970.000.000	96,97	3500	Orang	3394
03-2025 Total							68.812.260.000	67.296.263.274	97,80			

Penjelasan:

a. BBPKK Bandung Barat

Program PN pada BBPKK Bandung Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan prioritas, antara lain:

(1) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat TKM Lanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembinaan TKM Lanjutan yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan, pendampingan, dan pemberian bantuan kepada peserta program. TKM adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya maupun masyarakat melalui.

Kegiatan kewirausahaan. Sebelum ditetapkan sebagai peserta pembekalan TKM Lanjutan, melalui serangkaian proses seleksi yang dimulai dari pendaftaran. Calon penerima bantuan melakukan pendaftaran TKM Lanjutan TA 2025 melalui laman bizhub.kemnaker.go.id dan kemudian dilakukan proses seleksi calon TKM Lanjutan. Tahapan seleksi calon TKM Lanjutan,

terdiri dari: Seleksi Administrasi, Seleksi Substansi dan Seleksi Wawancara.

Penerima manfaat dari Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan adalah masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan kegiatan perluasan kesempatan kerja (TKM Pemula) pada tahun sebelumnya serta telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi, pembekalan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan TKM lanjutan.

(2) Bantuan TKM Lanjutan

Bantuan masyarakat dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada peserta TKM Lanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan dan pengembangan usaha para penerima bantuan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja. Untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan kegiatan tenaga kerja yang mendapat bantuan untuk menjadi TKM Lanjutan yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- i. Tahap rekrutmen: calon penerima bantuan melakukan pendaftaran secara daring melalui laman Bizhub yang ada di platform SIAPkerja;
- ii. Tahap seleksi: calon penerima bantuan telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah disampaikan sebelumnya;
- iii. Tahap pembekalan: setelah penerima bantuan diumumkan di laman bizhub selanjutnya adalah kegiatan pembekalan selama 4 (empat) hari yang dilaksanakan oleh BBPKK Bandung Barat dengan durasi materi yang diberikan kepada peserta sejumlah 32 jam pelajaran;
- iv. Tahap pencairan: setelah peserta dinyatakan lulus pembekalan kemudian akan dilakukan proses pencairan dana bantuan kepada penerima. Proses ini terdiri dari proses validasi data dan pengecekan ulang dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh calon penerima bantuan. Nilai bantuan yang diberikan maksimal sebesar Rp15.000.000 per orang.

Penerima dana bantuan TKM Lanjutan ditetapkan oleh PPK Balai Besar melalui Surat Keputusan Penetapan yang disahkan oleh KPA Balai Besar. Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang yang akan ditransfer ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan oleh penerima. Dana bantuan diberikan melalui transfer ke rekening pribadi penerima dalam satu tahap (100%). Pengalokasian dana Bantuan TKM Lanjutan digunakan untuk pembelian peralatan usaha, pembelian bahan usaha, biaya produksi dan pemasaran.

- b. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula merupakan program bantuan pemerintah berupa modal usaha sebesar Rp5.000.000 per orang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mandiri yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Tujuan dari program TKM Pemula ini adalah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan menumbuhkan usaha kecil menuju UMKM. Tata cara pelaksanaan program TKM Pemula ini dilaksanakan melalui Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/168/PK.03.03/VIII/2025 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan tenaga kerja mandiri pemula Tahun 2025.

Program TKM Pemula dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dengan proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara online melalui aplikasi SiapKerja dan Bizhub. Adapun tahapan – tahapan pelaksanaan program TKM Pemula adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi melalui SiapKerja, Bizhub, dan media sosial.
2. Pendaftaran calon penerima secara online.
3. Verifikasi dan wawancara oleh tim untuk menilai kelayakan usaha.
4. Penetapan penerima bantuan melalui SK resmi.
5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK dan penerima.
6. Penyaluran dana melalui Bank Penyalur ke rekening penerima.
7. Penggunaan dana untuk pembelian alat atau bahan usaha.
8. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat 31 Desember 2025 melalui Bizhub.

Jenis usaha yang dapat didanai mencakup:

1. Pertanian, peternakan, perikanan,
2. Perdagangan barang dan jasa,
3. Jasa boga, industri kreatif,
4. Jasa perorangan (bengkel, pangkas rambut, dsb).

Pelaksanaan atas Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula per 30 September 2025 belum diadakan realisasi atas penyaluran bantuan karena masih ada blokir anggaran. Realisasi penyaluran bantuan untuk program Tenaga Kerja Mandiri Pemula rencana akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 karena sudah dilaksanakan proses wawancara untuk calon penerima bantuan dan sedang dalam proses penerbitan SK (Surat Keputusan) Penerima Bantuan.

Kendala yang dialami selama berjalannya program adalah banyaknya jumlah pendaftar TKMP yang membuat proses verifikasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jumlah personil untuk verifikasi kurang. Upaya yang dijalankan dalam mengatasi hal tersebut adalah meminta bantuan untuk penambahan personil di Direktorat/Unit Kerja lain untuk membantu melakukan verifikasi Calon Penerima Bantuan TKM dengan

KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	PAGU BELANJA	BELANJA NETTO	PERSEN (%)	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN
001	Bekas mendasi Kabupaten terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketenagakerjaan	Bekas mendasi kebijakan	2.574.065.000	1.953.500.125	72,01	1	1	100
001	Layanan Pengujian K3 pada Sams, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	Badan usaha	475.881.000	165.464.000	34,77	100	100	100
			475.881.000	165.464.000	34,77	100	100	100
			2.715.575.000	1.635.985.593	24,60	635	635	100
			2.810.065.000	770.773.446	27,43	640	640	100
			3.335.270.000	1.069.075.458	32,05	700	700	100
			1.054.398.000	1.053.445.478	99,91	735	735	100
001	Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) Satuan kerja dengan pagu mencapai Rp83.013.062.000 dan realisasi sebesar Rp42.439.797.120 atau 51,12% dengan rincian terlampir.	Orang	346.590.800	346.253.186	91,25	1000	1080	100
			09.714.025.000	4.607.741.493	10,74	1000	2300	100
	Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	Orang	8.388.000.000	5.748.805.451	68,54	2000	2040	100
002	Facilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita Rentan	Orang	225.520.000	211.322.335	93,70	100	100	100
003	Facilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia Produktif	Orang	383.487.000	376.322.113	98,13	100	100	100
004	Facilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Rentan	Orang	407.255.000	386.700.572	94,95	100	100	100
001	Pembinaan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pembuatan Peraturan Perusahaan	Badan usaha	3.360.000.000	1.631.798.032	48,57	1200	1447	100
002	Facilitasi Sertifikasi SMK3 bagi Perusahaan	Badan usaha	713.540.000	713.335.880	99,97	1600	1600	100
	Pembinaan Penyusunan Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi Perusahaan	Badan usaha	6.500.000.000	2.394.030.625	36,83	1560	1966	100
001	Layanan pelaporan keadaan ketenagakerjaan pada WLPK Online bagi Perusahaan	Badan usaha	1.122.572.000	1.087.131.580	96,84	448090	448090	100
	Layanan pembinaan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum ketenagakerjaan bagi Perusahaan	Badan usaha	11.976.105.000	11.043.159.509	92,21	7700	7700	100
	Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan di Provinsi	Badan usaha	157.620.000	-	-	107	0	0
			280.697.000	-	-	123	0	100
			333.567.000	-	-	130	0	1
			198.542.000	-	-	130	130	100
			168.936.000	-	-	133	0	0
			228.440.000	-	-	140	0	0
			366.426.000	-	-	159	0	0
			191.260.000	-	-	173	0	0.1
			288.055.000	-	-	175	0	0.04
			195.688.000	-	-	176	0	0
			190.687.000	-	-	179	179	100
			270.061.000	-	-	181	0	4.7
			236.405.000	-	-	181	181	100
			264.831.000	-	-	182	0	1.22
			231.756.000	-	-	185	185	100
			272.651.000	-	-	189	189	100
			311.866.000	-	-	204	0	7
			225.044.000	-	-	216	216	100
			495.858.000	-	-	374	3740	100
			722.026.000	-	-	398	398	100
			695.103.000	-	-	510	0	0
			726.750.000	-	-	529	0	12
			982.830.000	-	-	565	0	0
			214.572.000	-	-	62	62	100
			151.823.000	-	-	76	0	0
002	Dokumen Analisis Pasar Kerja	Dokumen	228.549.000	224.712.936	98,32	1	1	100
006	Tenaga Pelatihan BLK Komunitas Baru yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	937.090.000	931.602.753	99,41	288	288	100
001	Pelatihan dalam Peningkatan Kapasitas Mediator Hubungan Industrial	Orang	19.496.790.000	6.233.042.473	31,97	2090	1800	90.43
04-2025 Total			83.013.062.000	42.439.797.120	51,12			

Penjelasan:

a. Sekretariat Jenderal

Pelaksanaannya diantaranya melalui Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan di Provinsi yang tersebar di 25 Satker Penerima Dana Dekonsentrasi dengan Pagu sebesar Rp8.401.494.000. Tidak terdapat realisasi pada kegiatan ini karena Pagu diblokir.

b. Ditjen Binapenta dan PKK

(1) Pelaksanaannya di antaranya melalui Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang berada di Direktorat Bina PTKK dengan pagu mencapai Rp346.560.000 dan realisasi sebesar Rp316.253.196 dengan lokasi, waktu, bentuk pelaksanaan, target dan capaian sebagai berikut:

(a) Cilegon, Provinsi Banten

- i. Sosialisasi dalam bentuk penandatanganan komitmen Bersama dalam rangka promosi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Waktu pelaksanaan 14 Mei 2025.

Capaian: 62 perusahaan mewakili Kawasan industri provinsi banten yang terdiri dari Kawasan industri Cilegon, kota Tangerang, kabupaten Tangerang dan kabupaten/kota serang.

- ii. Penandatanganan PKS Bersama BAZNAS RI dalam Upaya Fasilitasi Pelayanan Penempatan TKPD Sektor Formal.

Waktu pelaksanaan 14 Mei 2025.

Capaian: 1 Dokumen PKS

Target Penempatan dalam 5 tahun : 1000

(b) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Sosialisasi dalam bentuk penandatanganan dalam rangka implementasi Fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Waktu pelaksanaan 25 Juli 2025.

Target: 22 Perusahaan

Capaian: 9 Perusahaan yang menempatkan 22 orang TKPD

(c) Kementerian Ketenagakerjaan

Sosialisasi dan Penandatanganan Bersama FOZ dalam rangka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Waktu pelaksanaan 17 Juli 2025

Capaian: 1 Dokumen PKS

(d) Rapat Koordinasi Bersama ULD Bidang Ketenagakerjaan Online

Rapat Koordinasi Bersama ULD Bidang Ketenagakerjaan terkait program Kerjasama dengan BAZNAS dan FOZ dalam rangka fasilitasi pelayanan Penempatan TKPD untuk penempatan dalam sektor formal dan pemberdayaan.

Waktu pelaksanaan 26 Mei 2025

Waktu pelaksanaan 4 Agustus 2025

Target ULD: 263 Unit Layanan Disabilitas

(2) Pelaksanaanya di antaranya melalui Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia Produktif yang berada di Direktorat Bina PTKK dengan pagu mencapai Rp383.487.000 dan realisasi sebesar Rp376.322.113 dengan lokasi, waktu, bentuk Pelaksanaan, target dan capaian sebagai berikut:

(a) Kementerian Ketenagakerjaan

- i. Pelaksanaan penyusunan NSPK berupa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Penempatan Tenaga Khusus. Pelaksanaan kegiatan berupa rapat-rapat dengan mengundang narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang hukum perundang-undangan dan

unit kerja lain di Kemnaker yang terkait.

Waktu pelaksanaan: pada Juli s.d. Desember 2025.

Target: draft Rancangan Permenaker tentang Penempatan Tenaga Kerja Khusus.

- ii. Pelaksanaan Kerjasama antar Kementerian/Lembaga untuk penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lansia. Pelaksanaan kegiatan berupa rapat-rapat dengan mengundang narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam penempatan dan pemberdayaan lansia, unit kerja lain di Kemnaker yang terkait, serta K/L lain (Kemendukbangga, Sekretariat Inklusi, Aisyiyah, Sekolah Lansia, PT.Boga Group, Uma Oma Cafe)

Waktu pelaksanaan pada Juli s.d. Desember 2025.

Target: dokumen kerjasama.

- iii. Penyusunan database tenaga kerja lansia

Pelaksanaan kegiatan berupa rapat-rapat dengan mengundang narasumber yang memiliki keahlian dalam pengumpulan, pengolahan, dan manajemen data, unit kerja lain di Kemnaker yang terkait, serta K/L lain (Bappenas, Kemendukbangga, Aisyiyah, Sekolah Lansia, dll).

Waktu pelaksanaan pada Juli s.d. Desember 2025

Target: database terkait penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lansia

- iv. Penyusunan Pedoman Umum Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia Potensial (TKLUP)

Pelaksanaan kegiatan berupa rapat-rapat dengan mengundang narasumber/konsultan yang memiliki keahlian dalam demografi ketenagakerjaan, pelatihan dan pemberdayaan lansia.

Waktu pelaksanaan pada Juli s.d. Desember 2025

Target: Pedoman Umum Penempatan dan Pemberdayaan TKLUP

- v. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, Kemendukbangga/BKKBN dengan Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker tentang Sinergi Program Pembangunan Keluarga Dengan Program Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perluasan Kesempatan Kerja.

Waktu pelaksanaan : 17 Juli 2025

Target: 1 dokumen Perjanjian Kerja Sama

(b) BPKK Bekasi

Kegiatan layanan kewirausahaan bagi tenaga kerja lansia di BPKK Bekasi. Kegiatan berupa pembekalan kemampuan entrepreneurship, pengelolaan keuangan, dan softskill.

Waktu pelaksanaan: 10 September 2025

Capaian: 86 orang lansia dari Sekolah Lansia Kota Bekasi

(c) Disnaker Kabupaten Karawang

Kegiatan layanan kewirausahaan bagi tenaga kerja lansia di Kantor Disnaker Kabupaten Karawang. Lansia yang mengikuti berasal dari Aisyiyah dan Sekolah Lansia Karawang. Kegiatan berupa pembekalan kemampuan entrepreneurship, pengelolaan keuangan, dan softskill.

Waktu pelaksanaan: 9 Oktober 2025

Capaian: 20 orang lansia dari Sekolah Lansia dan Aisyiyah Karawang

c. Ditjen PHI dan Jamsos

Pelaksanaannya diantaranya melalui:

- (1) Pembinaan Tenaga Kerja Terampil Berdialog dalam Membangun Kerja Sama di Perusahaan dengan pagu sebesar Rp4.714.235.000 dan realisasi sebesar Rp4.607.741.493 atau 97,74%;
- (2) Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dengan pagu sebesar Rp8.388.000.000 dan realisasi sebesar Rp5.748.805.451 atau 68,54%;
- (3) Pembinaan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pembuatan Peraturan Perusahaan dengan pagu sebesar Rp3.360.000.000 dan realisasi sebesar Rp1.631.798.032 atau 48,57%;
- (4) Pembinaan Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi Perusahaan dengan pagu sebesar Rp6.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp2.394.030.625 atau 36,83%;
- (5) Pelatihan dalam Peningkatan Kapasitas Mediator Hubungan Industrial dengan pagu sebesar Rp19.496.790.000 dan realisasi sebesar Rp6.233.042.473 atau 31,97%.

d. Ditjen Binwasnaker dan K3

Pelaksanaannya diantaranya melalui Program Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) berupa kegiatan Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Fasilitasi Sertifikasi SMK3 bagi Perusahaan, Layanan pelaporan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online bagi Perusahaan, Layanan pembinaan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum ketenagakerjaan bagi Perusahaan dan Layanan Pengujian K3 pada Perusahaan yang tersebar di 7 (tujuh) satuan kerja dengan pagu senilai Rp29.051.238.000 dan realisasi sebesar Rp18.809.814.793 atau 64,75%.

e. Ditjen Binalavotas

Pelaksanaannya diantaranya melalui program Tenaga Pelatihan BLK Komunitas Baru yang Ditingkatkan Kompetensinya yang dilaksanakan oleh Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan pagu sebesar Rp937.090.000 dan realisasi sebesar Rp931.602.753 atau 99,41%

4. PN VI: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan kerja dengan pagu mencapai Rp2.496.636.000 dan realisasi sebesar Rp2.184.264.292 atau 87,49% dengan rincian terlampir.

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	KODE KEGIATAN	PAGU BELANJA	REALISASI	PERSEN (%)	TARGET VOLUME	SATUAN	REALISASI VOLUME
451270	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DN	PEF	001	Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial	5586	1.194.111.000	904.920.511	75,78	1000	Orang	740
			QDB	001	Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586	1.302.525.000	1.279.343.781	98,22	600	Lembaga	1000
06-2025 Total							2.496.636.000	2.184.264.292	87,49			

Proritas Nasional VI terdapat pada Ditjen PHI dan Jamsos yang Pelaksanaannya diantaranya melalui program Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial dan Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan pagu sebesar Rp2.496.636.000 dan realisasi sebesar Rp2.184.264.292 atau 87,49%.

F.4. Progress Penyelesaian Hibah Peralatan dan Mesin kepada Masyarakat/Pemda dari Tahun 2017 s.d 2022 Ditjen Binalavotas

Progress
Penyelesaian Hibah
Peralatan dan
Mesin Kepada
Masyarakat

- a) Proses Hibah Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dari tahun 2017 - 2022 per tanggal 31 Desember 2025

TAHUN	PENERIMA	SELESAI SK		PROSES BIRO KEUANGAN		BELUM DIUSULKAN NPH & BAST				BATIL HIBAH		JUMLAH HIBAH	
		PENE RIMA	ANGGARAN	PENE RIMA	ANGGARAN	SUDAH PERSETUJUAN PENE RIMA	ANGGARAN	BELUM PERSETUJUAN PENE RIMA	ANGGARAN	PENE RIMA	ANGGARAN	PENE RIMA	ANGGARAN
2017	KOMUNITAS	30	14,442,943,444	0	0	0	0	0	0	0	0	30	14,442,943,444
	LPKS	372	14,105,901,595	0	0	0	0	0	0	0	0	372	14,105,901,595
	UPTD	64	43,381,738,447	0	0	0	0	0	0	0	0	64	43,381,738,447
2017 Total		466	71,930,583,486	0	0	0	0	0	0	0	0	466	71,930,583,486
2018	KOMUNITAS	75	22,119,775,147	0	0	0	0	0	0	0	0	75	22,119,775,147
	LPKS	826	24,255,749,666	0	0	0	0	0	0	0	0	826	24,255,749,666
	SDC	1	4,516,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,516,490,000
	UPTD	300	268,941,389,530	0	0	0	0	0	0	1	511,432,350	301	269,452,821,880
2018 Total		1,002	319,831,404,323	0	0	0	0	0	0	1	511,432,350	1,003	320,344,836,673
2019	KOMUNITAS	968	291,119,783,788	0	0	0	0	0	0	0	0	968	291,119,783,788
	LPKS	413	19,958,723,840	0	0	0	0	0	0	0	0	413	19,958,723,840
	PMI	1	199,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	199,573,000
	SDC	22	14,696,105,674	0	0	0	0	0	0	0	0	22	14,696,105,674
	UPTD	65	61,545,612,302	0	0	0	0	0	0	0	0	65	61,545,612,302
2019 Total		1,469	387,319,794,604	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469	387,319,794,604
2020	KOMUNITAS	1,014	350,445,530,828	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014	350,445,530,828
	LPKS	206	9,677,350,800	0	0	0	0	0	0	0	0	206	9,677,350,800
	SDC	24	8,163,644,950	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8,163,644,950
	UPTD	70	53,469,891,191	0	0	0	0	0	0	0	0	70	53,469,891,191
2020 Total		1,314	421,754,417,769	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314	421,754,417,769
2021	BLUK 2021	795	271,517,378,017	0	0	0	0	0	0	0	0	795	271,517,378,017
2021 Total		795	271,517,378,017	0	0	0	0	0	0	0	0	795	271,517,378,017
2022	BLUK 2022	846	292,338,103,741	0	0	0	0	0	0	0	0	846	292,338,103,741
	LPKS	150	7,438,706,953	0	0	0	0	0	0	0	0	150	7,438,706,953
	UPTD	40	29,928,789,202	0	0	0	0	0	0	0	0	40	29,928,789,202
2022 Total		1,036	329,705,599,896	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036	329,705,599,896
TOTAL		6,112	1,802,263,178,095	0	0	0	0	0	0	1	511,432,350	6,113	1,802,774,610,445

Adapun penjelasan tabel diatas sebagai berikut:

Hibah 2017 - 2022 per tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp1.802.774.610.445 dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah yang sudah selesai SK penghapusan sebesar Rp1.802.263.178.095
- Batal Hibah sebesar Rp511.432.350

- b) Progress Hibah Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 per 31 Desember 2025

TAHUN	PENERIMA	SELESAI SK		PROSES SURAT KEPUTUSAN		BELUM DIUSULKAN INPH & BAST				BATAL HIBAH		JUMLAH HIBAH	
		PENE RIMA	ANGGARAN	PENE RIMA	ANGGARAN	SUDAH PERSETUJUAN		BELUM PERSETUJUAN		PENE RIMA	ANGGARAN	PENE RIMA	ANGGARAN
						PENE RIMA	ANGGARAN	PENE RIMA	ANGGARAN				
2024	BLKK	370	126.611.397.855	-	-	-	-	-	-	-	-	370	126.611.397.855
	LPKS	50	2.487.093.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.487.093.000
	UPTD	10	10.888.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.888.952.000
2024 Total		430	139.987.442.855	-	-	-	-	-	-	-	-	430	139.987.442.855
Grand Total		430	139.987.442.855	-	-	-	-	-	-	-	-	430	139.987.442.855

Penjelasan persediaan diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Jumlah persediaan yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2024 senilai Rp91.844.002.423 dan masih dalam RPTA Rp48.143.440.432 sehingga total menjadi Rp139.987.442.855 terdiri dari penerima:

- 1) Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) sebanyak 370 dengan nilai sebesar Rp126.611.379.855
- 2) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LKPKS) sebanyak 50 dengan nilai sebesar Rp2.487.093.000
- 3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 8 dengan nilai sebesar Rp10.888.952.000

Progres hibah persediaan yang diserahkan kepada masyarakat adalah:

Telah diterbitkan persetujuan hibah sebanyak 430 penerima dengan nilai sebesar Rp139.987.442.855 terdiri dari:

- 1) Sudah mendapat persetujuan dan selesai SK hibah sebanyak 430 penerima hibah dengan nilai Rp139.987.442.855.
- 2) Selesai SK hibah sebanyak 430 penerima hibah dengan nilai Rp139.987.442.855.

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo hibah dikarenakan sudah selesai dan sudah terbit Surat keputusan Hibah dan sudah didukung dengan dokumen hibah.

- c) Progress Hibah Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat Tahun 2025 per 31 Desember 2025

Pada tahun 2025 (per 31 Desember 2025) bantuan berupa peralatan dan

mesin untuk diserahkan kepada masyarakat teralokasi senilai Rp40.949.390.143 dengan rincian tabel sebagai berikut:

TAHUN	PENERIMA	SELESAI SK	PROGRES PENYELESAIAN SK	SUDAH PERSETUJUAN	BELUM PERSETUJUAN	JUMLAH
2025	BLKK	-	-	-	-	40.949.390.143
Total 2025		-	-	-	-	40.949.390.143

Persediaan diserahkan kepada masyarakat Tahun 2025 merupakan bantuan berupa peralatan dan mesin yang diserahkan kepada Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Sampai dengan periode pelaporan belum ada pengajuan persetujuan hibah kepada Pengguna Barang (PB) sehingga masih tersaji dalam Neraca.

F.5. Progres Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Progress

Penyelesaian

Tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK

RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memantau pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sampai dengan Semester II Tahun 2025 yang terdiri atas 73 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 949 temuan pemeriksaan, dan 2.125 rekomendasi senilai Rp1.416.364.235.828,80, USD15.926.811,00, dan EUR615.593,31, dengan uraian status TLRHP sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.521 rekomendasi senilai Rp250.947.345.251,89 dan USD23.400,00 (71,58%);
2. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 586 rekomendasi senilai Rp1.056.680.210.388,56, USD15.806.111,00, dan EUR615.593,31 (27,58%);
3. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 18 rekomendasi senilai Rp108.736.680.188,35 dan USD97.300,00 (0,84%).

F.6. Aset-Aset Yang Digunakan/Dikuasai oleh Pihak Lain/Pihak-III pada Sekretariat Jenderal

Aset-aset Yang

Digunakan/Dikuasai

1. Sengketa Aset antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah

*oleh Pihak
Lain/Pihak-III pada
Sekretariat Jenderal*

Daerah Provinsi DKI Jakarta

a. Tanah di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Cikoko Pancoran Barat Jakarta Selatan

Tanah di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Cikoko Pancoran Barat Jakarta Selatan seluas 10.050 m² dengan sertifikat Hak Pakai No. 53 Desa Cikoko 27 September 1996, a.n. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, tanah tersebut tercatat dalam SIMAK BMN Biro Umum dan sudah mendapat Penetapan Status Penggunaan Sesuai dengan Kep. Menteri Keuangan RI No. 436/KM.6/2016 pada tanah tersebut terdapat tiga bangunan (Gedung Kantor BNP2TKI, Gedung Kantor BNSP dan Gedung Kantor Eks PHI).

Gedung Kantor Eks-PHI yang diklaim bahwa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bangunan terdiri 1 (satu) lantai seluas $\pm$ 1.135 m², bangunan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta Nomor Lap.02.00.02-5003/PW.09.2/2000 tanggal 4 Agustus 2000 menyatakan bahwa bangunan tersebut telah diserahkan terkait otonomi daerah.

Dari hasil koordinasi Tim Biro Umum dengan Disnaker Provinsi DKI Jakarta telah didapat dokumen yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bukti kuat pemilik atas aset tanah dan bangunan yaitu Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) atas Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara (BIM/KN) Dep. Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta Nomor Lap.02.00.02-5003/PW.09.2/2000 tanggal 4 Agustus 2000.

Namun Disnaker Prov. DKI Jakarta tidak bisa memperlihatkan lampiran pada dokumen tersebut yang menjelaskan status kepemilikan tanah dan bangunan yang diklaim.

Progres Penyelesaian Gedung Kantor Eks PHI :

1) Rapat tanggal 3 April 2018

Agenda rapat adalah pembahasan dan klarifikasi kepemilikan aset di Jl. MT. Haryono Kav. 52 eks Departemen Ketenagakerjaan dan Permukiman Perambah Hutan RI.

Pada kesempatan rapat tersebut pihak Pemprov. DKI Jakarta menyampaikan bukti copy Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta Nomor Lap.02.00.02-5003/PW.09.2/2000 tanggal 4 Agustus 2000.

2) Rapat tanggal 11 Oktober 2019

Pemprov. DKI Jakarta meminta kepada Kemnaker, agar penyelesaian aset ini bisa segera diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena Pemprov. DKI Jakarta akan membangun gedung di lokasi tersebut, dikarenakan tanah dan bangunan tersebut sudah sah menurut Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta Nomor Lap.02.00.02-5003/PW.09.2/2000 tanggal 4 Agustus 2000 menyatakan bahwa bangunan tersebut telah diserahkan terkait otonomi daerah.

3) Rapat Tanggal 4 Januari 2022

Hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tanah di Jl. MT. Haryono Kav.52, Cikoko, Pancoran Barat, Jakarta Selatan yang pernah digunakan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOT dan Hubungan Industrial Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, maka Kemnaker akan melaksanakan pemecahan sertifikat tanah di Jl. MT. Haryono Kav. 52, Cikoko, Pancoran Barat menjadi 2 (dua) bidang tanah antara tanah yang dicatat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tanah yang dicatat Kementerian Ketenagakerjaan.

- 4) Tahun 2023 telah dilakukan pemecahan sertifikat menjadi dua bidang tanah dengan sertifikat Nomor 00087 seluas 7.158 m² dan Nomor 00088 seluas 2.892 m² yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2022.

b. Tanah di Jalan Gunung Sahari Raya No. 31 Sawah Besar Jakarta Pusat

Tanah di Jalan Gunung Sahari Raya No. 31 Sawah Besar Jakarta Pusat tercatat sebagai aset Biro Umum Kemnaker sesuai dengan Penetapan Status Penggunaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 436/KM.6/2016. Sertifikat Asli dikuasai Biro Umum Hak Pakai Nomor 83 Desa Gunung Sahari Utara 28 Januari 1997 seluas 1.364 m².

Sesuai dengan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta Nomor Lap.02.00.02-5003/PW.09.2/2000 tanggal 4 Agustus 2000 menyatakan aset tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait otonomi daerah, sesuai keterangan dan informasi yang didapat bahwa penyerahan tersebut termasuk tanah yang digunakan.

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kesehatan) terdiri dari 4 Lantai seluas ± 2.100 m² kondisi bangunan baik dan bangunan tersebut

tidak tercatat di Kemnaker.

Progres Penyelesaian Tanah di Jalan Gunung Sahari:

Hasil Rapat tanggal 4 Januari 2022

Tanah di Jl. Gunung Sahari Raya No. 31 Sawah Besar Jakarta Pusat tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, Biro Umum dan Ditjen Binwasnaker dan K3 berhasil meminta mengalihstatuskan dan disetujui oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta terkait bangunan kantor yang sekarang dimiliki Hiperkes Pemprov DKI Jakarta seluas + 509 m² terdiri dari 4 lantai yang berdiri diatas hamparan tanah milik Balai K3 Jakarta sesuai sertifikat Hak Pakai No. 527 atas nama Departemen Tenaga Kerja RI untuk dialihstatuskan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

F.7. Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan Yang Digunakan oleh BP2MI

Aset digunakan oleh BP2MI

Aset Tanah dan Gedung Bangunan yang digunakan sementara oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berlokasi di Jalan Letjen M.T. Haryono Kaveling 52, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 432 Aset Tanah dan Gedung Bangunan yang digunakan sementara oleh BP2MI

No	Jenis BMN	NUP	Tahun Perolehan	Luas Penggunaan Sementara (m ²)	Nilai Perolehan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	1996	10.050	Rp338.504.106.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2007	3.850	Rp3.259.576.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	2009	348	Rp1.079.774.000
Jumlah					Rp342.843.456.000

Penjelasan terkait aset-aset tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/409/UM.03.03/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Kementerian Ketenagakerjaan Untuk Kantor BP2MI yang telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.
2. Surat Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia oleh

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor S-18/MK.6/WKN.07/KNL.03/2022 tanggal 20 Januari 2022.

3. Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1/1/UM.03.00/I/2022.
4. Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara Barang Milik Negara antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1/2/UM.03.00/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Jangka waktu penggunaan sementara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 23 Januari 2027

Penggunaan sementara Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tanpa mengubah kepemilikan dan status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan tanpa imbalan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden R.I Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, menyebutkan bahwa BP2MI menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan KP2MI mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN sesuai dengan tahapan berikut:

1. Tahun 2025, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI melalui surat nomor: B.481/01/PL.03.01/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 mengajukan permohonan alih status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan bangunan kepada Menteri Ketenagakerjaan;
2. Menindaklanjuti surat permohonan Menteri P2MI tersebut, Sekretaris Jenderal a.n Menteri Ketenagakerjaan mengajukan permohonan alih status penggunaan barang milik negeri berupa tanah dan/atau bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Nomor B-1/608/UM.03.01/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025;
3. Kepala KPKNL Jakarta III a.n Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat nomor: S-304/MK/KNL.0703/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Surat Persetujuan Alih Status Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kemnaker kepada Kementerian P2MI/BP2MI sebesar Rp164.466.688.827;
4. Surat Sekretaris Jenderal nomor: B-1/325/U.03.00/IV/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Proses Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Ketenagakerjaan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;

5. Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor: 1.2/1291/UM.03.01/IV/2026 Tanggal 23 April 2026 perihal rapat Pembahasan draft BAST Alih Status yang menghasilkan draft Berita Acara Serah Terima Alih Status Barang Milik Negara;
6. Telah terbit BAST nomor: BA. 1024/02/PL.03.07/IV/2026 dan nomor: B-1/411/UM.03.03/IV/2026 tanggal 23 April 2026 tentang Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan Dari Kementerian Ketenagakerjaan Kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

F.8. Aset-Aset Yang Digunakan/Dikuasai oleh Pihak Lain/Pihak-III pada Ditjen Binalavotas

Nilai aset tetap yang dilaporkan dalam neraca Ditjen Binalavotas per-30 Juni 2024 mencakup aset tanah dan gedung bangunan yang dikuasai oleh pihak lain.

Rincian aset tetap yang dikuasai pihak lain yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	PENGUNA	LOKASI	NILAI 31 DESEMBER 2024 (Rp)
1	BLKI Surabaya	PEMDA Jawa Timur	BLKI Surabaya	566.035.065.000
2	BPVP Surakarta	Pemkot Surakarta	Tanah & Gedung di Jalan Slamet Riyadi, Laweyan	98.874.212.000
3	BBPVP Bekasi	Kementerian Perindustrian	Di area BBPVP Bekasi Jalan Guntur Raya No 1 Bekasi	39.104.315.000
ASET DIKUASAI PIHAK KETIGA				704.013.592.000

Perkembangan tindak lanjut yang sudah dilakukan Ditjen Binalavotas terkait aset-aset tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aset yang Dikuasai PEMDA Provinsi Jawa Timur

- a. Atas permintaan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai surat nomor B.187/MEN/SJ-OKP/XI/2016 Tanggal 16 November 2016, hal penyelesaian status kelembagaan BLK Surabaya.
- b. Menindaklanjuti hasil rapat tim teknis Sekretariat DPOD tanggal 10 Juli 2017 dengan pertimbangan kemampuan dan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka pengelolaan dan status BLK Surabaya diserahkan oleh Kemnaker kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. Selanjutnya, dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelesaian status BLK Surabaya tidak disarankan untuk dibahas pada sidang DPOD;
 - 2) Mengacu pada UU 23/2014 sesuai Pasal 404 dan lampiran huruf G bahwa sub bidang pengawasan ketenagakerjaan, maka penyerahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi maka harus dilakukan serah terima dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Kementerian Ketenagakerjaan RI mengacu pada lampiran huruf G UU 23/2014, bermaksud membentuk UPTP untuk melaksanakan kewenangannya dalam penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan (NSPK) dengan wilayah kerja regional di Indonesia Timur menggunakan sebagian fasilitas gedung BLK Surabaya;
 - 4) Direncanakan dalam kurun waktu $\pm$ 3 tahun akan dilaksanakan pengembangan kapasitas Bersama, sehingga terbentuk institusi dan fasilitas yang setara untuk melaksanakan kewenangan masing-masing;
 - 5) Pilihan penyelesaian aset dapat dilakukan dengan pinjam pakai dan atau menggunakan *memorandum of understanding* (nota kesepahaman bersama).
- d. Pada September 2021 dilaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Barenbang, Kepala Biro SDMA, Biro Keuangan, Biro Umum, Dirjen Binalavotas, Direktur Bina K3, Asisten Deputi Politik Hukum dan Keamanan Sekretarian Wakil Presiden dengan hasil bahwa Kemnaker akan menyerahkan aset dan pengelolaan BLKI Surabaya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa Kemnaker sudah memiliki UPTP di Provinsi Jawa Timur
- e. Berdasarkan otonomi daerah 1 Januari 2021 surat nomor 446/M.PAM/2/2/001 tanggal 23 Februari 2023 perihal daftar instansi vertikal dan UPT di lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen (LPND0, BLKI Surabaya tidak termasuk sebagai UPT yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur didukung oleh Kepgub Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tugas Fungsi UPTP Disnaker Provinsi Jawa Timur yang didalamnya terdapat tugas BLKI Surabaya
- f. Dilakukan pencatatan oleh operator BMN Setditjen Binalavotas dengan kode satker 026130199451026007KP dan 026130500055105000KD sebagai Saldo Awal

- g. Adanya Keputusan Gubernur dan surat tersebut menegaskan bahwa terdapat dua instansi (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Ketenagakerjaan) mencatat aset yang sama sebagai aset
- h. Berdasarkan Konsep LHP Nomor 64B/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 temuan tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh Ditjen Binalavotas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Biro Keuangan, dan Inspektorat Jenderal
- i. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kemnaker Nomor 1/112/UM.03.03/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Penyampaian Notula Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah dan Gedung/ Bangunan merekomendasikan Ditjen Binalavotas untuk bersurat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa aset tersebut berdasarkan Surat Kementerian Keuangan menjadi Underlying Asset sebagai tindak lanjut temuan BPK.

2. Aset yang Dikuasai Pemerintah Kota Surakarta

- a. Aset BLK Surakarta berupa tanah seluas 2.960 m² dan bangunan gedung seluas 255 m² yang terletak di Jl. Slamet Riyadi, Laweyan, Surakarta digunakan sebagai Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Aset tersebut telah bersertifikat Hak Pakai No. 20 sejak tanggal 21 Juni 1994 atas nama Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.
- b. Kepala BLK Surakarta melalui surat Nomor: B.962/BBLKI-SKA/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 meminta kepada Walikota Surakarta untuk memproses perjanjian pinjam pakai gedung antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. BLK Surakarta.
- c. Walikota Surakarta telah menanggapi melalui surat Nomor: 030/3.162 tanggal 7 Agustus 2013 tentang status tanah dan bangunan P3D Departemen Tenaga Kerja, meminta agar dokumen berupa sertifikat hak pakai yang masih dikuasai BLK Surakarta diserahkan kepada pemerintah kota Surakarta.
- d. Untuk memproses pinjam pakai tanah dan bangunan tersebut BLK Surakarta melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- e. Walikota Surakarta melalui surat Nomor: 593.3/202 tanggal 24 Januari 2018 tentang permohonan hibah atas Tanah dan Bangunan Hak Pakai Nomor 20 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, meminta Kemnaker untuk menghibahkan tanah dan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Kota Surakarta.
- f. Menteri Ketenagakerjaan melalui surat nomor: 1/81/UM.03.00/IV/2020 tanggal 1 April 2020 hal tanggapan atas

permohonan aset di Jl. Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan:

- 1) Bahwa sesuai dengan dokumen, Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta adalah milik Departemen Tenaga Kerja c.q. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Aset tersebut sudah tercatat dalam aplikasi SIMAK-BMN BLK Surakarta dan sudah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 2) Dalam rangka pengembangan BLK Surakarta, kami masih sangat membutuhkan aset tersebut untuk pembangunan infrastruktur kejuruan perhotelan, Digital Animasi, dan Fashion Teknologi dengan tujuan meningkatkan keterampilan masyarakat Surakarta;
 - 3) Namun apabila Pemerintah Kota Surakarta akan menggunakan aset tersebut, Pemerintah Surakarta dapat memberikan lokasi sebagai lahan pengganti melalui proses pemindahtanganan BMN atau tukar menukar aset sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- g. Sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Binalavotas Nomor: 2/2869/UM.03.03/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 perihal Usulan Permohonan Hibah BMN Berupa Tanah, Gedung dan /Bangunan Rumah Negara pada BPVP Surakarta disampaikan bahwa:
- Hibah BMN kepada Pemerintah Kota Surakarta dengan total nilai Rp101.378.437.000 (seratus satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berupa Tanah seluas 2.960 m² senilai Rp98.874.212.000
- 1) Bangunan Gedung seluas 1.210 m² senilai Rp2.284.029.000
 - 2) Rumah Negara sebanyak 3 unit yaitu:
 - a) NUP 4 Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen senilai Rp90.669.000
 - b) NUP 7 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai Rp69.081.000
 - c) NUP 8 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai Rp60.446.000
- h. Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat B-1/390/UM.03.03/IX/2023 tanggal 6 September 2023 hal permohonan persetujuan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, gedung/bangunan, rumah negara pada BPVP Surakarta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Atas BMN tersebut akan di serahkan melalui mekanisme Hibah kepada Pemkot Surakarta. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu proses persetujuan Hibah.

- i. Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat No.S-987/MK.06/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Permohonan Persetujuan Hibah BMN untuk memberikan persetujuan atas hibah berupa tanah, gedung/bangunan, rumah negara pada BPVP Surakarta.

3. Aset yang dimiliki Kementerian Perindustrian

- a. Total luas tanah BBPVP Bekasi ± 95.036 m² dimiliki oleh Kemnaker SHP, yang dimiliki Kementerian Perindustrian sesuai BAST ± 7.000 m² berupa hak pakai. Namun diatas lahan tanah seluas 7.000 m² terdapat 5 sertifikat SHM milik perorangan seluas 1.577 m². SHM merupakan Rumah Dinas Golongan III dan telah dibayar ke Kementerian PUPR. Rekomendasi BPK sertifikat tanah seluas 5.423 m² diserahkan ke Kementerian Perindustrian.
- b. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kemnaker Nomor 1/112/UM.03.03/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Penyampaian Notula Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah dan Gedung/ Bangunan merekomendasikan Ditjen Binalavotas membuat kajian untuk 5 (lima) unit Rumah Dinas Negara Golongan III pada BBPVP Bekasi dengan melibatkan koordinator perundang-undangan.
- c. Tanggal 7 Oktober 2025: Rapat bersama Kantor Pertanahan ATR/ BPN Kota Bekasi; Kemnaker dan Kemenperin, berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Bekasi di Jl. Chairil Anwar No.25, RT.004/RW.009, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113 dengan hasil sebagai berikut;
 - 1) Terdapat kondisi kepemilikan SHM atas 6 (enam) rumah di atas tanah SHP Cevest, 5 (lima) rumah berada pada lokasi yang akan diserahkan ke Kemenperin seluas 7.000 m² dan 1 (satu) rumah berada pada lokasi 89.390 m² yang berada pada kepemilikan Kemnaker.
 - 2) Berdasarkan kondisi dengan terbitnya SHM 5 (lima) rumah tersebut, Kemnaker menekankan bahwa berdasarkan kronologis yang ada bahwa SHM terbit pada Tahun 2017 artinya kondisi terjadi setelah terjadinya Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Tanah (tahun 1999) dan Kemnaker tidak memiliki salinan dokumen atas SHM tersebut, untuk itu Kemnaker tetap akan menggunakan luasan yang tertera pada Berita Acara, yaitu 7.000 m².
 - 3) Pada point a, menyebabkan terjadinya selisih antara luas tanah yang diserahkan (7.000 m²) dengan total luas sertifikat yang terbit atas nama Kementerian Ketenagakerjaan (5.646 m²) dan SHM pribadi (1.419 m²), yaitu sebesar 65 m², menyingkapi hal ini Kemnaker akan menyampaikan kondisi ke pimpinan untuk mengalihstatuskan tanah seluas 65 m² dengan menerbitkan kesepakatan Berita Acara

yang baru, sehingga akan ada 2(dua) Berita Acara, yaitu BA 7.000 m² dan BA 65 m² yang akan menjadi dasar koreksi pencatatan BMN pada masing-masing K/L.

- 4) Berdasarkan kondisi pada point a terkait dengan terbitnya SHM atas 1 (satu) rumah seluas 171 m² atas nama pegawai Kemnaker Bapak Agus, SHM secara sah diterbitkan karena telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, untuk hal ini Kemnaker akan membahas kembali dengan pihak terkait.
 - 5) Kantor Pertanahan sepenuhnya menyerahkan keputusan dari Kemnaker dan Kemenperin, namun untuk mempermudah penyelesaian sertifikasi kedepannya diharapkan kedua belah pihak menyepakati penyelesaian administrasi BMN nya termasuk permasalahan 1 (satu) rumah di Cevest diatas, kemudian untuk melakukan pengukuran ulang semua tanah sehingga didapat luasan yang sebenarnya dan apabila ada kemungkinan selisih maka akan dicatat berdasarkan ukuran (saling koreksi).
 - 6) Kemnaker dan Kemenperin akan melakukan rapat tindak lanjut pada hari Senin, 13 Oktober 2025 untuk membahas arahan dari Kantor Pertanahan tersebut.
 - 7) Kemenperin bersedia untuk mengikuti kesepakatan yang akan diambil oleh Kemenaker, BAST atas tanah ke Ditjen IKMA 29 Desember 1999 seluas 7.000 m², dicatat 5.423 m², arahan dari Kantah 5.646 m² kalau digabung dengan 5 (lima) rumah dinas 7.065 m².
- d. Tanggal 13 Oktober 2025: Rapat bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bekasi; Kemnaker dan Kemenperin, berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Bekasi di Jl. Chairil Anwar No.25, RT.004/RW.009, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113 dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Terdapat kondisi kepemilikan SHM atas 6 (enam) rumah di atas tanah SHP Cevest, 5 (lima) rumah berada pada lokasi yang akan diserahkan ke Kemenperin seluas 7.000 m² dan 1 (satu) rumah berada pada lokasi 89.390 m² yang berada pada kepemilikan Kemnaker.
 - 2) Berdasarkan kondisi dengan terbitnya SHM 5 (lima) rumah tersebut, Kemnaker menekankan bahwa berdasarkan kronologis yang ada bahwa SHM terbit pada Tahun 2017 artinya kondisi terjadi setelah terjadinya Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Tanah (tahun 1999) dan Kemnaker tidak memiliki salinan dokumen atas SHM tersebut, untuk itu Kemnaker tetap akan menggunakan luasan yang tertera pada Berita Acara, yaitu 7.000 m².
 - 3) Pada point a, menyebabkan terjadinya selisih antara luas tanah yang diserahkan (7.000 m²) dengan total luas sertifikat yang terbit atas

nama Kementerian Ketenagakerjaan (5.646 m²) dan SHM pribadi (1.419 m²), yaitu sebesar 65 m², menyingkapi hal ini Kemnaker akan menyampaikan kondisi ke pimpinan untuk mengalihstatuskan tanah seluas 65 m² dengan menerbitkan kesepakatan Berita Acara yang baru, sehingga akan ada 2(dua) Berita Acara, yaitu BA 7.000 m² dan BA 65 m² yang akan menjadi dasar koreksi pencatatan BMN pada masing-masing K/L.

- 4) Berdasarkan kondisi pada point a terkait dengan terbitnya SHM atas 1 (satu) rumah seluas 171 m² atas nama pegawai Kemnaker Bapak Agus, SHM secara sah diterbitkan karena telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, untuk hal ini Kemnaker akan membahas kembali dengan pihak terkait.
 - 5) Kantor Pertanahan sepenuhnya menyerahkan keputusan dari Kemnaker dan Kemenperin, namun untuk mempermudah penyelesaian sertifikasi kedepannya diharapkan kedua belah pihak menyepakati penyelesaian administrasi BMN nya termasuk permasalahan 1 (satu) rumah di Cevest diatas, kemudian untuk melakukan pengukuran ulang semua tanah sehingga didapat luasan yang sebenarnya dan apabila ada kemungkinan selisih maka akan dicatat berdasarkan ukuran (saling koreksi).
 - 6) Kemnaker dan Kemenperin akan melakukan rapat tindak lanjut pada hari Senin, 13 Oktober 2025 untuk membahas arahan dari Kantor Pertanahan tersebut.\
 - 7) Kemenperin bersedia untuk mengikuti kesepakatan yang akan diambil oleh Kemenaker, BAST atas tanah ke Ditjen IKMA 29 Desember 1999 seluas 7.000 m², dicatat 5.423 m², arahan dari Kantah 5.646 m² kalau digabung dengan 5 (lima) rumah dinas 7.065 m².
- e. Tanggal 20 Oktober 2025: Rapat penyelesaian permasalahan pencatatan ganda dan percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah antara Ditjen IKMA dan BBPVP Cevest bersama dengan Kepala KPKNL Bekasi dan Kepala KPKNL Jakarta IV yang menghasilkan simpulan sebagai berikut:
- 1) Menindaklanjuti adanya temuan BPK terkait permasalahan BMN pada Kementerian Perindustrian terkait adanya pencatatan BMN berupa tanah pada Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (Kementerian Perindustrian) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi (Kementerian Ketenagakerjaan), perlu segera dilakukan koordinasi dengan mengacu pada dokumen pendukung yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyelesaian atas permasalahan pencatatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga terkait dan disampaikan kepada Pengelola Barang;

- 2) ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan BMN;
 - 3) Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (Kementerian Perindustrian) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan produktivitas Bekasi (Kementerian Ketenagakerjaan) selanjutnya berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat guna melakukan penyesuaian yang diperlukan sebagai langkah pengamanan dan tindak lanjut atas pelaksanaan pengamanan secara fisik, administrasi, dan hukum;
 - 4) Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (Kementerian Perindustrian) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi (Kementerian Ketenagakerjaan) melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pengelolaan BMN yang berada di bawah penguasaannya.
- f. Tanggal 22 April 2026: Rapat penyelesaian permasalahan pencatatan ganda antara Kemnaker dan kemenperin, dengan hasil berikut:
- 1) Berita Acara Kesepakatan hanya akan membahas koreksi tindaklanjut Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah nomor 373/SJ/UM/1999;
 - 2) Pada konsep Berita Acara disepakati bahwa Pihak Kesatu dalam hal ini Balai Besar Pelatihan Vokasi dan produktivitas Bekasi, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan koreksi pencatatan luas BMN berupa tanah bangunan kantor pemerintah di Jl. Guntur Raya No.1, Bekasi Selatan. Luas awal tercatat 95.036 m² pada Kementerian Ketenagakerjaan, dan akan dikurangi sebesar 7.000 m² sesuai Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 373/SJ/UM/1999;
 - 3) Pihak Kedua dalam hal ini Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian telah mencatat tanah eks Cevest Bekasi, semula 7.000m² dikarenakan ada arahan BPK terkait dengan 5 (lima) SHM maka terdapat perubahan catatan menjadi seluas 5.423 m² dan akan melakukan koreksi penambahan sebesar 223 m² sehingga menjadi 5.646 m² pada saat Sertipikat Hak Pakai Nomor 468 diterima.
- g. Dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, telah terbit Berita Acara Kesepakatan Nomor: 2.10/2/KU.7/IV/2026 dan nomor: 631/IKMA.1/BMN/IV/2026 tanggal 22 April 2026 dengan ini kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) PIHAK KESATU akan melaksanakan koreksi pencatatan luas bidang terhadap Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di Jalan Guntur Raya No. 1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Saat ini tanah Barang Milik Negara dimaksud tercatat pada Kementerian Ketenagakerjaan seluas 95.036 m², untuk selanjutnya dilakukan koreksi pengurangan seluas 7.000 m² dengan nilai Rp39.104.315.000 (tiga puluh sembilan milyar seratus empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hak atas Tanah Nomor 373/SJ/UM/1999.
- 2) PIHAK KEDUA telah mencatat tanah Ex Cevest Bekasi dengan luas 5.423 m² yang berlokasi di Jalan Guntur Raya No. 1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, yang selanjutnya akan dilakukan koreksi luasan tanah setelah proses balik nama sertipikat selesai.
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membentuk tim lintas Kementerian untuk melakukan:
 - (a) penyelesaian koreksi sertipikat tanah pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 421 Tahun 2010 a.n. Pemerintah Indonesia cq Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - (b) perubahan nama Sertipikat Hak Pakai Nomor 468 Tahun 2024 a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Ketenagakerjaan menjadi cq Kementerian Perindustrian.

F.9. Aset-Aset Yang Digunakan/Dikuasai oleh Pihak Lain/Pihak-III pada Ditjen Binwasnaker dan K3

*Aset-aset Yang
Digunakan/
Dikuasai oleh Pihak
Lain/Pihak-III pada
Ditjen Binwasnaker
dan K3*

1. Aset Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Timur

Kronologis penyelesaian Status BLK dan Balai Hiperkes Keselamatan kerja Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2000 – 2021

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Perda Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Desember 2000

Substansi:

Dalam Perda tersebut, tercantum bahwa BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Provinsi Jawa Timur yang berada dibawah Depnakertrans diakui sebagai UPT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.

- b. Pelaksanaan otonomi daerah secara serentak (deklaratoris) dimulai 1 Januari 2001. Secara administratif, terbit Surat Men-PAN kepada Mendagri dan Otda Nomor 446/M.PAN/2/2001 tanggal 23 Februari 2001, perihal Penyampaian Daftar Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan LPND.

Substansi:

Berdasarkan surat tersebut BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Prov. Jawa Timur tidak termasuk UPT yang diserahkan ke Pemprov. Jawa Timur

- c. Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan, dan Dokumen/Arsip Instansi Vertikal Dari Departemen/LPND yang dialihkan kepada Provinsi Jawa Timur Nomor:10/3/Tim. KEPPRES/157/2001 tanggal 21 Maret 2001.

Substansi:

Bahwa BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Provinsi Jawa Timur tidak termasuk yang diserahkan P3D-nya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- d. Surat Men-PAN kepada Menakertrans Nomor 134/M.PAM/5/2001 tanggal 31 Mei 2001, Perihal Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Depnakertrans.

Substansi:

Bahwa Men-PAN menyetujui rancangan Keputusan Menakertrans tentang UPT Depnakertrans (termasuk BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Prov. Jawa Timur). Sehingga ditetapkan Kepmenakertrans Nomor 137/MEN/2001 Tanggal 25 Juni 2001.

- e. Pemerintah Prov. Jawa Timur menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Desember 2001.

Substansi:

Tugas dan fungsi BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Prov. Jawa Timur tercantum dalam Keputusan Gubernur tersebut.

- f. Surat Menakertrans kepada Ketua DPOD Nomor: B.75/MEN/SJ-OKP/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 perihal Permasalahan UPTP di Surabaya.

Tindak lanjut surat:

Upaya penyelesaian difasilitasi sidang DPOD.

- g. Surat Men-PAN kepada Menakertrans Nomor: B/636/M.PAN/3/2006 tanggal 8 Maret 2006 perihal Penataan UPT di Lingkungan Depnakertrans.

Hasil:

Persetujuan atas rancangan Permenakertrans tentang penataan UPT. Sehingga ditetapkan Permenakertrans Nomor 06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Depnakertrans.

- h. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menakertrans Nomor 061/5883/041/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Pengelolaan BP2TKI, BLKIP Surabaya dan Balai Hiperkes di Jawa Timur, yang menginformasikan bahwa BLKI dan Balai Hiperkes Prov. Jawa Timur tetap menjadi UPTD Dinas Tenaga Kerja Prov. Jawa Timur.

Tindak lanjut:

Menakertrans bersurat kepada Mendagri Nomor 110/MEN/SJ-OKP/IV/2007 tanggal 19 April 2007 perihal Pengelolaan BP2TKI, BLKI serta Balai Hiperkes dan KK Surabaya, agar Mendagri segera menyelesaikan status hukum 3 Satker dimaksud.

- i. Surat Mendagri kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 061/1911/SJ tanggal 16 Agustus 2007 perihal Penyerahan Kembali BLKI, BP2TKI, dan Balai Hiperkes Surabaya. Agar Pemprov Jawa Timur melakukan revisi Perda Nomor 35 Tahun 2000 dan segera menyelesaikan status P3D.

Substansi:

Tidak ada tindak lanjut dari Gubernur Jawa Timur.

- j. Surat Menakertrans kepada Mendagri Nomor: B.357/MEN/LATTAS-LS/XI/2007 tanggal 22 November 2007 perihal Penyerahan Kembali BLKI, BP2TKI, dan Balai Hiperkes Prov. Jawa Timur, tindak lanjut penyelesaian penyerahan kembali 3 Satker dimaksud.

Substansi:

Tidak ada tindak lanjut dari Mendagri

- k. Surat Menakertrans kepada Mendagri Nomor: B.32/MEN/SJ-OKP/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 perihal Penyerahan Kembali BLKI, BP2TKI, dan Balai Hiperkes dan KK Surabaya kepada Pemerintah, agar Mendagri mengingatkan kembali Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan koordinasi dengan DPRD untuk pengembalian status dan P3D.

Substansi:

Tidak ada tindak lanjut dari Mendagri

- l. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Mendagri Nomor: 118/6319/011/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Penyerahan BLKI, BP2TKI, dan Balai Hiperkes Surabaya.

Substansi surat:

Balai-balai tersebut tetap dikelola Pemprov Jawa Timur, beserta tanah dan bangunan yang digunakan untuk BLKI dan Balai Hiperkes.

- m. Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 118/4580/050/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Dukungan DPRD Prov. Jawa Timur, agar aset diserahkan ke Pemprov. Jawa Timur.
- n. Pada 2009 dilaksanakan pertemuan antara Ditjen Otda, Depnakertrans, Gubernur Jawa Timur, dan DPRD Surabaya, namun belum ada kesepakatan.
- o. Pada tanggal 7 Maret 2017 dilaksanakan pertemuan Tim Sekretariat Kelompok Kerja DPOD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan narasumber Dr Halilul Khairi, M.Si Kemendagri (Pusat Studi Otonomi Daerah, IPDN).

Progress:

Berdasarkan aspek kewenangan, maka Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur masing-masing memiliki kewenangan dan legalitas atas kelembagaan BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Surabaya, sehingga permasalahan BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Surabaya bukan merupakan permasalahan kewenangan tetapi merupakan masalah penggunaan aset Kemnaker oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk itu Tim Pakar DPOD akan menyusun kajian mengenai permasalahan BLK Surabaya dan Balai Hiperkes Surabaya untuk memberikan pertimbangan terhadap urgensi Kemnaker maupun urgensi pemerintah Provinsi dalam pengelolaan aset kedua balai tersebut.

- p. Pada tanggal 10 Juli 2017 dilaksanakan rapat Tim Teknis Sekretariat DPOD Bidang Pemerintahan, Sekretaris Jenderal Kemnaker dan

Pejabat Eselon I terkait yang menjadi anggota tim teknis Pemprov. Jatim.

Progress Pada pertemuan tersebut disepakati berita acara yang memuat:

- i. Aset dan pengelolaan BLK Surabaya diserahkan oleh Kemnaker kepada Pemprov. Jawa Timur dengan alasan mendukung pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah memiliki kewenangan di bidang pelatihan kerja dan karena Pemprov. Jatim memiliki kemampuan untuk mengelola dan memajukan BLK Surabaya.
 - ii. Sedangkan penyelesaian status kelembagaan Balai Hiperkes Surabaya dinyatakan akan dibahas lebih lanjut.
- q. Pada tanggal 15 Agustus 2017, Menaker bersurat kepada Mendagri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Nomor B.221/M.NAKER/SJOKP/VIII/2017 perihal Pengelolaan Aset dan Status Kewenangan BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Surabaya yang memuat:
- 1) Kemnaker menyetujui untuk menyerahkan aset dan pengelolaan BLKI Surabaya kepada Pemprov. Jatim.
 - 2) Kemnaker menyatakan bahwa untuk aset Balai Hiperkes Surabaya tidak diserahkan kepada 15 Agustus 2017 Pemprov. Jatim karena Balai dimaksud masih sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengembangan, standardisasi keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

Tindak lanjut:

Pada tanggal 31 Agustus 2017. Gubernur Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan dengan bersurat kepada Menaker melalui surat nomor 028/4138/108.1/2017 perihal Pengelolaan Aset dan Kewenangan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya, yang memuat permohonan agar tanah, bangunan, dan aset, serta peralatan uji dihibahkan kepada Pemprov. Jatim.

- r. Pada tanggal 29 September 2017, Menteri Dalam Negeri bersurat kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 563/4571/SJ tanggal 29 September 2017 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Fungsi Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, K3 Surabaya yang berisi opsi kepada Kemnaker untuk dapat memanfaatkan Balai Hiperkes Surabaya atau menyerahkan aset tersebut kepada Pemprov. Jatim, dan segera menyelesaikan sengketa tersebut.

Progress:

Dilaksanakan pembahasan pada tanggal 1 Maret 2018, Kemnaker, Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, BKN mengadakan koordinasi yang menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat proses pengalihan pengelolaan Balai Hiperkes Surabaya dan mempersiapkan pengalihan SDM Balai Hiperkes Surabaya kepada pemerintah pusat.

- s. Pada tanggal 13 April 2018 dilaksanakan pembahasan substansi Berita Acara Serah Terima Status Kelembagaan BLKI Surabaya dan Balai Hiperkes Surabaya yang dihadiri oleh unsur Kemendagri, Setwapres, Kemnaker dan Pemprov Jawa Timur.

Substansi:

Kemnaker tetap menyatakan bahwa BLKI dihibahkan ke Pemprov. Jatim, namun untuk Balai K3 tetap di pusat.

- t. Pada tanggal 6 Juni 2018 dilaksanakan rapat di ruang rapat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, DPOD, Set. Wapres, Kemnaker, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim. (Kemnaker: penyelesaian status BLKI Surabaya dan Balai K3 Surabaya tidak disarankan untuk dibahas hingga sidang DPOD yang dipimpin Wapres, Kemnaker akan membentuk UPTP untuk melaksanakan kewenangannya dalam penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk wilayah kerja regional di Indonesia Timur menggunakan sebagian fasilitas gedung UPT K3 Surabaya/BLKI Surabaya).
- u. Pada tanggal 6 September 2018 dilaksanakan rapat Pokja Sekretariat DPOD bidang Pemerintahan di Hotel Swiss Bell dihadiri oleh DPOD, Pemprov Jatim, Set. Wapres, Setneg, Kemnaker, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan. (intinya dari Kemnaker menyatakan bahwa aset Balai K3 Surabaya adalah Aset milik Kemnaker, maka pihak yang pinjam pakai adalah Pemprov meminjam dari Kemnaker).

Poin kesimpulan:

Menindaklanjuti berita acara tanggal 6 Juni 2018:

- i. Agar menyiapkan legal drafting BAST yang melibatkan Kemnaker, Pemprov Jatim dan melengkapi data dan dokumen pendukung.
- ii. Menyiapkan rencana aksi pemanfaatan Balai K3 Surabaya selama 3 Tahun ke depan, sehingga diharapkan masing-masing pihak (Kemnaker dan Pemprov) mempunyai fasilitas dan kapasitas yang setara.
- iii. Sikap Kemnaker:
 - 1) Kemnaker akan menyerahkan aset BLKI Surabaya kepada Pemprov Jatim.

- 2) Menegaskan bahwa aset Balai K3 Surabaya itu masih aset Kemnaker maka pihak yang pinjam pakai adalah pihak Jatim yang meminjam dari Kemnaker.
- v. Pada tanggal 29 Mei 2019 di Surabaya telah dilaksanakan pertemuan yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur dan dihadiri Tim Fasilitas DPOD, Set. Wapres, dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kemnaker tidak diikutsertakan).

Substansi berita acara sebagai berikut:

- i. Kemnaker menyetujui untuk menyerahkan aset BLKI Surabaya (tanah seluas 46.570 m² dan bangunan sebanyak 75 unit beserta peralatan mesin) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- ii. Balai Hiperkes/K3 Surabaya yang merupakan aset Kemnaker dapat digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan format pinjam pakai dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- iii. Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menghibahkan tanah seluas ± 1 ha kepada Kemnaker guna dibangun UPTP Balai K3 di Surabaya.
- iv. Setelah Kemnaker membangun UPTP Balai K3 di Surabaya pada lahan pengganti yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka aset Balai Hiperkes/K3 milik Kemnaker pada lokasi yang disengketakan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- w. Pada tanggal 2 September 2019 dilaksanakan pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dihadiri oleh Kepala Barenbang, Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur, Plt. Biro Keuangan, perwakilan Biro Hukum, Biro Umum, Ditjen Binalattas, Direktorat Bina K3, serta Tim DPOD Kementerian Dalam Negeri dan Asdep Polhukam Set. Wapres yang menyampaikan berita acara sekaligus opsi Gubernur Jawa Timur sebagaimana angka 2 di atas.

Tindak Lanjut:

Arahan Bapak Menteri Ketenagakerjaan setelah bertemu dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Nomor B.2916/OT.00.02/X/2019 tanggal 1 Oktober dengan substansi final sebagai berikut:

- i. Kemnaker akan menyerahkan aset dan pengelolaan BLKI Surabaya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Kemnaker sudah memiliki UPTP Bidang Pelatihan Kerja di Provinsi Jawa Timur.
- ii. Aset dan pengelolaan Balai Hiperkes/K3 Surabaya tetap di bawah Kemnaker dikarenakan jumlah UPTP Balai Hiperkes/K3 saat ini

masih sangat terbatas (5 UPTP) dan di wilayah Provinsi Jawa Timur belum terdapat UPTP Balai Hiperkes/K3.

- x. Pada tanggal 03 Mei 2021 dilaksanakan pertemuan secara virtual melalui zoom meeting yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker RI dan dihadiri oleh Asisten Deputy Sekretariat Wakil Presiden RI, Dirjen Binwasnaker dan K3, Plt. Sesditjen Binwasnaker dan K3, Direktur Bina Pengujian K3, Perwakilan dari Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, dan Koordinator Bidang di Lingkungan Direktorat Bina Pengujian K3 dengan kesimpulan bahwa:
 - i. Dari pandangan regulasi sudah selesai.
 - ii. Dalam penyelesaian temuan harus dicari solusinya. Dengan opsi kesepakatan bersama agar dapat diselesaikan sesuai standar akuntansi aturan pemerintah yang benar.
 - iii. Pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti, ketika dilakukan penyelesaian permasalahan ini.
 - iv. Guna meningkatkan pelayanan masyarakat, Kemnaker diminta menyiapkan *roadmap* terkait pengembangan Balai untuk itu bila *draft roadmap* sudah selesai akan disampaikan kepada Pak Iqbal.
 - v. Dalam pembagian kewenangan dan tugas harus sesuai dengan koridor regulasi, yaitu UU. Ada urusan yang disentralisasikan dan ada urusan yang bersifat konkuren.
 - vi. Optimal kan berbagai cara pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bilateral dan jangan sampai dibawa ke sidang DPOD
- y. Pada tanggal 4 Oktober 2021, disampaikan surat dari Menteri Ketenagakerjaan RI terkait Permohonan Dukungan Revitalisasi UPTP Balai K3 Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan penguatan fungsi standarisasi, pengkajian, pengujian pengendalian serta pembinaan bidang K3 bagi UPTD Balai K3.
- z. Pada tanggal 16 Februari 2024, disampaikan surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 nomor 5/28/UM.01.03/II/2024 perihal Permohonan Peminjaman Ruang Kerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo sebagai dasar adanya rencana perpindahan Balai Hiperkes dan KK Surabaya ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo.
- aa. Pada tanggal 02 April 2024, diadakan rapat Tindak Lanjut Pengelolaan Aset dan Persiapan Relokasi Balai Hiperkes Keselamatan Kerja (K2) Surabaya dengan hasil akan dilakukan inventarisasi aset BMN sebagai langkah awal proses perpindahan Balai Hiperkes dan KK Surabaya ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo.

- bb. Pada tanggal 13 - 17 Mei 2024, diadakan inventarisasi aset BMN Balai Hiperkes dan KK Surabaya dan hasilnya telah disampaikan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 pada tanggal 27 Mei 2024. Inventarisasi tersebut dituangkandalam 3 (tiga) macam berita acara sebagai berikut:
 - i. Berita acara nomor 5/097/UM.03.02/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal inventarisasi BMN yang sudah jelas diketemukan dan milik Kemnaker R.I sebanyak 1.132 NUP.
 - ii. Berita acara nomor 5/098/UM.03.02/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal inventarisasi BMN yang belum ditemukan.
 - iii. Berita acara nomor 5/099/UM.03.02/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal inventarisasi BMN yang double pencatatan antara BMN Kemnaker R.I dan BMN UPT K2 Disnakertrans Prov. Jawa Timur sebanyak 3 NUP, berupa 1 NUP Tanah dan 2 NUP Gedung & Bangunan.
- cc. Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama dengan Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan dan BMN, Biro Umum telah melakukan rapat dengan Pemerintahan Jawa Timur (Disnakertrans Jawa Timur, Balai UPTD Provinsi Jawa Timur, BPKAD dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur) dan menghasilkan surat kesepakatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 5/601/HM.02.01/IX/2024/000.2.1/1969/108.1/2024 tentang penyelesaian permasalahan BMN Hiperkes K2 Surabaya. Inti dari kesepakatan itu ialah menyatakan bahwa aset Kemnaker yang di catat juga oleh Balai UPTD Jawa Timur ialah benar milik Kemnaker. Sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka UPTD Provinsi Jawa Timur akan melakukan koreksi pencatatan pada Aplikasi SIMBADA.
- dd. Telah dilakukan penambahan pegawai outsourcing, yaitu satpam dan receptionist serta petugas kebersihan dan telah dilaksanakan Penataan ruangan di Lt. 1-3 untuk Balai K3 Surabaya sesuai dengan koordinasi dengan UPT Keselamatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Juli 2025
- ee. Pada akhir bulan Desember 2025, UPTD Disnakertrans Provinsi Jawa Timur resmi pindah dari kantor Balai Hiperkes K2 Surabaya. Sehingga penguasaan aset BMN baik tanah, gedung dan bangunan maupun peralatan dan mesin secara utuh dikuasai kembali oleh Balai Hiperkes K2 Surabaya.
- gg. Demi meningkatkan pelayanan dan eksistensi Balai Hiperkes K2 Surabaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka pada bulan Januari 2026 telah dilakukan acara reaktivasi Balai K3 Surabaya yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan serta Pejabat di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Adanya kegiatan reaktivasi Balai K3 Surabaya sekaligus ini menandai selesainya permasalahan aset di Balai Hiperkes K2 Surabaya.

2. Aset Balai K3 Jakarta

Kronologis sengketa Aset Balai K3 Jakarta

- a. Tahun 1994, ada serah terima Gedung Balai K3 kepada Pemerintah Provinsi DKI karena ada perubahan organisasi, sarana dan fasilitas, dan personil;
- b. Tahun 2004, Sekjen Kemnaker bersurat kepada Pemprov DKI untuk memindahkan Pusat Hiperkes milik DKI ke tempat lain dalam rangka pengembangan sarfas pusat K3 Kemnaker, lalu Pemprov DKI menanggapi surat tersebut dengan mengadakan rapat;
- c. Tahun 2006, ada serah terima dari Kemnaker kepada Pemprov DKI berupa mobil dan Genset.
- d. Tahun 2018, Dit. Bina K3 mengirimkan surat kembali kepada Pemprov DKI dikarenakan adanya temuan BPK karena Aset dikuasai pihak lain.
- e. Dit. Bina K3 menawarkan adanya surat pinjam pakai untuk tanah dan hibah aset, namun Pemprov DKI menanggapi dengan meminta tanah dan aset semuanya dihibahkan.
- f. Pada tanggal 06 Januari 2022 telah dilakukan komunikasi dan koordinasi terkait penyelesaian aset tersebut. Hasil dari koordinasi tersebut sepakat bahwa bangunan kantor yang dimiliki oleh Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja Pemprov DKI Jakarta seluas 509 m² terdiri dari 4 lantai yang berdiri diatas tanah milik Balai K3 Jakarta sesuai sertifikat Hak Pakai No.527 atas nama Departemen Tenaga Kerja RI akan dihibahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Dan akan dimanfaatkan sebagai Pusat Pengembangan Kompetensi Personil K3 dan Pengembangan Laboratorium Pengujian K3, Kalibrasi alat K3 dan Laboratorium Uji Coba Metode dan Standar K3.
- g. Berdasarkan hal tersebut, telah disepakati antara pemprov DKI dan Kemnaker RI (Biro Umum dan Ditjen Binwasnaker) akan dilakukan serah terima gedung pusat hiperkes DKI Jakarta ke Kemnaker. Surat permohonan hibah gedung dari Sekretariat Jenderal Kemnaker sesuai dengan Nomor: B-I/253/UM.03.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 telah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

F.10. Pelaksanaan Inventarisasi BMN Dengan Kartu Identitas Barang (KIB) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025

Pelaksanaan Inventarisasi BMN

Dalam rangka memperkuat Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan layanan yang cepat, transparan dan akuntabel, salah satu capaian kinerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu adanya peningkatan capaian Indeks Pengelolaan Aset yang merupakan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan untuk mengukur tingkat perbaikan pengelolaan BMN di seluruh Kementerian/ Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan penatausahaan yang meliputi: Pembukuan; Inventarisasi; dan Pelaporan, dan berdasarkan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan dan pemeriksaan Manajemen Aset yang selalu menjadi temuan berulang adalah dengan Inventarisasi BMN yang harus dilakukan oleh Kemnaker.

Pelaksanaan inventarisasi Kementerian Ketenagakerjaan sejalan dengan dasar hukum, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Menteri selaku Pengguna Barang melakukan inventarisasi atas BMN yang berada dalam penguasannya paling sedikit sekali dalam 5 tahun untuk BMN;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 3) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-1/628/UM.03.03/XII/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan inventarisasi BMN bertujuan dari agar seluruh BMN dapat tertata dengan baik, tersedianya informasi akurat antara perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan serta pengamanan pada setiap satuan kerja/unit kerja, serta mendukung validitas nilai asset dalam Laporan BMN dan Laporan Keuangan.

Inventarisasi BMN dilaksanakan dalam 2 tahap selama tahun 2025 – 2026. Tahap pertama (2025) ini dilakukan terhadap BMN Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi: tanah; gedung dan bangunan; bangunan air; alat angkutan bermotor; dan alat besar. Sedangkan Tahap Kedua (2026) dilakukan terhadap BMN non KIB, meliputi: peralatan mesin; ATB dan Aset Tetap Lainnya.

A. Data Awal BMN

Data pelaksanaan Inventarisasi BMN yang memiliki KIB Tahun 2025 adalah data SIMAN pada tanggal 9 Mei 2025.

Tabel 433 Rincian saldo BMN KIB
per 31 Desember 2025

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN
1	302	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	1.645	295.116.689.338
2	301	ALAT BESAR	1.046	85.317.394.615
3	319	ALAT PERSENIJATAAN	5	1.720.670.888
4	501	BANGUNAN AIR	106	33.139.358.031
5	401	BANGUNAN DAN GEDUNG	1.224	3.617.273.448.668
6	401	RUMAH NEGARA	426	60.803.678.262
7	201	TANAH	108	7.833.268.926.054
TOTAL			4.560	11.926.640.165.856

Tabel 434 Rincian BMN KIB berdasarkan kuantitas - Unit Eselon I
per 31 Desember 2025

KD Es-1	KETERANGAN	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	ALAT BESAR	ALAT PERSENIJATAAN	BANGUNAN AIR	BANGUNAN DAN GEDUNG	RUMAH NEGARA	TANAH	Grand Total
02601	Setjen	265	106			57	36	20	484
02602	Inspektorat Jenderal	14							14
02604	Ditjen Binapenta dan PKK	146	57		13	71	37	4	328
02605	Ditjen PHI & Jamsos	64	2						66
02608	Ditjen Binwasnaker dan K3	177	177			33	1	7	395
02611	Barenbang	39							39
02613	Ditjen Binalavotas	940	704	5	93	1.063	352	77	3.234
Grand Total		1.645	1.046	5	106	1.224	426	108	4.560

Tabel 435 Rincian BMN KIB berdasarkan Nilai Perolehan - Unit Eselon I
per 31 Desember 2025

KD Es-1	KETERANGAN	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	ALAT BESAR	ALAT PERSENIJATAAN	BANGUNAN AIR	BANGUNAN DAN GEDUNG	RUMAH NEGARA	TANAH	Grand Total
02601	Setjen	37.185.523.982	16.021.639.554			729.103.141.588	17.592.808.825	3.115.438.716.000	3.915.341.829.949
02602	Inspektorat Jenderal	3.751.183.183							3.751.183.183
02604	Ditjen Binapenta dan PKK	32.545.211.523	371.418.125		989.854.300	99.767.992.450	5.302.836.048	267.431.035.000	406.408.347.446
02605	Ditjen PHI & Jamsos	9.897.317.932	15.840.000						9.913.157.932
02608	Ditjen Binwasnaker dan K3	52.390.243.900	6.559.011.123			131.653.661.330	595.532.000	336.695.750.000	527.894.198.353
02611	Barenbang	5.122.983.000							5.122.983.000
02613	Ditjen Binalavotas	154.224.225.818	62.349.485.813	1.720.670.888	32.149.503.731	2.656.748.653.300	37.312.501.389	4.113.703.425.054	7.058.208.465.993
Grand Total		295.116.689.338	85.317.394.615	1.720.670.888	33.139.358.031	3.617.273.448.668	60.803.678.262	7.833.268.926.054	11.926.640.165.856

B. Data Hasil Inventarisasi

Berdasarkan hasil pengecekan fisik atas kertas kerja inventarisasi dapat disampaikan data sebagai berikut:

a. Daftar Barang Hasil Inventarisasi Aset Sengketa

Berdasarkan hasil Inventarisasi ditemukan aset sengketa (dikuasai oleh masyarakat) sebanyak 1 unit yang tercatat pada Biro Umum berupa

tanah yang terletak di Jl. Pisangan Lama, Jakarta Timur dengan luas tanah 3.440 m2 dengan nilai perolehan Rp25 Miliar SHP Nomor 325.

- b. Rekap data atas Hasil Inventarisasi dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 436 Rekap Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) KIB
Kementerian Ketenagakerjaan

No	Kode Eselon	Nama Eselon	Total			Belum Sensus	Kondisi			Tidak Ditemukan	Berlebih	Sengketa	Salah Kodeifikasi
			Total Korwil	Total Satker	Total BMN		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat				
1	02601	SEKRETARIAT JENDERAL	1	4	484	-	362	7	61	54	-	1	113
2	02602	INSPEKTORAT JENDERAL	1	1	14	-	14	-	-	-	-	-	2
3	02604	DITJEN BINAPENTA DAN PKK	69	4	335	-	239	17	31	41	7	-	79
4	02605	DITJEN PHI & JAMSOS	24	1	66	-	48	-	-	18	-	-	13
5	02608	DITJEN BINWASNAKER DAN K3	33	7	402	-	151	7	83	154	7	-	100
6	02611	BARENBAANG	1	1	39	-	30	6	3	-	-	-	1
7	02613	DITJEN BINALAVOTAS	60	26	3.272	-	2.563	113	332	226	38	-	1.523
GRAND TOTAL			189	44	4.612	-	3.407	150	510	493	52	1	1.831

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi BMN pada Pengguna Barang Nomor 1/143/UM.03.02/XII/2025 di dapatkan rincian sebagai berikut:

NO	KODE-E1	UNIT-E1	MENURUT ADMINISTRASI		MENURUT INVENTARISASI BMN		SELISIH ADMINISTRASI DENGAN INVENTARISASI BMN	
			QTTY	HARGA BARANG	QTTY	HARGA BARANG	QTTY	HARGA BARANG
1	2601	Setjen	484	3.915.341.829.949	430	3.911.531.552.993	54	3.810.276.956
2	2602	Inspektorat Jenderal	14	3.751.183.183	14	3.751.183.183	0	-
3	2604	Ditjen Binapenta dan PKK	328	406.408.347.446	294	401.575.756.854	34	4.832.590.592
4	2605	Ditjen PHI & Jamsos	66	9.913.157.932	48	9.315.360.181	18	597.797.751
5	2608	Ditjen Binwasnaker dan K3	395	527.894.198.353	248	560.143.183.972	147	32.248.985.619
6	2611	Barenbang	39	5.122.983.000	39	5.122.983.000	0	-
7	2613	Ditjen Binalavotas	3234	7.058.208.465.993	3046	7.016.921.624.487	188	41.286.841.506
Grand Total			4.560	11.926.640.165.856	4.119	11.908.361.644.670	441	18.278.521.186

Tabel 437 Sandingan Data Kondisi Aset Sebelum dan Sesudah Inventarisasi

Nama Eselon	Kondisi Setelah Inventarisasi		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
02601. Setjen	362	7	61
02602. Inspektorat Jenderal	14	0	0
02604. Ditjen Binapenta dan PKK	239	17	31
02605. Ditjen PHI & Jamsos	48	0	0
02608. Ditjen Binwasnaker dan K3	151	7	83
02611. Barenbang	30	6	3
02613. Ditjen Binalavotas	2563	113	332
Grand Total	3407	150	510

Tabel 438 Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan

UNIT-E1	Jenis BMN	TIDAK DITEMUKAN			Grand Total
		Penghapusan	Penelusuran	Double Catat	
02601. Setjen	Alat Angkutan Bermotor	47	5	-	52
	Bangunan Dan Gedung	2	-	-	2
Total		49	5	-	54
02604. Ditjen Binapenta dan PKK	Alat Angkutan Bermotor	22	14	-	36
	Alat Besar	-	1	-	1
	Bangunan dan Gedung	-	3	-	3
	Rumah Negara	-	1	-	1
Total		22	19	-	41
02605. Ditjen PHI & Jamsos	Alat Angkutan Bermotor	11	5	-	16
	Alat Besar	-	2	-	2
Total		11	7	-	18
02608. Ditjen Binwasnaker dan K3	Alat Angkutan Bermotor	5	21	-	26
	Alat Besar	58	70	-	128
Total		63	91	-	154
02613. Ditjen Binalavotas	Alat Angkutan Bermotor	44	33	-	77
	Alat Besar	27	68	4	99
	Bangunan Air	-	2	-	2
	Bangunan dan Gedung	22	18	2	42
	Rumah Negara	2	4	-	6
Total		95	125	6	226
Grand Total		240	247	6	493

Tabel 439 Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Berlebih

UNIT-E1	Jenis BMN	Barang Berlebih
02604. Ditjen Binapenta dan PKK	Alat Angkutan Bermotor	6
	Bangunan dan Gedung	1
Total		7
02608. Ditjen Binwasnaker dan K3	Alat Angkutan Bermotor	6
	Bangunan dan Gedung	1
Total		7
02613. Ditjen Binalavotas	Alat Angkutan Bermotor	6
	Alat Besar	2
	Bangunan Air	3
	Bangunan dan Gedung	23
	Mesin Peralatan Non Tik	4
Total		38
Grand Total		52

Tabel 440 Daftar Barang Hasil Inventarisasi Salah Kodefikasi

UNIT ESELON I	JENIS BMN	KODEFIKASI		JUMLAH
		1.Sudah Sesuai	2.Belum Sesuai	
02601. Setjen	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	200	13	213
	ALAT BESAR	12	94	106
	BANGUNAN DAN GEDUNG	49	6	55
	RUMAH NEGARA	36	-	36
	TANAH	20	-	20
02601. Setjen Total		317	113	430
02602. Inspektorat Jenderal	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	12	2	14
02602. Inspektorat Jenderal Total		12	2	14
02604. Ditjen Binapenta dan PKK	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	107	3	110
	ALAT BESAR	13	43	56
	BANGUNAN AIR	12	1	13
	BANGUNAN DAN GEDUNG	37	31	68
	RUMAH NEGARA	35	1	36
	TANAH	4	-	4
02604. Ditjen Binapenta dan PKK Total		208	79	287
02605. Ditjen PHI & Jamsos	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	35	13	48
02605. Ditjen PHI & Jamsos Total		35	13	48
02608. Ditjen Binwasnaker dan K3	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	93	58	151
	ALAT BESAR	10	39	49
	BANGUNAN DAN GEDUNG	30	3	33
	RUMAH NEGARA	1	-	1
	TANAH	7	-	7
02608. Ditjen Binwasnaker dan K3 Total		141	100	241
02611. Barenbang	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	38	1	39
02611. Barenbang Total		38	1	39
02613. Ditjen Binalavotas	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	330	533	863
	ALAT BESAR	108	497	605
	ALAT PERSENJATAAN	-	5	5
	BANGUNAN AIR	43	48	91
	BANGUNAN DAN GEDUNG	594	427	1.021
	RUMAH NEGARA	338	8	346
	TANAH	72	5	77
02613. Ditjen Binalavotas Total		1.485	1.523	3.008
Grand Total		2.236	1.831	4.067

Tabel 435 BMN Sengketa KL

NO	UNIT-E1	KODE BARANG	NAMA BARANG	QTTY	NILAI BARANG
1	Sekretariat Jenderal	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	1	25.000.200.000
Grand Total				1	25.000.200.000

C. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Memorandum Nomor: 1/1105/UM.03.02/XII/2025 perihal tindak lanjut Hasil Inventarisasi Barang Nilik Negara (BMN) Kartu Identitas Barang (KIB) Tahun 2025 (terlampir), sebagai pedoman dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil inventarisasi.

Ruang lingkup dalam pelaksanaan tindak lanjut meliputi tindak lanjut hasil inventarisasi kelompok BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. BMN Kondisi Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat;
2. BMN Tidak Ditemukan yang terbagi dalam kategori;
 - a. Proses Pemindahtanganan
 - b. Penelusuran lebih lanjut
 - c. Dobel catat.
3. BMN Berlebih;
4. BMN dalam Sengketa;
5. BMN Salah Kodefikasi.

F.11 Likuidasi Satker Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

1. Likuidasi Satker Dekonsentrasi pada Ditjen Binapenta dan PKK

Likuidasi pada 34 Satker Dekonsentrasi Tahun 2024 Ditjen Binapenta dan PKK berdasarkan Surat Keputusan Nomor 110/HK.03.01/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Likuidasi Entitas Akuntansi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja. Ditjen Binapenta dan PKK telah menutup seluruh rekening Satuan Kerja Penerima Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 (34 rekening) yang merupakan bagian dari tahapan proses

*Likuidasi Satker
Dekonsentrasi*

Likuidasi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat 34 Satker Dekonsentrasi yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi yaitu:

NO	KODE SATKER	NOMENKLATUR
1	026.04.019041	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2	026.04.069074	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD
3	026.04.189079	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
4	026.04.219057	Dinas Nakertrans Provinsi Maluku
5	026.04.289066	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
6	026.04.319056	Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
7	026.04.360025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
8	026.04.229063	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
9	026.04.159065	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan
10	026.04.029098	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
11	026.04.039093	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
12	026.04.049055	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. D I Yogyakarta
13	026.04.059109	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur
14	026.04.079071	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
15	026.04.089079	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
16	026.04.099261	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
17	026.04.109067	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
18	026.04.119073	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
19	026.04.129067	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
20	026.04.139071	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
21	026.04.149069	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

22	026.04.169068	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
23	026.04.179064	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara

Satker Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi

NO	KODE SATKER	NOMENKLATUR
24	026.04.199070	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
25	026.04.209067	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara
26	026.04.239076	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara Barat
27	026.04.249093	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara timur
28	026.04.259061	Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Provinsi Papua
29	026.04.269068	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
30	026.04.299339	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
31	026.04.309143	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung
32	026.04.329051	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
33	026.04.339051	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat
34	026.04.340026	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

2. Likuidasi Satker Dekonsentrasi pada Ditjen Binwasnaker dan K3

Sehubungan dengan penyederhanaan DIPA Tahun Anggaran 2025 dimana satker Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang semula terdiri dari 4 (empat) satker dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan pada setiap Dinas Provinsi menjadi 1 (satu) satker dekonsentrasi, sehingga mengakibatkan perubahan identitas Entitas Akuntansi yang berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi satu Entitas Akuntansi baru, maka perlu dilakukan likuidasi terhadap satker dekonsentrasi tahun 2024. Untuk melakukan proses likuidasi maka, Satker Likuidasi diharuskan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban, diantaranya aset harus sudah tidak bersaldo.

Menindaklanjuti hal tersebut Ditjen Binwasnaker dan K3 telah mengirimkan Surat Nomor 5/ 717/UM.03.04/VI/2025 tanggal 21 Juli 2025

perihal Penarikan Aset Barang Milik Negara (BMN) Yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi.

Pada Ditjen Binwasnaker dan K3 terdapat Satker dekonsentrasi yang masih bersaldo, antara lain:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, senilai Rp88.250.000 berupa:

Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
3050105028	1	Overhead Projector	Toshiba TDPS8 Limen 2000	2006-03-28	20.000.000
3060101048	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2006-03-28	1.400.000
3100102001	1	P.C Unit	-	2006-03-28	4.600.000
3100102003	1	Note Book	Toshiba	2008-12-16	16.500.000
3100102003	2	Note Book	-	2005-06-19	12.850.000
3100102003	3	Note Book	-	2005-06-19	12.850.000
3100102003	4	Note Book	Toshiba M 50	2006-03-28	17.850.000
3100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Ink Jet	2005-06-19	600.000
3100203003	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Ink Jet	2005-06-19	600.000
3100203003	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Deskjet 7260	2006-03-28	1.000.000
Grand Total					88.250.000

- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, senilai Rp148.428.500, berupa:

Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
3050101004	1	Mesin Ketik Listrik	MESIN KETIKELEKT	2006-12-31	6.325.000
3050105048	1	LCD Projector/Infocus	LCD INFOCUS	2006-12-31	46.750.000
3050201009	1	Meja Komputer	MEJA KOMPUTER	2006-12-31	495.000
3050206019	1	Stabilisator	STABILIZER	2006-12-31	632.500
3050206021	1	Tustel	CAMERA DIGITAL	2006-12-31	7.150.000
3060101048	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS 600	2006-12-31	561.000
3100102001	1	P.C Unit	KOMPUTER PC	2006-12-31	11.550.000
3100102002	1	Lap Top	LAPTOP	2006-12-31	24.750.000
3100102002	2	Lap Top	LAPTOP	2006-12-31	24.750.000
3100102002	3	Lap Top	LAPTOP	2006-12-31	24.750.000
3100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER	2006-12-31	715.000
Grand Total					148.428.500

- 3) Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, senilai Rp315.198.000, berupa:

Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
3050101002	3	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		2007-12-31	2.800.000
3050101002	4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		2007-12-31	2.800.000
3050104001	2	Lemari Besi/Metal		2007-12-31	3.900.000
3050104002	3	Lemari Kayu		2007-12-31	2.900.000
3050104002	4	Lemari Kayu		2007-12-31	1.900.000
3050104005	3	Filing Cabinet Besi		2007-12-31	750.000
3050104005	4	Filing Cabinet Besi		2007-12-31	750.000
3050105045	2	Penangkal Petir		2007-12-31	10.000.000
3050105048	3	LCD Projector/Infocus		2005-07-06	18.500.000
3050105048	4	LCD Projector/Infocus		2007-12-31	18.500.000
3050201004	2	Kursi Kayu		2005-07-06	2.500.000

- 4) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp111.250.000 berupa Lemari Kayu, Filling Kabinet kayu, meja kerja kayu, kursi besi/metal, kipas angin, handycam, TV Monitor, PC Unit, Laptop, Notebook, CPU, Printer.
- 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT senilai Rp6.000.000 berupa 1 unit Lap top pengadaan tahun 2015.
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung senilai Rp19.750.000 berupa 1 unit Lap top pengadaan tahun 2006.

Progress Likuidasi pada Ditjen Binwasnaker dan K3 sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sudah dilakukan penutupan rekening terhadap 34 satker Dekonsentrasi Tahun 2024 dan telah melakukan Likuidasi pada Satker Dekonsentrasi Tahun 2024.

3. Likuidasi Satker Dekonsentrasi pada Ditjen PHI dan Jamsos

Berdasarkan Nota dinas Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Nomor 1/423/KU.08/VI/2025 tentang Likuidasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian/Lembaga Negara, maka Satuan Kerja Penerima Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 diminta untuk melakukan proses Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tersebut.

Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah membuat Surat Keputusan Nomor 4/889/KU.08.04/VII/2025 tentang Tim Pelaksana Likuidasi Entitas Akuntansi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan telah menutup seluruh rekening Satuan Kerja Penerima Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 (34 rekening) yang merupakan bagian dari tahapan proses Likuidasi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sudah 34 Satker Dekonsentrasi yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NOMENKLATUR
1	026.05.019069	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2	026.05.029010	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
3	026.05.039091	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
4	026.05.049009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. D I Yogyakarta
5	026.05.059110	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa

		Timur
6	026.05.069075	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD
7	026.05.079006	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
8	026.05.089022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
9	026.05.099000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
10	026.05.109012	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
11	026.05.119006	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
12	026.05.129011	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
13	026.05.139014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
14	026.05.149070	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
15	026.05.159187	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan
16	026.05.169010	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
17	026.05.179017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
18	026.05.189008	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
19	026.05.199010	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan
20	026.05.209016	Dinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaProvinsi Sulawesi Tenggara
21	026.05.219006	Dinas Nakertrans Provinsi Maluku
22	026.05.229014	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
23	026.05.239219	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara Barat
24	026.05.249093	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara timur
25	026.05.259013	Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Provinsi Papua
26	026.05.269009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
27	026.05.289006	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
28	026.05.299018	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

		Banten
29	026.05.309020	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung
30	026.05.319014	Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
31	026.05.329004	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
32	026.05.339003	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat
33	026.05.340015	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat
34	026.05.350017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

4. Likuidasi Satker Dekonsentrasi pada Ditjen Binalavotas

Terdapat 34 satuan kerja dekonsentrasi di lingkungan Ditjen Binalavotas yang dilikuidasi dengan rincian 34 satker neracanya sudah nihil dan 7 satuan kerja yaitu Disnakertrans Prov Jawa Barat, Disnakertrans Prov Maluku, Disnakertrans Prov Maluku Utara, Disnakertrans Prov Sulawesi Barat, Disnakertrans Prov Sulawesi Tenggara, Disnaker ESDM dan Transmigrasi Prov Gorontalo dan Disnakertrans Prov Riau sudah dicatat TKTM ke satuan kerja Ditjen Binalavotas.

SATKER DEKONSENTRASI YANG LIKUIDASI				
No	Nama Satker	Neraca Nol	Kewajiban	Aset
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh;	V	V	V
2	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;	V	V	V
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;	V	V	V
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;	V	V	V
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi;	V	V	V
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kep. Riau;	V	V	V
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Riau;	V	V	V
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kep. Bangka Belitung;	V	V	V
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;	V	V	V
10	Dinas Tenaga Kerja Lampung;	V	V	V
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;	V	V	V
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.	V	V	V
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;	V	V	V
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;	V	V	V
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	V	V	V
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta;	V	V	V
17	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;	V	V	V
18	Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB;	V	V	V
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;	V	V	V
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;	V	V	V
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;	V	V	V
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;	V	V	V
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;	V	V	V
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;	V	V	V
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara;	V	V	V
26	Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;	V	V	V
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;	V	V	V
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara;	V	V	V
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;	V	V	V
30	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku;	V	V	V
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;	V	V	V
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat;	V	V	V
33	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua;	V	V	V
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;	V	V	V

F. 12 Aset Kementerian Ketenagakerjaan yang Digunakan Sekolah Rakyat

Aset Kemnaker yang digunakan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam rangka mencapai tujuan program dimaksud maka dilakukan Kolaborasi antar K/L sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui pemberian fasilitas sarana dan prasarana BMN melalui skema Penggunaan Sementara dan Penggunaan Bersama Barang Milik Negara. Adapun dasar pelaksanaan skema dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2634/1/PL.03/07/2025 tanggal 10 Juli 2025, hal Permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara;
3. Nota Dinas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas nomor 2/3888/PR.01.00/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 kepada Plt. Kepala Biro Keuangan dan BMN hal Kesiapan Penggunaan Lokasi UPTP/Satuan Pelayanan/UPTD dalam Rencana Penambahan Lokasi Sekolah Rakyat Rintisan;
4. Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor B-1/548/UM.03.03/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia hal Penggunaan Sementara BMN Kemnaker untuk Sekolah Rakyat;
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementerian Sosial Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial nomor M/27/KS.06/XI/2025 nomor 48 tahun 2025 tanggal 6 November 2025, Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan dukungan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
6. Perjanjian antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Penggunaan Sementara dan Penggunaan Bersama Barang Milik Negara Nomor 36/KS.06/XI/2025 dan Nomor 4730/1/PL.03/11/2025 tanggal 6 November tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan BMN, Skema Sekolah Rakyat dengan mekanisme Penggunaan Sementara dan Peminjaman Bersama atas BMN antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial, dengan Jangka waktu Penggunaan Sementara dan Penggunaan BMN untuk

Sekolah Rakyat adalah selama 6 (enam) bulan.

BMN yang digunakan untuk mendukung Program Sekolah Rakyat mencakup kategori tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin. Khusus untuk kategori Tanah dan Bangunan, proses renovasi dan penyesuaian fasilitas dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR agar memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan untuk Sekolah Rakyat. Adapun rincian BMN adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Sementara:

- a. Tanah dan Bangunan: Sebanyak 49 unit dengan nilai Rp199.458.054.335 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- b. Peralatan dan Mesin: Sebanyak 2.237 unit dengan nilai Rp6.839.608.313 (enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

2. Penggunaan Bersama

- a. Tanah dan Bangunan: Sebanyak 21 unit dengan nilai aset Rp107.192.218.487 (seratus tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- b. Peralatan dan Mesin: Sebanyak 92 unit dengan nilai Rp552.128.220 (lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

BMN berupa tanah dan bangunan tersebut mencakup Asrama Permanen, Gedung Pendidikan, Fasilitas Olahraga, Taman, Lantai Jemur, Tempat Ibadah, Gedung CPMI, Laboratorium, Gedung Parkir, hingga Lahan Terbuka. Pemanfaatan aset tersebut untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Asrama dan Flat/Rumah Susun Permanen (Rusunawa) digunakan sebagai tempat tinggal siswa, guru, pendamping, dan staff sekolah rakyat
2. Gedung bangunan tertutup digunakan sebagai ruang berkumpul, dapur dan ruang makan.
3. Ruangan terbuka digunakan untuk area parkir kendaraan, pelaksanaan upacara, serta kegiatan ekstrakurikuler.
4. Bangunan lantai jemur permanen digunakan khusus untuk keperluan menjemur pakaian.

Tabel 442. Penggunaan Sementara dan Penggunaan Bersama BMN untuk Sekolah Rakyat

No	Keterangan	Rombel Belajar	Penggunaan Sementara				Penggunaan Bersama			
			Tanah & Bangunan		Peralatan & Mesin		Tanah & Bangunan		Peralatan & Mesin	
			Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BB PVP BANDUNG	2 SD 2 SMP	4	24.882.691.993	170	1.074.590.000	1	23.124.400.547	-	-
2	BB PVP BEKASI	2 SMA	4	1.808.801.000	18	122.178.366	6	19.371.338.406	-	-
3	BB PVP MEDAN	2 SD 2 SMA	3	17.857.087.436	-	-	2	4.115.122.093	-	-
4	BB PVP SEMARANG	2 SD 2 SMA	3	7.857.192.000	61	262.884.184	1	656.902.000	-	-
5	BB PVP SERANG	2 SD 2 SMP	5	7.721.655.955	38	219.692.035	2	15.723.929.595	-	-
6	BPVP BANYUWANGI	2 SD 2 SMA	-	-	54	317.422.505	1	26.015.538.228	-	-
7	BPVP KENDARI	2 SD 2 SMA	4	14.694.398.000	137	375.354.195	2	2.474.390.000	9	100.585.500
8	BPVP LOMBOK TIMUR	4 SD	3	35.745.828.941	1371	2.530.384.666	2	98.101.000	-	-
9	BPVP PANGKAJENE KEPULAUAN	Tidak Digunakan								
10	BPVP SAMARINDA	1 SMP 1 SMA	7	34.293.982.886	278	1.446.574.183	1	1.055.651.000	83	451.542.720
11	BPVP SURABAYA	4 SD	1	13.543.437.600	53	162.540.000	1	6.101.548.618	-	-
12	BPVP TERNATE	4 SD	5	5.733.398.000	10	515.20.000	1	435.540.000	-	-
13	SATPEL JAYAPURA	Tanah dan Bangunan dalam Proses Hibah dari Pemprov Jayapura, Perjanjian akan dilakukan langsung antara Kemensos dan Pemprov Jayapura								
14	SATPEL LAMPUNG	2 SD 1 SMP	4	13.543.592.472	-	-	-	-	-	-
15	SATPEL MAMUJU	2 SD 2 SMP	4	11.455.427.452	-	-	-	-	-	-
16	SATPEL SOFIFI	3 SD	2	10.320.560.600	47	276.468.179	2	8.019.757.000	-	-
JUMLAH			49	199.458.054.335	2.237	6.839.608.313	21	107.192.218.487	92	552.128.220

Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat berimplikasi pada timbulnya biaya operasional rutin yang meliputi penggunaan listrik, air, internet, dan jasa kebersihan, dengan pembagian tanggungjawab sebagai berikut:

Tabel 443. Pembebanan Biaya Pemeliharaan Penggunaan Sementara dan Penggunaan Bersama BMN Sekolah Rakyat

NO	NAMA SATKER	PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL PENGGUNAAN BMN SEMENTARA							
		KEMENSOS				KEMNAKER			
		LISTRIK	AIR	INTERNET	KEBERSIHAN	LISTRIK	AIR	INTERNET	KEBERSIHAN
1	BB PVP BANDUNG	√	√	√	√	-	-	-	-
2	BB PVP MEDAN	√	√	√	√	-	-	-	-
3	BPVP KENDARI	√	√	√	√	-	-	-	-
4	BPVP LOTIM	√	-	√	√	-	√	-	-
5	BPVP SAMARINDA	√	√	√	√	-	-	-	-
6	BPVP TERNATE	√	√	√	√	-	-	-	-
7	SATPEL SOFIFI	√	√	√	√	-	-	-	-
8	SATPEL MAMUJU	√	-	√	√	-	√	-	-
9	BB PVP BEKASI	-	-	√	√	√	√	-	-
10	BB PVP SEMARANG	-	-	√	√	√	√	-	-
11	BB PVP SERANG	-	-	√	-	√	√	-	√
12	BPVP BANYUWANGI	-	-	√	√	√	√	-	-
13	BPVP SURABAYA	-	-	√	√	√	√	-	-
14	SATPEL LAMPUNG	-	-	√	√	√	√	-	-

F. 13 Pengungkapan Belanja Barang Bantuan yang Belum Dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban

1. Ditjen Binapenta dan PKK

*Belanja Barang
Bantuan yang Belum
Dilengkapi Laporan
Pertanggungjawaban*

Koreksi Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 pada satker BBPPK Bandung Barat dan satker Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja terjadi akibat adanya implementasi PMK 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa dana yang sudah dikeluarkan dari rekening penampungan dana bantuan/rekening yang sejenis namun belum dipertanggungjawabkan, tidak dicatat di neraca, cukup disajikan dalam daftar dan diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tabel 444 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	SATKER	31 Des 2025	31 Des 2024
1	BBPPK Bandung Barat	2,548,612,233	5,651,714,000
2	Dit. Bina PKK	79,146,449,824	99,886,170,349
	JUMLAH	81,695,062,057	105,537,884,349

A. Belanja Dibayar Dimuka pada BBPPK Bandung Barat

Sesuai PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat disebutkan bahwa belanja bantuan pemerintah/bantuan sosial dan belanja BLU yang diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang yang sudah dikeluarkan dari rekening penyaluran dana bantuan ke rekening penerima manfaat namun belum dipertanggungjawabkan, tidak disajikan dalam Neraca sebagai Beban/Belanja Dibayar Dimuka. Belanja yang belum dipertanggungjawabkan tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam daftar belanja yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga atas nilai BBDM per 31 Desember 2025 sudah dilakukan jurnal koreksi senilai Rp2.548.612.233, daftar belanja yang belum dipertanggungjawabkan atas bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan tahun 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam bentuk daftar penerima bantuan terlampir.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp2.548.612.233 pada Satker BBPPK Bandung Barat. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 445 Perbandingan Saldo Belanja Dibayar DiMuka
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	SATKER	31 Des 2025	31 Des 2024
1	BBPPK Bandung Barat	2,548,612,233	5,651,714,000
	JUMLAH	2,548,612,233	5,651,714,000

Rincian Belanja Dibayar DiMuka (Prepaid) BBPKK Bandung Barat sebagai berikut:

No	Bantuan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bantuan TKM Lanjutan 2022 (LPJ Tidak Lengkap Hasil Uji Petik BPK)	691.214.000			691.214.000		24.614.000	666.600.000
	Jumlah Bantuan Tahun 2022	691.214.000	-	-	691.214.000	-	24.614.000	666.600.000
2	Bantuan TKM Lanjutan 2023 (LPJ Tidak Lengkap Hasil Uji Petik BPK)	73.348.000		4.848.000	68.500.000			68.500.000
3	Bantuan TKM Lanjutan 2023 (LPJ Lengkap)	2.025.000.000		2.025.000.000	-			-
	Jumlah Bantuan Tahun 2023	2.098.348.000	-	2.029.848.000	68.500.000	-	-	68.500.000
4	Bantuan TKM Lanjutan 2024 (LPJ Tidak Lengkap dan LPJ belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023)	-	4.892.000.000		4.892.000.000		3.220.987.767	1.671.012.233
	Jumlah Bantuan Tahun 2024	-	4.892.000.000	-	4.892.000.000	-	3.220.987.767	1.671.012.233
5	Bantuan TKML 2025(belum menyampaikan LPJ per 31 Des 2025)					142.500.000		142.500.000
	Jumlah Bantuan Tahun 2025							142.500.000
	JUMLAH	2.789.562.000	4.892.000.000	2.029.848.000	5.651.714.000	-	3.245.601.767	2.548.612.233

1) TKM Lanjutan Tahun 2022

- Pada Tahun 2022, BBPKK Bandung Barat melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah melalui Program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.870.000.000 yang diberikan kepada 2.058 penerima bantuan dengan satuan Rp15.000.000/orang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022 Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 bahwa Pengelolaan Belanja Bantuan pada Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tidak Memadai karena terdapat LPJ TKM Lanjutan Tahun 2022 yang tidak lengkap sebesar Rp691.214.000.

- c) Hingga 31 Desember 2025 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp24.614.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 446 Pengembalian Uji Petik Kegiatan TKML Tahun 2022

Akun	NTPN	Uraian	Nilai
425912	4C0283CIFTKJ80VR	Pengembalian Temuan LHP Tahun Anggaran 2022 Samsiar dengan id TKM L 31655	1.500.000
425912	CFA8155DFIPLAJ	Pengembalian temuan uji petik TKM L tahun 2022 an. Sherika Putri Abdelia dengan ID TKM 33899	15.000.000
425912	DC2CA6U8F80ILJVO	Pengembalian Temuan TKML TA. 2022 a.n Irfan Ilyas ID TKML 32747	300.000
425912	42E5D1JNG8I88NUT	Pengembalian Temuan TKML TA 2022 a.n Andi Makmur Burhanuddin, S.E. ID TKML 32832	1.314.000
425912	CC5050NA0E0AI3KN	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan pertama) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	750.000
425912	963D87QLV2JI9B6D	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan	500.000
425912	92D5748VVOD055U5	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan kedua) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	750.000
425912	845602G5038AF72B	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan (Cicilan Kedua)	500.000
425912	6D0C63CIFTTLTHVH	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan ketiga) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	750.000
425912	3955661QVDKUG6SJ	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan (Cicilan ke-3)	500.000
425912	ED4D255DFJ5GDR6B	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan keempat) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	750.000
425912	9D42B0NA0EC1FMED	Pengembalian Kekurangan SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2022 a.n Lestari, ID 32560 Kota Medan (Cicilan ke-4)	500.000
425912	3FFE155DFJ8D0HUJ	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan kelima) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	750.000
425912	AECFD0NA0EFDKNRO	Pengembalian TKML TA. 2022 A.n Nurwana ID TKML 29761 Kab. Maros (Cicilan keenam) atas Nomor 116.b/LHP/XVI/05/2023 Tgl 24 Mei 2023	750.000
Jumlah			Rp 24.614.000

Saldo nilai Belanja Dibayar Dimuka untuk bantuan tahun 2022 BBPKK Bandung Barat sebesar Rp666.600.000.

2) TKM Lanjutan Tahun 2023

- a) Pada Tahun 2023, BBPKK Bandung Barat melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah melalui Program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp44.205.000.000 yang diberikan kepada 2.947 penerima bantuan dengan satuan Rp15.000.000/orang.

- b) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 64.b/LHP/XVI/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 bahwa Pengelolaan Bantuan Pemerintah pada Ditjen Binapenta dan PKK belum memadai. Atas temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Itjen Kemnaker melakukan verifikasi bantuan yang belum dipertanggungjawabkan secara lengkap per 31 Desember 2024.
- c) Pada awal tahun 2025 atas Bantuan Pemerintah tahun 2023 yang dilakukan verifikasi dan Uji Petik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdapat temuan hasil Uji Petik yang direkomendasikan untuk pengembalian ke kas negara senilai Rp73.348.000 dan senilai Rp2.025.000.000 dapat diverifikasi kembali.
- d) Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal atas nilai Belanja Barang Dibayar Di Muka sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 6/1/PW.06/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:
- (1) Verifikasi dilakukan terhadap 135 LPJ senilai Rp2.025.000.000.
 - (2) Hasil verifikasi adalah 135 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp2.025.000.000.

Atas nilai tersebut, termasuk di dalamnya pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp4.887.982 dengan rincian:

Tabel 447 Hasil Verifikasi Itjen atas Nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Tanggal	No. Dokumen	Jumlah Dikotor (Rp)
1	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Muh Thamrin M., ID 76797 Kab. Bantaeng	07/11/2024	3EE780NA051TL9DI	100.000
2	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Nurhayati, ID 72295 Kota Makassar	08/11/2024	34CC90NA051UM9MK	12.694
3	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Najmudin, ID 7628 Kab. Lombok Tengah	13/11/2024	B40220NA05238QI6	4.500
4	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Rina Fatmawati, ID 69521 Kabupaten Jayapura	14/11/2024	D1BF448VVFBSQD99	17.499
5	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Ahmad Mudlisahon, ID 71972 Kota Tangerang	18/11/2024	600C13CFKPCUPJF	1.039
6	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Achmad Sholihun, ID 63190 Kab. Purbalingga	22/11/2024	10C4C8U8EV324AB9	15.250
7	Pengembalian Kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n.Rovita Feronika H. Waluyan, ID 74324	25/11/2024	29E3548VVFBSQFMJ9	2.000
8	Pengembalian kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Lanjutan Tahun 2023 a.n.Ade Nugraha ID 68959 Kabupaten Bogor	02/12/2024	77C8B0NA054NR6D	1.585.000
9	Pengembalian kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Lanjutan Tahun 2023 a.n.Satrio ID 71128 Kabupaten Polewali Mandar	04/12/2024	1998A8U8EV5H02HQ	1.000.000
10	Pengembalian kekurangan SPJBSU kegiatan TKML Lanjutan Tahun 2023 a.n.Dwi Satrio Alun Yaqin ID 77402 Kabupaten Bondowoso	07/12/2024	646FD2G4VQ9LALUU	2.150.000
Seloran Belanja Barang Dibayar Dimuka BBPKK Bandung Barat				4.887.982

- e) Atas Belanja Barang Di Muka Tahun 2023 yang direkomendasikan BPK untuk diproses pengembalian ke kas negara sebesar Rp73.348.000, telah dilakukan penyeteroran Pengembalian Temuan Uji

Petik SPJ BSU kegiatan TKML Tahun Anggaran 2023 a.n FFH ID TKML 67771 NTPN 2FBDC1JNFVKNMAV8 tanggal 22 November 2024 sebesar Rp4.848.000.

- f) Saldo nilai Belanja Dibayar Dimuka untuk bantuan tahun 2023 BBPKK Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.500.000.

3) TKM Lanjutan Tahun 2024

- a) Pada Tahun 2024, BBPKK Bandung Barat melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah dengan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan (TKML) dengan nilai bantuan grade A sebesar Rp15.000.000, grade B sebesar Rp12.000.000 dan grade C sebesar Rp10.000.000. Realisasi dari program TKML tersebut sebanyak 3.034 orang senilai Rp36.232.000.000.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2024, telah dilakukan Verifikasi Internal atas Bantuan Pemerintah dengan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan (TKML) dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - (a) LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 2.620 orang senilai Rp31.360.000.000.
 - (b) LPJ yang dinyatakan belum lengkap sebanyak 313 orang senilai Rp3.749.000.000.
 - (c) Belum menyampaikan LPJ sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 101 orang senilai Rp1.143.000.000.

Nilai LPJ belum lengkap (poin (b)) dan yang belum mengirimkan LPJ (poin (c)) disajikan sebagai nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp4.892.000.000.

- c) Pada tanggal 29 Agustus 2025, telah dilakukan Verifikasi Internal atas Bantuan Pemerintah dengan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan (TKML) dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - (a) LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 306 orang senilai Rp3.220.987.767.
 - (b) LPJ yang dinyatakan belum lengkap sebanyak 91 orang senilai Rp419.012.233.

Sehingga nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.671.012.233.

4) TKM Lanjutan Tahun 2025

- a) Pada Tahun 2025, BBPKK Bandung Barat melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah dengan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan (TKML) dengan nilai bantuan Rp 15.000.000. Realisasi atas bantuan tersebut senilai Rp15.000.000.000 yang salurkan untuk 1.000 TKM Lanjutan. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat 10 TKM Lanjutan yang belum menyampaikan LPJ yaitu:

- (1) Terdapat 2 (dua) orang TKM Lanjutan yang daerahnya terdampak bencana banjir yaitu Fauzi Saputra dari Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Rudi Suswendra dari Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat. Keduanya melampirkan bukti dokumentasi Lokasi bencana, namun hanya satu yang melampirkan surat keterangan terdampak bencana dari pemerintah Kab. Aceh Utara. Seluruh dokumen SPJ yang akan dikirim terbawa arus banjir.
 - (2) Terdapat 1 (satu) orang TKM Lanjutan an. Muhammad Sunil Rizaldi yang telah mengembalikan dana bantuannya ke kas negara senilai Rp7.500.000 NTPN 4F0D38JOC7JS8QSB tanggal 10 November 2025 dari total bantuan Rp15.000.000 karena terbukti menggunakan usaha milik orang lain. Sisa kekurangan Rp.7.500.000 telah dikembalikan ke kas negara tanggal 30 April 2026 NTPN 934EC3CIG6OTCMIF akan di catat pada pelaporan Semester I Tahun 2026.
 - (3) Terdapat 7 (tujuh) orang TKM Lanjutan yang murni belum mengupload LPJ Dana Bantuan TKML Lanjutan sampai dengan 31 Desember 2025. BBPKK berupaya untuk menagih LPJ TKM Lanjutan melalui pembentukan Tim Verifikasi LPJ dan melaksanakan monitoring LPJ baik secara online (whatsapp dan gform monev) maupun secara offline mengunjungi TKM Lanjutan ke lokasi untuk mengecek LPJ dan melihat pengelolaan usaha setelah diterimanya bantuan. BBPKK juga telah menagih SPJ ke Penerima bantuan pemerintah. Dari 7 orang tersebut sebanyak 3 orang TKM Lanjutan telah melengkapi LPJnya per tanggal 20 April 2026.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat TKM Lanjutan yang belum menyampaikan LPJ sebesar Rp142.500.000.

Sehingga Saldo Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.548.612.233.

Adapun data *By Name By Address* untuk Biaya Dibayar Dimuka BBPKK Bandung Barat dapat diakses melalui <https://bit.ly/DaftarRincianBBDMBandungBarat>

B. Belanja Dibayar DiMuka pada Direktorat Bina PKK

Saldo Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp79.146.449.824 dan Rp99.886.170.349.

Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) Direktorat Bina PKK berasal dari Program Bantuan Padat Karya dan TKM Pemula Tahun 2022 dan 2023 dimana penerima bantuan menyampaikan LPJ tidak lengkap, LPJ yang telah disampaikan perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal, dan LPJ yang belum disampaikan.

Rincian Belanja Dibayar Di Muka (*Prepaid*) Direktorat Bina PKK

sebagai berikut:

No	Bantuan	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Padat Karya Th 2022 (Hasil Uji Petik BPK)	2,640,650,000.00			2,640,650,000.00
2	Padat Karya Th 2022 (LPJ Verifikasi Itjen)	1,208,540,700.00		34,990,000.00	1,173,550,700.00
3	TKM Pemula Th 2022 (Hasil Uji Petik BPK)	4,090,866,900.00		23,000,000.00	4,067,866,900.00
4	TKM Pemula Th 2022 (LPJ Verifikasi Itjen)	1,727,625,657.00		173,740,935.00	1,553,884,722.00
Jumlah Bantuan Th 2022		9,667,683,257.00	-	231,730,935.00	9,435,952,322.00
5	Padat Karya Th 2023 (Hasil Uji Petik BPK)	7,575,000.00			7,575,000.00
6	Padat Karya Th 2023 (LPJ Verifikasi Itjen)	7,400,000,000.00		1,545,600,000.00	5,854,400,000.00
7	TKM Pemula Th 2023 (Hasil Uji Petik BPK)	75,912,092.00		1,545,454.00	74,366,638.00
8	TKM Pemula Th 2023 (LPJ Verifikasi Itjen)	8,260,000,000.00		1,200,267,554.00	7,059,732,446.00
Jumlah Bantuan Th 2023		15,743,487,092.00	-	2,747,413,008.00	12,996,074,084.00
9	Padat Karya Th 2024 (LPJ Tidak Lengkap dan LPJ belum diterima)	14,200,000,000.00		8,978,695,000.00	5,221,305,000.00
10	TKM Pemula Th 2024 (LPJ Tidak Lengkap dan LPJ belum diterima)	60,275,000,000.00		13,376,881,582.00	46,898,118,418.00
Jumlah Bantuan Th 2024		74,475,000,000.00	-	22,355,576,582.00	52,119,423,418.00
11	Padat Karya Th 2025 (LPJ Tidak Lengkap dan LPJ belum diterima)	-	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00
12	TKM Pemula Th 2025 (LPJ Tidak Lengkap dan LPJ belum diterima)		2,894,900,000.00		2,894,900,000.00
Jumlah Bantuan Th 2025		-	4,595,000,000.00	-	4,594,900,000.00
JUMLAH		99,886,170,349.00	4,595,000,000.00	25,334,720,525.00	79,146,349,824.00

1) Bantuan Tahun 2022

Nilai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) tahun 2022 sebesar Rp13.988.383.322 terdiri dari:

- Bantuan Padat Karya Tahun 2022 sebesar Rp2.640.650.000 berasal dari LPJ tidak lengkap sesuai hasil uji petik pemeriksaan BPK.
- Bantuan Padat Karya sebesar Rp2.146.715.827 berasal dari LPJ yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil Verifikasi oleh Inspektorat Jenderal atas Nilai BBDM Tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 6/1/PW.06/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

- Verifikasi dilakukan terhadap 65 LPJ senilai Rp1.405.617.127.
- Hasil Verifikasi:
 - 43 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp938.175.127.

(b) 22 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp467.442.000.

Sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 448 Hasil Verifikasi Itjen atas Nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka Pada Direktorat Binapenta dan PKK

Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2022 atas LPJ yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal		Rp	2.146.715.827
Mutasi Kurang			
Tahun 2024 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi)		Rp	(938.175.127)
Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2022 atas LPJ yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal - per 31 Desember 2025		Rp	1.208.540.700

c) Bantuan TKM Pemula (Uji Petik BPK) sebesar Rp4.210.650.227 berasal dari LPJ tidak lengkap.

(1) Pada Tahun 2024, telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebanyak 10 kelompok senilai Rp119.783.327 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 449 Pengembalian Bantuan TKM Pemula Tahun 2024

No	Penyetor	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Madu Segar, Provinsi DKI Jakarta	21/11/2024	D9C1955DF94A9U	20.000.000
2	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Dream Maker, Provinsi Sumatera Utara	21/11/2024	4121B61QV4DLH9RT	20.000.000
3	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Pemda Jaya, Provinsi Sulawesi Selatan	21/11/2024	728093C1FKMGA9BK	104.000
4	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Grup Star Seller, Provinsi DKI Jakarta	31/12/2024	65E8B0NA055J86JN	20.000.000
5	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Astana, Provinsi Sulawesi Selatan	31/12/2024	894068U8EV6A34FP	2.000.000
6	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Berjaya Konveksi, Provinsi Sumatera Utara	31/12/2024	7F1110NA055J85SQ	20.000.000
7	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Era Baru Sablon, Provinsi Sumatera Utara	31/12/2024	B77312G4VQAC1NMK	10.000.000
8	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Mahameru, Provinsi Sulawesi Selatan	31/12/2024	FD81055DFA1H97P1	1.129.327
9	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Rizquna Berkah, Provinsi Jawa Barat	31/12/2024	08B7A48VVF4S9ET	6.550.000
10	TKM Pemula Tahun 2022 Kelompok Setia Kuliner, Provinsi Sumatera Utara	31/12/2024	9DAE948VVF4S5BD	20.000.000
JUMLAH				119.783.327

(2) Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebanyak 3 kelompok senilai Rp23.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 442 Pengembalian Bantuan TKM Pemula Tahun 2025

NTPN	TANGGAL	KETERANGAN	PROVINSI	JENIS BANTUAN	NOMINAL
F91AB61QVCSREMBE	21/01/2025	Kelompok Usaha Kecil Kecilan Kelontong Berkah	DKI Jakarta	TKM Pemula	20.000.000
F558C1JNG80TDMIF	21/01/2025	Kelompok Astama	Sulawesi Selatan	TKM Pemula	1.000.000
C1A23ONAOEC7AAUM	18/11/2025	Kelompok Fatayat Mart	Sumatera Utara	TKM Pemula	2.000.000
JUMLAH					23.000.000

- (3) Hasil verifikasi Inspektorat Jenderal Bulan Agustus 2025 berdasarkan Nota Dinas 6/1675/PW.06/IX/2025 terkait dengan Uji Petik BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah untuk Padat Karya Tahun 2022 sebanyak 3 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp34.990.000.

Sehingga saldo Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2022 (Uji Petik BPK) sebagai berikut:

Tabel 450 Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2022 (Uji Petik BPK)

Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2022 (Uji Petik BPK)	Rp	4.210.650.227
Mutasi Kurang		
Tahun 2024 (Setoran Pengembalian Ke Kas Negara)	Rp	119.783.327
Tahun 2025 (Setoran Pengembalian Ke Kas Negara)	Rp	23.000.000
Tahun 2025 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi)	Rp	34.990.000
Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2022 (Uji Petik BPK) - per 31 Desember 2025	Rp	4.032.876.900

- d) Bantuan TKM Pemula Tahun 2022 sebesar Rp4.990.367.268 berasal dari LPJ yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal.

- 1) Hasil Verifikasi oleh Inspektorat Jenderal atas Nilai BBDM Tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 6/1/PW.06/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

- (a) Verifikasi dilakukan terhadap 671 LPJ senilai Rp3.410.699.513.

- (b) Hasil Verifikasi:

- 642 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp3.262.741.611.
- 29 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp147.957.902.

- 2) Hasil verifikasi Inspektorat Jenderal Bulan Agustus 2025 berdasarkan Nota Dinas 6/1675/PW.06/IX/2025 terkait dengan Uji Petik BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah untuk TKM Pemula Tahun 2022 sebagai berikut:

- (a) Verifikasi dilakukan terhadap 52 LPJ senilai Rp246.453.935

- (b) Hasil Verifikasi:

i. 29 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp173.740.935

ii. 23 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp72.713.000

Sehingga saldo Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2022 yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 451 Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2022 (Itjen)

Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2022 (Uji Petik I Rp		4.990.367.268
Mutasi Kurang		
Tahun 2024 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi Itjen)	Rp	3.262.741.611
Tahun 2025 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi Itjen)	Rp	173.740.935
Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2022 (Uji Petik BPK) - per 31 Desember 2025	Rp	1.553.884.722

2) Bantuan Tahun 2023

Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) Tahun 2023 berasal dari Bantuan Padat Karya dan TKM Pemula Tahun 2023 terdiri dari:

a) Bantuan Padat Karya sebesar Rp77.707.575.000 berasal dari LPJ tidak lengkap dan LPJ yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2024 serta perlu dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal.

(1) Hasil Verifikasi oleh Inspektorat Jenderal atas Nilai BBDM Tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 6/1/PW.06/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

(1) Verifikasi dilakukan terhadap 757 LPJ senilai Rp75.500.000.000.

(2) Hasil Verifikasi:

(a) 703 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp70.300.000.000.

(b) 52 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp5.200.000.000.

(2) Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Bulan Agustus 2025 berdasarkan Nota Dinas 6/1675/PW.06/IX/2025 terkait dengan Uji Petik BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah untuk Bantuan Padat Karya Tahun 2023 sebagai berikut:

(1) Verifikasi dilakukan terhadap 16 LPJ senilai Rp1.600.000.000.

(2) Hasil Verifikasi:

(a) 12 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp1.545.600.000.

(b) 4 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp54.400.000.

Sehingga saldo Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2023 yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 452 Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2023 (Itjen)

Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2023 yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal	Rp	77.707.575.000
Mutasi Kurang		
Tahun 2024 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi Itjen)	Rp	70.300.000.000
Tahun 2025 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi Itjen)	Rp	1.545.600.000
Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2023 yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal - per 31 Desember 2025	Rp	5.861.975.000

- b) Bantuan TKM Pemula Tahun 2023 sebesar Rp42.015.881.000 berasal dari LPJ tidak lengkap dan LPJ yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2024 serta perlu dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal.
- (1) Pada tahun 2024, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp39.968.908 yang terdiri dari:

Tabel 453 Bantuan TKM Pemula Tahun 2023

No	Penyetor	Tgl Setor	No. Dokumen	Jumlah Setor (Rp)
1	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Iksan Garden di Sidoarjo, Jawa Timur	06/09/2024	C57AE0N404RT9QL8	2.520.000
2	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Guyub Rukun, Kepuh Kemiri, Prov Jawa Timur	12/09/2024	08FAF48VVF5LHDIG	8.000.000
3	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Waji_Store Official, Kab Sidoarjo, Prov Jawa Timur	12/09/2024	862127QLUFF7507N	7.358.000
4	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Noer Hijab, Provinsi Jawa Barat	21/10/2024	355882G4VQ43T8DB	3.000.000
5	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Noer Hijab, Provinsi Jawa Barat	31/12/2024	A747348VVF4S8D3	1.545.454
6	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Noer Hijab, Provinsi Jawa Barat	31/12/2024	DA5372G4VQAC23OP	1.545.454
7	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Fastabiq, Provinsi Jawa Timur	31/12/2024	C3C2A1JNFV/NVL8U9	11.500.000
8	TKM Pemula Tahun 2023 Kelompok Angkingan Sahabat, Provinsi Jawa Timur	31/12/2024	803152G4VQAC29S2	4.500.000
JUMLAH				39.968.908

- (2) Hasil Verifikasi oleh Inspektorat Jenderal atas Nilai BBDM Tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 6/1/PW.06/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:
- (a) Verifikasi dilakukan terhadap 1.733 LPJ senilai Rp34.660.000.000.
- (b) Hasil Verifikasi:
- i. 1.682 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp33.640.000.000.

- ii. 51 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp1.020.000.000.
- (3) Pada tahun 2025, terdapat setoran pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp1.545.454 dari Kelompok Noer Hijab Provinsi Jawa Barat dengan NTPN 43B2848VVNNU5VHJ tanggal 15 Januari 2025.
- (4) Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Bulan Agustus 2025 berdasarkan Nota Dinas 6/1675/PW.06/IX/2025 terkait dengan Uji Petik BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah untuk TKM Pemula Tahun 2023 sebagai berikut:
 - (a) Verifikasi dilakukan terhadap 72 LPJ senilai Rp1.440.000.000.
 - (b) Hasil Verifikasi:
 - i. 49 LPJ dinyatakan lengkap senilai Rp1.200.267.554.
 - ii. 23 LPJ dinyatakan tidak lengkap senilai Rp239.732.446.

Sehingga saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 447 Saldo belanja Dibayar Dimuka TKM Pemula Tahun 2023

Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2023	Rp	42.015.881.000
Mutasi Kurang		
Tahun 2024 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi Itjen)	Rp	33.640.000.000
Tahun 2024 (Setoran Pengembalian ke Kas Negara)	Rp	39.968.908
Tahun 2025 (Setoran Pengembalian ke Kas Negara)	Rp	1.545.454
Tahun 2025 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi Itjen)	Rp	1.200.267.554
Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan TKM Pemula Tahun 2023 - per 31 Desember 2025	Rp	7.134.099.084

3) Bantuan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Direktorat Bina PKK melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah dengan program sebagai berikut:

- a) Bantuan Pemerintah Program Padat Karya dengan realisasi neto sebanyak 1.242 kelompok sebesar Rp124.200.000.000.
 - (1) Pada Tahun 2024, telah dilakukan Verifikasi Internal atas Belanja Bantuan Pemerintah Program Padat Karya sesuai Nota Dinas Nomor 3/497/PK.03/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan diperoleh hasil bahwa LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 1.100 kelompok senilai Rp110.000.000.000 dan LPJ yang dinyatakan belum lengkap sebanyak 142 kelompok senilai Rp14.200.000.000.
 - (2) Pada Tahun 2025, telah dilakukan Verifikasi Internal atas Belanja Bantuan Pemerintah Program Padat Karya sesuai Nota Dinas Nomor 6/1675/PW.06/IX/2025 dan diperoleh hasil bahwa LPJ yang

dinyatakan lengkap sebanyak 82 kelompok senilai Rp8.978.695.000 dan LPJ yang dinyatakan belum lengkap sebanyak 8 kelompok senilai Rp21.305.000.

Tabel 448 Bantuan Pemerintah Program Padat karya Tahun 2024

Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2024	Rp	124.200.000.000
Mutasi Kurang		
Tahun 2024 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi ltjen)	Rp	110.000.000.000
Tahun 2025 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi ltjen)	Rp	8.978.695.000
Belanja Dibayar Dimuka atas Bantuan Padat Karya Tahun 2024 - per 31 Desember 2025	Rp	5.221.305.000

- b) Bantuan Pemerintah Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dengan realisasi sebanyak 43.053 orang senilai Rp215.265.000.000.

Dari realisasi tersebut, penerima bantuan yang mengambil dana bantuan sebanyak 42.662 orang senilai Rp213.310.000.000, sehingga sebanyak 391 orang senilai Rp1.955.000.000 dilakukan penarikan serta pengembalian dana ke kas negara.

- (1) Pada Tahun 2024, telah dilakukan Verifikasi Internal atas Belanja Bantuan Pemerintah Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula sesuai Nota Dinas Nomor 3/497/PK.03/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan diperoleh hasil bahwa LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 30.607 orang senilai Rp153.035.000.000 dan LPJ yang dinyatakan belum lengkap sebanyak 12.055 orang senilai Rp60.275.000.000.
- (2) Pada Tahun 2025, telah dilakukan Verifikasi Internal atas Belanja Bantuan Pemerintah Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula sesuai Nota Dinas Nomor 6/1675/PW.06/IX/2025 dan diperoleh hasil bahwa LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 2.275 orang senilai Rp13.370.381.582 dan LPJ yang dinyatakan belum lengkap sebanyak 1.281 orang senilai Rp4.409.618.418.
- (3) Pada Tahun 2025 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp6.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

NTPN	TANGGAL	KETERANGAN	PROVINSI	JENIS BANTUAN	NOMINAL
782B37QLV2SP8B1U	11/5/2025	IWAN SURYAWAN	KALIMANTAN TIMUR	TKM Pemula	5,000,000
C94B48N3ETHNVTUJ	11/21/2025	ARDIANSYAH	BANTEN	TKM Pemula	1,500,000
JUMLAH					6,500,000

Tabel 454 Bantuan Pemerintah TKM Pemula Tahun 2024

Belanja Dibayar Dimuka atas TKM Pemula Tahun 2024	Rp	215,265,000,000
Mutasi Kurang		
Tahun 2024 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi ltjen)	Rp	153,035,000,000
Tahun 2024 (Setoran Pengembalian Ke Kas Negara)	Rp	1,955,000,000
Tahun 2025 (LPJ lengkap sesuai hasil verifikasi ltjen)	Rp	13,370,381,582
Tahun 2025 (Penyetoran Ke Kas Negara)	Rp	6,500,000
Belanja Dibayar Dimuka atas TKM Pemula Tahun 2024 - per 31 Desember 2025	Rp	46,898,118,418

4) Bantuan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah dengan program sebagai berikut:

- Bantuan Pemerintah Program Padat Karya dengan realisasi neto sebanyak 5.520 Orang (184 lembaga) sebesar Rp18.400.000.000. Telah dilakukan Verifikasi Internal atas Belanja Bantuan Pemerintah Program Padat Karya dan diperoleh hasil bahwa LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 167 kelompok senilai Rp16.700.000.000 dan LPJ yang dinyatakan tidak lengkap sebanyak 17 kelompok senilai **Rp1.700.000.000**.
- Bantuan Pemerintah Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dengan realisasi sebanyak 9.008 orang senilai Rp45.040.000.000. Dari realisasi tersebut, sebanyak 74 orang senilai Rp370.000.000 tidak melakukan penarikan dan dilakukan pengembalian dana ke kas negara, sehingga penerima bantuan yang mengambil dana bantuan sebanyak 8.934 orang senilai Rp44.670.000.000. Dari 8.934 orang tersebut, Sebanyak 301 LPJ belum dikirimkan senilai **Rp1.505.000.000**. Sedangkan 8.633 penerima bantuan telah mengirimkan LPJ Senilai Rp43.165.000.000 dan dilakukan Verifikasi Internal atas Belanja Bantuan Pemerintah Program TKM Pemula sehingga, diperoleh hasil bahwa LPJ yang dinyatakan lengkap sebanyak 8.355 Kelompok senilai Rp41.775.000.000 dan LPJ yang dinyatakan tidak lengkap sebanyak 278 senilai

Rp1.390.000.000.

Adapun data *By Name By Address* untuk Biaya Dibayar Dimuka Direktorat Bina PKK dapat diakses melalui <https://bit.ly/MutasiBDMBinaPKK>

2. Ditjen Binalavotas

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.751.000.000 dan Rp1.923.779.369.

Penjelasan Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 Direktorat Bina Lemlatvok yang sebesar Rp1.751.000.000 terdiri dari:

- a. Terkait Bantuan Pembangunan BLKK Tahun 2023, terdapat saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp78.300.000.000 yang diidentifikasi sebagai LPJ kurang saji. Atas rekomendasi BPK RI, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker bersama Direktorat Bina Lemlatvok dalam dua tahap:
 1. Tahap I: Terverifikasi senilai Rp47.500.000.000 (Surat Itjen No. 6/91/PW.06/VI/2024).
 2. Tahap II: Terverifikasi senilai Rp30.800.000.000 (Surat Itjen No. 6/28/PW.06/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024).

Per 31 Desember 2025, masih terdapat sisa 3 lembaga yang belum menyampaikan Laporan Paripurna dengan total nilai Rp1.500.000.000. Berdasarkan Hasil Verifikasi Itjen Nomor R-6/2905/PW.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, ditetapkan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000 dikoreksi menjadi Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.
 2. Sebesar Rp500.000.000 (yang belum melengkapi laporan) dikoreksi menjadi Piutang.
- b. Progress Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Jabal Nur Balaburu sebesar Rp251.000.000.

Tabel 455 Setoran Pengembalian Yayasan Miftahul Hasanah Al Musri

No	Nama Lembaga	Nilai Temuan (Rp)	Tanggal Setor	NTPN	Pengembalian (Rp)	Sisa
1	Yayasan Pondok Pesantren Jabal Nur Balaburu	350,000,000	21 Desember 2022	C3FAC0JSQ1424IC6	50,000,000	
			21 Desember 2022	1955A7N8P6N5AM74	10,000,000	
			13 November 2024	1AACB3CIFKP7CN71	5,000,000	
			29 November 2024	A6AFE2G4VQ7AQ6HE	5,000,000	
			6 Januari 2025	F0DB90NA0DE0L1G5	20,000,000	
			21 Maret 2025	954023CIFTBJU0QE	9,000,000	
	Jumlah	350,000,000			99,000,000	251,000,000

Tabel 456 Mutasi Progress Bantuan pembangunan BLKK Ditjen Binalavotas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	SATKER	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Belanja Dibayar Dimuka per 30 November 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	BBPVP Bandung	129,709,892	-	129,709,892	-
2	Dit Bina Lemlatvok	1,794,069,477		43,069,477	1,751,000,000
	Jumlah	1,923,779,369		172,779,369	1,751,000,000

Terdapat mutasi kurang pada Belanja Dibayar Dimuka ini sebesar Rp172.779.369 per 31 Desember 2025 yang berasal dari:

1. BBPVP Bandung

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (BDDM) BBPVP Bandung sebesar Rp129.709.892, berdasarkan Nota Dinas Kepala BBPVP Bandung Nomor: 2.5/384/KU.02/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, hasil verifikasi Laporan Keuangan Tahun 2022 menunjukkan rincian sebagai berikut:

- Rp122.779.992 dinyatakan sebagai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang valid.
- Rp6.929.600 dinyatakan sebagai LPJ tidak valid dan akan disetorkan ke Kas Negara.

Menindaklanjuti hasil tersebut, Direktorat Jenderal Binalavotas telah menyampaikan Nota Dinas kepada Ketua TPKN Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 2/4797/KU.02.00/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohonan Pengajuan Usulan TPKN Direktorat Bina Lemlatvok dan BBPVP Bandung.

- Saldo Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Bina Lemlatvok per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.794.069.477 mengalami perubahan menjadi Rp1.751.000.000 per 31 Desember 2025. Penurunan saldo tersebut disebabkan oleh adanya mutasi sebesar

Rp43.069.477 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a) Penyelesaian Bantuan pembangunan BLKK sebesar Rp14.069.477 berupa setoran Yayasan Miftahul Hasanah Al Musri sesuai NTPN 58CEA3CIFT8912V8 tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp14.069.477.
- b) Penyelesaian Bantuan pembangunan BLKK sebesar Rp29.000.000 berupa setoran Yayasan Pondok Pesantren Jabal Nur Balaburu sesuai NTPN F0DB90NA0DE0L1G5 tanggal 6 Januari 2025 sebesar Rp20.000.000 dan NTPN 954023CIFTBJU0QE tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp9.000.000.
- c. Terkait bantuan pembangunan BLKK, terdapat saldo sebesar Rp1.500.000.000 yang merupakan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Direktorat Bina Lemlatvok bersama Inspektorat Jenderal (sesuai Surat Itjen No. 6/28/PW.06/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024). Nilai tersebut merupakan bagian dari total verifikasi tahun 2023 sebesar Rp30.800.000.000, dengan rincian hasil sebagai berikut:
 1. Ruang Lingkup Verifikasi: Mencakup 60 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan total nilai Rp30.800.000.000.
 2. Laporan Paripurna Lengkap: Sebanyak 53 laporan dinyatakan lengkap dengan nilai total Rp27.000.000.000.
 3. Laporan Tidak Lengkap: Sebanyak 4 laporan senilai Rp2.200.000.000 dinyatakan tidak lengkap, dengan temuan catatan keuangan sebesar Rp26.949.050. Atas temuan ini:

- a) Sebesar Rp503.200 telah disetorkan kembali ke Kas Negara oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin Sebuta (NTPN: 429A52G4VQ3H68KM tanggal 8 Oktober 2024).
 - b) Sisanya sebesar Rp26.445.850 telah dijurnal sebagai Piutang Lainnya.
4. Laporan Belum Tersampaikan: Terdapat 3 lembaga yang belum menyampaikan Laporan Paripurna hingga 31 Desember 2024 dengan nilai Rp1.500.000.000. Posisi ini telah diverifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal.
- Selain itu, terdapat selisih perhitungan sebesar Rp100.000.000 atas LPJ Bantuan yang belum selesai per 31 Desember 2023. Selisih ini muncul antara nilai Rekomendasi BPK RI (Rp78.300.000.000) dengan total nilai SP2D (Rp78.200.000.000). Atas selisih tersebut, telah dilakukan penyesuaian melalui jurnal
- d. Mengacu pada PMK 100/PMK.05/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, khususnya terkait Belanja Dibayar di Muka dalam pos Aset Lainnya, diatur bahwa belanja yang tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset pada akhir periode pelaporan wajib dikeluarkan dari Neraca. Selanjutnya, nilai tersebut harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan lainnya.

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D.